



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semuanya

Shalom, Om Swastiastu

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna secara tepat waktu.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, pada dasarnya merupakan gambaran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Gambaran kinerja tahunan ini merupakan implementasi dari kegiatan dan program yang telah dicapai melalui pembiayaan

APBD, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang terukur secara kuantitas dan kualitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Keberhasilan kinerja maupun permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama dan perlu kita sadari masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa-masa yang akan datang. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat, serta pelibatan pihak swasta menjadi kunci dalam percepatan pembangunan dan terjaganya kondusivitas wilayah.

Catatan-catatan strategis, saran, dan masukan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan rekomendasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 disampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan semua pihak atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama.

Semoga ikhtiar kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT.

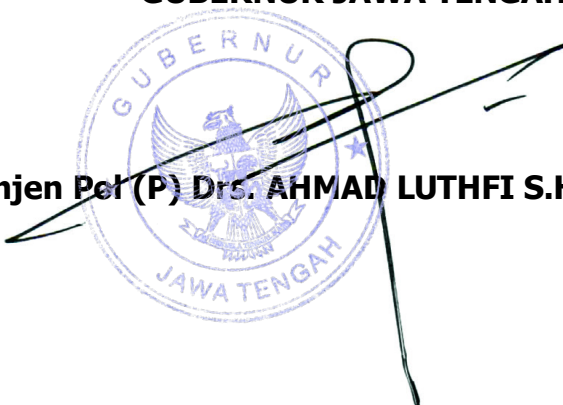
Aamiin yaa Rabbal 'aalamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH

Komjen Pol (P) Drs. AHMAD LUTHFI S.H., S. St., M.K

The image shows a circular official stamp of the Governor of Jawa Tengah. The stamp features a blue ink emblem with a bird (Garuda) in the center, surrounded by the text "GUBERNUR" at the top and "JAWA TENGAH" at the bottom. A large, bold, black handwritten signature is written across the stamp, extending from the left and right sides.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 DASAR HUKUM.....	1-1
1.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	1-2
1.3 DATA UMUM DAERAH	1-4
1.3.1 Kondisi Geografi Wilayah.....	1-4
1.3.2 Kondisi Demografi	1-6
1.3.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	1-6
1.3.2.2 Pertumbuhan Penduduk	1-8
1.3.2.3 Komposisi Penduduk	1-8
1.3.2.4 Bonus Demografi	1-9
1.4 GAMBARAN EKONOMI MAKRO	1-12
1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1-12
1.4.2 Tipologi Klassen	1-18
1.4.3 Tenaga Kerja	1-20
1.4.4 Kemiskinan.....	1-22
1.4.5 Rasio Gini.....	1-27
1.4.6 Inflasi/Perubahan Harga	1-29
1.4.7 Nilai Tukar Petani (NTP).....	1-30
1.4.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1-32
1.4.9 Indeks Williamson	1-34
1.5 DATA KEPEGAWAIAN DAERAH.....	1-35
1.6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	1-40
1.6.1 Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan	1-40
1.6.2 Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja.....	1-41
1.6.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	1-42
BAB 2 PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	2-1
2.1 PERUBAHAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.....	2-1
2.1.1 Pergeseran Anggaran I.....	2-2

2.1.2	Pergeseran Anggaran II	2-2
2.1.3	Pergeseran Anggaran III.....	2-3
2.2	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2-1
2.2.1	Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.....	2-1
2.2.2	Realisasi Pendapatan Daerah.....	2-2
2.2.2.1	Pendapatan Asli Daerah.....	2-2
2.2.2.2	Pendapatan Transfer.....	2-14
2.2.2.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	2-16
2.2.3	Permasalahan	2-16
2.2.4	Solusi	2-17
2.3	PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	2-18
2.3.1	Kebijakan Umum Belanja Daerah	2-18
2.3.1.1	Belanja Operasi	2-19
2.3.1.2	Belanja Modal.....	2-20
2.3.1.3	Belanja Tidak Terduga	2-20
2.3.1.4	Belanja Transfer	2-20
2.3.2	Realisasi Belanja Daerah	2-21
2.3.2.1	Realisasi Belanja Operasi	2-21
2.3.2.2	Realisasi Belanja Modal	2-22
2.3.2.3	Realisasi Belanja Tidak Terduga	2-23
2.3.2.4	Realisasi Belanja Transfer	2-23
2.3.3	Permasalahan	2-23
2.3.4	Solusi	2-23
2.4	PEMBIAYAAN DAERAH	2-24
2.5	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	2-25
BAB 3 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH		3-1
3.1	CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	3-1
3.2	PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI DAERAH.....	3-15
3.3	CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	3-19
3.4	CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	3-54
3.4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	3-54
3.4.1.1	Urusan Pendidikan	3-54
3.4.1.2	Urusan Kesehatan.....	3-68
3.4.1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3-134
3.4.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3-150
3.4.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	3-157
3.4.1.6	Urusan Sosial	3-165

3.4.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	3-176
3.4.2.1	Urusan Tenaga Kerja.....	3-176
3.4.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3-186
3.4.2.3	Urusan Pangan.....	3-197
3.4.2.4	Urusan Pertanahan	3-203
3.4.2.5	Urusan Lingkungan Hidup.....	3-208
3.4.2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3-217
3.4.2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	3-220
3.4.2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	3-225
3.4.2.9	Urusan Perhubungan.....	3-231
3.4.2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika	3-240
3.4.2.11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	3-244
3.4.2.12	Urusan Penanaman Modal	3-251
3.4.2.13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	3-260
3.4.2.14	Urusan Statistik	3-267
3.4.2.15	Urusan Persandian	3-269
3.4.2.16	Urusan Kebudayaan	3-272
3.4.2.17	Urusan Perpustakaan	3-278
3.4.2.18	Urusan Kearsipan.....	3-283
3.4.3	Urusan Pilihan.....	3-287
3.4.3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	3-287
3.4.3.2	Urusan Pariwisata	3-300
3.4.3.3	Urusan Pertanian	3-308
3.4.3.4	Urusan Kehutanan	3-323
3.4.3.5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	3-331
3.4.3.6	Urusan Perdagangan.....	3-344
3.4.3.7	Urusan Perindustrian.....	3-353
3.4.3.8	Urusan Transmigrasi	3-358
3.4.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3-360
3.4.4.1	Fungsi Perencanaan.....	3-360
3.4.4.2	Fungsi Keuangan	3-366
3.4.4.3	Fungsi Kepegawaian	3-389
3.4.4.4	Fungsi Pendidikan dan Pelatihan	3-392
3.4.4.5	Fungsi Penelitian dan Pengembangan	3-395
3.4.4.6	Fungsi Penghubung	3-400
3.4.5	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah.....	3-402

3.4.6	Unsur Pemerintahan Umum.....	3-407
3.4.7	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	3-414
3.4.7.1	Sekretariat Daerah.....	3-414
3.4.7.2	Sekretariat DPRD	3-431
3.5	PERAN BUMD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3-435
3.6	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	3-443
3.7	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	3-476
3.7.1	REKOMENDASI UMUM	3-476
3.7.2	REKOMENDASI SEKTORAL PEMBANGUNAN DAERAH	3-479
BAB 4 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN & PENUGASAN		4-1
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUANKAN, IDENTIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT.....	4-1
4.1.1	Tugas Pembantuan.....	4-1
4.1.2	Dekonsentrasi.....	4-10
4.2	IDENTIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA (HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN)	4-16
4.2.1	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.....	4-16
4.2.2	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.....	4-21
4.3	PELAKSANAAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI JAWA TENGAH	4-29
BAB 5 PENUTUP.....		5-1
REKAPITULASI PENGHARGAAN TAHUN 2025 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	1-4
Tabel 1.2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2025	1-7
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif serta Angka Beban Ketergantungan Tahun 2025	1-10
Tabel 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha (Y-on-Y)	1-13
Tabel 1.5	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran (Y-on-Y).....	1-14
Tabel 1.6	PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Jawa Tengah Tahun 2021–2025 (Miliar Rupiah)	1-14
Tabel 1.7	PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Jawa Tengah Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)	1-15
Tabel 1.8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah	1-23
Tabel 1.9	Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2024 dan 2025	1-24
Tabel 1.10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2025.....	1-27
Tabel 1.11	Perbandingan Gini Rasio Provinsi di Jawa Tahun 2024-2025	1-28
Tabel 1.12	Perbandingan Inflasi Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2021-2025.....	1-30
Tabel 1.13	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021 – 2025	1-33
Tabel 1.14	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	1-37
Tabel 1.15	Jumlah PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	1-37
Tabel 1.16	Jumlah Pejabat Manajerial berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	1-38
Tabel 1.17	Jumlah Pejabat Manajerial berdasarkan Tingkat Jabatan dan Pendidikan.....	1-39
Tabel 2.1	Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	2-4
Tabel 2.2	Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah	2-2
Tabel 2.3	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2-3
Tabel 2.4	Target Dan Realisasi Pajak Daerah	2-4
Tabel 2.5	Perbandingan Tarif PKB dan BBNKB Provinsi se-Jawa	2-5
Tabel 2.6	Peringkat Kepatuhan Pembayaran PKB Nasional Tahun 2025 dan 2024.....	2-6
Tabel 2.7	Realisasi Capaian PKB di Pulau Jawa 2025 dan 2024.....	2-6
Tabel 2.8	Realisasi Capaian BBNKB di Pulau Jawa 2025 dan 2024	2-7
Tabel 2.9	Target Dan Realisasi Retribusi Daerah	2-9
Tabel 2.10	Target Dan Realisasi Retribusi Jasa Umum	2-9
Tabel 2.11	Target Dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha.....	2-10
Tabel 2.12	Target Dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu	2-11
Tabel 2.13	Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2-13
Tabel 2.14	Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pihak ke III Tahun Anggaran 2024 dan 2025.....	2-13
Tabel 2.15	Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2025.....	2-15
Tabel 2.16	Target Dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2025.....	2-16
Tabel 2.17	Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025	2-21
Tabel 2.18	Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2025.....	2-22
Tabel 2.19	Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025	2-25
Tabel 2.20	Ringkasan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).....	2-25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah	3-9
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	3-10

Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	3-20
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	3-21
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.....	3-22
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	3-23
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	3-23
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah	3-24
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Utama RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	3-24
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Utama RSJD dr. Arif Zainuddin Provinsi Jawa Tengah	3-25
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Utama RSJD dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	3-25
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	3-26
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	3-27
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3-28
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	3-29
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	3-30
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	3-30
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	3-31
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.....	3-32
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	3-33
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	3-34
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.....	3-35
Tabel 3.23	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	3-35
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	3-36
Tabel 3.25	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	3-37
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	3-38
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.....	3-38
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	3-39
Tabel 3.29	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.....	3-40
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	3-41

Tabel 3.31	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	3-42
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	3-43
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.....	3-45
Tabel 3.34	Capaian Indikator Kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.....	3-45
Tabel 3.35	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	3-46
Tabel 3.36	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.....	3-47
Tabel 3.37	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	3-48
Tabel 3.38	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	3-49
Tabel 3.39	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	3-50
Tabel 3.40	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	3-50
Tabel 3.41	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	3-51
Tabel 3.42	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	3-52
Tabel 3.43	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	3-53
Tabel 3.44	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.....	3-54
Tabel 3.45	Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan	3-58
Tabel 3.46	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pendidikan.....	3-66
Tabel 3.47	Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan	3-74
Tabel 3.48	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan.....	3-79
Tabel 3.49	Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi.....	3-82
Tabel 3.50	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi	3-86
Tabel 3.51	Capaian SPM Bidang Kesehatan RSUD Dr. Moewardi.....	3-86
Tabel 3.52	Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	3-91
Tabel 3.53	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.....	3-95
Tabel 3.54	Capaian SPM Bidang Kesehatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	3-95
Tabel 3.55	Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD dr. Adhyatma, MPH	3-101
Tabel 3.56	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD dr. Adhyatma, MPH	3-105
Tabel 3.57	Capaian SPM Bidang Kesehatan RSUD dr. Adhyatma, MPH.....	3-106
Tabel 3.58	Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD dr. Rehatta	3-110
Tabel 3.59	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD dr. Rehatta	3-113
Tabel 3.60	Capaian SPM Bidang Kesehatan RSUD dr. Rehatta.....	3-113
Tabel 3.61	Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.....	3-117
Tabel 3.62	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD dr. Amino Gondohutomo	3-120
Tabel 3.63	Capaian SPM Bidang Kesehatan RSJD dr. Amino Gondohutomo.....	3-120
Tabel 3.64	Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. Arif Zainudin	3-123

Tabel 3.65	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. Arif Zainudin	3-126
Tabel 3.66	Capaian SPM Bidang Kesehatan RSJD Dr. Arif Zainudin	3-126
Tabel 3.67	Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	3-129
Tabel 3.68	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	3-132
Tabel 3.69	Capaian SPM Bidang Kesehatan RSJD dr. RM. Soedjarwadi	3-133
Tabel 3.70	Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUBMCK	3-136
Tabel 3.71	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUBMCK	3-141
Tabel 3.72	Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUSDATARU	3-144
Tabel 3.73	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUSDATARU	3-150
Tabel 3.74	Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3-153
Tabel 3.75	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3-156
Tabel 3.76	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP	3-159
Tabel 3.77	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Trantibum Linmas Satpol PP	3-161
Tabel 3.78	Capaian Kinerja Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat BPBD	3-163
Tabel 3.79	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Trantibum Linmas BPBD	3-165
Tabel 3.80	Capaian Kinerja Program Urusan Sosial	3-169
Tabel 3.81	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Sosial	3-175
Tabel 3.82	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja	3-179
Tabel 3.83	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja	3-185
Tabel 3.84	Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3-189
Tabel 3.85	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3-196
Tabel 3.86	Capaian Kinerja Program Urusan Pangan	3-199
Tabel 3.87	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pangan	3-202
Tabel 3.88	Capaian Kinerja Program Urusan Pertanahan	3-205
Tabel 3.89	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3-207
Tabel 3.90	Capaian Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup	3-211
Tabel 3.91	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup	3-216
Tabel 3.92	Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3-218
Tabel 3.93	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3-220
Tabel 3.94	Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3-222
Tabel 3.95	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3-224

Tabel 3.96	Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	3-227
Tabel 3.97	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	3-231
Tabel 3.98	Capaian Kinerja Program Urusan Perhubungan.....	3-233
Tabel 3.99	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perhubungan	3-239
Tabel 3.100	Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika	3-242
Tabel 3.101	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika.....	3-243
Tabel 3.102	Capaian Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	3-246
Tabel 3.103	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3-251
Tabel 3.104	Capaian Kinerja Program Urusan Penanaman Modal	3-254
Tabel 3.105	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Penanaman Modal	3-259
Tabel 3.106	Capaian Kinerja Program Urusan Pemuda dan Olahraga.....	3-262
Tabel 3.107	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga	3-266
Tabel 3.108	Capaian Kinerja Program Urusan Statistik.....	3-268
Tabel 3.109	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Statistik	3-269
Tabel 3.110	Capaian Kinerja Program Urusan Persandian	3-270
Tabel 3.111	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Persandian	3-271
Tabel 3.112	Capaian Kinerja Program Urusan Kebudayaan	3-274
Tabel 3.113	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kebudayaan	3-277
Tabel 3.114	Capaian Kinerja Program Urusan Perpustakaan	3-279
Tabel 3.115	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perpustakaan	3-283
Tabel 3.116	Capaian Kinerja Program Urusan Kearsipan.....	3-285
Tabel 3.117	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kearsipan	3-287
Tabel 3.118	Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan	3-290
Tabel 3.119	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan.....	3-299
Tabel 3.120	Capaian Kinerja Program Urusan Pariwisata	3-303
Tabel 3.121	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pariwisata.....	3-307
Tabel 3.122	Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian (DISTANBUN).....	3-311
Tabel 3.123	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pertanian (DISTANBUN).....	3-315
Tabel 3.124	Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian (DISNAKESWAN)	3-318
Tabel 3.125	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pertanian (DISNAKESWAN)	3-322
Tabel 3.126	Capaian Kinerja Program Urusan Kehutanan	3-325
Tabel 3.127	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kehutanan.....	3-331
Tabel 3.128	Capaian Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	3-334
Tabel 3.129	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	3-344
Tabel 3.130	Capaian Kinerja Program Urusan Perdagangan.....	3-347
Tabel 3.131	Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perdagangan	3-352
Tabel 3.132	Capaian Kinerja Program Urusan Perindustrian	3-355

Tabel 3.133 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perindustrian	3-358
Tabel 3.134 Capaian Kinerja Program Urusan Transmigrasi	3-359
Tabel 3.135 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Transmigrasi	3-360
Tabel 3.136 Capaian Kinerja Program Fungsi Perencanaan	3-362
Tabel 3.137 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Perencanaan	3-365
Tabel 3.138 Capaian Kinerja Program Fungsi Keuangan (BAPENDA).....	3-368
Tabel 3.139 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Penunjang Keuangan (BAPENDA).....	3-381
Tabel 3.140 Capaian Kinerja Program Fungsi Keuangan (BPKAD).....	3-383
Tabel 3.141 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Keuangan (BPKAD)	3-387
Tabel 3.142 Capaian Kinerja Program Fungsi Kepegawaian	3-390
Tabel 3.143 Kesesuaian Antara Kinerja Program Dan Kegiatan Pada Fungsi Kepegawaian	3-392
Tabel 3.144 Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan dan Pelatihan	3-393
Tabel 3.145 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pendidikan dan Pelatihan	3-395
Tabel 3.146 Capaian Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	3-397
Tabel 3.147 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Penelitian dan Pengembangan	3-399
Tabel 3.148 Capaian Kinerja Program Fungsi Penghubung.....	3-401
Tabel 3.149 Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Penghubung	3-402
Tabel 3.150 Capaian Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	3-404
Tabel 3.151 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	3-407
Tabel 3.152 Capaian Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum	3-410
Tabel 3.153 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum	3-414
Tabel 3.154 Capaian Kinerja Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	3-418
Tabel 3.155 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah.....	3-429
Tabel 3.156 Capaian Kinerja Program Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD.....	3-432
Tabel 3.157 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD.....	3-435
Tabel 3.158 Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif pada PT BPD Jateng 2024-2026 (dalam Juta).....	3-436
Tabel 3.159 Jenis Kredit yang Mendukung Pertumbuhan Kredit pada PT BPD Jateng 2024-2026 (dalam Juta)	3-438
Tabel 3.160 Capaian Kredit Produktif PT BPR BKK (Perseroda).....	3-438
Tabel 3.161 Capaian Kredit Produktif PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	3-439
Tabel 3.162 Jenis Kredit Produktif PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	3-440
Tabel 4.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan	4-1
Tabel 4.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	4-5

Tabel 4.3	Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum DPUBMCK	4-7
Tabel 4.4	Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum PUSDATARU.....	4-8
Tabel 4.5	Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Transmigrasi	4-9
Tabel 4.6	Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	4-10
Tabel 4.7	Realisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan	4-11
Tabel 4.8	Realisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan Koperasi	4-12
Tabel 4.9	Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pangan	4-12
Tabel 4.10	Realisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan Pertanian.....	4-14
Tabel 4.11	Realisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan Keolahragaan	4-16
Tabel 4.12	Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2025	4-16
Tabel 4.13	Alokasi Anggaran Bankeu Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025	4-22
Tabel 4.14	Realisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun Anggaran 2025	4-24
Tabel 4.15	Realisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2025 Per Jenis Kegiatan	4-25
Tabel 4.16	Realisasi Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2025.....	4-27
Tabel 4.17	Realisasi Bantuan Keuangan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Jamban Keluarga.....	4-28
Tabel 4.18	Rincian Pelaksanaan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Melalui Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029	4-32
Tabel 4.19	Evaluasi Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	4-34
Tabel 4.20	Evaluasi Dokumen Perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	4-35
Tabel 4.21	Evaluasi Dokumen APBD Tahun 2026 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	4-37
Tabel 4.22	Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	4-39
Tabel 4.23	Rincian Pelaksanaan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Melalui Fasilitas Rancangan Akhir Perkada Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025	4-51
Tabel 4.24	Tabel Rincian Pelaksanaan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Melalui Fasilitas Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026.....	4-52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	1-5
Gambar 1.2	Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah	1-6
Gambar 1.3	Perbandingan Kepadatan Penduduk di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 2021–2025 (jiwa/km2).....	1-8
Gambar 1.4	Piramida Penduduk Jawa Tengah 2025	1-9
Gambar 1.5	Perbandingan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 2021–2025 (jiwa/km2)	1-11
Gambar 1.6	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (Y-on-Y) di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021–2025 (%).....	1-12
Gambar 1.7	Grafik Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024–2025.....	1-17
Gambar 1.8	Grafik Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2024–2025	1-17
Gambar 1.9	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021–2025 (%)	1-18
Gambar 1.10	Hasil Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita, 2021-2025.....	1-19
Gambar 1.11	Sebaran Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kabupaten/Kota	1-20
Gambar 1.12	Penduduk Bekerja, Pengangguran, dan TPT Jawa Tengah.....	1-22
Gambar 1.13	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021–2025 (%).....	1-22
Gambar 1.14	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	1-23
Gambar 1.15	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa	1-24
Gambar 1.16	Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi	1-25
Gambar 1.17	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2025	1-26
Gambar 1.18	Rasio Gini Jawa Tengah Menurut Wilayah, 2016–2025	1-28
Gambar 1.19	Perbandingan Rasio Gini Provinsi di Jawa dengan Nasional Tahun 2021-2025.....	1-29
Gambar 1.20	Perbandingan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional 2013 - 2025 (%)	1-29
Gambar 1.21	Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah Tahun 2021-2025	1-31
Gambar 1.22	Grafik Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional 2020-2025.....	1-33
Gambar 1.23	Perkembangan Indeks Williamson Jawa Tengah Tahun 2014 – 2025	1-35
Gambar 1.24	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	1-37
Gambar 1.25	Jumlah Pejabat Manajerial berdasarkan Pendidikan.....	1-38
Gambar 1.26	Jumlah Pejabat Manajerial berdasarkan Tingkat Jabatan	1-39
Gambar 1.27	Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dengan 2025	1-40
Gambar 1.28	Persandingan Komposisi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 dengan 2025	1-41
Gambar 2.1	Peta Penjualan Mobil Indonesia Tahun 2025.....	2-7

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	URAIAN	HALAMAN
1.	WAJIB PELAYANAN DASAR	L-1.A.1
	1. Pendidikan	L-1.A.1.1.1
	2. Kesehatan	L-1.A.1.2.1
	3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	L-1.A.1.3.1
	4. Perumahan dan Permukiman	L-1.A.1.4.1
	5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	L-1.A.1.5.1
	6. Sosial	L-1.A.1.6.1
2.	WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	L-1.A.2
	1. Tenaga Kerja	L-1.A.2.1.1
	2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	L-1.A.2.2.1
	3. Pangan	L-1.A.2.3.1
	4. Pertanahan	L-1.A.2.4.1
	5. Lingkungan Hidup	L-1.A.2.5.1
	6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	L-1.A.2.6.1
	7. Pemberdayaan Masyarakat Desa	L-1.A.2.7.1
	8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	L-1.A.2.8.1
	9. Perhubungan	L-1.A.2.9.1
	10. Komunikasi dan Informatika	L-1.A.2.10.1
	11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	L-1.A.2.11.1
	12. Penanaman Modal	L-1.A.2.12.1
	13. Kepemudaan dan Olahraga	L-1.A.2.13.1
	14. Statistik	L-1.A.2.14.1
	15. Persandian	L-1.A.2.15.1
	16. Kebudayaan	L-1.A.2.16.1
	17. Perpustakaan	L-1.A.2.17.1
	18. Kearsipan	L-1.A.2.18.1
3.	PILIHAN	L-1.B
	1. Kelautan dan Perikanan	L-1.B.1.1
	2. Pariwisata	L-1.B.2.1
	3. Pertanian	L-1.B.3.1
	4. Kehutanan	L-1.B.4.1
	5. Energi Sumber Daya Mineral	L-1.B.5.1
	6. Perdagangan	L-1.B.6.1
	7. Perindustrian	L-1.B.7.1
	8. Transmigrasi	L-1.B.8.1
4.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	L-1.C
	1. Perencanaan	L-1.C.1.1
	2. Keuangan	L-1.C.2.1
	3. Kepegawaian	L-1.C.3.1
	4. Pendidikan dan Pelatihan	L-1.C.4.1
	5. Penelitian dan Pengembangan	L-1.C.5.1
	6. Penghubung	L-1.C.6.1
5.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	L-1.D
6.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	L-1.E
7.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	L-1.F
	1. Sekretariat Daerah	L-1.F.1.1
	2. Sekretariat Dewan	L-1.F.2.1
8.	Realisasi Indikator Kinerja Program di kabupaten/kota	L-2.1
9.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	L-3.Bankeudes.1
10.	Daftar Penghargaan Tingkat Internasional dan Nasional	L-4.1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025.

1.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Proses pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 secara normatif dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dalam perjalanannya, pada pertengahan tahun 2025, dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan, dan secara substansi proses pembangunan daerah tahun 2025 dilaksanakan juga dalam rangka menjabarkan kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan **RPD Tahun 2024-2026** yang menetapkan **tujuan** pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 adalah mewujudkan **"Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari"**. Tujuan ini diukur dengan tiga indikator tujuan yaitu PDRB per Kapita, Rasio Gini, dan Angka Kemiskinan. Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Nilai Tukar Petani;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pembangunan Keluarga;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, berdasarkan kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, ditetapkan arah dan **tema** pembangunan daerah tahun 2025 yaitu **"Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter"**. Tema pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat **Prioritas Daerah (PD) tahun 2025** yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Seiring dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk periode tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilakukan penyesuaian dengan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640 SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa semua daerah agar dapat menyesuaikan dan mengakomodir visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta kebijakan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 dan tertuang dalam **RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029** adalah **"Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut didukung dengan **6 misi** yaitu:

1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029. **Tujuan** pembangunan daerah **Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029** adalah **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan"**. Tujuan pembangunan daerah ini diukur keberhasilannya dengan indikator Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan **sasaran pembangunan daerah** yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan, berintegritas dan kolaboratif, serta stabilitas pembangunan daerah, diukur dengan indikator Indeks Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Otonomi Fiskal Daerah;
2. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berbasis lingkungan, diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter, diukur dengan indikator Indeks Modal Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Implementasi dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 ditetapkan 136 Program Daerah yang terdiri dari 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Sedangkan **tema atau arah kebijakan pembangunan daerah**

tahun 2025 diarahkan untuk **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat”**. Arah kebijakan pembangunan tersebut difokuskan pada 5 fokus arah kebijakan yaitu Insfrastruktur Jalan, Jembatan, Teknologi dan Data, Sekolah, serta Penyediaan Air Untuk Petani. Penjabaran tema dan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut, serta implementasi awal dari 136 Program Daerah yang mendasari penyesuaian terhadap beberapa rencana kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah tahun 2025.

Seluruh pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang diukur dengan **8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah** yaitu Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Otonomi Fiskal Daerah, dan Indeks Demokrasi Indonesia.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Kondisi Geografi Wilayah

Letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara.

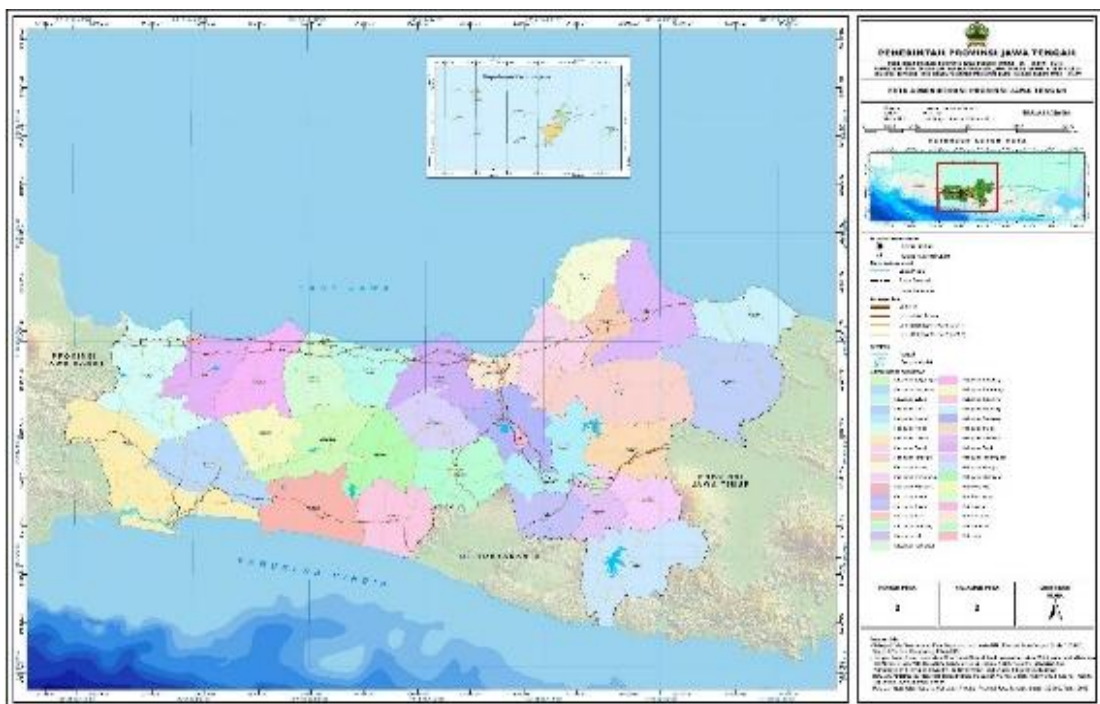
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, secara administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 576 Kecamatan yang meliputi 7.810 Desa, dan 753 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Kode Data Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah		
			Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	33.01	Kabupaten Cilacap	24	15	269
2	33.02	Kabupaten Banyumas	27	30	301
3	33.03	Kabupaten Purbalingga	18	15	224
4	33.04	Kabupaten Banjarnegara	20	12	266
5	33.05	Kabupaten Kebumen	26	11	449
6	33.06	Kabupaten Purworejo	16	25	469
7	33.07	Kabupaten Wonosobo	15	29	236
8	33.08	Kabupaten Magelang	21	5	367
9	33.09	Kabupaten Boyolali	22	6	261
10	33.10	Kabupaten Klaten	26	10	391
11	33.11	Kabupaten Sukoharjo	12	17	150
12	33.12	Kabupaten Wonogiri	25	43	251
13	33.13	Kabupaten Karanganyar	17	15	162
14	33.14	Kabupaten Sragen	20	12	196
15	33.15	Kabupaten Grobogan	19	7	273
16	33.16	Kabupaten Blora	16	24	271
17	33.17	Kabupaten Rembang	14	7	287
18	33.18	Kabupaten Pati	21	5	401
19	33.19	Kabupaten Kudus	9	9	123
20	33.20	Kabupaten Jepara	16	11	184
21	33.21	Kabupaten Demak	14	6	243
22	33.22	Kabupaten Semarang	19	27	208
23	33.23	Kabupaten Temanggung	20	23	266
24	33.24	Kabupaten Kendal	20	20	266
25	33.25	Kabupaten Batang	15	9	239

No.	Kode Data Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah		
			Kecamatan	Kelurahan	Desa
26	33.26	Kabupaten Pekalongan	19	13	272
27	33.27	Kabupaten Pemalang	14	11	212
28	33.28	Kabupaten Tegal	18	6	281
29	33.29	Kabupaten Brebes	17	5	292
30	33.71	Kota Magelang	3	17	-
31	33.72	Kota Surakarta	5	54	-
32	33.73	Kota Salatiga	4	23	-
33	33.74	Kota Semarang	16	177	-
34	33.75	Kota Pekalongan	4	27	-
35	33.76	Kota Tegal	4	27	-
Jumlah			576	753	7.810

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3.433.748 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa atau 1,70% dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Letak geografis Provinsi Jawa Tengah pada 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Wilayah Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai 791,76 km yang terdiri dari pantai utara 502,69 km dan pantai selatan 289,07 km.



Sumber: Dinas Pusdatar Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Secara topografi wilayah Jawa Tengah sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah.

Secara geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas

beracun. Terdapat 5 gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi di Kabupaten (Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet di Kabupaten (Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro di Kabupaten (Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing di Kabupaten (Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng di Kabupaten (Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi *organosol*, *alluvial*, *planosol*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, *podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol*, *aluvial*, serta *gromosol*, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.



Sumber: Data RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

Gambar 1.2 Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah

1.3.2 Kondisi Demografi

1.3.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Proyeksi Penduduk hasil Pendataan Long Form Sensus Penduduk 2020 (LFSP2020) dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat 38.233.933 jiwa, meningkat sebesar 8.342.650 jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2024.

Distribusi penduduk menunjukkan konsentrasi tertinggi di beberapa kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar tercatat di Kabupaten Brebes sebanyak 2.043.077 jiwa (5,44%), diikuti Kabupaten Cilacap 2.046.392 jiwa (5,35%) dan Kabupaten Banyumas 1.865.270 jiwa (4,88%). Sebaliknya, tiga wilayah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Magelang 122.674 jiwa (0,32%), Kota Salatiga 203.554 jiwa (0,53%), dan Kota Tegal 288.817 jiwa (0,76%).

Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah pada 2025 tercatat 1.113,47 jiwa/km², naik dari 1.103,53 jiwa/km² pada tahun sebelumnya. Wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Surakarta 11.324,46 jiwa/km² (naik dari 11.302,31 jiwa/km²), diikuti Kota Tegal 7.390,40 jiwa/km² dan Kota Pekalongan 7.025,19 jiwa/km². Sebaliknya, kepadatan terendah tercatat di Kabupaten Blora

467,06 jiwa/km², disusul Kabupaten Wonogiri 554,66 jiwa/km² dan Kabupaten Rembang 645,85 jiwa/km².

Data jumlah dan kepadatan penduduk selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Kab. Cilacap	2.046.392	2.323,93	880,57
2	Kab. Banyumas	1.865.270	1.391,15	1.340,81
3	Kab. Purbalingga	1.047.755	805,76	1.300,33
4	Kab. Banjarnegara	1.067.606	1.144,90	932,49
5	Kab. Kebumen	1.431.777	1.334,10	1.073,22
6	Kab. Purworejo	801.670	1.081,97	740,94
7	Kab. Wonosobo	931.142	1.011,62	920,45
8	Kab. Magelang	1.351.952	1.129,98	1.196,44
9	Kab. Boyolali	1.109.332	1.096,59	1.011,62
10	Kab. Klaten	1.300.940	701,50	1.854,51
11	Kab. Sukoharjo	950.424	493,53	1.925,77
12	Kab. Wonogiri	1.057.045	1.905,75	554,66
13	Kab. Karanganyar	968.484	803,05	1.206,01
14	Kab. Sragen	1.011.824	994,57	1.017,35
15	Kab. Grobogan	1.519.382	2.023,85	750,74
16	Kab. Blora	914.172	1.957,29	467,06
17	Kab. Rembang	670.095	1.037,54	645,85
18	Kab. Pati	1.381.912	1.572,90	878,58
19	Kab. Kudus	891.721	447,45	1.992,90
20	Kab. Jepara	1.244.314	1.020,25	1.219,62
21	Kab. Demak	1.265.053	977,77	1.293,81
22	Kab. Semarang	1.098.572	1.019,27	1.077,80
23	Kab. Temanggung	821.118	864,83	949,46
24	Kab. Kendal	1.076.483	1.008,12	1.067,81
25	Kab. Batang	847.175	857,27	988,22
26	Kab. Pekalongan	1.030.342	892,91	1.153,91
27	Kab. Pemalang	1.559.306	1.137,41	1.370,93
28	Kab. Tegal	1.694.235	983,90	1.721,96
29	Kab. Brebes	2.087.331	1.742,81	1.197,68
30	Kota Magelang	122.674	18,56	6.609,59
31	Kota Surakarta	529.079	46,72	11.324,46
32	Kota Salatiga	203.554	54,98	3.702,33
33	Kota Semarang	1.722.421	370,00	4.655,19
34	Kota Pekalongan	324.564	46,20	7.025,19
35	Kota Tegal	288.817	39,08	7.390,40
Jawa Tengah		38.233.933	34.337,49	1.113,47

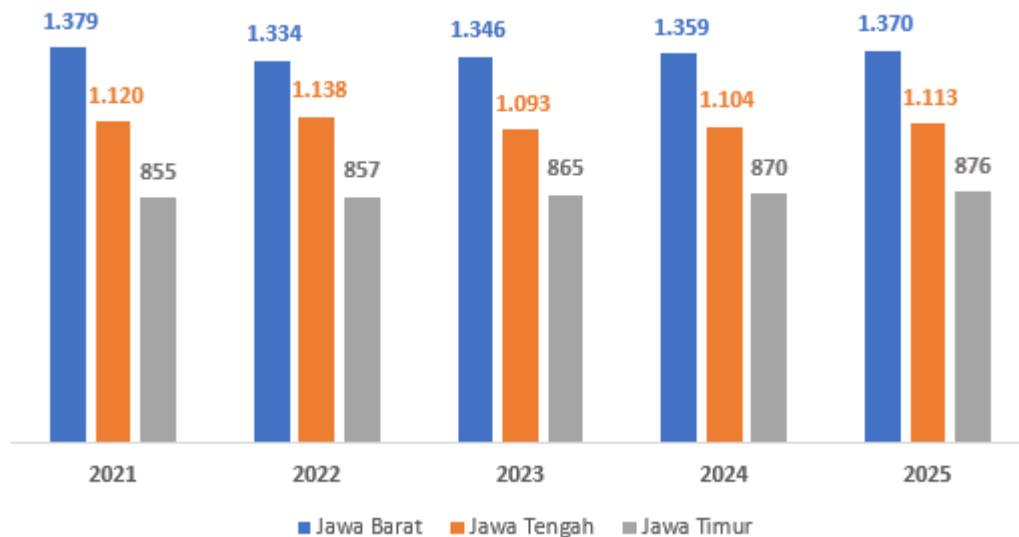
Sumber:

* Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) (Penduduk)

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 (Luas Wilayah dan Kepadatan)

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa menunjukkan pola konsisten sepanjang periode 2021–2025, dengan Jawa Barat menempati posisi tertinggi pada kisaran >1.300 jiwa/km², mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan urbanisasi yang kuat di provinsi tersebut. Jawa Tengah berada di posisi menengah dengan kepadatan sekitar 1.100 jiwa/km², yang menggambarkan peran strategis provinsi ini sebagai penyangga antara pusat-pusat pertumbuhan di barat dan timur. Sementara itu, Jawa

Timur memiliki kepadatan terendah di antara ketiganya, berada di kisaran 800–900 jiwa/km², namun menunjukkan tren kenaikan bertahap yang patut dicermati.



Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Gambar 1.3 Perbandingan Kepadatan Penduduk di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 2021–2025 (jiwa/km²)

Dari perspektif tata kelola dan perencanaan wilayah, kondisi ini menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda antarprovinsi. Untuk Jawa Tengah, angka kepadatan yang relatif stabil menandakan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan ketersediaan ruang hidup, namun juga mengindikasikan peluang untuk meningkatkan produktivitas ruang melalui penguatan pusat-pusat ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur transportasi, dan penataan permukiman yang lebih efisien. Perbandingan dengan Jawa Barat yang lebih padat menegaskan perlunya strategi mitigasi tekanan urban, seperti pengendalian pemanfaatan lahan dan peningkatan layanan publik, sementara kenaikan di Jawa Timur membuka peluang kolaborasi regional untuk berbagi praktik baik.

1.3.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Proyeksi Penduduk dari SP2020, rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat 0,90%, setara dengan penambahan sekitar 341 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 11 kabupaten/kota mencatat laju pertumbuhan lebih dari 1%; lima daerah dengan pertumbuhan tertinggi pada 2025 adalah Kabupaten Kebumen (1,20%), Kabupaten Wonosobo (1,16%), Kabupaten Tegal (1,16%), Kabupaten Pemalang (1,14%), dan Kota Salatiga (1,13%). Di sisi lain, pertumbuhan terendah tercatat di Kota Magelang dan Kota Surakarta, masing-masing sebesar 0,20%, yang mengindikasikan perlunya perhatian kebijakan untuk mendorong dinamika demografis dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut.

1.3.2.3 Komposisi Penduduk

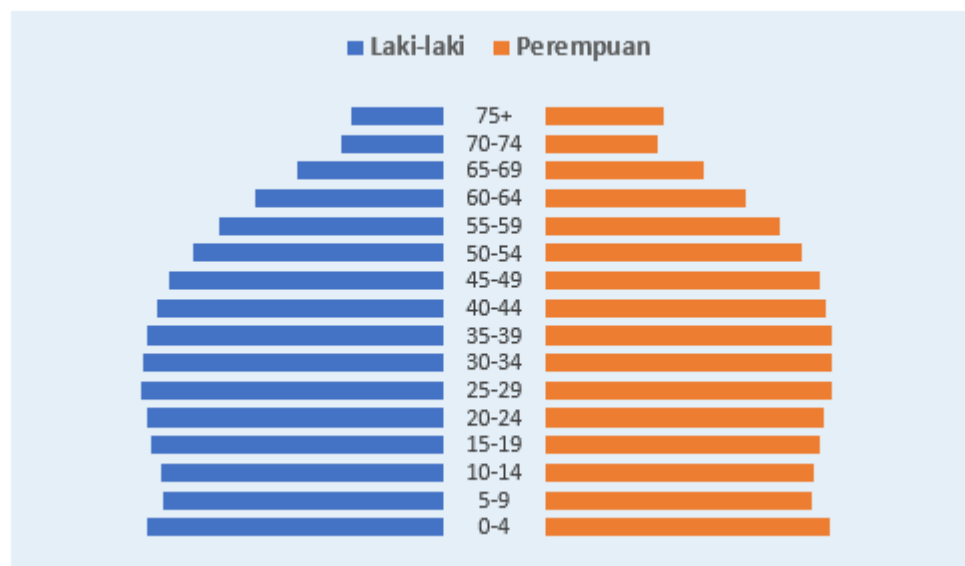
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2020 (SP2020), diperoleh komposisi penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut jenis kelamin tahun 2024 terdiri dari 19,04

juta orang laki-laki dan 18,85 juta orang perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio-SR*) di atas angka seratus yaitu 100,97. Hal ini menunjukkan jumlah laki-laki lebih tinggi dari jumlah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki melebihi perempuan pada rentang usia antara 0-44 tahun, sementara pada rentang usia 45 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan melebihi laki-laki.

Berdasarkan usia, penduduk Jawa Tengah tahun 2024 yang berada pada usia produktif, yakni usia 15-64 tahun 26,22 juta jiwa penduduk (69,20%). Usia produktif merupakan usia kerja yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun berjumlah 11,67 juta jiwa.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif, dengan hasil 44,50 yang artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) memiliki tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Sementara itu, proporsi anak balita usia 0-4 tahun sebesar 7,44% dari jumlah penduduk. Meskipun secara jumlah tidak besar, namun tetap menjadi perhatian pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi dan penanganan stunting. Hal ini sejalan dengan program prioritas penanganan stunting yaitu ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun, atau disebut sebagai hari pertama kelahiran (1.000 HPK).

Jika dilihat menurut jenis kelamin, tahun 2024 komposisi wanita usia subur, yaitu rentang usia 15-49 tahun sebanyak 9,66 juta jiwa (51,26% dari total penduduk wanita). Proporsi yang besar dari wanita usia subur membutuhkan perhatian yang lebih dalam hal pemenuhan fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi.



Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Gambar 1.4 Piramida Penduduk Jawa Tengah 2025

1.3.2.4 Bonus Demografi

Saat ini penduduk Jawa Tengah memasuki bonus demografi dimana jumlah penduduk usia 15 s.d 64 tahun menduduki jumlah terbanyak dalam piramida penduduk. Besarnya proporsi jumlah penduduk usia produktif jika dibandingkan dengan usia non produktif tercermin dalam angka beban ketergantungan

(*dependency ratio*) dibawah 50, ini merupakan salah satu indikasi terjadinya bonus demografi.

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia non produktif merupakan era terjadinya bonus demografi. Momentum tersebut tentu harus dihadapi dengan perencanaan yang matang seperti mempersiapkan lapangan pekerjaan karena melimpahnya jumlah penduduk usia produktif. Perencanaan tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada era bonus demografi. Upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi adalah dengan meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi kesehatan yang baik, kecukupan pangan, pengelolaan angka pengangguran dan pendidikan.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 26,38 juta orang dan usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebanyak 11,85 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 44,93 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 45 penduduk non produktif.

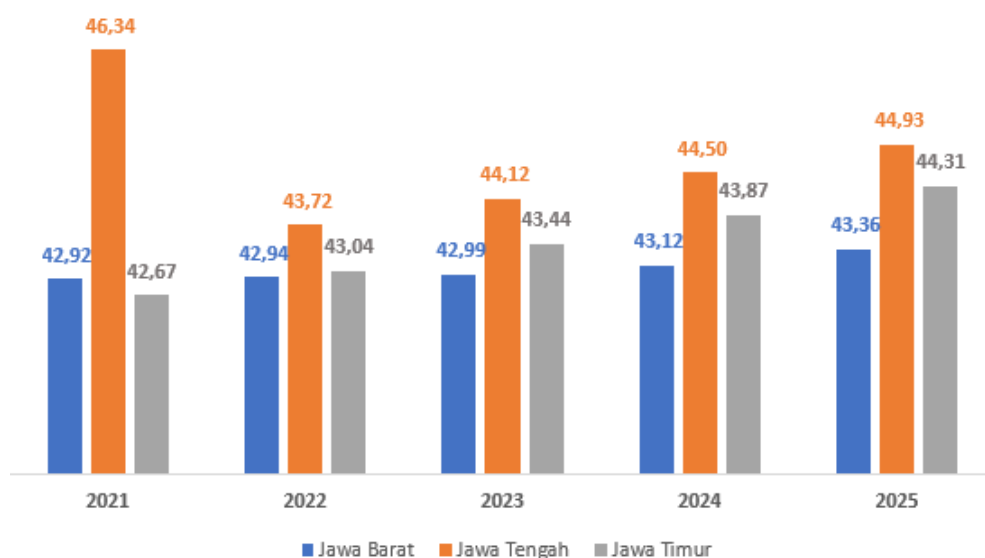
Fenomena bonus demografi terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Bonus Demografi yang cukup tinggi (angka beban ketergantungan rendah) terjadi di Kota Semarang dengan angka beban ketergantungan sebesar 40,97%, diikuti Kota Magelang sebesar 42,16% dan Kabupaten Kudus sebesar 42,58%. Data jumlah penduduk usia produktif dan non produktif serta angka beban ketergantungan selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif serta Angka Beban Ketergantungan Tahun 2025

No.	Kab/Kota	Jumlah Usia Produktif (jiwa)	Jumlah Usia Non Produktif (jiwa)	Angka Beban Ketergantungan (%)
1	Kab. Cilacap	1.408.392	638.000	45,30
2	Kab. Banyumas	1.276.949	588.321	46,07
3	Kab. Purbalingga	714.005	333.750	46,74
4	Kab. Banjarnegara	727.590	340.016	46,73
5	Kab. Kebumen	974.960	456.817	46,85
6	Kab. Purworejo	543.649	258.021	47,46
7	Kab. Wonosobo	639.227	291.915	45,67
8	Kab. Magelang	929.969	421.983	45,38
9	Kab. Boyolali	752.494	356.838	47,42
10	Kab. Klaten	896.910	404.030	45,05
11	Kab. Sukoharjo	662.698	287.726	43,42
12	Kab. Wonogiri	711.990	345.055	48,46
13	Kab. Karanganyar	662.556	305.928	46,17
14	Kab. Sragen	691.098	320.726	46,41
15	Kab. Grobogan	1.040.343	479.039	46,05
16	Kab. Blora	638.774	275.398	43,11
17	Kab. Rembang	464.560	205.535	44,24
18	Kab. Pati	961.429	420.483	43,74
19	Kab. Kudus	625.407	266.314	42,58
20	Kab. Jepara	867.130	377.184	43,50
21	Kab. Demak	875.408	389.645	44,51
22	Kab. Semarang	762.477	336.095	44,08
23	Kab. Temanggung	563.518	257.600	45,71
24	Kab. Kendal	753.887	322.596	42,79
25	Kab. Batang	583.680	263.495	45,14

No.	Kab/Kota	Jumlah Usia Produktif (jiwa)	Jumlah Usia Non Produktif (jiwa)	Angka Beban Ketergantungan (%)
26	Kab. Pekalongan	706.528	323.814	45,83
27	Kab. Pemalang	1.078.184	481.122	44,62
28	Kab. Tegal	1.171.039	523.196	44,68
29	Kab. Brebes	1.449.104	638.227	44,04
30	Kota Magelang	86.293	36.381	42,16
31	Kota Surakarta	370.429	158.650	42,83
32	Kota Salatiga	141.752	61.802	43,60
33	Kota Semarang	1.221.858	500.563	40,97
34	Kota Pekalongan	226.233	98.331	43,46
35	Kota Tegal	200.874	87.943	43,78
Jawa Tengah		26.381.394	11.852.539	44,93

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)



Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Gambar 1.5 Perbandingan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 2021–2025 (jiwa/km²)

Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah mencatat rasio beban ketergantungan sebesar 46,34, angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat (42,92) maupun Jawa Timur (42,67). Tingginya rasio ini mencerminkan struktur demografi Jawa Tengah yang masih didominasi oleh proporsi penduduk usia nonproduktif, baik kelompok usia muda maupun lanjut usia. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa penduduk usia produktif harus menanggung beban ekonomi dan sosial yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan kelompok nonproduktif.

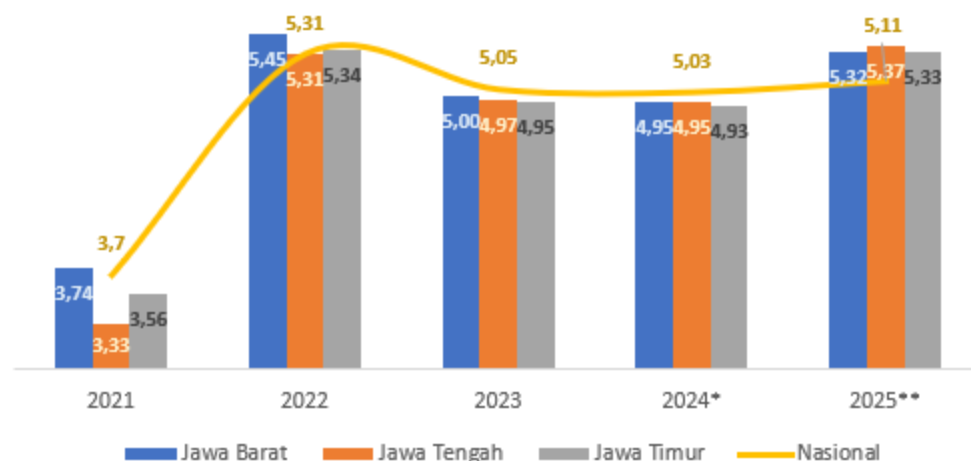
Jika dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur, tren Jawa Tengah menunjukkan posisi yang konsisten lebih tinggi sepanjang periode 2021–2025. Sementara Jawa Barat dan Jawa Timur bergerak relatif stabil dengan kenaikan bertahap, Jawa Tengah sempat mengalami penurunan signifikan pada 2022 (43,72), namun kembali meningkat hingga mencapai 44,93 pada 2025. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat perbaikan sementara, beban ketergantungan di Jawa Tengah tetap lebih berat dibandingkan dua provinsi besar lainnya di Pulau Jawa.

Upaya strategis yang perlu dilakukan adalah dengan memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok usia nonproduktif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rasio beban ketergantungan dapat terkendali, sehingga penduduk usia produktif mampu menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara menyeluruh.

1.4 GAMBARAN EKONOMI MAKRO

1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan stabilitas dan peningkatan yang konsisten, dengan capaian akhir pada 2025 sebesar 5,37%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat (5,25%), Jawa Timur (5,33%), dan rata-rata nasional (5,11%). Setelah mengalami pemulihan bersama-sama provinsi lain pasca-pandemi pada 2022, Jawa Tengah mempertahankan laju pertumbuhan yang kompetitif pada 2023–2024 dan berhasil memperkuat momentum pada 2025, menandakan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi dan stimulus daerah yang telah dijalankan. Adapun tren pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Nasional sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut:



Sumber: Data BPS Jateng, 2025 (diolah)

Keterangan: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Gambar 1.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (Y-on-Y) di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021–2025 (%)

Jika dilihat secara periodik, tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Provinsi di sekitarnya adalah sebagai berikut: pada 2021 Jawa Tengah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 3,33% sementara Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 3,74% dan 3,56%; pada 2022 semua provinsi mencatat lonjakan signifikan (Jawa Tengah 5,35%); meskipun pada 2023–2024 laju Jawa Tengah sedikit di bawah puncak nasional namun tetap stabil (4,97% pada 2023; 4,94% pada 2024). Kenaikan menjadi 5,37% pada 2025 menunjukkan perbaikan struktural yang didorong oleh penguatan sektor manufaktur, investasi infrastruktur, dan peningkatan konsumsi domestik.

Pertumbuhan Ekonomi Berdasar Lapangan Usaha

Sektor-sektor penunjang pariwisata mencatat pertumbuhan signifikan pada tahun 2025. Lapangan usaha Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman mencatat kenaikan tertinggi sebesar 10,60%, diikuti Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 8,74%, serta Jasa Lainnya dengan pertumbuhan 8,15%. Kinerja ini mencerminkan pemulihan permintaan wisatawan dan peningkatan aktivitas ekonomi terkait layanan, sehingga perlu dilanjutkan dengan penguatan kualitas layanan, promosi terintegrasi, dan dukungan kebijakan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan.

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha (Y-on-Y)

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)				
		2021	2022	2023	2024*)	2025**)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,76	2,91	0,43	1,39	4,78
2	Pertambangan dan Penggalian	4,40	-6,20	1,38	2,83	2,21
3	Industri Pengolahan	2,34	3,88	4,32	3,52	4,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,95	3,79	6,80	6,96	4,42
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,92	1,01	4,07	2,28	1,37
6	Konstruksi	7,37	1,83	6,07	7,97	6,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,80	4,32	4,93	4,15	4,63
8	Transportasi dan Pergudangan	3,27	73,01	8,12	5,56	6,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,92	16,99	11,24	10,03	10,60
10	Informasi dan Komunikasi	6,04	2,50	10,67	9,56	8,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	0,53	2,16	2,16	5,61
12	Real Estate	2,15	5,09	6,90	5,91	5,62
13	Jasa Perusahaan	3,07	6,15	7,24	9,15	7,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,64	1,58	4,13	7,53	2,25
15	Jasa Pendidikan	0,07	1,58	5,97	8,53	6,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	2,51	5,82	7,28	5,01
17	Jasa lainnya	0,53	11,79	7,41	6,82	8,15
PDRB		3,33	5,31	4,97	4,95	5,37

Sumber: Data BPS Jateng, 2025 (diolah)

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah terus menguat dan mencapai 4,78% pada tahun 2025, angka tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan serangkaian kebijakan provinsi, termasuk peningkatan akses permodalan, modernisasi teknologi pertanian, dan program pendampingan bagi petani, yang bersama-sama meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas lokal. Kinerja positif ini memperkuat peran pertanian sebagai penopang ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Berdasar Pengeluaran

Konsumsi rumah tangga, sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian, tumbuh **4,78%** pada tahun 2025, mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat

seiring membaiknya kondisi ekonomi. Perbaikan penerimaan daerah dan nasional turut mendorong peningkatan belanja pemerintah; konsumsi pemerintah pada 2025 tercatat **3,31%**, menguat dari **3,01%** pada 2024, yang menunjukkan adanya ruang fiskal lebih besar untuk belanja publik dan investasi prioritas.

Investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan penguatan signifikan pada 2025 dengan pertumbuhan **6,76%**, yang sejalan dengan percepatan aktivitas di sektor konstruksi. Kenaikan PMTB ini menandakan peningkatan investasi pada infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan yang berpotensi memperkuat kapasitas produksi dan konektivitas antarwilayah, sekaligus membuka lapangan kerja jangka pendek dan menengah.

Dari sisi perdagangan luar negeri, kinerja ekspor Jawa Tengah menguat tajam pada 2025 dengan pertumbuhan 13,60%, sementara impor mengalami kontraksi tipis -0,31%, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan regional dan mendukung akumulasi devisa. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran (Y-on-Y)

No	Komponen Pengeluaran	Pertumbuhan (%)				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Konsumsi Rumah Tangga	1,82	5,52	5,68	5,15	4,78
2	Konsumsi LNPR	1,25	5,00	7,25	16,24	4,01
3	Konsumsi Pemerintah	0,46	0,02	2,64	3,01	3,31
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,84	1,99	4,23	6,55	6,76
5	Ekspor Luar Negeri	35,72	15,83	-9,54	12,70	13,60
6	Impor Luar Negeri	1,82	5,52	-2,82	12,44	-0,31
	PDRB	3,33	5,31	4,97	4,95	5,37

Sumber: BPS Jateng, 2025 (diolah)

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Dalam perhitungannya, PDRB dapat menggunakan dua harga, yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan.

Tabel 1.6 PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Jawa Tengah Tahun 2021–2025 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	127.065,84	130.762,52	131.330,54	133.162,54	139.530,40
2	Pertambangan dan Penggalian	22.326,16	20.942,66	21.232,09	21.833,06	22.315,21
3	Industri Pengolahan	333.239,63	346.169,65	361.111,03	373.837,72	389.026,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.170,51	1.214,86	1.297,42	1.387,68	1.448,95
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	744,86	752,41	783,02	800,90	811,85

6	Konstruksi	106.701,15	108.657,61	115.250,87	124.441,81	132.673,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	147.313,38	153.670,44	161.240,41	167.931,17	175.700,39
8	Transportasi dan Pergudangan	24.335,82	42.103,03	45.523,39	48.052,76	51.285,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.595,12	38.132,45	42.417,20	46.670,27	51.617,30
10	Informasi dan Komunikasi	62.288,94	63.846,51	70.658,78	77.416,08	84.182,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	27.545,69	27.690,76	28.289,10	28.899,58	30.519,47
12	Real Estate	19.133,49	20.107,10	21.494,52	22.764,06	24.042,70
13	Jasa Perusahaan	3.816,62	4.051,19	4.344,41	4.741,92	5.114,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.528,68	24.915,02	25.944,09	27.897,21	28.525,56
15	Jasa Pendidikan	38.974,99	39.589,05	41.951,57	45.530,22	48.491,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.471,68	9.709,66	10.274,55	11.022,21	11.573,88
17	Jasa lainnya	16.068,57	17.963,16	19.294,49	20.609,68	22.288,53
	PDRB ADHK	997.321,13	1.050.278,09	1.102.437,49	1.156.998,88	1.219.148,60

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 1.6, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar **Rp 1.219 triliun**, meningkat sekitar **Rp 62.149,72 miliar** dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, Tabel 1.7 menunjukkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada 2025 mencapai **Rp 1.943 triliun**, atau naik **Rp 125.476,84 miliar** secara nominal dari tahun sebelumnya. Kenaikan kedua indikator ini mencerminkan ekspansi ekonomi baik secara riil maupun dalam nilai moneter, meskipun besaran kenaikan ADHB lebih besar karena dipengaruhi oleh perubahan harga dan inflasi.

Perbedaan antara PDRB ADHB dan ADHK perlu dijelaskan dalam konteks analisis ekonomi: **PDRB ADHB** menggunakan harga tahun berjalan sehingga mencerminkan nilai nominal perekonomian termasuk efek inflasi, dan karenanya berguna untuk menghitung kontribusi sektor terhadap total output dalam nilai rupiah saat ini. Sebaliknya, **PDRB ADHK** memakai harga dasar 2010 sehingga mengukur perubahan volume atau output riil; indikator inilah yang menjadi dasar perhitungan **pertumbuhan ekonomi** Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, ADHK lebih tepat dipakai untuk menilai kinerja produktivitas dan efektivitas kebijakan pembangunan, sedangkan ADHB penting untuk perencanaan fiskal dan alokasi anggaran berdasarkan nilai moneter aktual.

Tabel 1.7 PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Jawa Tengah Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196.835,03	211.490,54	224.291,41	237.348,86	253.907,09
2	Pertambangan dan Penggalian	36.628,43	37.723,92	38.102,94	39.211,80	40.556,56
3	Industri Pengolahan	486.957,68	529.612,56	576.208,65	614.658,98	648.749,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.377,81	1.438,00	1.556,85	1.675,83	1.752,77

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	915,50	938,29	985,79	1.066,34	1.123,96
6	Konstruksi	158.056,34	172.199,81	190.384,35	207.039,33	222.900,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	195.399,04	212.208,01	230.723,26	245.140,47	262.081,27
8	Transportasi dan Pergudangan	32.076,43	59.256,75	69.538,67	74.443,94	80.201,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43.040,37	51.316,31	57.757,14	64.731,32	72.617,60
10	Informasi dan Komunikasi	60.910,56	62.593,23	69.420,57	76.438,36	83.408,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	42.944,78	46.920,61	48.965,20	50.560,09	54.552,68
12	Real Estate	23.741,78	25.420,79	27.455,79	29.153,89	31.091,49
13	Jasa Perusahaan	5.650,01	6.259,70	6.975,59	7.783,77	8.561,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	35.853,14	37.421,33	39.955,00	43.959,71	45.763,61
15	Jasa Pendidikan	64.584,46	65.985,53	70.550,28	77.978,57	84.860,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.800,24	14.372,31	15.533,75	16.932,97	18.109,07
17	Jasa lainnya	20.963,55	24.413,40	27.022,68	29.586,58	32.949,35
PDRB ADHB		1.419.735,15	1.559.571,10	1.695.427,92	1.817.710,82	1.943.187,66

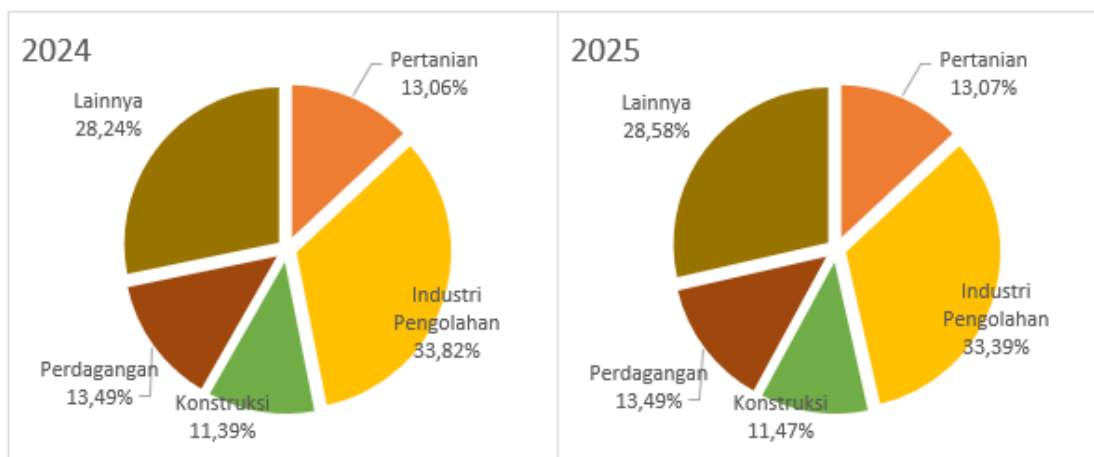
Keterangan: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Distribusi PDRB

Distribusi PDRB atas dasar **harga berlaku** menunjukkan struktur ekonomi Jawa Tengah pada 2025 yang didominasi oleh beberapa sektor utama. **Industri pengolahan** menjadi kontributor terbesar dengan **33,39%**, diikuti oleh **Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan (13,49%)**, **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,07%)**, serta **Konstruksi (11,47%)**. Keempat sektor ini bersama-sama menyumbang **71,42%** dari total PDRB ADHB, menegaskan bahwa basis perekonomian provinsi masih bertumpu pada manufaktur, perdagangan, dan aktivitas primer serta pembangunan fisik.

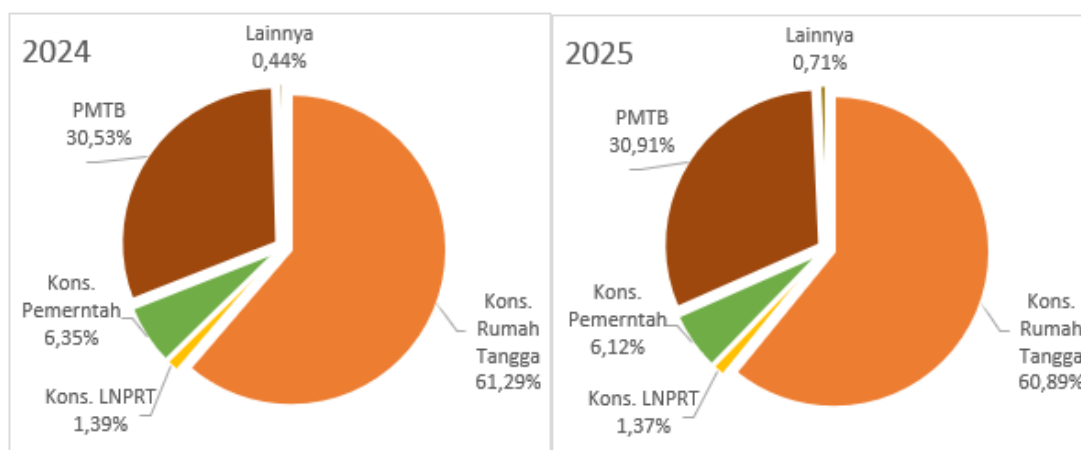
Secara komparatif terhadap 2024, kontribusi relatif sektor-sektor utama tersebut cenderung stabil, dengan catatan **peningkatan kontribusi pada sektor konstruksi**. Penguatan peran konstruksi berkaitan dengan percepatan proyek infrastruktur dan investasi fisik yang meningkatkan permintaan bahan bangunan, jasa teknik, dan tenaga kerja terampil. Stabilitas kontribusi industri pengolahan dan perdagangan menunjukkan keberlanjutan rantai nilai yang sudah ada, sementara peran pertanian tetap signifikan sebagai penopang ketahanan pangan dan sumber bahan baku bagi industri hilir.



Gambar 1.7 Grafik Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024–2025

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama perekonomian Jawa Tengah, menyumbang terbesar dalam struktur pengeluaran dengan porsi **61,29%** pada 2024 dan sedikit menurun menjadi **60,89%** pada 2025. Proporsi ini mencerminkan peran dominan belanja rumah tangga dalam mendorong permintaan domestik, sekaligus menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap menjadi faktor penentu stabilitas ekonomi regional. Perubahan kecil pada proporsi konsumsi perlu dipantau untuk memastikan bahwa penurunan relatif tidak mengindikasikan melemahnya konsumsi riil di segmen-segmen rentan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sebagai indikator investasi fisik, menempati posisi kedua terbesar dan meningkat dari **30,53%** pada 2024 menjadi **30,91%** pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan investasi pada aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, dan mesin yang mendukung kapasitas produksi jangka panjang. Penguatan PMTB sejalan dengan percepatan proyek konstruksi dan investasi swasta maupun publik, yang berpotensi memperkuat basis produksi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas regional.



Sumber: BPS Jateng, 2025 (diolah)

Gambar 1.8 Grafik Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2024–2025

PDRB Per Kapita

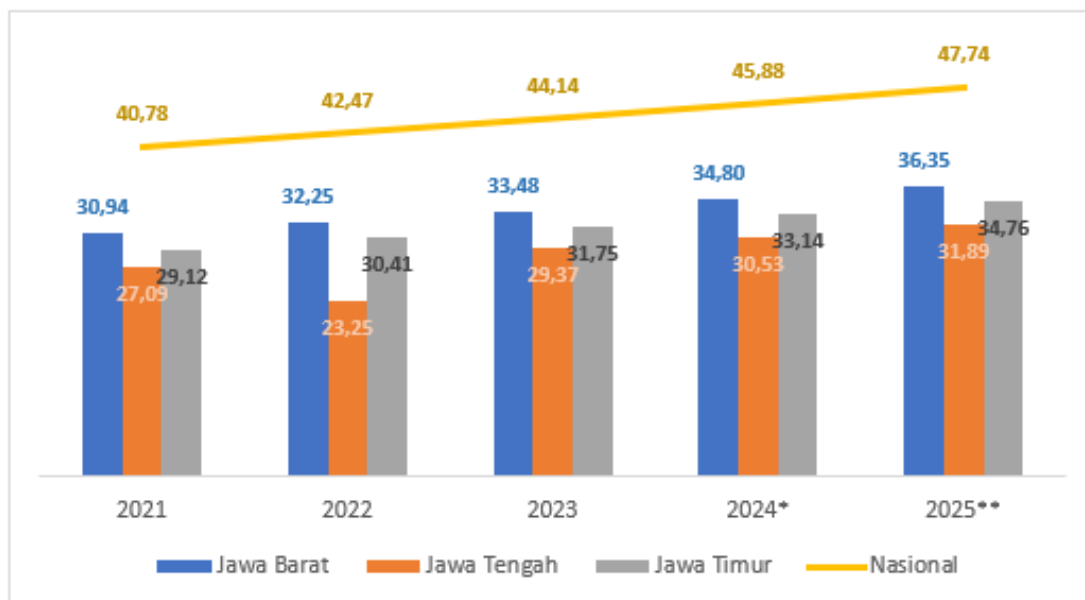
PDRB per kapita ADHK adalah nilai output riil yang dihasilkan per penduduk dengan menggunakan **harga konstan** sebagai dasar penilaian. Indikator ini

mengukur **volume produksi rata-rata per orang** dan berfungsi sebagai *proxy* produktivitas ekonomi wilayah setelah menghilangkan pengaruh perubahan harga.

Kinerja PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah ADHK menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2021–2025, dari **Rp27,09 juta** pada 2021 menjadi **Rp31,89 juta** pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan produktivitas dan akumulasi nilai tambah di beberapa sektor utama, namun secara relatif Jawa Tengah masih berada di bawah capaian **Jawa Barat (Rp36,35 juta)**, **Jawa Timur (Rp34,76 juta)**, dan jauh di bawah rata-rata nasional (**Rp47,74 juta** pada 2025). Fakta ini menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan, tingkat produktivitas per kapita provinsi belum setinggi wilayah sekitar dan nasional.

Sementara itu, PDRB per kapita ADHB adalah nilai output yang dihasilkan per penduduk dengan menggunakan **harga berlaku** pada tahun berjalan sebagai dasar penilaian. Indikator ini secara tidak langsung mencerminkan tingkat daya beli dan kontribusi rata-rata individu terhadap perekonomian regional pada tahun tersebut.

Kinerja PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah ADHB menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2021–2025, dari **Rp38,57 juta** pada 2021 menjadi **Rp50,82 juta** pada 2025. Kenaikan PDRB per kapita ADHB Jawa Tengah mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten sekaligus indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat, perbaikan kualitas hidup, serta kontribusi individu terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan tersebut juga dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai kebijakan pembangunan, investasi, serta penguatan sektor-sektor unggulan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi di Jawa Tengah.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025 (diolah)

Gambar 1.9 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021–2025 (%)

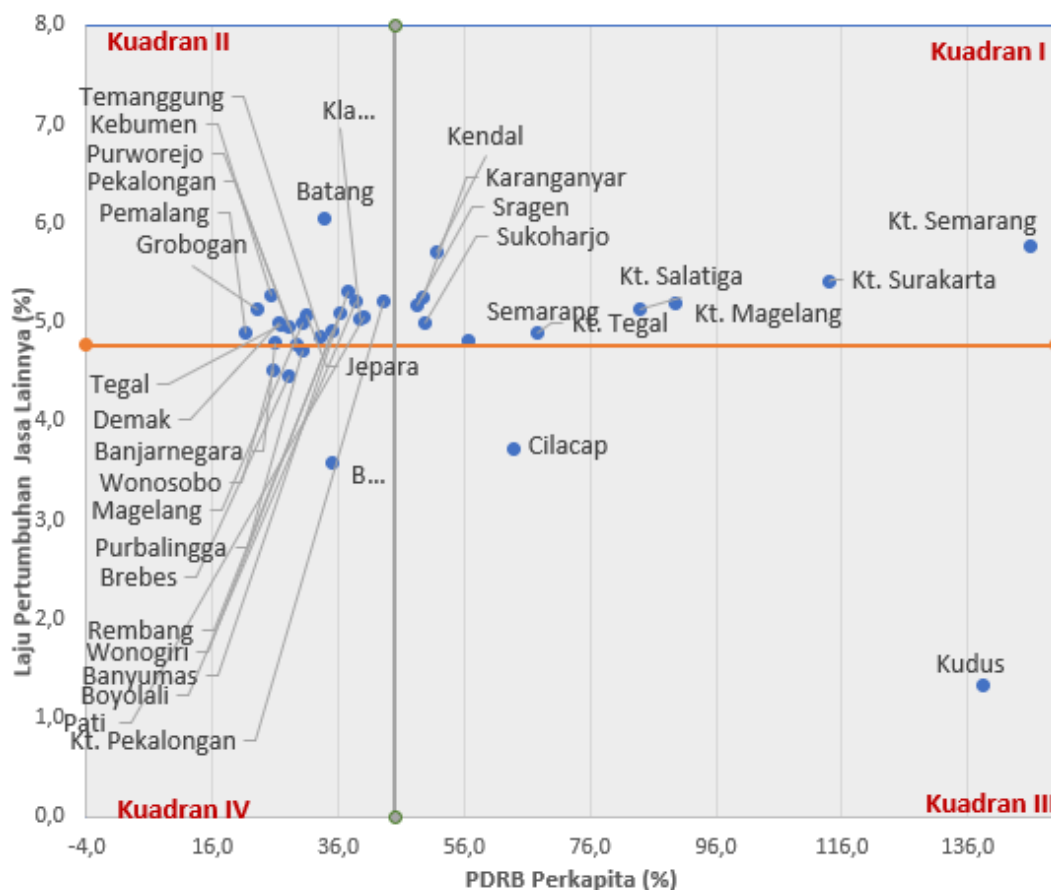
1.4.2 Tipologi Klassen

Selama kurun waktu 2021–2025, hasil klasifikasi menunjukkan bahwa di Jawa Tengah terdapat 5 kabupaten dan 5 kota yang merupakan daerah yang cepat maju

dan cepat tumbuh. Adapun 5 kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Semarang, Sukoharjo, Kendal, Karanganyar, dan Sragen. Sedangkan, 5 kota terdiri dari Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota Magelang. Sementara itu, Kabupaten Kudus dan Cilacap termasuk kedalam klasifikasi kabupaten maju tetapi tertekan. Rata-rata PDRB Perkapita kedua kabupaten tersebut relatif tinggi namun pertumbuhan ekonominya relatif rendah dibanding rata-rata Jawa Tengah.

Sebaran wilayah menurut tipologi klasen ini, mengelompokkan 18 kabupaten dan 1 kota di Jawa Tengah termasuk klasifikasi daerah berkembang cepat, dimana kabupaten/kota ini mengalami rata-rata pertumbuhan diatas Jawa Tengah dan memiliki PDRB perkapita dibawah Jawa Tengah selama periode 2021-2025. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Jepara, Rembang, Pemalang, Purworejo, Boyolali, Klaten, Banyumas, Pati, Grobogan, Pekalongan, Kebumen, Tegal, Demak, Banjarnegara, Batang, Wonogiri, Temanggung, Magelang, dan Kota Pekalongan.

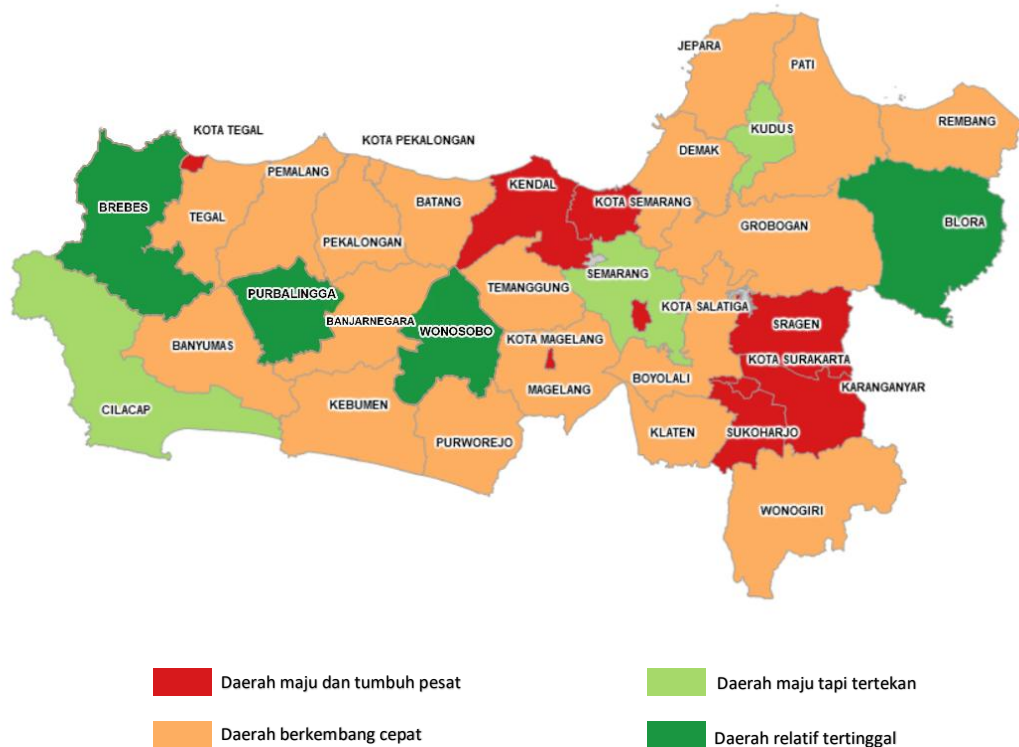
Sementara itu, 4 wilayah masuk klasifikasi daerah relatif tertinggal, di antaranya Purbalingga, Wonosobo, Blora, dan Brebes. Kabupaten ini mengalami pertumbuhan ekonomi dan memiliki PDRB perkapita yang relatif rendah dibanding rata-rata Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir.



Gambar 1.10 Hasil Tipologi Klasen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita, 2021-2025

Setiap kabupaten/kota mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan kabupaten/kota lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu kabupaten/kota perlu mengenali karakteristik ekonomi, sosial, fisik itu sendiri, termasuk interaksinya dengan kabupaten/kota atau provinsi lain. Dengan demikian,

tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di sisi lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang tentunya juga dikaji bagaimana pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai daerah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana ekonomi daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal juga diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyesuaikan laju pertumbuhan antar daerah (Suyatno, 2000).



Gambar 1.11 Sebaran Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kabupaten/Kota

1.4.3 Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada November 2025 tercatat 30,12 juta orang, meningkat 413 ribu orang dibanding Agustus 2024. Dari total tersebut, 22,32 juta orang termasuk dalam angkatan kerja, sedangkan 7,80 juta orang bukan angkatan kerja. Di antara angkatan kerja, yang bekerja berjumlah 21,36 juta orang dan pengangguran tercatat 0,97 juta orang, sehingga tingkat partisipasi dan penyerapan tenaga kerja tetap menjadi fokus utama kebijakan ketenagakerjaan provinsi.

Komposisi tenaga kerja menurut lapangan usaha menggambarkan struktur pasar kerja Jawa Tengah: sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyerap 26,07% tenaga kerja, Industri Pengolahan menyerap 21,03%, dan Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan menyerap 18,01%. Pola ini menunjukkan dominasi sektor primer dan manufaktur dalam penyerapan tenaga kerja, sekaligus

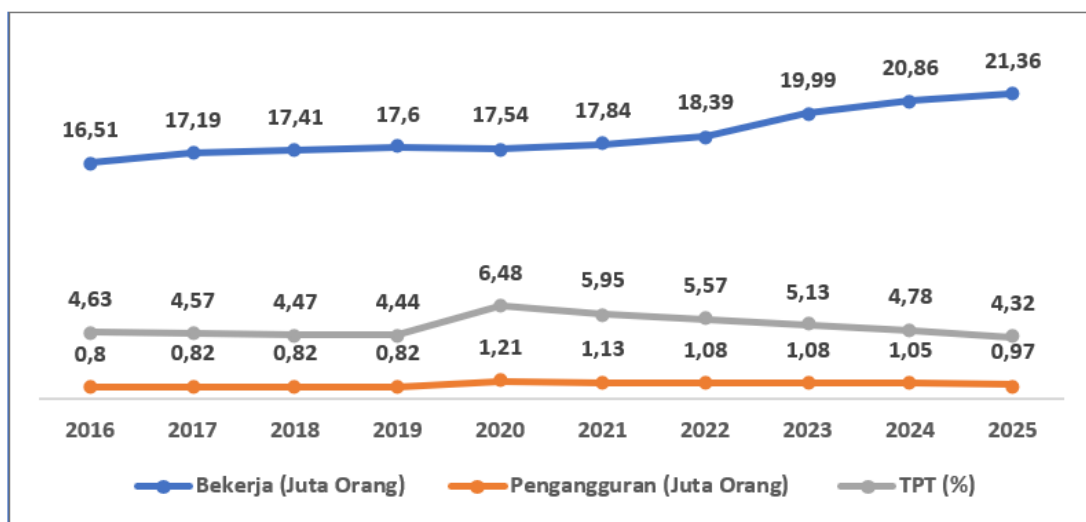
menandakan adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas di sektor-sektor padat karya serta memperkuat konektivitas antara sektor pertanian dan industri hilir.

Dibandingkan Agustus 2024, penyerapan tenaga kerja di beberapa lapangan usaha menunjukkan pergeseran yang nyata. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat peningkatan tenaga kerja terbesar sebesar 29 ribu orang, diikuti Industri Pengolahan yang bertambah 23 ribu orang. Sektor Pengangkutan dan Pergudangan mengalami peningkatan tenaga kerja terbesar sebesar 47 ribu orang, sementara Aktivitas Informasi dan Komunikasi menurun sekitar 39 ribu orang. Perubahan ini mencerminkan dinamika permintaan tenaga kerja antar-sektor yang dipengaruhi oleh siklus ekonomi, investasi infrastruktur, dan pergeseran pola produksi serta distribusi.

Sementara itu, pengangguran tetap menjadi isu makro yang perlu mendapat perhatian serius. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) November 2025 tercatat 4,32%, yang berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat sampai lima orang yang belum terserap oleh pasar kerja. Dibandingkan Agustus 2024, TPT menurun 0,46 poin persentase, menandakan perbaikan penyerapan tenaga kerja namun masih menyisakan ruang kebijakan untuk menurunkan pengangguran struktural dan friksional.

Pada November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perbedaan menurut jenis kelamin: TPT laki-laki 4,54% dan TPT perempuan 4,03%. Dibandingkan Agustus 2024, TPT laki-laki turun 0,29 poin, sementara TPT perempuan turun lebih banyak yakni sebanyak 0,68 poin, menandakan bahwa perbaikan kondisi pasar kerja relatif lebih dirasakan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Penurunan TPT perempuan yang lebih tajam mencerminkan adanya peningkatan peluang kerja atau penyerapan tenaga kerja perempuan yang lebih signifikan dalam periode tersebut, sehingga kesenjangan pengangguran menurut jenis kelamin sedikit menyempit.

Dilihat menurut jenjang pendidikan, kelompok yang paling rentan terhadap pengangguran adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan TPT 8,17%, dan selama lima tahun terakhir lulusan SMK konsisten menempati posisi tertinggi dalam struktur pengangguran. Pola ini mengindikasikan adanya *mismatch* antara kompetensi yang diperoleh di SMK dan kebutuhan pasar kerja, serta tantangan penyerapan lulusan vokasi ke pekerjaan formal yang sesuai keterampilan mereka. Adapun tren variabel ketenagakerjaan dapat dilihat pada gambar berikut:

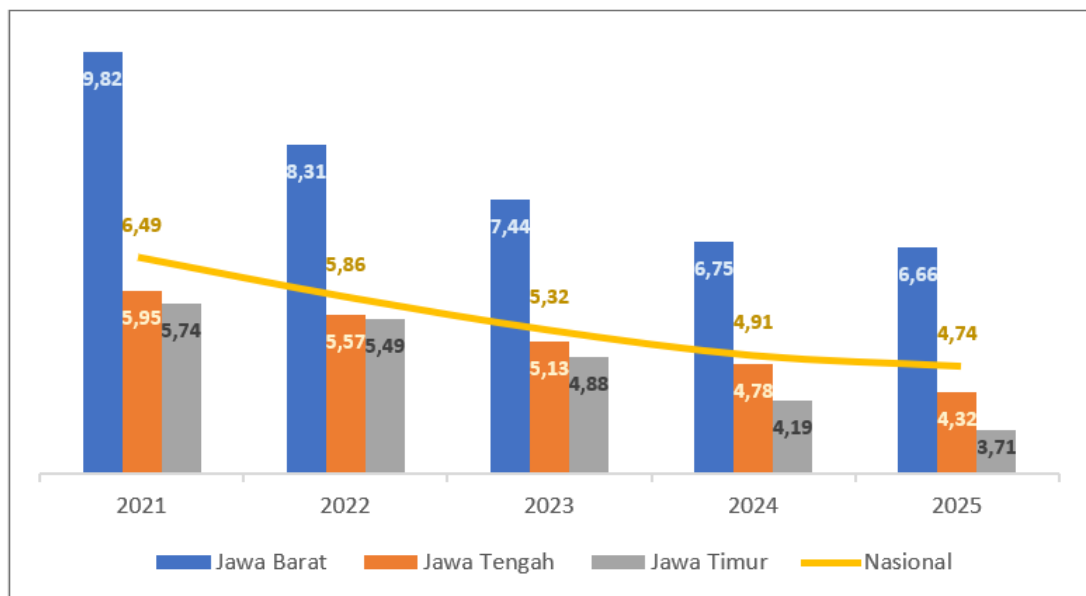


Sumber: Data Sakernas BPS Jawa Tengah, 2025 (diolah)

*) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Gambar 1.12 Penduduk Bekerja, Pengangguran, dan TPT Jawa Tengah

Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah turun dari 5,95% (2021) menjadi 4,32% (2025), lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang bergerak dari 6,49% ke 4,74% pada periode yang sama. Di antara provinsi sekitar, Jawa Barat mencatat TPT tertinggi namun juga mengalami penurunan signifikan (dari 9,82% menjadi 6,66%), sedangkan Jawa Timur menunjukkan penurunan paling konsisten hingga mencapai 3,71% pada 2025. Secara keseluruhan, tren menurun ini mencerminkan perbaikan penyerapan tenaga kerja pasca-pandemi dan pemulihan aktivitas ekonomi regional.



Gambar 1.13 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021–2025 (%)

1.4.4 Kemiskinan

Indikator kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang terefleksi melalui angka kemiskinan menunjukkan tren positif yang konsisten menurun selama periode 2021–2025. Per September 2025, prevalensi penduduk miskin tercatat sebesar 9,39% (setara 3.344,82 ribu jiwa), mengalami reduksi sebesar 0,19% atau

sebanyak 51,52 ribu jiwa dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berada pada angka 9,58%.

Secara spasial, dinamika kemiskinan selama periode 2024–2025 menunjukkan performa yang kontras antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Perdesaan mencatatkan progres signifikan dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,58 poin persentase, yakni dari 10,45% (1.712,59 ribu jiwa) menjadi 9,87% (1.604,34 ribu jiwa). Sebaliknya, wilayah perkotaan justru mengalami eskalasi tipis, di mana prevalensi penduduk miskin meningkat dari 8,83% (1.683,75 ribu jiwa) menjadi 8,99% (1.740,48 ribu jiwa).

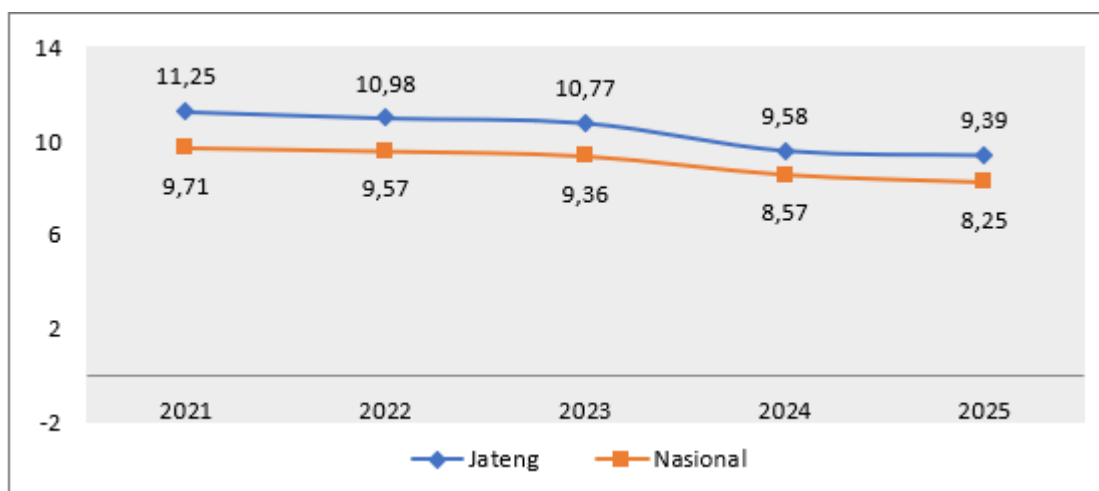
Tabel 1.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Penduduk Miskin					
	(Ribu Orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2021	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25
2022	1.852,17	2.006,06	3.858,23	10,02	12,05	10,98
2023*)	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77
2024	1.683,75	1.712,59	3.396,34	8,83	10,45	9,58
2025	1.740,48	1.604,34	3.344,82	8,99	9,87	9,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021-2025 (Rilis Periode September)

Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Secara komparatif, prevalensi kemiskinan Jawa Tengah masih melampaui angka nasional. Namun, jika ditinjau dari sisi dinamika perubahan, Jawa Tengah menunjukkan performa yang selaras dengan tren nasional selama periode lima tahun terakhir. Sinkronisasi pola ini menegaskan bahwa strategi intervensi kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berjalan inklusif dan memperkuat upaya de-eskalasi kemiskinan secara nasional.



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik.

Catatan: Data Periode Spetember. Kecuali angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Gambar 1.14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Dalam perspektif regional di Pulau Jawa, masih terdapat disparitas angka yang menempatkan Jawa Tengah pada posisi yang lebih tinggi dibanding Jawa Barat dan

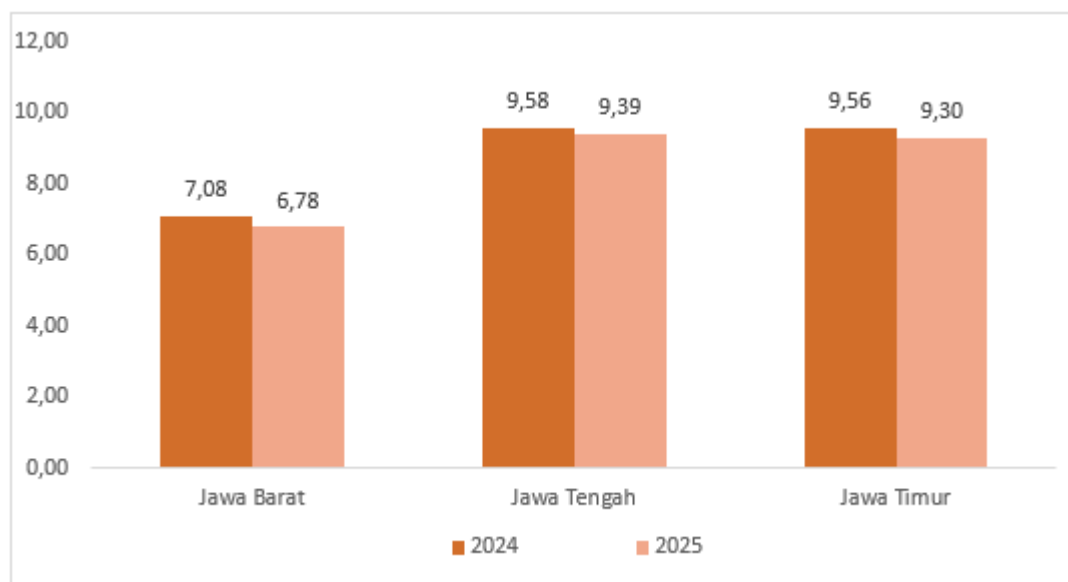
Jawa Timur. Menyikapi hal tersebut, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih presisi dan berbasis data mikro guna mempercepat laju penurunan kemiskinan agar lebih kompetitif dan setara dengan standar kesejahteraan regional. Hal ini mengindikasikan perlunya akselerasi kebijakan yang lebih intensif guna mengejar ketertinggalan capaian indikator kesejahteraan di tingkat regional.

Tabel 1.9 Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2024 dan 2025

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		Persentase	
		2024	2025	2024	2025
1	Jawa Barat	3.668,35	3.550,71	7,08	6,78
2	Jawa Tengah	3.396,34	3.344,82	9,58	9,39
3	Jawa Timur	3.893,82	3.804,29	9,56	9,30

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 (Rilis Periode September)

Dinamika kemiskinan di Pulau Jawa periode ini ditandai dengan kontraksi angka kemiskinan di seluruh wilayah. Jawa Barat memimpin akselerasi penurunan sebesar 0,30 poin persentase, sementara Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan progresivitas yang stabil dengan penurunan masing-masing sebesar 0,26 poin, dan 0,19 poin persentase. Capaian Jawa Tengah ini menjadi sinyal positif keberlanjutan program kesejahteraan daerah yang mampu menjaga ritme penurunan selaras dengan tren provinsi besar lainnya di Jawa.

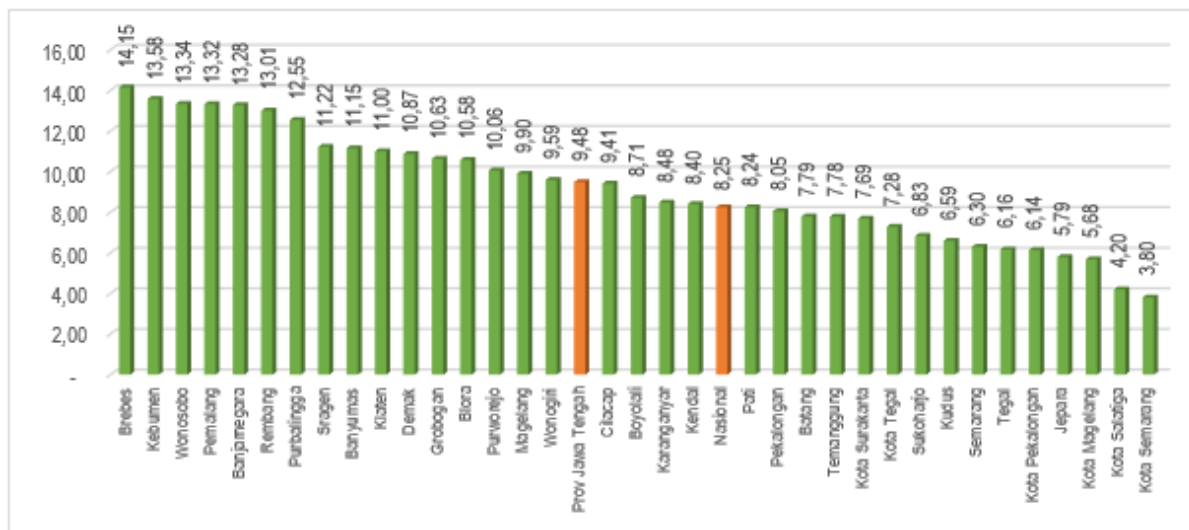


Gambar 1.15 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa

Persebaran penduduk miskin 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan performa yang beragam berdasarkan ambang batas (*threshold*) provinsi dan nasional. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, di mana angka kemiskinan Jawa Tengah berada pada level 9,48% dan Nasional di level 8,47%, pemetaan wilayah tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 16 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Sragen, Klaten, Banyumas, Demak, Grobogan, Blora, Purworejo, Magelang, dan Wonogiri;

2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 3 kabupaten meliputi Kabupaten Cilacap, Karanganyar, dan Boyolali;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 16 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Kendal, Pati, Pekalongan, Batang, Temanggung, Kota Surakarta, Kota Tegal, Sukoharjo, Kudus, Semarang, Tegal, Kota Pekalongan, Jepara, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

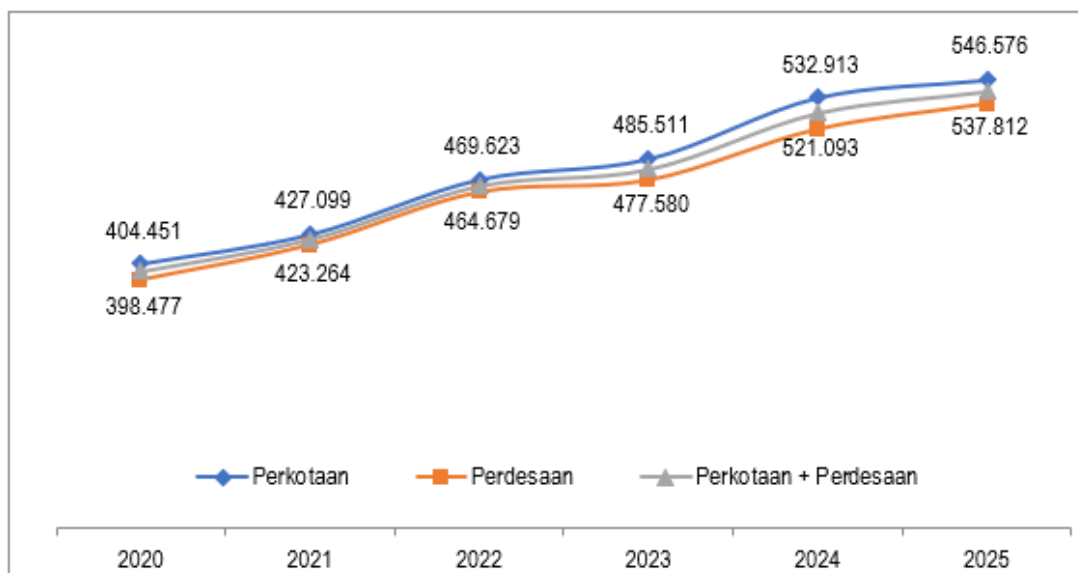


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Maret 2025

Gambar 1.16 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi

Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp537.812,00 per kapita per bulan, merepresentasikan eskalasi sebesar 9,11% dibandingkan periode 2024 yang berada pada angka Rp521.093,00.

Secara spasial, instrumen pengukur kemiskinan di wilayah perkotaan mengalami apresiasi sebesar 2,56% menjadi Rp546.576,00. Sementara itu, wilayah perdesaan mencatatkan kenaikan yang lebih progresif, yakni sebesar 3,86% hingga mencapai Rp527.934,00. Sebagaimana terjustifikasi dalam Gambar 1.17, tren GK menunjukkan pola pertumbuhan yang linear dari tahun ke tahun, yang merefleksikan adanya peningkatan standar biaya kebutuhan hidup minimum di masyarakat.



Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2025, diolah.

Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 dan 2025 periode Maret.

Gambar 1.17 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2025

Evaluasi terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Jawa Tengah mengonfirmasi adanya perbaikan struktur kesejahteraan penduduk miskin. Meskipun sempat terkoreksi naik pada masa pandemi (2021) ke level 1,938, Jawa Tengah berhasil melakukan pemulihan struktural dengan menekan indeks P1 hingga menyentuh angka 1,557 pada tahun 2025. Penurunan dari 1,601 (2024) ke 1,557 (2025) mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan perlindungan sosial di Jawa Tengah semakin efektif dalam mendekatkan daya beli kelompok rentan menuju standar kebutuhan minimum.

Apabila ditinjau berdasarkan stratifikasi wilayah *urban* dan *rural*, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2025 menunjukkan adanya disparitas struktural yang cukup nyata. Nilai P1 di wilayah pedesaan tercatat sebesar 1,670, angka yang secara signifikan masih melampaui indeks perkotaan yang berada pada level 1,461. Besaran ini merefleksikan bahwa magnitudo kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan di zona rural jauh lebih lebar dibandingkan dengan di kawasan urban.

Selain aspek kedalaman, dimensi kemiskinan juga terefleksi melalui Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) yang memotret ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Setelah sempat mengalami eskalasi dari 0,431 pada tahun 2020 menjadi 0,459 di periode 2021, indeks P2 Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren de-eskalasi yang progresif. Penurunan mulai terakselerasi dari 0,422 (2022) dan 0,415 (2023), hingga terkoreksi signifikan ke angka 0,365 pada tahun 2024. Kondisi ini terus membaik pada tahun 2025 dengan penurunan menjadi 0,354, yang mengindikasikan semakin mengecilnya ketimpangan ekonomi di kelompok masyarakat paling rentan.

Potret Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) Jawa Tengah mengonfirmasi bahwa masyarakat rentan di pedesaan menghadapi distorsi ekonomi yang lebih dalam. Dengan nilai P2 pedesaan yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perkotaan termasuk capaian 0,375 berbanding 0,337 pada periode sebelumnya

terlihat adanya variabilitas pengeluaran yang lebih tajam di wilayah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan internal di kelompok penduduk miskin desa jauh lebih persisten dibandingkan dengan dinamika di area perkotaan.

Tabel 1.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2025

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	1,611	2,073	1,835	0,385	0,479	0,431
2021	1,746	2,147	1,938	0,419	0,502	0,459
2022	1,640	1,879	1,753	0,407	0,439	0,422
2023	1,673	1,835	1,749	0,410	0,420	0,415
2024	1,497	1,723	1,601	0,347	0,386	0,365
2025	1,461	1,670	1,557	0,337	0,375	0,354

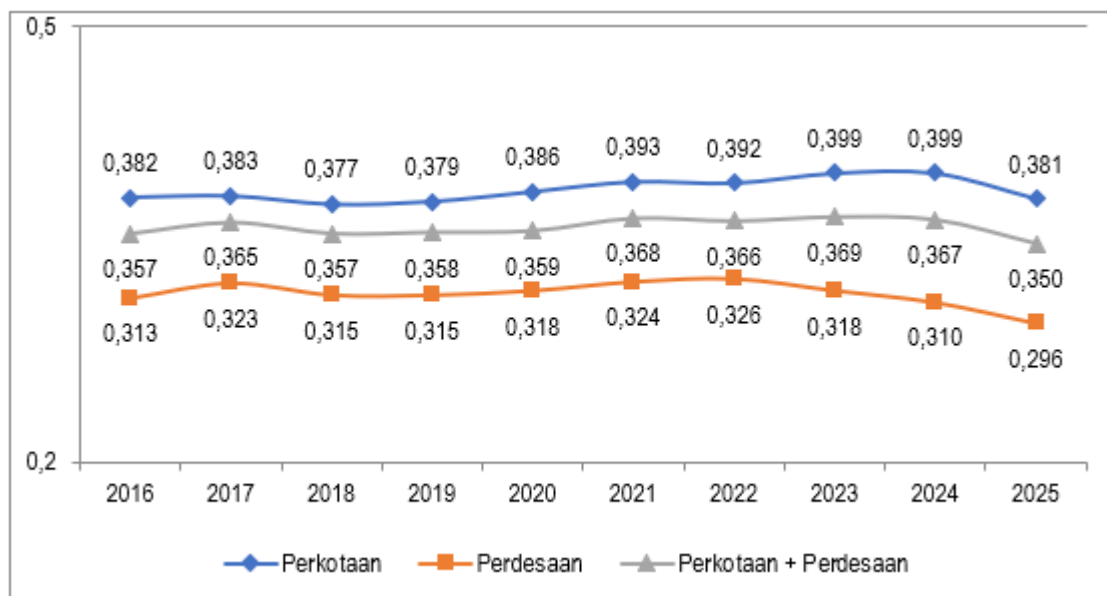
Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2025, diolah.

Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

1.4.5 Rasio Gini

Evaluasi terhadap Rasio Gini Jawa Tengah mengonfirmasi bahwa distribusi pendapatan masyarakat masih terjaga dalam rentang disparitas yang moderat. Meskipun sempat mengalami tekanan distribusi yang puncaknya terekam pada Maret 2023 (0,369), Jawa Tengah berhasil melakukan remanajemen distribusi pendapatan secara efektif. Hal ini terbukti dari penurunan indeks secara beruntun menjadi 0,367 pada 2024 dan semakin melandai ke level 0,350 pada tahun 2025, yang merefleksikan penguatan inklusivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Potret ketimpangan spasial per September 2025 menunjukkan bahwa derajat disparitas pengeluaran masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (0,381) dibandingkan perdesaan (0,296). Sementara perdesaan menunjukkan tren perbaikan melalui penurunan sebesar 0,014 poin, wilayah perkotaan justru sebaliknya. Hal ini memberikan sinyal perlunya penguatan kebijakan distribusi pendapatan yang lebih menyasar kelompok marjinal di kawasan urban guna menekan gap ekonomi yang lebih lebar tersebut.



Sumber: Data Susenas BPS Jawa Tengah, 2025 (diolah)

Gambar 1.18 Rasio Gini Jawa Tengah Menurut Wilayah, 2016–2025

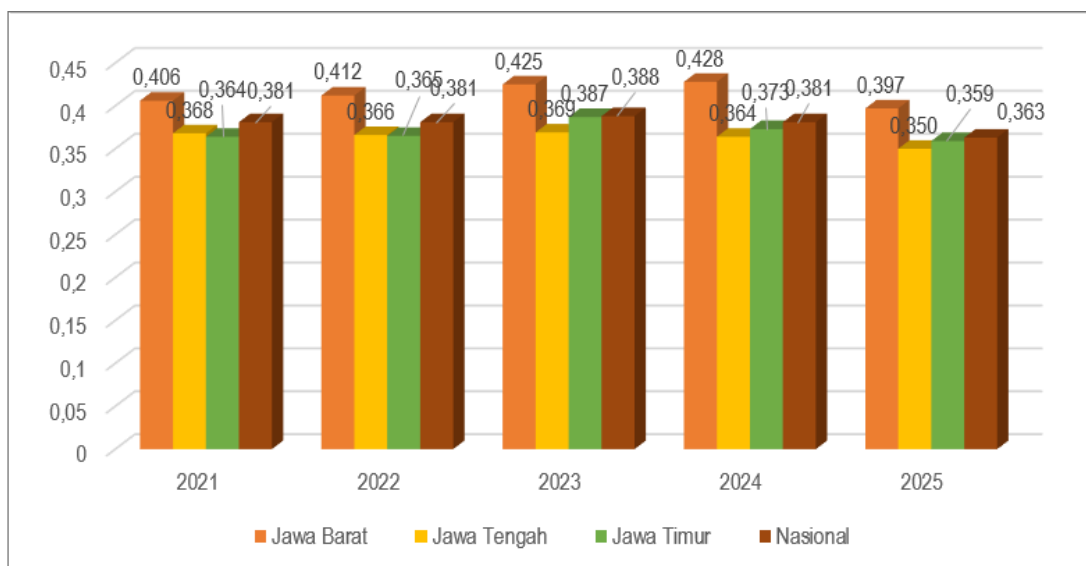
Dinamika struktur ekonomi di Pulau Jawa periode 2024–2025 ditandai dengan konvergensi perbaikan distribusi pengeluaran di tiga provinsi penyangga ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa Jawa Tengah berhasil menekan rasio Gini hingga menyentuh level 0,350 pada September 2025, sebuah capaian yang lebih progresif dibandingkan Jawa Timur (0,359) dan Jawa Barat (0,397). Penurunan indeks pada Gambar 1.18 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah kian bersifat partisipatif, dimana kelompok masyarakat kelas bawah mulai merasakan dampak penguatan daya beli secara lebih baik. Selaras dengan tren penurunan rasio gini Nasional, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mencatatkan penurunan tingkat ketimpangan secara konsisten dalam 2 tahun terakhir, hal ini menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan di Provinsi tersebut.

Tabel 1.11 Perbandingan Gini Rasio Provinsi di Jawa Tahun 2024-2025

No	Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jawa Barat	0,406	0,412	0,425	0,428	0,397
2	Jawa Tengah	0,368	0,366	0,369	0,364	0,350
3	Jawa Timur	0,364	0,365	0,387	0,373	0,359
4	Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381	0,363

Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2025, data tahun 2023 periode Maret

Penurunan angka gini rasio secara sederhana bermakna tingkat ketimpangan ekonomi di suatu wilayah berkurang. Dengan kata lain, distribusi pendapatan atau pengeluaran antar penduduk menjadi lebih merata.

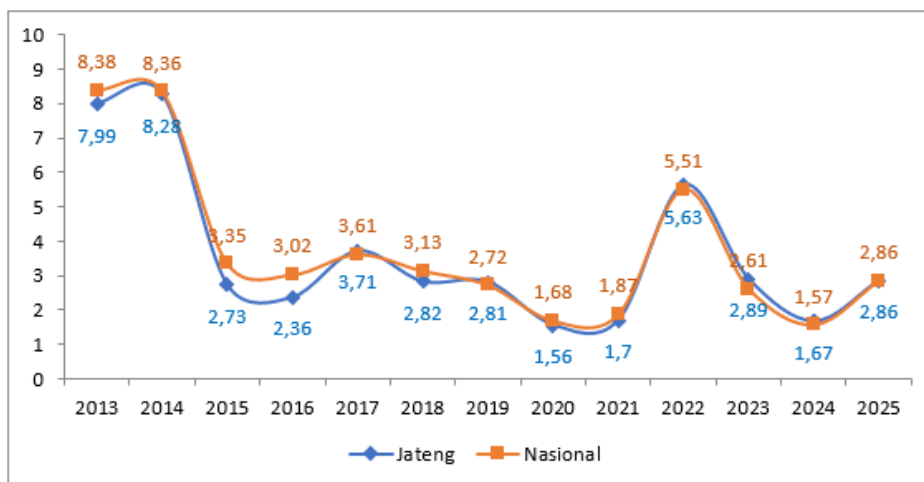


Gambar 1.19 Perbandingan Rasio Gini Provinsi di Jawa dengan Nasional Tahun 2021-2025

1.4.6 Inflasi/Perubahan Harga

Dinamika harga berbagai komoditas di Jawa Tengah pada Oktober 2025 secara *year-on-year* (yoy) menunjukkan tren eskalasi. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di sembilan kabupaten/kota, tercatat inflasi *year-on-year* (yoy) sebesar 2,72% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,98. Meskipun angka ini merefleksikan tekanan harga yang lebih tinggi dibandingkan capaian Desember 2024 yang berada di level 1,67%, tingkat inflasi periode ini tetap terjaga dalam koridor yang terkendali dan tidak melampaui volatilitas tinggi seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada periode 2022, baik inflasi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional mengalami akselerasi yang signifikan hingga melampaui ambang batas 5%. Fenomena ini dipicu oleh transmisi tekanan harga global (*imported inflation*), disrupsi rantai pasok komoditas pangan, serta dampak transmisi dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Namun, melalui orkestrasi kebijakan moneter dan fiskal yang efektif, laju inflasi berhasil diredam hingga kembali ke dalam sasaran target di bawah 3% sepanjang periode 2023–2025.



Gambar 1.20 Perbandingan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional 2013 - 2025 (%)

Tren penurunan inflasi di Jawa Tengah hingga tahun 2025 memiliki pola yang koheren dengan tren penurunan nasional. Karakteristik inflasi Jawa Tengah yang koheren dengan skala nasional mengindikasikan bahwa stabilitas harga di tingkat provinsi merupakan determinan krusial yang memengaruhi arah kebijakan dan efektivitas kinerja inflasi nasional secara komprehensif.

Efektivitas pengendalian inflasi di Jawa Tengah merupakan manifestasi dari sinergitas multisektoral antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Bulog, BUMD, serta pemangku kepentingan terkait yang terhimpun dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Strategi stabilisasi harga ini diimplementasikan melalui pendekatan intervensi hulu-hilir yang komprehensif. Pada aspek hulu (*supply-side*), fokus diarahkan pada penguatan produktivitas melalui distribusi bantuan benih, optimalisasi pupuk bersubsidi, serta modernisasi pertanian melalui pembangunan green house. Sementara pada aspek hilir (*demand-side*), langkah mitigasi dilakukan melalui penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pengawasan ketat terhadap skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga aksesibilitas harga di tingkat konsumen.

Inovasi dalam pengendalian inflasi di Jawa Tengah antara lain melalui BUMD Jateng Peduli Inflasi, inisiasi pembentukan ekosistem/distribusi cabai/bawang merah, perluasan area *greenhouse*, penguatan *Early Warning System* harga komoditi, gerakan 1.000 petani peduli inflasi, serta kios TPID Pandawa Kita.

Jawa Tengah mengukuhkan dominasinya dalam tata kelola inflasi regional dengan meraih predikat Provinsi Berkinerja Terbaik se-Jawa–Bali pada TPID Award. Penghargaan ini menegaskan kinerja TPID Jawa Tengah dalam menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah guna menekan angka inflasi hingga tetap berada dalam koridor sasaran. Prestasi ini menjadi katalis positif bagi iklim investasi dan penguatan fondasi ekonomi makro di wilayah Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan angka inflasi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta tingkat inflasi nasional di Indonesia, terlihat bahwa pergerakannya menunjukkan pola yang selaras dan konsisten. Keselarasan tersebut sebagaimana tergambar secara komprehensif pada tabel dan ilustrasi grafis yang disajikan berikut ini.

Tabel 1.12 Perbandingan Inflasi Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2021-2025

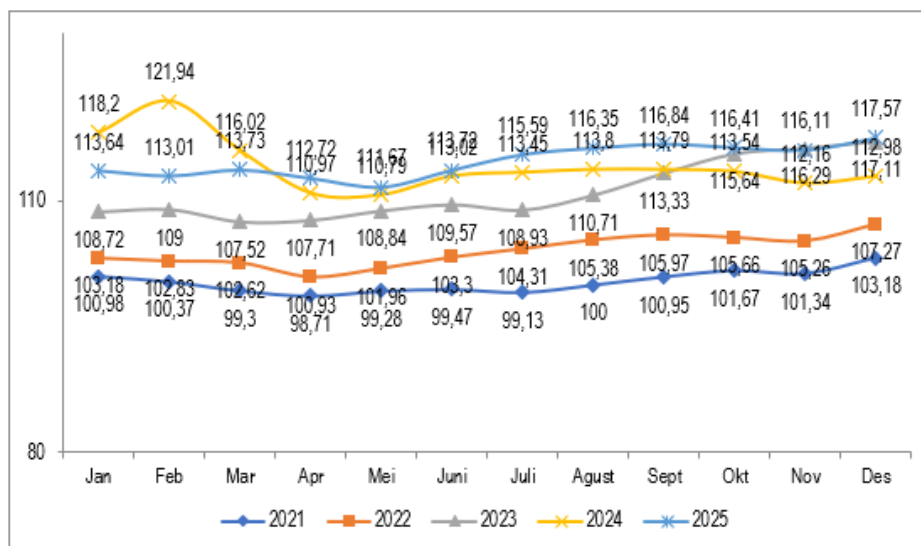
No	Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jawa Barat	1,69	6,04	2,48	1,64	2,63
2	Jawa Tengah	1,70	5,63	2,89	1,67	2,72
3	Jawa Timur	2,45	6,52	2,92	1,51	2,93
4	Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

1.4.7 Nilai Tukar Petani (NTP)

Analisis terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah periode Desember 2024 mengungkap adanya ekspansi daya tukar ke level 112,98. Kenaikan tipis namun signifikan sebesar 0,82% ini merupakan implikasi langsung dari peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,56%. Angka NTP yang tetap bertahan di atas ambang batas 100 menunjukkan bahwa secara struktural, surplus ekonomi masih

dinikmati oleh rumah tangga tani Jawa Tengah sebagai dampak dari stabilitas harga komoditas di pasar.

Secara visual, pada gambar dibawah menunjukkan tren NTP bulanan Jawa Tengah pada Januari 2020-Desember 2025. Selama bulan Januari-Desember 2023 NTP Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pola serupa juga terjadi di tahun 2024 hingga Agustus 2024 dengan puncak NTP tertinggi terjadi pada Februari 2024. Namun pada September 2024, pola NTP mulai menunjukkan penurunan dan tren penurunan masih berlangsung hingga akhir tahun 2024 meskipun di Desember 2024 terjadi sedikit peningkatan yang didorong oleh peningkatan Indeks yang diterima petani yang meningkat 1,56% dibanding November 2024. Sementara di tahun 2025, cenderung stabil selama akhir tahun.

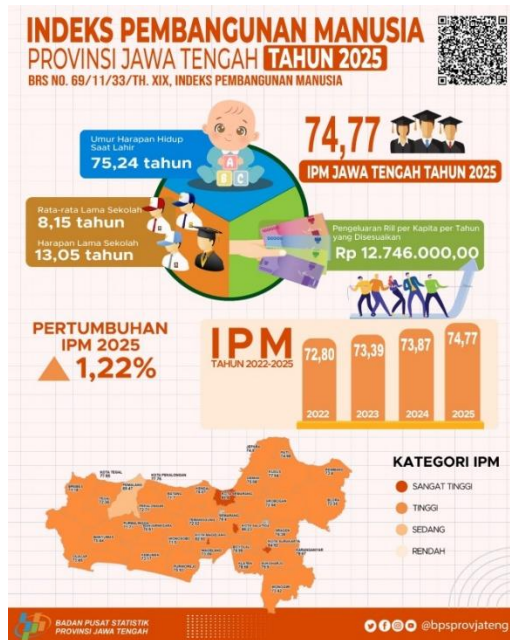


Sumber: Data BPS Jawa Tengah, 2025 (diolah)

Gambar 1.21 Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Dalam upaya penguatan Nilai Tukar Petani (NTP), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan instrumen kebijakan multidimensi yang berfokus pada mitigasi risiko dan efisiensi produksi. Strategi perlindungan sosial disalurkan melalui skema asuransi bagi 10.000 nelayan, sementara penguatan permodalan diakomodasi melalui fasilitasi subsidi suku bunga kredit guna memperluas akses finansial petani.

1.4.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



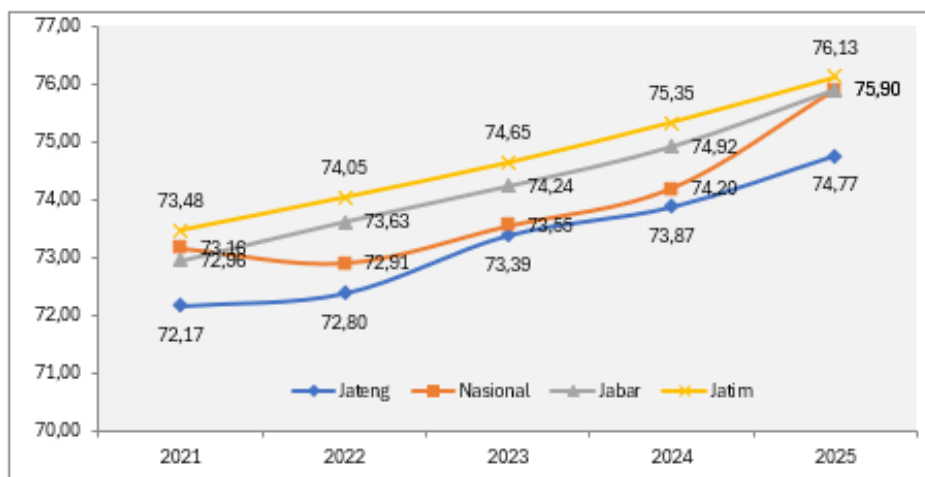
Pemerintah secara konsisten melakukan reposisi kebijakan dengan menitikberatkan pada akselerasi kualitas sumber daya manusia sebagai determinan utama pembangunan jangka panjang. Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu daerah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjadi parameter dalam menilai kualitas sumber daya manusia. IPM mencakup tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga memungkinkan perbandingan antarwilayah secara obyektif.

Dalam penghitungan IPM, tahun 2020 hingga 2023 menggunakan 2 metode, khususnya pada penghitungan komponen Umur Harapan Hidup (UHH) berbasis data hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dan data hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020), setelahnya menggunakan *Long Form* SP2020.

Hasil penghitungan UHH Jawa Tengah tahun 2025 dengan basis data hasil *Long Form* SP2020 tercatat sebesar 74,77 tahun meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 73,87 tahun. Pada level provinsi hasil penghitungan UHH menunjukkan angka yang sama, namun di level Kabupaten Kota terlihat ada perbedaan angka hasil penghitungan UHH.

Sedangkan untuk penghitungan komponen Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah menggunakan sumber yang sama yaitu Survei Sosial Ekonomi (Susenans).

Visualisasi gambar 7 menunjukkan bahwa trend IPM baik di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur selaras dengan akselerasi di tingkat nasional. Pada tahun 2025, IPM Jawa Tengah mencatatkan eskalasi signifikan sebesar 0,90 poin menjadi 74,77 dari sebelumnya 73,87. Semakin meningkatnya nilai IPM ini merefleksikan bahwa kualitas pembangunan manusia di Jawa Tengah semakin lebih baik, sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara nasional.



Sumber: Data BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 1.22 Grafik Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional 2020-2025

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, IPM seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat dibanding tahun lalu. Urutan IPM terendah ditempati oleh Kabupaten Pemalang (69,47), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Salatiga (86,23). Empat kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) yaitu Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang.

Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) pada tahun 2025 bertambah menjadi 30 dari tahun sebelumnya sebanyak 29 Kabupaten/Kota yaitu; Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Sedangkan kabupaten dengan status capaian “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) ada 1, yaitu Pemalang. Sementara itu, wilayah di Jawa Tengah dengan status pembangunan manusia “rendah” ($IPM < 60$) tidak ada.

Data lengkap IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.13 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021 – 2025

No	Kab/Kota	IPM				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Cilacap	70,66	71,22	72,04	72,55	73,45
2	Banyumas	72,59	73,30	73,96	74,52	75,44
3	Purbalingga	69,41	69,80	70,51	70,97	71,71
4	Banjarnegara	67,87	68,62	69,16	69,62	70,61
5	Kebumen	70,56	71,29	71,88	72,48	73,17
6	Purworejo	73,06	73,67	74,35	75,16	75,93
7	Wonosobo	69,24	69,69	70,18	70,63	71,50
8	Magelang	70,23	70,96	71,56	72,10	73,09
9	Boyolali	74,40	74,97	75,41	75,96	76,95
10	Klaten	76,12	76,95	77,59	78,16	78,68
11	Sukoharjo	77,13	77,94	78,65	79,30	79,90

No	Kab/Kota	IPM				
		2021	2022	2023	2024	2025
12	Wonogiri	70,49	71,04	71,97	72,54	73,42
13	Karanganyar	75,99	76,58	77,31	78,11	78,67
14	Sragen	74,08	74,65	75,10	75,53	76,38
15	Grobogan	70,41	70,97	71,49	72,02	72,94
16	Blora	69,37	69,95	70,63	71,42	72,35
17	Rembang	70,43	71,00	71,89	72,53	73,40
18	Pati	72,28	73,14	73,59	74,10	74,98
19	Kudus	75,16	75,89	76,71	77,21	77,94
20	Jepara	72,36	73,15	73,85	74,32	74,90
21	Demak	72,57	73,36	74,07	74,57	75,08
22	Semarang	74,24	74,67	75,13	75,67	76,40
23	Temanggung	69,88	70,77	71,33	71,86	72,52
24	Kendal	72,50	73,19	73,86	74,34	75,07
25	Batang	68,92	69,45	70,20	70,73	71,70
26	Pekalongan	70,11	70,81	71,45	71,95	72,71
27	Pemalang	66,64	67,26	68,08	68,65	69,47
28	Tegal	69,67	70,42	71,12	71,70	72,36
29	Brebes	68,10	68,81	69,71	70,18	71,18
30	Kota Magelang	79,43	80,39	81,17	82,15	82,92
31	Kota Surakarta	82,62	83,08	83,54	84,41	84,92
32	Kota Salatiga	83,60	84,35	84,99	85,72	86,23
33	Kota Semarang	83,55	84,08	84,43	85,24	85,80
34	Kota Pekalongan	75,40	75,90	76,71	77,21	77,76
35	Kota Tegal	75,59	76,21	77,06	77,50	77,95
Jawa Tengah		72,17	72,80	72,80	73,39	74,77

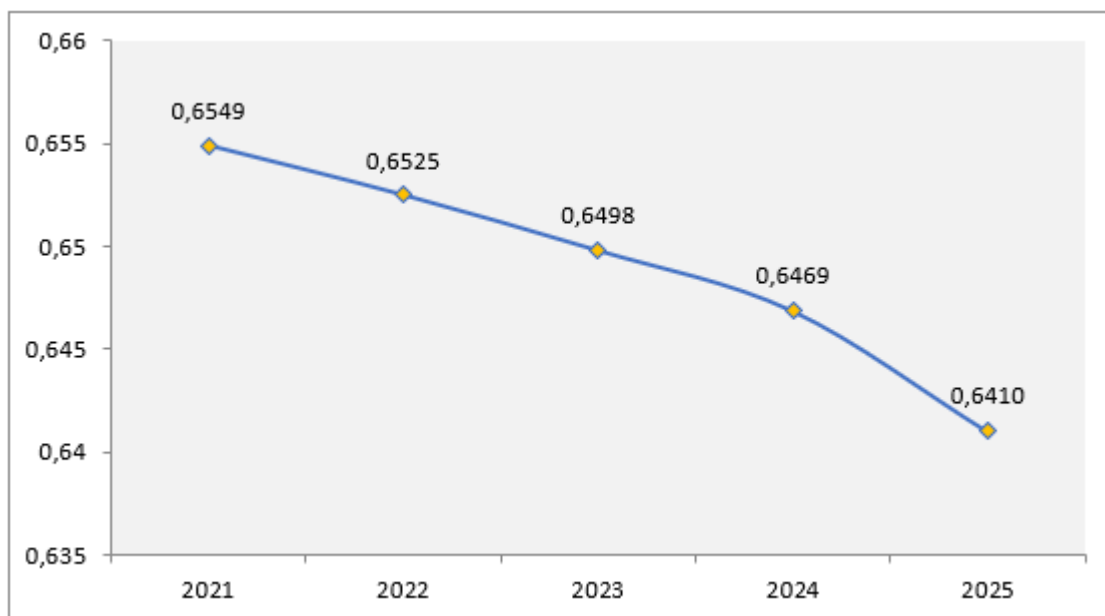
Sumber: Data BPS Jateng, 2023 (diolah)

*) Data Hasil Proyeksi SP2010

**) Data Hasil Proyeksi SP2020

1.4.9 Indeks Williamson

Evaluasi terhadap ketimpangan regional melalui parameter Indeks Williamson mengonfirmasi adanya tren perbaikan struktur ekonomi di Jawa Tengah. Kecenderungan penurunan indeks dalam lima tahun terakhir menjadi sinyal positif atas efektivitas kebijakan pemerataan infrastruktur dan stimulasi ekonomi daerah yang berhasil menekan polarisasi pertumbuhan pada pusat-pusat ekonomi tertentu.



Sumber: Data BPS Jawa Tengah, 2025 (diolah)

Gambar 1.23 Perkembangan Indeks Williamson Jawa Tengah Tahun 2014 – 2025

Variabel utama yang membentuk profil Indeks Williamson di Jawa Tengah mencakup agglomerasi investasi dan disparitas ketersediaan infrastruktur strategis. Wilayah dengan ekosistem industri yang mapan secara alami menciptakan gap pendapatan dengan wilayah agraris yang masih berkembang. Oleh karena itu, agenda transformasi ekonomi wilayah diorientasikan pada penguatan resiliensi ekonomi lokal dan penyetaraan standar layanan dasar, guna mengonversi pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi menjadi pertumbuhan yang partisipatif dan inklusif

1.5 DATA KEPEGAWAIAN DAERAH

Dalam pelaksanaan program pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah, birokrasi sebagai mesin penggerak pemerintahan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Transformasi birokrasi yang semakin dinamis dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan agenda strategis pemerintah, sehingga dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan tepat sasaran, digitalisasi layanan menjadi langkah yang sangat krusial. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan masyarakat dituntut untuk memiliki pola pikir digital agar mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Sebagai motor penggerak birokrasi dan pelayanan publik, pengelolaan manajemen ASN juga diarahkan menuju sistem digital, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN. Namun demikian, pelaksanaan manajemen ASN masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketersediaan dan kualitas ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik. Pelaksanaan pengadaan ASN saat ini masih dengan pertumbuhan ASN yang zero growth, artinya jumlah ASN yang direkrut tidak sebanding dengan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun. Permasalahan lain yang dihadapi adalah implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Meskipun dilakukan untuk memperkuat profesionalisme ASN, kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif yang signifikan. Dalam pelaksanaannya, justru muncul penambahan beban anggaran daerah karena tunjangan jabatan

fungsional lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan manajerial yang sebelumnya melekat pada jabatan Administrator dan Pengawas

Berdasarkan dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, tujuan jangka menengah organisasi adalah “Mewujudkan Meritokrasi dalam Manajemen ASN”, sehingga dalam kebijakan manajemen ASN di Jawa Tengah mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa diskriminasi. Proses pengadaan ASN/rekrutmen, promosi, dan pengelolaan karier dilakukan secara adil dan setara, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, ataupun status lainnya yang pada akhirnya akan melahirkan ASN Provinsi Jawa Tengah yang profesional dan kompeten. Dengan demikian, berkurangnya jumlah ASN diharapkan tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan layanan kepegawaian yang cepat, efektif, dan terintegrasi.

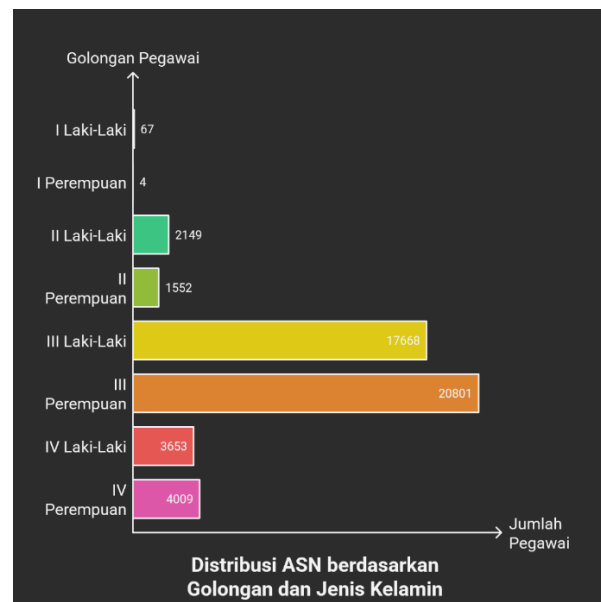
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diharapkan menjadi momentum baru dalam penguatan Manajemen ASN melalui sejumlah agenda strategis, antara lain digitalisasi manajemen ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, percepatan pengembangan kompetensi, serta integrasi sistem informasi kepegawaian. Harapannya seluruh agenda transformasi tersebut mampu mendukung terwujudnya Smart ASN Jawa Tengah sebagai fondasi birokrasi berkelas dunia menuju Indonesia Emas 2045.

Terkait perkembangan laporan Pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jumlah pegawai Non-ASN per Desember 2025 yang terdata oleh BKN mencapai 14.350 orang, dengan 4.291 orang di antaranya masuk kategori Non-ASN Prioritas 1. Pengadaan ASN Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui tiga jenis mekanisme, yaitu Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2024; Pengadaan PPPK Teknis dan Guru (dalam dua tahap untuk Formasi Tahun 2024); serta PPPK Paruh Waktu untuk Formasi Tahun 2025.

Mekanisme seleksi CPNS dilakukan dalam satu tahap, sedangkan seleksi PPPK dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama diikuti oleh pelamar prioritas, eks-THK II, dan tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Tahap kedua diperuntukkan bagi tenaga Non-ASN yang telah bekerja minimal dua tahun namun tidak termasuk dalam pendataan BKN, serta pelamar Pendidikan Profesi Guru (PPG). Adapun untuk PPPK Paruh Waktu Formasi Tahun 2025, sejumlah 13.111 Pegawai telah resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 11 Desember 2025. Dengan dilantiknya PPPK Paruh Waktu tersebut, diharapkan dapat menunjang optimalisasi pelayanan publik di Jawa Tengah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, didalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 didukung pegawai yang berstatus ASN sejumlah 49.903 orang. Jumlah ASN tersebut terdiri dari Laki-laki sebanyak 23.537 orang (47,2%) dan Perempuan sebanyak 26.366 orang (52,8%).

Selanjutnya jika dilihat dari golongan ASN, ASN golongan III adalah yang terbanyak yaitu sejumlah 38.469 orang (77,1%), disusul ASN golongan IV sebanyak 7.662 orang (15,4%) dan ASN golongan II sebanyak 3.701 orang (7,4%) dan golongan I sebanyak 71 orang (0,1%). Rincian lebih lanjut mengenai jumlah ASN berdasarkan Golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 1.10, sebagai berikut:



Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.24 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Selanjutnya profil ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, apabila dilihat berdasarkan pendidikan, maka proporsi yang paling banyak adalah berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 38.202 orang (76,7%), disusul kemudian berpendidikan Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 5.586 orang (10,6%) dan ASN berpendidikan D-III sebanyak 2.987 orang (6,2%) . Rincian lebih lanjut mengenai jumlah ASN berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.14 , sebagai berikut:

Tabel 1.14 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SD	84	0,2	11	0	95	0,2
2	SLTP	239	0,5	12	0	251	0,5
3	SLTA	1.989	4	664	1,3	2.653	5,6
4	D-I	8	0	8	0	16	0
5	D-II	9	0	12	0	21	0
6	D-III	1.050	2,1	1.937	3,9	2.987	6,2
7	S-1	17.270	34,6	20.932	41,9	38.202	76,7
8	S-2	2.829	5,7	2.757	5,5	5.586	10,6
9	S-3	59	0,1	33	0,1	92	0,2
TOTAL		23.537	47,2	26.366	52,8	49.903	100

Sumber Data : BKD Provinsi Jawa Tengah

Apabila dilihat dari usia ASN, maka usia ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang paling dominan berusia 41 - 45 Th yaitu sebanyak 8.283 orang (16,6%), disusul usia 31 - 35 Th yaitu sebanyak 8.191 orang (16,4%), kemudian ASN usia 46 - 50 Th sebanyak 7.861 orang (15,8%). Secara rinci jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.12, sebagai berikut:

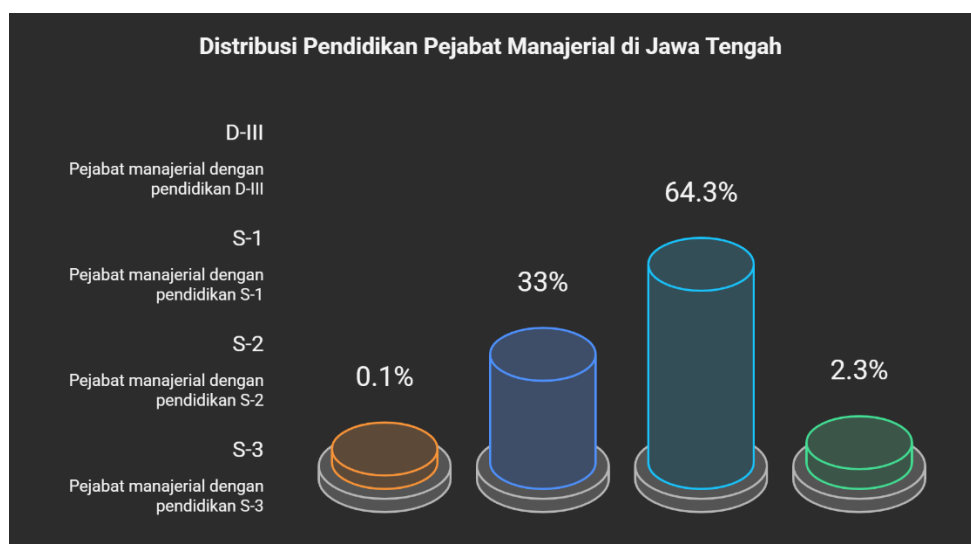
Tabel 1.15 Jumlah PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	21 s.d 25 Tahun	71	0,1	212	0,4	283	0,6
2	26 s.d 30 Tahun	1,024	2,1	2.013	4	3.037	6,1
3	31 s.d 35 Tahun	3.595	7,2	4.596	9,2	8.191	16,4

4	36 s.d 40 Tahun	3.575	7,2	3.969	8	7.544	15,1
5	41 s.d 45 Tahun	3.840	7,7	4.443	8,9	8.283	16,6
6	46 s.d 50 Tahun	3.702	7,4	4.159	8,3	7.861	15,8
7	51 s.d 55 Tahun	3.956	7,9	3.849	7,7	7.805	15,6
8	> 55 Tahun	3.774	7,6	3.125	6,3	6.899	13,8
TOTAL		23.537	47,3	26.270	52,7	49.877	100

Sumber Data : BKD Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, diperlukan aspek manajerial. Dilihat dari karakteristik pejabat manajerial dikaitkan dengan pendidikannya, maka yang pejabat manajerial di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang paling dominan berpendidikan Pasca Sarjana (S-2), yaitu sebanyak 576 orang (64,3%), disusul kemudian berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 296 orang (33%) dan berpendidikan Doktor (S-3) sebanyak 21 orang (2,3%). Lebih rinci mengenai pendidikan pejabat manajerial berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 1.24, sebagai berikut:



Sumber Data: BKD Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.25 Jumlah Pejabat Manajerial berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari usia pejabat manajerial, maka pejabat manajerial berusia 46 - 55 Tahun adalah yang dominan, yaitu sebanyak 442 orang (49,3%), disusul kemudian berusia di atas 55 Tahun sebanyak 265 orang (29,6%) dan berusia 36 – 45 Tahun sebanyak 181 orang (20,2%) . Untuk melihat secara lebih detail mengenai usia pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1.16, sebagai berikut:

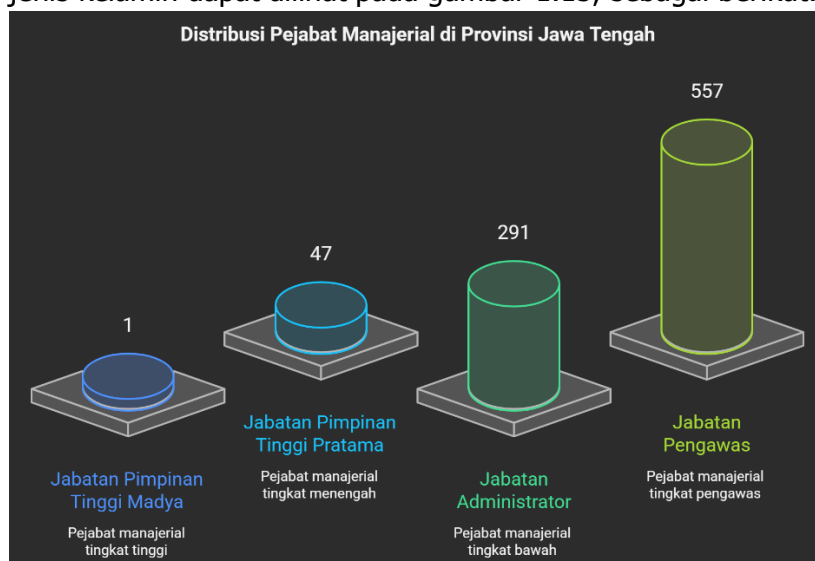
Tabel 1.16 Jumlah Pejabat Manajerial berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	< 35	7	0,8	1	0,1	8	0,9
2	36 - 45	124	13,8	57	6,4	181	20,2
3	46 - 55	280	31,3	162	18,1	442	49,3
4	>55	167	18,6	98	10,9	265	29,6
Total		578	64,5	318	35,5	896	100

Sumber Data : BKD Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya apabila dilihat dari tingkat jabatan dan jenis kelamin pejabat manajerial di lingkungan ASN Provinsi Jawa Tengah, yang terbanyak adalah Jabatan

Pengawas sebanyak 557 orang (62,2%) terdiri dari Laki laki sebanyak 349 orang (39%) dan Perempuan sebanyak 208 orang (23,2%), disusul Jabatan Administrator sebanyak 291 orang (32,5%) terdiri dari Laki-laki sebanyak 194 orang (21,7%) dan Perempuan sebanyak 97 orang (10,8%). Lebih rinci mengenai profil pejabat manajerial dikaitkan dengan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 1.15, sebagai berikut:



Sumber Data : BKD Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.26 Jumlah Pejabat Manajerial berdasarkan Tingkat Jabatan

Kemudian profil pejabat manajerial apabila dikaitkan dengan tingkat jabatan dan pendidikannya, maka pejabat manajerial berpendidikan Pasca Sarjana (S-2) yang paling dominan, yaitu sebanyak 576 orang (64,3%) yang terdiri dari Jabatan Pengawas sebanyak 301 orang (33,6%), Jabatan Administrator sebanyak 238 orang (26,6%) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 36 orang (4%). Kemudian berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 296 orang (33%), dengan rincian Jabatan Pengawas sebanyak 245 orang (27,3), Jabatan Administrator sebanyak 46 orang (5,1%) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 5 orang (0,6%). Untuk melihat lebih rinci mengenai profil pejabat manajerial di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jabatan manajerial dan pendidikannya dapat dilihat pada tabel 1.16, sebagai berikut:

Tabel 1.17 Jumlah Pejabat Manajerial berdasarkan Tingkat Jabatan dan Pendidikan

No	Pendidikan	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		Jabatan Administrator		Jabatan Pengawas		TOTAL	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	D-III	0	0	0	0	0	0	3	0,3	3	0,3
2	S-1	0	0	5	0,6	46	5,1	245	27,3	296	33
3	S-2	1	0,1	36	4	238	26,6	301	33,6	576	64,3
4	S-3	0	0	6	0,7	7	0,8	8	0,9	21	2,3
Total		1	0,1	47	5,2	291	32,5	557	62,2	896	100

Sumber Data : BKD Provinsi Jawa Tengah

1.6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.6.1 Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan sumber dana (*source of fund*) dalam menjalankan program kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD tanpa harus dibayar kembali yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi, Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD), Pendapatan Transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penerapan opsen mengurangi pendapatan secara angka, namun tidak secara fiskal karena di sisi belanja juga berkurang senilai bagi hasil pajak yang berubah skema melalui opsen tersebut. Hal ini tercermin pada Pendapatan Asli Daerah tetap sebagai menyumbang porsi terbesar dengan Pendapatan Pajak sebagai kontributor utama. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.27 Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dengan 2025

Dari gambar diatas, kontribusi Pendapatan Asli Daerah di tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan proporsi kontribusi ini lebih disebabkan karena adanya perbedaan skema pendapatan pajak daerah dengan diberlakukannya opsen. Penerapan skema tersebut juga memberi andil terhadap kebijakan penurunan target pendapatan pada tahun 2025, disamping fenomena lain seperti kebijakan dana transfer. Target pendapatan 2025 sejumlah Rp24.654.591.248.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.761.967.963.877,00 atau 96,38%. Realisasi ini mengalami penurunan 9,92% atau sejumlah Rp2.616.751.662.542,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Capaian pendapatan daerah secara rinci sebagai berikut:

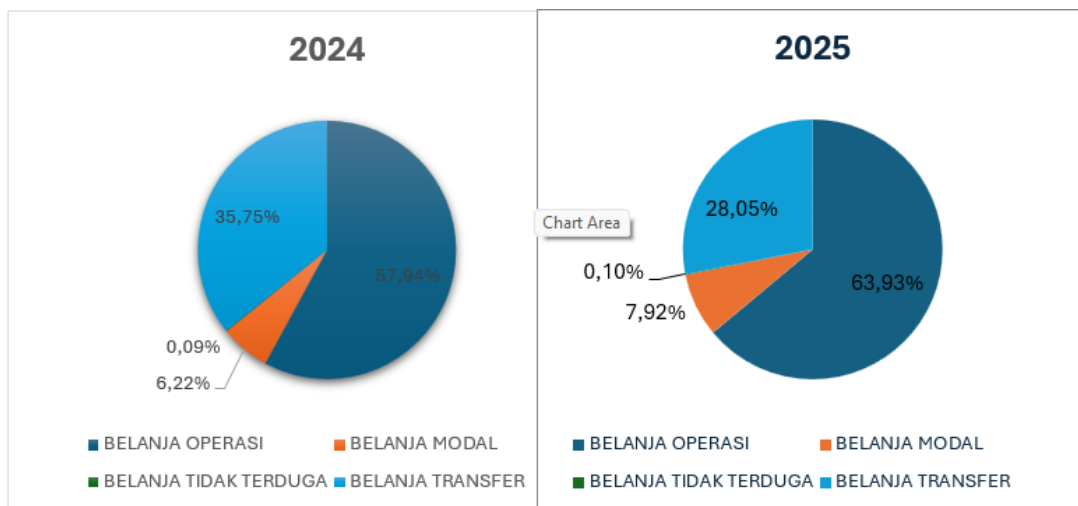
- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,37% dengan target sebesar Rp15.699.284.656.000,00 terealisasi sejumlah Rp14.973.130.864.336,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.677.806.049.168,00 atau 15,17% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Pajak Daerah tercapai 91,81%, mengalami penurunan 19,51% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Retribusi

Daerah tercapai 123,05%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan 15,29%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai 79,21%, mengalami penurunan 20,52% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tercapai 83,42%, mengalami mengalami penurunan 27,50% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Ketidaktercapaian pajak daerah Sebagian besar dikarenakan lesunya volume penjualan kendaraan baru sehingga berdampak pada target pajak kendaraan bermotor dari objek baru dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan tidaktercapainya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan skema yang diambil dalam rangka mengembalikan porsi kepemilikan menjadi lebih dari 51% di Bank Jateng, yaitu sebagian deviden dari Bank Jateng dikonversi menjadi saham.

- b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 ditargetkan Rp8.783.684.673,00 terealisasi Rp8.616.927.676.508,00 atau 98,10%, mengalami penurunan sejumlah Rp46.513.622.287,00 atau 0,54% apabila dibandingkan realisasi tahun 2024.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan Rp163.185.839.000,00 terealisasi Rp163.473.343.033,00 atau 100,18% dari target, mengalami peningkatan sejumlah Rp137.129.496.913,00 atau 520,54% apabila dibandingkan realisasi tahun 2024. Peningkatan ini terjadi karena terdapat pengembalian dana hibah yang sudah tidak digunakan lagi.

1.6.2 Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah merupakan setiap penggunaan dana (*use of fund*) untuk menjalankan program kegiatan yang telah tercantum pada APBD tanpa harus diterima kembali. Pada tahun 2025, anggaran belanja daerah mengalami penurunan sejumlah Rp3.335.238.707.000,00 atau 11,68% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan realisasi sejumlah Rp23.871.838.129.256,00 atau 94,61%. Penurunan anggaran belanja tersebut mayoritas dari perubahan skema belanja bagi hasil dengan opsen pajak daerah. Belanja operasi mendapat porsi terbesar, di ikuti belanja transfer yang berisi bantuan keuangan dan dana bagi hasil. Komposisi Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 tampak pada gambar berikut:



Gambar 1.28 Persandingan Komposisi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 dengan 2025

Komponen Belanja Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi digunakan untuk pelayanan sehari-hari pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi mengalami kenaikan realisasi jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sejumlah Rp16.131.580.750.000,00 terealisasi sejumlah Rp15.480.092.183.316,00 atau 95,96% mengalami penurunan sejumlah Rp603.773.118.648,00 atau 3,75% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024. Belanja Operasi terdiri dari: Belanja Pegawai terealisasi 94,92% mengalami peningkatan 0,54% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024, Belanja Barang dan Jasa terealisasi 96,20% mengalami peningkatan 1,15% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Subsidi terealisasi 99,02% mengalami peningkatan 777,97% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024, Belanja Hibah terealisasi 98,82% mengalami penurunan 25,60% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024, dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi 99,95% mengalami penurunan 27,61% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024.
- b. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sejumlah Rp1.998.205.719.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.795.558.675.999,00 atau 89,86% mengalami peningkatan sejumlah Rp62.474.579.005,00 atau 3,60% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.733.084.096.994,00.
- c. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sejumlah Rp25.000.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp7.192.800.000,00 atau 28,77%.
- d. Belanja Transfer dianggarkan sejumlah Rp7.076.818.456.000,00 terealisasi sejumlah Rp6.588.994.469.941,00 atau 93,11%, mengalami penurunan sejumlah Rp2.770.956.828.404,00 atau 29,60% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024. Penurunan pada realisasi belanja transfer Sebagian besar karena berubahnya skema belanja bagi hasil pajak daerah menjadi opsen bagi kabupaten/kota.

1.6.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 didapat dari SILPA tahun 2024 dan penerimaan kembali dana bergulir dengan target sejumlah Rp577.013.677.000,00 terealisasi sejumlah Rp577.049.291.379,00 atau 100,01%.

BAB 2

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor yang krusial dalam kemajuan suatu wilayah sehingga perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Perkembangan fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan meningkatnya kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan sumber pendanaan. Hal ini ditunjukkan adanya tantangan kemandirian fiskal, peluang peningkatan pendapatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, digitalisasi dan efisiensi belanja dengan tetap fokus pada *good governance* serta desentralisasi fiskal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih cermat dalam merencanakan dan memanfaatkan anggaran agar setiap belanja publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perencanaan dan target keuangan harus disusun secara realistis, transparan, dan berbasis data agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. APBD berperan strategis sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah dengan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penyusunan APBD mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar arah kebijakan fiskal sejalan dengan prioritas pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan bagian dari masa transisi arah kebijakan pembangunan nasional dari *Nawa Cita* menuju *Asta Cita*. Perubahan arah pembangunan ini menuntut sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar program prioritas di Jawa Tengah tetap selaras dengan sasaran nasional, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan penguatan pelayanan publik. Sehingga penyusunan perencanaan hingga penetapan APBD diarahkan untuk mendukung transformasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai visi “Menuju Jawa Tengah Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing.”

2.1 PERUBAHAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Kebijakan Umum APBD (KUA)/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara DPRD dan Gubernur Nomor 59 Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 16 Agustus 2024. APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka Pemerintah Provinsi Jawa tengah melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA)/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara DPRD dan Gubernur nomor 189 Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 23 Juli 2025. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar organisasi/unit kerja, program/kegiatan/sub kegiatan dan jenis/objek/rincian objek pendapatan dan/atau belanja yang mempengaruhi struktur dalam dokumen APBD melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Pergeseran ini terjadi dalam hal keadaan darurat/luar biasa, kebutuhan mendesak yang mempengaruhi pelayanan publik serta perkembangan/penyesuaian pendapatan dan/atau belanja yang berbeda dari perencanaan awal yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

2.1.1 Pergeseran Anggaran I

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dilakukan pergeseran untuk penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam. Pergeseran terjadi pada Belanja Tak Terduga yang dialokasikan untuk belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp5.158.990.000,00 pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Perubahan tersebut, dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 tanggal 4 Maret 2025 dan disampaikan kepada DPRD melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0002046 tanggal 4 Maret 2025 Hal Pemberitahuan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

2.1.2 Pergeseran Anggaran II

Pergeseran dilakukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Kepala Daerah untuk :

- a. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/FGD;
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
- c. Membatasi belanja honorarium mengacu pada peraturan presiden mengenai Standar Harga Saruan Regional;
- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung;

- e. Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik, tidak berdasarkan pemerataan antar OPD atau alokasi tahun anggaran sebelumnya;
- f. Selektif dalam memberikan hibah langsung pada kementerian/lembaga; dan
- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 bersumber dari TKD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah efisiensi ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, selektivitas, dan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan fiskal daerah diarahkan menjadi lebih adaptif, transparan, dan berbasis kinerja agar target pembangunan tetap tercapai meskipun terjadi penyesuaian anggaran di tengah dinamika fiskal nasional. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian belanja operasional OPD antara lain belanja makan minum rapat/jamuan tamu, jasa konsultasi/tenaga ahli, bahan kegiatan kantor (alat tulis, kertas dan cetak), belanja perjalanan dinas, honorarium tim dan sekretariat pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan barang daerah serta belanja bantuan transfer ke kabupaten/kota.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Dimana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan alokasi sebesar Rp127.979.376.000,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp31.728.761.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp96.250.615.000,00. Dampak dari pengurangan TKD tersebut, maka dilakukan penyesuaian belanja bersifat fisik untuk pengembangan Satuan Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; penambahan *system* layanan kesehatan pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta, RSUD Dr. Margono Sukardjo Purwokerto, RSUD Dr. Adhyatma, RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan pengembangan layanan dasar air minum pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.

Pergeseran ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 14 Maret 2025 dan disampaikan kepada DPRD melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0002473 tanggal 14 Maret 2025 Hal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

2.1.3 Pergeseran Anggaran III

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dilakukan pergeseran dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/MK/PK/2025 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp343.257.000,00 sehingga perlu adanya penyesuaian pada belanja gaji dan tunjangan dan Penggunaan Ambang Batas Anggaran BLUD pada RSUD Dr Moewardi Surakarta sehingga menambah pendapatan

retribusi pelayanan kesehatan dan belanja barang dan jasa sebesar Rp80.000.000.000,00.

Tabel 2.1 Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PENETAPAN APBD	PERUBAHAN 1 PERDA 12 TAHUN 2024	PERUBAHAN 2 PERDA 12 TAHUN 2024	PERUBAHAN APBD	PERUBAHAN PERDA 8 TAHUN 2025
	Perda 12 Tahun 2024 30 Desember 2024	Pergub 8 Tahun 2025 4 Maret 2025	Pergub 14 Tahun 2025 14 Maret 2025	Perda 8 Tahun 2025 12 September 2025	Pergub 29 Tahun 2025 28 November 2025
PENDAPATAN DAERAH	24.486.526.112.000,00	24.486.526.112.000,00	24.358.633.376.000,00	24.574.934.505.000,00	24.654.591.248.000,00
Pendapatan Asli Daerah	15.542.692.866.000,00	15.542.692.866.000,00	15.542.692.866.000,00	15.619.284.656.000,00	15.699.284.656.000,00
Pendapatan Transfer	8.920.356.746.000,00	8.920.356.746.000,00	8.792.464.010.000,00	8.792.464.010.000,00	8.792.120.753.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.476.500.000,00	23.476.500.000,00	23.476.500.000,00	163.185.839.000,00	163.185.839.000,00
BELANJA DAERAH	24.848.826.112.000,00	24.848.826.112.000,00	24.720.933.376.000,00	25.151.948.182.000,00	25.231.604.925.000,00
Belanja Operasi	16.100.551.735.000	16.100.551.735.000,00	15.742.765.783.000,00	16.051.924.007.000,00	16.131.580.750.000,00
Belanja Modal	1.449.835.221.000	1.454.994.211.000,00	1.930.518.628.000,00	1.998.205.719.000,00	1.998.205.719.000,00
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	19.841.010.000,00	893.526.117.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Belanja Transfer	7.273.439.156.000	7.273.439.156.000,00	6.154.122.848.000,00	7.076.818.456.000,00	7.076.818.456.000,00
Surplus/ (Defisit)	-362.300.000.000,00	-362.300.000.000,00	-362.300.000.000,00	-577.013.677.000,00	-577.013.677.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH	362.300.000.000,00	362.300.000.000,00	362.300.000.000,00	577.013.677.000,00	577.013.677.000,00
Penerimaan Pembiayaan	432.300.000.000,00	432.300.000.000,00	432.300.000.000,00	577.013.677.000,00	577.013.677.000
Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	362.300.000.000,00	362.300.000.000,00	362.300.000.000,00	577.013.677.000,00	577.013.677.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-	-

2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Implementasi Undang-Undang tersebut, adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah dan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui upaya:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan pembayaran pajak;
- b. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, Samsat Corporate, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
- c. Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya (Samsat Corporate, Mitra Putra Bangsa);
- d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat, Podcast Cara Hebat Informasikan Pajak dan Retribusi (CHIPS), *Lets Activate New Sakpole and Signal* (LANS), kerja sama dengan para influencer Jawa Tengah di media sosial) dan pelaksanaan *door to door*;
- e. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan;
- f. Menyelenggarakan *Auto Show* serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia *International Auto Show* (GIIAS) 2025;
- g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
- h. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
- i. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
- j. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
- k. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; dan
- l. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.

2.2.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam RPD Tahun 2024-2026 ditargetkan sebesar Rp22.457.882.196.000,00. Pada RKPD Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp23.549.642.794.000,00, dan APBD ditargetkan sebesar Rp24.486.526.112.000,00, sedangkan RKPD Perubahan Tahun 2025 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp24.574.934.505.000,00 dan APBD Perubahan sebesar Rp24.654.591.248.000,00 bertambah sebesar Rp168.065.136.000,00 atau 0,69% dari APBD Murni.

Perubahan APBD merupakan prosedur konstitusional yang lazim dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Secara garis besar, perubahan ini dilakukan karena adanya dinamika antara rencana awal dengan realitas di lapangan. Antara lain meliputi perkembangan yang tidak sesuai Asumsi, penyesuaian kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan kebijakan pada harga bahan bakar minyak, dan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif. Rincian target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Pendapatan Asli Daerah	15.542.692.866.000,00	15.699.284.656.000,00	14.973.131.878.336,00	95,37	17.650.936.913.504,00
2.	Pendapatan Transfer	8.920.356.746.000,00	8.792.464.010.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00
3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yg Sah	23.476.500.000,00	163.185.839.000,00	163.473.343.033,00	100,18	26.343.846.120,00
Jumlah Penda- patan Daerah		24.486.526.112.000,00	24.654.591.248.000,00	23.761.968.977.877,00	96,38	26.378.719.626.419,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar 96,38% lebih rendah dari realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 sebesar 96,87%, ini merupakan salah satu dampak dari pemberlakuan UU HKPD yang merubah skema bagi hasil kabupaten/kota menjadi opsen pajak kabupaten/kota, selain itu pendapatan transfer di Tahun 2025 ini juga mengalami penyesuaian.

2.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk dalam PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. RPD Tahun 2024-2026 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp14.808.893.164.000,00. Pada RKPD Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp15.519.788.406.000,00 dan APBD ditargetkan sebesar Rp15.542.692.866.000,00, sedangkan RKPD Perubahan Pendapatan Asli Daerah

diproyeksikan sebesar Rp15.619.284.656.000,00 dan APBD Perubahan sebesar Rp15.699.284.656.000,00 bertambah Rp156.591.790.000,00 atau 1,01% dari APBD Murni berkurang Rp191.421.766.000,00 atau (10,51%).

Realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 63,01% terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 PAD mengalami penurunan Rp2.677.805.035.168,00 atau (15,17%). Rincian realisasi PAD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Pajak Daerah	12.650.725.636.000,00	12.459.303.870.000,00	11.438.451.030.063,00	91,81	14.210.241.533.541,00
2.	Retribusi Daerah	1.807.585.183.000,00	2.172.596.928.000,00	2.673.330.019.574,00	123,05	2.318.821.514.818,00
3.	Hasil Pengelolaan KAYADA Yang Dipisahkan	707.349.144.000,00	690.155.713.000,00	546.657.345.508,00	79,21	687.813.166.201,00
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	377.032.903.000,00	377.228.145.000,00	314.693.483.191,00	83,42	434.060.698.944,00
JUMLAH		15.542.692.866.000,00	15.699.284.656.000,00	14.973.131.878.336,00	95,37	17.650.936.913.504,00

Berdasarkan tabel di atas realisasi PAD diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;
- Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah;
- Pajak Alat Berat (PAB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat; dan
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPD Tahun 2024-2026 Pajak Daerah ditargetkan Rp12.184.082.081.000,00. Pada RKPJ Pajak daerah ditargetkan Rp12.650.725.636.000,00 dan APBD ditargetkan sebesar Rp12.650.725.636.000,00, Sedangkan RKPJ Perubahan Tahun 2025 Pajak Daerah ditargetkan Rp12.459.303.870.000,00 dan pada APBD Perubahan Rp12.459.303.870.000,00 berkurang sebesar (Rp191.421.766.000,00) atau (1,51%).

Penyesuaian target pendapatan karena adanya pemberian diskon pada bulan Januari-Maret 2025, adanya pemberlakuan program merah putih dan kenaikan pajak rokok sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025. Rincian target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Target Dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	PKB	4.353.358.423.000,00	4.155.214.820.000,00	3.960.139.868.900,00	95,31	5.474.932.909.600,00
2.	BBNKB	2.549.433.805.000,00	2.529.132.809.000,00	1.741.611.744.500,00	68,86	3.068.323.586.500,00
3.	PBBKB	2.619.000.000.000,00	2.619.000.000.000,00	2.690.646.253.813,00	102,74	2.693.880.376.743,00
4.	PAP	18.900.000.000,00	18.900.000.000,00	20.925.885.996,00	110,72	18.993.373.282,00
5.	Pajak Rokok	3.088.000.000.000,00	3.115.022.833.000,00	3.001.754.723.736,00	96,36	2.954.059.323.916,00
6.	Pajak Alat Berat	33.408.000,00	33.408.000,00	134.045.500,00	401,24	51.963.500,00
7.	Opsen Pajak MBLB	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	23.238.507.618,00	105,63	-
JUMLAH		12.650.725.636.000,00	12.459.303.870.000,00	11.438.451.030.063,00	91,81	14.210.241.533.541,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

Realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan Rp2.771.790.503.478,00 atau (19,51%) apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Penerapan opsen pajak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berpengaruh pada tarif pajak yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pengenaan Tarif PKB sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dengan skema bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar 1,50%, sedangkan setelah berlakunya opsen Tahun 2025 pengenaan tarif PKB untuk Provinsi 1,05% dengan skema opsen tambahan 66% untuk opsen Kabupaten/Kota sehingga tarif mulai tanggal 5 Januari 2025 menjadi 1,74%;
- Pengenaan tarif BBNKB sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dengan skema bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar 12,50%, sedangkan setelah berlakunya opsen Tahun 2025 pengenaan tarif PKB untuk Provinsi 10% dengan skema opsen tambahan 66% untuk opsen Kabupaten/Kota sehingga tarif mulai tanggal 5 Januari 2025 menjadi

16,60%. BBNKB hanya dikenakan untuk penyerahan pertama (Kendaraan baru), sedangkan balik nama atas jual beli kendaraan bekas tidak dikenakan BBNKB namun tetap dikenakan PNPB Kepolisian, PKB dan SWDKLLJ PT. Jasa Raharja.

c. Perbandingan Tarif PKB dan BBNKB Provinsi se-Jawa

Tabel 2.5 Perbandingan Tarif PKB dan BBNKB Provinsi se-Jawa

NO	PROVINSI	PKB				BBNKB (PRIBADI NON PROGRESIF)				
		LAMA	BARU	OPSEN 66%	BARU + OPSEN	LAMA	BARU	OPSEN 66%	BARU + OPSEN	% KENAIKAN
1	2	3	4	5=66%X4	6=4+5	3	4	5=66%X4	6=4+5	7=(6-3)/3
1	BANTEN	1,75%	1,20%	0,79%	1,99%	10,00%	12,00%	7,92%	19,92%	99,20%
2	DKI	2%	2,00%	0,00%	2,00%	13%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%
3	JABAR	1,75%	1,12%	0,74%	1,86%	12,50%	12,00%	7,92%	19,92%	59,36%
4	JATENG	1,50%	1,05%	0,69%	1,74%	12,50%	10,00%	6,60%	16,60%	32,80%
5	DIY	1,50%	0,90%	0,59%	1,49%	10,00%	10,00%	6,60%	16,60%	66,00%
6	JATIM	1,50%	1,20%	0,79%	1,99%	12,50%	12,00%	7,92%	19,92%	59,36%

Berdasarkan tabel tersebut, tarif PKB Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,74% menempati posisi kedua termurah setelah DIY sebesar 1,49%. Sedangkan tarif BBNKB Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,60% sama dengan DIY mengesampingkan Provinsi DKI Jakarta, karena tidak memberlakukan opsen.

Tidak tercapainya target Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok, antara lain dikarenakan:

a. Tidak tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 disebabkan antara lain:

- ✓ Belum optimalnya kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB secara tepat waktu. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat piutang/tunggakan PKB tahun 2025 mencapai 6.073.029 kendaraan bermotor atau senilai Rp3.008.866.133.450,00n (Unaudited). Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Jateng menempati posisi 2 nasional setelah Provinsi DIY berdasarkan data dari PT. Jasa Raharja tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Peringkat Kepatuhan Pembayaran PKB Nasional Tahun 2025 dan 2024

KANTOR WILAYAH	Tahun Berjalan			Tahun Lewat			Tahun Potensi		
	2025	2024	Selisih	2025	2024	Selisih	2025	2024	Selisih
D.I. YOGYAKARTA	85,85	87,51	↓ -1,66	22,19	25,07	↓ -2,88	69,79	71,55	↓ -1,76
JAWA TENGAH	82,23	82,24	↓ -0,01	34,53	24,46	↑ 10,08	67,12	64,93	↑ 2,19
KALIMANTAN SELATAN	82,07	80,91	↑ 1,16	22,38	16,21	↑ 6,17	60,07	56,93	↑ 3,14
JAWA BARAT	74,64	75,44	↓ -0,80	35,91	19,60	↑ 16,30	58,18	51,85	↑ 6,33
LAMPUNG	81,86	79,63	↑ 2,24	25,57	10,65	↑ 14,93	57,22	49,84	↑ 7,39
BALI	77,34	80,15	↓ -2,81	19,08	21,88	↓ -2,80	56,74	58,63	↓ -1,88
BANTEN	72,33	73,14	↓ -0,81	37,90	17,58	↑ 20,32	56,47	48,07	↑ 8,40
SUMATERA BARAT	77,71	77,87	↓ -0,16	26,03	13,50	↑ 12,53	55,09	50,18	↑ 4,92
JAWA TIMUR	72,09	81,95	↓ -9,86	19,08	21,34	↓ -2,27	53,95	61,44	↓ -7,49
SUMATERA SELATAN	79,73	79,64	↑ 0,09	15,47	11,73	↑ 3,74	53,92	52,37	↑ 1,55
KEP BANGKA BELITUNG	78,85	79,34	↓ -0,49	16,67	13,15	↑ 3,52	53,40	53,69	↓ -0,28
NTB	75,60	75,89	↓ -0,30	21,36	17,96	↑ 3,40	53,35	52,09	↑ 1,26
KALIMANTAN TIMUR	72,97	74,76	↓ -1,80	23,79	18,02	↑ 5,77	53,01	51,79	↑ 1,22
DKI JAKARTA	75,19	76,40	↓ -1,21	17,51	18,11	↓ -0,60	51,68	53,23	↓ -1,55
KEP RIAU	70,61	72,00	↓ -1,39	22,55	24,16	↓ -1,61	51,40	52,55	↓ -1,15
KALIMANTAN TENGAH	72,48	70,96	↑ 1,52	21,71	12,47	↑ 9,24	48,48	44,35	↑ 4,13
SULAWESI SELATAN	71,54	73,14	↓ -1,60	18,88	17,69	↑ 1,20	48,01	47,65	↑ 0,36
RIAU	75,82	74,69	↑ 1,14	13,21	9,70	↑ 3,51	47,87	47,12	↑ 0,75
NTT	71,91	71,11	↑ 0,80	19,76	19,62	↑ 0,15	47,80	46,45	↑ 1,35
SULAWESI TENGAH	67,49	68,10	↓ -0,61	28,08	13,00	↑ 15,09	47,50	39,12	↑ 8,38
BENGKULU	73,69	75,69	↓ -2,00	8,99	16,58	↓ -7,59	46,38	50,90	↓ -4,52
MALUKU	65,54	67,61	↓ -2,07	22,02	15,32	↑ 6,71	44,01	41,91	↑ 2,10
SUMATERA UTARA	70,28	71,92	↓ -1,64	12,54	13,97	↓ -1,43	43,08	44,43	↓ -1,34
ACEH	67,13	72,95	↓ -5,81	13,36	13,64	↓ -0,28	42,06	44,79	↓ -2,72
KALIMANTAN BARAT	70,60	71,01	↓ -0,41	11,85	11,21	↑ 0,63	41,99	42,34	↓ -0,35
SULAWESI UTARA	65,87	67,19	↓ -1,32	17,36	15,32	↑ 2,04	41,33	40,53	↑ 0,79
JAMBI	70,19	70,73	↓ -0,55	10,41	10,47	↓ -0,06	39,64	40,04	↓ -0,39
SULAWESI TENGGARA	57,05	52,20	↑ 4,84	10,36	10,09	↑ 0,27	29,08	29,70	↓ -0,62
PAPUA	40,58	24,53	↑ 16,04	12,43	18,17	↓ -5,74	21,10	20,13	↑ 0,96
NASIONAL	75,35	77,69	↓ -2,34	24,35	18,40	↑ 5,95	55,02	54,35	↑ 0,67

- ✓ Adanya indikasi penurunan atau tidak tercapainya target penjualan kendaraan bermotor. Data Gaikindo menunjukkan target awal penjualan kendaraan bermotor 850.000 unit sampai 900.000 unit hanya tercapai 833.692 unit, dan terdapat revisi target pada bulan November 2025 menjadi 780.000 unit;
- ✓ Penetrasi penjualan kendaraan listrik yang bebas PKB juga turut memberikan dampak tidak tercapainya target PKB. Berdasarkan data *Regident* pada tahun 2025 total kendaraan listrik yang berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 19.608 unit atau meningkat 51,35% dibanding tahun 2024 sejumlah 13.139 Unit;
- ✓ Namun capaian pajak kendaraan bermotor pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di bandingkan capaian Tahun 2024 masih lebih baik apabila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa, sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.7 Realisasi Capaian PKB di Pulau Jawa 2025 dan 2024

PROVINSI	REALISASI 2024 S.D 31 DESEMBER 2024	REALISASI 2024 S.D 31 DESEMBER 2024 (SETELAH DIKURANGI BAGI HASIL KECUALI DKI)	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2025	% PERBANDINGAN
JAWA TENGAH	5.474.932.909.600	3.832.453.036.720	3.960.139.868.900	3,33%
JAWA TIMUR	8.262.123.514.153	5.783.486.459.907	4.875.853.229.560	-15,69%
JAWA BARAT	9.682.817.551.355	6.777.972.285.949	5.673.645.544.588	-16,29%
BANTEN	3.570.962.779.800	2.499.673.945.860	2.112.638.943.700	-15,48%
DI YOGYAKARTA	1.041.662.985.900	729.164.090.130	666.057.670.000	-8,65%
DKI JAKARTA	9.630.587.788.361	9.630.587.788.361	10.018.238.343.426	4,03%

b. Capaian realisasi BBNKB pada Tahun 2025 di bawah target disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- ✓ Penurunan Penjualan Mobil Baru, Penerimaan BBNKB sangat bergantung pada volume penjualan kendaraan baru (BBN-I). Berdasarkan Data GAIKINDO (sumber data website) menunjukkan penjualan mobil nasional sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan sekitar **6,3%** dibandingkan tahun sebelumnya. Target yang dipatok di awal tahun biasanya didasarkan pada asumsi pertumbuhan otomotif yang optimis, sehingga ketika pasar lesu, berdampak pada turunnya realisasi BBNKB;



Gambar 2.1 Peta Penjualan Mobil Indonesia Tahun 2025

- ✓ Bertambahnya penjualan kendaraan bermotor Listrik dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- ✓ Namun capaian BBNKB Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah dibandingkan capaian Tahun sebelumnya masih lebih baik apabila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa, sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.8 Realisasi Capaian BBNKB di Pulau Jawa 2025 dan 2024

PROVINSI	REALISASI 2024 S.D 31 DESEMBER 2024	REALISASI 2024 S.D 31 DESEMBER 2024 (SETELAH DIKURANGI BAGI HASIL KECUALI DKI)	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2025	% PERBANDINGAN
JAWA TENGAH	3.068.323.586.500	2.147.826.510.550	1.741.611.744.500	-18,91%
JAWA TIMUR	4.340.905.816.750	3.038.634.071.725	2.012.841.865.500	-33,76%
JAWA BARAT	6.238.625.941.700	4.367.038.159.190	3.011.683.270.001	-31,04%
BANTEN	2.676.106.930.100	1.873.274.851.070	1.272.028.812.300	-32,10%
DI YOGYAKARTA	453.957.069.400	317.769.948.580	201.880.607.000	-36,47%
DKI JAKARTA	6.644.521.355.800	6.644.521.355.800	5.191.877.757.800	-21,86%

c. Capaian realisasi pajak rokok masih di bawah target, capaian pajak rokok dipengaruhi oleh capaian kinerja penerimaan cukai Pemerintah Pusat Ketidaktercapaian pajak rokok berbanding lurus dengan ketidaktercapaian realisasi penerimaan cukai rokok, penyebabnya antara lain :

- ✓ Pajak Rokok dipengaruhi oleh capaian kinerja penerimaan cukai rokok oleh

pemerintah pusat. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-49/PK/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Proporsi Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2025, target Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Rp3.115.022.033.295 dan berdasarkan realisasi transfer dari kementerian keuangan sampai dengan triwulan IV sebesar Rp3.001.754.723.736. Ketidaktercapaian pajak rokok berbanding lurus dengan ketidaktercapaian realisasi penerimaan cukai rokok;

- ✓ Konsumen beralih dari rokok golongan 1 (mahal) ke rokok golongan 2 atau 3 yang memiliki tarif cukai lebih rendah, sehingga total penerimaan pajak menurun;
- ✓ Kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) yang tinggi akibat kenaikan tarif cukai menyebabkan penurunan volume produksi, terutama pada produsen besar; dan
- ✓ Harga rokok yang semakin mahal mendorong meningkatnya permintaan terhadap rokok ilegal yang tidak membayar pajak.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan kesehatan pada rumah sakit dan balai/unit pada Dinas Kesehatan.
- b. Retribusi Jasa Usaha merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta jenis objek Retribusi Jasa Usaha yaitu tempat penginapan/pesanggrahan/villa, penyediaan tempat kegiatan usaha, tempat pelelalangan ikan/ternak/hasil bumi dan hutan, tempat khusus parkir, jasa kepelabuhan, tempat rekreasi/ pariwisata/ olahraga, penjualan hasil produksi usaha serta pemanfaatan aset daerah; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu penggunaan tenaga kerja asing.

RPD	Tahun	2024-2026	Retribusi	Daerah	ditargetkan
Rp106.149.242.000,00.	Pada	RKPD	Retribusi	daerah	ditargetkan
Rp1.805.361.743.000,00	dan	APBD	ditargetkan	Rp1.807.585.183.000,00,	
sedangkan	RKPD	Perubahan	Retribusi	Daerah	ditargetkan

Rp2.092.596.928.000,00 dan APBD Perubahan Rp2.172.596.928.000,00 bertambah Rp365.011.745.000,00 atau 20,19%. Rincian target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Retribusi Jasa Umum	1.705.538.935.000,00	2.068.079.800.000,00	2.559.393.583.760,00	123,76	2.219.653.775.575,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	100.836.648.000,00	103.307.528.000,00	105.837.413.738,00	102,45	92.761.371.908,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.209.600.000,00	1.209.600.000,00	8.099.022.076,00	669,56	6.406.367.335,00
JUMLAH		1.807.585.183.000,00	2.172.596.928.000,00	2.673.330.019.574,00	123,05	2.318.821.514.818,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

Realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan Rp354.508.504.756,00 atau 15,29%, apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Kenaikan pendapatan retribusi daerah yang sangat signifikan berasal dari Retribusi Perizinan Tertentu dikarenakan makin bertambahnya perusahaan asing yang berinvestasi sehingga berdampak pada pekerja asing yang bekerja di wilayah Jawa Tengah. Rincian target dan realisasi retribusi jasa umum sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Target Dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.705.538.935.000,00	2.068.079.800.000,00	2.559.393.583.760,00	123,76	2.217.602.631.575,00
2.	Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	-	2.051.144.000,00
JUMLAH		1.705.538.935.000,00	2.068.079.800.000,00	2.559.393.583.760,00	123,76	2.219.653.775.575,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

Dengan meningkatnya pelayanan dari beberapa Rumah Sakit Umum Daerah sehingga membuat Capaian Pendapatan Retribusi Jasa Umum yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih dari target yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Target Dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	9.598.235.000,00	10.196.965.000,00	9.154.865.000,00	89,78	7.927.263.000,00
2.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	9.856.016.031,00	10.397.090.031,00	10.723.607.278,00	103,14	15.346.487.178,00
3.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	428.925.000,00	49.875.000,00	12.662.500,00	25,39	92.042.000,00
4.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	3.785.865.500,00	5.922.933.500,00	6.026.009.500,00	101,74	5.160.417.195,00
5.	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	8.562.710.000,00	8.562.710.000,00	11.855.310.000,00	138,45	11.368.920.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	5.413.827.000,00	5.413.737.000,00	5.113.405.700,00	94,45	2.266.141.000,00
7.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	21.603.617.369,00	18.513.337.369,00	16.047.506.362,00	86,68	-
8.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	41.587.452.100,00	44.250.880.100,00	46.904.047.398,00	106,00	50.284.681.535,00
9.	Retribusi Terminal	-	-	-	-	315.420.000,00
JUMLAH		100.836.648.000,00	103.307.528.000,00	105.837.413.738,00	102,45	92.761.371.908,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

Tidak tercapainya target Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing objek retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Objek Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga tidak mencapai target karena Stadion Jatidiri yang merupakan objek potensial, pada Tahun 2025 ini mengalami penurunan realisasi pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya turunnya Divisi PSIS dari liga I ke liga II (Degradasi) yang sangat berpengaruh terhadap harga sewa lapangan dan penjualan tiket;
2. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha tidak mencapai target antara lain karena penanaman padi atau tanaman lainnya di beberapa daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan terkena serangan hama (OPT, tikus, fusarium, ulat grayak) sehingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu sehingga hasil tidak optimal.

Rincian target dan realisasi retribusi perizinan tertentu sebagaimana

tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.12 Target Dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.209.600.000,00	1.209.600.000,00	8.099.022.076,00	669,56	6.406.367.335,00
JUMLAH		1.209.600.000,00	1.209.600.000,00	8.099.022.076,00	669,56	6.406.367.335,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

Realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu tercapai sangat signifikan dikarenakan bertambahnya perusahaan asing yang berinvestasi sehingga berdampak pada pekerja asing yang bekerja di wilayah Jawa Tengah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan/atau BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan PT. Asuransi Bangun Askrida.
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD antara lain:
 - 1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
 - 2) Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jawa Tengah Petro Energi;
 - 3) Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - 4) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

- 5) Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;
- 6) Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari;
- 7) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
- 8) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Perseroda; dan
- 9) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Perseroda.

RPD Tahun 2024-2026 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 ditargetkan Rp664.112.968.000,00. Pada RKPD Tahun 2025 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan Rp707.349.144.000,00 dan APBD ditargetkan Rp707.349.144.000,00, sedangkan RKPD Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan Rp690.155.713.000,00 dan APBD Perubahan Rp690.155.713.000,00 berkurang Rp17.193.431.000,00 atau (2,43%).

Penyesuaian target antara lain dikarenakan adanya penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pasca perubahan kebijakan akuntansi dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) dan optimalisasi kinerja bisnis. Rincian target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 8 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.13 Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	PT. JTAB	4.260.000.000,00	4.712.725.153,00	4.712.725.152,00	100,00	1.668.816.220,00
2.	PT Bank Jateng	560.000.000.000,00	560.145.738.164,00	417.903.370.127,00	74,61	550.244.937.092,00
3.	BPR – BKK	90.500.000.000,00	69.020.856.142,00	69.020.856.688,00	100,00	70.945.400.423,00
4.	PT. Tirta Utama	12.180.000.000,00	12.334.438.119,00	12.334.438.119,00	100,00	7.444.261.200,00
5.	PT. PRPP	-	-	-	-	10.715.302.586,00
6.	PT. SPJT	2.300.000.000,00	5.788.118.477,00	5.788.118.477,00	100,00	-
7.	PT. JPEN	25.000.000.000,00	28.691.237.844,00	28.691.237.844,00	100,00	3.878.979.438,00
8.	PT. JAMKRIDA	7.853.144.000,00	8.206.599.101,00	8.206.599.101,00	100,00	34.097.271.465,00
JUMLAH		702.093.144.000,00	688.899.713.000,00	546.657.345.508,00	79,35	6.978.397.022,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

Tidak tercapainya target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMD-Bank Jateng dikarenakan sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 April 2025, deviden tahap 2 dikonversi menjadi penyertaan modal untuk menjaga kepemilikan saham 51% sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

Selain penerimaan dividen dari 8 BUMD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menerima bagian laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan Pihak Ketiga yaitu PT. Askrida dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14 Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pihak ke III Tahun Anggaran 2024 dan 2025

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	PT KIW	1.256.000.000,00	1.256.000.000,00	-	-	1.839.800.755,00
2.	PT Askrida	4.000.000.000,00	-	-	-	3.513.923.270,00
JUMLAH		5.256.000.000,00	1.256.000.000,00	-	-	1.839.800.755,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

Belum terealisasinya target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMN-PT Kawasan Industri Wijayakusuma dikarenakan deviden yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham menunggu persetujuan dari Danantara dan Kementerian BUMN, sedangkan PT.Askrida berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASKRIDA tanggal 5 Agustus 2024 dan sesuai himbauan Otoritas Jasa keuangan bahwa dividen tahun buku Tahun 2025 tidak dibagikan kepada pemegang saham.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, denda pajak daerah dan retribusi, penerimaan komisi, potongan dan bentuk lainnya, hasil kerjasama daerah dan lain-lain PAD yang Sah sesuai ketentuan perundang-undangan. RPD Tahun 2024-2026 Lain-Lain PAD Yang Sah ditargetkan Rp1.854.548.873.000,00. Pada RKPD Lain Lain PAD Yang Sah ditargetkan Rp356.351.883.000,00 dan APBD ditargetkan Rp377.032.903.000,00, sedangkan RKPD Perubahan Tahun 2025 Lain-Lain PAD Yang Sah ditargetkan Rp377.228.145.000,00 dan APBD Perubahan Rp377.228.145.000,00 bertambah Rp195.242.000,00 atau 0,05%.

Realisasi penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp314.693.483.191,00 atau 83,42%. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan Rp119.359.215.753,00 atau (27,50%) Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Rincian penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meliputi:

- a. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari 7 BLUD Rumah Sakit Daerah ditargetkan Rp51.099.715.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp56.166.050.000,00 bertambah Rp5.066.335.000,00 atau 9,91%. Realisasi pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Rp65.780.604.756,00 atau 117,12%. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah mengalami kenaikan Rp2.987.068.758,00 atau 4,76% apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.
- b. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah non BLUD Rumah Sakit Daerah ditargetkan Rp325.933.188.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp321.062.095.000,00 berkurang Rp4.871.093.000,00 atau (1,49%). Realisasi Non BLUD Rp248.912.878.435,00 atau 77,53%. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah non BLUD Rumah Sakit Daerah mengalami penurunan Rp122.354.284.511,00 atau (32,96%) apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

2.2.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat target dalam RPD Tahun 2024-2026 sebesar Rp7.620.239.032.000,00, sedangkan target dalam RKPD sebesar Rp8.006.377.888.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan sebesar Rp8.792.464.010.000. APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp8.920.356.746.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp8.792.120.753.000,00 berkurang Rp128.235.993.000,00 atau (1,44%). Penyesuaian dikarenakan adanya penyesuaian alokasi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar 36,30% terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah dan apabila dibandingkan dengan realisasi

Tahun 2024 Pendapatan Transfer mengalami penurunan Rp76.075.110.287,00 atau (0,87%). Adapun rincian target dan realisasi pendapatan transfer sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.15 Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2025

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.920.356.746.000,00	8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-
JUMLAH		8.920.356.746.000,00	8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

Pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar (Rp76.075.110.287,00) atau (0,87%) apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Rincian Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp8.911.920.666.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp8.783.684.673.000,00 berkurang Rp128.235.993.000,00 atau (1,44%). Realiasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp8.616.927.676.508,00. Penerimaan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan mengalami penurunan Rp46.513.622.287,00 atau (0,54%) apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas:
 - 1) Dana Bagi Hasil pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan Rp1.015.927.337.000 tidak mengalami penyesuaian pada perubahan APBD Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Rp976.507.947.700,00. Dana bagi hasil mengalami kenaikan Rp80.275.379.700,00 atau 8,96% apabila dibandingkan tahun anggaran 2024;
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan Rp4.010.900.533.000,00 mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp3.978.828.515.000,00 berkurang Rp32.072.018.000,00 atau (0,80%). Realisasi Dana Alokasi Umum Rp3.978.828.515.369,00. Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan Rp159.817.724.341,00 atau 4,18% apabila dibandingkan tahun anggaran 2024;
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan Rp246.919.384.000,00 mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp150.668.769.000,00 berkurang Rp96.250.615.000,00 atau (38,98%). Realisasi DAK Fisik Rp142.445.000.400,00. DAK Fisik mengalami penurunan Rp331.495.472.439,00 atau (69,94%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024; dan
 - 4) DAK Non Fisik pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan Rp3.638.173.412.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada Perubahan APBD menjadi Rp3.638.260.052.000,00 bertambah Rp86.640.000,00

atau 0,002%. Realisasi DAK Non Fisik Rp3.519.146.213.039,00. DAK Non Fisik mengalami kenaikan Rp44.888.746.111,00 atau 1,29% apabila dibandingkan tahun anggaran 2024.

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Sesuai amanat UU HKPD Insentif Fiskal sebagai *reward* bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum, pemerintahan yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria umum dan kategori kinerja serta memacu daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan. Insentif Fiskal pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp8.436.080.000, tidak mengalami penyesuaian pada Perubahan APBD. Realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp8.436.080.000,00. Insentif Fiskal mengalami penurunan Rp29.561.488.000,00 atau (77,80%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024.

2.2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang berasal dari hibah dari pihak ketiga berasal dari Jasa Raharja dan pengembalian hibah dana pemilihan umum dan KPU. Proyeksi dalam RPD Tahun 2024-2026 Rp22.750.000.000,00, sedangkan Proyeksi dalam RKPD Rp23.476.500.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan Rp163.185.839.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan Rp23.476.500.000,00, mengalami penyesuaian pada Perubahan APBD menjadi Rp163.185.839.000,00 bertambah Rp139.709.339.000,00 atau 595,10%.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi 0,69% terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan Rp137.129.496.913,00 atau 520,54%. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.16 Target Dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2025

No	Uraian	Target APBD TA 2025	Target Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Pendapatan Hibah	23.476.500.000,00	25.505.460.000,00	25.505.460.000,00	100,00	25.600.169.638,00
2.	Lain-Lain Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan	-	137.680.379.000,00	137.967.883.033,00	100,21	743.676.482,00
JUMLAH		23.476.500.000,00	163.185.839.000,00	163.473.343.033,00	100,18	26.343.846.120,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

2.2.3 Permasalahan

Dalam pencapaian target pendapatan daerah terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- a. Pemberlakuan skema opsen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah per tanggal 5 Januari 2025, sehingga berdampak penurunan target pendapatan PKB dan BBNKB serta kenaikan tarif/beban wajib pajak;
- b. Keterbatasan sumber daya baik SDM maupun Sarpras pada pengelola pendapatan daerah;
- c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak belum optimal dibuktikan dengan jumlah piutang pajak daerah yang semakin meningkat yang berasal dari tunggakan tahun berjalan di tahun 2025.
- d. Pendayagunaan aset/barang milik daerah yang belum optimal utamanya yang berada di SKPD/Pengguna Barang serta kondisi yang relatif tidak kompetitif apabila dibandingkan dengan penyedia jasa sejenis dalam satu kawasan yang sama;
- e. Belum optimalnya kinerja beberapa BUMD, bahkan masih ada yang mengalami kerugian kumulatif;

2.2.4 Solusi

- a. Pemberian Diskon Merah Putih sebesar 13,94% pada Triwulan I sehingga beban wajib pajak *ekuivalen* dengan tarif lama PKB dan BBNKB serta program pemutihan tunggakan dan denda pada Triwulan II;
- b. Untuk mengatasi permasalahan Keterbatasan sumber daya pengelola pajak daerah, telah dilakukan beberapa upaya antara lain :
 - 1) Membangun dan meningkatkan sinergi atau kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, badan usaha dan pihak lainnya dalam melakukan sosialisasi, pendataan, pelayanan pemungutan serta penagihan pajak daerah seiring dengan diberlakukannya ketentuan Opsen Pajak pada tahun 2025;
 - 2) Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pajak digital dan pelayanan pajak melalui pihak ketiga antara lain SAMSAT BUDIMAN bekerja sama dengan BUMDES dan SAMSAT CORPORATE bekerjasama dengan perusahaan dan/atau koperasi;
- c. Meningkatkan validasi basis data dengan melakukan perbaikan tatakelola dan optimalisasi satu data pendapatan asli daerah;
- d. Melakukan sosialisasi kepatuhan membayar pajak secara masif bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan publikasi melalui berbagai platform media, baik media cetak, online maupun media sosial;
- e. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara lebih fokus dan profesional dengan melakukan restrukturisasi kelembagaan pengelola aset/barang milik daerah dan melakukan pemeliharaan serta pengamanan aset /barang milik daerah untuk meningkatkan nilai guna dan daya saing;
- f. Mengoptimalkan manajemen Aset/BMD secara profesional melalui penguatan struktur kelembagaan, serta intensifikasi pemeliharaan dan pengamanan aset guna meningkatkan nilai guna dan daya saing daerah; dan
- g. Melakukan perbaikan tata kelola dan restrukturisasi unit bisnis BUMD.

2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer.

2.3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada tema “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter” dengan fokus utama pada :

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan prioritas nasional meliputi:
 - a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
 - e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan; dan
 - h. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.
3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20 persen untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi

- kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
 5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
 6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
 7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

2.3.1.1 Belanja Operasi

Kebijakan Umum Belanja operasi diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai tahun anggaran 2025 diproyeksikan sesuai kebutuhan riil dan termasuk penambahan belanja pegawai untuk CPNS dan PPPK;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
- c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat; Belanja subsidi digunakan untuk subsidi bahan pangan guna penanganan stunting dan kemiskinan serta subsidi kepada BUMD sebagai penjamin agar Kelompok Penerima SPAM dapat memperoleh pinjaman untuk pengembangan tanpa menggunakan agunan;

- d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

2.3.1.2 Belanja Modal

Kebijakan Umum Belanja modal diarahkan untuk pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

2.3.1.3 Belanja Tidak Terduga

Kebijakan umum belanja tidak terduga diarahkan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2.3.1.4 Belanja Transfer

Kebijakan umum belanja transfer pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 disediakan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa) terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

2.3.2 Realisasi Belanja Daerah

Target belanja daerah dalam RPD Tahun 2024-2026 Rp26.782.587.536.000,00, Target belanja daerah dalam RKPD Rp23.911.942.794.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan Rp25.151.948.182.000,00. APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp24.848.826.112.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp25.231.604.925.000,00 bertambah Rp382.778.813.000,00 atau 1,54%. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan Rp3.315.288.368.547,00 atau (12,19%) apabila dibandingkan tahun 2024.

Program dan kegiatan infrastruktur yang diarahkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.951.901.242.000,00 terealisasi sebesar Rp4.620.852.190.320,00 atau 93,31%. Bentuk program dan kegiatan tersebut antara lain pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan; pengembangan fasilitas kesehatan pada rumah sakit dan fasilitas terminal; teknologi dan data; pengembangan sekolah; penyediaan air untuk petani dan pengembangan sarana dan prasarana pada kabupaten/kota serta desa melalui bantuan keuangan.

Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.17 Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025

No	Uraian	Anggaran Belanja APBD TA 2025	Anggaran Belanja Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Belanja Operasional	16.100.551.735.000,00	16.131.580.750.000,00	15.480.092.183.316,00	95,96	16.083.865.301.964,00
2.	Belanja Modal	1.449.835.221.000,00	1.998.205.719.000,00	1.795.558.675.999,00	89,83	1.733.084.096.994,00
3.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	7.192.800.000,00	28,77	10.225.800.500,00
4.	Belanja Transfer	7.273.439.156.000,00	7.076.818.456.000,00	6.588.994.469.941,00	93,11	9.359.951.298.345,00
JUMLAH		24.848.826.112.000,00	25.231.604.925.000,00	23.871.838.129.256,00	94,61	27.187.126.497.803,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

2.3.2.1 Realisasi Belanja Operasi

Proyeksi belanja operasi dalam RPD Tahun 2024-2026 Rp14.405.558.878.000,00, sedangkan proyeksi belanja operasi dalam RKPD Rp15.389.713.402.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan Rp16.053.711.560.000,00. APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Operasi dianggarkan Rp16.100.551.735.000,00, selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan

APBD menjadi Rp16.131.580.750.000,00 berkurang Rp31.029.015.000,00 atau (0,19%). Perubahan anggaran belanja operasi antara lain penyesuaian perhitungan belanja gaji dan tunjangan untuk PPPK dan CPNS; pemenuhan belanja obat dan makan minum pasien pada Rumah Sakit Daerah; belanja subsidi dan hibah yang diberikan kepada masyarakat. Realisasi belanja operasi mengalami penurunan Rp603.773.118.648,00 atau (3,75%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2025

No	Uraian	Anggaran Belanja APBD TA 2025	Anggaran Belanja Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Belanja Pegawai	7.719.320.885.000,00	7.438.563.067.000,00	7.060.692.834.988,00	94,92	7.023.084.524.845,00
2.	Belanja Badan dan Jasa	5.889.922.014.000,00	6.554.955.733.000,00	6.306.083.040.496,00	96,20	6.234.228.358.506,00
3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4.	Belanja Subsidi	9.274.000.000,00	12.413.000.000,00	12.291.564.636,00	99,02	1.399.999.100,00
5.	Belanja Hibah	2.449.434.836.000,00	2.093.048.950.000,00	2.068.441.743.196,00	98,82	2.780.143.423.054,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000,00	32.600.000.000,00	32.583.000.000,00	99,95	45.008.996.459,00
JUMLAH		16.100.551.735.000,00	16.131.580.750.000,00	15.480.092.183.316,00	95,96	16.083.865.301.964,00

2.3.2.2 Realisasi Belanja Modal

Proyeksi belanja modal dalam RPD Tahun 2024-2026 Rp2.383.508.147.000,00, sedangkan proyeksi belanja modal dalam RKPD Rp1.253.873.852.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan Rp1.996.418.166.000,00. APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp1.449.835.221.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp1.998.205.719.000,00 bertambah Rp548.370.498.000,00 atau 37,82%. Perubahan anggaran belanja modal adanya penyesuaian belanja pembangunan jalan dan jembatan antara lain akibat bencana alam (Jembatan Logong Kabupaten Kendal, Jembatan Welo Kabupaten Pekalongan dan Jalan Semarang-Godong Kabupaten Grobogan) dan pengadaan tanah untuk Ruas Jalan : Bumiayu-Sirampog, Ruas Jalan : Kuwu-Galeh, Ruas Jalan : Bener-Maron. Realisasi Belanja modal Rp1.795.558.675.999,00 atau 89,86% mengalami kenaikan Rp62.474.579.005,00 atau 3,60% apabila dibandingkan tahun anggaran 2024. Tidak terealisasinya Belanja Modal antara lain dikarenakan paket pekerjaan fisik seperti peningkatan ruas jalan Kuwu – Galeh, perbaikan Sarana dan Prasarana Air Baku Embung Selur dan Rondo Kuning Kabupaten Wonogiri, pembangunan Bunker Linac pada RSUD Adhyatma serta gedung Critical Center dan pelayanan penunjang tahap 3 RSUD Dr Moewardi Surakarta yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga pembayaran dilakukan sesuai dengan hasil pekerjaan; pekerjaan yang putus kontrak pembangunan sarana dan prasarana irigasi

di Bakalan Kabupaten Jepara dan Mejagong Kabupaten Pemalang.

2.3.2.3 Realisasi Belanja Tidak Terduga

Target belanja tidak terduga dalam RPD Tahun 2024-2026 Rp25.000.000.000,00, sedangkan proyeksi belanja tidak terduga dalam RKPD Rp25.000.000.000,00 dan tidak mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan. APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp25.000.000.000,00 selanjutnya tidak mengalami penyesuaian pada perubahan APBD. Realisasi belanja tidak terduga Rp7.192.800.000,00 atau 28,77% mengalami penurunan Rp3.033.000.500,00 atau (29,66%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk Korban Bencana Banjir di Kabupaten Grobogan; tanah longsor dan gerak di Kabupaten Banjarnegara dan Brebes; Kebakaran Rumah di Kabupaten Grobogan; Darurat Bencana di Kabupaten Demak; kebakaran Kantor Walikota dan DPRD Kota Pekalongan; dan Kebakaran Pasar Kota Kabupaten Wonogiri.

2.3.2.4 Realisasi Belanja Transfer

Target belanja transfer dalam RPD Tahun 2024-2026 Rp9.968.520.511.000,00, sedangkan Proyeksi belanja transfer dalam RKPD Rp7.243.355.540.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan Rp7.076.818.456.000,00. APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp7.273.439.156.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp7.076.818.456.000,00 berkurang Rp196.620.700.000,00 atau (2,70%). Perubahan anggaran belanja transfer adanya pengalokasian kurang salur bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 yang telah diaudit BPK-RI untuk dibayarkan pada tahun anggaran 2025; penyesuaian penerimaan pajak rokok sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2025; dan penyesuaian belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dialihkan untuk mendukung arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025, yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja transfer Rp6.588.994.469.941,00 atau 93,11% mengalami penurunan Rp2.770.956.828.404,00 atau (29,60%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024.

2.3.3 Permasalahan

Dalam melaksanakan program kegiatan dan merealisasikan anggaran belanja daerah terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 setelah penetapan APBD Tahun 2025;
- b. Belum tertibnya pengelola keuangan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) dan Anggaran Kas

2.3.4 Solusi

Upaya-upaya dan alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan sinkronisasi program kegiatan pusat dan daerah dan melakukan

- realokasi serta efisiensi belanja rutin sehingga output dan outcome tercapai;
- b. Melakukan pembinaan, verifikasi dan integrasi aplikasi penyusunan RKO dan anggaran kas SKPD sehingga pengelola keuangan SKPD dalam merealisasikan dana memperhatikan waktu pelaksanaan maupun ketersediaan kas.

2.4 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah Jawa Tengah untuk penyertaan modal kepada BUMD dilakukan realokasi berdasarkan pada peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal kepada BUMD

Target pembiayaan netto dalam RPD Tahun 2024-2026 Rp980.000.000.000,00, sedangkan target pembiayaan netto dalam RKPD Rp362.300.000.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan Rp577.013.677.000,00. APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp362.300.000.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp577.013.677.000,00 bertambah Rp214.713.677.000,00 atau 59,26%. Realisasi pembiayaan netto Rp577.041.291.379,00 atau 100,01% mengalami penurunan Rp808.316.774.433,00 atau (58,35%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Target penerimaan pembiayaan dalam RPD Tahun 2024-2026 Rp1.050.000.000.000,00, sedangkan target penerimaan pembiayaan dalam RKPD Rp432.300.000.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan Rp577.013.677.000,00. APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp432.300.000.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp577.013.677.000,00 bertambah Rp144.713.677.000,00 atau 33,48%. Realisasi penerimaan pembiayaan Rp577.049.291.379,00 atau 100,01% mengalami penurunan Rp829.008.774.433,00 atau (58,96%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024.
2. Target pengeluaran pembiayaan dalam RPD Tahun 2024-2026 Rp70.000.000.000,00, sedangkan target pengeluaran pembiayaan dalam RKPD Rp70.000.000.000,00 dan mengalami realokasi pada RKPD Perubahan. APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp70.000.000.000,00 selanjutnya mengalami realokasi dalam perubahan APBD. Realisasi pengeluaran pembiayaan tidak terealisasi dan mengalami penurunan Rp20.700.000.000,00 atau (100,00%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024.

Secara rinci anggaran dan realisasi pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.19 Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025

No	Uraian	Anggaran Belanja APBD TA 2025	Anggaran Belanja Perubahan APBD TA 2025	Realisasi		
				TA. 2025	%	TA. 2024 (Audited)
1.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Penggunaan SiLPA	432.300.000.000,00	577.013.677.000,00	576.951.194.428,00	99,99	900.123.938.112,00
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	505.869.400.000,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	64.727.700,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	98.096.951,00	-	-
Jumlah		432.300.000.000,00	577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.406.058.065.812,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Penyerntaan Modal Pemerintah	70.000.000.000,00	-	-	-	-
Jumlah		70.000.000.000,00	-	-	-	-
Pembiayaan Netto		362.300.000.000,00	577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.385.358.065.812,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

2.5 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

SiLPA merupakan hasil penjumlahan dari empat komponen dalam APBD dimana dua komponen diantaranya merupakan arus kas masuk yaitu pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta dua komponen lainnya yang merupakan arus kas keluar yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Faktor faktor yang membentuk SiLPA yaitu adanya pelampauan target pendapatan dan pelampauan target penerimaan pembiayaan serta penyerapan anggaran belanja dan realisasi anggaran. Untuk mengetahui realisasi masing-masing anggaran sehingga terbentuk SiLPA tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Ringkasan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

No	Uraian	APBD TA. 2025	Perubahan APBD TA. 2025	Realisasi	%	Berlebih/ (Berkurang)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	Pendapatan Pajak Daerah	12.650.725.636.000,00	12.459.303.870.000,00	11.438.451.030.063,00	91,81%	(1.020.852.839.937,00)

No	Uraian	APBD TA. 2025	Perubahan APBD TA. 2025	Realisasi	%	Berlebih/ (Berkurang)
	Retribusi Daerah	1.807.585.183.000,00	2.172.596.928.000,00	2.673.330.019.574,00	123,05%	500.732.077.574,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	707.349.144.000,00	690.155.713.000,00	546.657.345.508,00	79,21%	(143.498.367.492,00)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	377.032.903.000,00	377.228.145.000,00	314.693.483.191,00	83,42%	(62.534.661.809,00)
JUMLAH		15.542.692.866.000,00	15.699.284.656.000	14.973.131.878.336,00	95,37%	(726.152.777.664,00)
2.	PENDAPATAN TRANSFER					
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.920.356.746.000,00	8.792.464.010.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10%	(166.756.996.492,00)
JUMLAH		8.920.356.746.000,00	8.792.464.010.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10%	(166.756.996.492,00)
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	Pendapatan Hibah	23.476.500.000,00	25.505.460.000,00	25.505.460.000,00	100,00%	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	137.680.379.000,00	137.967.883.033,00	100,21%	287.504.033,00
JUMLAH		23.476.500.000,00	163.185.839.000,00	163.473.343.033,00	100,18%	287.504.033,00
TOTAL PENDAPATAN		24.486.526.112.000,00	24.654.591.248.000,00	23.761.968.977.877,00	96,38%	(892.622.270.123,00)
4.	BELANJA OPERASI					
	a. Belanja Pegawai	7.719.320.885.000,00	7.438.563.067.000,00	7.060.692.834.988,00	94,92%	(377.870.232.012,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.889.922.014.000,00	6.554.955.733.000,00	6.306.083.040.496,00	96,20%	(248.872.692.504,00)
	c. Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	d. Belanja Subsidi	9.274.000.000,00	12.413.000.000,00	12.291.564.636,00	99,02%	(121.435.364,00)
	e. Belanja Hibah	2.449.434.836.000,00	2.093.048.950.000,00	2.068.441.743.196,00	98,82%	(24.607.206.804,00)
	f. Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000,00	32.600.000.000,00	32.583.000.000,00	99,95%	(17.000.000,00)
JUMLAH		16.100.551.735.000,00	16.131.580.750.000,00	15.480.092.183.316,00	95,96%	(651.488.566.684,00)
5.	BELANJA MODAL	1.449.835.221.000,00	1.998.205.719.000,00	1.795.558.675.999,00	89,86%	(202.647.043.001,00)

No	Uraian	APBD TA. 2025	Perubahan APBD TA. 2025	Realisasi	%	Berlebih/ (Berkurang)
6.	BELANJA TIDAK TER- DUGA	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	7.192.800.000,00	28,77%	(17.807.200.000,00)
7.	BELANJA TRANSFER					
	a. Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	4.196.561.232.000,00	4.494.697.452.000,00	4.084.034.975.804,00	90,86%	(410.662.476.196,00)
	b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemdes	3.076.877.924.000,00	2.582.121.004.000,00	2.504.959.494.137,00	97,01%	(77.161.509.863,00)
	JUMLAH	7.273.439.156.000,00	7.076.818.456.000,00	6.588.994.469.941,00	93,11%	(487.823.986.059,00)
	TOTAL BELANJA	24.848.826.112.000,00	25.151.948.182.000,00	23.871.838.129.256,00	94,61%	(1.359.766.795.744,00)
	SUR- PLUS/(DEFISIT)	(362.300.000.000,00)	(577.013.677.000,00)	(109.870.165.379,00)	19,04%	467.144.525.621,00
8.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	a. Penggunaan SiLPA	432.300.000.000,00	577.013.677.000,00	576.951.194.428,00	99,99%	(62.482.572,00)
	b. Pencairan Dana Ca- dangan			-		-
	c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	98.096.951,00	100,00%	98.096.951,00
	JUMLAH	432.300.000.000,00	577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01%	35.614.379,00
9.	PENGELUARA N PEMBIAYAAN					
	a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	70.000.000.000,00	-	-	-	-
	JUMLAH	70.000.000.000,00	-	-	-	-
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO	362.300.000.000,00	577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,00%	35.614.379,00
	Sisa Lebih Pem- biayaan Anggaran (SiLPA)			467.180.140.000,00	100,00%	467.179.126.000,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2025 *Unaudited*

SiLPA tahun anggaran 2025 Rp467.180.140.000,00 berada pada rekening kas umum daerah berupa giro Rp28.219.099.330,00; rekening Badan Layanan Umum Daerah pada 7 Rumah Sakit Daerah Rp428.814.703.116,00; Kas di Bendahara Penerimaan SKPD Rp141.193.000,00; dan Kas di Bendahara Sekolah Rp10.005.144.554,00.

BAB 3

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH TAHUN 2025

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang diukur dengan **8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah** yaitu Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Otonomi Fiskal Daerah, dan Indeks Demokrasi Indonesia. Gambaran capaian kinerja IKU daerah Jawa Tengah tahun 2025 sebagai berikut.

1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena permasalahan yang kompleks, tidak hanya terkait dengan dimensi ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan budaya. Demikian juga kemiskinan di Jawa Tengah juga merupakan kondisi multidimensional yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak yang menjadi faktor penyebab kemiskinan di Jawa Tengah. Penyebab kemiskinan di Jawa Tengah secara garis besar dilihat dari aspek struktural dan kultural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh sistem atau struktur sosial yang tidak adil, misalnya kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, lahan, atau modal usaha. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya atau sikap mental, seperti sifat malas, boros, atau tidak mau memperbaiki taraf hidup meskipun ada kesempatan.

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2025 tercatat sebesar 9,39 persen, atau sekitar 3,34 juta jiwa. Angka ini merupakan pencapaian penting karena Jawa Tengah berhasil menjaga tren penurunan di bawah 10 persen secara stabil. Garis Kemiskinan (GK) berada di angka Rp 570.870/kapita/bulan dengan kontribusi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar 76,81 persen. Ketimpangan (Rasio Gini) berada di angka 0,350. Meskipun angka kemiskinan turun, tantangan distribusi pendapatan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan sebaran tingkat kemiskinan di Jawa Tengah secara geografis yang tidak merata. Wilayah Perdesaan Masih memiliki angka kemiskinan lebih tinggi (9,87 persen) dibandingkan wilayah perkotaan (8,99 persen). Di wilayah Jawa Tengah bagian selatan kabupaten seperti Kebumen dan Wonosobo memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, dimana secara historis memiliki tantangan geografis yang membuat akses ekonomi lebih sulit dibanding wilayah utara. Sedangkan untuk Kawasan Pantura Barat, wilayah kabupaten seperti Brebes dan Pemalang terus menjadi fokus intervensi karena jumlah penduduk miskinnya yang cukup besar secara absolut.

Capaian kinerja indikator tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2025 yang sebesar 9,39 persen, dinilai tercapai dari target tahun 2025 yang sebesar 9,66-9,00 persen. Menurunnya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ini merupakan hasil dari berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, dan lembaga non pemerintah.

Strategi utama penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah fokus pada tiga pilar mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan dan jaminan sosial adaptif, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan UMK dan peningkatan produktivitas, serta meminimalkan kantong kemiskinan melalui sinergi kebijakan, pemenuhan infrastruktur dasar, dan tata kelola data yang baik. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

- a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Strategi ini diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu: Bantuan sosial, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), seragam siswa miskin, Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)/Kartu Jateng Sejahtera Ngopeni (Kajen), Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas, serta bantuan instalasi sambungan listrik bagi rumah tangga miskin.
- b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Strategi ini dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, diantaranya melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat Karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses terhadap aset produktif, dan akses penggunaan lahan, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil
- c) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi ini adalah sinergi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar mendukung peningkatan produktivitas serta pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur Pendidikan melalui SMK Boarding dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), infrastruktur air minum layak melalui Pembangunan SPAM, serta penanganan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti peningkatan sarana transportasi melalui Trans Jateng serta penguatan database kemiskinan (verifikasi dan validasi database kemiskinan).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 mencapai angka 5,37 persen, sesuai dengan proyeksi yang ditetapkan dalam perencanaan yang sebesar 4,80-5,60 persen. Beberapa faktor yang menjadi pendorongnya antara lain meningkatnya investasi di Jawa Tengah tahun 2025 yang mencapai angka 88,50 triliun rupiah. Kenaikan angka investasi ini juga dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 jiwa. Hal ini didukung dengan kebijakan pemberian kemudahan investasi yang masuk ke Jawa Tengah, serta didukung juga dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang semakin mudah untuk memperlancar distribusi dan konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendukung proyek dan program strategis Nasional yang dilaksanakan di Jawa Tengah, yang memberikan dampak positif pada perekonomian daerah Jawa Tengah. Inflasi Jawa Tengah juga relatif terjaga, sehingga daya beli masyarakat juga terjaga, dimana proporsi terbesar dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah pada komponen konsumsi masyarakat. Selain itu, naiknya total ekspor Jawa Tengah juga memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Jawa Tengah. Tahun 2025, secara kumulatif total ekspor Jawa Tengah sebesar US12.623,21 juta, meningkat 10,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor Jawa Tengah yang utama adalah Negara Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok.

Di sisi lain, perekonomian Jawa Tengah juga menghadapi tantangan global yang mempengaruhi kondisi ekonomi Jawa Tengah tahun 2025. Kondisi global tersebut antara lain ketegangan geopolitik dunia yang masih berlanjut dimana perang Rusia dan Ukraina di Eropa belum selesai dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas sejalan meningkatnya serangan Israel ke Palestina. Faktor lain adalah kebijakan tarif Amerika Serikat memperlemah kinerja perdagangan global. Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi masih lemah sehingga mendorong berlanjutnya penurunan kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, ekonomi Jepang, Eropa, dan Tiongkok juga belum kuat yang dipengaruhi oleh belum kuatnya konsumsi rumah tangga di negara-negara tersebut.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah tahun 2025 periode November 2025 sebesar 4,32 persen. Capaian ini melampaui dengan proyeksi TPT yang ditetapkan dalam perencanaan tahun 2025 yang sebesar 4,81-4,42 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya pengangguran di Jawa Tengah antara lain pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang konsisten menguat pada tahun 2025 didukung dengan tumbuhnya berbagai sektor unggulan Jawa Tengah yang menyerap tenaga kerja juga semakin banyak. Namun disisi lain, beberapa kondisi terjadi di Jawa Tengah yang memperlambat penurunan pengangguran di Jawa Tengah antara lain terjadinya badai PHK tekstil selama tahun 2025 yaitu sebanyak 18.101 kasus PHK dimana separuhnya (10.632 orang) berasal dari grup Sritex yang dinyatakan pailit. Selain itu juga terjadi peningkatan proporsi pekerja paruh waktu menjadi 24,19 persen dan tingkat setengah pengangguran sebesar 7,00 persen, mengindikasikan banyak pekerja belum

mendapatkan jam kerja atau pendapatan yang ideal. Meskipun angka TPT secara umum turun, tantangan terbesar masih ada pada lulusan SMK mencapai 9,20 persen, yang secara konsisten menyumbang angka pengangguran lebih tinggi dibandingkan lulusan jenjang lainnya pada tahun 2025.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi angka pengangguran di Jawa Tengah antara lain:

a. Dominasi Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Pada tahun 2025, sektor ini mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan, terutama di wilayah perdesaan. Hal ini menjelaskan mengapa TPT di perdesaan jauh lebih rendah (sekitar 3,17 persen) dibandingkan perkotaan.

b. Pertumbuhan Industri Pengolahan (Manufaktur)

Jawa Tengah terus memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi industri (relokasi industri dari wilayah dengan UMK lebih tinggi):

- Kawasan Industri: Operasional penuh di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK) menyerap ribuan tenaga kerja lokal;
- Sektor Padat Karya: Industri tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki di wilayah Solo Raya dan Semarang Raya memberikan kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja di periode Agustus dan November 2025.

c. Ekspansi Sektor Perdagangan dan Jasa

Seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) tumbuh pesat. Peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi super prioritas seperti Borobudur berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja di sektor jasa pendukungnya.

d. Tantangan Struktural: Lulusan SMK

Meskipun TPT secara umum turun, terdapat faktor penghambat yang konsisten yaitu *mismatch* (ketidaksesuaian) antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dimana lulusan SMK masih menyumbang angka pengangguran tertinggi. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurikulum yang belum sepenuhnya selaras dengan teknologi industri terbaru, meskipun program *link and match* terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi.

e. Kebijakan Pemerintah Daerah

Program seperti "Ekotren" (Ekonomi Pesantren) dan optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Jawa Tengah membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja mandiri (wirausaha), yang secara statistik mengurangi jumlah pencari kerja aktif. Selain itu, beberapa kebijakan dan aktivitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menurunkan angka pengangguran antara lain melakukan job fair, pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar, pemagangan dalam dan luar negeri, padat karya produktif, pelatihan wirausaha baru, optimalisasi Ayo Kerjo, koordinasi

dan menghubungkan pekerja yang terkena PHK dengan peluang kerja di perusahaan lain yang membutuhkan tenaga kerja.

4. Indeks Modal Manusia

Indikator Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan hasil kesehatan dan pendidikan saat ini dalam membentuk produktivitas masa depan, serta memotivasi pemerintah untuk berinvestasi pada sumber daya manusia. Pengukuran untuk komponen kesehatan dilihat dari bagaimana seorang individu dapat bertahan hidup hingga usia sekolah, pertumbuhan anak (stunting), dan kesehatan usia dewasa. Sedangkan untuk pendidikan dilihat dari kuantitas (lama sekolah) dan kualitas pemberlajaran (hasil tes).

Indeks Modal Manusia Jawa Tengah sampai dengan tahun 2025 belum rilis secara resmi, namun demikian diproyeksikan IMM Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 0,62. Angka ini menggambarkan anak yang lahir saat itu diprediksi akan mencapai 62 persen dari produktivitas maksimalnya dibandingkan jika mendapat layanan kesehatan dan pendidikan yang sempurna. Beberapa faktor pendorong yang mendukung nilai IMM Jawa Tengah antara lain adanya mandatori SPM Pendidikan dan kesehatan yang harus dipenuhi, Kebijakan dan Program Nasional WAJAR (Wajib Belajar) 13 Tahun; tersedianya jalur pendidikan non formal dan kesetaraan; perluasan jangkauan layanan kesehatan hingga ke pelosok desa melalui program dokter spesialis keliling; penanganan stunting dan gizi buruk yang cukup masif; akses terhadap bahan pangan pokok yang relatif stabil membantu menjaga kecukupan gizi masyarakat; peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat membantu mengurangi risiko penyakit menular (PM); sosialisasi masif mengenai pentingnya aktivitas fisik dan pola makan gizi seimbang membantu mengurangi risiko penyakit tidak menular (PTM); serta akses pembiayaan kesehatan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan pada tahun 2025 di sektor pendidikan antara lain penguatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), penyediaan Unit Sekolah baru (USB) pada wilayah blankspot layanan pendidikan, Penambahan Ruang Kelas Baru untuk peserta didik, Kemitraan Negeri dan Swasta untuk perluasan daya tampung siswa; peningkatan digitalisasi sarpras pendidikan, Penyediaan beasiswa miskin, serta penyediaan 3 SMK Boarding dan 15 SMK Semi Boarding bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya program di sektor kesehatan yang sudah dilakukan antara lain Program cek kesehatan gratis melalui Speling (Dokter Spesialis Keliling), termasuk untuk deteksi PTM dan PM hingga pelosok desa, Program aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting/intervensi stunting terintegrasi melalui Pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi di desa-desa dengan prevalensi stunting tinggi, Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) secara masif, serta Peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan.

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah tahun 2025 adalah sebesar 94,06. Angka ini menunjukkan performa reformasi birokrasi di Jawa Tengah yang sangat positif, melampaui target yang telah ditetapkan yang sebesar 91,5. Capaian yang menembus angka 94 ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan reformasi birokrasi paling progresif. Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah ini merupakan hasil perbaikan berbagai strategi dan kebijakan birokrasi, yang tidak hanya fokus pada administrasi tetapi pada dampak nyata di masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain:

a. Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) pada tahun 2025. Strategi yang dilakukan dalam RB Tematik dengan mengarahkan birokrasi untuk langsung menyelesaikan empat isu mendasar:

- Pengentasan Kemiskinan, yaitu dengan mengintegrasikan data kemiskinan antar instansi agar intervensi lebih akurat;
- Peningkatan Investasi, melalui penyederhanaan izin usaha dan digitalisasi layanan penanaman modal;
- Digitalisasi Administrasi dengan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Prioritas Aktual Presiden, termasuk pengendalian inflasi dan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

b. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik

Digitalisasi dan inovasi pelayanan publik merupakan strategi yang juga terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah.

c. Penguatan Tata Kelola dan Antikorupsi

Jawa Tengah secara konsisten menjaga integritas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi lebih intensif dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi antikorupsi. Penguatan tata kelola pemerintahan juga dilakukan melalui perwujudan *Collaborative Government* yaitu sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (sebagai wakil pemerintah pusat di daerah) untuk memastikan program kerja tidak tumpang tindih.

d. Manajemen SDM Aparatur yang Adaptif

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan transformasi profesionalisme ASN antara lain dengan penyederhanaan jabatan birokrasi menjadi jabatan fungsional yang lebih lincah, serta penerapan sistem manajemen SDM berbasis digital yang transparan untuk promosi dan mutasi.

6. Indeks Demokrasi Indonesia

Tahun 2025, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang positif dengan capaian yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 85,84, dan lebih baik dari proyeksi tahun 2025. Skor ini menempatkan Jawa Tengah dalam kategori "Tinggi" (di atas 80). Capaian tinggi tersebut didorong oleh beberapa indikator yang mendapatkan skor maksimal atau mendekati sempurna, di antaranya:

- Kebebasan Berkeyakinan: Skor 96,50, menunjukkan tingkat toleransi yang sangat baik;
- Transparansi Anggaran: Skor 100,00, berkat penyediaan informasi APBD yang sangat terbuka bagi publik;
- Partisipasi Masyarakat: Skor 100,00 dalam hal memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan;
- Kesetaraan Gender: Skor 95,71, mencerminkan inklusivitas yang kuat dalam pembangunan daerah.

Meskipun skor keseluruhan tinggi, terdapat beberapa poin yang masih memerlukan perhatian (berada di bawah skor 70):

- Pemenuhan Hak Pekerja: Skor 59,70, menunjukkan perlunya perlindungan lebih bagi tenaga kerja.
- Netralitas Penyelenggara Pemilu: Skor 65,28, yang menjadi catatan penting terutama pasca pelaksanaan kontestasi politik daerah.
- Kelestarian Lingkungan: Skor 69,46 terkait jaminan pemerintah terhadap ruang hidup masyarakat.

Beberapa faktor pendorong meningkatnya skor IDI Jawa Tengah tahun 2025 antara lain Pemerintah Provinsi senantiasa memaksimalkan fungsi FKUB, PKDM, dan FPK dalam menangkal potensi ATHG, pemanfaatan informasi intelijen sebagai *early warning* untuk kesiapsiagaan daerah dalam menangkal eskalasi yang lebih luas, serta parpol yang melaksanakan kaderisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara di sisi lain, faktor-faktor yang menghambat perbaikan skor IDI pada beberapa komponennya antara lain masih lemahnya komitmen dalam pelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan, hingga kebijakan yang diskriminatif, serta terdapat beberapa penolakan pembangunan tempat ibadah dan aksi perusakan tempat ibadah di beberapa daerah.

Peningkatan skor IDI ini juga tidak terlepas dari berbagai upaya kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai kegiatan tersebut antara lain pelaksanaan Rapim/Rakor dengan FORKOPIMDA baik tingkat Provinsi/Kab/Kota hingga di kecamatan (FORKOPIMCAM), koordinasi dan pemberdayaan TOGA, TOMAS, FKUB, FPK, FKDM, dan Penghayat kepercayaan terkait isu intoleransi, pelaksanaan rapat kerja tim pokja IDI tingkat provinsi, fasilitasi penyelesaian masalah demokrasi di Jawa Tengah, penguatan keterbukaan partai politik, pendidikan politik melalui hibah kepada parpol, serta penguatan kemitraan pengembangan demokrasi.

7. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) merepresentasikan persepsi responden internal, eksternal, dan ahli terhadap risiko korupsi serta efektivitas upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2025, skor IIN Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,38 menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 79,47. Dengan skor di bawah 78, Jawa Tengah kini berada di zona kuning atau kategori Waspada. Meskipun masih berada di atas rata-rata nasional yang berada di angka 72,32, jarak skor IIN tersebut kini semakin menyempit. Skor Indeks Integritas Nasional merupakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan persepsi masyarakat (pengguna layanan), pegawai, serta ekspert (ahli). SPI merupakan media partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dengan mendorong perbaikan layanan dan tata kelola instansi melalui masukan langsung dari publik. Dari hasil survei pada ketiga komponen tersebut, skor komponen internal sebesar 79,28, komponen eksternal sebesar 89,83, dan komponen ekspert sebesar 67,85.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya skor IIN dilihat dari dimensi komponen internal adalah sosialisasi antikorupsi yang dinilai dari kebermanfaatan dari sosialisasi tersebut yaitu adanya pelaporan tindak pidana korupsi, pelaporan gratifikasi, pelaporan suap, dan menghindari konflik kepentingan. Sedangkan dari dimensi komponen ekspert terkait dengan persepsi ekspert terhadap adanya praktik suap, pungli, konflik kepentingan, dan intervensi pihak lain. Sementara pada dimensi komponen eksternal menjadi kekuatan utama Jawa Tengah dengan skor yang tinggi, yang menandakan kepercayaan publik tinggi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti publikasi ke media sosial, serta sosialisasi kepada perangkat daerah terkait hasil dan pelaksanaan SPI sebagai dasar penentuan skor IIN.

8. Otonomi Fiskal Daerah

Kinerja otonomi fiskal Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan cukup kuat, terutama dalam konteks transformasi tata kelola pemerintahan. Kinerja otonomi fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 tercatat sebesar 63,01, lebih rendah dari proyeksi tahun 2025. Angka ini cukup baik mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran sendiri melalui pendapatan asli daerah. Kinerja otonomi fiskal daerah Jawa Tengah juga didukung oleh kondisi makro ekonomi Jawa Tengah yang baik pada tahun 2025 antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen melampaui rata-rata Nasional, inflasi yang tetap terkendali pada angka 2,72 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen, serta realisasi investasi mencapai Rp88,50 triliun, yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja (418.138 orang) dan penguatan basis pajak daerah.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya otonomi fiskal daerah antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat kurang memahami manfaat pajak; penurunan penjualan mobil baru, karena penurunan daya beli masyarakat; meningkatnya penjualan kendaraan bermotor listrik; pemanfaatan aset daerah yang belum optimal dalam

peningkatan PAD; serta belum optimalnya kinerja BUMD. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan otonomi fiskal daerah antara lain penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya penanganan piutang pajak, pengembangan sistem pelayanan pajak digital dan pelayanan pajak melalui pihak ketiga, sosialisasi kepatuhan membayar pajak secara masif bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan publikasi melalui berbagi platform media, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dapat meningkatkan PAD, serta perbaikan tata kelola dan restrukturisasi unit bisnis BUMD.

Dari delapan IKU Daerah, tingkat ketercapaian atau realisasi tahun 2025 seluruhnya masuk dalam kategori sangat tinggi. Meskipun demikian ada dua indikator yang menjadi tantangan untuk perbaikan ke depan yaitu Indeks Integritas Nasional dan Otonomi Fiskal Daerah.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,66-9,00	9,39	102,88
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,5	94,06*	102,80
3	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,97	75,38	93,10
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	85,81–89,07	85,84	100,03
5	Otonomi Fiskal Daerah	%	63,56	63,01	99,13
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80 - 5,60	5,37	111,88
7	Indeks Modal Manusia	Angka	0,62	0,62**	100,00
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81 - 4,42	4,32	111,34

Keterangan:

- *) angka sementara, masih masa sanggah

- **) angka proyeksi tahun 2025, karena belum rilis

- Penghitungan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan kategori tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sangat Tinggi : $\geq 91\%$

Tinggi : 76 – 90,99%

Sedang : 66 – 75,99%

Rendah : 51 – 65,99%

Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

B. CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH TAHUN 2025

Dalam RKPD Tahun 2025, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah diukur dengan indikator tujuan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Rasio Gini, dan Angka Kemiskinan. Sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang perlu dicapai meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Nilai Tukar Petani;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pembangunan Keluarga;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Tingkat ketercapaian (%)
Tujuan: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari				
PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,30 -51,10	50,82	103,08
Angka Kemiskinan	%	9,66 – 9,00	9,39	102,88
Rasio Gini	Angka	0,362 - 0,367	0,350	103,43
Sasaran 1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan				
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80-5,60	5,37	111,88
Inflasi	%	1,50 - 3,50	2,72	128,68
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81 - 4,42	4,32	111,34
Nilai Tukar Petani	Angka	107,52	117,57	109,35
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif				
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,99	74,77	101,05
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	62,31	63,89 (2024)	102,54
Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,45	93,44 (2024)	99,99
Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,25	71,50	111,28
Sasaran 3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,68	77,30	102,14
Indeks Risiko Bencana	Angka	96,18	92,37	104,12
Sasaran 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis				
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,5	94,06	102,80

Keterangan : Penghitungan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan kategori tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sangat Tinggi	: $\geq 91\%$
Tinggi	: 76 – 90,99%
Sedang	: 66 – 75,99%
Rendah	: 51 – 65,99%
Sangat Rendah	: $\leq 50,99\%$

Berdasarkan gambaran capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, sebanyak 14 indikator kinerja seluruhnya mencapai tingkat ketercapaiannya kategori sangat tinggi. Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 tersebut didukung dengan kebijakan dan prioritas daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran 1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan nilai tukar petani, telah dilakukan melalui berbagai macam strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan:

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
 - 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - 6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - 7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; dan
 - 8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan perumusan kebijakan sebagai bagian dalam penyusunan roadmap pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat termasuk masyarakat miskin, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI, pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

Upaya strategi tersebut dijabarkan dan diimplementasikan dalam 67 program, dilaksanakan oleh 17 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan indikator indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan kebudayaan, indeks pembangunan gender, dan indeks pembangunan keluarga, telah dilakukan melalui berbagai macam strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan upaya:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *softskill* dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan

pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;

- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung program prioritas; peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan *surveilans* berbasis laboratorium; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan prasarana sarana olahraga memadai dan terjangkau, serta pembinaan dan pelatihan atlet;
- d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan;
- e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai *platform* termasuk *platform* digital;
- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
- h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Upaya strategi tersebut dijabarkan dan diimplementasikan dalam 26 program prioritas daerah, dilaksanakan oleh 13 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.

Sasaran 3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dan persentase penurunan indeks risiko bencana, telah dilakukan melalui berbagai macam strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan upaya:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan prasarana sarana pengolahan limbah dan persampahan (percepatan penyelesaian *readiness criteria* TPST regional dan fasilitasi proses pembangunan IPLT regional), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak, serta rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat (termasuk masyarakat miskin) terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/ *Early Warning System* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk

utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

Upaya strategi tersebut dijabarkan dan diimplementasikan dalam 22 program, dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.

Sasaran 4. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang dinamis

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi, telah dilakukan melalui berbagai macam strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan upaya:

- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non pemerintah.

Upaya strategi tersebut dijabarkan dan diimplementasikan dalam 41 program, di dalamnya termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang berlaku untuk seluruh perangkat daerah.

3.2 PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 67 huruf f, kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan Program Strategis Nasional sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk di dalamnya program prioritas Presiden. Pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki peran strategis dalam mendukung keterpaduan perencanaan, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan koordinasi pelaksanaan program prioritas Presiden di wilayah provinsi, termasuk yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Seiring dengan dinamika pelaksanaan program tersebut, diperlukan penyampaian informasi yang komprehensif mengenai perkembangan kegiatan, capaian yang telah diraih, serta berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Sebagai bentuk peran serta Provinsi dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional sebagai wujud dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) turut mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden melalui pelaksanaan program kegiatan

Perangkat Daerah Provinsi serta dukungan fasilitasi, koordinasi dan sinergitas bersama Kabupaten/Kota untuk berbagai program diantaranya:

1. Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, menuju Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, MBG bertujuan untuk mengatasi permasalahan diantaranya gizi buruk dan stunting, mendukung tumbuh kembang anak-anak, meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan.

Sebagai bentuk komitmen dalam dukungan pelaksanaan Program MBG, Pemprov Jateng telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG dan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/88 tanggal 25 Maret 2025 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/kot) membentuk Satgas Percepatan MBG.

Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan infrastruktur penyediaan pangan dan layanan gizi, telah direncanakan Pembangunan sebanyak 3.228 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sehubungan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Surat Sekretaris Daerah Nomor S/500.1/37/25 tanggal 2 Juni 2025 terkait pendataan aset yang dapat dimanfaatkan melalui mekanisme pinjam pakai lahan pada 134 titik. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan pangan, edukasi dan sosialisasi gizi, serta monitoring dan ketersediaan pangan.

Adapun capaian pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah, jumlah SPPG yang telah terbentuk sebanyak 3.364 unit SPPG, dengan penerima manfaat MBG sebanyak 4.288.525 orang terdiri dari Pelajar, Ibu hamil, Ibu Menyusui dan Balita. Sementara itu, Pemkab/kot yang telah membentuk Satgas Percepatan MBG adalah sebanyak 19 Pemkab/kota.

2. Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah

Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi. Tujuan dari Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir.

Sebagai komitmen dukungan pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, Pemprov Jateng telah melakukan intervensi berupa pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni sebanyak 17.510 unit melalui APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.357 Milyar serta sebanyak 2.743 unit melalui non-APBD (Baznas dan CSR).

Selain itu, Pemprov Jateng juga mendorong Pemkab/kot di Jawa Tengah untuk menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), saat ini 35 Pemkab/kot telah menetapkan PERKADA Pembebasan BPHTB bagi MBR dan Retribusi PBG. Percepatan program tersebut juga dilakukan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta Pemprov Jateng juga turut memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan para stakeholders terkait. Sampai dengan akhir tahun 2025, FLPP sudah te-realisasi di 33 Kabupaten/Kota sebanyak 22.157 unit rumah dengan nilai Rp.2,641 Triliun.

Dalam Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dihadapkan pada tantangan berupa jumlah kebutuhan rumah layak huni di Jawa Tengah yang cukup tinggi yaitu sebanyak 1.058.454 unit. Untuk itu, perlu dilakukan langkah strategis melalui penguatan perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dihadapkan pada tantangan berupa jumlah kebutuhan rumah layak huni di Jawa Tengah yang cukup tinggi yaitu sebanyak 1.058.454 unit. Untuk itu, perlu dilakukan langkah strategis melalui penguatan perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

3. Program Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai strategi utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini bertujuan membentuk koperasi di setiap desa dan kelurahan sebagai pusat layanan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. KDKMP diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional yang berangkat dari tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat ketahanan pangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Pembentukan KDKMP didorong oleh kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Sebagai komitmen dukungan pelaksanaan Program KDKMP, Pemprov Jateng telah melaksanakan diantaranya:

1. Koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan kebijakan di tingkat pusat–kab/kota–desa;
2. Fasilitasi akses pembiayaan, untuk mendorong pemanfaatan akses pinjaman sesuai Peraturan Menteri Keuangan;
3. Pembinaan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen koperasi, pendampingan AD/ART, serta penguatan kelembagaan;
4. Pemetaan potensi dan klaster usaha berdasarkan sektor prioritas (sembako, simpan pinjam, logistik, digitalisasi);
5. Fasilitasi kemitraan dan perluasan akses pasar untuk menghubungkan koperasi dengan BUMD, perbankan, serta berbagai jaringan pasar guna memperkuat keberlanjutan usaha koperasi;

6. Monitoring dan evaluasi data progres pembentukan dan pelaksanaan KDKMP;
7. Penguatan regulasi Daerah melalui penerbitan SE Gubernur untuk percepatan dan dukungan kab/kota.

Capaian program KDKMP di Jawa Tengah saat ini telah terbentuk 8.523 unit KDKMP (100%) dimana 6.233 unit telah operasional dan 2.289 unit belum operasional, dengan jumlah modal yang terkumpul sebesar Rp34.546.808.412 dan jumlah anggota 199.999 orang. Capaian ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan atas capaian operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tertinggi nasional.

4. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) adalah program pemerintah yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini menjadi kado ulang tahun dari negara untuk rakyatnya dengan tujuan mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pelaksanaan PKG di Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama RSUD dan RSJD Pemprov Jateng, serta berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan faskes Pemkab/kota. Pada bulan Mei 2025 Provinsi Jawa Tengah memperoleh apresiasi dari Pemerintah Pusat menjadi provinsi terbaik yang melaksanakan program PKG tersebut, utamanya didukung dengan program Dokter Spesialis Keliling (Speling).

Capaian PKG di Jawa Tengah pada tahun 2025 berdasar data yang ditarik pada aplikasi SATUSEHAT Indonesia-Ku per 1 Januari 2026 yaitu 881 Puskesmas di Jawa Tengah (100%) sudah melaksanakan PKG, dari target 37.892.283 orang telah tercapai 14.135.283 orang (37,3%) yang terdiri dari 119.148 Bayi baru lahir, 982.391 Balita dan anak pra-sekolah, 4.167.105 Usia sekolah dan remaja, 7.141.311 Dewasa dan 1.725.644 Lansia.

Disamping capaian yang cukup tinggi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan pelaksanaan PKG di Jawa Tengah antara lain adalah keterbatasan SDM di layanan, kendala aplikasi yang kemudian menghambat upaya pencatatan dan pelaporan, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk memanfaatkan PKG, serta pemenuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang tidak tepat waktu.

Terdapat beberapa solusi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan yang ada. Solusi tersebut antara lain adalah penguatan tim pelaksanaan CKG dengan penerbitan SK tim CKG, kolaborasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan CKG, sosialisasi secara masif dan melalui berbagai media, perluasan cakupan CKG pada tempat kerja, komunitas, dan event masyarakat, serta perencanaan dan usulan BMHP dengan berdasar pada sistem.

5. Program Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu Program Prioritas Presiden Prabowo, yang dirancang sebagai jalan bagi generasi muda di wilayah terpencil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Hadirnya Program Sekolah Rakyat merupakan kontribusi nyata dalam mengatasi

permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Program ini memberikan akses pendidikan gratis bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan karakter yang komprehensif, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur.

Pemprov Jateng berkomitmen untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui diantaranya, Mengkoordinasikan proses pendirian Sekolah Rakyat, Menjadi fasilitator antar Pemerintah Kab/Kota dengan Pemerintah Pusat, Memberikan dukungan administratif izin operasional Sekolah Rakyat Menengah Atas dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta Monev dan Bintek Penyelenggaraan SR di Kab/Kota.

Capaian Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah dilaksanakan pada 14 Kabupaten/Kota dengan 17 pembangunan Sekolah Rakyat yang terdiri dari 4 SD (11 rombel), 5 SMP (12 rombel) dan 8 SMA (28 rombel) dengan total 1.275 siswa.

Selanjutnya direncanakan Sekolah Rakyat Tahap II yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). di Provinsi Jawa Tengah terdapat 12 Kabupaten dan Kota yang masuk dalam Sekolah Rakyat Tahap II meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sragen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, kabupaten Temanggung, Kabupaten Blora, Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Wonogiri, yang ditargetkan akan selesai untuk tahun ajaran 2026/2027.

3.3 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan dalam pencapaian pembangunan daerah didukung oleh pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Kinerja ini diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU Perangkat Daerah tahun 2025 terdiri dari 111 Indikator dari 42 Perangkat Daerah, dengan rata-rata capaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 **(162,39%)** dan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sebesar **(193,39%)**.

Rata-rata capaian terhadap RKPD 2025 dipengaruhi oleh beberapa indikator yang melebihi target RKPD antara lain indikator Persentase penurunan kasus kematian ibu **(1.054%)**, Pertumbuhan nilai penanaman modal **(679,53%)**, dan Nilai tambah ekonomi kreatif **(3.621,42%)**. Rata-rata capaian terhadap RPD dipengaruhi oleh beberapa indikator yang melebihi target RPD antara lain pada indikator Persentase penurunan kasus kematian ibu **(1.054%)**, Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat **(3.772,73%)**, dan Nilai tambah ekonomi kreatif **(3.516,16%)**.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses layanan, kebutuhan peningkatan mutu pembelajaran, serta urgensi penguatan literasi dan karakter budaya masyarakat. Kondisi tersebut menuntut sistem yang mampu merespon dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya layanan pendidikan, keterbatasan sarana dan sumber daya pendukung, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penguatan budaya, serta sebagian wilayah masih menghadapi hambatan geografis maupun sosial. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan kebijakan pemerataan layanan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih memadai, program pelestarian dan peningkatan ruang ekspresi budaya, serta pemberdayaan komunitas.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96	13,05	100,69	12,98	13,05	100,54
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,15	100,12	8,2	8,15	99,39
3	Angka Melek Budaya	%	53,82	53,85	100,06	55,32	53,85	97,34

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD 1 indikator tercapai dan 2 indikator akan tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD, antara lain:

- a. **Harapan Lama Sekolah (100,69%)** salah satunya dilakukan melalui strategi pemerataan akses layanan pendidikan menengah dan khusus melalui pembiayaan pendidikan yang bebas pungutan, pelaksanaan kelas jauh dan kelas virtual serta peningkatan mutu pendidikan;
- b. **Rata-rata Lama Sekolah (100,12%)** didukung melalui upaya peningkatan partisipasi sekolah dengan pemberian bantuan pendidikan (beasiswa siswa miskin, beasiswa anak tidak sekolah), pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk sekolah negeri, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan baik melalui dana APBD maupun APBN, serta pembangunan unit sekolah baru SMA/ SMK/ SLB di wilayah *blankspot*.

2. Dinas Kesehatan

Pembangunan kesehatan menghadapi tantangan berupa kebutuhan peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan sistem kewaspadaan dan respon kesehatan masyarakat, perluasan akses pelayanan yang berkeadilan bagi seluruh kelompok usia, dinamika epidemiologis, perubahan pola penyakit, serta meningkatnya risiko kedaruratan kesehatan menuntut adanya tata kelola kesehatan daerah yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya pemerataan pelayanan kesehatan dan belum optimalnya deteksi, penanganan kasus prioritas, kelemahan kapasitas fasilitas pelayanan, koordinasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan sistem kesehatan dalam mengantisipasi potensi krisis yang mempengaruhi keberlanjutan pelayanan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan layanan esensial, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan,

pengembangan sistem pelayanan yang lebih terstandar dan responsif, optimalisasi jejaring layanan, penyediaan program promotif dan preventif yang lebih menasar kelompok risiko, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi kedaruratan.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,92	75,24	100,43	74,68	75,24	100,75
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	21,08	1.054	2	21,08	1.054
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	74,28	85,71	115,39	85,71	85,71	100
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting	%	85	88,88	104,56	90	88,88	98,76
5	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	82	83,06	101,29	86	83,06	96,58
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	51,69	63,67	123,18	53,49	63,67	119,03

Dinas Kesehatan memiliki 7 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD 5 indikator tercapai dan 2 indikator akan tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD, antara lain Indikator **Persentase Penurunan kasus Kematian Ibu (1.054%)** disebabkan adanya penguatan implementasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) melalui penyusunan rekomendasi AMPSR yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant Time-bound* (SMART). Penguatan kapasitas kompetensi melalui *Drill emergency, workshop* dan pelatihan tata laksana kegawatan maternal dan neonatal, dukungan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait. Dalam prosesnya banyak penyebab kasus kematian yang dapat dipelajari bersama di level fasyankes

dan Dinas Kesehatan supaya tidak terulang penyebab kasus yang sama. Penguatan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui koordinasi yang terintegrasi bersama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Surakarta Banyumas dan Semarang membahas tentang strategi teknis menekan penyebab obstetri kematian ibu. Pembahasan ini melibatkan tim AMPSR Provinsi dan Tim Mutu RSUP Kariadi dalam pendampingan AMPSR.

3. RSUD dr. Moewardi

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi menghadapi tantangan berupa tuntutan peningkatan mutu layanan, pemenuhan standar pelayanan kesehatan, penguatan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perubahan kebutuhan masyarakat, dinamika kasus kesehatan, serta ekspektasi terhadap layanan yang lebih profesional dan transparan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya kualitas layanan antar unit, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan standar pelayanan secara konsisten. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu pelayanan, penguatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem manajemen dan tata kelola risiko, penyediaan sarana penunjang yang lebih memadai, pengembangan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur, serta penguatan program pelibatan masyarakat.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	88,97	88,97	100	87	88,97	102,26

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPd dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD seluruhnya tercapai.

4. RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo

Pelayanan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo dihadapkan pada tantangan yang mencakup peningkatan mutu layanan, penguatan sistem rujukan, optimalisasi manajemen risiko, tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat, aman, dan terstandar, pembenahan menyeluruh dalam tata kelola, kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas yang mendukung efektivitas pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain ketidakmerataan konsistensi mutu layanan antar unit, keterbatasan kapasitas operasional dalam memenuhi standar pelayanan, belum optimalnya penerapan prinsip manajemen risiko, kebutuhan peningkatan kepuasan masyarakat, kompleksitas proses pelayanan, serta keterbatasan sarana yang mempengaruhi kelancaran dan kualitas layanan kesehatan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu dan standar pelayanan, penguatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem manajemen risiko secara terstruktur, pengembangan fasilitas layanan, optimalisasi proses operasional, serta peningkatan mekanisme evaluasi kinerja pelayanan.

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Prof. dr. Margono Soekarno Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarno	%	90,5	93,78	103,62	90	93,78	104,20

RSUD Prof. dr. Margono Soekarno memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

5. RSUD dr. Adhyatma, MPH

Penyelenggaraan pelayanan RSUD dr. Adhyatma, MPH dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan mutu layanan, penguatan sistem rujukan, pengelolaan risiko yang lebih komprehensif, meningkatnya kompleksitas kebutuhan kesehatan masyarakat serta tuntutan terhadap pelayanan yang aman, cepat, dan berstandar tinggi, serta optimalisasi tata kelola serta kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum seragamnya mutu layanan antar unit, keterbatasan kapasitas dalam memenuhi standar pelayanan, penerapan manajemen risiko yang belum berjalan secara optimal, kebutuhan peningkatan kepuasan masyarakat, pengendalian risiko operasional, serta penguatan koordinasi layanan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan standar mutu layanan, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan sistem manajemen risiko secara terstruktur, optimalisasi proses pelayanan, peningkatan sarana penunjang, serta penyempurnaan mekanisme evaluasi kinerja.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	91,11	92,22	101,22	90	92,22	102,47

RSUD dr. Adhyatma, MPH memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

6. RSUD dr. Rehatta

Penyelenggaraan pelayanan di RSUD dr. Rehatta dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan mutu layanan kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, serta penguatan reformasi birokrasi, pelayanan yang aman, berorientasi pada pasien.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya pemenuhan cakupan standar pelayanan minimal, kualitas layanan, implementasi manajemen risiko dan reformasi birokrasi. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas tata kelola layanan, penguatan cakupan dan standar pelayanan

minimal, implementasi manajemen risiko secara terstruktur, peningkatan kepuasan masyarakat melalui penyempurnaan mekanisme pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi praktik reformasi birokrasi.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	89	93,8	105,39	90	93,8	104,22

RSUD dr. Rehatta memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

7. RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Penyelenggaraan pelayanan RSJD dr. Amino Gondohutomo dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan kontribusi terhadap derajat kesehatan masyarakat, penguatan kualitas tata kelola, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan, layanan yang aman, responsif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum seragamnya kualitas implementasi standar layanan, adanya variasi dalam persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan, pengelolaan risiko yang masih memerlukan penguatan pada aspek identifikasi, mitigasi, maupun tindak lanjut. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas tata kelola dan pelaksanaan standar layanan, pemantapan sistem pemantauan kinerja, serta penguatan kompetensi SDM.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98	99,52	101,55	98	99,52	101,55

RSJD dr. Amino Gondohutomo memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

8. RSJD dr. Arif Zainudin

Penyelenggaraan layanan di RSJD dr. Arif Zainuddin dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan kontribusi terhadap derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan jiwa yang bermutu, penguatan tata kelola kelembagaan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, serta pemenuhan standar pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Permasalahan yang dihadapi antara lain ketidakseimbangan kualitas implementasi standar pelayanan, tantangan dalam menjaga persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa, serta perlunya penguatan pengelolaan risiko

di seluruh unit kerja. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas tata kelola pelayanan, penguatan penerapan standar layanan melalui supervisi berkelanjutan, serta pengembangan kompetensi SDM.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Utama RSJD dr. Arif Zainuddin Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	96,58	97,86	101,32	98,25	97,86	99,60

RSJD dr. Arif Zainuddin memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

9. RSJD dr. RM. Soedjarwadi

Penyelenggaraan layanan di RSJD dr. RM. Soedjarwadi dihadapkan pada tantangan berupa pemantapan mutu pelayanan kesehatan jiwa, peningkatan keterpenuhan standar pelayanan minimal, serta penguatan tata kelola melalui reformasi birokrasi.

Permasalahan yang dihadapi antara lain ketidakterpaduan dalam penerapan standar pelayanan di berbagai unit dan variasi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penyempurnaan penerapan standar pelayanan minimal, penguatan sistem kendali mutu, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung profesionalisme pelayanan kesehatan jiwa.

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama RSJD dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	98	98,91	100,93	100	98,91	98,91

RSJD dr. RM. Soedjarwadi memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD akan tercapai.

10. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan pemenuhan akses pelayanan dasar di bidang air minum dan sanitasi, perbaikan kondisi bangunan gedung milik daerah, agar memenuhi standar fungsi dan keselamatan, peningkatan konektivitas wilayah, keselamatan transportasi, serta efektivitas penyediaan infrastruktur dasar menjadi kebutuhan strategis yang menuntut optimalisasi kapasitas teknis dan tata kelola pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya kondisi infrastruktur yang memenuhi standar, keterbatasan efektivitas pengelolaan sarana prasarana

dasar, serta tantangan dalam memastikan keberfungsian aset daerah secara berkelanjutan, keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya optimal. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan perencanaan teknis, percepatan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, serta optimalisasi dukungan terhadap penyediaan layanan dasar air minum dan sanitasi, peningkatan pendataan, penjaminan standar teknis, serta penguatan mekanisme pengawasan.

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap	%	68,01	71,38	104,96	70,29	71,38	101,55
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	48,18	48,76	101,20	46,24	48,76	105,45
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	82,15	85,43	103,99	92,33	85,43	92,53
4	Persentase jumlah kompleks bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	61,65	61,65	100	72,82	61,65	84,66
5	Persentase akses air minum aman	%	42,93	43,85	102,14	44,93	43,85	97,60
6	Persentase akses air limbah domestik aman	%	12,5	10,32	82,56	12	10,32	86

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya memiliki 6 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 5 indikator sangat tinggi dan 1 indikator tinggi, terhadap target akhir RPD 2 indikator tercapai dan 4 indikator akan tercapai.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPD, yaitu indikator **Persentase akses air limbah domestik aman (82,56%)** disebabkan oleh beberapa kendala mendasar, yakni pertumbuhan jumlah penduduk di kabupaten/ kota yang tidak diimbangi dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) baru karena keterbatasan anggaran kabupaten/ kota yang diprioritaskan untuk pembangunan tangki septik rumah tangga. Upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk mendukung kabupaten/ kota dengan mengalokasikan anggaran hibah guna mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik.

11. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan kualitas pelayanan sumber daya air, penguatan efektivitas pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu, penguatan kinerja sistem jaringan irigasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana sumber daya air menjadi kebutuhan prioritas untuk memastikan tercapainya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya kesenjangan kualitas sarana dan prasarana sumber daya air, belum optimalnya efektivitas pengelolaan pemanfaatan ruang, keterbatasan dalam penegakan ketentuan rencana tata ruang, serta koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan daya tampung embung dan penampungan air lainnya, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air seperti embung, longstorage, jaringan irigasi, perkuatan tebing dan normalisasi sungai, penyiapan materi teknis perubahan peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	62,78	62,78	100	66,29	62,78	94,70
2	Persentase ket-erwujudan penataan ruang	%	58,33	58,33	100	77,56	58,33	75,21

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD seluruhnya akan tercapai.

12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan kualitas dan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, penguatan pembangunan lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta perwujudan tertib administrasi pertanahan yang akurat, terintegrasi, dan berkeadilan, serta, percepatan reforma agraria sebagai program strategis nasional.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya kondisi dan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang memenuhi standar kelayakan, masih terbatasnya kualitas infrastruktur permukiman dasar dan adanya ketidakteraturan dalam penataan kawasan permukiman, pada proses administrasi pertanahan menghadapi tantangan berupa keterbatasan kelengkapan data, kompleksitas proses penetapan lokasi, serta belum optimalnya capaian dalam

penyelenggaraan reforma agraria. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan perencanaan dan pelaksanaan program (Peningkatan kualitas rumah, penyediaan rumah layak huni, dan kawasan permukiman, serta optimalisasi penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman), penyempurnaan administrasi pertanahan melalui percepatan penetapan lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan umum, peningkatan akurasi data pertanahan guna memastikan kepastian hukum, ketertiban pemanfaatan ruang, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan reforma agraria.

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	41,57	50,46	121,39	42,86	50,46	117,73
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	39,78	32,87	121,02	51,4	32,87	156,37
3	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	20,22	20,75	102,62	0,55	20,75	3.772,73
4	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	%	100	100	100	100	100	100

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 5 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD seluruhnya tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RPD dan RKPD, antara lain indikator **Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat** dengan capaian RPD **(3.772,73%)** dan RKPD **(102,62%)**. Tingkat capaian terhadap RPD disebabkan pada awal penargetan belum memperhitungkan capaian kinerja di luar APBD Provinsi Jawa Tengah sedangkan realisasi s.d tahun 2025 merupakan hasil perhitungan realisasi secara agregat dari berbagai sumber pendanaan (APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten/Kota, CSR, Baznas) dan melalui proses verifikasi dan validasi data yang mencapai 84.232 unit dari angka target RPD sampai dengan Tahun 2025 yaitu 2.233 unit.

13. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada tantangan berupa penguatan penegakan produk hukum daerah, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap potensi gangguan ketertiban, penanganan dinamika sosial yang memerlukan respons cepat dan terukur, kebutuhan peningkatan kualitas manajemen risiko perangkat daerah serta penyempurnaan tata kelola pelayanan publik.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum, belum optimalnya pemenuhan standar operasional perlindungan masyarakat, adanya potensi kerentanan sosial, pengelolaan risiko perangkat daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan operasional, serta kualitas pelayanan internal belum merata. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan koordinasi penegakan produk hukum daerah, peningkatan kapasitas personel dalam penanganan ketertiban dan perlindungan masyarakat, optimalisasi sistem deteksi dini, penyempurnaan manajemen risiko perangkat daerah dan peningkatan kualitas pelayanan.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Penye-lenggaraan Tran-tibum	Angka	85	97,43	114,62	88	97,43	110,72

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinamika sosial-politik yang berkembang pada periode pasca pemilihan umum menunjukkan peningkatan sensitivitas terhadap stabilitas politik, kohesi sosial, serta ketahanan ideologi di tengah arus informasi digital yang tidak terbatas. Kondisi ini menuntut penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, ketahanan masyarakat terhadap disrupsi informasi, serta koordinasi lintas lembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Permasalahan yang dihadapi antara lain meningkatnya penyebaran narasi yang berpotensi memecah belah, polarisasi masyarakat, kerentanan terhadap isu politik identitas, dan masih terbatasnya efektivitas mitigasi risiko kelembagaan serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kebijakan dalam merespons dinamika politik dan sosial yang berkembang. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan kapasitas koordinasi lintas sektor untuk memastikan respons yang cepat, terukur, tepat sasaran, dialog kebangsaan, peningkatan literasi politik masyarakat serta pemantapan sinergi kelembagaan dalam pengelolaan informasi strategis.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2,905	3,12*	107,40	3,065	3,12	101,80

Ket: *) Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan data triwulan III tahun 2025, data akhir diperkirakan rilis pada akhir Maret 2026 oleh Lemhannas RI.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

15. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Fokus kebijakan prioritas BPBD Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk menurunkan risiko bencana secara sistematis melalui penguatan kebijakan dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya kemampuan daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana, keterbatasan dan ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kebencanaan, kesiapsiagaan dan kecepatan penanganan bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini. Upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, pemberdayaan masyarakat secara inklusif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana, serta penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS).

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,76	0,75	98,68	0,76	0,75	98,68

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD akan tercapai.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPD, yaitu indikator **Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (98,68%)** disebabkan oleh perbedaan capaian antar daerah, belum optimalnya pemenuhan beberapa indikator, serta kualitas data yang belum seragam. Upaya yang dilakukan melalui pendampingan teknis, peningkatan kapasitas SDM, pengawalan proses sanggah, integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam perencanaan daerah, dan pemantauan capaian secara berkala.

16. Dinas Sosial

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial menghadapi tantangan berupa meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial, keterbatasan kemandirian kelompok rentan dan kebutuhan penguatan perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya akses pelayanan rehabilitasi sosial, keterbatasan pemenuhan hak dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, serta belum optimalnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan layanan. Selain itu, dinamika kerentanan sosial yang terus berubah menyebabkan sebagian kelompok rentan masih menghadapi hambatan dalam mencapai kondisi sosial yang lebih stabil dan mandiri. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan program rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif, memperluas cakupan perlindungan sosial, serta memastikan pemenuhan layanan secara layak dan tepat sasaran, optimalisasi peran potensi sumber kesejahteraan sosial, serta pendampingan berkelanjutan dan integrasi layanan kelompok rentan.

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	5,04	5,04	100	1,66	5,04	303,62

Dinas Sosial memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RPD, antara lain indikator **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya (303,61%)** disebabkan pada tahun 2024-2025 terdapat penambahan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT sebanyak 163.000 orang. Penambahan alokasi anggaran bersumber dari DBHCHT oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.

17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghadapi tantangan berupa meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan dinamika pasar kerja yang cepat berubah, serta penguatan perlindungan tenaga kerja dalam berbagai sektor.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja yang layak dan upah yang berkeadilan, adanya ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan standar keselamatan kerja, serta dinamika pengusaha dan tenaga kerja dalam penyesuaian diri dengan perubahan kebutuhan tenaga kerja/

SDM baik dari segi keterampilan/ kompetensi dan teknologi. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pemagangan, akreditasi lembaga dan sertifikasi serta perluasan akses penempatan tenaga kerja yang terarah, penegakan norma ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), norma lingkungan kerja, serta pembinaan hubungan industrial, fasilitasi pembinaan syarat dan jaminan sosial.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,64	30,6	106,84	28,7	30,6	106,62
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	68,57	74,28	108,33	74,28	74,28	100
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rupiah	56	57,24	102,21	57	57,24	100,42
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	10,15	10,22	100,69	10,53	10,22	97,06
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,06	71,08	100,03	71,08	71,08	100
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91,58	91,65	100,08	92,09	91,65	99,52
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80,96	80,96	100	80,38	80,96	99,28

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 7 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD 4 indikator tercapai dan 3 indikator akan tercapai.

18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi tantangan antara lain masih tingginya kerentanan kelompok perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, masih adanya ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan serta dinamika pembangunan kependudukan dan keluarga yang dinamis.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mendorong pemenuhan hak anak, terbatasnya akses atau jangkauan terhadap layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan maupun anak di daerah, serta masih lemahnya keluarga utamanya kelompok keluarga rentan dalam menghadapi dinamika sosial. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui pemberdayaan perempuan secara terintegrasi, perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, optimalisasi layanan keluarga, serta kolaborasi unsur hexa-helix yang sinergis dan berkelanjutan.

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65	73,67*	113,34	68	73,67	108,34
2	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40	66,67	166,68	40	66,67	166,68
3	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,2	5,23	80,31	4,15	5,23	79,35
4	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,1	2,06	101,94	2,11	2,06	102,43

Ket: *) Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan data tahun 2024, data tahun 2025 diperkirakan rilis Akhir Desember 2026 oleh Kementerian PPA.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 4 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 3 indikator sangat tinggi dan 1 indikator tinggi, terhadap target akhir RPD 3 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPD, yaitu indikator **Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan (80,31%)** disebabkan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sehingga kasus kekerasan masih dianggap masalah domestik rumah tangga sehingga tidak perlu dilaporkan. Upaya yang telah dilakukan salah satunya dengan kolaborasi pentahelix untuk pencegahan kekerasan dan pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di tingkat Kecamatan se-Jawa Tengah sebagai tempat layanan maupun upaya pencegahan kekerasan.

19. Dinas Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan menghadapi tantangan berupa dinamika ketersediaan pangan, ketidakstabilan akses masyarakat terhadap pangan, peningkatan pemanfaatan pangan yang berorientasi pada kualitas gizi dan keberlanjutan serta perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya pemerataan ketersediaan pangan di wilayah dan waktu tertentu, terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan strategis, beredarnya pangan segar yang tidak memenuhi kriteria

keamanan dan mutu serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) dan berkelanjutan serta masih terdapat wilayah dengan kerentanan pangan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan sistem produksi pangan, stabilisasi distribusi dan pengendalian gejolak harga, peningkatan edukasi pemanfaatan pangan berbasis gizi seimbang, melaksanakan pengawasan, pengujian dan penanganan tindak lanjut terhadap komoditas pangan segar di peredaran, serta meningkatkan pelayanan sertifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan segar.

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85,47	73,73	86,26	83,1	73,73	88,72

Dinas Ketahanan Pangan memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian tinggi dan terhadap target akhir RPD akan tercapai.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPD, yaitu indikator **Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (86,26%)** disebabkan adanya perubahan perhitungan IKP tahun 2025 menggunakan 12 indikator yang sebelumnya menggunakan 9 indikator. IKP tersusun atas indikator yang melibatkan data lintas sektor. Upaya yang dilakukan antara lain menyusun data ketersediaan komoditas pangan strategis, memastikan pasokan, akses dan harga pangan strategis terjangkau oleh masyarakat, subsidi harga pangan, fasilitasi distribusi pangan, gelar pangan murah dan kios pangan murah, serta subsidi pangan sumber energi untuk keluarga yg berisiko stunting.

20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan menghadapi tantangan berupa kebutuhan peningkatan kualitas ekosistem, penguatan tata kelola sumber daya alam, pemantapan upaya pengendalian pencemaran yang berkesinambungan, serta tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, perubahan pemanfaatan lahan, dan peningkatan aktivitas sosial-ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya efektivitas pengawasan lingkungan, adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan prinsip keberlanjutan, keterbatasan kapasitas dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, belum optimalnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, integrasi perencanaan lintas sektor, serta konsistensi implementasi program. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan instrumen pengelolaan lingkungan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan pendekatan pengendalian pencemaran dan kerusakan yang lebih terarah dan sistematis, optimalisasi sinergi antar-sektor, penyusunan kebijakan berbasis kajian ilmiah, serta pelaksanaan program prioritas yang diarahkan untuk menjaga kualitas ekosistem dan memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,91	85,20	100,34	85,03	85,20	100,20
2	Indeks Kualitas Air	Angka	68,71	72,69	105,79	50,68	72,69	143,43
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	59,46	60,3	101,41	42,47	60,3	141,98
4	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	1.022.457	100	1.022.457	1.022.457	100
5	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,35	3,32	100,90	3,33	3,32	100,60
6	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,37	0,32	115,5	0,37	0,32	115,44

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 6 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, dan terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai.

21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil menghadapi tantangan berupa kebutuhan penguatan tata kelola desa, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pemerataan kapasitas pembangunan berbasis masyarakat, dinamika sosial ekonomi, perubahan karakteristik demografi, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan publik.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya kapasitas kelembagaan desa, terbatasnya efektivitas pendampingan pembangunan berbasis masyarakat, serta masih adanya kesenjangan kualitas pelayanan administrasi kependudukan antar wilayah. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan kelembagaan desa, peningkatan kompetensi aparatur dan pendamping, serta pengembangan layanan administrasi kependudukan yang lebih terstandar dan mudah diakses.

Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Nilai Level Admin-dukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4	4	100	4	4	100
2	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	Nilai	0,7618	0,7486	98,27	0,8018	0,7486	93,37

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD 1 indikator tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPD, yaitu indikator **Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah (98,27%)**, disebabkan terdapat perubahan

Indeks, dimana pada tahun 2025 berubah menjadi Indeks Desa (ID) dengan 6 dimensi pengukuran yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan pendampingan pada desa dengan status kemandirian kategori tertinggal, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten, serta para pendamping desa baik tenaga ahli di kabupaten, kecamatan dan pendamping desa. Pendampingan yang dilakukan antara lain dengan klarifikasi pengisian dimensi pengukuran Indeks Desa Tahun 2025.

22. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan menghadapi tantangan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan kualitas layanan transportasi yang aman, terhubung, dan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup penguatan keselamatan perjalanan, peningkatan konektivitas lintas wilayah, perbaikan kualitas layanan angkutan umum, serta tuntutan tata kelola birokrasi yang lebih adaptif dan profesional.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum meratanya kualitas infrastruktur pendukung keselamatan, keterbatasan integrasi jaringan transportasi antarmoda, serta variasi kinerja layanan angkutan umum. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas teknis unit pelaksana serta optimalisasi sistem pelayanan transportasi berbasis teknologi.

Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,276	6,3	100,38	6,532	6,3	96,45
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,412	0,43	104,37	0,457	0,43	94,09
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15,33	15,33	100	14,48	15,33	94,45
4	On Time Performance layanan transportasi	%	85,05	85,2	100,18	86,88	85,2	98,07

Dinas Perhubungan memiliki 4 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD seluruhnya akan tercapai.

23. Dinas Komunikasi dan Informatika

Tantangan dalam penyelenggaraan layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah berkaitan dengan kebutuhan memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik, serta penguatan keamanan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan terpercaya.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya integrasi antar platform layanan digital, variasi kualitas pengelolaan data sektoral dan geospasial, serta keterbatasan dalam penerapan sistem keamanan informasi yang komprehensif. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui perluasan layanan digital, optimalisasi pemanfaatan data statistik dan geospasial, serta penyempurnaan mekanisme pengelolaan keamanan informasi.

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,5	4,56	101,33	3,77	4,56	120,96
2	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	64	100	156,25	100	100	100
3	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	638	855	134,01	640	855	133,59

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD seluruhnya telah tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD, antara lain indikator **Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah (156,25%)** disebabkan adanya eskalasi besar pada jumlah respon yang sangat positif dari pengguna Open Data Jawa Tengah baik dari masyarakat lokal, regional, maupun global yang berdampak pada pertumbuhan pemanfaatan data menjadi signifikan. Ketersediaan berita statistik yang esensial, termasuk data indikator makro pembangunan Jawa Tengah dalam bentuk infografis, sehingga pemanfaatan data statistik geospasial menjadi optimal.

24. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tantangan dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah mencakup kebutuhan untuk memperkuat peran sektor ini sebagai penggerak perekonomian daerah, meningkatkan daya saing kelembagaan, serta memastikan tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain ketidakseimbangan kapasitas kelembagaan koperasi, variabilitas kemampuan UMKM dalam bertahan dan berkembang serta keterbatasan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan pembinaan dan pengawasan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku koperasi dan UMKM, serta konsolidasi kebijakan yang mendukung penguatan ekosistem usaha.

Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12,99	15,06	115,94	13,41	15,06	112,30
2	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7,39	8,03	108,66	7,74	8,03	103,75
3	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0,38	0,93	244,74	0,46	0,93	202,17

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD seluruhnya telah tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD, antara lain indikator **persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah (244,74%)** didukung dengan meningkatnya kualitas SDM pengurus/ pengelola/ pengawas/ koperasi dalam peningkatan tata Kelola serta kinerja usaha koperasi, serta meningkatnya kepatuhan koperasi dalam pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Kesehatan.

25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tantangan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan daerah berfokus pada upaya memperkuat iklim investasi yang kompetitif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Tantangan tersebut mencakup konsolidasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian berusaha, optimalisasi proses perizinan yang terintegrasi, serta peningkatan peran daerah dalam memfasilitasi masuknya penanaman modal yang produktif dan berorientasi pada pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan investasi serta keragaman kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan proses layanan perizinan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparatur dalam fasilitasi investasi, serta perluasan mekanisme pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha.

Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,25	28,88	679,53	4,5	28,88	641,78
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100	112,98	112,98	100	112,98	112,98

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	98,56	108,31	92	98,56	107,13

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD 5 seluruhnya telah tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD, antara lain indikator **Pertumbuhan nilai penanaman modal (679,53%)** disebabkan meningkatnya minat pelaku usaha dalam mendirikan usaha di Jawa Tengah terbukti dengan bertambahnya jumlah proyek dari tahun 2024 ke tahun 2025 yang semula sejumlah 65.815 proyek menjadi 105.078 proyek yang didominasi industri barang dari kulit dan alas kaki, serta masifnya upaya yang dilakukan dalam meningkatnya realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kegiatan penanaman modal, antara lain melalui optimalisasi promosi penanaman modal dan business meeting, serta memberikan pendampingan terhadap segala kegiatan perizinan dan penanaman modal pada pelaku usaha dan calon pelaku usaha baik secara luring maupun daring.

26. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata mencakup kebutuhan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan derajat kebugaran masyarakat, serta mengembangkan destinasi wisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Tantangan tersebut juga mencakup upaya untuk memperluas partisipasi pemuda, meningkatkan prestasi olahraga, serta mendorong inovasi sektor pariwisata yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pada beberapa bidang, belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kepemudaan dan keolahragaan, serta variasi kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan potensi lokal. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, serta pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	58,25	63,23	108,55	58,54	63,23	108,01
2	Sport Development Index (SDI)	%	0,45	0,48	106,67	0,47	0,48	102,13
3	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,26	10,60	128,33	8,5	10,60	124,71
4	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1.737 Milyar	62.904,111 Milyar	3.621,42	1.789 Milyar	62.904,111 Milyar	3.516,16

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata memiliki 4 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD seluruhnya tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD, antara lain indikator **Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (3.621,42%)** dipengaruhi oleh penambahan penetapan kabupaten/kota Kreatif (KaTa Kreatif) oleh kementerian ekonomi kreatif. Data s/d tahun 2025 terdapat 14 KaTa kreatif yg berimplikasi pada peningkatan seluruh kegiatan ekonomi kreatif, mencakup PDRB ekonomi kreatif, jumlah tenaga kerja dan peningkatan upah serta ekspor produk unggulan ekonomi kreatif.

27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tantangan dalam penyelenggaraan kearsipan dan layanan perpustakaan daerah berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola arsip, penguatan literasi masyarakat, serta pengembangan layanan informasi yang adaptif terhadap kebutuhan publik. Tantangan tersebut mencakup kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan standar kearsipan, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yang inklusif, serta memperkuat peran lembaga kearsipan sebagai pusat penyedia informasi yang andal dan berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya variasi kualitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah, keterbatasan pemanfaatan fasilitas perpustakaan oleh masyarakat, belum optimalnya penerapan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang konsisten di lingkup internal, serta belum meratanya kapasitas SDM dalam bidang kearsipan dan perpustakaan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan sistem kearsipan berbasis standar nasional, penyediaan layanan perpustakaan yang lebih variatif dan mudah diakses masyarakat, optimalisasi tata kelola lembaga, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM.

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	96,17	98,04	101,95	96	98,04	102,13
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	15,45	38,86	251,52	17,5	38,86	222,06

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD seluruhnya telah tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD, antara lain indikator **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) (236,70%)** disebabkan berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat terjadi perubahan formulasi perhitungan dan dimensi IPLM. Upaya yang dilakukan yaitu koordinasi dengan Perpusnas RI untuk kepastian nilai IPLM dan berkoordinasi

dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah untuk penyesuaian target karena adanya formulasi perhitungan baru.

28. Dinas Kelautan dan Perikanan

Tantangan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat ketahanan ekonomi pesisir, meningkatkan produktivitas usaha perikanan, serta memperbaiki tata kelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi mendukung kebijakan perikanan serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang berorientasi keberlanjutan ekosistem perairan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas produksi pelaku perikanan, fluktuasi kondisi lingkungan dan ekonomi, serta pemanfaatan teknologi yang belum merata. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam tata kelola sumber daya kelautan perikanan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,5	99,93	94,72	106	99,93	94,27
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	110,5	107,19	97,01	112	107,19	95,71
3	Produksi perikanan	Ton	952.718	974.612,08	102,30	2.859.106	1.942.965,88	67,96

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD seluruhnya akan tercapai.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPD, yaitu indikator:

- a. **Nilai Tukar Nelayan (94,72%)** disebabkan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) mengalami kenaikan sebesar 1,32 persen lebih tinggi dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) sebesar 0,75 persen. Kenaikan It disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok penangkapan di perairan umum sebesar 1,51 persen (nila, patin, tawes, udang, dan gabus) dan kelompok penangkapan di laut sebesar 1,32 persen (kembung, layur, cumi-cumi, tenggiri, kakap, layang, bawal, dan belanak. Sedangkan kenaikan Ib disebabkan naiknya Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 1,42 persen serta Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) yang juga mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen. Upaya yang telah dilakukan antara lain pemberian bantuan hibah sarpras penangkapan ikan untuk nelayan kecil, kegiatan penanggulangan rumah ikan untuk menambah stok ikan, asuransi nelayan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, pemeliharaan alur dan sarpras pelabuhan perikanan, fasilitasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sentra nelayan, fasilitasi penerbitan dokumen perijinan kapal perikanan melalui layanan

gerai perijinan secara gratis, pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) secara gratis, penerbitan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 5 desa pesisir di Jawa Tengah.

- b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (97,01%)** disebabkan kenaikan biaya produksi terutama pakan dan sarana produksi budidaya tidak diimbangi kenaikan harga jual serta ketergantungan pembudidaya kepada pengepul ikan yang berdampak pada harga ikan yang cenderung stagnan. Upaya yang telah dilakukan antara lain sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pembudidaya ikan agar melaksanakan kegiatan budidaya sesuai pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) agar ikan hasil budidaya terjamin mutunya, pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya kepada pembudidaya ikan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produksi hasil budidaya melalui hilirisasi produk perikanan yang terintegrasi dalam satu lokasi, memberikan dukungan kepada pembudidaya ikan untuk melakukan kerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka penyediaan ikan segar untuk pemenuhan kebutuhan protein pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

29. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan mencakup kebutuhan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, serta memastikan pengelolaan sumber daya lahan dan air yang lebih adaptif terhadap dinamika iklim. Selain itu, peningkatan kesejahteraan petani, penguatan struktur usaha tani, serta perbaikan kualitas layanan publik di bidang pertanian menjadi prioritas penting guna mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan pedesaan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain variasi kapasitas produksi akibat perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman, ketidakseimbangan minat petani terhadap komoditas tertentu, belum optimalnya tata kelola internal dalam mendukung efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan pertanian, penyediaan sarana pendukung, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi lintas sektor. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian, penguatan pembinaan dan penyuluhan, penyempurnaan tata kelola sumber daya pertanian, serta pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan sistem manajemen risiko, serta peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,16	1,22	762,5	0,13	1,22	938,46
2	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,57	121,29	114,89	105,95	121,29	114,48
3	NTP Hortikultura	Angka	108,49	126,8	116,88	108,95	126,8	116,38

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
4	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100,97	113,72	112,63	101,35	113,72	112,21

Dinas Pertanian dan Perkebunan memiliki 4 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD seluruhnya telah tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD yaitu **Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (762,5%)** dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi per kapita terhadap produk pertanian, seperti beras, sayuran dan buah-buahan, serta kebijakan dan dukungan pemerintah melalui program swasembada pangan yang menunjang peningkatan produksi pertanian.

30. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tantangan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berfokus pada penguatan ketahanan subsektor peternakan, peningkatan kesejahteraan peternak, serta perbaikan tata kelola pelayanan publik di bidang kesehatan hewan. Selain itu, dinamika kebutuhan konsumsi protein hewani, perubahan pola usaha, dan tuntutan peningkatan kualitas layanan reformasi birokrasi menempatkan sektor peternakan pada posisi penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain fluktuasi kemampuan produksi akibat kondisi biologis ternak dan risiko penyakit hewan, ketergantungan pelaku usaha terhadap bahan produksi tertentu, kapasitas peternak dalam meningkatkan nilai tambah produk ternak, kebutuhan peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam mendukung rantai produksi dan distribusi hasil peternakan serta belum optimalnya tata kelola internal dalam mendukung standarisasi pelayanan publik dan penguatan manajemen risiko. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan pembinaan teknis kepada peternak, peningkatan pengendalian kesehatan hewan, fasilitasi peningkatan kapasitas usaha, dorongan penggunaan teknologi budidaya dan pengolahan, pengembangan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penyempurnaan tata kelola organisasi melalui penguatan standar pelayanan dan penerapan manajemen risiko.

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3,1	5,45	175,81	3,15	5,45	173,02
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100,8	99,75	98,96	101	99,75	98,76

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD 1 indikator tercapai 1 indikator akan tercapai.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPD, yaitu indikator **laju pertumbuhan PDRB ADHK subsektor peternakan (18,71%)** dan **Nilai Tukar Petani Peternakan (98,96%)**. Permasalahan yang dihadapi yaitu kenaikan harga pakan, obat dan sarana produksi. Upaya yang dilakukan yaitu antara lain subsidi transportasi bahan pangan asal ternak untuk menekan harga di tingkat konsumen, dukungan program cadangan jagung pemerintah bagi peternak ayam layer, penyediaan bibit ternak unggul, serta fasilitasi pakan berkualitas berbasis bahan lokal guna menurunkan biaya produksi, peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, bantuan hibah uang dan peralatan untuk meningkatkan skala usaha peternakan, serta dorongan investasi dan ekspor melalui kemudahan perizinan, penerbitan sertifikat NKV, pendampingan peningkatan mutu produk, dan peningkatan kapasitas SDM peternak melalui Sekolah Usaha Peternakan Rakyat (SUPRA).

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPD, yaitu indikator **Nilai Tukar Petani Peternakan (98,96%)**. Permasalahan yang dihadapi yaitu kenaikan harga pakan, obat dan sarana produksi. Upaya yang dilakukan yaitu antara lain subsidi transportasi bahan pangan asal ternak untuk menekan harga di tingkat konsumen, dukungan program cadangan jagung pemerintah bagi peternak ayam layer, penyediaan bibit ternak unggul, fasilitasi pakan berkualitas berbasis bahan lokal guna menurunkan biaya produksi, peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, bantuan hibah uang dan peralatan untuk meningkatkan skala usaha peternakan, mendorong investasi dan ekspor melalui kemudahan perizinan, penerbitan sertifikat NKV, pendampingan peningkatan mutu produk dan peningkatan kapasitas SDM peternak melalui SUPRA.

31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral mencakup kebutuhan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola pertambangan, serta menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah sebagai sumber daya vital. Selain itu, peningkatan ketahanan energi, keamanan pasokan listrik, serta reformasi tata kelola internal menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang efisien, adaptif, dan ramah lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya variasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kaidah pertambangan yang baik, keterbatasan koordinasi dalam pengawasan sumber daya air tanah, belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan, ketidakseimbangan kebutuhan energi dengan ketersediaan infrastruktur, serta perlunya penguatan tata kelola birokrasi dan manajemen risiko. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan regulasi dan pengawasan pertambangan, peningkatan kapasitas teknis dalam pengelolaan air tanah, percepatan program pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih terstruktur, penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang energi dan sumber daya mineral, serta penyempurnaan tata kelola internal, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	21,32	22,33	104,74	21,6	22,33	103,38
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	KWh/Ka pita	826,11	826,43	100,04	791,32	826,43	104,44
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,63	3,74	103,03	3,65	3,74	102,47
4	Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP)	%	57	63,49	111,39	62	63,49	102,40

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki 4 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD seluruhnya telah tercapai.

32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penyelenggaraan sektor industri dan perdagangan masih mengedepankan penguatan daya saing industri dan perdagangan, penguatan dan perluasan pasar luar negeri untuk produk Jawa Tengah, menjaga kelancaran distribusi serta stabilisasi stok dan harga barang strategis. Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, konsolidasi tata kelola birokrasi, serta penguatan ekosistem usaha menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain peningkatan daya saing belum mampu mengimbangi dinamika kebutuhan pasar yang sangat cepat berubah, ketimpangan wilayah yang menyebabkan perbedaan waktu dan biaya distribusi, sarana prasarana pendukung perdagangan yang belum memadai, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi perdagangan dan industri, Penguatan koordinasi lintas sektor dan penerapan tata kelola internal yang konsisten. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas dan fasilitasi pelaku usaha industri dan perdagangan, pembukaan pasar *non-traditional*, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan industri dan perdagangan, penguatan mekanisme pengendalian distribusi dan stabilisasi harga, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,59	4,63	100,87	5,36	4,63	86,38
2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor	%	3,5	4,06	116	3,75	4,06	108,27

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
	industri pengolahan							

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD 1 indikator tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

33. Sekretariat Daerah

Tantangan dalam penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah mencakup kebutuhan untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan kemampuan perumusan kebijakan, serta mendorong konsistensi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi hasil. Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan administrasi, reformasi birokrasi, serta penguatan manajemen risiko menjadi aspek penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi antara lain meliputi belum optimalnya integrasi proses koordinasi kebijakan, tantangan dalam memastikan konsistensi pelaksanaan pelayanan administrasi sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pemahaman dan komitmen terhadap penerapan reformasi birokrasi dan manajemen risiko belum sepenuhnya merata. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan mekanisme koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah, peningkatan kapasitas perumusan kebijakan, konsolidasi tata kelola internal, pembinaan implementasi reformasi birokrasi, penguatan sistem manajemen risiko, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.

Tabel 3.35 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,1	39,93	107,63	38,1	39,93	104,80
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	93,78	104,2	90	93,78	104,2
3	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	95,47	106,08	90	95,47	106,08
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	80	84,15	105,19	80	84,15	105,19

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
	lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah							

Sekretariat Daerah memiliki 4 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD seluruhnya tercapai.

34. Sekretariat DPRD

Tantangan dalam penyelenggaraan layanan kesekretariatan DPRD berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini mencakup optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kedewanan serta perbaikan prosedur layanan yang mampu mendukung efektivitas kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu, tuntutan profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan publik menempatkan Sekretariat DPRD pada peran penting dalam memastikan kelancaran proses pemerintahan daerah.

Permasalahan yang dihadapi antara lain sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan kedewanan belum seluruhnya terpenuhi, kemudahan prosedural dalam layanan administrasi yang belum memadai, serta koordinasi internal dan kesiapan infrastruktur digital masih memerlukan penguatan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyempurnaan prosedur layanan, serta penguatan koordinasi internal dan peningkatan kualitas infrastruktur digital.

Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	91	91,97	101,07	92	91,97	99,97
2	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	76	77,7	102,24	77	77,7	100,91
3	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	76	80,83	106,36	77	80,83	104,97

Sekretariat DPRD memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD 2 indikator tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tantangan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan keselarasan antar dokumen perencanaan, peningkatan kualitas tata kelola birokrasi, serta penguatan integrasi kebijakan pembangunan pada seluruh tingkatan pemerintahan. Tantangan tersebut mencakup upaya menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, sekaligus memastikan bahwa proses perencanaan didasarkan pada bukti, responsif terhadap dinamika pembangunan, serta selaras dengan prioritas nasional.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya keterpaduan antar perangkat daerah dalam proses perencanaan, variasi kualitas dalam penyusunan substansi dokumen, keterbatasan dalam memastikan kesesuaian tahapan perencanaan dengan regulasi, serta kemampuan internal dalam pengelolaan risiko, pemanfaatan data perencanaan, dan penerapan prinsip tata kelola yang lebih adaptif. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas penyusun perencanaan, konsolidasi internal dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola birokrasi, serta penerapan manajemen risiko secara sistematis (memastikan bahwa dokumen perencanaan tersusun secara selaras, berbasis bukti, dan mendukung arah pembangunan daerah secara menyeluruh).

Tabel 3.37 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100	100	100	100	100	100

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD seluruhnya tercapai.

36. Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tantangan dalam pengembangan riset dan inovasi daerah berfokus pada kebutuhan memperkuat ekosistem penelitian yang terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah. Tantangan tersebut mencakup peningkatan kualitas inovasi lokal, penguatan tata kelola lembaga riset, serta percepatan pemanfaatan hasil

penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan. Di sisi lain, tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik juga menempatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah pada peran strategis dalam mendorong transformasi kinerja pemerintahan yang lebih adaptif dan inovatif.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya tingkat penerapan hasil riset di perangkat daerah, belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan inovasi, adanya kebutuhan peningkatan kapasitas internal dalam pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola lembaga riset, serta kualitas layanan publik dan kendala dalam penyelarasan kebijakan berbasis bukti. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan riset dan inovasi, peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan berkelanjutan, konsolidasi internal dalam pengelolaan manajemen risiko, optimalisasi fungsi pelayanan publik, peningkatan kualitas tata kelola birokrasi, serta perluasan jaringan kemitraan riset.

Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	73	82,63	113,19	74	82,63	111,66

Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tantangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penguatan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaporan secara terpadu menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa seluruh proses keuangan dan pengelolaan aset dapat mendukung efektivitas pembangunan daerah.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya ketidaksempurnaan dalam integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset oleh sebagian perangkat daerah, konsistensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas layanan internal yang belum merata. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penyempurnaan kebijakan teknis, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi mekanisme Monev (memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban), serta pembinaan intensif kepada perangkat daerah (pengelolaan aset, percepatan digitalisasi sistem keuangan, serta peningkatan kualitas layanan publik dilakukan secara berkesinambungan).

Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97,91	97,91	100	98	97,91	99,91
2	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	89,86	89,86	100	95,69	89,86	93,91

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD seluruhnya akan tercapai.

38. Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan pendapatan daerah, konsolidasi kebijakan fiskal menjadi langkah strategis untuk memastikan kesinambungan penerimaan yang stabil. Upaya ini tidak hanya menekankan pada peningkatan kapasitas pemungutan, tetapi juga pada penyesuaian terhadap dinamika regulasi yang terus berubah. Transformasi layanan berbasis digital menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem pendapatan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.

Tabel 3.40 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	-6,19	-6,69	92,53	-3,38	-6,69	50,52
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	3,19	3,57	111,91	-3,47	3,57	100

Badan Pengelola Pendapatan Daerah memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD 1 indikator tercapai dan 1 indikator perlu Upaya keras.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPD, yaitu indikator **Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah (92,53%)**. Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian IKU utamanya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan capaian 95,31%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan capaian 68,86% serta Pajak Rokok dengan capaian 96,36%.

Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh : belum optimalnya kepatuhan pembayaran PKB yang ditandai dengan masih tingginya saldo piutang PKB per 31 Desember 2025 yang masih mencapai 3,008 triliun rupiah (*unaudited*); menurunnya penjualan kendaraan bermotor berbasis bahan bakar fosil berdasarkan data GAIKINDO dan dinamika meningkatnya jumlah kendaraan bermotor listrik; serta

adanya fenomena *down trading* rokok yaitu fenomena peralihan konsumsi rokok dari golongan atas menjadi golongan menengah bawah sehingga mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan cukai rokok dan pajak rokok.

Upaya optimalisasi pendapatan Daerah antara lain melalui; penguatan basis data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyusunan data subjek dan objek dengan atribut lengkap; pengembangan sistem informasi terintegrasi dan pengembangan digitalisasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

39. Badan Kepegawaian Daerah

Tantangan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah berfokus pada penguatan penerapan prinsip sistem merit dalam seluruh proses pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan integritas tata kelola kepegawaian, serta percepatan transformasi digital dalam layanan kepegawaian. Tantangan tersebut menjadi penting mengingat kebutuhan organisasi untuk menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya ketidakterpaduan dalam implementasi kebijakan manajemen ASN, belum optimalnya pemetaan dan pengembangan talenta pegawai, keterbatasan konsistensi dalam penerapan prinsip objektivitas dan transparansi pada berbagai proses kepegawaian, serta, kesiapan organisasi dalam mengadopsi sistem layanan digital belum sepenuhnya merata. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan regulasi dan tata kelola sistem merit, penyempurnaan mekanisme pengelolaan talenta, peningkatan profesionalitas ASN melalui program pengembangan kompetensi yang berkesinambungan, serta, percepatan integrasi sistem informasi kepegawaian dan penguatan koordinasi lintas unit.

Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,87	0,87	100	0,87	0,87	100

Badan Kepegawaian Daerah memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai.

40. Inspektorat

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan dan tata kelola organisasi mencakup kebutuhan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapabilitas aparat pengawasan, serta konsistensi penerapan prinsip manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, dorongan untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik menjadi pijakan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Permasalahan yang dihadapi antara lain berupa ketidakterpaduan pelaksanaan pengawasan internal, belum optimalnya kualitas pengelolaan risiko pada berbagai

tingkatan organisasi, serta tantangan dalam memperkuat budaya kinerja yang berbasis integritas dan profesionalitas, serta keterbatasan internal dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah dan belum meratanya pemahaman atas kerangka pengendalian internal.

Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan kerangka pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas aparat pengawasan melalui pembinaan dan pendampingan teknis, optimalisasi mekanisme evaluasi kinerja yang lebih terstruktur, mendorong perangkat daerah melakukan integrasi proses pengelolaan risiko dengan perencanaan dan penganggaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kualitas layanan internal.

Tabel 3.42 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3	2	66,67	3	2	66,67
2	Level Kapabilitas APIP	Level	3	2	66,67	3	2	66,67
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3	2	66,67	3	2	66,67

Inspektorat memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPd dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sedang dan terhadap target akhir RPD seluruhnya akan tercapai.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKPd, yaitu:

- Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi (66,67%)** disebabkan penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh BPKP terdapat pemenuhan akses *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang mengakibatkan adanya perubahan dalam penilaian. Upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan pendampingan Identifikasi Risiko pada seluruh Perangkat Daerah dan melaksanakan evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah.
- Level Kapabilitas APIP (66,67%)** disebabkan terdapat pengembangan/ pembaharuan tools Penilaian Kapabilitas APIP dengan mengacu pada PP 60/2002, Standar Global (GIAS) dan Kerangka Penilaian IA-CM antara lain Pedoman kini mengarah pada pelembagaan dan peningkatan kapabilitas yang berkelanjutan, pimpinan APIP menjadi penggerak utama peningkatan kapabilitas dengan dukungan dan pimpinan organisasi, kualitas peran dan layanan APIP menjadi indikator utama dalam meningkatkan kapabilitas, implementasi pedoman berfokus pada penguatan manajemen pengawasan dan profesionalisme penugasan, serta gradasi kapabilitas menggambarkan integrasi pengawasan pada perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI) dan Pengendalian Kecurangan. Upaya yang telah dilakukan yaitu Melaksanakan koordinasi secara

aktif dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP, serta Menyusun perbaikan SOP Pengawasan.

- c. **Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah (66,67%)** disebabkan belum optimalnya implementasi Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya yang telah dilakukan yaitu Melaksanakan monev atas implementasi Manajemen Risiko pada seluruh Perangkat Daerah dan Bersama BAPPEDA merumuskan Rapergub tentang Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.

41. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang adaptif, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sistem pelayanan publik sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya birokrasi yang mampu bergerak responsif terhadap perubahan, memiliki kompetensi yang memadai, serta mampu mengelola risiko organisasi secara terstruktur untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya kesenjangan antara standar kualitas pelayanan yang diharapkan dengan kemampuan operasional perangkat daerah, ketidakterpaduan dalam implementasi reformasi birokrasi, belum optimalnya mekanisme pengelolaan risiko pada seluruh tingkatan organisasi, serta kebutuhan peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, perbaikan kerangka manajemen risiko, penyempurnaan mekanisme pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas unit.

Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,08	3,92	127,27	3,1	3,92	126,45
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	17,34	84,22	485,70	26,1	84,22	322,68
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	100	100	100	100	100

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD 5 seluruhnya tercapai.

Adapun IKU yang capaiannya melebihi target RKPD yaitu indikator **Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan**

kompetensi (485,70%) disebabkan adanya berbagai terobosan dan sistem yang terintegrasi, penerapan jenis dan metode pembelajaran yang kekinian sehingga pengembangan kompetensi dapat diikuti oleh semua ASN di Provinsi Jawa Tengah.

42. Badan Penghubung

Penyelenggaraan tugas Badan Penghubung menghadapi dinamika yang menuntut penguatan kualitas pelayanan publik, percepatan reformasi birokrasi, serta peningkatan efektivitas tata kelola lembaga. Perubahan lingkungan strategis, meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan, serta berkembangnya kebutuhan koordinasi antar wilayah menjadi landasan penting dalam mendorong adaptasi organisasi. Kondisi tersebut memerlukan orientasi kinerja yang lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan agar pelayanan kepada pejabat dan masyarakat dapat berlangsung secara optimal.

Permasalahan yang dihadapi antara lain konsistensi kualitas pelayanan, penguatan sistem kerja berbasis kinerja, dan penguatan manajemen risiko, standar pelayanan, penyederhanaan proses internal, penguatan budaya kerja aparatur, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan tata kelola internal, pengembangan kapasitas aparatur, dan optimalisasi mekanisme pelayanan publik, serta peningkatan pemantauan kinerja, internalisasi nilai-nilai profesionalisme, penataan proses kerja yang lebih adaptif dan berorientasi hasil, penguatan fungsi koordinasi, penyempurnaan sistem pengendalian internal, serta perbaikan prosedur layanan.

Tabel 3.44 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			RPD 2024-2026		
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85	86,25	101,47	85	86,25	101,47

Badan Penghubung memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target akhir RPD telah tercapai.

3.4 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

3.4.1.1 Urusan Pendidikan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir mengambil langkah kebijakan strategis untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas, antara lain: dengan fokus pada upaya Mengatasi masih tingginya ATS, angka putus sekolah, maupun Tingkat serapan lulusan. (melanjutkan Pendidikan dan keterserapan di Dunia Kerja).

Mengatasi permasalahan akses, khususnya pada wilayah dengan kategori blankspot yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 24 kecamatan, maka pada tahun 2025 dilakukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di 4 lokasi (3 di antaranya merupakan pembangunan tahap lanjutan dan 1 lokasi baru). Melalui pendirian USB

dimaksud jumlah wilayah kecamatan blankspot berkurang menjadi 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Upaya penanganan perluasan akses melalui pembangunan USB dilakukan sesuai skala prioritas tingkatan hambatan keterbatasan akses, dan upaya lain yang dilakukan untuk hal ini antara lain melalui: penambahan daya tamping melalui pembangunan ruang kelas baru, Beasiswa Siswa Miskin, Jalur Afirmasi SPMB, dan program terobosan terbaru melalui program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah yang dikelola oleh masyarakat (swasta).

Selain Program prioritas yang telah dijelaskan sebagaimana pada paragraf kedua, terdapat rekomendasi DRPD pada urusan pendidikan yang meliputi : a) penguatan pondasi sistem pembangunan SDM, b) penuntasan angka putus sekolah, c) mengoptimalkan cakupan dan rasio ketersediaan infrastruktur sekolah, d) mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta, e) pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan jumlah minimal 2 sekolah tiap kabupaten, (f) peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa dan Pendidikan Non Formal, (g) Link Match Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Atas rekomendasi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tindak lanjut program/kegiatan yang akan dilakukan melalui : a) pembangunan Unit Sekolah Baru (USB): SMAN, SMKN dan SLBN, b) peningkatan sarpras: DAK Fisik (pengadaan alat), c) peningkatan sarpras melalui APBD, d) distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, e) Beasiswa Siswa Miskin (BSM), f) bantuan seragam siswa miskin, g) bantuan perlengkapan sekolah (siswa miskin), h) penyelenggaraan Program Kemitraan melalui kerjasama dengan sekolah swasta, i) pemberian hibah kepada satuan pendidikan SD, SMP, SMK dan SLB swasta, dan Lembaga Non Formal, j) sekolah Inklusi, Semi Boarding dan Boarding, k) bimbingan dan pelatihan guru pendamping anak berkebutuhan khusus, l) pelatihan Keterampilan Tambahan (Upskilling & Reskilling), m) kemitraan dengan Industri yang di kenal dengan Link and Match dalam penyaluran alumni SMK, n) Sertifikat Kompetensi bagi Siswa maupun tamatan SMK, o) Penguatan Kemitraan SMK dan BLK dengan sektor industri prioritas, dan p) Pengembangan SDM Vokasi.

Komitmen peningkatan layanan urusan pendidikan telah menghadirkan/ memperoleh pengakuan dan penghargaan di tingkat nasional dengan capaian prestasi sepanjang tahun 2025:

1. Olimpiade Siswa Nasional (OSN) jenjang SD, SMP dan SMA memperoleh 6 emas, 15 perak dan 27 perunggu;
2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD, SMP, SMA, SMK memperoleh 4 Emas, 2 Perak, dan 3 Perunggu;
3. Lomba Keterampilan Siswa (LKS) jenjang SMK dan SLB memperoleh 9 Emas, 11 Perak, dan 11 Perunggu;
4. Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB memperoleh 5 Emas, 5 Perak, dan 7 Perunggu;
5. Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang SMP memperoleh 3 Emas, 2 Perak, dan 1 Perunggu;
6. Lomba FIKSI jenjang SMA memperoleh 4 Emas, 3 Perak, dan 2 Perunggu;

7. Provinsi Dengan Karya Terbaik Dalam Sayembara Cerita Praktik Baik 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat oleh Kemdikdasmen;
8. Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025 kategori Wiyata Dharma Madya dan Bunda PAUD Provinsi Peduli PAUD oleh Kemdikdasmen;
9. Anugerah Provinsi Terbaik Dalam Pemanfaatan Data Pendidikan dan Pengimbasan dan Pemanfaatan Rumah Pendidikan oleh Kemdikdasmen;
10. Anugerah Guru Pejuang Digital oleh Kemdikdasmen;
11. Provinsi Penerima Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) oleh Kemdikdasmen;
12. Anugerah Pengimbasan dan Pemanfaatan Rumah Pendidikan Terbaik oleh Kemdikdasmen;

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam melaksanakan Urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didukung anggaran Rp3.363.824.753.000,00 untuk melaksanakan 4 Program yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan** didukung anggaran Rp3.361.891.269.000,00 dengan realisasi fisik 99,95% dan keuangan 97,04%. Program ini memiliki 57 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 44 sangat tinggi antara lain APK SMA, APK SMK dan APK SLB; Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB; Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikasi kompetensi. 6 tinggi antara lain: Rasio ruang kelas:rombongan belajar SMA; Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, 1 sedang pada Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK, dan SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, 2 rendah pada Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK, dan SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan IV serta 4 sangat rendah antara lain: Persentase capaian prestasi peserta didik pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, II, hal ini disebabkan karena cabang dinas tersebut tidak mendapatkan penghargaan dalam perlombaan akademik dan non-akademik tingkat provinsi. Bidang pembinaan SMK; Persentase angka putus sekolah SMK pada Bidang Pembinaan SMK, hal ini disebabkan karena siswa SMK lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Terhadap target akhir RPD terdapat 29 Indikator telah tercapai, 15 indikator akan tercapai dan 13 Indikator perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu *Blank Spot* (Kecamatan yang belum ada SMA, SMK dan SLB Negeri). **Upaya** yang dilakukan antara lain Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan rombongan belajar. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meningkatnya partisipasi pendidikan melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan.
- 2. Program Pengembangan Kurikulum** didukung anggaran Rp458.646.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 87,47%, terkait dengan realisasi keuangan hal ini disebabkan karena penyusunan kompetensi dasar/capaian pembelajaran muatan lokal pendidikan menengah

dan khusus dapat digabungkan sesuai dengan kondisi topologi daerah. Program ini memiliki 13 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target RPD, terdapat 13 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain belum meratanya kapasitas pendidik dalam memahami dan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik, dan belum meratanya implementasi kurikulum di satuan Pendidikan. **Upaya** yang dilakukan yaitu: peningkatan kompetensi pendidik melalui bimbingan teknis dan pendampingan, penyusunan serta penyempurnaan dokumen kurikulum satuan Pendidikan dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas pembelajaran

3. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, didukung anggaran Rp851.994.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 93,48%, terkait dengan Realisasi keuangan hal ini disebabkan beberapa kegiatan pendistribusian guru melalui koordinasi dengan pusat/BKN dilaksanakan secara daring dikarenakan keterbatasan waktu untuk tatap muka. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri). Terhadap target RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu: belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan, adanya ketimpangan jumlah jam mengajar dan jumlah guru di beberapa sekolah, keterbatasan pemenuhan kebutuhan guru mata pelajaran produktif serta adanya ketidakseimbangan pertumbuhan guru. **Upaya** yang dilakukan antara lain melakukan distribusi guru dan tenaga kependidikan melalui pendekatan domisili mengusulkan penambahan formasi pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pemenuhan guru produktif melalui skema guru tamu, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemerataan dan peningkatan kualitas SDM pendidikan. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meratanya guru melalui optimalisasi jumlah jam mengajar, meningkatnya efektivitas proses pembelajaran, terjaminnya layanan pendidikan yang adil dan merata, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan sesuai target RKPD.
4. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**, didukung anggaran Rp622.844.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 86,63%, terkait dengan realisasi keuangan hal ini disebabkan karena berkas/dokumen yang diusulkan sudah sesuai dengan syarat usulan perizinan sehingga tidak perlu peninjauan berulang. Program ini memiliki 16 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 9 sangat tinggi yaitu Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMK, Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus, dan Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB Cabdin I,II,III,IX,X,XI,XII; 1 indikator tinggi yaitu Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB Cabdin V; 2 indikator sedang yaitu Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB Cabdin IV dan VII; serta 4 indikator sangat rendah yaitu Persentase usulan

perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB Cabdin VI, VIII, XIII dan Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA hal ini disebabkan oleh usulan perizinan yang diusulkan oleh masyarakat tidak berada di wilayah *Blankspot* Pendidikan. Terhadap target akhir RPD terdapat 5 indikator yang tercapai, 4 indikator akan tercapai, 7 indikator perlu Upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain: minat masyarakat mendirikan satuan pendidikan pada wilayah blank spot rendah. **Upaya** yang dilakukan antara yaitu: mendorong masyarakat (Yayasan pendidikan) untuk berpartisipasi dalam pendirian USB di wilayah blank spot. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meningkatnya akses layanan pendidikan melalui terselenggaranya satuan pendidikan yang memiliki legalitas sesuai ketentuan, terjaminnya mutu dan standar penyelenggaraan pendidikan, meningkatnya kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan, serta mendukung pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah.

Tabel 3.45 Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
1	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	%	85	86,71	102,01	90	86,71	96,34
2	Rasio ruang kelas: rombongan belajar SMA	Angka	38,85	0,85	2,18	1	0,85	85
3	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	67,85	79,08	116,55	79,12	79,08	99,94
4	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%	58	7,3	12,58	56	7,3	13,03
5	Persentase angka putus sekolah SMA	%	2,25	0,26	11,55	2,28	0,26	11,40
6	Persentase angka putus sekolah SMK	%	0,021	2,71	12905	0,024	2,71	11292
7	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	%	70	75,58	107,97	76,5	75,58	98,79
8	Rasio ruang kelas: rombongan belajar SMK	Angka	0,65	0,55	84,61	0,6	0,55	91,66
9	Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	%	60,29	57,78	95,83	58,82	57,78	98,23

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	56,64	54,32	95,90	54,5	54,32	99,67
11	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	%	14,47	19,15	132,34	18,56	19,15	103,18
12	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka	20	0,81	4,05	0,85	0,81	95,29
13	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	10	41,57	415,7	10	41,57	415,7
14	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%	68,18	57,7	84,629	68,18	57,7	84,62
15	Persentase angka putus sekolah SLB	%	2,85	1,54	54,03	3,2	1,54	48,12
16	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%	88	84,1	95,56	84,1	84,1	100
17	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	%	35	20	57,14	20	20	100
18	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%	40	20	50	20	20	100
19	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	1,75	8,05	460	7,5	8,05	107,33
20	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	%	1	82,73	8273	86,34	82,73	95,81
21	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%	91,11	124,63	136,79	90,9	124,63	137,11
22	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%	76,97	63,62	82,65	76,84	63,62	82,79
23	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	1	0	0	4,2	0	0
24	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%	40,71	83,73	205,67	83,73	83,73	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	2,9	12,64	435,86	9,5	12,64	133,05
26	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%	70	89,14	127,34	85,71	89,14	104
27	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%	76,44	79,41	103,89	77,96	79,41	101,86
28	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%	26	71,91	276,58	75,1	71,91	95,752
29	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	1,75	0,86	49,14	1,5	0,86	57,33
30	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%	71,85	70,15	97,63	71,25	70,15	98,45
31	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	1,94	7,47	385,05	1,93	7,47	387,05
32	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%	79	82,82	104,84	99,5	82,82	83,23
33	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%	94,64	83,74	88,48	94,23	83,74	88,86
34	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%	80,52	80,99	100,58	80,17	80,99	101,02
35	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	95	4,89	5,14	4	4,89	122,25
36	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%	95	83,25	87,63	93	83,25	89,51
37	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	2,76	14,37	520,65	2,75	14,37	522,55
38	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%	85,75	90,48	105,52	89,62	90,48	100,96
39	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%	72,85	112,3	154,15	72,84	112,3	154,17

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%	77,46	77,26	99,74	77,25	77,26	100,01
41	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	2,4	8,6	358,33	8,7	8,6	98,85
42	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%	76,14	89,28	117,26	76,13	89,28	117,27
43	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	3,26	6,46	198,16	5,5	6,46	117,45
44	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%	79,3	88,16	111,17	88,9	88,16	99,16
45	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%	54,62	81,22	148,7	81,25	81,22	99,96
46	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%	78,22	83,46	106,7	78,06	83,46	106,92
47	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	35,71	9,48	26,54	19,84	9,48	47,78
48	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%	85,59	84,1	98,25	85,17	84,1	98,74
49	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%	88,46	84,76	95,81	88,14	84,76	96,16
50	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	5,6	2,59	46,25	4,84	2,59	53,51
51	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%	52,53	78,48	149,4	78,48	78,48	100
52	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	2,24	1,44	64,28	2,08	1,44	69,23
53	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%	85	81	95,29	83	81	97,59
54	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%	81,7	75,28	92,14	81,4	75,28	92,48

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%	88,27	80,78	91,51	88,26	80,78	91,52
56	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	2,54	4,31	169,69	2,53	4,31	170,36
57	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%	79,9	88,05	110,2	88,05	88,05	100
II PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
1	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka	90,06	89	98,82	89,56	89	99,37
2	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka	82,22	80,52	97,93	81,72	80,52	98,53
3	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka	84,27	82,42	97,80	83,77	82,42	98,38
4	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka	82,77	80,31	97,02	82,27	80,31	97,61
5	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	Angka	89,34	88,75	99,34	88,84	88,75	99,89
6	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka	87,49	85,97	98,26	86,99	85,97	98,82
7	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka	89,83	88,99	99,06	89,33	88,99	99,61
8	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka	90,03	88,95	98,8	89,53	88,95	99,35
9	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka	86,85	85,66	98,63	86,35	85,66	99,20
10	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka	83,21	81,52	97,96	81,47	81,52	100,06
11	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka	84,27	81,19	96,34	83,77	81,19	96,92

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka	86,3	84,22	97,59	85,8	84,22	98,15
13	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka	87,06	85,42	98,11	86,56	85,42	98,68
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
1	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	85	25,0	29,91	25,0	25,0	100
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
1	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%	17	15	88,23	100	15	15
2	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%	94,59	98,15	103,76	94,29	98,15	104,09
3	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	3	3	100	3	3	100
5	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	100	16,21	16,21	15	16,21	108,07
7	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	20	11,11	55,55	15	11,11	74,067
8	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	25	20	80	25	20	80
9	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	100	50	50	100	50	50
10	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	100	66,67	66,67	100	66,67	66,67
11	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	100	4	4	100	4	4

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	75	52	69,333	50	52	104
13	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	50	5,41	10,82	2,71	5,41	199,63
14	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	9,52	4,71	49,475	4,76	4,71	98,95
15	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	100	100	100	100	100	100
16	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	100	0	0	100	0	0

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengelolaan Pendidikan didukung 3 kegiatan yaitu: Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, dan Pengelolaan Pendidikan Khusus.

- 1) Pengelolaan Pendidikan SMA**, dengan **keluaran** rehabilitasi 11.740 Ruang Kelas, Perpustakaan, Sanitasi, dan Laboratorium pada 570 satuan pendidikan SMA serta pembangunan 5 Unit Sekolah Baru (USB) di Kota Tegal, Kabupaten (Wonosobo, Klaten, Pemalang dan Banyumas).
- 2) Pengelolaan Pendidikan SMK**, dengan **keluaran** antara lain rehabilitasi 24.264 Ruang Kelas, Perpustakaan, Sanitasi, dan Laboratorium pada 1.560 satuan pendidikan SMK serta pembangunan 3 USB di Kabupaten Purbalingga dan Batang.
- 3) Pengelolaan Pendidikan Khusus**, dengan **keluaran** antara lain rehabilitasi 3.006 Ruang Kelas, Perpustakaan, Sanitasi, dan Laboratorium pada 187 satuan pendidikan SLB serta pembangunan 1 USB di Kabupaten Banyumas.

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ TA 2024 mengenai penguatan pondasi sistem pembangunan SDM melalui pendidikan. **Outcome** kegiatan tersebut, diantaranya peningkatan angka kelulusan, dan angka partisipasi pendidikan. **Manfaat** yang diterima, diantaranya meningkatnya pemerataan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, mencegah angka putus sekolah. **Dampaknya** yaitu layanan pendidikan yang semakin merata dan berkualitas. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum semua peserta didik dari keluarga miskin mendapatkan layanan pendidikan gratis (di swasta) belum optimalnya fasilitas pendidikan. **Upaya** yang

dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan digitalisasi pendidikan, inovasi layanan pembelajaran (penyelenggaraan kelas virtual dan jauh).

2. Program Pengembangan Kurikulum, didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah** dengan keluaran penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah pada 2392 satuan pendidikan menengah
- 2) **Pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus** dengan keluaran penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah pada 186 satuan pendidikan Khusus.

Outcome kegiatan tersebut, diantaranya kurikulum lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mengakomodasi kearifan lokal sekaligus menyiapkan siswa menghadapi era digital. **Manfaat** yang diterima, diantaranya SDM Jawa Tengah lebih kompetitif di tingkat nasional maupun internasional, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. **Dampak** dari kegiatan ini diantaranya, kesiapan menghadapi dunia kerja dimana kurikulum berbasis kompetensi menekankan keterampilan Abad 21 (*critical thinking, collaboration, creativity, communication*), dan penguatan karakter siswa, dimana kurikulum menanamkan nilai moral, etika, dan kebangsaan yang relevan dengan konteks Jawa Tengah. **Permasalahan** pada pelaksanaan program ini yaitu belum meratanya guru yang menguasai platform pembelajaran. **Upaya** yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam penguasaan platform pembelajaran digital.

- 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, didukung kegiatan **Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) provinsi**, dengan **keluaran** pemenuhan 24.132 Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLB. **Outcome** kegiatan tersebut, diantaranya Peningkatan kompetensi guru, Meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dan seimbangannya pertumbuhan guru sehingga manajemen sekolah lebih efektif dan efisien. **Manfaat** meratanya guru melalui optimalisasi jumlah jam mengajar, meningkatnya efektivitas proses pembelajaran, terjaminnya layanan pendidikan yang adil dan merata, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan. **Dampak** dari kegiatan ini diantaranya, mutu pembelajaran di kelas meningkat dimana siswa lebih aktif, kreatif, dan hasil belajar lebih baik; pemerataan kualitas pendidikan, terlihat dari guru memahami pembelajaran melalui Platform Digital; **Permasalahannya** yaitu belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan, adanya ketimpangan jumlah jam mengajar dan jumlah guru di beberapa sekolah, keterbatasan pemenuhan kebutuhan guru sesuai mata pelajaran produktif serta adanya ketidakseimbangan pertumbuhan guru. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan distribusi guru dan tenaga kependidikan melalui pendekatan domisili mengusulkan penambahan formasi pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pemenuhan guru produktif melalui skema guru tamu, serta

koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemerataan dan peningkatan kualitas SDM Pendidikan.

- 4. Program Pengendalian Perizinan**, didukung 2 kegiatan yaitu **Pengendalian Perizinan Pendidikan Menengah** dan **Pengendalian Perizinan Pendidikan Khusus** dengan **keluaran** 77 kajian usulan perizinan satuan pendidikan menengah dan 13 kajian usulan perizinan satuan pendidikan khusus. **Outcome** kegiatan tersebut, diantaranya tingginya partisipasi Masyarakat dalam pendirian USB di wilayah *Blankspot* dan tingginya pemahaman Masyarakat mengenai juknis/aturan pendirian USB. **Manfaat** yang diterima, diantaranya meningkatnya akses layanan pendidikan melalui terselenggaranya satuan pendidikan yang memiliki legalitas sesuai ketentuan, terjaminnya mutu dan standar penyelenggaraan pendidikan, meningkatnya kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan, serta mendukung pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah. **Dampak** dari kegiatan ini diantaranya, tingginya pemahaman Masyarakat mengenai aturan/regulasi pendirian USB. **Permasalahan** yang terjadi dalam pelaksanaan pemahaman Masyarakat kurang terkait dengan aturan pendirian USB khususnya pada wilayah blankspot. **Upaya** penyelesaian yaitu mendorong Masyarakat (Yayasan Pendidikan) agar berpartisipasi dalam pendirian USB di wilayah Blankspot dan menyebarluaskan aturan/regulasi mengenai pendirian USB.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan dengan tingkat capaian 3 indikator sangat tinggi dan 1 indikator sedang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.46 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pendidikan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Pendidikan	57	100	218	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Kurikulum	13	98,81	38	100	98,81	Sangat Tinggi
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	16	69,05	42	100	69,05	Sedang

Mengatasi Permasalahan Urusan Pendidikan yang hampir menjadi permasalahan di semua daerah provinsi, sekaligus sebagai keberlanjutan program pembangunan pendidikan di Jawa Tengah, Tahun 2026 akan diselenggarakan program intervensi menangani permasalahan pendidikan, sebagai berikut :

1. Perluasan Akses Layanan Pendidikan

a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah blank

- SMAN Kota Tegal
- SMAN Garung Kabupaten Wonosobo;
- SMA Negeri Kemalang Kabupaten Klaten;
- SMA Negeri Watukumpul Kabupaten Pemalang;
- SMA Negeri Cilongok Kabupaten Banyumas;
- SMA Negeri Kedungbanteng Kabupaten Tegal
- SMK Negeri Karangjambu Kabupaten Purbalingga;
- SMK Negeri Tulis Kabupaten Batang;
- SMK Negeri Kemangkun Kabupaten Purbalingga;
- SMK Negeri Wonogiri Kabupaten Wonogiri
- SLB N Purwokerto Kabupaten Banyumas.

b. Penyelenggaraan Kelas Jauh;

c. Penyelenggaraan Kelas Virtual pada SMAN 3 Brebes Kabupaten Brebes, dan SMAN 1 Kemusu Kabupaten Boyolali;

d. Peningkatan Sarpras: DAK Fisik (pengadaan alat), Peningkatan Sarpras melalui APBD;

e. Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

f. penerapan sekolah bebas pungutan untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri dikarenakan biaya operasional satuan pendidikan telah tercukupi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

g. Beasiswa Siswa Miskin (BSM);

h. Bantuan Seragam Siswa Miskin;

i. Bantuan Perlengkapan sekolah (siswa miskin);

j. Penyelenggaraan Program Kemitraan melalui kerjasama dengan sekolah swasta;

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Bimbingan dan pelatihan guru pendamping anak berkebutuhan khusus;

b. Pengembangan SDM dan Pendidikan Vokasi melalui uji kompetensi siswa SMK dan uji sertifikasi Guru SMK;

c. Re-engineering Program Keahlian SMK sesuai kebutuhan industri khususnya pada wilayah pertumbuhan kawasan industri baru;

d. Penguatan kerjasama SMK dengan Mitra Industri;

e. Penyelarasan Kurikulum Vokasi;

f. Penguatan Kewirausahaan;

g. Perwujudan Sekolah Aman dan Nyaman;

h. Digitalisasi Pendidikan;

i. Pembelajaran Coding;

j. Optimalisasi Platform Pembelajaran;

- k. Pemberian hibah kepada satuan pendidikan SD, SMP, SMK dan SLB swasta.
- 3. Tata Kelola Penyelenggaraan Layanan Pendidikan
 - a. Pemanfaatan Sistem Aplikasi Perencanaan dan Pelaporan anggaran sekolah (ARKAS, MASKAS, SIPERKASA);
 - b. Belanja melalui market place (E Katalog, SIPLah, E-Blangkon);
 - c. Layanan pengaduan via medsos.

3.4.1.2 Urusan Kesehatan

A. Dinas Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi: Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, Penanggulangan Penyakit, Kesehatan Lanjutan, Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK); Pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, Penanggulangan Penyakit, Kesehatan Lanjutan, Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK); Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, Penanggulangan Penyakit, Kesehatan Lanjutan, Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK); Pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan sekretariat kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan masing-masing bidang urusan kesehatan, antara lain: kasus stunting, gizi buruk dan malnutrisi, masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan balita, masih tingginya penyakit menular (TB, DBD, HIV/AIDS) dan penyakit tidak menular (DM, hipertensi, kanker) karena gaya hidup tidak sehat, prevalensi gangguan jiwa yang cukup tinggi dan kurang mendapat perhatian, dan pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar.

Salah satu program prioritas nasional yang melibatkan banyak sektor dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan terutama penanganan masalah gizi yaitu percepatan penurunan stunting. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menyatakan bahwa Jawa Tengah mampu menurunkan prevalensi Gizi sebesar 3,6 % dari tahun 2023 (sebesar 20,7 %) menjadi 17,1 %. Penurunan tersebut sangat signifikan dibandingkan dengan penurunan sebelumnya (sebesar 0,1 % per tahun). Hasil kinerja dimaksud dipergunakan untuk menggambarkan juga kinerja di tahun 2025 dikarenakan tidak diselenggarakannya SSGI. Dalam hal pengukuran kinerja intervensi, maka daerah mempergunakan hasil pendataan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Masyarakat (e_PPGBM), dimana jumlah anak stunting di Jawa Tengah tahun 2025 sebanyak 181.030 anak (9,66%). Beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain: intervensi balita masalah gizi sesuai tata laksana (PMT lokal), dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota untuk pemberian makanan tambahan

(PMT) kepada sasaran balita bermasalah gizi dan ibu hamil (bumil) KEK. Sampai dengan tahun 2025 jumlah balita yang diberikan PMT sebanyak 292.084 balita dan bumil KEK sebanyak 12.573 bumil. Upaya lain yaitu pemberian Program Pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) pada balita stunting, edukasi gizi dan intervensi air bersih, jambanisasi serta rumah layak huni. Adanya koordinasi dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan. Pendampingan intervensi masalah gizi dengan melibatkan TP PKK pada pemberian makanan tambahan pada sasaran balita, kerjasama dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk pelaksanaan KKN Tematik dan magang lulusan di Rumah Sakit.

Pada tahun 2025 terdapat 5 Perguruan Tinggi yaitu Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Tidar Magelang, Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah melaksanakan KKN Tematik pencegahan dan penanganan stunting yang fokus kegiatannya yaitu pendampingan Pemberian PMT Balita, Ibu Hamil, edukasi remaja putri dan edukasi calon pengantin dengan jumlah mahasiswa sebanyak 4.543 orang tersebar di 13 Kabupaten/Kota (Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, Kendal, Batang, Boyolali, Grobogan, Pemalang, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap). Hasil dari KKN Tematik yaitu sejumlah 2.829 Balita telah didampingi oleh mahasiswa KKN, 277 Ibu Hamil KEK, 1428 Remaja Putri dan 101 Calon pengantin telah dilakukan edukasi pencegahan Stunting.

Salah satu program intervensi Gubernur yaitu Jambanisasi 100 %. Dimana pada tahun 2025 sudah terealisasi bantuan jamban untuk keluarga miskin sebanyak 5.328 unit, melalui *Collaborative Funding* yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dukungan CSR (PT.Kilang pertamina internasional Refinery Unit (RU) IV Cilacap, dan Rotary Internasional District 3420-Indonesia). Dukungan dari Bankeu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa 1.000 unit jamban di 7 Kabupaten lokus (Cilacap, Banyumas, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang). Dari Baznas Provinsi Jawa Tengah sebanyak 200 unit di 9 Kabupaten/Kota lokus (Purworejo, Boyolali, Pemalang, Banjarnegara, Pati, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Batang dan Demak. Dukungan dari Rotary Internasional District 3420-Indonesia berupa 611 unit closet di 3 Kabupaten/Kota (Kabupaten Semarang, Temanggung, Kota Semarang). Dukungan dari PT.Kilang pertamina internasional Refinery Unit (RU) IV Cilacap sebanyak 100 unit di 2 Kabupaten (Cilacap, Banjarnegara). Adapun 3.417 unit sisanya merupakan partisipasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Baznas Kabupaten/Kota dan CSR lainnya.

Selama kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2024 penurunan kasus kematian ibu belum signifikan. Sedangkan pada tahun 2025, kasus kematian ibu di Jawa Tengah mengalami Penurunan sangat signifikan dari 427 kasus di tahun 2024 menjadi 337 kasus di tahun 2025. Upaya telah dilakukan diantaranya melalui layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diintegrasikan dengan program SPELING (Spesialis Keliling) memberikan layanan spesialisik secara gratis pada masyarakat termasuk ibu hamil. Upaya lain yang dilakukan meliputi penguatan implementasi Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR) dengan menyusun rekomendasi AMPSR yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* (SMART), penguatan

kapasitas kompetensi melalui *Drill emergency*, workshop dan pelatihan tata laksana kegawatan maternal dan neonatal, dukungan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait; koordinasi terintegrasi terkait strategi teknis menekan penyebab obstetri kematian ibu bersama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Surakarta, Banyumas dan Semarang dengan melibatkan tim AMPSR Provinsi dan Tim Mutu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kariadi.

Cek Kesehatan Gratis merupakan program prioritas nasional, dan pada tahun 2025 Capaian Kehadiran CKG di Provinsi Jawa Tengah tertinggi secara nasional, dibanding Jawa Timur (12.788.285 orang) dan Jawa Barat (10.072.932 orang). Program CKG di Jawa Tengah telah dilaksanakan untuk 14.135.599 orang dari sasaran 37.892.283. Capaian ini (37,3%) melebihi target nasional sebesar 36,2%. Sasaran pemeriksaan meliputi bayi baru lahir, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, dewasa dan lansia.

Cakupan kepesertaan JKN 98,83% menjadi 98,25% (38.562.958 jiwa). Hal ini disebabkan karena adanya penonaktifan kepesertaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari jumlah peserta 17.623.822 jiwa menjadi 17.113.501 jiwa tahun 2025. Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan lintas sektor, meliputi Dinas Sosial, BPJS dan Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan kepesertaan bagi peserta yang mempunyai riwayat penyakit katastropik.

Ketersediaan fasilitas Kesehatan di Jawa Tengah dari 883 Puskesmas, sudah terakreditasi 881 dan dari 366 faskes rujukan (RS), sudah terakreditasi 352. Penyebab belum terakreditasi karena faskes masih baru atau operasional kurang dari 2 tahun dan belum bekerjasama dengan BPJS.

Implementasi *Collaborative Government* diwujudkan melalui integrasi CKG dengan program aksi Gubernur berupa Layanan Dokter Spesialis Keliling (SPELING). Inovasi ini didukung oleh Rumah Sakit Provinsi dan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, RSUD Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Rumah Sakit Swasta, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, BPJS Kesehatan, Pondok Pesantren, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Media Massa. Target jangka panjang SPELING akan dilaksanakan di 1.278 desa sasaran, dan pada tahun 2025 telah dilaksanakan di 849 desa/kelurahan dengan jumlah masyarakat yang terlayani sebanyak 88.295 orang. Jenis layanan yang diberikan bersifat komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat desa. Layanan tersebut meliputi: 1) Pemeriksaan kehamilan risiko tinggi (ANC) dengan Ultrasonografi (USG) sebanyak 11.594 bumil, 2) Skrining kanker serviks melalui IVA sebanyak 4.206 orang, 3) Skrining tuberkulosis melalui inovasi TB Expres dengan menggunakan *X Ray Mobile* telah melayani sebanyak 38.721 orang, 4) Skrining kesehatan jiwa telah menjangkau sebanyak 24.494 orang. Dalam pelaksanaannya telah disediakan 27 unit Mobil SPELING dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 6 unit disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Cilacap, Blora, Demak, Rembang, Banjarnegara, Kebumen, serta 1 unit dari RSUD Mutiara Bunda Brebes. Dukungan sarana prasarana lain berupa *X Ray Mobile* pada tahun 2025 sebanyak 2 unit untuk RSUD Dr. Rehatta dan RSJD Dr. Amino.

Dokter Spesialis yang dilibatkan dalam Program Speling ini minimal 3 (tiga) terdiri dari Dokter Spesialis Kandungan (Sp.OG), Dokter Spesialis Paru (Sp.P) atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD), serta Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Sp.KJ). Perluasan layanan dilakukan dengan penambahan dokter spesialis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah sasaran. Pembiayaan program bersumber dari berbagai skema, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana operasional rumah sakit pelaksana bagi RS Swasta, serta dana lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pola pembiayaan multipihak ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program serta mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Dukungan prioritas Gubernur yang lain adalah penerapan sistem antrian pasien yang diprioritaskan (layanan *fasttrack*) untuk lanjut usia, ibu hamil, bayi, balita dan disabilitas di Rumah Sakit Provinsi dan beberapa Puskesmas. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut rekomendasi DPRD.

Sebagai upaya peningkatan Literasi Kesehatan pada kelompok sasaran dan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga menyelenggarakan Jupiter (Jumat Pinter), melalui Zoom Meeting dan kanal Youtube Dinkes yang tidak hanya diperuntukkan bagi insan Kesehatan, tetapi juga masyarakat umum. Tema yang diangkat berupa *trending topic* di masyarakat, misalnya pola asuh anak, Kesehatan jiwa, pentingnya Cek Kesehatan, Kewaspadaan terhadap jenis penyakit yang sedang terjadi, dan lain sebagainya. Menggandeng para pakar dalam agenda Jupiter, membuat animo peserta Jupiter sangat baik (1.000 peserta via zoom dan selebihnya pada kanal Youtube). Sebagaimana dinyatakan WHO bahwa Literasi kesehatan yang baik berhubungan langsung dengan perilaku sehat, kualitas hidup, serta produktivitas seseorang. Pentingnya literasi hidup sehat, bukan sekadar pengetahuan, melainkan kemampuan kritis untuk memahami, menilai, memilah informasi dan mengambil keputusan yang cerdas serta menerapkan informasi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari demi kesehatan diri dan lingkungan. Sehingga generasi muda yang memiliki literasi kesehatan tinggi akan lebih siap menghadapi tantangan hidup modern, mulai dari pola makan, kesehatan mental, hingga aktivitas fisik.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Urusan Kesehatan pada tahun 2025 adalah:

1. Penghargaan Anugrah Lentera Emas dari Kementerian Kesehatan RI sebagai Juara 1 kategori Lembaga Pelatihan BBPK/Bapelkes/Bapelkesda.
2. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai 5 Provinsi dengan Capaian terbaik dalam Pelaksanaan Kesehatan Gratis (PKG)
3. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai Juara 1 Provinsi dengan Capaian Cek Kesehatan Gratis tertinggi
4. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai Provinsi Terbaik Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan
5. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai Provinsi dengan Intervensi Stunting Terbaik Kategori Regional

6. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai Provinsi Terbaik 2 Pembina Kabupaten/Kota Sehat
7. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai Provinsi Terbaik 3 dengan Capaian Indikator Tuberkulosis
8. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif Terbaik
9. Penghargaan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah Terbaik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor di Provinsi Jawa Tengah

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam melaksanakan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp587.814.479.000,00 untuk melaksanakan 4 program yaitu:

- 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung anggaran Rp449.368.779.000,00 dengan realisasi fisik 99,89% dan keuangan 95,12%. Program ini memiliki 26 indikator yang mendukung RKPD. Semua indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi, antara lain Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi; Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting; dan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan. Terhadap target akhir RPD terdapat 12 indikator telah tercapai, 14 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain belum semua kabupaten/kota melakukan *Audit Maternal Perinatal Surveilans Response* (AMPSR), kualitas pelayanan K6 belum sesuai standar, banyaknya kasus penyakit tidak menular (PTM) dan Kesehatan jiwa yang tidak terdeteksi, Lansia tidak mendapat pelayanan kesehatan secara prioritas. **Upaya yang dilakukan** antara lain melakukan pendampingan AMPSR kabupaten/kota, FGD penyebab kematian ibu dan bayi, mendorong kabupaten/kota untuk penguatan skrining PTM, dan Pembinaan pelayanan puskesmas santun lansia. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu menurunnya angka kematian, angka kesakitan, meningkatnya penemuan kasus penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa, meningkatnya pelayanan Kesehatan lansia, pemenuhan obat, vaksin dan bahan habis pakai, sertifikasi pelayanan di UPT serta pengembangan sistem informasi.
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** didukung anggaran Rp957.635.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,13% karena adanya efisiensi honorarium narasumber/ fasilitator internal (Dinkes dan Bapelkes) yang tidak dibayarkan dan konsumsi peserta selama bulan Ramadhan. Program ini memiliki 2 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, yaitu Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dan Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi.

Terhadap target akhir RPD seluruhnya telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain belum semua usulan fasilitasi pembiayaan pelatihan dapat difasilitasi karena keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi. **Upaya yang dilakukan** melakukan monitoring pelaksanaan tugas bagi SDM Kesehatan (SDMK) yang sudah di tingkatkan kapasitasnya. **Manfaat** dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

3. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**, didukung anggaran Rp164.329.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 42,58% dikarenakan perubahan metode kegiatan semula kunjungan lapangan menjadi daring. Program ini memiliki 1 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi (100%) yaitu Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut masih perlu Upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi adalah Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dalam menyiapkan data dukung pengajuan rekomendasi tidak lengkap atau tidak memenuhi standar. **Upaya yang dilakukan** antara lain riviui Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Lampiran Data Teknis Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan (SSDAK) dan pendampingan pemenuhan syarat. **Manfaat** program ini adalah menjamin ketersediaan mutu sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian agar dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung anggaran Rp1.307.767.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 94,68% karena efisiensi pada perjalanan dinas (*at cost* transport dan penginapan) dan sewa gedung menggunakan fasilitas pemerintah. Program ini memiliki 6 indikator yang mendukung RKPD. Semua indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita, Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat. Terhadap target akhir RPD, terdapat 1 indikator telah tercapai dan 5 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menerapkan Germas dalam kehidupan sehari-hari. **Upaya yang dilakukan** antara lain melakukan advokasi kepada pemerintah Desa/Kecamatan/Kab/Kota agar mengimplementasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di setiap level Masyarakat dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media. **Manfaat** program ini adalah meningkatnya implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di kabupaten/kota, melalui pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta memberikan penyuluhan.

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	48,57	60	123,53	40	60	150,00
2	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	%	62,85	71,42	113,64	57,14	71,42	124,99
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	%	80	88,57	110,71	74,28	88,57	119,24
4	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	85,7	77,1	89,96	74,3	77,1	103,77
5	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	%	85,7	77,1	89,96	74,3	77,1	103,77
6	Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	100	100	100	100,00
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	70,4	68,5	97,30	68,5	68,5	100,00
8	Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	%	100	85,99	85,99	85	85,99	101,16
9	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	90	85	94,44	85	85	100,00
10	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	71,42	57,14	80,01	57,14	57,14	100,00
11	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	%	85,71	71,42	83,33	71,42	71,42	100,00
12	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	%	100	100	100	100	100	100,00
13	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	%	100	100	100	100	100	100,00
14	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57,14	42,85	75,01	42,85	42,85	100,00

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	%	100	85,71	85,71	85,71	85,71	100,00
16	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	%	100	100	100	100	100	100,00
17	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	71,42	57,14	80,01	57,14	57,14	100,00
18	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	%	85,71	71,42	83,33	71,42	71,42	100,00
19	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	%	100	100	100	100	100	100,00
20	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57,14	57,14	100	57,14	57,14	100,00
21	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	%	57,14	57,14	100	57,14	57,14	100,00
22	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	%	100	100	100	100	100	100,00
23	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57,14	42,86	75,01	42,86	42,86	100,00
24	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	57,14	42,86	75,01	42,86	42,86	100,00
25	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	%	90	85,0	94,44	85,0	85,0	100,00
26	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	%	100	100	100	100	100	100,00
II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
1	Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	85	85,28	100,33	85,0	85,28	100,33
2	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	99	99,82	100,83	98,0	99,82	101,86
III PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	85	25,0	29,91	25,0	25,0	100
IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	%	88,57	100	112,91	85,71	100	116,67
2	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	71,42	57,14	80,01	57,14	57,14	100,00
3	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57,14	42,85	74,99	42,85	42,85	100,00
4	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	71,42	57,14	80,01	57,14	57,14	100,00
5	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57,14	42,86	75,01	42,86	42,86	100,00
6	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57,14	42,86	75,01	42,86	42,86	100,00

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, didukung 4 kegiatan yaitu:

- 1) **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** antara lain telah melakukan kalibrasi 4.253 unit alkes, pemeliharaan gedung kantor, pengadaan obat, bahan habis pakai dan bahan medis habis pakai di 8 UPT. **Outcome** kegiatan tersebut berupa pemenuhan sarana, prasarana dan alat Kesehatan di fasilitas Kesehatan. **Manfaat** kegiatan yaitu terpenuhinya fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna di UPT. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin belum sesuai spesifikasi, belum semua fasilitas Kesehatan terakreditasi paripurna. **Upaya** yang dilakukan adalah penyelesaian pengawasan realisasi pengadaan obat dan bahan medis habis pakai sesuai spesifikasi, melakukan pendampingan akreditasi/mutu di fasilitas kesehatan primer, rujukan dan lainnya.

- 2) **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** antara lain pemeriksaan ibu hamil sesuai standar Kunjungan Ke-6 (K6) 375.592 ibu hamil; pemberian PMT untuk 209.461 Balita bermasalah gizi; pengukuran surveilans gizi kepada 1.867.045 balita; pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk 1.339.428 remaja putri, pelayanan kesehatan lansia sesuai standar untuk 5.016.567 lansia, ketercapaian 8.563 desa ODF di 35 Kab/Kota; Jumlah kasus TB yang disembuhkan 73.616, penemuan kasus baru TB 89.967 kasus; imunisasi dasar lengkap 412.710 bayi; dan layanan kesehatan kejadian KLB dan bencana 43.235 jiwa, serta pembayaran iur JKN untuk 14.307.955 masyarakat miskin dan kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap isu strategis seperti Stunting, Angka Kematian Ibu, Cakupan Jaminan Kesehatan dan indikator strategis lainnya perlu mendapatkan porsi penjelasan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa penurunan kasus kematian ibu, bayi, balita, penurunan kasus gizi buruk/stunting, penyakit menular dan tidak menular dan meningkatnya Kesehatan lingkungan. **Manfaat** kegiatan yaitu terlayannya Kesehatan Masyarakat sesuai siklus hidup, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta KLB/bencana dan peningkatan Kesehatan lingkungan. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kualitas pelayanan ibu hamil (K6) belum sesuai standar, remaja putri belum mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sesuai aturan, masih ada penolakan vaksin di beberapa daerah, masih terdapat kasus TB dan HIV yang tidak terdeteksi. **Upaya mengatasi** permasalahan dengan melakukan pendampingan ke kabupaten/kota dengan capaian rendah, deteksi dini pada remaja putri untuk mencegah anemia, melakukan edukasi dan promosi Kesehatan tentang vaksin, peningkatan kapasitas petugas dan pendampingan/bimbingan teknis petugas dan mentoring.
- 3) **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan** secara terintegrasi dengan **keluaran** antara lain 6 dokumen informasi kesehatan (dokumen SPM-BK, dokumen Buku Saku Kesehatan, dokumen Buku Saku Kinerja Kesehatan, dokumen Profil Kesehatan, Dokumen Data dasar Puskesmas 7 RS dan dokumen Data dasar FKTP). **Outcome** kegiatan ini yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang berkualitas. **Manfaat** kegiatan ini adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat dan valid untuk pengambilan kebijakan. **Dampak** kegiatan ini yaitu intervensi program kesehatan tepat sasaran. **Permasalahan** pada kegiatan ini adalah penyampaian data dari Kabupaten/Kota belum tepat waktu dan kurang konsisten. **Upaya mengatasi** permasalahan dengan melakukan validasi data dan fasilitasi teknis pengelolaan data terkini secara berkelanjutan.
- 4) **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** fasilitasi pada 8 UPT agar terakreditasi sesuai standar. **Outcome** kegiatan ini yaitu UPT

Dinas Kesehatan dapat memberikan pelayanan Kesehatan secara paripurna. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatkan dan mempertahankan akreditasi di UPT. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Masyarakat. **Permasalahan** kegiatan ini adalah sarana prasarana, alat Kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum sesuai standar dalam rangka akreditasi pelayanan di UPT. **Upaya mengatasi** dengan pemenuhan sarana prasarana dan tenaga Kesehatan.

2. **Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan** didukung oleh kegiatan **pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tingkat provinsi** dengan **keluaran** 24 SDM kesehatan provinsi (Dinkes dan UPT) lulus uji kompetensi dan kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap penguatan pondasi sistem pembangunan SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan yang maju guna menjamin akses dan level pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing regional, nasional dan internasional. **Outcome** kegiatan ini yaitu tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang kompeten sehingga kualitas pelayanan kesehatan meningkat. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan. **Dampak** kegiatan ini adalah peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi, meningkatkan efektivitas pelayanan Kesehatan dan mendorong budaya kompetensi kinerja berbasis hasil (*performance-based promotion*). **Permasalahan** yang dihadapi pada kegiatan tersebut adalah penerbitan rekomendasi formasi Menpan RB untuk UPT belum terbit. **Upaya mengatasi** permasalahan koordinasi dengan BKD, Kemenkes serta aktif memantau penerbitan rekomendasi formasi dari Menpan.
3. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman** didukung kegiatan **penerbitan, pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)** dengan **keluaran** 29 penerbitan pengakuan PBF Cabang dan 35 penerbitan pengakuan Cabang PAK. **Outcome** kegiatan ini yaitu menjamin keamanan produk farmasi dan alkes yang beredar di masyarakat. **Manfaat** dari kegiatan adalah didapatkannya produk farmasi dan alkes yang aman, bermutu dan bermanfaat digunakan oleh masyarakat. **Dampak** kegiatan ini adalah mencegah resistensi obat dan pertumbuhan industri farmasi dan alkes nasional. **Permasalahan** yang dihadapi pada kegiatan tersebut adalah kurangnya kemampuan sarana produksi dan distribusi di dalam pemenuhan implementasi kaidah-kaidah cara pembuatan dan cara distribusi sediaan farmasi dan Alkes/PKRT yang baik. **Upaya mengatasi** permasalahan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap produk dan sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) secara berkelanjutan.
4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung 2 kegiatan, yaitu:
 - 1) **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat** dengan **keluaran** 30 kabupaten/kota telah melakukan

penggerakan masyarakat untuk hidup sehat (Germas) minimal 4 kali; peningkatan teknis dalam pencapaian rumah tangga sehat di 8 UPT. **Outcome** kegiatan ini yaitu memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. **Manfaat** kegiatan ini adalah mendorong partisipasi masyarakat dan linsek dalam upaya peningkatan implementasi Germas. **Dampak** kegiatan ini Germas menjadi budaya di masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurangnya dukungan lintas sektor dalam upaya peningkatan implementasi Germas. **Upaya mengatasi** permasalahan dengan melakukan advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan kebijakan Germas yang ada.

- 2) **Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 9 kabupaten/kota telah mengimplementasikan minimal 2 kebijakan yang mendukung PHBS dan peningkatan keterampilan 114.963 kader Kesehatan. **Outcome** kegiatan ini yaitu PHBS di seluruh lapisan Masyarakat. **Manfaat** kegiatan ini adalah menyebarluaskan informasi kesehatan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang PHBS. **Dampak** kegiatan ini adalah PHBS menjadi budaya di Masyarakat. **Permasalahan** kegiatan kurangnya kesadaran masyarakat dan masih adanya masyarakat yang mengabaikan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat. **Upaya mengatasi permasalahan** dengan meningkatkan promosi kesehatan melalui informasi langsung ke masyarakat dan melalui media elektronik (spot tv, dialog radio), media cetak (umbul-umbul, spanduk, leaflet), media pameran, media sosial (youtube, instagram).

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.48 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	26	86.62	44	86.06	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	81.54	3	71.05	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1	95	1	96.47	100	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6	85.41	7	85.31	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis dengan sasaran 107.685 Balita, 17.230 Baduta, dan 17.200 anak usia sekolah kelas 7; Skrining TB dengan sasaran 8.899 anak dan 41.498 dewasa;
3. Pelayanan Kesehatan paripurna melalui asuransi Kesehatan dengan pembiayaan Penerima Bantuan Iuran JKN untuk 14.588.724 jiwa, PMKS 11.000 jiwa dan alokasi *buffer* PBI 1.538.790 jiwa;
4. Peningkatan kualitas hidup lansia dengan pemberian lansia Kit 441 lansia, skrining gratis untuk 524.350 lansia dan pemberian suplemen dengan indikasi sesuai hasil pemeriksaan untuk 110.114 lansia.

B. RSUD dr. Moewardi

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi menghadapi tantangan berupa tuntutan peningkatan mutu layanan, pemenuhan standar pelayanan kesehatan, penguatan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perubahan kebutuhan masyarakat, dinamika kasus kesehatan, serta ekspektasi terhadap layanan yang lebih profesional dan transparan.

Permasalahan yang dihadapi rumah sakit meliputi belum meratanya mutu pelayanan antar instalasi, keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia yang belum optimal, konsistensi penerapan standar pelayanan dan keselamatan pasien, keterbatasan sarana prasarana serta sistem informasi yang belum terintegrasi, tantangan pengelolaan pembiayaan dan klaim penjaminan, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, profesional, dan transparan di tengah dinamika kasus kesehatan yang semakin kompleks. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu pelayanan, penguatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem manajemen dan tata kelola risiko, penyediaan sarana penunjang yang lebih memadai, pengembangan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur, serta penguatan program pelibatan masyarakat.

Pada tahun 2025 prestasi dan penghargaan yang diraih oleh RSUD Dr. Moewardi adalah:

1. *Diamond Status* dari *World Stroke Organization* pada *WSO Angels Awards* Q1 dan Q2;
2. Penghargaan JR *Care Champion Award* 2025 Dengan Kategori *Form and Diagnosis Accuracy Champion* dengan Kriteria Ketepatan Pengisian Diagnosis Cedera dan Form Kesehatan;
3. Juara 3 Tingkat Nasional Lomba Video Konten Edukasi JKN, Kategori FKRTL Milik Pemerintah oleh BPJS Kesehatan;
4. Penghargaan Sebagai Dua Belas Rumah Sakit Terbaik Bidang Layanan Kanker dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI);
5. Penghargaan Sebagai Dua Belas Rumah Sakit Terbaik Bidang Layanan Saraf dari PERSI.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung urusan Kesehatan, RSUD Dr. Moewardi pada tahun 2025 didukung anggaran Rp1.357.809.574.000,00 untuk melaksanakan 4 program yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** didukung anggaran Rp1.298.824.889.000,00 terdiri dari anggaran APBD Rp109.819.239.000,00 dan BLUD Rp1.189.005.650.000 dengan realisasi fisik 99,01% dan keuangan 97,68%. Program ini memiliki 3 indikator yang mendukung RKPD dengan capaian keseluruhan sangat tinggi yaitu *Cost Recovery Rate* Total; Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah; dan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah proses pelaksanaan pengadaan gedung *Critical Center* dan Penunjang Pelayanan Tahap III mengalami keterlambatan. **Upaya** yang dilakukan adalah koordinasi dengan Biro APBJ, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri serta Inspektorat sehingga proses pengadaan dapat dilanjutkan dan target realisasi dapat tercapai. **Manfaat** program ini adalah tercapainya kinerja perangkat daerah, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah serta terwujudnya CRR Total yang optimal.
2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung anggaran Rp58.984.685.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 88,19%. Capaian keuangan 88,19% disebabkan karena sisa negosiasi dari pengadaan alat. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan capaian sangat tinggi yaitu Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat, dan terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah ketidaktepatan usulan alat kesehatan (alkes) dari pengguna. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan yang tepat dengan melibatkan tim dan koordinasi yang baik antara bagian perencanaan, pengguna dan penyedia untuk segera melakukan proses pengadaan. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui alat medis yang lengkap dan berbasis teknologi.

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan** memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan capaian sangat tinggi yaitu Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih. Pelaksanaan program ini menggunakan anggaran BLUD. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya monitoring pemenuhan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Dr. Moewardi karena belum adanya proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki karyawan/pegawai. **Upaya** yang dilakukan yaitu membangun sistem pelaporan secara digital. **Manfaat** dari penyelenggaraan program ini adalah terpenuhinya Sumber Daya (SDM) kesehatan dan non kesehatan yang terlatih melalui pelatihan yang diselenggarakan di dalam maupun di luar rumah sakit.
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan capaian sangat tinggi yaitu Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi. Pelaksanaan program ini menggunakan anggaran BLUD. **Permasalahan** yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah editor video dibandingkan dengan banyaknya kegiatan liputan di dalam dan luar rumah sakit, sehingga proses editing dan unggah video sering mengalami keterlambatan. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah menerapkan sistem prioritas dan manajemen waktu yang terstruktur guna menyediakan waktu khusus bagi editor dalam proses editing dan finalisasi video liputan agar publikasi dapat dilakukan tepat waktu. **Manfaat** dari penyelenggaraan program ini adalah meningkatnya pengetahuan, kemandirian, serta partisipasi aktif peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan melalui kegiatan penyuluhan, seminar, sosialisasi kesehatan di media sosial serta kegiatan spesialis keliling (Speling) yang menjangkau masyarakat desa.

Capaian Kinerja Program tahun 2025 RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.49 Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1	Cost Recovery Rate Total	%	82	100,53	122,59	82	100,53	122,59
2	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** didukung oleh 4 kegiatan yaitu:

- 1) **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan **keluaran** antara lain dokumen Renstra, Renja, DPA, DPPA, Laporan Tahunan, LKjIP. **Outcome** kegiatan ini adalah terselenggaranya manajemen rumah sakit yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran secara terpadu, yang berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas layanan serta kepuasan pasien. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah optimalisasi penggunaan sumber daya secara tepat sasaran, penguatan proses pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan mutu layanan dan akuntabilitas kinerja rumah sakit. **Dampak** kegiatan ini adalah terbangunnya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, meningkatnya efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran, dan tercapainya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta berfokus pada kebutuhan pasien. **Permasalahan** yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai bagian. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan pembangunan sistem terintegrasi yang menghubungkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan tujuan meningkatkan konsistensi, efektivitas, serta transparansi dalam pengelolaan kegiatan.
- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan **keluaran** terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sejumlah 1.450 orang selama 6 bulan (Januari–Juni). **Outcome** kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 6 bulan. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah terjaminnya ketersediaan dan penyaluran gaji serta tunjangan bagi ASN secara akurat dan tepat waktu. **Dampak** kegiatan ini yaitu stabilitas kinerja dan motivasi pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. **Permasalahan** yang dihadapi adalah perlunya peningkatan pengelolaan data kepegawaian agar selaras dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang tersedia.
- 3) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan **keluaran** kegiatan yaitu terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian antara lain kenaikan pangkat 247 orang, kenaikan gaji berkala 643 orang, pensiun 34

orang, Peninjauan Masa Kerja (PMK) 14 orang, SK Fungsional 144 orang, SK Tugas Belajar 9 orang, Ijin Belajar 56 orang, Ujian Dinas 7 orang, Ujian Peningkatan Pendidikan 3 orang, Pemanfaatan Paska Studi 22 orang, Pencantuman Gelar 182 orang, Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) 10 orang, Surat Keterangan Memiliki Ijazah (SKMI) 4 orang, Surat Keterangan Belajar 5 orang dan pelaksanaan ujian kompetensi (UKOM) 74 orang. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian melalui administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dampak kegiatan ini adalah terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, disiplin, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Manfaat kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ASN di lingkungan perangkat daerah. Permasalahan yang dihadapi yaitu pelaksanaan pemutakhiran dokumen pada sistem informasi kepegawaian terkendala pada keterlambatan input dokumen pegawai serta tidak kesesuaian data dengan dokumen fisik dan digital. Upaya yang dilakukan adalah mereviu standar operasional prosedur (SOP) pemutakhiran dokumen yang mudah diakses dan dipahami serta meningkatkan integrasi sistem dengan aplikasi pendukung.

- 4) **Peningkatan Pelayanan BLUD** dengan **keluaran** terpenuhinya operasional kegiatan rumah sakit yaitu belanja pegawai antara lain terbanyaknya gaji dan tunjangan ASN selama 6 bulan sejumlah 1.450 pegawai, pegawai BLUD dan Mitra sejumlah 967 pegawai, belanja barang jasa antara lain pengadaan obat dan bahan habis pakai 1.700 paket dan belanja modal antara lain pengadaan alat kedokteran sejumlah 49 unit, pembangunan gedung critical center tahap III, 1 unit kendaraan dinas dan 4 paket pengadaan perangkat jaringan komputer. **Outcome** kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas layanan BLUD melalui peningkatan kapasitas fasilitas, SDM, dan manajemen layanan. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan yang dikelola BLUD bagi masyarakat. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat, penggunaan layanan yang lebih optimal, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain kebutuhan layanan yang dinamis dan kompleks. **Upaya** yang dilakukan adalah pemutakhiran data kebutuhan secara berkala dan penyesuaian rencana program dengan pengendalian operasional kegiatan secara rutin. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD tentang penguatan/sinkronisasi data BPJS dan pelayanan tanpa antri.

2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung kegiatan **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** pengadaan alat kedokteran DAK sebanyak 4 unit yaitu Body

Impedance Analyzer, Handheld USG, Camera Fundus, Radio Frequency Ablation, alat kedokteran DBHCHT sebanyak 107 unit antara lain Meja Operasi, Ventilator, X-Ray Fluoroscopy serta ambulance 5 unit untuk mendukung pelaksanaan program spesialis keliling (speling). **Outcome** dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas dan alat kesehatan yang memadai untuk mendukung pelayanan. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui alat medis yang lengkap dan berbasis teknologi. **Dampak** kegiatan ini adalah terwujudnya layanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan mampu menurunkan angka kesakitan serta kematian. **Permasalahan** kegiatan ini yaitu ketidaktepatan usulan alkes dari pengguna. **Upaya** yang dilakukan adalah koordinasi antara bagian perencanaan, pengguna dan penyedia dalam menentukan prioritas kebutuhan alat kesehatan yang mempertimbangkan *utilitas* dan *maintenance* alat kesehatan.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan**, didukung kegiatan **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** dengan keluaran terlaksananya kegiatan pelatihan eksternal, internal maupun mandiri sebanyak 104 kegiatan, studi banding 4 kegiatan, Bimtek 6 kegiatan, Workshp 1 kegiatan, FGD 1 kegiatan, seminar 7 kegiatan, sosialisasi 4 kegiatan serta webinar 3 kegiatan. **Outcome** kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan sesuai standar profesi dan kebutuhan layanan. **Manfaat** kegiatan ini meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tenaga kesehatan dalam penanganan dan pelayanan medis. **Dampak** kegiatan ini adalah terbentuknya sistem pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan bermutu. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya monitoring pemenuhan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Dr. Moewardi karena belum adanya proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki karyawan/pegawai. **Upaya** yang dilakukan yaitu membangun sistem pelaporan secara digital. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut terhadap rekomendasi DPRD tentang peningkatan kualitas hidup lansia dengan mengirimkan narasumber Dokter Penanggung Jawab Pasien Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Geriatri (DPJP Sp.PD., K.Ger).
4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung kegiatan **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat lintas sektor tingkat daerah provinsi** dengan **keluaran** antara lain bakti sosial 8 kegiatan, donor darah 56 kegiatan, speling 34 kegiatan, seminar 27 kegiatan, streaming dan penyuluhan internal 20 kegiatan. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di desa dampingan sebagai bentuk komitmen peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta upaya pencegahan stunting melalui penyuluhan kesehatan dan gizi yang menyasar ibu hamil, remaja putri, calon pengantin, serta ibu yang memiliki balita. Selain itu, diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita dengan kondisi stunting, wasting, dan underweight serta kepada ibu hamil, sebagai

upaya preventif dan promotif dalam meningkatkan status gizi serta menekan risiko gangguan kesehatan sejak dini. **Outcome** kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan serta mendorong perilaku hidup sehat. **Dampak** kegiatan ini adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain yaitu koordinasi dengan penanggungjawab lokus kegiatan belum optimal dalam penentuan sasaran baksos. **Upaya** yang dilakukan adalah koordinasi secara intensif pada penanggungjawab lokus terkait teknis pelaksanaan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD tentang penurunan Stunting, peningkatan kampanye kesehatan dan kegiatan pap smear gratis.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.50 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	100	4	100	100	Sangat Tinggi

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSUD Moewardi terdapat 25 jenis pelayanan dengan 136 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian SPM rumah sakit yang memenuhi standar adalah 88,97% dan yang belum memenuhi standar yaitu 11,03%. Capaian indikator yang belum memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.51 Capaian SPM Bidang Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

NO	JENIS LAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Gawat Darurat	Indikator Kematian Pasien	≤2% (pin-dah ke pelayanan rawat	20,08%	RSUD Dr. Moewardi merupakan pusat rujukan trauma dan cardiac serta	Meningkatkan pelayanan gawat darurat baik pada SDM, alat dan sarana

NO	JENIS LAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
			inap setelah 8 jam)		penyakit lainnya sehingga pasien yang dibawa ke IGD sudah dalam tingkat keparahan tinggi.	prasarana serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
2.	Pelayanan Rawat Inap	Jam visite dokter spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	81,89%	masih ada visite dokter tidak sesuai jadwal jam kerja	Berkoordinasi dengan bidang pelayanan medis untuk bisa memaksimalkan jumlah dokter spesialis visite di jam kerja dan sesuai ketentuan rumah sakit.
3.		Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	2,29%	kondisi pasien yang memburuk dengan diagnosa yang kompleks dan merupakan pasien rujukan dari rumah sakit lain yang sudah dalam kondisi buruk.	Sosialisasi dan koordinasi kepada bidang dan bagian terkait untuk selalu memaksimalkan pelayanan/tindakan yang dianggap perlu yang bertujuan dapat meningkatkan perbaikan kondisi pasien dan kesembuhan pasien.
4.	Persalinan, Perinatologi dan KB	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Sepsis ≤ 0,2 %	0,32%	RSUD Dr. Moewardi sebagai RS ppk 3 menerima rujukan-rujukan dengan komplikasi, pada kasus tersebut pasien datang dalam kondisi tidak baik.	Tingkatkan terus kinerja Tim PONEK, tingkatkan koordinasi dengan RS jejaring, kegiatan rutin untuk Drill Emergency
5.		Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	80,38%	kondisi ibu dengan rujukan, dengan riwayat yang tidak diketahui dan riwayat pemeriksaan Antenatal kurang baik, dengan penyakit penyerta yang akut maupun kronik. Pasien BBLR memiliki usia gestasi yang masih imatur sehingga pematangan organ juga masih imatur hal ini menyebabkan kesiapan organ belum mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan extrauteri serta kondisi klinis pasien yang kompleks (gangguan nafas berat, sepsis, gangguan multi organ, kelainan kongenital).	1. Koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan edukasi pada ibu hamil supaya melakukan pemeriksaan Antenatal secara rutin. 2. Peningkatan kepatuhan pencegahan infeksi dan pelaksanaan prosedur sesuai standar. 3. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam Penatalaksanaan BBLR. 4. Koordinasi dengan NAKESLA yang terlibat dalam pemberian pelayanan BBLR untuk mematuhi standar pencegahan infeksi 5. Permohonan perbaikan lingkungan dan sarpras sesuai dengan standar
6.		Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	67,44%	kasus rujukan sudah tidak bisa lahir pervaginam/ normal dan juga kasus-kasus yang emergency yang perlu tindakan segera. RSUD Dr. Moewardi sebagai salah satu pusat rujukan kasus plasenta akreta, juga menambah angka tindakan sectio cesaria.	Tingkatkan terus kinerja Tim PONEK, tingkatkan koordinasi dengan RS jejaring, kegiatan rutin untuk Drill Emergency
7.	Pelayanan Intensif	Pemberi pelayanan Unit Intensif	100%	85,47%	masih ada perawat yang belum memiliki sertifikat mahir ICU	Mengajukan usulan untuk dapat diadakan pelatihan bagi yang belum memiliki sertifikat.

NO	JENIS LAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pelayanan Farmasi	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	30,60	persyaratan klaim yang kurang lengkap dan konfirmasi kepada penulis resep sering memakan waktu. Resep datang bersamaan dan terjadi penumpukan antrian yang belum bisa diurai. Serta jumlah kunjungan pasien yang cukup tinggi.	Evaluasi rutin permasalahan dengan kepala sub Instalasi Farmasi dan Apoteker Penanggung Jawab Unit
9.		Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	60,08	jumlah resep racikan yang cukup banyak di waktu tertentu dibandingkan tenaga yang meracik, persyaratan klaim yang kurang lengkap dan konfirmasi kepada penulis resep sering memakan waktu, resep datang bersamaan dan terjadi penumpukan antrian yang belum bisa diurai serta jumlah kunjungan pasien yang cukup tinggi	Evaluasi rutin permasalahan dengan kepala sub Instalasi Farmasi dan Apoteker Penanggung Jawab Unit
10.		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	99,99%	pengembalian obat ke tempat penyimpanan kurang memperhatikan obat LASA, kurang ketelitian petugas dalam pembacaan resep, kurang ketelitian saat pengambilan obat serta kurang ketelitian petugas saat melakukan serah terima obat.	1. Edukasi secara terus menerus kepada petugas mengenai keselamatan pasien 2. Memberi pengertian kepada staf bahwa melaporkan medication error tidak diberi punishment 3. Monitoring dan edukasi terus menerus mengenai telaah obat dan serah terima
11.	Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	82,66%	dokter tidak konsisten dalam mendokumentasikan bukti pelayanan, sehingga diperlukan evaluasi terus menerus kepada pemberi pelayanan dalam mendokumentasikan bukti pelayanan.	dilakukan monitoring rutin terhadap kepatuhan pengisian rekam medis dalam 24 jam. Sistem pengingat otomatis melalui rekam medis elektronik dapat dioptimalkan.
12.		Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	85,13%	bahwa diperlukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan serta kelengkapan isi dokumen rekam medis serta sosialisasi pengisian dokumen rekam medis.	1. Sosialisasi ulang kepada tenaga medis dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dokumentasi. 2. Sistem rekam medis elektronik diperkuat dengan fitur pengingat otomatis.
13.	Pelayanan CSSD & Laundry	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	96,88%	terjadinya kerusakan mesin laundry dan pencucian ulang linen yang masih kotor (Rijek) sehingga menyebabkan linen tidak bisa tercukupi.	Koordinasi dengan bagian sarana dan prasarana dalam perbaikan mesin laundry
14.		Ketepatan waktu sterilisasi bahan dan alat	100%	97,56%	ada kejadian mesin sterilisasi yang error atau rusak pada waktu proses sterilisasi sedang berjalan maka proses sterilisasinya harus diulang.	Segara melaporkan kejadian mesin sterilisasi yang error atau rusak ke bagian teknisi rumah sakit agar segera di tindak lanjuti dan kepada seluruh petugas CSSD untuk selalu disiplin

NO	JENIS LAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
						melakukan monev setiap proses sterilisasi.
15.	Pelayanan Radioterapi	Interval waktu Brakhiterapi	100%	95,43%	ada pasien yang perlu memperbaiki pemasangan DJ Stent.	dilakukan evaluasi pelayanan terkait kondisi pasien dan kolaborasi antar bagian

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh RSUD Dr. Moewardi yaitu:

- 1) *Cancer Advance*: Memperkuat pondasi strata utama;
- 2) Klinis:
 - Inisiasi pembentukan KSM onkologi, tumor board sudah aktif
 - Pemantapan pelayanan onkologi, terapi sistemik & radioteraphy
 - Skrining & deteksi dini
 - Penyelesaian perijinan layanan kedokteran nuklir
 - Revitalisasi layanan paliative & home care
 - Persiapan tata kelola layanan kedokteran nuklir
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM): kirim sekolah : 1 org Sp.PK(K), 1 org, Sp.PA(K)
- 4) Sarana Prasarana Alat (SPA):
 - Monitoring kesiapan ruang layanan kedokteran nuklir (rajal & ranap)
 - Proses penyediaan ruang intensive imunitas rendah
 - Monitoring kesiapan alat kedokteran nuklir yang telah tersedia (SPECT, hot lab beserta kelengkapannya)
 - Pengadaan alkes: 3D brachyterapi, *robotic surgery* & proses perijinannya
- 5) Jejaring: MOU dengan Rumah Sakit Dharmais dan RSCM
- 6) Pelatihan:
 - Proctorship (Bedah tumor/Terapi sistemik/Layanan patologi anatomi/Layanan paliatif/manajemen nyeri)
 - Pelatihan onkologi perawat
 - Pelatihan kemoterapi perawat
 - Pelatihan kanker dasar perawat
 - Pelatihan handling cytotoxic
 - Pelatihan registrasi kanker
- 7) Penelitian : Pelayanan Ontologi/Terapi Sistimik/Radioterapi
- 8) Proses Bedah : Biopsi, Bedah tumor dasar, Bedah tumor lanjut

C. RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan berbagai fungsi strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit bertugas melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan, menyusun program kerja dan anggaran, serta memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar yang berlaku.

Isu strategis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo tahun 2025 meliputi pemenuhan tenaga medis dokter sub spesialis, aksesibilitas pelayanan dalam rangka penurunan

AKI dan Stunting serta pengembangan pelayanan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dan jejaring pelayanan Kardiovaskuler intervensi dan neuro intervensi.

Prestasi tingkat nasional yang diraih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 adalah:

1. Juara I lomba video kreatif tiktok edukasi kolaboratif dalam asuhan pasien KARS RI (12 Agustus 2025).
2. *"Recognition achievement in implementing the guidelines for patient-centred care services and integrated patient care"* dalam penganugerahan hospital patient-centred care award KARS RI (12 Agustus 2025).
3. Penghargaan *The Runner Up Winner Central Sterilization Indonesia's Hero Award* oleh Perkumpulan Praktis Sterilisasi Seluruh Indonesia;
4. Penghargaan e-Va Centil (*Electronic Validation* – Cara Cepat dan Akurat Jamin Lancarkan Klaim BPJS) pada Outstanding Public Service Innovations 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp948.803.352.000,00 untuk melaksanakan 4 program, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** didukung anggaran Rp932.836.273.000,00 dengan realisasi fisik 90,49% dan keuangan 89,36%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu *Cost Recovery Rate Total*; Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah; dan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah. Terhadap target RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah pelaksanaan Pembangunan Gedung Pelayanan VIP dengan kontrak tahun jamak 2025-2026 masih berlangsung sehingga capaian realisasi fisik tahun 2025 belum tercapai 100%. Serapan realisasi keuangan sebesar 89,36% dikarenakan anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada tahun pertama hanya digunakan untuk pembayaran uang muka pekerjaan dan pembayaran pekerjaan termin I. **Upaya** yang dilakukan yaitu monitoring secara rutin progress pelaksanaan pekerjaan sehingga mengurangi potensi keterlambatan serah terima pekerjaan dan mengalokasikan kembali di tahun 2026 untuk anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang belum terserap di tahun 2025. **Manfaat** program ini adalah tercapainya tingkat kemandirian rumah sakit melalui capaian *Cost Recovery Rate Total*, tercapainya kinerja perangkat daerah dan tercapainya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.
2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung anggaran Rp15.967.079.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,85% dikarenakan terdapat efisiensi pada saat negosiasi melalui e katalog dan pengadaan ambulance melalui

konsolidasi. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dan terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu adanya perubahan kelas rumah sakit berdasarkan standar kompetensi, sehingga masih diperlukan pemenuhan sarana prasarana terutama alat kedokteran. **Upaya** yang dilakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan alat kedokteran guna mendukung pemenuhan sesuai standar kompetensi. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah terpenuhinya belanja modal alat kedokteran DAK dan DBHCHT serta terpenuhinya belanja modal kendaraan bermotor ambulance.

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** didukung anggaran BLUD Rp1.666.940.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,36%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih, dan terhadap target akhir RPD indikator tersebut perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih diperlukannya peningkatan kapasitas SDM seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan membuat perencanaan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan kompetensinya. **Manfaat** dari penyelenggaraan program ini adalah terpenuhinya Sumber Daya (SDM) kesehatan dan non kesehatan yang terlatih melalui pelatihan yang diselenggarakan di dalam maupun di luar rumah sakit.
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung anggaran BLUD Rp407.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,97%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi, dan terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keberlanjutan program promosi yang telah dilaksanakan masih perlu ditingkatkan. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan melakukan edukasi keberlanjutan yang melibatkan kader-kader kesehatan dan tokoh masyarakat. **Manfaat** dari penyelenggaraan program ini adalah tercapainya peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, seminar, sosialisasi kesehatan di media sosial serta kegiatan spesialis keliling (Speling).

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
1	Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	84	110,27	131,27	83	110,27	132,86

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	100	100	100	100	100
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
1	Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	80	49	61,25	20	20	100
IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung 5 Kegiatan yaitu:

- 1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan **keluaran** 2 dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah peningkatan akuntabilitas dalam monitoring dan evaluasi kinerja. **Dampak** dari kegiatan ini adalah seluruh unit kerja memiliki pedoman yang jelas sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan organisasi. **Permasalahan** yang dihadapi adalah koordinasi dan komunikasi antar unit belum optimal. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan rapat koordinasi berkala lintas unit untuk menyamakan rencana, progres, dan kendala pelaksanaan.
- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan **keluaran** terpenuhinya gaji dan tunjangan PNS orang selama 6 bulan (Januari–Juni). **Outcome** kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 6 bulan. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah terjaminnya ketersediaan dan penyaluran gaji serta tunjangan bagi ASN secara akurat dan tepat waktu yang berdampak pada stabilitas kinerja dan motivasi pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit.
- 3) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan **keluaran** terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian antara lain kenaikan pangkat pegawai, administrasi bagi pegawai pensiun dan administrasi bagi

pegawai yang melaksanakan tugas belajar. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian melalui administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel. **Manfaat** kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu perubahan data kepegawaian belum diperbarui tepat waktu. **Upaya** yang dilakukan meningkatkan komunikasi baik internal maupun eksternal terhadap perubahan data kepegawaian.

4) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** kegiatan ini tidak memiliki keluaran. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu tidak dilaksanakannya kegiatan ini dikarenakan ketidakterediaan anggaran. **Upaya** yang dilakukan melakukan identifikasi kebutuhan untuk pengajuan anggaran pada tahun berikutnya.

5) **Peningkatan Pelayanan BLUD** dengan **keluaran** terpenuhinya operasional kegiatan rumah sakit yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa antara lain : pemenuhan paket belanja obat dan bahan habis pakai, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan alat kedokteran dan kebutuhan penunjang lainnya dan belanja modal antara lain : belanja modal alat kedokteran dan belanja modal peralatan kantor lainnya. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional dalam penyelenggaraan layanan, yang mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan kinerja unit BLUD secara keseluruhan. **Manfaat** kegiatan ini adalah tersedianya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu ketersediaan barang/jasa pada tahapan proses pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya tersedia. **Upaya** yang dilakukan yaitu menyusun kebutuhan berdasarkan data pemakaian historis dan tren layanan dan melakukan pemesanan lebih awal.

2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat didukung oleh kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** didukung 2 kegiatan yaitu:

1) **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** yaitu 11 paket belanja modal alat kedokteran dan 3 unit ambulance. **Outcome** kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan belanja modal alat kedokteran dan kendaraan ambulance. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya peningkatan kualitas pelayanan medis. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu jangka waktu pelaksanaan pekerjaan relatif memerlukan waktu yang panjang. **Upaya** yang dilakukan yaitu percepatan proses kontrak sehingga pada saat proses pencairan tidak terjadi keterlambatan mengingat aturan terhadap dana transfer ke daerah cukup ketat.

- 2) **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** rumah sakit telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). **Outcome** kegiatan ini yaitu pelayanan jadi lebih standar dan konsisten sesuai standar nasional. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu pelayanan kesehatan lebih terstandar, aman, dan bermutu. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu update dokumen administrasi belum konsisten. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan melakukan reviu dokumen secara rutin.
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** didukung oleh kegiatan **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 5 Kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo meliputi bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop dan seminar dengan jumlah peserta 679 orang. **Outcome** dari kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) tenaga kesehatan dan nonkesehatan. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan sikap profesional pegawai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu beban pelayanan yang cukup tinggi berdampak pada terbatasnya fleksibilitas pegawai dalam meninggalkan unit kerja. **Upaya** yang dilakukan yaitu pengaturan jadwal jauh hari dan mencari pengganti pada saat pelayanan.
4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung oleh kegiatan **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 3 kegiatan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kampanye kesehatan promotif dan preventif dengan pendekatan berbasis desa. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu masyarakat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu mendorong perubahan perilaku ke arah hidup bersih dan sehat (PHBS). **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah dokter spesialis dan subspesialis berdampak pada perlunya penyesuaian jam praktik di poliklinik. **Upaya** yang dilakukan yaitu mengatur praktik bergilir antar dokter spesialis/sub spesialis yang sejenis.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada urusan kesehatan yang dilaksanakan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan tingkat capaian 4 program sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.53 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	100	5	84,376	100	Sangat Tinggi
2	Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo terdapat 25 jenis pelayanan dengan 117 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian SPM rumah sakit yang memenuhi standar adalah 82,91% dan yang belum memenuhi standar yaitu 17,09%. Capaian indikator yang belum memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.54 Capaian SPM Bidang Kesehatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

NO	JENIS LAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Gawat Darurat	Dokter	100%	70,58%	Jumlah SDM dokter jaga IGD terbatas Penyelenggaraan Pelatihan ATLS/BTCLS Terbatas	Mengadakan Pelatihan secara internal
2.	Pelayanan Rawat Inap	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	88.66%	Alur pelayanan rawat inap masih kurang efisien terhadap keluhan pasien	Mengoptimalkan proses operasional dan manajemen keluhan
3.	Pelayanan Maternal, Perinatal, dan Keluarga Berencana	Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	86.57 %	Kecepatan layanan dan respons terhadap keluhan	Peningkatan kecepatan respon terhadap keluhan
4.	Pelayanan Radiologi	Waktu tunggu hasil	100%	93.36%	Kurangnya SDM radiologi	Usulan penambahan SDM radiologi

NO	JENIS LAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCA PAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
		pelayanan foto thorax ≤ 3 jam				
5.		Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	87.22%	Perilaku Pelaksana dan Penanganan Pengaduan belum optimal	Peningkatan etika komunikasi dan interaksi staf, serta mempercepat dan memperjelas proses penanganan keluhan
6.	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 140 menit Kimia darah dan darah rutin	100%	99%	Adanya sampel yang rusak sehingga perlu pengambilan sampel ulang	Usulan pelatihan pengambilan sampel yang baik
7.		Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	84.72%	Waktu penyelesaian masih belum optimal	Peningkatan kemampuan teknis pegawai
8.	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	87.43%	Waktu penyelesaian masih belum optimal	Peningkatan kemampuan teknis pegawai
9.	Pelayanan Farmasi	Waktu tunggu pelayanan: a. Obat Jadi ≤ 30 menit	100%	93.6%	Jumlah pasien cukup banyak rata-rata perhari 1300 pasien	Melakukan penghitungan beban kerja SDM di farmasi sebagai bahan pertimbangan
10.		Waktu tunggu pelayanan: b. Racikan ≤ 60 menit	100%	95.3%	Memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat obat racikan	Melakukan penghitungan beban kerja SDM di farmasi sebagai bahan pertimbangan
11.	Pelayanan Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan: Pengembalian dokumen rekam medik rawat inap 2 x 24 jam	100%	98.49%	Hal ini terjadi pada pasien yang meninggal dunia pada hari libur karena menunggu tanda tangan dokter penanggungjawab dokter terutama pada yang jumlahnya masih satu	Melakukan komunikasi dengan DPJP terkait.
12.		Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan: Kelengkapan pengisian dokumen rekam medik rawat inap	100%	97.84%	Jumlah pasien cukup tinggi Bor 100% Sehingga petugas lupa melakukan pengisian dokumen rekam medis	Melakukan penghitungan ulang beban kerja sebagai dasar penambahan tenaga baru
13.		Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan: Kelengkapan Informed Consent setelah	100%	98.39%	Inform konsen sudah dilaksanakan tapi belum ada dokumen bukti tertulis	Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja

NO	JENIS LAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCA PAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
		mendapatkan informasi yang jelas				
14.	Pelayanan Kedokteran Forensik & Medikolegal	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 2 Jam	100%	98.62%	Keterbatasan SDM	Penambahan SDM
15.	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	72%	Keterbatasan SDM	Penambahan SDM
16.		Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	99%	Ketersediaan sparepart alat perlu indent (waktu pemesanan)	Melakukan pemeliharaan rutin
17.		Alat Laboratorium & alat medik	100%	98%	Jumlah alat medik yang cukup banyak, Keterbatasan lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melakukan kalibrasi (BPFK)	Melakukan koordinasi dengan BPFK untuk menjadwalkan lebih awal sehingga semua alat dapat terkalibrasi
18.	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi	Waktu Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi				
19.		Pemeriksaan Jaringan (6 hari)	100%	94.78%	Jumlah SDM terbatas Pemeriksaan PA memerlukan ketelitian yang tinggi untuk mengurangi kesalahan membaca, Kadang ada sampel yang perlu di ulang	Penambahan Jumlah SDM dokter dengan mitra atau menyekolahkan
20.		Pemeriksaan sitologi (3 hari)	100%	86.14%	Jumlah SDM terbatas Pemeriksaan PA memerlukan ketelitian yang tinggi untuk mengurangi kesalahan membaca, Kadang ada sampel yang perlu di ulang	Penambahan Jumlah SDM dokter dengan mitra atau menyekolahkan

NO	JENIS LAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCA PAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
21.		Pemeriksaan imuno-histokimia (12 hari)	100%	89.72%	Jumlah SDM terbatas Pemeriksaan PA memerlukan ketelitian yang tinggi untuk mengurangi kesalahan membaca, Kadang ada sampel yang perlu di ulang	Penambahan Jumlah SDM dokter dengan mitra atau menyekolahkan

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2025 yaitu:

- 1) Pembangunan Gedung Pelayanan VIP;
- 2) Pengembangan kompetensi dokter sub spesialis;
- 3) Penambahan alat kedokteran radioterapi (LINAC)

D. RSUD dr. Adhyatma, MPH

RSUD dr. Adhyatma, MPH merupakan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B. RSUD dr. Adhyatma, MPH mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, yang dikuatkan dengan SK Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/202/2020 tentang Penetapan RSUD dr. Adhyatma, MPH sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, yang sekaligus sebagai RS Pendidikan bagi Keperawatan dan Tenaga Kesehatan lainnya pada umumnya.

Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, RSUD dr. Adhyatma, MPH senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan selalu mengedepankan mutu dan keselamatan pasien yang dikelola berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan kesehatan RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yaitu:

1. Juara 2 Lomba Karya Ilmiah Kategori Manajemen LAM KPRS Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
2. Anugerah dalam Bidang Keselamatan dan Keamanan Nuklir Kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Rumah Sakit) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten); dan
3. Juara 2 sebagai Instansi Pengelola Jabatan Terbaik kategori Rumah Sakit Daerah yang diselenggarakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan kesehatan RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp329.782.613.000,00 untuk melaksanakan 4 program, yaitu:

1. **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** didukung anggaran Rp320.782.613.000,00 dengan realisasi fisik 98,35% dan keuangan 89,74%. Capaian keuangan ini dikarenakan terdapat kegiatan yang belum selesai yaitu pada Pembangunan Gedung Bunker Linac dikarenakan kinerja penyedia jasa tidak sesuai kontrak sehingga diberi kesempatan penyelesaian sampai 6 Februari 2026. Selain itu terdapat beberapa pegawai BLUD yang mutasi sehingga anggaran gaji tersisa 5,1%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu *Cost Recorvery Rate* Total RSUD dr. Adhyatma, MPH, Presentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah, dan Presentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah. Terhadap target akhir RPD terdapat 3 (tiga) indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah proses pelaksanaan pembangunan gedung Bunker Linac mengalami keterlambatan. **Upaya** yang dilakukan adalah koordinasi dengan Biro APBJ, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri serta Inspektorat sehingga proses pembangunan dapat dilanjutkan dan target realisasi dapat tercapai. **Manfaat** program ini adalah tercapainya kinerja perangkat daerah, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah serta terwujudnya CRR Total yang optimal. Manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat adalah keberlangsungan pelayanan radioterapi bagi pasien kanker yang mendapatkan terapi di RSUD dr. Adhyatma, MPH yang semakin tahun semakin meningkat dari 5.953 (tahun 2024) pasien menjadi 7.009 (tahun 2025) pasien, sementara Radioterapi Cobalt saat ini kemampuannya tinggal 34% saja yang artinya jumlah tindakan naik tetapi kemampuan alat berkurang sehingga memerlukan Linac tetap harus terlaksana
2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung anggaran Rp 9.000.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,05%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Presentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD dr. Adhyatma, MPH, dan Presentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD dr. Adhyatma, MPH. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu adanya regulasi BPJS yang selaras dengan transformasi layanan rujukan termasuk rumah sakit berbasis kompetensi (dasar, madya, utama dan paripurna) menggantikan klasifikasi rumah sakit berbasis kelas A, B, C dan D. Klasifikasi berdasar kompetensi ini dinilai dari kemampuan layanan rumah sakit berdasar pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dimiliki rumah sakit. Sebuah tantangan strategis dalam pemenuhan dan sinkronisasi data berbasis infrastruktur

teknologi informasi terintegrasi, standar kompetensi yang tinggi, implikasi finansial rumah sakit, tuntutan masyarakat dan regulasi serta investasi yang besar. **Upaya** penyelesaiannya yaitu Pemenuhan SDM dengan rekrutmen melalui formasi ASN dan Dokter spesialis mitra serta peningkatan kompetensi melalui pengiriman pendidikan Dokter spesialis. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dipenuhi dengan usulan anggaran bersumber dari dana transfer kas daerah dan APBD Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** program ini yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien dan selaras dengan transformasi layanan kesehatan rujukan.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** didukung anggaran BLUD Rp 310.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,52%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Presentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD dr. Adhyatma, MPH dan terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** dalam pelaksanaan program ini yaitu kurangnya SDM kesehatan yang tersertifikasi, yang disebabkan keterbatasan kuota pelatihan, SDM yang akan dilatih tetap melaksanakan pelayanan sehingga harus bertahap, biaya yang cukup tinggi dan lokasi pelatihan diluar provinsi. **Upaya** penyelesaiannya yaitu melaksanakan pelatihan/*in house training* oleh narasumber/pelatih internal RS yang sudah memiliki kompetensi dan tersandar Kementerian Kesehatan serta mengajukan inden usulan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan kesehatan terkait, melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi (*certified body person*) yang dapat melakukan sertifikasi tanpa pelatihan ulang. **Manfaat** penyelenggaraan program ini yaitu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan tenaga kesehatan secara menyeluruh sehingga mendukung pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan efisien, mengutamakan keselamatan pasien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung anggaran BLUD Rp 55.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,34%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Presentase ketercapaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD dr. Adhyatma, MPH. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan fasilitas, koordinasi yang belum optimal, serta kurangnya edukasi kesehatan yang efektif. **Upaya** penyelesaiannya yaitu dengan program **SPELING** (spesialis keliling) yang melaksanakan CKG, skrining, pengobatan umum dan spesialis, rujukan, edukasi kesehatan, kunjungan rumah, edukasi terkait jaminan kesehatan, pelatihan kader tentang gizi dalam penanganan stunting, pelatihan kader, dengan melibatkan Dinas Kabupaten Kota, Puskesmas setempat serta kader kesehatan. **Manfaat** penyelenggaraan program ini yaitu meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, mendukung

tercapainya CKG, penanganan stunting, mendekatkan dokter spesialis ke masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memahami kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 3.55 Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD dr. Adhyatma, MPH

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
1	Cost Recovery Rate Total RSUD dr. Adhyatma, MPH	%	55,8	62,96	112,83	53,52	62,96	117,64
2	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	92,22	102,47	91,11	92,22	101,22
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD dr. Adhyatma, MPH	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD dr. Adhyatma, MPH	%	100	100	100	100	100	100
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
1	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD dr. Adhyatma, MPH	%	100	70,44	70,44	33	35,56	107,76
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
1	Persentase ketercapaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD dr. Adhyatma, MPH	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 4 kegiatan, yaitu:

- 1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan **keluaran** 11 dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu: Renstra, Renja Murni, Renja Perubahan, RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan, RKO Murni, RKO Perubahan, RUP Murni, RUP Perubahan serta 6 dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, yaitu: LKPJ, LKJiP, E-Controlling triwulan I, E-Controlling triwulan II, E-Controlling triwulan III dan E-Controlling triwulan IV. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terwujudnya manajemen rumah sakit yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sehingga mendukung peningkatan mutu layanan dan

kepuasan pasien. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memastikan penggunaan sumber daya yang tepat sasaran, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, serta mendorong peningkatan mutu layanan dan akuntabilitas kinerja rumah sakit. **Dampak** kegiatan ini yaitu terciptanya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran, serta terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan pasien. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terbitnya beberapa regulasi dan kebijakan terkait perencanaan yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian sehingga mempengaruhi upaya pencapaian perencanaan strategis jangka pendek dan jangka menengah. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan proses perencanaan sesuai dengan regulasi dan kebijakan terbaru serta berkoordinasi dengan pihak internal (bidang/bagian) maupun eksternal (Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan dalam hal pengampunan tata kelola rumah sakit bersama RSUP dr. Kariadi).

- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan **keluaran** terbayarnya gaji dan tunjangan sejumlah 846 orang ASN. **Outcome** dari kegiatan tersebut berupa terbayarnya gaji dan tunjangan ASN. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya hak pegawai. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kesejahteraan pegawai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu adanya penyesuaian dalam proses input dan verifikasi data kepegawaian serta tunjangan kinerja, yang disebabkan oleh adanya perubahan data ASN (seperti mutasi, perubahan jabatan, atau penyesuaian tunjangan) yang memerlukan pembaruan dokumen pendukung. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan penataan dan pembaruan data kepegawaian secara berkala melalui sistem informasi kepegawaian internal agar perubahan data ASN dapat segera terakomodir dan tidak menghambat proses administrasi keuangan.
- 3) **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan **keluaran** 12 dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terwujudnya pengelolaan arsip yang tertib dan sistematis serta meningkatnya efisiensi pelayanan administrasi di RSUD dr. Adhyatma, MPH. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi serta menjamin ketersediaan dan keamanan informasi. **Dampak** kegiatan ini yaitu terciptanya tertib arsip di lingkungan RSUD dr. Adhyatma, MPH serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan administratif. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu pengarsipan dokumen penatausahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Upaya** yang dilakukan adalah melalui kegiatan bimbingan teknis terkait sistem informasi kearsipan dinamis guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelolaan arsip sesuai standar.
- 4) **Peningkatan Pelayanan BLUD** dengan **keluaran** terpenuhinya operasional kegiatan rumah sakit yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional dalam penyelenggaraan layanan, yang

mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan kinerja unit BLUD secara keseluruhan. **Manfaat** kegiatan ini adalah tersedianya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. **Dampak** kegiatan ini adalah peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja BLUD dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain yaitu pengadaan barang dan jasa belum memenuhi target karena masih dalam proses pengadaan. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan evaluasi secara berkala dan berkoordinasi dengan penyedia agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** antara lain: pengadaan alat alat DAK sebanyak 5 unit alat kesehatan antara lain 1 unit *Patient Monitor*, 1 unit *Spyrometry*, 1 unit Ventilator, 1 unit *Blanket Warmer* dan 1 unit *Hyper Hypothermia System* dan DBHCHT sebanyak 5 antara lain 1 unit Ultrasonografi (USG), 2 unit Ventilator dan 2 unit *Bedside Monitor* unit yang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya penanganan pasien sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, akurat, dan berkualitas, serta mendukung peningkatan keselamatan pasien. **Manfaat** kegiatan ini yaitu mempercepat proses pelayanan medis, mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan penanganan yang tepat, serta meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan medis, menurunnya angka kesalahan diagnosis, serta peningkatan kualitas dan keselamatan pasien serta menurunkan *Net Death Rate* (NDR) di RSUD dr. Adhyatma, MPH. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Pengadaan Belanja Modal Alat Kesehatan Linac bersumber anggaran DBHCHT tidak dapat dilaksanakan karena hasil pemenang lelang pembangunan bunker Linac mundur dari penjadwalan awal dikarenakan ada sanggah dari penyedia. Hal tersebut menyebabkan pembangunan bunker Linac mundur, baru dilaksanakan pada bulan Juni dan selesai pada awal februari. Karena bunker Linac selesai bulan februari, proses pengadaan alat kesehatan Linac tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena setelah pembangunan bunker selesai, ada uji fungsi alat dan perijinan kebocoran Bappeten yang harus dilakukan. Sehingga beresiko waktu pelaksanaan tidak mencukupi. **Upaya** yang dilakukan adalah telah dilakukan perubahan anggaran yang dialihkan untuk pengadaan alat kesehatan / alat kedokteran serta berkoordinasi dengan TAPD terkait dengan pengusulan anggaran pengadaan Linac pada tahun 2026.

- 2) **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** penyediaan honorarium 6 pegawai harian lepas. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terjaganya kontinuitas layanan kesehatan, meningkatnya produktivitas tenaga kerja, serta mendukung kelancaran operasional rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memastikan kelancaran pelayanan kesehatan serta mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga tambahan secara fleksibel sesuai kebutuhan operasional rumah sakit. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas dan kelancaran pelayanan kesehatan serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih produktif dan responsif terhadap kebutuhan pasien. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu beberapa pegawai memiliki status sebagai pegawai harian lepas sementara status kepegawaian di instansi pemerintah hanya ada dua yaitu pegawai PNS dan PPPK. **Upaya** yang dilakukan adalah pengajuan formasi ke Badan Kepegawaian Daerah pegawai harian lepas menjadi PPPK.
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** didukung kegiatan **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 165 kegiatan, meliputi bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, *workshop* dan seminar. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, serta sesuai standar, yang berdampak pada peningkatan mutu layanan, keselamatan dan kepuasan pasien. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, menurunkan resiko insiden keselamatan pasien (IKP), memperkuat pemahaman terhadap regulasi, standar pelayanan dan mendukung peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien serta penguatan terhadap efisiensi. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator standar pelayanan minimal dari 90 indikator tercapai 92,22%, terciptanya tenaga kesehatan yang lebih kompeten dan profesional, serta meningkatnya kepuasan pasien dan keselamatan layanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu potensi terganggunya pelayanan pasien apabila jadwal pelatihan tidak diatur menyesuaikan kebutuhan pelayanan sementara kuota tiap pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi sudah diatur di kementerian kesehatan. **Upaya** yang dilakukan adalah melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan secara berkala dengan melibatkan setiap unit kerja agar pelatihan tepat sasaran dan mendukung peningkatan kinerja, yang dilakukan secara bertahap serta pemenuhan kuota dapat dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal sekaligus meningkatkan pendapatan diklat Rumah Sakit sebagai penyelenggara.
4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung kegiatan **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan spesialis keliling/speling di 25 (dua puluh lima) lokasi.

Outcome kegiatan tersebut berupa meningkatkan akses layanan spesialisik serta mendorong deteksi dini dan kepuasan masyarakat. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan spesialisik serta mengurangi rujukan yang tidak perlu ke rumah sakit mempercepat deteksi dini penyakit. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di tingkat primer serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan spesialisik yang lebih merata dan terjangkau. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Keterbatasan alat x Ray untuk pelaksanaan speling, kondisi saat ini RSUD dr. Adhyatma, MPH tidak memiliki x ray portable. **Upaya** penyelesaiannya yaitu dilakukan peminjaman fasilitas kepada Poltekkes Kemenkes Semarang untuk mendukung kelancaran kegiatan.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada urusan Kesehatan pada RSUD dr. Adhyatma, MPH dengan tingkat capaian 4 program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.56 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD dr. Adhyatma, MPH

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2	100	5	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSUD dr. Adhyatma, MPH terdapat 21 jenis pelayanan dengan 90 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian SPM rumah sakit yang memenuhi standar adalah 92,22% dan yang belum memenuhi standar yaitu 7,78%. Capaian indikator yang belum memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.57 Capaian SPM Bidang Kesehatan RSUD dr. Adhyatma, MPH

NO	JENIS PELAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCA PAIAN		
1.	Pelayanan IGD	Kematian pasien < 24 jam di Pelayanan IGD	< 2 Per seribu	3,41‰	Pasien datang dalam kondisi DOA/henti jantung, pasien datang dalam kondisi berat (kecelakaan, CKB, penyakit kronis eksaserbasi akut)	Penguatan triase. Tetap dilayani pasien apapun yang datang ke IGD (termasuk kondisi pasien yg berat). Direncanakan Studi tiru ke RS lain yang memiliki kematian sesuai SPM
2.	Pelayanan Rawat Inap	Jam visite dokter spesialis	Jam 08.00 s/d 15.30 setiap hari kerja	97,51%	Dokter baru bisa visite ruangan setelah jadwal pelayanan poli dan IBS	Mengingatn kembali kepada Dokter Spesialis untuk visite tepat waktu perawat juga membantu untuk mengingatkan dokter spesialis
3.	Pelayanan Rawat Inap	Kematian pasien > 48 jam	< 0,24%	3,44%	Pasien di Rumah Sakit tipe B, banyak yang masuk dalam kondisi kronis serta kasus rujukan dengan kasus kompleks	Peningkatan pelayanan dengan mengaktifkan early warning system dan peningkatan koordinasi tim code blue, menggiatkan audit klinis, optimalisasi ICU, sertifikasi perawat ICU
4.	Pelayanan Rawat Intensif	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	< 3%	4,24%	Beberapa pasien dari ICU langsung ke rawat inap biasa, tidak melalui intermediate room (HCU), beberapa kasus mengalami perburukan dg cepat (monitoring manual)	Peningkatan pengawasan pasien pasca rawat intensif, penyiapan ruang HCU (penambahan 2 TT), penambahan BSM di ruangan, pelatihan EWS
5.	Pelayanan Farmasi	Penulisan resep sesuai formularium	100%	99,96%	Adanya kendala pada penerapan penggunaan obat yang sesuai	Sosialisasi retriksi Formularium dan konsultasi terkait penggunaan formularium RS
6.	Pelayanan Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	97,7%	Error sistem (DPJP sudah merasa mengisi tapi ternyata data tidak tersimpan), kesibukan & ketidakdisiplinan DPJP dalam mengisi di rekam medis elektronik	1. Evaluasi sistem rekam medis elektronik dan sosialisasi dan edukasi kembali terhadap DPJP agar lebih disiplin lagi terkait pengisian rekam medis elektronik 2. Rencana Penerapan reward and punishment untuk kelengkapan pengisian rekam medis
7.	Pelayanan Rekam Medik	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	98,8%	Adanya gangguan jaringan dan ketika menggunakan manual masih ada yang kurang lengkap	Pelaksanaan Informed Consent elektronik

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Pengadaan Alat Kesehatan berupa 1 set *Linac*;
2. Pelayanan spesialis keliling (Speling)

E. RSUD dr. Rehatta

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. RSUD dr. Rehatta sebagai salah satu rumah sakit daerah memiliki peran strategis dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif. Berbagai upaya penguatan layanan dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia rumah sakit agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, terdapat beberapa isu strategis di bidang kesehatan yang menjadi perhatian khusus, antara lain penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu, peningkatan cakupan jaminan kesehatan, serta sinkronisasi data BPJS dengan sistem rujukan agar distribusi pasien dapat merata dan tidak terjadi overload pada rumah sakit tertentu. Selain itu, pentingnya penguatan peran rumah sakit daerah dalam peningkatan kampanye kesehatan promotif dan preventif melalui kegiatan skrining dini, imunisasi, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) berbasis desa. Selain itu, perluasan akses layanan bagi kelompok rentan melalui program fast track untuk lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan pensiunan menjadi prioritas pelayanan.

RSUD dr. Rehatta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting serta penurunan angka kematian ibu melalui kegiatan pelayanan Dokter Spesialis Keliling (Speling) di 9 (sembilan) desa wilayah Karesidenan Pati dengan realisasi penerima layanan sejumlah 1.106 orang dan program “Rehatta Turun Gunung” yang dilaksanakan bersama Puskesmas sekitar. Selain itu, rumah sakit memberikan dukungan pemberian bantuan makanan pendamping ASI (MPASI) bagi balita dengan sumber anggaran dari APBD, BLUD, dan UPZ dengan realisasi pengguna layanan sejumlah 180 orang. Dalam rangka peningkatan kapasitas rumah sakit, dilakukan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit berbasis kompetensi serta pemenuhan kelas rawat inap standar. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan khusus seperti pelatihan NICU. Kampanye promotif dan preventif juga terus digencarkan melalui kegiatan Speling di desa Bandungharjo dan Damarwulan Kabupaten Jepara yang mencakup promosi kesehatan, imunisasi, serta edukasi Germas. Implementasi program Aksi Gubernur Nomor 36 telah direalisasikan melalui penyediaan layanan tanpa antri (*fast track*) bagi lansia, ibu hamil, disabilitas, dan pensiunan dengan dukungan sistem digitalisasi pelayanan dengan realisasi penerima layanan sejumlah 1.016 orang. Pelayanan *papsmear* gratis juga telah dilaksanakan melalui pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) yang disertai edukasi dan penyediaan alat pemeriksaan. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup lansia diwujudkan melalui kegiatan promosi dan senam kesehatan lansia di desa sekitar RS serta kegiatan rutin senam lansia setiap Jumat di halaman gedung Walet RSUD dr. Rehatta.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah, RSUD dr. Rehatta didukung anggaran Rp143.092.590.000,00 untuk melaksanakan 4 program, yaitu:

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung alokasi anggaran Rp30.874.646.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,95%. Program ini memiliki indikator Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan tingkat ketercapaian terhadap RKPD sangat tinggi dan terhadap RPD telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain adanya perubahan kebijakan nasional di bidang perumahnya sakit yang mengarah pada standar layanan rumah sakit berbasis kompetensi (dasar, madya, utama dan paripurna) menggantikan klasifikasi rumah sakit berbasis kelas A, B, C dan D. Klasifikasi berdasar kompetensi ini dinilai dari kemampuan layanan rumah sakit berdasar pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dimiliki rumah sakit. Sebuah tantangan strategis dalam pemenuhan dan sinkronisasi data berbasis infrastruktur teknologi informasi terintegrasi, standar kompetensi yang tinggi, implikasi finansial rumah sakit, tuntutan masyarakat dan regulasi serta investasi yang besar. **Upaya** yang telah dilakukan antara lain Pemenuhan SDM dengan rekrutmen melalui formasi ASN dan Dokter spesialis mitra serta peningkatan kompetensi melalui pengiriman pendidikan Dokter spesialis. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dipenuhi dengan usulan anggaran bersumber dari dana transfer kas daerah dan APBD Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan berorientasi pada pasien dan selaras dengan transformasi layanan kesehatan rujukan.
2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** didukung anggaran Rp82.847.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,81%. Program ini memiliki indikator persentase SDM kesehatan yang terlatih, dengan tingkat ketercapaian terhadap RKPD sangat tinggi dan terhadap RPD telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah sebagian tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan belum seluruhnya memiliki sertifikasi kompetensi terkini sesuai standar pelayanan rumah sakit serta pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dengan program tugas belajar. **Upaya** yang dilakukan antara lain penyusunan *Training Need Analysis* (TNA) berdasarkan kesenjangan kompetensi dan tuntutan regulasi dalam pengembangan kompetensi SDM unit kerja serta penugasan dokter umum untuk melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sesuai kebutuhan rumah sakit. **Manfaat** penyelenggaraan program ini yaitu meningkatkan pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam pelayanan kesehatan berorientasi pada pasien dan selaras dengan transformasi layanan kesehatan rujukan.

- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung anggaran Rp177.992.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,60%. Program ini memiliki indikator persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi dengan tingkat ketercapaian terhadap RKPD sangat tinggi dan terhadap RPD telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah tingkat literasi kesehatan dan kepatuhan masyarakat terhadap perilaku hidup sehat serta pengobatan penyakit masih bervariasi, sehingga upaya edukasi kesehatan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku kesehatan secara optimal. Hal ini terlihat antara lain pada masih ditemukannya kasus penyakit kronis maupun penyakit menular yang datang dengan kondisi komplikasi atau keterlambatan penanganan, seperti pada kasus Tuberculosis, Diabetes Mellitus, dan Hypertension. **Upaya** yang dilakukan antara lain: (1) edukasi berkelanjutan dengan melibatkan pendekatan tokoh agama, masyarakat dan adat, (2) usulan pengadaan ambulance spelling, alat *screening* anemia, *x-ray portable* dan rekrutmen dokter spesialis, (3) Pemberdayaan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) sebagai detektor dini kusta, (4) Pembiayaan kolaboratif dalam penanganan stunting. **Manfaat** penyelenggaraan program ini yaitu menurunkan angka kematian ibu dan anak, menurunkan prevalensi anemia remaja putri, menurunkan prevalensi TBC dan kusta, menurunkan angka stunting serta meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** didukung anggaran Rp111.957.105.000,00 dengan realisasi fisik 99,40% dan keuangan 96,37%. Capaian realisasi fisik tersebut dikarenakan dana BLUD baru tersedia di akhir tahun sehingga untuk pelaksanaannya tidak cukup waktu. Program ini memiliki dua indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu *Cost Recovery Rate Total* dan Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. Program ini mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta efisiensi manajemen rumah sakit. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu meskipun memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan, RSUD dr. Rehatta bergantung pada pendapatan layanan kesehatan dan dukungan pemerintah daerah karena kondisi geografis, keberadaan rumah sakit pesaing sehingga *catchment area* RSUD dr. Rehatta terbatas. Selain itu, tantangan besar RSUD dr. Rehatta dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, salah satunya adalah kekurangan dokter spesialis. Kondisi ini bukan hanya menjadi kendala internal rumah sakit, tetapi juga berdampak signifikan pada akses kesehatan masyarakat di sekitarnya. Hal ini mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang setara dengan rumah sakit di perkotaan. **Upaya** yang dilakukan adalah fokus pada pengelolaan keuangan yang lebih efisien termasuk evaluasi rutin terhadap biaya operasional dan pengadaan setiap bulan, mengusulkan formasi CPNS dan PPPK yang difokuskan pada tenaga dokter spesialis sesuai kebutuhan rumah sakit dan menjalin kerja sama

dengan dokter spesialis mitra. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah untuk memastikan bahwa operasional rumah sakit berjalan sesuai dengan standar pelayanan publik yang optimal.

Tabel 3.58 Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD dr. Rehatta

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
1	Persentase SDM kesehatan yang terlatih	%	100	65	65	35	35	100
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
1	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	100	100	100	100	100
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1	<i>Cost Recovery Rate Total</i>	%	40	63	157,5	40	63	157,5
2	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** Pengadaan 17 unit alat kesehatan/ kedokteran dan 1 unit Ambulance. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kapasitas rumah sakit daerah agar mampu menangani kasus kompleks. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan kapasitas dan kesiapan pelayanan rujukan berbasis kompetensi. **Manfaat** kegiatan ini yaitu pemenuhan standar pelayanan berbasis kompetensi sesuai pelayanan kesehatan berorientasi pada pasien dan selaras dengan transformasi layanan kesehatan rujukan. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan berbasis kompetensi. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu standar kompetensi pelayanan kesehatan belum dapat dipenuhi. **Upaya** yang dilakukan adalah optimalisasi pelayanan kesehatan

existing dan peningkatan pemenuhan standar pelayanan kompetensi yang belum terpenuhi.

- 2) **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** terbayarnya Honorarium Dokter Spesialis dan Pegawai Harian Lepas sejumlah 13 orang. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan ketersediaan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan rujukan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan medis. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit daerah serta menurunnya rujukan pasien keluar rumah sakit. **Permasalahan** yang dihadapi adalah kurangnya minat Dokter Spesialis yang bersedia ditempatkan di RSUD dr. Rehatta. **Upaya** yang telah dilakukan mengusulkan formasi CPNS dan PPPK, kerja sama dengan dokter spesialis mitra dan pengiriman pendidikan Dokter spesialis.

2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** didukung **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** bimtek, diklat, sosialisasi, workshop dan seminar yang dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan terdiri dari Bimtek Keperawatan sejumlah 50 orang, Pelatihan BTCLS sejumlah 52 orang, Workshop Keperawatan 150 orang dan seminar keperawatan 82 Orang. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kompetensi, profesionalisme, dan kinerja tenaga kesehatan dan non-kesehatan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan sesuai bidangnya. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya peningkatan kinerja rumah sakit secara menyeluruh, baik dari aspek manajemen, pelayanan medis, maupun penunjang. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Keterbatasan narasumber yang tersertifikasi. **Upaya** yang dilakukan adalah mendatangkan narasumber dari tempat lain yang membutuhkan biaya tambahan yang berasal dari BLUD.
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung **Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** Penyuluhan Kesehatan, Pendampingan di 2 Desa Binaan dan Bakti Sosial di 17 desa di Jawa Tengah dengan jumlah sebanyak 31 kegiatan yang terdiri dari Pelayanan Spesialis Pemeriksaan Penyakit Dalam, Obgyn, Anak, TB, Kesehatan Jiwa, Bedah, IVA, EKG dan CKG. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dengan pendekatan berbasis desa, *pap smear* gratis dan peningkatan kualitas hidup lansia. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan budaya hidup sehat. Dampak kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi keterbatasan anggaran dan SDM Kesehatan. **Upaya** yang dilakukan antara lain pembiayaan kolaboratif dan kolaborasi lintas sektor, serta penjadwalan pelaksanaan bakti sosial.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 2 kegiatan, yaitu :

- 1) **Administrasi Keuangan** dengan **keluaran** 14 dokumen administrasi keuangan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terjaminnya kepastian dan ketepatan waktu pembayaran gaji serta tunjangan ASN, sehingga mendukung kesejahteraan pegawai. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kinerja organisasi karena kesejahteraan pegawai terjamin dan proses keuangan berjalan lancar. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terjadinya keterlambatan dalam proses input dan verifikasi data kepegawaian serta tunjangan kinerja, yang disebabkan oleh adanya perubahan data ASN (seperti mutasi, perubahan jabatan, atau penyesuaian tunjangan) yang memerlukan pembaruan dokumen pendukung. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan penataan dan pembaruan data kepegawaian secara berkala melalui sistem informasi kepegawaian internal agar perubahan data ASN dapat segera terakomodir dan tidak menghambat proses administrasi keuangan.
- 2) **Peningkatan Pelayanan BLUD** dengan **keluaran** menunjang kegiatan operasional BLUD, antara lain Belanja Pegawai BLUD sebanyak 225 orang pegawai BLUD dan 19 orang dokter mitra, 13 orang PPPK, Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal BLUD. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD terhadap Pelayanan tanpa Antri Lansia (Geriatric), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di RS. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan efektivitas manajemen pelayanan rumah sakit melalui pengelolaan keuangan BLUD yang fleksibel dan efisien. **Manfaat** kegiatan ini yaitu Menjamin keberlangsungan operasional pelayanan rumah sakit, baik untuk kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, maupun administrasi. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSUD dr. Rehatta, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kepuasan pasien dan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, yang berdampak langsung terhadap optimalisasi pelayanan dan pendapatan rumah sakit. Jumlah dokter spesialis yang masih terbatas menyebabkan kapasitas pelayanan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap, belum dapat dimaksimalkan, sehingga pendapatan BLUD dari jasa pelayanan belum optimal. **Upaya** yang dilakukan adalah mengusulkan penambahan formasi tenaga kesehatan melalui mekanisme PPPK dan CPNS, melakukan rekrutmen tenaga dokter spesialis melalui mekanisme kerja sama dengan dokter mitra dan mendukung dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada urusan kesehatan yang dilaksanakan RSUD dr. Rehatta dengan tingkat capaian seluruhnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.59 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSUD dr. Rehatta

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	129	2	101	115	Sangat Tinggi

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSUD dr. Rehatta terdapat 23 jenis pelayanan dengan 113 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian SPM rumah sakit yang memenuhi standar adalah 92,03% dan yang belum memenuhi standar yaitu 7,97%. Capaian indikator yang belum memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.60 Capaian SPM Bidang Kesehatan RSUD dr. Rehatta

NO	JENIS PELAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
1.	Pelayanan Gawat Darurat	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS /ALS: c. Bidan	100%	86,51%	Dari 6 bidan yang jaga di ruang IGD terdapat 2 bidan yang sertifikatnya PPGDON habis masa berlakunya.	Mengusulkan pelatihan KKMN (PPGDON) secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran
2.		Kematian pasien < 24 Jam	≤2‰	3,52‰	1. Keterlambatan kedatangan pasien ke IGD, memperburuk prognosis penyakit yang membutuhkan tindakan resusitasi segera	1. Pembuatan video edukasi penanganan henti jantung/pasien penurunan kesadaran bagi masyarakat awam

NO	JENIS PELAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCA PAIAN		
					2. Kurangnya pemahaman pasien/keluarga pasien tentang kondisi kegawatdaruratan yang berisiko mengancam nyawa (faktor sosiokulturak sangat berpengaruh)	2. Evaluasi rutin alat resusitasi setiap pergantian shift jaga 3. Pengajuan nota dinas alat resusitasi yang sudah tidak optimal 4. Update algoritma henti jantung dan ACLS, serta evaluasi kemampuan resusitasi masing-masing SDM IGD pada rapat bulanan
3.	Rawat Jalan	Ketersediaan Pelayanan	Klinik Mata	Tidak ada	Belum terpenuhinya tenaga dokter spesialis mata	1. Usulan pemenuhan tenaga dokter spesialis mata 2. Membuka open rekrutmen untuk tenaga dokter spesialis mata
4.	Rawat Inap	Kejadian infeksi pasca operasi	≤1,5%	2,77%	1. Internal : Status gizi pasien, obesitas, faktor sosiokultural 2. Eksternal : Kondisi ruang IBS sementara yang belum sesuai standard	1. Komite PPI menyusun audit bundle pencegahan IDO 2. Komite PPI melakukan audit bundle pencegahan IDO 3. Edukasi kepada pasien dan keluarga pentingnya nutrisi bagi pasien post op
5.	Pelayanan Persalinan, KIA, perinatologi dan KB	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤20%	70,19%	1. Adanya peraturan BPJS Kesehatan bahwa persalinan normal harus dilayani FKTP dan persalinan dengan penyulit di Rumah Sakit 2. Persalinan dengan tindakan SC sesuai dengan indikasi	1. Koordinasi dengan FKTP untuk pendampingan ibu resti supaya bisa melakukan persalinan spontan di FKTP 2. Usul peninjauan kembali terkait target capaian < 20 %
6.	Pelayanan Intensif	Pemberi pelayanan Unit Intensif	100% Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU	92,38% Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU	Dari 12 perawat yang bertugas di ICU terdapat 1 perawat yang belum memiliki sertifikat pelatihan ICU	1. Usul diajukan pelatihan ICU bagi perawat ICU yang belum 2. mempunyai sertifikat pelatihan ICU sesuai kemampuan anggaran
7.	Pelayanan Lab. Patologi Klinik	Pelaksana ek-sptersi	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK 16,94%	Dokter SP.PK belum bisa hadir setiap hari	Pengajuan dokter SP.PK organik

NO	JENIS PELAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
8.	Administrasi dan Manajemen	Karyawan Yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥60%	52,86%	1. Penyesuaian anggaran Kurang respect pegawai secara menyeluruh terhadap pentingnya pengembangan kompetensi	1. Penyusunan ulang pengembangan kompetensi TW III 2. Sosialisasi kegiatan pengembangan kompetensi secara masiv
9.	Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	92,30%	Jumlah personil dan jumlah maintenance sarpras belum bisa maksimal	Melakukan modifikasi pengaturan jadwal maintenance
10.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Kepatuhan kebersihan tangan 6 langkah oleh petugas	100%	96,57%	Kurangnya kepatuhan petugas	1. Melakukan monev setiap hari, melakukan koordinasi dengan kepala ruang dalam pemantauan kepatuhan 6 langkah kebersihan tangan 2. Usulan peninjauan kembali target capaian sesuai INM

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Pemenuhan alat kesehatan guna mendukung pengembangan layanan berbasis kompetensi;
2. Meningkatkan dan menjamin keberlanjutan layanan tanpa antri (*fast track*) untuk Lansia (Geriatric), Ibu hamil, Disabilitas, dan Pensiunan di RS;
3. Meningkatkan dan menjamin keberlanjutan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting, antara lain melalui edukasi & pemeriksaan kesehatan balita dan pemberian paket nutrisi di desa/wilayah sekitar RS.

F. RSJD dr. Amino Gondohutomo

Sebagai rumah sakit kelas A, RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh dan terpadu. Pelayanan tersebut mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, rumah sakit ini juga berperan sebagai pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa, serta aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah menargetkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan jiwa, memperkuat respons terhadap faktor risiko gangguan jiwa yang semakin beragam, mengoptimalkan sarana

dan prasarana pelayanan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa guna menekan stigma dan mendukung pemulihan pasien.

Penghargaan tingkat nasional yang diterima RSJD dr. Amino Gondohutomo berdasarkan yaitu Piala dan Piagam 'Fakes Berkomitmen Terbaik dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tahun 2025.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp172.220.159.000,00, untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** didukung anggaran Rp146.456.606.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 85,58%. Capaian realisasi keuangan tersebut dipengaruhi oleh adanya prioritas dan efisiensi pada belanja modal serta belanja barang dan jasa, yang dilakukan sebagai penyesuaian terhadap realisasi pendapatan yang masih perlu dioptimalkan agar sejalan dengan target yang ditetapkan, tanpa mengganggu pencapaian output fisik program. Program ini memiliki 2 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah dan tinggi yaitu *Cost Recovery Rate Total*. Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai. **Permasalahan** program ini capaian *Cost Recovery Rate* (CRR) Total masih memerlukan penguatan optimalisasi pendapatan untuk mengimbangi kebutuhan belanja operasional yang terus berkembang. **Upaya** yang telah dilakukan adalah efisiensi belanja BLUD yang memprioritaskan pelayanan langsung kepada masyarakat, optimalisasi pendapatan melalui peningkatan mutu dan perluasan layanan, penguatan edukasi dan promosi kesehatan jiwa secara berkelanjutan, serta optimalisasi layanan konsultasi kesehatan jiwa daring dan tatap muka guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. **Manfaat** Program ini mendukung pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, obat-obatan, dan sarana pelayanan, serta menjamin kelancaran operasional rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung anggaran Rp25.688.084.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,52%. Program ini memiliki dua indikator dengan capaian sangat tinggi yang mendukung RKPD yaitu persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat serta persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** pada program ini berkaitan dengan adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi dalam rangka pengendalian belanja, yang berdampak pada penyesuaian waktu pelaksanaan pengadaan barang. **Upaya** yang telah dilakukan adalah percepatan proses

belanja agar pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan. **Manfaat** Program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan alat kesehatan, obat-obatan, serta pengadaan ambulans untuk mendukung layanan gawat darurat dan mobilitas pasien. Selain itu, pelaksanaannya turut memastikan ketersediaan sarana dan prasarana medis yang memadai, termasuk pengembangan fasilitas rumah sakit yang lebih modern guna meningkatkan kapasitas, kenyamanan, dan keselamatan pasien serta mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung anggaran Rp75.469.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 92,07%. Program ini memiliki satu indikator yang mendukung RKPD dengan capaian sangat tinggi yaitu Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat Provinsi pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Manfaat** penyelenggaraan Program ini yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat dalam upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan. Kegiatan seperti home visit, pendampingan desa binaan, penyuluhan, dan seminar kesehatan berkontribusi dalam mendeteksi dini permasalahan kesehatan, memperkuat peran serta masyarakat, serta mendorong pola hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan.

Tabel 3.61 Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	44	36,91	83,88	43	36,91	85,84
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	100	100	100	100
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
1	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan **keluaran** 520 orang pegawai yang terpenuhi hak penghasilannya. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terjaminnya motivasi, disiplin, dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. **Manfaat** kegiatan ini yaitu pemenuhan hak pegawai ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian kepada negara. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik, seiring dengan meningkatnya profesionalisme dan tanggung jawab ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
- 2) **Peningkatan Pelayanan BLUD** dengan **keluaran** Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan jiwa dan nonjiwa melalui optimalisasi pelayanan poliklinik, seperti Klinik Obstetri dan Ginekologi, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Psikologi, serta poliklinik lainnya. dan kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap Pelayanan tanpa Antri Lansia (Geriatric), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di RS dan isu strategis seperti Stunting, Angka Kematian Ibu. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan Kesehatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terjaminnya kontinuitas pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan medis dengan kualitas yang konsisten dan berkesinambungan. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi penderita gangguan jiwa, melalui penyediaan layanan yang profesional, komprehensif, dan berkesinambungan. **Permasalahan** yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu masih terdapat tantangan dalam menjaga keselarasan antara realisasi belanja rumah sakit dan pendapatan yang diperoleh, sehingga diperlukan penguatan dukungan pendanaan untuk mendukung operasional, pengadaan peralatan medis, serta pembangunan dan renovasi infrastruktur rumah sakit. **Upaya** yang dilakukan meliputi efisiensi pada beberapa pos belanja BLUD, optimalisasi pendapatan melalui peningkatan volume dan variasi layanan kesehatan termasuk layanan unggulan kesehatan jiwa, rehabilitasi, dan konsultasi psikologis berbasis komunitas, serta penguatan kerja sama dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas akses layanan dan potensi pendapatan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** pengadaan alat Kesehatan/alat kedokteran sebanyak 32 unit antara lain CO2 Ablatif Fractional, Quantitative Electroencephalogram, Transcranial Magnetic Stimulation

(TMS), dan General XRAY. Pengadaan mobil ambulance sebanyak 2 unit serta pengadaan obat-obatan untuk pasien dan kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kapasitas rumah sakit daerah agar mampu menangani kasus kompleks. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana, prasarana, serta ketersediaan obat-obatan esensial yang menunjang kelancaran dan keberlangsungan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan yang didukung oleh sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, aman, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah. **Permasalahan** dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu berkaitan dengan adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja, yang berdampak pada penyesuaian waktu pelaksanaan sebagian kegiatan. **Upaya** yang dilakukan meliputi penjadwalan ulang kegiatan, percepatan proses administrasi dan pengadaan, serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan.

- 2) **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** terbayarnya honorarium dan belanja iuran jaminan/asuransi BPJS bagi pegawai Harlep Provinsi sejumlah 4 orang. **Outcome** kegiatan ini berupa terjaminnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan melalui pembayaran honorarium dan iuran jaminan kesehatan, guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terciptanya tenaga kesehatan yang lebih termotivasi dan berkinerja baik melalui jaminan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang memadai. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya mutu dan keberlanjutan pelayanan kesehatan melalui tenaga kesehatan yang sejahtera dan berkomitmen.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** didukung kegiatan **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** berupa 4 kegiatan yaitu *dropping* pasien, *home visit* pasien, *home care* pasien serta promosi kesehatan masyarakat dan kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kualitas hidup lansia, peningkatan kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dengan pendekatan berbasis desa dan isu strategis seperti Stunting, Angka Kematian Ibu. **Outcome** kegiatan tersebut berupa Terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih responsif dan berbasis masyarakat melalui kegiatan advokasi, home visit, dan promosi kesehatan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu Meningkatnya keberlanjutan perawatan dan pemulihan pasien melalui dukungan serta partisipasi keluarga dan masyarakat. **Dampak** kegiatan ini yaitu Terwujudnya masyarakat yang lebih peduli dan berdaya dalam mendukung kesehatan jiwa dan non jiwa.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan RSJD dr. Amino Gondohutomo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.62 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD dr. Amino Gondohutomo

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	2	92,92	2	100	92,92	Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2	100	3	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSUD dr. Amino Gondohutomo terdapat 21 jenis pelayanan dengan 86 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian SPM rumah sakit yang memenuhi standar adalah 99,52% dan yang belum memenuhi standar yaitu 0,48%. Capaian indikator yang belum memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.63 Capaian SPM Bidang Kesehatan RSJD dr. Amino Gondohutomo

NO	JENIS PELAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
1.	Rawat Inap	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,25%	0.55%	dipengaruhi oleh tingginya jumlah pasien rujukan dengan kondisi klinis berat dan kebutuhan perawatan lanjutan yang kompleks.	Optimalisasi skrining dan penanganan awal pasien rujukan dengan kondisi klinis berat melalui peningkatan koordinasi, pemantauan intensif, dan kolaborasi tim layanan.
2.	Rawat Inap	Kejadian (re-admission) pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤ 1 bulan	100%	96.75%	Rendahnya kepatuhan pasien dan kurangnya dukungan keluarga serta lingkungan terhadap jadwal kontrol pasca perawatan, khususnya pada pasien dengan gangguan jiwa berat.	Peningkatan edukasi dan pendampingan kepada pasien dan keluarga serta penguatan pemantauan pasca perawatan melalui koordinasi layanan kesehatan.
3.	Pelayanan Persalinan, Perinatologi	Kemampuan menangani	100%	96%	terjadi karena terdapat satu pasien bayi yang dirawat di ruang NICU	Peningkatan pemantauan intensif dan penatalaksanaan optimal

NO	JENIS PELAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
		BBLR 1500 gr – 2500 gr			meninggal dunia akibat kondisi prematur dan gangguan pernapasan.	pada bayi risiko tinggi di ruang NICU sesuai standar pelayanan.
4.	Pelayanan Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	100%	99.92%	terjadi karena hasil foto rontgen dikategorikan tidak cito, sehingga tidak dilakukan konfirmasi atau pemanggilan dokter pada tengah malam.	Penguatan kepatuhan terhadap SOP penetapan pemeriksaan cito serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar petugas pelayanan.
5.	Pelayanan Administrasi Manajemen	Cost Recovery	≥ 40%	36.9%	capaian Cost Recovery Rate (CRR) Total masih memerlukan penguatan optimalisasi pendapatan untuk mengimbangi kebutuhan belanja operasional yang terus berkembang	efisiensi belanja BLUD yang memprioritaskan pelayanan langsung kepada masyarakat, optimalisasi pendapatan melalui peningkatan mutu dan perluasan layanan, penguatan edukasi dan promosi kesehatan jiwa secara berkelanjutan, serta optimalisasi layanan konsultasi kesehatan jiwa daring dan tatap muka guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit

Rencana strategis yang akan dilaksanakan pada 2026 merupakan kelanjutan kegiatan sebelumnya antara lain:

1. Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana berupa alat kesehatan/alat kedokteran sesuai standar KRIS dan rumah sakit berbasis kompetensi,
2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM dalam hal pengadaan dokter sub spesialis jiwa,
3. Optimalisasi kerja sama layanan dengan Panti Rehabilitasi Napza,
4. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, perluasan jangkauan sasaran, dan pemanfaatan media edukasi yang efektif.

G. RSJD dr. Arif Zainuddin

Dalam melaksanakan tugas Urusan Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Kesehatan RSJD, Penyusunan program kerja dan anggaran RSJD, Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSJD, Pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis, Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengabdian Masyarakat serta penapisan teknologi

bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan, Penyelenggaraan kesekretariatan RSJD, Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSJD, Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSJD dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Identifikasi dan pemetaan masalah RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah berdasarkan masing-masing bidang urusan kesehatan, antara lain: belum terpenuhinya Prasarana yang sesuai standar pelayanan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan dan Belum terpenuhinya fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Prestasi tingkat nasional yang diraih RSJD Dr. Arif Zainudin pada Urusan Kesehatan pada tahun 2025 adalah:

1. Juara 1 Fasilitas Kesehatan Kategori Video Edukasi Pemanfaatan Mobile JKN Terbaik oleh Fasilitas Kesehatan dalam Digital Transformation Awards 2024 di tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan RI.
2. Juara III tingkat Nasional untuk kategori *Healthcare Workers' Wellbeing* Lomba PERSI Award.
3. Juara III tingkat Nasional Video Edukasi HKJS #7DetikJagaJiwa dalam Lomba Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (Arsawakoi).
4. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Berkomitmen Kategori RS Khusus dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Cabang 2025 oleh BPJS Kesehatan RI.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, RSJD Dr. Arif Zainudin didukung anggaran Rp146.040.806.000,- untuk melaksanakan 2 program, yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berisi Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** didukung anggaran Rp126.607.356.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,20%. Terdapat beberapa pegawai BLUD yang mutasi dan mengundurkan diri, serta ASN yang pensiun/purna sehingga anggaran gaji tersisa 7,05%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah; Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah dan Indikator Cost Recovery Rate. Terhadap target akhir RPD terdapat 3 indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah terdapat kelebihan anggaran pada gaji dan tunjangan pegawai dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun/purna tugas, dan mutasi. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan melakukan penghitungan perkiraan jumlah pegawai dan penghitungan anggaran gaji dan tunjangan ASN tahun 2026 dengan berkoordinasi dengan bagian kepegawaian agar perhitungan lebih tepat dan akurat. **Manfaat** program ini adalah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan obat-obatan pasien, penyediaan sarana penunjang pelayanan kesehatan, serta menjamin

kelancaran operasional rumah sakit yang meliputi pemeliharaan barang milik daerah, pengembangan kapasitas pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan ASN (PPPK) dan tenaga BLUD, serta pengadaan barang dan jasa pendukung pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta optimalisasi pencapaian CRR Total.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat didukung anggaran Rp19.433.450.000,00 dengan realisasi fisik 94,73% dan keuangan 89,15%. Terdapat kegiatan yang belum selesai yaitu pada Pengadaan Alat Kesehatan dikarenakan adanya proses pre-order selama 8 bulan untuk alat kesehatan tersebut, sehingga waktu pengadaan tidak cukup jika dilakukan di tahun 2025. Program ini memiliki 3 indikator yaitu Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dan Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain pengadaan Alat Kesehatan dalam rangka pemenuhan fasilitas layanan kesehatan tidak sesuai RKO (Rencana Kerja Operasional) atau mundur dari jadwal yang ditetapkan. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian RKO dengan tetap mempertimbangkan waktu pelaksanaan. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu upaya pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin meningkat yang berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat.

Tabel 3.64 Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. Arif Zainudin

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
1	Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	%	33	34,91	105,79	33	34,91	105,79
2	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	92	99,16	107,78	90	99,16	110,18
3	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100,00	100	100	100,00
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95	98,61	103,80	95	98,61	103,80
2	Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95	100	105,26	95	100	105,26

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	%	100	100	100,00	100	100	100,00

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan keluaran kegiatan antara lain terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sejumlah 429 orang. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terbayarnya gaji dan tunjangan ASN. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya hak pegawai. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kesejahteraan pegawai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah terdapat kelebihan anggaran pada gaji dan tunjangan ASN dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun/purna tugas. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan melakukan penghitungan perkiraan jumlah pegawai dan penghitungan anggaran gaji dan tunjangan ASN tahun 2026 dengan melakukan koordinasi bersama bagian kepegawaian agar perhitungan lebih tepat dan akurat.
- 2) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan keluaran kegiatan antara lain Terlayannya urusan kepegawaian meliputi kenaikan pangkat 55 orang, pensiun 7 orang, kenaikan jabatan 55 orang dan penerima satya lencana 1 orang. **Outcome** kegiatan tersebut berupa Terpenuhinya hak pegawai. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya kesejahteraan pegawai. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kesejahteraan pegawai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian serta belum optimalnya pemanfaatan dan integrasi sistem informasi kepegawaian, yang berdampak pada keterlambatan dan kurang optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala dan terintegrasi, serta melakukan pemanfaatan dan integrasi sistem informasi kepegawaian secara optimal guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian.
- 3) **Peningkatan Pelayanan BLUD** dengan keluaran kegiatan ini antara lain adalah terlaksananya kegiatan operasional rumah sakit berupa Belanja Pegawai, Barang Jasa, dan Modal serta peningkatan kualitas pelayanan BLUD. Kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD tentang Pelayanan tanpa Antri (*Fast-Track*) Lansia (Geriatri), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di Rumah Sakit, serta mendorong peningkatan kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan

gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dengan pendekatan berbasis desa. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kemandirian dan pengelolaan layanan kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainudin. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit dan terjaminnya keberlanjutan pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam rangka memberikan layanan medis yang berkualitas dan konsisten kepada masyarakat. Dampak kegiatan ini yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. **Permasalahan** dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kondisi di mana realisasi belanja rumah sakit melampaui pendapatan BLUD yang diperoleh, sehingga keberlanjutan operasional rumah sakit masih sangat bergantung pada subsidi APBD, terutama dalam mendukung pembiayaan gaji pegawai, pengadaan peralatan medis, serta pembangunan dan renovasi infrastruktur rumah sakit. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui optimalisasi pendapatan BLUD melalui optimalisasi layanan unggulan, peningkatan kerja sama kemitraan strategis dengan pihak ketiga, termasuk BPJS Kesehatan, lembaga sosial, perguruan tinggi, serta sektor swasta, guna memperluas akses layanan bagi pasien sekaligus meningkatkan potensi pendapatan, serta pengendalian efisiensi belanja rumah sakit.

2. Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain penyediaan 12 unit alat kesehatan/alat penunjang medik antara lain : endoscopy, laparoscopy, dan panoramic digital, serta Penyediaan 2 paket Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat yang sesuai standar. **Dampak** kegiatan ini yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Pengadaan 1 (satu) unit alat kesehatan *Electro Convulsive Therapy* (ECT) tidak terpenuhi dikarenakan barang impor dan membutuhkan waktu pengadaan minimal 8(delapan) bulan. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan alat kesehatan yang ada.
- 2) **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain terbayarnya premi asuransi BPJS, honorarium dokter spesial dan umum masing-masing sebanyak 1 (satu) orang. **Outcome** kegiatan tersebut berupa Terlayannya pelayanan kesehatan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat yang sesuai standar. **Dampak** kegiatan ini yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Masih adanya status pegawai honor. **Upaya** yang dilakukan adalah Pengalihan status tenaga honor menjadi tenaga BLUD.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan RSJD Dr. Arif Zainudin dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.65 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. Arif Zainudin

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	100	5	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3	100	7	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSJD Dr. Arif Zainudin terdapat 18 jenis pelayanan dengan 75 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian SPM rumah sakit sebesar 97,86 % dari target 96,58%. Indikator SPM yang belum memenuhi standar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.66 Capaian SPM Bidang Kesehatan RSJD Dr. Arif Zainudin

NO	JENIS PELAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
1.	Rawat Inap	Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤ 1 bulan	100%	97,03%	Pasien kembali dalam perawatan ≤ 1 bulan karena beberapa hal : - Tidak minum obat secara teratur - Stigma : kurangnya dukungan keluarga/ masyarakat - Kondisi sosial ekonomi pasien	Melakukan edukasi keluarga/ masyarakat
2.	Administrasi dan Manajemen	Cost Recovery	≥ 40 %	39,86%	- Target pendapatan tidak tercapai - Terdapat SILPA pada anggaran perubahan	- Upaya peningkatan pendapatan pada tahun berikutnya - Efisiensi dalam belanja barang dan jasa

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Operasionalisasi *Central Sterile Supply Department* (CSSD);
2. Peningkatan sarana prasarana, gedung dan bangunan sesuai persyaratan klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi;
3. Peningkatan promosi layanan rumah sakit.

H. RSJD dr. RM. Soedjarwadi

Dalam melaksanakan tugas urusan kesehatan. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi memiliki fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan RSJD;
- b. Penyusunan program kerja dan anggaran RSJD;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSJD;
- d. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan suber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- f. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat serta penapisan teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan Bidang Kesehatan;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan RSJD;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSJD;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSJD; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi berupaya untuk selalu berkembang dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan dilaksanakan dengan pengembangan layanan baru seperti layanan bedah, obsgyn, paru dan unit hemodialisa. Pemenuhan sarana dan pra sarana terus diupayakan dengan mengoptimalkan berbagai sumber anggaran, sementara untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan maka upaya pengembangan kompetensi SDM juga terus dilaksanakan.

Dalam mendukung misi pertama Gubernur Jawa Tengah, yaitu Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sebagai Rumah Sakit Jiwa Kelas A, turut melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas SDM di Jawa Tengah melalui layanan kesehatan jiwa maupun non jiwa.

Prestasi tingkat nasional yang di raih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi tahun 2025 yaitu:

1. Juara 1 Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK) terbaik (JFK Award 2025) Kategori RS Daerah oleh Kementerian Kesehatan RI;
2. Juara Harapan 1 tingkat nasional Lomba Video Inovasi Unggulan RS pada Pertemuan Ilmiah Tahunan & Semiloka Nasional (PITSELNAS) IX KARS yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan Visi Misi Jawa Tengah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi didukung anggaran Rp142.609.633.000,00 untuk melaksanakan 4 program, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** didukung anggaran Rp113.063.404.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93%, hal tersebut karena efisiensi anggaran BLUD agar bisa digunakan untuk anggaran tahun berikutnya. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi antara lain persentase capaian Cost Recovery Rate Total (CRR Total) sebesar 116,61%; Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah sebesar 100%; Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah sebesar 100%. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah pembayaran gaji pegawai PPPK yang dibebankan kepada BLUD rumah sakit sehingga mempengaruhi operasional rumah sakit. **Upaya** yang dilakukan rumah sakit dengan melakukan pengembangan layanan untuk mendukung kenaikan pendapatan. **Manfaat** program tersebut yaitu menunjang operasional Rumah Sakit sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan lengkap dengan kualitas terbaik.
2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung anggaran Rp29.234.777.000,00 dengan **realisasi** fisik 100% dan keuangan 96,63%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase Pemenuhan Fasilitas layanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan capaian sebesar 100%, Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat dengan capaian sebesar 100%. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu adanya penerapan beberapa standar baru dalam pelayanan rumah sakit seperti penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), penerapan sistem klasifikasi berdasarkan kompetensi atau kemampuan layanan yang dimiliki rumah sakit berdasarkan kompetensi. **Upaya** yang dilakukan adalah mengalokasikan anggaran BLUD untuk renovasi ruang rawat inap agar sesuai dengan standar KRIS. Terkait pemenuhan kompetensi rumah sakit, telah dilakukan perekrutan SDM dokter spesialis/sub spesialis untuk mendukung layanan RS, pengadaan alat-alat kesehatan untuk meningkatkan kompetensi rumah sakit, dan pengadaan lahan untuk pemenuhan prasarana sesuai standar. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit serta peningkatan kompetensi rumah sakit dalam melayani pasien jiwa maupun non jiwa.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan didukung anggaran Rp245.564.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase SDM kesehatan yang terlatih sebesar 132,76%. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain tidak semua masyarakat memiliki akses layanan rumah sakit (khususnya spesialisik), tidak semua masyarakat telah teredukasi dengan optimal terkait urusan kesehatan **Upaya** yang dilakukan melaksanakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat melalui bakti sosial, seminar/webinar dan berbagai penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Untuk memberikan akses pelayanan spesialis, dilakukan program dokter spesialis keliling ke berbagai lokasi desa di Jawa Tengah sehingga akses kepada layanan spesialis bagi masyarakat desa menjadi terwujud **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah masyarakat yang teredukasi dan akses layanan spesialis dapat lebih menjangkau masyarakat sampai ke desa-desa.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan didukung anggaran Rp65.888.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase capaian advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi dengan capaian sebesar 100% dan Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi dengan capaian sebesar 100%. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain belum semua tenaga kesehatan memiliki kompetensi sesuai persyaratan atau ada yang sudah memiliki sertifikasi namun masa berlakunya sudah habis **Upaya** yang dilakukan yaitu secara konsisten melakukan pendataan terkait kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai layanan yang dimiliki rumah sakit. Berdasarkan data kebutuhan kompetensi dilaksanakan kegiatan pelatihan di rumah sakit atau pengiriman SDM untuk mengikuti pelatihan di luar rumah sakit. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah tercapainya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan rumah sakit sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diukur dalam indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Tabel 3.67 Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI							
1	Cost Recovery Rate Total (CRR Total)	%	46,57	45,35	97,38	38,89	45,35	116,61
2	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemenuhan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	100	100	100	100
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
1	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	35	99,57	284,48	75	99,57	132,76
IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase capaian advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan Masyarakat Tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Peningkatan Pelayanan BLUD** dengan **keluaran** *Case Recovery Rate Parsial* (CRR Parsial) dengan capaian 112,6% dari target sebesar 91,6%. **Keluaran** menunjang kegiatan operasional BLUD, antara lain Belanja Pegawai BLUD sebanyak 121 orang pegawai, 37 orang pegawai PPPK, 20 orang pegawai Mitra, Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal BLUD. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu menunjang pelayanan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terkendalinya biaya BLUD dalam menunjang pelayanan. **Dampak** kegiatan ini yaitu tercapainya tata kelola BLUD yang efektif dan efisien BLUD. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kebutuhan belanja dari berbagai unit kerja yang terus meningkat. **Upaya** yang dilakukan yaitu rutin melakukan pemantauan terhadap ketersediaan anggaran dengan belanja yang akan dilakukan.
- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan **keluaran** kegiatan antara lain penyediaan gaji dan tunjangan ASN sejumlah 352 orang. **Outcome** kegiatan ini berupa terpenuhinya hak pegawai rutin setiap bulan. **Manfaat** meningkatnya kesejahteraan pegawai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu bertambahnya ASN di pertengahan

tahun sehingga menyebabkan anggaran gaji tidak cukup. **Upaya** yang dilakukan dengan melakukan permohonan penambahan anggaran.

2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung kegiatan **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** yaitu pengadaan 25 unit alat kesehatan/alat penunjang medik dan penyediaan 3 paket Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman. Kegiatan tersebut merupakan **rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah tahun 2025 tentang pelayanan tanpa antri (Fast track)** untuk Lansia (Geriatric) dengan alat bantu mobilitas, Ibu hamil, Bayi dibawah 2 tahun, penyandang disabilitas dan Pensiunan sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 3.664 pasien menggunakan layanan *fast track*. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat yang sesuai standar. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. **Permasalahan** kegiatan yaitu beberapa alat kesehatan yang proses pengadaannya dilaksanakan setelah anggaran perubahan sehingga waktu pengadaan menjadi terbatas. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan rekanan pengadaan barang modal.
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia** didukung kegiatan **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek ,17 kegiatan untuk 369 orang pegawai antara lain: Workshop upgrading Pelayanan informasi Publik, Deklarasi penguatan pembangunan zona integritas menuju WBBM, Bimtek SAKD SIM BLUD, Bimtek Pembinaan Mental Pegawai, Workshop Penguatan Akreditasi Rumah Sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah (16 April 2025) Workshop Pelayanan Prima dan Komunikasi Efektif di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah (22-25 April 2025), Seminar Online Penatalaksanaan Masalah Penyalahgunaan Napza Dengan Skrining Assist, Terapi Dan Rujukan Kasus (24 April 2025), Bimbingan Teknis Rekam Medis Elektronik (RME) bagi Pegawai CPNS Tahun 2024 di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah (9 Mei 2025), Pelatihan BTCLS, Pelatihan PPI Dasar, Bimtek Kelengkapan Fasilitas Penanggulangan Kebakaran, Bimtek Penguatan Asuhan Keperawatan General, Webinar Nasional Manajemen dan Tata Laksana Gangguan Jiwa pada Lansia, Bimtek Penyuluhan Assesment Rehab Psikososial, IHT Kemampuan Dasar, IHT Pengembangan Pelayanan CAPD dan Bimtek Keamanan Jaringan. **Outcome** meningkatnya kapasitas SDM Rumah Sakit. **Manfaat** kegiatan ini yaitu peningkatan pelayanan Rumah Sakit. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terbatasnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan tertentu sehingga standar kompetensi untuk pelayaann tertentu belum bisa terpenuhi. **Upaya** yang dilakukan mengadakan pelatihan mandiri dengan menghadirkan narasumber dari luar.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan didukung kegiatan **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** FGD *Psychological First Aid* bersama DPRD dan 7 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi yaitu penyuluhan kesehatan, bakti sosial, temu pelanggan, Forum Komunikasi Publik (FKP), Seminar, Spesialis Keliling (Speling) dan Pencegahan Stunting (pemberian makanan tambahan). Kegiatan ini merupakan **rekomendasi DPRD** terhadap laporan LKPJ Gubernur tahun 2024. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu edukasi kesehatan kepada masyarakat dan mendapatkan pelayanan spesialisik. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kesehatan dan memudahkan akses layanan spesialisik. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat terkait kesehatan dan akses layanan spesialisik. **Permasalahan** kegiatan ini yaitu terbatasnya jumlah dokter spesialis non jiwa dan alat kesehatan. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran BLUD dan koordinasi dengan rumah sakit lain serta Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.68 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kesehatan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2	100	7	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	100	2	100	98.34	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSJD dr. RM. Soedjarwadi terdapat 20 jenis pelayanan dengan 77 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian SPM

rumah sakit yang memenuhi standar adalah 98,91% dan yang belum memenuhi standar yaitu 1,09%. Capaian indikator yang belum memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.69 Capaian SPM Bidang Kesehatan RSJD dr. RM. Soedjarwadi

NO	JENIS PELAYANAN	SPM			PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN		
1.	Rawat Inap	Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	0%	72,54%	Banyak faktor eksternal yang membuat pasien jiwa kambuh lagi: lingkungan sosial, ekonomi dll	1. Inovasi SOPASTI untuk mengedukasi keluarga pasien untuk tertib minum obat dan memantau kondisi pasien jiwa 2. Home visit 3. Si Terpa Daya Jiwa 4. FGD/Pelatihan <i>Psychological First Aid</i> kepada kader jiwa di tingkat kecamatan. 5. Penyuluhan-penyuluhan kesehatan jiwa di masyarakat 6. Peningkatan kompetensi petugas keperawatan jiwa melalui IHT Kegawatdaruratan Jiwa
2.	Rehabilitasi Medik	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	$\leq 5 \%$	70,90%	Rujukan dari faskes tingkat I seringkali ke RS lain. Dari sisi pasien ada kemungkinan mereka merasa sudah sembuh sehingga enggan melanjutkan terapi	1. Melakukan edukasi ke pasien 2. Membuka Pelayanan Rehab Medik di Hari Sabtu
3.	Farmasi	Waktu tunggu pelayanan obat: Obat racik	≤ 60 menit	99,21%	Obat Racikan lebih membutuhkan ketelitian dan waktu lebih lama	1. Adanya APM Antrian Obat 2. Penggabungan farmasi rawat jalan jiwa dan non jiwa untuk memangkas waktu tunggu dan SDM lebih fleksibel dalam melayani pasien
4.	Rekam Medis	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	80%	Tidak semua dokter mau mengisi form evaluasi pasien karena form tersebut dianggap terlalu berat dan tidak simple	1. Upaya penyederhanaan sistem RME sehingga lebih memudahkan pengisian 2. Koordinasi Internal RS

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2025 yaitu:

1. Pembangunan gedung rawat inap
2. Penambahan lahan di sekitar rumah sakit
3. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk meningkatkan kompetensi rumah sakit
4. Penganggaran tugas belajar untuk dokter sub spesialis
5. Penambahan jumlah dokter spesialis
6. Penataan tata ruang rumah sakit
7. Perluasan jejaring kerjasama

3.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah turut melaksanakan 136 Program Prioritas Gubernur sebagai sebuah terobosan strategis yaitu peningkatan jalan kolektor dengan spesifikasi lebar 7 meter dan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton, implementasi program desalinasi di Kabupaten Demak, Brebes, dan Pati sebagai solusi jangka panjang bagi krisis air bersih di wilayah pesisir, serta peningkatan dan perluasan SPAM Regional Bregas dan Wosusokas untuk memperluas jangkauan akses air minum layak bagi masyarakat.

Dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi telah melaksanakan serangkaian program strategis yang terintegrasi antara sektor ketenagakerjaan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan infrastruktur jalan. Pada aspek ketenagakerjaan, program Padat Karya telah diwujudkan melalui Penyelenggaraan pemeliharaan rutin jalan dengan melibatkan Masyarakat Bina Marga (Masbima). Pada Tahun Anggaran 2025, program yang telah menjangkau seluruh Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) dengan melibatkan 824 orang. Di sektor penanggulangan kemiskinan, upaya konkret dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa. Pada TA 2025, program yang menyasar 30 desa prioritas dengan keterbatasan akses air bersih. Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi secara khusus menangani ruas jalan rawan kecelakaan di Kalijambe-Purworejo. Rencana tindak lanjutnya telah dilaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan jalur penyelamat. Sedangkan, untuk memperkuat penanganan di seluruh wilayah, koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR dan Dinas PU Kabupaten/Kota terus dilakukan, melalui aplikasi "Jalan Cantik" untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait jalan berlubang dan rawan kecelakaan.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya didukung anggaran Rp1.062.553.158.000,00 untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Jalan** didukung anggaran Rp827.223.417.000,00 dengan realisasi fisik 99,99% dan keuangan 96,37%. Realisasi fisik tidak tercapai 100% dikarenakan paket pekerjaan peningkatan jalan Kuwu-Galeh di Kab.Grobogan terkendala proses pembebasan lahan milik Perhutani yang akan terbit rekomendasinya pada Tahun 2026. Program ini memiliki 25 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD terdapat 10 indikator telah tercapai dan 15 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi masih terdapat ruas jalan provinsi yang belum memenuhi standar teknis yang berlaku. **Upaya** yang dilakukan antara lain: melakukan kegiatan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan sesuai pemetaan prioritas penanganan. **Manfaat** program ini adalah meningkatkan

kemantapan jalan sebagai sarana pendukung konektivitas antar wilayah dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian.

2. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** didukung anggaran Rp88.554.782.000,00 dengan **realisasi** fisik 100,00% dan keuangan 96,04%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase akses air minum layak, Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan Persentase akses air minum jaringan perpipaan. Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator telah tercapai yaitu Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan 2 indikator akan tercapai yaitu Persentase akses air minum layak dan Persentase akses air minum jaringan perpipaan. **Permasalahan** yang dihadapi masih adanya kesenjangan akses air bersih antar daerah baik perkotaan maupun perdesaan. **Upaya** yang dilakukan yaitu perluasan cakupan layanan air bersih melalui pembangunan infrastruktur SPAM Regional dan SPAM Desa yang menyasar daerah rawan kekeringan. **Manfaat** program ini adalah tersedianya akses air bersih yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat yang bersumber dari sumber air berkelanjutan.
3. **Program Penataan Bangunan Gedung** didukung anggaran Rp45.795.822.000,00 dengan realisasi fisik 98,52% dan keuangan 91,31% dikarenakan penugasan khusus pembangunan revitalisasi PRPP menjadi pusat kegiatan MICE belum tercapai kesepakatan dengan investor sehingga belum dapat dilaksanakan, selain itu penugasan khusus rehabilitasi rumah dinas Gubernur yaitu Puri Gedeh tidak jadi dilaksanakan karena termasuk bangunan cagar budaya yang membutuhkan ijin khusus dari Dinas Kebudayaan Daerah dan Kajian Tim Ahli Cagar Budaya. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah dan Persentase kompleks bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi masih terdapat Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) yang belum memenuhi standart teknis dan keselamatan. **Upaya** yang dilakukan yaitu melalui kegiatan pendataan dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan bangunan gedung negara yang berkelanjutan. **Manfaat** program ini adalah terwujudnya tata kelola bangunan gedung yang tertib dan memenuhi standar.
4. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi** didukung anggaran Rp3.742.711.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,39%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi dan Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut akan

tercapai. Permasalahan yang dihadapi yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan jumlah, kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan bimbingan teknis. Manfaat program ini adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam rangka mewujudkan mendukung pembangunan infrastruktur yang masif, andal, berkualitas dan berkelanjutan.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

didukung anggaran Rp364.039.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,95% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase akses air limbah domestik layak. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik yang berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. **Upaya** yang dilakukan yaitu menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Kelompok Pemanfaat dan Penyelenggara (KPP) Sanitasi untuk meningkatkan kapasitas dan manajerial operasional. **Manfaat** program ini adalah terwujudnya pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal yang berkelanjutan dan mandiri melalui peningkatan kapasitas KPP Sanitasi yang profesional dan kompeten.

Tabel 3.70 Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUBMCK

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
1	Persentase panjang jalan yang dileger	%	100,00	58,32	58,32	58,32	58,32	100,00
2	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	40,13	49,59	123,57	48,87	49,59	101,47
5	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	45,80	47,85	104,48	47,43	47,85	100,89
6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	96,61	94,08	97,38	94,06	94,08	100,02

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	86,24	79,42	92,09	78,42	79,42	101,28
8	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,86	94,81	98,90	95,33	94,81	99,45
9	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	88,59	83,83	94,63	83,56	83,83	100,32
10	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	98,44	97,91	99,46	94,89	97,91	103,18
11	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	83,75	93,61	111,77	88,84	93,61	105,37
12	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	96,21	94,78	98,51	94,78	94,78	100,00
13	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	85,61	91,57	106,96	91,56	91,57	100,01
14	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	95,64	96,04	100,42	93,98	96,04	102,19
15	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	93,75	82,69	88,20	74,58	82,69	110,87
16	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	%	92,07	94,89	103,06	93,71	94,89	101,26
17	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	95,00	93,71	98,64	84,18	93,71	111,32
18	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	92,04	94,03	102,16	91,03	94,03	103,30
19	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	93,92	88,35	94,07	78,13	88,35	113,08
20	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%	80,76	91,26	113,00	90,71	91,26	100,61
21	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	91,28	67,81	74,29	67,00	67,81	101,21

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	94,07	91,89	97,68	91,89	91,89	100,00
23	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	94,88	91,91	96,87	91,87	91,91	100,04
24	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
25	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	100,00	73,04	73,04	73,04	73,04	100,00
II PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
1	Persentase akses air minum layak	%	95,45	94,86	99,38	93,94	94,86	100,98
2	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	60,82	55,67	91,53	57,82	55,67	96,28
3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
III PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
1	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5,83	5,83	100,00	5,83	5,83	100,00
2	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11,17	12,23	109,49	12,23	12,23	100,00
IV PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
1	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	72,79	66,67	91,59	66,67	66,67	100,00
2	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	51,09	48,01	93,97	48,01	48,01	100,00
V PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
1	Persentase akses air limbah domestik layak	%	96,78	92,42	95,49	95,18	92,42	97,10

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. **Program Penyelenggaraan Jalan** didukung kegiatan **Penyelenggaraan Jalan Provinsi** dengan keluaran kegiatan yaitu: Peningkatan jalan sepanjang 77,3km, Rehabilitasi jalan sepanjang 76,41km Rehabilitasi jembatan sepanjang 67,9m, pemeliharaan rutin di sepanjang ruas jalan provinsi serta penyediaan lahan untuk penyelenggaraan jalan seluas 6.685m². Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap aspek ketenagakerjaan program padat karya dan pembebasan tanah pada ruas jalan Kalijambe – Purworejo. **Outcome** meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan keselamatan lalu lintas. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan efisiensi perjalanan, baik dari segi waktu dan biaya, disertai dengan peningkatan standar keselamatan bagi seluruh pengguna jalan dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian. **Permasalahan** yang dihadapi pelaksanaan proyek peningkatan jalan menyebabkan penyempitan badan jalan, yang berimbas pada menurunnya kapasitas dan kelancaran ruas jalan tersebut. **Upaya** yang dilakukan menerapkan rekayasa lalu lintas guna meminimalisir dampak kemacetan.
2. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** didukung kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** dengan keluaran kegiatan yaitu: Pembangunan SPAM Desa di 30 desa (Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab.Purbalingga, Kab.Banyumas, Kab.Cilacap, Kab.Magelang, Kab.Purworejo, Kab.Kebumen, Kab.Pemalang, dan Kab.Brebes) dengan prioritas daerah yang memiliki keterbatasan akses air bersih, Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta dan Karanganyar) dan Pembangunan SPAM Regional Bregas (Brebes,Tegal dan Kota Tegal). Kegiatan ini juga merupakan tindaklanjut rekomendasi DPRD terhadap sektor penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan layanan dasar. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan akses, kapasitas, dan kualitas layanan air minum bagi masyarakat Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat melalui ketersediaan air yang dikelola secara aman. **Permasalahan** yang dihadapi pencarian sumber air baku yang memenuhi kriteria kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan guna menjamin operasional utamanya SPAM Desa. Upaya yang dilakukan sebagai langkah mitigasi, dilakukan koordinasi teknis dengan Dinas ESDM guna melaksanakan eksplorasi sumber air bawah tanah dengan survei geolistrik untuk menentukan lokasi pengeboran yang tepat.
3. **Program Penataan Bangunan Gedung** didukung kegiatan **Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi** dengan keluaran kegiatan yaitu: Bantuan teknis dalam bentuk Bimtek pengelola BGMD di 60 lokasi kompleks BGMD, Pendataan teknis pada 126 lokasi kompleks BGMD, Pembangunan Sarana dan Prasarana

Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) tahap 2 serta Pembangunan Masjid Setda Provinsi Jawa Tengah dan Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa teridentifikasi kualitas dan pengelolaan infrastruktur bangunan gedung pemerintah yang memadai, aman, dan berfungsi optimal untuk mendukung kepentingan strategis Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tersedianya data base prioritas penanganan BGMD menuju standart. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya BGMD yang terpelihara dan laik fungsi. **Permasalahan** yang dihadapi utamanya pada kegiatan bantuan teknis yaitu tidak terpenuhinya kesesuaian antara profil peserta bimtek dengan materi dan tujuan bimtek. **Upaya** yang dilakukan yaitu seleksi peserta yang lebih ketat dan terstruktur, diawali dengan memperjelas serta mempertajam sasaran dan kriteria calon peserta serta diiringi dengan peningkatan koordinasi yang sinergis dan berkelanjutan dengan instansi pengirim untuk menyelaraskan persepsi.

4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi didukung 4 kegiatan yaitu:

- 1) **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi** dengan **keluaran** yaitu jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi sebanyak 1.100 orang dan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.900 orang. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu tersedianya tenaga ahli bersertifikat untuk menjamin keandalan dan kualitas infrastruktur. **Manfaat** kegiatan ini yaitu peningkatan daya saing dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan keselamatan, keandalan, dan umur layanan infrastruktur yang dibangun. **Permasalahan** yang dihadapi rendahnya kapasitas pemahaman sebagian peserta terhadap materi pelatihan. **Upaya** yang dilakukan pendekatan sistematis yang mencakup pelaksanaan *pre-assessment* guna memetakan level kemampuan peserta, penyesuaian kurikulum dengan tingkat kesulitan yang bertahap, penerapan metode pelatihan yang lebih partisipatif dan aplikatif.
- 2) **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu jumlah penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan daerah provinsi sebanyak 5 kegiatan, yaitu peningkatan sistem informasi harga satuan pekerjaan konstruksi (MasPetrak), penyusunan buku Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK), penyelenggaraan pameran, pengadaan buku konstruksi, dan pelatihan administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). **Outcome** kegiatan tersebut berupa terkelolanya informasi jasa konstruksi secara digital dan termutakhir. **Manfaat** kegiatan ini yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi jasa konstruksi daerah. **Dampak** kegiatan ini yaitu terciptanya ekosistem jasa konstruksi yang berteknologi dan berdaya saing. **Permasalahan** yang dihadapi kebutuhan integrasi antar sistem informasi pembina jasa konstruksi serta kebutuhan percepatan pemutakhiran sistem informasi yang menyesuaikan perubahan kebijakan. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan instansi terkait.

- 3) **Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu laporan pengawasan bidang jasa konstruksi. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk konstruksi di Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan aturan. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya tata kelola jasa konstruksi yang akuntabel dan transparan. **Permasalahan** yang dihadapi terkendalanya pengumpulan data pengawasan serta keterbatasan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengawasan yang konsisten dan menyeluruh. **Upaya** yang dilakukan melaksanakan bimbingan teknis bagi aparatur pengawas dan objek pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

5. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** didukung kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional** dengan **keluaran** fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang, Pemalang dan Sragen. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan. **Manfaat** kegiatan ini terjaganya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam. **Dampak** kegiatan ini adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan, serta minimnya rasa kepemilikan terhadap fasilitas pengolahan limbah yang tersedia. **Upaya** yang dilakukan dengan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk mengelola air limbah domestik secara mandiri, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, serta penguatan KPP Sanitasi.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang DPUBMCK dengan tingkat capaian keseluruhannya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.71 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUBMCK

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3	99,08	3	99,08	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	97,1	1	97,1	100	Sangat Tinggi
3	Program Penataan Bangunan Gedung	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program Penyelenggaraan Jalan	25	100	26	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2	100	4	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Realinyemen Horisontal dan Jalur Penyelamat Darurat PJD Bener – Maron (Kalijambe)
2. Peningkatan Jalan Galeh – Ngrampal dan Jalan Kuwu – Galeh;
3. Penggantian Jembatan Dengkeng (Karangwuni – Bts. Prov. DIY)
4. Rehabilitasi Jalan Keling / Bts. Kab. Jepara – Tayu; Jalan Pati – Tayu dan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan;
5. Pembangunan SPAM Regional Wosusokas; Bangunan Penunjang Desalinasi; SPAM Desa; Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R); Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Kecamatan dan SPALDT IPAL+ 25SR;
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan melalui pemberdayaan Masyarakat Bina Marga (MASBIMA);
7. Pembangunan Gedung Instansi Vertikal; Gedung Parkir Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; Gedung BKD Srandol dan VIP Room di Lanud Adi Soemarmo.

B. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang

Pelayanan terhadap pemenuhan air baku di Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas air permukaan yang cenderung fluktuatif, disebabkan perubahan iklim global, terjadinya degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA), adanya perubahan tata guna lahan dan limbah cair maupun padat yang berasal dari pemukiman atau industri yang berpotensi sebagai pencemar. Selain itu, kondisi fisik sungai cenderung menurun disebabkan tingginya laju sedimentasi akibat erosi lahan budidaya sehingga kapasitas alir sungai menjadi berkurang dan belum sepenuhnya dapat menampung debit air di musim penghujan yang berpotensi menimbulkan genangan banjir.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) merupakan usaha dasar dalam memenuhi kebutuhan air baku irigasi untuk mendukung pertanian. Rehabilitasi jaringan irigasi dan penampung air baku serta operasi dan pemeliharaan prasarana merupakan bentuk nyata dalam mendukung ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan daerah. Pembangunan bangunan perkuatan tebing merupakan wujud nyata dalam pembangunan infrastruktur dalam mendukung prioritas pembangunan daerah lainnya yaitu penanganan dampak perubahan iklim.

Intensitas pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat cukup tinggi sehingga diperlukan rencana tata ruang wilayah yang efektif agar mobilitas masyarakat berjalan lancar. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan penyesuaian substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021. RTRW Provinsi Jawa Tengah merupakan perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dan menjadi acuan dalam rencana pembangunan Jawa Tengah selama dua puluh tahun kedepan.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Untuk melaksanakan urusan Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp291.087.720.000,00 untuk melaksanakan 2 program, yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** didukung alokasi anggaran sebesar Rp201.975.653.000,00 dengan realisasi fisik 94,83% dan keuangan 90,51% di karenakan masih ada pekerjaan yang diberikan toleransi perpanjangan waktu penyelesaian sampai dengan tahun 2026. Program ini memiliki 24 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi antara lain Indeks kinerja sistem irigasi, Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi, Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik. Terhadap target akhir RPD terdapat 10 indikator telah tercapai dan 14 indikator akan tercapai. **Permasalahan** dari program tersebut dikarenakan dampak perubahan iklim dan tingginya laju sedimentasi menyebabkan semakin seringnya terjadi genangan banjir di beberapa daerah selain itu terdapat permasalahan lainnya yaitu terbatasnya ketersediaan air baku dan air permukaan. **Upaya** yang dilakukan sebagai langkah mitigasi potensi banjir yaitu penguatan tanggul tebing sungai, melakukan normalisasi dan pengerukan sungai untuk mengurangi sedimentasi, membangun dan merehabilitasi infrastruktur pengendali banjir, serta memperkuat konservasi daerah hulu. Selain itu untuk meningkatkan tampungan air melalui embung/waduk, mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, dan memperbaiki pengelolaan air baku agar ketersediaan air tetap terjaga. serta pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur embung beserta jaringan irigasinya guna mengatasi keterbatasan ketersediaan air baku dan menurunnya kualitas air permukaan. **Manfaat** pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu guna memenuhi kebutuhan air baku untuk mencukupi kebutuhan pertanian serta meningkatnya fungsi sungai untuk menampung debit air di musim penghujan sehingga mengurangi potensi banjir dan rob.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung alokasi anggaran sebesar Rp201.975.653.000,00 dengan realisasi fisik 94,83% dan keuangan 90,51% di karenakan masih ada pekerjaan yang diberikan toleransi perpanjangan waktu penyelesaian sampai dengan tahun 2026. Program ini memiliki 24 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi antara lain Indeks kinerja sistem irigasi, Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi, Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik. Terhadap target akhir RPD terdapat 10 indikator telah tercapai dan 14 indikator akan tercapai. **Permasalahan** dari program tersebut dikarenakan dampak perubahan iklim dan tingginya laju sedimentasi menyebabkan semakin seringnya terjadi genangan banjir di beberapa daerah selain itu terdapat permasalahan lainnya yaitu terbatasnya ketersediaan air baku dan air permukaan. **Upaya** yang dilakukan sebagai langkah mitigasi potensi banjir yaitu perkuatan tanggul tebing sungai, melakukan normalisasi dan pengerukan sungai untuk mengurangi sedimentasi, membangun dan merehabilitasi infrastruktur pengendali banjir, serta memperkuat konservasi daerah hulu. Selain itu untuk meningkatkan tampungan air melalui embung/waduk, mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, dan memperbaiki pengelolaan air baku agar ketersediaan air tetap terjaga. serta pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur embung beserta jaringan irigasinya guna mengatasi keterbatasan ketersediaan air baku dan menurunnya kualitas air permukaan. **Manfaat** pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu guna memenuhi kebutuhan air baku untuk mencukupi kebutuhan pertanian serta meningkatnya fungsi sungai untuk menampung debit air di musim penghujan sehingga mengurangi potensi banjir dan rob.

Tabel 3.72 Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUSDATARU

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR							
1	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	%	72,61	62,5	86,06	62,5	62,5	100
2	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	70,58	65,82	93,26	64,31	65,82	102,348
3	Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	69,49	70,14	100,94	69,11	70,14	101,4904
4	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	52,48	52,38	99,81	52,38	52,38	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Angka	62,76	64,35	102,53	64,35	64,35	100
6	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	34,81	34,78	99,91	34,78	34,78	100
7	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53,36	53,26	99,81	53,26	53,26	100
8	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100	100	100	100
9	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Angka	71,86	71,8	99,92	71,8	71,8	100
10	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	72,73	63,64	87,5	63,64	63,64	100
11	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	50,14	50,08	99,88	50,08	50,08	100
12	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	100	100	100	100
13	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Angka	63,35	64,39	101,64	64,39	64,39	100
14	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	64,71	50	77,27	50	50	100
15	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	100	100	100	100
16	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Angka	67,43	67,36	99,8	67,36	67,36	100
17	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	77,82	67,35	86,55	67,35	67,35	100
18	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100	100	100	100	100
19	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Angka	77,4	78,45	101,36	78,45	78,45	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92,25	92,23	99,98	92,23	92,23	100
21	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	100	100	100	100
22	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Angka	74,11	72,65	98,03	72,65	72,65	100
23	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	81,15	76,5	94,27	76,5	76,50	100
24	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	100	100	100	100
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	88	76	86,36	76	76	100
2	Persentase tertib ruang	%	67	48	71,64	48	48	100
3	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	77,67	50,88	63,10	50,99	50,99	100
4	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** beberapa **keluaran** diantaranya 10 paket rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana air baku seperti rehabilitasi di Embung Triharjo Kabupaten Kendal dan pembangunan di Embung Kemurang Wetan Kabupaten Brebes; Pembangunan bangunan perkuatan tebing pada Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan; dan pengadaan pompa untuk mendukung penanganan darurat akibat banjir rob sebanyak 6 unit yaitu 3 unit trailer pump dengan kapasitas 1x250 lps, 2 unit mobile pump truck dengan kapasitas 1x250 lps dan 2x250 lps, serta 1 unit pompa air tenaga surya (PATS) dengan kapasitas 2x126 lps di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. **Outcome** kegiatan tersebut memaksimalkan kapasitas penampungan air baku, mengantisipasi terjadinya abrasi, erosi dan mencegah terjadinya genangan banjir maupun rob. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, air bersih untuk masyarakat dan mitigasi terjadinya bencana banjir rob. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya produktifitas pertanian, meningkatnya akses air bersih dan mengurangi kerugian sosial ekonomi akibat banjir rob. **Permasalahan** yang dihadapi dalam kegiatan tersebut adalah tingginya intensitas hujan pada saat pelaksanaan konstruksi, keterbatasan infrastruktur dan sarpras dalam penanganan banjir. **Upaya** yang dilakukan yaitu penyesuaian jadwal pekerjaan dengan pertimbangan musim, penyediaan sarpras tambahan, serta pembangunan dan pemeliharaan bangunan perkuatan tanggul, tebing sungai, normalisasi sungai, dan embung.
- 2) **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** antara lain terdapat 14 paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi seperti di DI Klego Kabupaten Boyolali dan DI Banjaran Kabupaten

Banyumas. Selain itu, terdapat keluaran pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan pada 108 DI yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan seperti pada DI Tangsi di Kabupaten Magelang dan DI Sudikampir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan tersebut termasuk tindak lanjut dari Rekomendasi DPRD terhadap penguatan program padat karya dengan program infrastruktur berbasis masyarakat dan program tenaga kerja mandiri. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu optimalnya infrastruktur jaringan irigasi. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu mendukung pengairan pada lahan pertanian masyarakat. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu mewujudkan ketahanan pangan. **Permasalahan** yang dihadapi adalah tingginya curah hujan yang mempengaruhi pada saat pelaksanaan konstruksi. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut memberikan toleransi waktu perpanjangan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang didukung 4 kegiatan yaitu:

- 1) **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** dengan **keluaran** pelaksanaan Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 kepada 35 OPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki kewenangan dalam bidang perindustrian, perijinan, lingkungan hidup dan kebencanaan; dokumen kajian arah pengembangan pada wilayah Rembang - Blora (WP BANGLOR) dan kajian arah pengembangan pada wilayah Wonosobo - Banjarnegara (WP WONOBANJAR). **Outcome** dari kegiatan tersebut yaitu memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terkait penataan ruang pada level provinsi sebagai bahan OPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penataan ruang Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan lainnya yaitu tersedianya pedoman penataan ruang WP BANGLOR dan WONOBANJAR. **Manfaat** kegiatan yaitu sinkronisasi dan integrasi rencana pembangunan Provinsi dengan rencana pembangunan Kab/Kota. **Dampak** kegiatan yaitu terwujudnya tertib penyelenggaraan tata ruang. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kompleksitas kajian tata ruang yang membutuhkan waktu lebih untuk koordinasi dan sosialisasi. **Upaya** yang telah dilakukan yaitu sosialisasi dan koordinasi berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
- 2) **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** dengan **keluaran** pelaksanaan Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 kepada 35 OPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki kewenangan dalam bidang perindustrian, perijinan, lingkungan hidup dan kebencanaan; dokumen kajian arah pengembangan pada wilayah Rembang - Blora (WP BANGLOR) dan kajian arah pengembangan pada wilayah Wonosobo - Banjarnegara (WP WONOBANJAR). **Outcome** dari kegiatan tersebut yaitu memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terkait penataan ruang pada level provinsi sebagai bahan OPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan

penataan ruang Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan lainnya yaitu tersedianya pedoman penataan ruang WP BANGLOR dan WONOBANJAR. **Manfaat** kegiatan yaitu sinkronisasi dan integrasi rencana pembangunan Provinsi dengan rencana pembangunan Kab/Kota. **Dampak** kegiatan yaitu terwujudnya tertib penyelenggaraan tata ruang. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kompleksitas kajian tata ruang yang membutuhkan waktu lebih untuk koordinasi dan sosialisasi. **Upaya** yang telah dilakukan yaitu sosialisasi dan koordinasi berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

- 3) **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** dengan **keluaran** pelaksanaan Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 kepada 35 OPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki kewenangan dalam bidang perindustrian, perijinan, lingkungan hidup dan kebencanaan; dokumen kajian arah pengembangan pada wilayah Rembang - Blora (WP BANGLOR) dan kajian arah pengembangan pada wilayah Wonosobo - Banjarnegara (WP WONOBANJAR). **Outcome** dari kegiatan tersebut yaitu memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terkait penataan ruang pada level provinsi sebagai bahan OPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penataan ruang Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan lainnya yaitu tersedianya pedoman penataan ruang WP BANGLOR dan WONOBANJAR. **Manfaat** kegiatan yaitu sinkronisasi dan integrasi rencana pembangunan Provinsi dengan rencana pembangunan Kab/Kota. **Dampak** kegiatan yaitu terwujudnya tertib penyelenggaraan tata ruang. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kompleksitas kajian tata ruang yang membutuhkan waktu lebih untuk koordinasi dan sosialisasi. **Upaya** yang telah dilakukan yaitu sosialisasi dan koordinasi berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
- 4) **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** dengan **keluaran** pelaksanaan Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 kepada 35 OPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki kewenangan dalam bidang perindustrian, perijinan, lingkungan hidup dan kebencanaan; dokumen kajian arah pengembangan pada wilayah Rembang - Blora (WP BANGLOR) dan kajian arah pengembangan pada wilayah Wonosobo - Banjarnegara (WP WONOBANJAR). **Outcome** dari kegiatan tersebut yaitu memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terkait penataan ruang pada level provinsi sebagai bahan OPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penataan ruang Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan lainnya yaitu tersedianya pedoman penataan ruang WP BANGLOR dan WONOBANJAR. **Manfaat** kegiatan yaitu sinkronisasi dan integrasi rencana pembangunan Provinsi dengan rencana pembangunan Kab/Kota. **Dampak** kegiatan yaitu terwujudnya tertib penyelenggaraan tata ruang. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kompleksitas kajian tata ruang yang membutuhkan

waktu lebih untuk koordinasi dan sosialisasi. **Upaya** yang telah dilakukan yaitu sosialisasi dan koordinasi berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.73 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUSDATARU

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	24	100	32	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	9	100	11	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026:

1. Pembangunan tanggul sungai di Kabupaten Demak
2. Pembangunan bangunan pantai pada di Kabupaten Demak
3. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan primer dan sekunder diantaranya di Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati.

3.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dengan fungsi perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; pengkoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan pokok pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu masih terdapat kawasan permukiman dengan kualitas buruk di Provinsi Jawa Tengah dengan penyebab utamanya adalah masih terdapat rumah

tidak layak huni serta masih terdapat kawasan permukiman dengan kualitas rendah. Beberapa isu strategis sampai akhir 2024 yang memerlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif Tahun 2025 yaitu tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tercatat 1.022.113 unit; Pesatnya pertumbuhan penduduk Jawa Tengah berdampak pada angka *backlog* kemiskinan perumahan diperkirakan mencapai 324.803 unit; Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah; serta penanganan sisa kawasan permukiman kumuh yang perlu mendapatkan perhatian intensif seluas 3.885,006 ha.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 adalah:

1. Penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, sebagai provinsi peringkat I terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan;
2. Penghargaan TVONE Inovasi Membangun Negeri 2025 untuk Kategori *Innovation Public Services*, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pembangunan Rumah Layak Huni".

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp27.593.680.000,00 untuk melaksanakan empat program, yaitu:

1. **Program Pengembangan Perumahan** didukung anggaran Rp24.128.017.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,68%. Program ini memiliki dua indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dan Persentase rumah layak huni yang disediakan. Meskipun capaian kedua indikator tersebut pada RKPD Tahun 2025 atau Tahun kedua dari RPD 2024-2026 adalah sangat tinggi sedangkan terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih banyak masyarakat yang terkendala akses penyediaan perumahan. **Upaya** yang dilakukan adalah memfasilitasi peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan penyediaan perumahan dengan melakukan identifikasi kebutuhan dan penyediaan rumah layak huni. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat.
2. **Program Kawasan Permukiman** didukung anggaran Rp2.950.611.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,69%. Program ini memiliki dua indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dan Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu dinamisnya luas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan adalah koordinasi dengan pusat dan Kabupaten/Kota untuk inventarisasi dan sinkronisasi kegiatan penanganan kumuh yang dilakukan, verifikasi penyusunan SK Kumuh Kabupaten/ Kota, pelatihan kepada masyarakat/ KSM untuk berpartisipasi dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di Jawa Tengah, serta melaksanakan pemugaran pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 - 15 Ha. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah menurunnya luasan kawasan kumuh.

- 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** didukung anggaran Rp398.605.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,45%. Program ini memiliki satu indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman. Meskipun capaian indikator tersebut pada RKPD Tahun 2025 atau Tahun kedua dari RPD 2024-2026 adalah sangat tinggi sedangkan terhadap target akhir RPD perlu upaya keras namun demikian target tersebut dapat terakomodir dan tercapai melalui kegiatan Tahun 2026. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kondisi PSU permukiman tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis. **Upaya** yang dilakukan adalah kolaborasi Penyediaan PSU Permukiman dengan berbagai pihak. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah terwujudnya permukiman yang layak huni.
- 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** didukung anggaran Rp116.447.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,13%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih banyak pengembang perumahan yang belum dilakukan Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2). **Upaya** yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada pengembang perumahan secara terus menerus sebagai bagian dari mitigasi terhadap permasalahan pengembang perumahan dan aduan masyarakat. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat bahwa pengembang perumahan memiliki kompetensi integritas dan kualitas yang memadai dalam menyediakan rumah yang layak huni.

Tabel 3.74 Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
1	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	10,94	8,32	76,05	8,32	8,32	100,00
2	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	1,85	0,75	40,54	0,73	0,75	102,74
II	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	13,17	53,49	406,15	49,49	53,49	108,08
2	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
III	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
1	Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	%	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengembangan Perumahan didukung empat kegiatan yaitu:

- 1) **Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu 17.000 unit RTLH yang ditangani. **Outcome** kegiatan tersebut berupa tersediakannya rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat. **Dampak** kegiatan ini adalah mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terdapat dinamika usulan perubahan penerima RTLH yang baru dapat terakomodir pada APBD perubahan dengan waktu pelaksanaan yang sangat singkat sehingga desa kesulitan dalam memasukkan dalam Siskeudes. **Upaya** yang dilakukan adalah berkoordinasi intensif dengan OPD terkait di kabupaten maupun dengan Pemerintah Desa, utamanya saat terjadi perubahan atau pengalihan alokasi kuota.

- 2) **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu 150 unit rumah korban bencana yang ter rehabilitasi, 20 unit rumah bagi korban bencana yang terbangun, 100 unit rumah yang direlokasi akibat Program Pemerintah, dan 240 unit Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa tersediakannya rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat. **Dampak** kegiatan ini adalah mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu penanganan Calon Penerima Bantuan dalam bentuk komunitas masih terkendala rendahnya komitmen pemerintah daerah dan kelompok calon penerima bantuan untuk menyediakan lahan yang sesuai dan siap bangun beserta kelengkapan PSU. **Upaya** yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa/ kelurahan secara intensif untuk mempersiapkan calon penerima bantuan yang sesuai *Readiness Criteria*, serta melengkapi bukti dukung sesuai dengan komitmennya terkait penyediaan lahan dan PSU;
- 3) **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu Dokumen Identifikasi Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Pemerintah, Dokumen Pendataan dan Verifikasi Rumah Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah, dan Dokumen Pendataan dan Verifikasi Rumah Sederhana Sehat (*backlog*). **Outcome** kegiatan ini adalah tersedianya data calon penerima manfaat yang tepat sasaran. **Manfaat** kegiatan tersebut berupa terpenuhinya *Readiness Criteria* (RC) penyediaan rumah layak huni. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu data usulan BNBA (*By Name By Address*) Calon Penerima Bantuan (CPB) yang diusulkan belum memenuhi kriteria penerima bantuan. **Upaya** yang dilakukan adalah pendampingan untuk mempersiapkan calon penerima bantuan supaya sesuai dengan *Readiness Criteria*;
- 4) **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu 204 orang yang diusulkan sebagai calon penerima manfaat untuk mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan 386 orang yang diusulkan sebagai calon penerima manfaat untuk mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP. **Outcome** kegiatan ini adalah tersedianya data usulan calon penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria. **Manfaat** kegiatan tersebut berupa terpenuhinya *Readiness Criteria* (RC) penyediaan rumah layak huni. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu peserta sosialisasi yang tidak sesuai dengan kriteria Program bantuan rumah yang dicanangkan. **Upaya** yang

dilakukan adalah penjaringan peserta dengan melibatkan Pemda Kab/ Kota dan Pempdes.

2. Program Kawasan Permukiman didukung dua kegiatan yaitu:

- 1) **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha** dengan **keluaran** kegiatan antara lain Laporan Pelatihan Penanganan Sampah dari Sumber di Kabupaten Pekalongan, Laporan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman di Kabupaten Wonosobo, dan Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelola TPS3R di Kabupaten Rembang. **Outcome** kegiatan tersebut berupa partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung penataan kawasan permukiman kumuh. **Manfaat** kegiatan ini adalah menurunnya risiko munculnya kawasan permukiman kumuh. **Dampak** kegiatan ini adalah mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum tersampainya informasi tentang penyebab tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh kepada masyarakat. **Upaya** yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh melalui pelatihan kepada masyarakat, KSM dan desa
- 2) **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha** dengan **keluaran** kegiatan yaitu 194,14 ha permukiman kumuh tanggung jawab provinsi yang diremajakan/ dipugar, 591 unit RTLH dalam kawasan permukiman kumuh tanggung jawab Provinsi yang ditangani melalui Bankeupemdes dengan hasil verifikasi validasi RTLH di kawasan permukiman Kumuh, Laporan Validasi Teknis Usulan Penanganan Kawasan Permukiman, Laporan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Laporan Kegiatan Verifikasi SK Kumuh. **Outcome** kegiatan tersebut berupa tertanganinya kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini adalah menurunnya luasan kawasan kumuh. **Dampak** kegiatan ini adalah mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu bertambahnya delineasi kumuh baru akibat adanya peninjauan ulang SK Kumuh Kabupaten/Kota. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan tim verifikator SK dan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap SK Kumuh Kabupaten/Kota serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap permukiman kumuh.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) didukung kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan **keluaran** kegiatan yaitu pelaksanaan pekerjaan Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kabupaten Karanganyar dan Laporan Perkembangan Penyerahan PSU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terpenuhinya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman. **Manfaat** kegiatan ini adalah terwujudnya

permukiman yang layak huni. **Dampak** kegiatan ini adalah mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan permukiman. **Upaya** yang dilakukan adalah melaksanakan Pembangunan PSU Permukiman di Kabupaten/ Kota.

- 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** didukung kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah dengan **keluaran** kegiatan yaitu pengembang perumahan yang telah tersertifikat melalui kegiatan Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan sejumlah 31 pengembang dan untuk pengembang yang sudah terbina melalui Pelaksanaan Bimbingan Teknis sejumlah 84 pengembang. Dari pengembang yang sudah terbina tersebut pada tahun selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan sertifikat dengan ketentuan yang sudah berlaku. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terpenuhinya pengembang perumahan yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi usaha. **Manfaat** kegiatan ini adalah memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat bahwa pengembang perumahan memiliki kompetensi, integritas dan kualitas yang memadai dalam menyediakan rumah yang layak huni. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih banyak pengembang perumahan yang belum mendapatkan sosialisasi perihal kegiatan SRP2 dengan upaya yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi kepada pengembang perumahan terkait kegiatan SRP2.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tingkat capaian empat program dan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.75 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengembangan Perumahan	2	100,00	7	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Kawasan Permukiman	2	100,00	6	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	100,00	1	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	100,00	1	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Tahun 2026 yaitu:

1. Penanganan RTLH melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BANKEUPEMDES) sebanyak 10.000 unit;
2. Penyediaan rumah sederhana sehat layak huni yang melalui program Pembangunan Baru (PB) sebanyak 100 unit;
3. Penanganan Rumah Pasca Bencana melalui Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana sebanyak 37 unit;
4. Penanganan Rumah Pasca Bencana melalui Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebanyak 74 unit;
5. Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Provinsi melalui program Pembangunan Rumah sebanyak 20 unit;
6. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha sebanyak 60 Ha.

3.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 11 dan pasal 12 menyebutkan bahwa bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat termasuk urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Hal ini berarti bahwa bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sejajar dengan bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum serta penataan ruang, perumahan rakyat, dan sosial, sehingga bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Begitu juga pada pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dan informasi dari semua unsur baik dari masyarakat, aparat sipil maupun aparat keamanan sangat berpengaruh dalam rangka menciptakan situasi Provinsi Jawa Tengah yang tertib, aman dan nyaman.

Identifikasi dan pemetaan permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah berdasarkan urusan masing-masing bidang trantibum linmas antara lain: masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang disebabkan oleh pelanggaran produk hukum daerah; masih rendahnya kesadaran masyarakat akan taat dan patuh terhadap aturan/peraturan daerah; kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota Satpol PP dan Satlinmas belum sesuai kesetandaran.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp4.498.593.000,00 melalui program:

1. **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** didukung dengan anggaran sebesar Rp4.444.003.000,00 dengan capaian realisasi fisik 67,30% dan keuangan 62,15% hal tersebut disebabkan terdapat belanja modal yang tidak bisa dilaksanakan yaitu peralatan *Inteleigent X-Ray Mobile* karena pagu anggaran yang tersedia tidak cukup, hal ini mempedomani spesifikasi peralatan intelegen yang direkomendasikan oleh Dirjen Bea dan Cukai nilai pagu terlalu tinggi. Program ini memiliki 4 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi, yaitu Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat ketercapaian (100%); Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah dengan tingkat ketercapaian (100%); Persentase penegakan produk hukum daerah dengan tingkat ketercapaian (100%); dan Persentase Satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang dibina dengan tingkat ketercapaian (100%). Terhadap capaian akhir RPD indikator persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum tidak dilaksanakan di Tahun 2026 dikarenakan perubahan SOTK. Sedangkan 2 indikator lainnya akan tercapai yaitu Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah dan Persentase penegakan produk hukum daerah kemudian 1 indikator masih perlu upaya keras yaitu Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina. **Permasalahan** dalam penyelenggaraan program tersebut adalah kurangnya keselarasan antara program Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menyebabkan pelaksanaan program menjadi terhambat dan tidak berjalan sesuai rencana. **Upaya** yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan mengadakan serangkaian rapat koordinasi bersama Satpol PP Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan strategi dan tindakan, serta meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Jawa Tengah terpelihara dan terjaga dengan baik.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran didukung anggaran Rp54.590.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Program ini memiliki indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. Terhadap capaian akhir RPD indikator tersebut sudah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah dukungan anggaran kurang memadai, sistem pengelolaan data masih belum efektif dan keterbatasan sumber daya pengelola data. **Upaya** yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah penyusunan peta daerah rawan kebakaran dilakukan melalui koordinasi bersama Satpol PP Kabupaten/Kota, khususnya di bidang Pemadam Kebakaran, untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah-wilayah yang berisiko tinggi terhadap potensi kebakaran. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah Identifikasi dan analisis komprehensif terhadap potensi daerah rawan bencana kebakaran, dengan tujuan untuk mengembangkan strategi mitigasi dan penanganan yang efektif dan terarah.

Tabel 3.76 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
1	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketenteramaan dan ketertiban umum	%	100.00	56.07	56..07	56.07	56.07	100.00
2	Persentase pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%	91.00	65.69	72.19	65.69	65.69	100.00
3	Persentase penegakan produk hukum daerah	%	93.33	86.67	92.86	86.67	86.67	100.00
4	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%	100.00	64.54	64.54	64.54	64.54	100.00
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
1	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	%	100.00	100.00	100.00	100.000	100.00	100.00

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah** dengan **keluaran** yaitu: Penyuluhan Perda dan Perkada kepada 130 Kelompok Masyarakat; Pemetaan Potensi Rawan Kebakaran di 35 Kab/Kota;

terlaksananya 16 kegiatan Upaya Pencegahan Gangguan Trantibum di Jawa Tengah; terlaksananya 74 kegiatan Penanganan Gangguan Trantibum, penerapan SPM Trantib Linmas 100%, penguatan kelembagaan Satgas Linmas dan Satlinmas sebanyak 185 kelompok serta Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan sebanyak 150 kelompok. **Outcome** kegiatan yang dihasilkan yaitu penanganan gangguan trantibum lebih efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik serta terciptanya lingkungan aman dan nyaman bagi masyarakat. **Manfaat** kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat dan kompetensi aparatur dalam rangka penanganan gangguan trantibum untuk stabilitas dan keamanan yang lebih baik. **Dampak** kegiatan yaitu terpeliharanya penanganan gangguan trantibum linmas dalam rangka terciptanya kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih aman dan nyaman. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu lemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, keterbatasan sumberdaya dan kapasitas aparatur serta kurangnya koordinasi dan sinergi antar instansi terkait. **Upaya** yang dilakukan meningkatkan kapasitas dan sumber daya aparatur, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tramtibum.

- 2) **Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur** dengan keluaran terbinanya para pelanggar perda sebanyak 100 pelanggar, tertanganinya 51 pelanggar Perda dan Pergub serta terawasinya 109 orang Pelanggar Perda dan Pergub. **Outcome** kegiatan ini yaitu masyarakat lebih taat dan patuh terhadap peraturan sehingga lingkungan menjadi lebih tertib, aman dan nyaman. **Manfaat** kegiatan yaitu meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kesadaran masyarakat akan peraturan. **Dampak** Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan serta penurunan jumlah pelanggaran perda dan pergub. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya penegak hukum serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Perda dan Pergub. **Upaya** yang dilakukan dengan sosialisasi sekaligus penyuluhan tentang pentingnya taat perda dan pergub, bekerjasama dengan instansi terkait.
- 3) **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi** dengan **keluaran** 2 dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan PPNS. **Outcome** kegiatan ini adalah anggota PPNS lebih profesional dalam pelaksanaan tugas. **Manfaat** kegiatan yaitu penegakan hukum lebih efektif serta peningkatan kualitas pelayanan publik. **Dampak** kegiatan adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu adanya purna tugas, keterbatasan anggota PPNS dan kurangnya kompetensi anggota PPNS. **Upaya** penyelesaian yaitu pelatihan dan pembinaan anggota PPNS secara berkala serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran didukung kegiatan **Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran** dengan **keluaran** 35 kabupaten/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran. **Outcome** kegiatan ini yaitu tersedianya peta rawan bencana kebakaran yang akurat dan terkini. **Manfaat** kegiatan adalah mitigasi potensi bencana kebakaran lebih efektif. **Dampak** kegiatan yaitu pengurangan terhadap resiko dan dampak bencana kebakaran. **Permasalahan** yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran kegiatan, pengelolaan data masih terbatas, serta kurangnya sumber daya pengelola yang kompeten dan memadai. **Upaya** penyelesaian yaitu dengan melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) dalam rangka peningkatan sistem pengelolaan data.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja proram dan kegiatan pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.77 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Trantibum Linmas Satpol PP

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4	100.00	10	100.00	100	Sangat Tinggi
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	100.000	1	100.00	100	Sangat Tinggi

Adapun rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026:

1. Melakukan pendataan, mapping dan rekapitulasi data pelanggaran Perda dan Pergub
2. Melakukan penindakan (penertiban non yustisial) pelanggaran Perda dan Pergub
3. Melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka memberikan pengetahuan, pemahaman dan penerangan terkait reward and punishment pelanggaran Perda dan Pergub
4. Melakukan pemantauan, pengamatan dan pengumpulan informasi situasi dan kondisi lapangan terkini (up to date) pelanggaran Perda dan Pergub
5. Melakukan penyampaian informasi dan pemahaman terkait ketentuan Perda dan Pergub untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran
6. Melakukan Bimbingan Teknis Operasional kepada PPNS OPD Provinsi dan

PPNS Satpol PP Kab/Kota

7. Penyiapan dukungan operasional sekretariat PPNS dan Melakukan mekanisme proses penyidikan pelanggaran produk hukum daerah secara yustisi
8. Patroli pengendalian gangguan tramtibum
9. Pemetaan potensi daerah rawan kebakaran

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang kompleks sehingga menjadikan wilayah ini sebagai salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana yang relatif tinggi di Indonesia. Berbagai jenis ancaman bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, serta bencana non-alam dan sosial kerap terjadi dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Isu strategis penanggulangan bencana di Jawa Tengah pada tahun berjalan meliputi meningkatnya bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, yang menuntut penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan lintas sektor. Masih terdapat wilayah rawan bencana yang memerlukan peningkatan kapasitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana dan mitigasi berbasis komunitas. Keterbatasan sumber daya dan anggaran serta perlunya tata kelola berbasis data dan teknologi menjadi tantangan utama, disertai kebutuhan adaptasi terhadap ancaman non-alam seperti kebakaran lahan dan potensi penyakit menular.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp3.462.028.000,00 untuk melaksanakan **Program Penanggulangan Bencana** didukung anggaran Rp3.462.028.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,24%. Program ini memiliki 4 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Indikator peningkatan kapasitas penduduk usia di atas 19 tahun di daerah rawan bencana 141,67%, Persentase penanganan darurat bencana, Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana, Persentase kabupaten/kota yang mengaktifasi klaster logistik. Terhadap target terakhir RPD 2 indikator telah tercapai yaitu peningkatan kapasitas penduduk usia diatas 19 tahun di daerah rawan bencana dan Persentase penanganan darurat bencana sedangkan 2 indikator perlu upaya keras yaitu Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana dan Persentase kabupaten/kota yang mengaktifasi klaster logistik, namun demikian indikator tersebut di Tahun 2026 akan mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan perubahan SOTK baru. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih banyaknya daerah rawan bencana yang perlu ditingkatkan kapasitas dalam hal penanggulangan bencana. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan pengurangan resiko bencana melalui memberikan layanan informasi daerah rawan bencana, memberikan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi bencana serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu peningkatan kesiapsiagaan

masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus menurunkan tingkat risiko, dampak, kerugian serta angka kematian akibat bencana.

Tabel 3.78 Capaian Kinerja Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat BPBD

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
1	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0.12	0.17	141,67	0.12	0.17	141,67
2	Persentase penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%	15	4	26.66	2	2	100
4	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi kluster logistik	%	17.14	5.72	33.37	2,86	2,86	100

b. Capaian Target Kinerja keluaran Kegiatan

Program Penanggulangan Bencana didukung 4 kegiatan yaitu:

- 1) **Pelayanan Informasi Daerah Rawan Bencana Provinsi** dengan **keluaran** Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (IDENSOS) untuk 3.000 orang pada 60 titik lokasi daerah rawan. **Outcome** tersedianya data dan informasi daerah rawan bencana serta meningkatnya pengetahuan masyarakat di 60 lokasi rawan. **Manfaat** masyarakat lebih mengenali potensi bahaya di wilayahnya dan memahami langkah kesiapsiagaan dasar. **Dampak** penurunan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana serta meningkatnya kewaspadaan lokal. **Permasalahan** yang dihadapi pada kegiatan ini yaitu terbatasnya cakupan wilayah yang dapat dijangkau dibandingkan dengan luasnya potensi daerah rawan bencana di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan sosialisasi belum merata, terutama di wilayah dengan akses geografis sulit atau minim jaringan komunikasi. **Upaya** yang dilakukan adalah memperluas kerja sama lintas sektor bersama pemerintah kabupaten/kota, memperkuat keterlibatan relawan dan komunitas lokal dalam proses sosialisasi, serta memanfaatkan media daring dan platform digital untuk penyebaran informasi kebencanaan secara lebih luas dan cepat.
- 2) **Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** dengan **keluaran** Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Bencana untuk 100 orang pada SMAN 1 Sayung Demak; Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi) Penanggulangan Bencana pada 10 Kab/Kota dengan peserta 300 orang. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan 9 *Early Warning System* (EWS) dan 90 Rambu Jalur Evakuasi di 9

Kabupaten. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana dengan terbentuknya 24 desa tangguh bencana (Destana) dengan sistem *budget sharing*. 50 orang Tim Reaksi Cepat (TRC) terlatih dalam Pengembangan Kapasitas (TRC) Bencana. **Outcome** meningkatkan penanganan pra bencana di Kab/Kota. **Manfaat** tumbuhnya budaya sadar bencana di masyarakat dan sekolah; meningkatnya kemampuan deteksi dini dan respon cepat. **Dampak** terbentuknya sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat dan inklusif di berbagai daerah. **Permasalahan** belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. **Upaya** dengan optimalisasi kolaborasi pendanaan dengan kabupaten/kota dan desa (*budget sharing*), pendampingan teknis, serta sosialisasi berkelanjutan fungsi EWS dan Destana.

- 3) **Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana** dengan **keluaran** 35 laporan respon cepat penanganan darurat bencana di Kab/Kota; 35 laporan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana di Kab/Kota; 1 Laporan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. **Outcome** meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan tanggap darurat bencana. **Manfaat** Korban bencana dapat tertangani lebih cepat, mengurangi risiko korban jiwa dan luka. **Dampak** meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan tanggap darurat. **Permasalahan** keterbatasan peralatan dan personel di beberapa lokasi kejadian, serta tantangan akses medan bencana. **Upaya** Penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan penguatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana serta koordinasi dengan lintas sektor untuk peningkatan kapasitas dan pemenuhan peralatan.
- 4) **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** dengan **keluaran** 35 dokumen penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan di Kab/Kota; 1 laporan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana Kab/kota; 1 dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana dan 1 dokumen penanganan pasca bencana provinsi. **Outcome** tersusunnya sistem informasi kebencanaan, laporan SPM, dokumen kerja sama antar lembaga, dan dokumen pascabencana (JITU PASNA dan R3P). **Manfaat** tersedianya data kebencanaan yang terintegrasi dan menjadi dasar perencanaan serta evaluasi penanggulangan bencana. **Dampak** terbangunnya tata kelola penanggulangan bencana yang lebih terarah, terukur, dan kolaboratif antar lembaga. **Permasalahan** belum seluruh data terintegrasi antardaerah serta keterbatasan SDM pengelola sistem informasi. **Upaya** Peningkatan kapasitas operator data kebencanaan, sinkronisasi basis data antar instansi, dan penguatan kerja sama kelembagaan.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang

dilaksanakan BPBD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.79 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Trantibum Linmas BPBD

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penanggulangan Bencana	4	100	11	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Penyediaan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi dilaksanakan melalui penyediaan *Early Warning System* (EWS) dan penguatan monitoring sistem peringatan bencana;
2. Penerapan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana melalui **Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) untuk SMA, SMK, SLB serta Pesantren;**
3. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana seperti pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana, pelatihan aparatur penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif melalui Pembentukan Unit LIDi serta pengurangan risiko berbasis komunitas (PRBBK);
4. Penguatan Tim tanggap bencana untuk desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana);
5. Perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana melalui penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota dengan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
6. Peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan dan melalui pelaksanaan pendampingan respon cepat penanggulangan bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

3.4.1.6 Urusan Sosial

Kelompok rentan sosial masih menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, antara lain anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban kekerasan dan bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai program seperti rehabilitasi sosial berbasis panti dan komunitas, perlindungan sosial melalui bantuan sosial dan layanan darurat, serta pemberdayaan sosial melalui penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga sosial. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah,

dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat melalui model pembangunan sosial berbasis komunitas.

Transformasi penanganan pelayanan sosial yang sejalan dengan slogan Provinsi Jawa Tengah “Ngopeni, Nglakoni” melalui penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan isu strategis yang dihadapi saat ini. Transformasi ini menekankan pada pendekatan yang lebih humanis dan hadir langsung di tengah masyarakat untuk melayani kelompok rentan dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di antaranya melalui Program Rehabilitasi Sosial dalam panti yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Program Perlindungan dan Jaminan sosial berupa bantuan jaminan sosial kepada masyarakat rentan non-produktif melalui Kartu Jateng Ngopeni (KaJeN) serta peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin sebagai upaya graduasi melalui pemberian modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Sebagai tindak lanjut Rekomendasi DPRD, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 melaksanakan olah data hasil Verifikasi dan Validasi Data oleh 35 kabupaten/kota terkait program Infrastruktur bagi masyarakat miskin yang meliputi jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang membutuhkan Rumah Layak Huni, Jumlah RTM yang membutuhkan sambungan listrik murah, Jumlah RTM yang membutuhkan Jamban Sehat, Jumlah RTM yang membutuhkan penyediaan air bersih konsumsi. Penerima program pengentasan kemiskinan merupakan langkah penting untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi dan DPRD.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp408.448.333.000,00 untuk melaksanakan 6 program, yaitu:

- 1. Program Pemberdayaan Sosial** didukung anggaran Rp9.395.763.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 84,89%, disebabkan pada bulan Oktober sebagian besar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diangkat PPPK sehingga tidak mendapatkan tali asih dari Dinas Sosial. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas. Terhadap target akhir RPD indikator kinerja tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terkait kebutuhan peningkatan kompetensi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan Bimtek, Akreditasi dan Sertifikasi bagi PSKS. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kompetensi PSKS dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** didukung anggaran Rp129.351.000,00 dengan realisasi fisik 99,99% dan keuangan 72,27%, dikarenakan kebutuhan layanan pekerja

migran bermasalah yang dirujuk ke Dinas Sosial tidak semua membutuhkan biaya pemulangan, tetapi ada yang dirujuk ke Panti Pelayanan Sosial. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan. Terhadap target akhir RPD indikator kinerja tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih ditemui korban yang tidak terdata secara resmi dikarenakan bekerja secara non-prosedural (ilegal). **Upaya** yang dilakukan adalah sinkronisasi data lintas instansi (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, BP3MI Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Imigrasi, Kepolisian Daerah Jawa Tengah) agar data migran bermasalah dapat terkumpul sistematis. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah dengan adanya sinkronisasi data, informasi tentang warga migran yang menjadi korban kekerasan, perdagangan orang, atau bermasalah di luar negeri dapat diakses lebih cepat dan akurat serta memungkinkan pemerintah merespons lebih dini (misalnya dalam pemulangan korban, bantuan sosial, atau pendampingan hukum).

3. **Program Rehabilitasi Sosial** didukung alokasi anggaran Rp74.889.094.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 97,52%. Program ini memiliki 28 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase pelayanan rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti, yang dilaksanakan pada 28 unit kerja. Terhadap target akhir RPD indikator kinerja tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah kelebihan kapasitas (*overload*) di beberapa UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang disebabkan oleh penumpukan kasus sosial seperti disabilitas mental terlantar dan lanjut usia terlantar di tingkat provinsi. **Upaya** yang dilakukan yaitu berkolaborasi bersama stakeholder lain di daerah seperti Kelurahan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan Sentra Kementerian dalam melaksanakan asesmen dan intervensi awal agar kasus sosial yang muncul di daerah dapat segera tertangani sebelum dirujuk ke tingkat provinsi (panti) apabila ditemui kasus sosial yang membutuhkan intervensi rehabilitasi sosial. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu mendukung penjangkauan dan layanan darurat bagi PPKS di daerah serta dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan kesejahteraan sosial PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Pemerintah kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di 56 panti dan rumah pelayanan sosial serta tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 4.610 orang penerima manfaat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh program Strategis Nasional yakni Sekolah Rakyat sebagai upaya memotong kemiskinan kultural dengan peningkatan kualitas hidup anak keluarga miskin melalui pendidikan dan pemberdayaan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa mengkoordinasikan proses pendirian Sekolah Rakyat, menjadi fasilitator antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat, Memberikan dukungan

administratif izin operasional Sekolah Rakyat Menengah Atas dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta Monitoring dan Evaluasi dan Bintek Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten/Kota.

4. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** didukung anggaran Rp164.746.610.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,77%. Program ini memiliki 3 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi (100%) yaitu Presentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial, Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan, dan Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan. Terhadap target akhir RPD indikator kinerja tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terjadi dinamika penerima manfaat di lapangan, yaitu masih terdapat data penerima manfaat yang belum dilakukan pembaharuan data melalui verifikasi dan validasi termasuk warga yang sudah tidak miskin namun masih tercantum sebagai Desil 1-5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sementara terdapat warga miskin terbaru yang belum terdaftar. **Upaya** yang dilakukan melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial melalui SIKS DJ V2 Modul DT Jateng. **Manfaat** penyelenggaraan program ini yaitu tersedianya bantuan pemenuhan kebutuhan pokok untuk mengurangi beban pengeluaran dan mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Non-Produktif.
5. **Program Penanganan Bencana** didukung anggaran Rp4.929.673.000,00 realisasi fisik 98,94% dan keuangan 97,57%. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Rapat Koordinasi dan Evaluasi penanganan bencana klaster pengungsian dan perlindungan yang direncanakan pada bulan Desember, karena seluruh personil difokuskan pada penanganan kejadian bencana dilapangan. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM bidang sosial. Terhadap target akhir RPD indikator kinerja tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Ketersediaan logistik (bahan pangan, obat-obatan) untuk korban bencana di gudang provinsi sering tidak memadai saat bencana besar terjadi secara bersamaan dan berlangsung lama. **Upaya** mengatasi permasalahan tersebut yaitu Peningkatan kerjasama lintas instansi dan dunia usaha (CSR kebencanaan) dalam pemenuhan logistik. **Manfaat** penyelenggaraan program ini yaitu tertanganinya korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa tanggap darurat.
6. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** didukung anggaran Rp387.619.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,62%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi (100%). Terhadap target akhir RPD indikator kinerja tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi dalam penyelenggaraan program pengelolaan taman makam pahlawan yaitu sarana

dan prasarana pemakaman dan pertamanan rusak atau kurang layak karena usia. **Upaya** untuk mengatasinya yaitu memelihara dan memperbaiki sarana dan fasilitas yang ada secara maksimal sesuai anggaran yang tersedia. **Manfaat** penyelenggaraan program ini yaitu terpeliharanya TMPN secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai obyek studi dan ziarah dalam upaya meningkatkan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Tabel 3.80 Capaian Kinerja Program Urusan Sosial

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
1	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	48,57	60	123,53	40	60	150,00
II	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
1	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100	100	100
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
1	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	5,75	3,84	66,78	3,84	3,84	100
2	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0,21	0,14	66,67	0,14	0,14	100
3	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0,22	0,15	68,18	0,15	0,15	100
4	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0,25	0,16	64	0,16	0,16	100
5	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0,31	0,21	67,74	0,21	0,21	100
6	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0,18	0,12	66,67	0,12	0,12	100
7	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0,19	0,12	63,16	0,12	0,12	100
8	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0,26	0,17	65,38	0,17	0,17	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,16	0,11	68,75	0,11	0,11	100
10	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0,22	0,15	68,18	0,15	0,15	100
11	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0,26	0,17	65,38	0,17	0,17	100
12	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0,33	0,22	66,67	0,22	0,22	100
13	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0,24	0,16	66,67	0,16	0,16	100
14	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0,19	0,13	68,42	0,13	0,13	100
15	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0,36	0,24	66,67	0,24	0,24	100
16	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0,12	0,08	66,67	0,08	0,08	100
17	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0,37	0,25	67,57	0,25	0,25	100
18	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0,1	0,06	60	0,06	0,06	100
19	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0,34	0,22	64,71	0,22	0,22	100
20	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,19	0,13	68,42	0,13	0,13	100
21	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0,32	0,21	65,63	0,21	0,21	100
22	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0,19	0,12	63,16	0,12	0,12	100
23	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0,33	0,22	66,67	0,22	0,22	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0,1	0,07	70	0,07	0,07	100
25	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0,1	0,07	70	0,07	0,07	100
26	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0,12	0,08	66,67	0,08	0,08	100
27	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,17	0,11	64,71	0,11	0,11	100
28	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0,16	0,1	62,5	0,1	0,1	100
IV PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
1	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	85	4,12	4,85	4,12	4,12	100
3	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0.07	0.45	642,86	0,45	0,45	100
V PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
1	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	100	100	100	100	100
VI PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
1	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pemberdayaan Sosial didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** antara lain Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan sebanyak 200 dokumen. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kepatuhan lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan

pengumpulan sumbangan dan UGB sesuai ketentuan yang berlaku. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meminimalisir adanya penipuan yang berkedok undian gratis berhadiah. **Dampak** kegiatan ini yaitu Dana hasil UGB dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. **Permasalahan** yang dihadapi Sebagian besar penyelenggara tidak mengurus izin resmi sesuai ketentuan Kementerian Sosial/Peraturan Perundangan. **Upaya** yang dilakukan yaitu Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang UGB.

- 2) **Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi** dengan **keluaran** antara lain PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas sebanyak 1.552 orang dan PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial sebanyak 2.000 orang. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kapasitas dan peran aktif PSKS secara partisipatif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya jaringan kerjasama, kemitraan dan sinergitas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini yaitu penanganan permasalahan sosial terintegrasi dengan seluruh elemen masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu rendahnya partisipasi masyarakat. **Upaya** yang dilakukan yaitu mendorong masyarakat dalam memanfaatkan potensi/kearifan lokal melalui program pemberdayaan masyarakat.

2. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** didukung kegiatan **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal** dengan **keluaran** jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal sebanyak 200 orang dan **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Warga Negara Migran korban tindak kekerasan selama proses pemulangan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tersedianya fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota asal. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya keamanan dan kesejahteraan migran korban tindak kekerasan di wilayah asalnya. **Permasalahan** yang dihadapi Pemulangan Warga Negara Migran berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang perlakuan penanganannya lebih kompleks yang mencakup aspek kelembagaan, koordinasi, sumber daya, hingga sosial budaya masyarakat. **Upaya** yang dilakukan yaitu penguatan koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan Pemulangan Warga Negara Migran yang berkaitan dengan TPPO.

3. **Program Rehabilitasi Sosial** didukung oleh 5 kegiatan antara lain:

- 1) **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti** dengan **keluaran** penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sejumlah

4.200 orang dengan rincian 1.655 orang di panti pemerintah dan 2.545 di panti swasta.

- 2) **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti** dengan **keluaran** anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sejumlah 3.400 orang dengan rincian 1.100 orang di panti pemerintah dan 2.300 di panti swasta.
- 3) **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti** dengan **keluaran** lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sejumlah 1.685 orang dengan rincian 1.285 orang di panti pemerintah dan 400 orang di panti swasta.
- 4) **Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti** dengan **keluaran** gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sejumlah 500 orang dengan rincian 250 orang di panti pemerintah dan 250 orang di panti swasta.
- 5) **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti** dengan **keluaran** PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sejumlah 220 orang yang kesemuanya berada di panti pemerintah.

Outcome kelima kegiatan tersebut berupa terselenggaranya pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS dalam Panti. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya keberfungsian sosial dan kesejahteraan sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dalam panti. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan kemandirian dan partisipasi sosial PPKS dalam kehidupan bermasyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Pemulangan PPKS ke keluarga terhambat karena adanya penolakan dari keluarga. **Upaya** yang dilakukan yaitu dilakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota guna memfasilitasi proses persiapan resosialisasi dan membujuk keluarga untuk dapat memberikan pengasuhan dan perawatan bagi PPKS dalam keluarga serta mengoptimalkan panti dalam memberikan bimbingan dan persiapan mental PPKS agar bisa mencapai keberfungsian sosial.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal** dengan **keluaran** rekomendasi pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan sebanyak 400 dokumen. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terfasilitasinya pengangkatan anak melalui sidang tim Permohonan Izin Pengangkatan Anak Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya perlindungan hak-hak anak dalam proses pengangkatan dan kepastian status hukum anak yang diangkat. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kesejahteraan dan stabilitas keluarga melalui proses pengangkatan anak yang sah dan diakui secara hukum. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih ditemui berkas yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. **Upaya** yang dilakukan diterbitkan Aplikasi

SINTA (Sistem Informasi Pengangkatan Anak) yang digunakan sebagai fasilitasi layanan pengangkatan anak di provinsi Jawa Tengah.

- 2) **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi** dengan **keluaran** Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) non produktif yang mendapatkan bantuan jaminan sosial sebanyak 110.528 orang; PPKS Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian Sosial sebanyak 10.600 orang melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin; serta PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sebanyak 500 orang melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kualitas basis data mikro kemiskinan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya akses dan penerimaan bantuan jaminan sosial bagi PPKS. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tersedianya bantuan yang dapat mengurangi beban pengeluaran bagi PPKS non produktif di Jawa Tengah, meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian ekonomi produktif fakir miskin di Jawa Tengah melalui Program KUBE Fakir Miskin dan UEP. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi kelompok fakir miskin yang lebih berkelanjutan dan mandiri. **Permasalahan** yang dihadapi berkas administrasi tidak lengkap dan tidak sesuai juknis. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan dan melengkapi berkas administrasi ketika desk verifikasi lapangan.
5. **Program Penanganan Bencana** didukung oleh **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi** dengan **keluaran** pelayanan perlindungan sosial kepada 3.000 orang korban bencana alam daerah provinsi dan pelayanan perlindungan sosial kepada 2.900 orang korban bencana sosial daerah provinsi. **Outcome** kegiatan tersebut berupa sistem perlindungan sosial dan penanganan bencana yang lebih responsif dan terkoordinasi. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tertanganinya korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa tanggap darurat. **Dampak** kegiatan ini yaitu mengurangi kerentanan korban terhadap dampak lanjutan bencana serta mempercepat proses pemulihan sosial. **Permasalahan** yang dihadapi koordinasi dan kolaborasi dalam Klaster Perlindungan dan Pengungsian masih belum optimal. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Lumbung Sosial yang dikelola masyarakat sebagai instrumen efektif untuk memperbaiki koordinasi dan kolaborasi dalam Klaster Perlindungan dan Pengungsian, sekaligus memperkuat ketangguhan sosial masyarakat terhadap bencana.
6. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** didukung **Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi** dengan **keluaran** terkelolanya 1 unit Taman Makam Pahlawan Nasional dan terlibatkannya 400 orang dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kualitas pengelolaan TMPN sebagai sarana penghormatan dan pembelajaran sejarah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan menghargai jasa para pahlawan. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial di kehidupan sehari-hari. **Permasalahan** kondisi pohon di sekitar Taman Makam Pahlawan yang rentan tumbang. **Upaya** yang dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan penebangan pohon-pohon yang rawan tumbang maupun berpotensi menimbulkan bahaya saat cuaca buruk.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Sosial dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.81 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Sosial

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pemberdayaan Sosial	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Rehabilitasi Sosial	28	100	93	98,99	100	Sangat Tinggi
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3	100	5	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Penanganan Bencana	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar dalam panti pemerintah dan bantuan subsidi permakanan kepada PPKS Penerima Manfaat di panti swasta.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial difokuskan pada kegiatan jaminan sosial bagi PPKS non produktif melalui Kartu Jateng Ngopeni (KaJeN) dan kegiatan bimbingan sosial dan motivasional terhadap keluarga fakir miskin melalui bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), didukung dengan pengelolaan data kemiskinan yang diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang tervalidasi.
3. Program Penanganan Bencana diarahkan pada penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

3.4.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

3.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan Menurut UU No. 13 Tahun 2003, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka untuk menurunkan jumlah pengangguran. Arah kebijakan mencakup peningkatan kesempatan kerja; peningkatan kualitas tenaga kerja, Fasilitasi dan penempatan tenaga kerja, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang disebabkan terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas keterampilan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, karena minimnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2025. Jumlah Angkatan kerja Agustus sebanyak 22,34 Juta orang meningkat 0,43 juta orang dibanding keadaan Agustus 2024. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebesar 21,30 juta orang, bertambah sekitar 0,43 juta orang.

Dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 sebesar 4.66% dilaksanakan melalui kebijakan pelaksanaan program kegiatan yang berfokus pada pengurangan pengangguran yaitu 1). Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan makro-mikro lembaga (kabupaten/kota) dan perusahaan 2). peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan melakukan kegiatan pelatihan, pemagangan, akreditasi lembaga pelatihan, 3). memperluas penyerapan penempatan tenaga kerja melalui metode penempatan Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara, 4). penguatan hubungan industrial yang kondusif dan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan 5). penguatan kepatuhan norma ketenagakerjaan melalui kegiatan pengawasan ketenagakerjaan.

Prestasi atau penghargaan yang diterima Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dari Kementerian Tenaga Kerja yaitu:

1. Penghargaan Sebagai salah satu Pembina terbaik bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas di ajang Naker Inspiration Leadership Award 2025
2. Penghargaan Sebagai pembina Produktivitas kepada perusahaan pada ajang Naker Inspiration Leadership Award 2025
3. Penghargaan sebagai salah satu dari 10 inovasi terbaik, Disnakertans berkontribusi pada Pengembangan inovasi SIK3 (Sistem Informasi Keselamatan, Kesehatan, Kerja) terbaik oleh BRIN Jawa Tengah.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kerja:

Urusan Tenaga Kerja didukung anggaran Rp14.867.470.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,55% untuk melaksanakan 5 Program yaitu:

- 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja** didukung anggaran Rp143.155.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,93%. Program ini memiliki indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan yaitu Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (116,67%), hal ini karena Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kab./Kota maupun perusahaan (RTK Mikro), merupakan instrumen perencanaan yang bersifat teknis untuk menjalankan keseimbangan fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga sumber daya dapat dioptimalkan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Sedangkan terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** program ini adalah belum semua Kabupaten/Kota telah melakukan pemutakhiran Rencana Tenaga Kerja (RTK). **Upaya** yang dilakukan pendampingan fasilitasi penyusunan pemutakhiran dokumen RTK. **Manfaat** program adalah kesesuaian jumlah kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan atau industri dengan ketersediaan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja.
- 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** didukung anggaran Rp10.052.222.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,67%. Program ini memiliki 7 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD terdapat 3 indikator telah tercapai yaitu Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian (106,91%), Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri (105,16%) dan Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan (104,81%) sedangkan 4 indikator yang akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain: produktivitas tenaga kerja di perusahaan masih rendah karena kurangnya dukungan motivasi kerja dari perusahaan kepada tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan. **Upaya** yang dilakukan antara lain: menjalin kerjasama (MOU) peningkatan kualitas SDM dengan kawasan-kawasan industri utamanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, KEK Industropolis Batang dan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan melakukan pengukuran dan identifikasi produktivitas tenaga kerja di perusahaan, sedangkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dilakukan dengan mengoptimalkan peran BLK dan LPK untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja yang relevan dengan perkembangan teknologi; pembinaan dan evaluasi akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan kurikulum pelatihan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja; menjalin kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI), Asosiasi Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri (AP2LN), Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia (APPRODI) dan Asosiasi HRD Jawa Tengah dalam hal

pelaksanaan uji kompetensi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan sertifikasi tenaga kerja. **Manfaat** dari program ini adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) produktif, kompeten dan berdaya saing, sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja didukung anggaran Rp1.561.617.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,39%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan di sektor formal (100,08%) dan Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (100,03%). Terhadap target akhir RPD tahun 2026 indikator Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan di sektor formal telah tercapai (100,02%) sedangkan indikator Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor Informal akan tercapai (99,74%). **Permasalahan** yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara angkatan kerja yang setiap tahunnya terus bertambah dibanding dengan daya serap tenaga kerja di pasar kerja. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), pemberdayaan kewirausahaan, memperluas penyebaran informasi lowongan kerja kepada masyarakat melalui kegiatan bursa kerja /Job fair dan Optimalisasi penggunaan media informasi dengan cara mempublikasikan aplikasi “ayo kerjo” kepada pencari kerja dengan cara menghubungkan dengan perusahaan sebagai pihak penyedia kerja. **Manfaat** dari Program ini adalah menurunkan jumlah angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4. Program Hubungan industrial didukung anggaran Rp1.160.639.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 85,10% hal ini disebabkan penetapan UMP/UMK baru ditetapkan pada minggu terakhir Bulan Desember sehingga kegiatan sosialisasi dan monitoring tidak dapat terlaksana. Program ini memiliki 4 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (104,70%); Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (103,42%); Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (101,13%); dan Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (100,66%). Terhadap target akhir RPD terdapat 3 indikator telah tercapai, dan Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (97,98%) akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih adanya perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yang disebabkan adanya perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), yang tidak bisa sepenuhnya diselesaikan secara Bipartit, sehingga harus dicatatkan ke Disnakertrans untuk mendapatkan penyelesaian melalui mediasi. **Upaya** yang dilakukan adalah memperkuat fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) di perusahaan

untuk komunikasi dan penyelesaian masalah internal, serta meningkatkan kapasitas LKS Tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memfasilitasi dialog dan memberikan pertimbangan kebijakan ketenagakerjaan, dengan tujuan utama menurunkan perselisihan hubungan industrial. **Manfaat** dari program ini adalah terwujudnya lingkungan kerja yang harmonis, aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas di perusahaan.

5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan didukung anggaran Rp1.949.837.000,00 dengan capaian realisasi fisik 100% dan keuangan 94,47%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (136,67%) dan Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan (100%). Terhadap target akhir RPD indikator Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (135,30%) telah tercapai dan indikator Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan (99,99%) akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain: masih adanya perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan karena masih ditemukannya pelanggaran pemenuhan hak-hak pekerja, meliputi hak atas upah yang layak, jaminan sosial; serta kurangnya perhatian dari pengusaha terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain belum sepenuhnya melaksanakan pemeriksaan dan pengujian objek K3 serta lingkungan kerja untuk mewujudkan kondisi tempat kerja yang aman. **Upaya** yang dilakukan antara lain: Meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum tentang pentingnya penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan, dan peningkatan kompetensi pengawas yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum ketenagakerjaan; pengujian dan pengukuran K3 di perusahaan yang diakibatkan karena faktor di lingkungan kerja (kebisingan, kualitas udara, pencahayaan) serta melakukan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga kerja secara berkala. **Manfaat** dari program adalah meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan hukum ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan kerja), dengan demikian secara otomatis akan terwujudnya hubungan kerja yang kondusif antara pengusaha dan pekerja.

Tabel 3.82 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
1	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	74,28	80,00	107,70	68,57	80,00	116,67

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
1	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	31,42	30,59	97,36	30,59	30,59	100
2	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,40	2,35	97,92	2,35	2,35	100
3	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4,68	4,61	98,50	4,60	4,61	100,22
4	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	3,49	3,67	105,16	3,20	3,67	114,69
5	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang	%	9,55	10,21	106,91	9,50	10,21	107,47
6	Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	%	13,30	13,94	104,81	13,22	13,94	105,4
7	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	47,13	47,08	99,89	46,98	47,08	100,21
III PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
1	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%	71,07	71,13	100,11	71,05	71,13	100,08
2	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68,50	68,32	99,74	68,30	68,32	100,03
IV PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
1	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98,40	99,31	100,92	98,20	99,31	101,13
2	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	46,81	45,84	97,93	45,54	45,84	100,66
3	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,8	52,11	104,64	49,77	52,11	104,70
4	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	97,7	100	102,35	96,69	100	103,42

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							
1	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89,60	89,59	99,99	89,59	89,59	100
2	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,94	36,45	135,30	26,67	36,45	136,67

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja didukung kegiatan **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** dengan **keluaran** pembinaan 53 Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTK Makro; bimtek penyusunan RTK Mikro untuk 71 perusahaan; dan tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja daerah Provinsi. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya pemahaman SDM Kab/Kota dan perusahaan untuk menyusun dokumen yang berkualitas. **Manfaatnya** untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang berdasarkan analisis beban kerja, tren industri dan pertumbuhan ekonomi. **Dampak** adalah berkurangnya pengangguran di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum semua Kabupaten/Kota memprioritaskan untuk menyusun dokumen RTK. **Upaya** yang dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bappeda kabupaten/Kota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait.

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja didukung 3 Kegiatan:

1) **Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi** dengan **keluaran** pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 2.135 orang pencaker yang dilaksanakan dengan rincian di Bidang Lattas 200 orang, Balai Latihan Kerja (BLK) Cilacap di 296 orang, BLK Semarang 1 sebanyak 352 orang pencaker, BLK Semarang 2 sebanyak 839 pencaker dan Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi sebanyak 628 pencaker, kerjasama dengan perusahaan / lembaga dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebanyak 16 Kesepakatan/naskah dan penyediaan serta memelihara Sarana Pelatihan kerja sebanyak 79 unit. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2024 mengenai perlunya *Link and Match* Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). **Outcome** kegiatan ini adalah pencari kerja mempunyai kompetensi atau keterampilan kerja yang berdaya saing di pasar kerja. **Manfaat** Pencari kerja (penganggur) terserap di perusahaan atau wirausaha. **Dampak** produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga kesejahteraan pekerja/buruh meningkat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu SDM instruktur di Balai Latihan Kerja

(BLK) tidak sepenuhnya berkompeten sesuai klaster industri. **Upaya** yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas SDM instruktur melalui Bimtek dan melakukan kerjasama kebutuhan instruktur dengan lembaga swasta.

- 2) **Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah**, dengan **keluaran** Peningkatan Produktivitas tenaga kerja di 475 Perusahaan Menengah. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu terjalannya kesepakatan kerjasama (MOU) Peningkatan Produktivitas dengan perusahaan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya produktivitas tenaga kerja. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya pendapatan tenaga kerja. **Permasalahan** yang dihadapi biaya pelaksanaan peningkatan produktivitas tenaga kerja dirasa oleh perusahaan relatif mahal dan kurangnya kesadaran terhadap peningkatan produktivitas. **Upaya** yang dilakukan melakukan berkolaborasi atau kerjasama pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produktivitas

- 3) **Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**, dengan **keluaran** terlaksananya akreditasi 30 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya minat atau animo masyarakat untuk mengikuti program pelatihan kerja. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu kompetensi lulusan LPK sesuai standar mutu yang diakui oleh dunia industri. **Dampak** kegiatan pasca pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) cenderung lebih mudah memperoleh kesempatan kerja atau bekerja di perusahaan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu regulasi yang mengatur akreditasi belum mengizinkan untuk pelaksanaan akreditasi secara mandiri. **Upaya** yang dilaksanakan telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pusat berkaitan dengan proses akreditasi tersebut dan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mengadakan pelatihan asesor kompetensi.

3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, didukung oleh didukung 4 kegiatan yaitu:

- 1) **Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, dengan **keluaran** Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada 350 Pencari kerja; penempatan tenaga Kerja melalui layanan AKAD, Antar Kerja Lokal (AKL) dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebanyak 80 orang; pemberdayaan tenaga kerja melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja sebanyak 230 orang. **Outcome** kegiatan ini yaitu terfasilitasinya penempatan tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya pemahaman mekanisme antar kerja dan pendapatan/kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini yaitu berkurangnya jumlah pengangguran. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu pencari kerja tidak mempunyai kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. **Upaya** meningkatkan kompetensi melalui kegiatan bimbingan karir dan pemberdayaan kewirausahaan bagi pencari kerja.
- 2) **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** dengan **keluaran** 193 orang

pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu tersedianya lowongan kerja. **Manfaat** kegiatan ini adalah terfasilitasinya penempatan tenaga kerja Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini yaitu berkurangnya jumlah pengangguran. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan pilihan pencari kerja. **Upaya** yang dilakukan pelatihan vokasi, atau program sertifikasi untuk memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan permintaan industri

- 3) **Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi** dengan **keluaran** pemberdayaan 80 orang PMI Purna; verifikasi dan pemberian Izin secara online kepada 15 cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan pembekalan 60 CPMI pra pemberangkatan. **Outcome** kegiatan ini yaitu ditemplatkannya PMI secara prosedural serta terfasilitasinya penempatan PMI dan terwujudnya wirausaha baru bagi PMI Purna dan keluarga PMI. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya pelindungan bagi CPMI/PMI. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Minimnya pemahaman hukum dan prosedur calon dan PMI. **Upaya** yang dilakukan yaitu meningkatkan edukasi prosedur hukum bekerja ke luar negeri.
- 4) **Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, dengan **keluaran** Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebanyak 150 pengguna TKA yang diberikan sosialisasi dan 412 orang TKA yang diberikan izin bekerja. **Outcome** kegiatan ini yaitu penggunaan TKA sesuai dengan regulasi dan kebutuhan perusahaan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu alih keahlian tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya produktivitas dan pendapatan tenaga kerja. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurangnya kesesuaian dokumen RPTKA dengan kondisi yang sebenarnya. **Upaya** yang dilakukan yaitu meningkatkan pembinaan kepada pengguna TKA.

4. Program Hubungan Industrial, didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**, dengan **keluaran** 105 Perusahaan menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online; 105 Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online, 140 Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif antara pengusaha dan pekerja. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu terciptanya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan dan mencegah terjadinya PHK di perusahaan. **Dampak** kegiatan tersebut

adalah meningkatkan produk barang dan jasa perusahaan dan meningkatkan pendapatan tenaga kerja. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu munculnya perselisihan dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama karena adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja. **Upaya** yang dilakukan yaitu mediator tenaga kerja melakukan mediasi dan komunikasi kepada pekerja dan pengusaha dengan tujuan untuk membantu mencapai persepsi bersama.

- 2) **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**, dengan **keluaran** pencegahan perselisihan sebanyak 178 kasus dan Penyelesaian Perkara Perselisihan sebanyak 162 kasus. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu berkurangnya pelanggaran dalam pelaksanaan Hubungan industrial. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan keharmonisan antara pekerja dan pengusaha. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatkan produk barang dan jasa perusahaan dan meningkatkan pendapatan tenaga kerja. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu pengusaha maupun pekerja belum sepenuhnya memahami UU Ketenagakerjaan. **Upaya** yang dilakukan yaitu memberdayakan serikat pekerja dan mediator secara lebih baik.
- 3) **Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**, dengan **keluaran** 2 Dokumen Pembahasan Penetapan UMP dan UMK. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu terwujudnya penetapan UMP dan UMK Kabupaten/Kota. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu meningkatkan hubungan yang lebih harmonis antara pengusaha dengan pekerja / buruh. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu peningkatan upah dan kesejahteraan tenaga kerja. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu munculnya perbedaan pendapat dalam rangka Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). **Upaya** yang dilakukan yaitu mengadakan dialog sosial yang melibatkan serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan akademisi.

5. **Program Pengawasan Ketenagakerjaan** didukung kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan** dengan **keluaran** Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menerapkan K3 di 581 Perusahaan dan Penyelesaian permasalahan kasus Hukum ketenagakerjaan sebanyak 260 kasus, dan 1.190 Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya Kepatuhan pengusaha dan tenaga kerja/buruh terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan kerja). **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya tempat kerja yang lebih aman dan sehat. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya produktivitas tenaga kerja. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran dan lemahnya pengawasan perusahaan dalam pelaksanaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). **Upaya** yang dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan pada perusahaan dalam

penerapan Undang undang ketenagakerjaan ke perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh fungsional pengawas ketenagakerjaan dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada pekerja mengenai K3 dan penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur keselamatan

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagai berikut :

Tabel 3.83 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1	100,00	1	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7	100,00	21	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	2	100,00	7	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Hubungan Industrial	4	100,00	6	100,00	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	2	100,00	4	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Rencana Program dan kegiatan strategis yang akan yang dilaksanakan kedepannya pada tahun 2026 antara lain :

1. Peningkatan Daya Saing Angkatan Kerja Melalui Pelatihan Vokasi, Penguatan BLK dan Lembaga Produktivitas
2. Kemitraan antara Industri dan BLK/LPK : Kerja sama antara lembaga pelatihan dan industri dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja serta menyusun kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Kerjasama dengan perusahaan untuk memfasilitasi perekrutan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan buruh melalui penetapan UMP dan UMK dan mendorong perusahaan dalam kepesertaan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja
5. Peningkatan pengawasan pada perusahaan dalam penerapan Undang Undang ketenagakerjaan ke Kabupaten/kota yang meliputi pembinaan, pemeriksaan, pengujian objek K3 dan lingkungan kerja serta pemeriksaan kesehatan kerja.

3.4.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, yaitu Meningkatkan kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah berdasarkan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain: masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan, belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak di daerah.

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain : memastikan alokasi anggaran yang responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mendorong kepedulian kelompok perempuan dengan berkoordinasi dengan dinas Kabupaten/ Kota untuk memberi alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan implementasi program terkait kesetaraan gender, melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan, pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan dan program terkait kesetaraan gender oleh pemerintah daerah, menjalin dialog dan masukan organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan. Adapun telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut antara lain : Pendampingan intens di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), kegiatan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya agar dapat direplikasi dan dialokasikan anggaran di Kabupaten/Kota sesuai dengan kearifan lokal, Kerjasama dengan berbagai mitra untuk mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan, mendorong Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan terkait implementasi program dan kegiatan responsif gender di OPD, mendorong pelaksanaan musrenbang dan forum konsultasi Publik untuk memprioritaskan masukan dan usulan dari organisasi perempuan dan anak.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) pada periode evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2025. Penghargaan Provila ini diraih karena Jawa Tengah dinilai berhasil mendampingi seluruh Kabupaten/Kota mendapat predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp3.573.583.000,00 untuk melaksanakan 6 program, yaitu:

1. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** didukung anggaran Rp990.325.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,5%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya perspektif gender dalam perencanaan program baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta terbatasnya sumber daya Kabupaten/Kota dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan secara komprehensif. **Upaya** yang dilakukan meliputi fasilitasi replikasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di daerah, penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi dan Kabupaten/Kota. **Manfaat** program ini yaitu memperkuat komitmen daerah terhadap kesetaraan gender dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.
2. **Program Perlindungan Perempuan** didukung anggaran Rp1.445.555.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,31%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar dan Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani. Terhadap target akhir RPD 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah, utamanya kekerasan fisik. Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan masih kesulitan dalam mengakses lembaga layanan karena lembaga layanan masih terpusat di Kabupaten/Kota melalui Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD PPA). **Upaya** penyelesaiannya yaitu kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mendekatkan akses layanan dengan membentuk kelembagaan terpadu perlindungan perempuan dan anak melalui Program Kecamatan Berdaya dengan pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). **Manfaat** program ini yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan korban perempuan dan anak dan adanya kolaborasi lintas sektor untuk perlindungan perempuan di Jawa Tengah.
3. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** didukung anggaran Rp93.683.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,9%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase

kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar dan Persentase korban kekerasan perempuan yang terdaftar. Terhadap target akhir RPD 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu 27 layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kabupaten/Kota masih belum terstandarisasi Kementerian PPPA. **Upaya** yang dilakukan yaitu seluruh Puspaga di Jawa Tengah telah didorong untuk melakukan evaluasi secara mandiri dengan menggunakan indikator standarisasi Puspaga, serta aktif melakukan pendampingan kepada Puspaga Kabupaten/Kota. **Manfaat** program ini adalah meningkatkan pembangunan kualitas keluarga melalui layanan edukasi dan psikososial yang responsif gender, hak anak dan keluarga.

4. **Program Pemenuhan Hak Anak** didukung anggaran Rp596.431.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya, terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang masih terjadi adalah beberapa Kabupaten/Kota menurun predikat KLA nya, yaitu Kabupaten Wonosobo yang turun peringkat menjadi Pratama dan Kota Surakarta yang turun menjadi peringkat Nindya dan masih terdapat 5 (lima) Kabupaten yang masih mendapat predikat pratama. **Upaya** yang dilakukan yaitu pendampingan intens kepada Kabupaten/Kota dalam upaya implementasi kebijakan pengembangan KLA, pembentukan tim Pembinaan dan Verifikasi Administrasi yang terdiri dari OPD lintas sektor dan Lembaga Masyarakat untuk melakukan umpan balik hasil evaluasi KLA Kabupaten/Kota. **Manfaat** Program Pemenuhan Hak Anak adalah meningkatkan komitmen pemangku kebijakan dalam upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
5. **Program Perlindungan Khusus Anak** didukung anggaran Rp357.999.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,5%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, dan terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah masih banyak kasus kekerasan anak (perundungan, pelecehan seksual, perkawinan anak) serta minimnya sistem perlindungan anak dan peran serta masyarakat. **Upaya** yang dilakukan yaitu kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan unsur *pentahelix*, terutama dari *stakeholder* satuan pendidikan dan masyarakat, serta membentuk satuan tugas Perlindungan Anak baik di sekolah maupun masyarakat. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah mendorong optimalisasi kinerja perlindungan anak di daerah serta meningkatkan kesadaran terkait hak-hak anak.
6. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak** didukung anggaran Rp89.590.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,9%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi

sistem informasi gender dan anak, terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi minimnya ketersediaan data pilah gender dan anak secara komprehensif di Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan adalah Advokasi dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyediakan data pilah gender dan anak secara berkualitas pada Sistem Informasi Gender dan Anak. **Manfaat** program yaitu meningkatkan keterisian data pilah gender dan anak sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan yang responsif gender dan anak.

Tabel 3.84 Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
1	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	70	82,86	118,37	80	82,86	103,58
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
1	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	50	42,86	85,72	31,42	42,86	136,41
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
1	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	25,71	22,86	88,91	20	22,86	114,3
2	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	25,71	22,86	88,91	22,86	22,86	100
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK							
1	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	88,57	85,71	96,77	82,86	85,71	103,44
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
1	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	11,7	8,29	141,13	11,8	8,29	142,34
2	Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
1	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	35	37,14	106,11	30	37,14	123,8

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** antara lain Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Jawa Tengah dengan peserta 100 orang dari OPD Provinsi dan 105 orang dari Kabupaten/Kota; Workshop PUG OPD Provinsi dengan peserta 80 orang. Kegiatan ini merupakan rekomendasi dari DPRD untuk mendorong pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan dan program terkait kesetaraan gender oleh pemerintah daerah serta memastikan alokasi anggaran yang responsif gender dalam APBD Provinsi pada program pemberdayaan perempuan di berbagai sektor sebagai upaya pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). **Outcome** kegiatan tersebut adanya Anggaran Responsif Gender (ARG) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam penerapan PUG. **Dampak** kegiatan yaitu menurunnya ketimpangan gender yang ada di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi masih terbatasnya pemahaman teknis dalam penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS); serta belum optimalnya koordinasi dan pengintegrasian PUG ke dalam 7 proses pembangunan dari Kabupaten/Kota. **Upaya** yang dilakukan antara lain penguatan koordinasi Pokja PUG; peningkatan kapasitas melalui workshop dan asistensi teknis; serta pengembangan sistem monitoring pelaksanaan PUG di OPD Provinsi.
- 2) **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan melalui Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam proses pengambilan keputusan kepada 1.250 peserta di 25 Kabupaten/Kota dan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) kepada 60 orang di 3 Kabupaten (Demak, Sragen, dan Pekalongan). Kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. **Outcome** kegiatan yaitu meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam forum-forum di

masyarakat serta adanya kelompok usaha perempuan mandiri yang mendorong peningkatan ekonomi perempuan. **Manfaat** kegiatan yaitu peningkatan pemahaman, partisipasi, dan kemandirian ekonomi perempuan. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan serta mendorong penurunan kemiskinan. **Permasalahan** yang masih dihadapi antara lain keterbatasan permodalan dan pemasaran produk usaha kelompok perempuan. **Upaya** yang dilakukan yaitu kerjasama lintas sektor untuk memberikan akses pemasaran melalui pameran, sedangkan akses permodalan melalui Baznas maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2. Program Perlindungan Perempuan didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota** dengan **keluaran** yaitu Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan KtP (Kekerasan terhadap Perempuan) dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) peserta 20 orang yang dilaksanakan 3 kali pertemuan dan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP dan TPPO peserta 30 orang yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan dengan mengundang unsur peserta dari akademisi, dunia usaha dan lembaga; Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan sebagai Implementasi Serat Kartini mengundang 40 peserta dari unsur akademisi, dunia usaha dan lembaga. **Outcome** dari kegiatan ini adalah adanya komitmen untuk mendorong penurunan kekerasan terhadap perempuan. **Dampak** dari kegiatan ini adalah menurunnya kasus kekerasan perempuan di berbagai sektor. **Permasalahan** saat ini adalah upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan belum implementatif. **Upaya** yang dilakukan yaitu mendorong tindak lanjut implementasi kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO *stakeholder* terkait, meningkatkan peran mitra untuk kolaborasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan perempuan. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kapasitas *stakeholders* untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- 2) **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** yaitu 43 perempuan korban kekerasan yang dilaporkan atau melapor serta mendapat layanan komprehensif. **Outcome** dari Kegiatan ini adalah adanya peningkatan layanan bagi perempuan korban kekerasan. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah layanan bagi korban kekerasan perempuan dapat tertangani secara optimal. **Dampaknya** adalah mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan rentan yang menjadi korban kekerasan. **Permasalahan** yang ada saat ini adalah banyaknya kasus kekerasan perempuan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin mendominasi di

daerah. **Upaya** yang dilakukan adalah kerja sama lintas sektor dalam rangka penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan lintas Kabupaten/Kota serta mendorong ketahanan keluarga.

- 3) **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** Kegiatan Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Layanan di 5 Kabupaten Boyolali, Rembang, Batang, Kendal dan Wonogiri dengan dihadiri oleh 100 orang (20 orang per Kabupaten) yang merupakan anggota Pusat Pelayanan Terpadu di daerah; Peningkatan Kapasitas Relawan SAPA di Kota Salatiga dan Surakarta; Peningkatan Kapasitas Penanganan KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*) mengundang Perguruan Tinggi, Perusahaan dan Media di Provinsi; Penguatan Kapasitas Bagi Perempuan dalam Situasi Darurat di Kota Semarang dengan peserta 25 orang. **Outcome** dari kegiatan ini adalah tersedianya lembaga penyedia layanan korban di daerah yang berkualitas. **Manfaat** dari kegiatan ini meningkatkan pemahaman petugas pada lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan. **Dampaknya** penanganan terhadap korban kekerasan menjadi optimal. **Permasalahan** bahwa saat ini, banyaknya pergantian personil pada lembaga penyedia layanan di daerah sehingga belum terbentuk perspektif dalam penanganan korban. **Upaya** penguatan kapasitas SDM petugas pada lembaga penyedia layanan di daerah.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga didukung oleh 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** edukasi peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender dan anak melalui Program Ngobrol Topik Inspiratif Perempuan dan Anak (Ngopi Penak) sebanyak 15 kali pelaksanaan; Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kendal, serta Kota (Tegal dan Semarang) dengan tema Evaluasi Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dengan unsur peserta Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dari Provinsi. **Outcome** kegiatan ini adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penguatan ketahanan keluarga dan kolaborasi antar unsur pembina ketahanan keluarga daerah. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kader, serta perangkat daerah tentang pentingnya peran keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. **Dampak** kegiatan ini terbentuknya keluarga yang lebih adaptif, setara, dan berdaya dalam menghadapi tantangan sosial. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain keterbatasan jangkauan dan pemahaman peserta masing-masing daerah terkait pemenuhan kualitas keluarga. **Upaya** yang dilakukan yaitu peningkatan sinergi, perluasan sosialisasi, serta optimalisasi media daring untuk edukasi keluarga responsif gender dan anak di daerah.

- 2) **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** yaitu terlayannya 20 Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak; Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dengan peserta 100 orang secara online yang terdiri dari unsur tenaga layanan/konselor Puspaga Kabupaten/Kota dan kader Satyagatra. **Outcome** yang dihasilkan mendorong peningkatan pembangunan kualitas keluarga. **Manfaat** kegiatan ini antara lain meningkatnya kemampuan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan domestik, pengasuhan anak, serta pengurangan resiko terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak berbasis keluarga. **Dampak** kegiatan ini terbangunnya sistem dukungan keluarga yang kuat, terbentuknya pola pengasuhan positif dalam keluarga, serta menurunnya risiko munculnya permasalahan sosial seperti perkawinan usia anak atau anak yang tidak berada dalam pengasuhan keluarga. **Permasalahan** yang dihadapi masih terbatasnya kapasitas SDM penyedia layanan Puspaga di Kabupaten/Kota. **Upaya** yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyediaan layanan Puspaga di Kabupaten/Kota yang meliputi konsultasi, konseling, bimbingan masyarakat, serta kegiatan penjangkauan keluarga rentan agar memperoleh dukungan psikososial dan akses terhadap layanan perlindungan anak.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** Pelaksanaan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional; 4 kali Rapat Rutin Forum Anak; Advokasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) mengundang OPD PPA Kabupaten/Kota dan 10 Tim Verifikasi Administrasi KLA yang terdiri dari OPD Provinsi dan Lembaga Masyarakat. **Outcome** dari kegiatan ini adalah adanya kolaborasi dan sinergitas antara Forum Anak, OPD, dan lembaga masyarakat dalam kebijakan pemenuhan hak anak (PHA) di daerah serta meningkatnya keterlibatan lintas sektor dalam implementasi PHA di Kabupaten/Kota. **Manfaatnya** adalah meningkatnya kualitas implementasi PHA di daerah serta meningkatnya kapasitas forum anak sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pemenuhan hak partisipasi anak. **Dampaknya** adalah terwujudnya lingkungan yang lebih responsif hak anak. **Permasalahan** yang masih dihadapi adalah keterbatasan pemahaman personil Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses evaluasi KLA di daerah, sehingga dapat mempengaruhi kualitas data dukung dan berdampak pada penurunan predikat KLA; serta masih terbatasnya pelibatan anak dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan pendampingan teknis dalam evaluasi KLA dengan melibatkan berbagai pihak termasuk OPD terkait; pendampingan lembaga masyarakat untuk memperkuat

pemahaman serta memastikan evaluasi KLA dilakukan secara objektif dan komprehensif.

- 2) **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan peserta 100 orang dari Satuan Pendidikan di Jawa Tengah (SMA, SMK, SLB); Rapat Koordinasi Keterlibatan Dunia Usaha bersama APSAI menghadirkan pengurus APSAI Kabupaten/Kota dengan peserta 20 orang. Kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD untuk menjalin dialog dan menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil. **Outcome** dari kegiatan yaitu adanya penerapan satuan pendidikan tentang prinsip Sekolah Ramah Anak. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya kompetensi dalam pendidikan yang berperspektif hak anak. **Dampak** kegiatan ini terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan meningkatnya partisipasi anak dalam proses pendidikan dan pengambilan keputusan. **Permasalahan** yang masih dihadapi yaitu Implementasi KLA di daerah masih cenderung pada pemenuhan administratif dan belum berperspektif pada upaya pemenuhan hak anak secara berkelanjutan serta belum semua pihak di daerah memiliki perspektif keberlanjutan terhadap kebijakan ramah anak di lembaga layanan bagi anak. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan umpan balik berdasarkan hasil evaluasi KLA kepada Kabupaten/Kota untuk perbaikan kebijakan pemenuhan hak anak di daerah.

5. Program Perlindungan Khusus Anak didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota** dengan **keluaran** *Draft* Rapergub RAD Perlindungan Anak (KLA); Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan peserta dari 35 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan. **Outcome** kegiatan ini adanya pedoman implementasi perlindungan anak secara komprehensif, holistik dan integratif. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatkan komitmen, pemahaman dan sinergitas para pemangku kepentingan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak. **Dampak** kegiatan ini meningkatkan peran aktif *stakeholder* terkait dalam peningkatan penyelenggaraan perlindungan anak. **Permasalahan** yang dihadapi adalah masih lemahnya komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya menurunkan kekerasan dan perkawinan anak. **Upaya** yang dilakukan adalah mendorong komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya perlindungan anak di Jawa Tengah.
- 2) **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** yaitu 22 anak korban kekerasan yang dilaporkan dan mendapat layanan sesuai standar. **Outcome** dari Kegiatan ini adalah adanya peningkatan layanan bagi anak korban kekerasan. **Manfaat** dari

kegiatan ini adalah layanan bagi korban kekerasan anak dapat tertangani secara optimal. **Dampak** kegiatan ini adalah adanya peningkatan kualitas hidup anak rentan yang menjadi korban kekerasan. **Permasalahan** yang ada saat ini adalah banyaknya kasus kekerasan anak didominasi kekerasan seksual anak dan perebutan hak asuh karena terpaparnya informasi media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta pola asuh keluarga yang kurang mendukung. **Upaya** yang dilakukan adalah kerja sama lintas sektor dalam rangka penanganan dan pencegahan kasus kekerasan anak lintas Kabupaten/Kota.

- 3) **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota** dengan **keluaran** Pelatihan Manajemen Kasus KtPA/TPPO dengan peserta 110 orang dari unsur lembaga penyedia layanan kab/kota; Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK berupa dukungan psikososial pada anak-anak yang ada di LPKA Kelas I Kutoarjo berjumlah 20 orang. **Outcome** kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman dan kerjasama penyedia layanan dalam memberikan layanan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus. **Manfaat** adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi layanan dari lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) di daerah. **Dampak** dari penguatan lembaga penyedia layanan yaitu meningkatnya kualitas layanan dan kompetensi penyedia layanan sehingga penerima manfaat bisa mendapatkan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan. **Permasalahan** saat ini adalah cakupan sasaran pelatihan bagi stakeholder dan lembaga penyedia layanan di Kabupaten/Kota belum merata. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan pelatihan bagi stakeholder dan lembaga penyedia layanan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

6. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak** didukung oleh kegiatan **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** pengisian pendataan indikator SIGA pada 35 kabupaten/kota dengan 9 Kabupaten/Kota yang keterisian indikatornya lebih dari 50% yaitu Kabupaten Rembang, Purbalingga, Banyumas, Tegal, Kudus, Batang, Wonosobo, Wonogiri, dan Kota Surakarta. **Outcome** kegiatan ini adanya data pilah gender dan anak yang digunakan untuk pengambilan kebijakan di daerah. **Manfaat** dari Kegiatan ini adalah mendorong ketepatan sasaran penerima manfaat dari pembangunan baik itu perempuan, anak maupun laki-laki. **Dampak** dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak sebagai subjek maupun objek pembangunan. **Permasalahan** yang dihadapi adalah validasi data pilah gender pada SIGA Jateng masih belum optimal. **Upaya** yang dilakukan melalui pendampingan terkait pemahaman data pilah gender dan anak pada aplikasi SIGA Jateng.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.85 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Perlindungan Perempuan	2	100	4	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1	100	2	91,667	100	Sangat Tinggi
5	Program Perlindungan Khusus Anak	2	100	4	100	100	Sangat tinggi
6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:

1. Optimalisasi implementasi PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pengembangan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kecamatan Berdaya sebagai upaya peningkatan layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
3. Mendorong pencegahan kekerasan perempuan dan anak secara komprehensif dan *multistakeholders*;
4. Mencegah dan menangani perkawinan anak secara terpadu melalui Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (Pandu Cinta);
5. Optimalisasi Penguatan UPTD PPA Kabupaten/Kota dalam penanganan layanan korban Perempuan dan anak serta layanan rujukan dari Kecamatan;
6. Mendorong penguatan kapasitas Forum Anak di Kecamatan Berdaya dan implementasi peran anak sebagai pelopor dan pelapor melalui Jogo Konco;
7. Mendorong implementasi PHA melalui strategi peningkatan capaian evaluasi KLA;
8. Mendorong optimalisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten/Kota yang terstandar.

3.4.2.3 Urusan Pangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan; Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan tugas serta fungsi organisasi yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah.

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Permasalahan yang sedang dihadapi pada aspek ketersediaan yaitu belum semua komoditas pangan tersedia secara cukup dan merata dari hasil produksi Jawa Tengah, kekurangan ketersediaan masih terjadi antara lain pada komoditas kedelai yang hingga saat ini masih harus ditutup dengan impor. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga yang signifikan sehingga belum dapat menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan kepada masyarakat, selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, proporsi konsumsi pangan masyarakat cenderung tidak merata antar kelompok pangan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang masih terbatas pada pengetahuan dan kesadaran pangan yang kurang serta masih banyak pangan tidak aman yang beredar di masyarakat dan juga masih banyak sisa pangan yang menjadi *food waste*.

Dukungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka **mendukung Program Prioritas Nasional** dilaksanakan kegiatan-kegiatan strategis antara lain:

1. Makan Bergizi Gratis melalui Pengawasan Keamanan Pangan pada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah hingga 691 sampel pangan segar yang diawasi pada 130 Dapur SPPG di Jawa Tengah;
2. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Pembentukan Kios Pangan Murah di Daerah Rawan Pangan pada Koperasi Desa Merah Putih dengan jumlah Kios Pangan Murah sebesar 520 Kios dan 113 diantaranya merupakan Koperasi Desa Merah Putih;

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan program kegiatan strategis antara lain Subsidi Harga Pangan Sumber Energi di daerah dengan Angka Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*); Subsidi Harga Pangan untuk Produsen dan Konsumen pada saat fluktuasi harga pangan.

Sebagai wujud nyata kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh penghargaan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) antara lain sebagai berikut:

1. Provinsi dengan Capaian Skor Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) terbaik II Tahun 2024;
2. Provinsi dengan Capaian Penurunan Angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) terbaik III Tahun 2024 (Angka PoU 8,63%);
3. Penghargaan Integrasi Data Pangan Inovatif Badan Pangan Nasional Tahun 2024.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam mewujudkan Ketahanan pangan di Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp47.104.866,00 untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

- 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** didukung anggaran Rp 18.903.525.000 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,28%. Program ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, antara lain indikator Rata – Rata Ketercukupan Pangan (160%); indikator Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (215,55%); indikator Persentase Komoditas Pangan Strategis Dengan Harga Efektif Sesuai ketentuan Yang Berlaku (155,83%); indikator Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (108,36%); dan Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) (108,36%). Terhadap target akhir RPJMD seluruh indikator telah tercapai. Permasalahan yang dihadapi antara lain terjadinya fluktuasi harga pangan strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen; dan inflasi tinggi di beberapa daerah pada komoditas pangan strategis. Upaya yang dilakukan antara lain memberikan subsidi harga baik kepada produsen (harga beli) dan konsumen (harga jual) untuk beberapa komoditas pangan strategis yang mengalami gejolak harga; pemberian fasilitasi biaya distribusi (transportasi, bongkar muat dan kemasan) kepada produsen; dan sosialisasi pengenalan pangan lokal substitusi beras kepada generasi muda/anak sekolah untuk peningkatan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Manfaat pelaksanaan program ini antara lain terwujudnya stabilitas harga dan pasokan pangan strategis; pemotongan rantai distribusi pangan strategis; dan tersedianya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman bagi masyarakat.
- 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan** didukung anggaran Rp 7.055.935.000 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,85%. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (1.200%), yaitu Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi. Terhadap target akhir RPJMD indikator tersebut telah tercapai. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih banyak daerah rawan pangan yang belum mendapatkan intervensi. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengintervensi daerah rawan pangan. Manfaat pelaksanaan program ini yaitu penurunan daerah rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan didukung anggaran Rp 1.829.123.000 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,66%. Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, antara lain Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (104,45%) dan Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan yang Diterbitkan (122,41%). Terhadap target akhir RPJMD seluruh indikator telah tercapai. Permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman produsen, masyarakat dan pelaku usaha pangan terhadap pangan yang aman; masih adanya produk pangan tidak aman yang beredar di masyarakat; penerapan standar level *hygiene* sanitasi pada pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) masih rendah. Upaya yang dilakukan antara lain pendampingan, sosialisasi dan edukasi mengenai mutu dan keamanan pangan terutama terhadap produsen, masyarakat dan pelaku usaha pangan; pengawasan keamanan pangan di *post-market* melibatkan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD); pengujian sampel produk pangan yang terindikasi cemaran; dan pendampingan pelatihan serta pengawasan terhadap *hygiene* sanitasi pelaku usaha PSAT. Manfaat pelaksanaan program ini antara lain mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pangan aman; mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia terhadap pangan; dan fasilitasi pelaku usaha untuk melakukan pengujian dan registrasi produk pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki.

Tabel 3.86 Capaian Kinerja Program Urusan Pangan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
1	Rata – Rata Ketercukupan Pangan	Angka	1,25	2	160	1,25	2	160
2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Angka	0,068	0,97	1.426,47	0,45	0,97	215,55
3	Persentase Komoditas Pangan Strategis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	%	55	85,71	155,83	55	85,71	155,83
4	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87,7	80,93	108,36	87,7	80,93	108,36
5	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87,7	80,93	108,36	87,7	80,93	108,36
II	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi	%	0,01	0,12	1.200	0,01	0,12	1.200
III	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
1	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	%	82	94,01	114,64	90	94,01	104,45
2	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	%	80	97,93	122,41	80	97,93	122,41

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** dengan **keluaran** kegiatan antara lain Terbentuknya 508 Kios Pangan Murah, termasuk di antaranya 84 Koperasi Desa Merah Putih; Informasi Harga Pangan Strategis selama 12 Bulan; Subsidi Harga Pangan untuk 535 ton pada komoditas Kentang, Telur Ayam, Kedelai dan Jagung pada tingkat produsen; Subsidi Harga Pangan untuk 860 ton beras pada tingkat konsumen; terselenggaranya Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.550 kali secara reguler, 235 hasil kerja sama dengan Pemkab/Pemkot, dan 38 hasil kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; dan Fasilitasi Distribusi untuk 1.731,32 ton pada komoditas beras, telur, gula pasir, minyak goreng dan pangan lain. **Outcome** kegiatan tersebut berupa tersedianya pangan pokok dan pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat; serta stabilnya pasokan dan harga pangan di Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu stabilisasi harga dan pasokan pangan di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini adalah terkendalinya inflasi komoditas pangan strategis di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu tidak meratanya ketersediaan komoditas pangan strategis antar waktu antar wilayah. **Upaya** yang dilakukan adalah menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), subsidi harga pangan tingkat produsen dan konsumen; fasilitasi distribusi pangan dan Kios Pangan Murah (KPM) dengan adanya pembentukan Kios Pangan Murah di Daerah Rawan Pangan dan pada Koperasi Desa Merah Putih dengan jumlah Kios Pangan Murah sebesar 520 Kios dan 113 diantaranya merupakan Koperasi Desa Merah Putih yang mendukung program prioritas nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

- 2) **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan pengadaan 697 ton komoditas Gabah Kering Giling (GKG) Cadangan Pangan Provinsi; dan pengadaan 9.444 bungkus komoditas Beras Analog. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terjaganya keseimbangan cadangan pangan Pemerintah Provinsi. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan cadangan pangan masyarakat. **Dampak** kegiatan ini yaitu Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam, bencana non alam, kemiskinan, gejolak harga, gagal panen, kekeringan maupun karena sebab lain yang mengakibatkan rawan pangan transien. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum terpenuhinya standar minimum penyediaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah . **Upaya** yang dilakukan adalah optimalisasi pengelolaan cadangan pangan sesuai standar nasional untuk wilayah provinsi.
 - 3) **Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu edukasi sekolah cerdas pangan pada 29 SMA/SMK dengan total peserta 2.535 siswa; sosialisasi panganekaragaman konsumsi pangan pada 10 desa rawan pangan/stunting sebanyak 16 kali; kampanye konsumsi panganekaragaman pangan lokal sebanyak 3 kali; kegiatan magang pengolahan pangan lokal kepada 10 pelaku usaha; dan pemberian stimulan pengolahan pangan lokal kepada pelaku usaha pangan lokal. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan pemahaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman kepada masyarakat. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pangan lokal substitusi beras dan pola konsumsi B2SA. **Dampak** kegiatan ini yaitu perubahan pola konsumsi pangan B2SA di masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi pangan B2SA. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan promosi dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA dengan masif dan intensif melalui media sosial maupun platform digital lain.
2. **Program Penanganan Kerawanan Pangan** didukung oleh kegiatan **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu 1 (satu) Dokumen Peta FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*); 1 Dokumen Manajemen *Food Loss and Waste*; Pemberian subsidi pangan sumber energi kepada masyarakat rawan pangan dan gizi sebanyak 100 KK miskin per desa pada 30 Desa; Pemberian subsidi pangan sumber energi kepada keluarga dengan anak berisiko stunting sebanyak 1.771 anak pada 8 Kabupaten di Jawa Tengah; dan Kampanye Edukasi Penyelamatan Pangan pada *multi-event* di wilayah Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa berkurangnya status daerah rawan pangan di Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini meningkatnya status gizi masyarakat di daerah

rawan pangan. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah daerah tahan pangan di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain masih banyaknya daerah rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah berdasarkan peta FSVA serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi keluarga. **Upaya** yang dilakukan adalah pemberian subsidi harga pangan sumber energi pada daerah rawan pangan dan gizi serta pemahaman terhadap masyarakat terkait pemenuhan gizi keluarga.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan didukung oleh kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** kegiatan yaitu pengawasan terhadap 691 sampel pangan segar pada 130 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); Pengawasan Higiene Sanitasi pada 130 Dapur SPPG yang mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis; dan Edukasi Keamanan Pangan pada 208 sasaran antara lain pedagang pasar, dan pondok pesantren; serta Penguatan Kapasitas Calon SPPI (Kepala SPPG); dan Pengujian Mutu dan Penerbitan Sertifikat sebanyak 170 sertifikat dan 186 Laporan Hasil Uji (LHU). **Outcome** kegiatan tersebut berupa pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar di masyarakat di wilayah Jawa Tengah aman dari cemaran. **Manfaat** kegiatan ini antara lain terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan dan terjaminnya *higiene* sanitasi pada bahan pangan di *pre-market* dan *post-market* termasuk SPPG wilayah Jawa Tengah; serta pelaku usaha yang terfasilitasi uji mutu dan sertifikasi produk PSAT. **Dampak** kegiatan ini yaitu terjaminnya mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain masih banyaknya produk PSAT beredar yang belum teruji dan tersertifikasi; rendahnya kesadaran produsen dan pelaku usaha pangan terhadap mutu dan keamanan pangan. **Upaya** yang dilakukan antara lain edukasi terhadap produsen dan pelaku usaha untuk melakukan uji dan sertifikasi produk PSAT serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pangan dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.87 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pangan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5	100	7	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2	100	5	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung **Program Prioritas Nasional** antara lain:

1. Program Makan Bergizi Gratis melalui kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan pada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah hingga 691 sampel pangan segar yang diawasi pada 130 Dapur SPPG di Jawa Tengah;
2. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui kegiatan Pembentukan Kios Pangan Murah di Daerah Rawan Pangan pada Koperasi Desa Merah Putih dengan jumlah Kios Pangan Murah sebesar 520 Kios dan 113 diantaranya merupakan Koperasi Desa Merah Putih.

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung Program Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Kegiatan di Kecamatan Berdaya dengan Fasilitas Bantuan Alat Pengolahan Pangan Olahan Lokal;
2. Subsidi Harga Pangan Lokal dalam rangka Subsidi Pangan Murah;
3. Subsidi Harga Pangan Aman dan Bermutu dalam rangka Subsidi Pangan Murah;
4. Penggiat Stop Boros Pangan dalam rangka Kegiatan Penyelamatan Pangan.

3.4.2.4 Urusan Pertanahan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan fungsi perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan; pengkoordinasian kebijakan Bidang Pertanahan; pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanahan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanahan; pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan pokok pada urusan Pertanahan yaitu kurang terjaminnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan penyebab utamanya adalah masih terdapat kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah serta

belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah di Provinsi Jawa Tengah. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan isu strategis pengelolaan pertanahan yaitu memfasilitasi instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum maupun Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan masyarakat pemilik tanah dalam kerangka penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berperan dalam penyelenggaraan Reforma Agraria melalui pelaksanaan penataan aset serta diwujudkan pula dalam program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* yang di dalamnya memuat kegiatan penataan akses.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp989.390.000,00 untuk melaksanakan tiga program, yaitu:

1. **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** didukung anggaran Rp246.991.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,98%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaiannya sangat tinggi yaitu Persentase fasilitasi penetapan lokasi. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih belum pahamnya instansi yang memerlukan tanah terhadap regulasi pengadaan tanah serta masih terdapatnya permasalahan tahap persiapan pengadaan tanah. **Upaya** yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Instansi terkait mengenai mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah adanya kepastian hukum atas lokasi proyek kepentingan umum untuk mendukung pemenuhan *Readiness Criteria* (RC).
2. **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** didukung anggaran Rp411.546.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,23% yang disebabkan terdapatnya perubahan standar biaya terbaru pada pembayaran PNPB sertifikasi tanah. Program ini memiliki satu indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaiannya sangat tinggi yaitu Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu lemahnya penataan administrasi penguasaan tanah. **Upaya** yang dilakukan adalah penguatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memfasilitasi permasalahan pertanahan melalui, koordinasi, mediasi, konsultasi, dan konsolidasi. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah adanya kepastian hukum pertanahan.
3. **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** didukung anggaran Rp330.853.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,98%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat

tinggi yaitu Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya TIM Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten/ Kota utamanya penyelenggaraan penataan akses Reforma Agraria. **Upaya** yang dilakukan adalah optimalisasi kolaborasi antara Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah dengan Tim GTRA Kabupaten/Kota. **Manfaat** penyelenggaraan program ini adalah penguatan kapasitas perekonomian masyarakat.

Tabel 3.88 Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							
1	Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	100	100	100	100	100	100
II	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							
1	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	100	100	100	100	100
III	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
1	Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum didukung kegiatan **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi** dengan **keluaran** dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Lima capaian Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah pada Tahun 2025 sebanyak 1.509 bidang seluas ±84,86 ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Jlatih di Kabupaten Karanganyar sebanyak ±1.080 bidang dengan luasan ±23,7 Ha;
2. Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Seksi 1 di Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Klaten sebanyak ±80 bidang dengan luasan ±3,04 ha;
3. Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah;

4. Penambahan Lahan Tol Semarang Demak Seksi I, sebanyak 134 bidang dengan luasan $\pm 52,65$ ha;
5. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap sebanyak ± 215 bidang dengan luasan 5,47 ha.

Outcome kegiatan tersebut berupa keputusan resmi yang mengikat untuk memulai proses tahap pelaksanaan pengadaan tanah. **Manfaat** kegiatan ini adalah adanya kepastian hukum atas lokasi proyek kepentingan umum untuk mendukung pemenuhan *Readiness Criteria* (RC). **Dampak** kegiatan ini adalah mendukung keberhasilan proyek kepentingan umum. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terdapat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi pertanahan dan warga terdampak yang tidak mendukung terhadap penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. **Upaya** yang dilakukan adalah memastikan tertib administrasi penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Desa, instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH, dan stakeholder terkait.

2. **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** didukung kegiatan **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** antara lain Berita Acara (BA) Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan pada Permasalahan Pengadaan Tanah SUTT 150 kV Kabupaten Kendal, Penanganan Normalisasi Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kudus, Jepara dan Pembahasan Penolakan Konsinyasi PDSK Tanah Musnah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1. **Outcome** kegiatan tersebut berupa kesepakatan antar Pihak. **Manfaat** kegiatan ini adalah kepastian hukum pertanahan. **Dampak** kegiatan ini adalah terlaksanannya tertib administrasi pertanahan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu ego sektoral dari para pihak sehingga tidak mau berkompromi, masih saling mempertahankan kepentingannya dan meyakini bahwa alas hak, bukti kepemilikan atau penguasaannya yang paling benar/ kuat. **Upaya** yang dilakukan adalah melaksanakan inovasi mekanisme penyelesaian permasalahan pertanahan dengan mengadopsi metode mediasi pada lembaga peradilan.

3. **Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee** didukung kegiatan **Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan di Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan, Koordinasi dan Monitoring, Evaluasi Reforma Agraria di Kabupaten Kendal, Semarang, Purworejo, dan Demak, Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria antara lain Pembuatan Pupuk Organik Skala Rumah Tangga di Kabupaten Kudus, Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Guna Menunjang kesejahteraan dan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung, Edukasi Pascapanen dan Ketrampilan Pengolahan Kopi di Kabupaten Semarang dan Penerapan Jaminan Pangan Masyarakat (Jampangmas) di Kabupaten Brebes. **Outcome**

kegiatan tersebut berupa edukasi pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat. **Manfaat** kegiatan ini adalah penguatan kapasitas perekonomian masyarakat. **Dampak** kegiatan ini adalah terciptanya klaster sumber ekonomi baru pada obyek Reforma Agraria. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Pemerintah Kabupaten/ Kota kurang memahami terkait urusan pertanahan yang menjadi kewenangannya serta belum semua menganggarkan penyelenggaraan Reforma Agraria. **Upaya** yang dilakukan adalah membina Pemerintah Kabupaten/Kota terkait urusan pertanahan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria serta memfasilitasi Rapat Koordinasi Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan dengan tingkat capaian tiga program dan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.89 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	100,00	1	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	100,00	1	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1	100,00	1	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Penyelenggaraan Reforma Agraria melalui Penataan Akses Reforma Agraria dalam bentuk Desa Rintisan Reforma Agraria di 3 lokasi dan optimalisasi Tim GTRA Kabupaten/Kota serta pembinaan dan pengendalian urusan pertanahan;
2. Pelaksanaan Administrasi Pertanahan terdiri dari Dukungan Persiapan Penyediaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan PSN melalui Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di 35 Kab/Kota serta Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah; dan Penanganan Permasalahan Pertanahan melalui inventarisasi data sengketa, konflik dan perkara pertanahan lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan melakukan mediasi penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

3.4.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas Urusan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi: perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian dampak lingkungan, serta peningkatan peran masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup; pelaksanaan dan pembinaan administrasi serta kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; serta pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan masing-masing bidang urusan lingkungan hidup antara lain: masih tingginya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah; belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3; menurunnya kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistem; rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran Rp4.283.775.000,00 melalui program:

1. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** didukung anggaran Rp322.986.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,77%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (130,77%), yaitu Persentase dokumen lingkungan hidup yang disusun. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih adanya potensi kegiatan/program pembangunan yang tidak selaras dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan lingkungan kedalam dokumen rencana pembangunan. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, rendah karbon dan berketahanan iklim di Jawa Tengah melalui harmonisasi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** didukung anggaran Rp1.734.292.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,25%. Program ini memiliki 5 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi (100%), yaitu Persentase sungai yang meningkat kualitasnya, Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya, Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan, Persentase pengujian kualitas air (106,04%) dan Persentase pemantauan kualitas udara

(117,67%). Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih adanya Pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi ketentuan dalam persetujuan lingkungan. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan koordinasi internal berkaitan dengan upaya penegakan hukum bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan dalam persetujuan lingkungan serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui proper. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan meningkatnya upaya adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.

3. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** didukung anggaran Rp681.509.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,45%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi (100%), yaitu Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden dan (105%) Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani. Terhadap target akhir RPD 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras yaitu Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani, hal ini disebabkan beberapa usulan kabupaten/kota tidak lolos verifikasi karena status lahan berada di kawasan hutan atau lahan dengan vegetasi yang rapat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu alih fungsi lahan yang menyebabkan fragmentasi habitat dan penurunan keanekaragaman hayati pada tingkat spesies dan genetik lokal. **Upaya** yang dilakukan yaitu memperkuat kebijakan daerah tentang kehati dan memperjelas mekanisme ABS (Access and Benefit Sharing) untuk pemanfaatan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu terwujudnya pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kehati.
4. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)** didukung anggaran Rp25.331.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,97%. Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), yaitu Persentase limbah B3 yang terkelola. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Risiko B3 dan Limbah B3 meningkat seiring pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota terkait pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengolahan limbah B3. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu terwujudnya upaya pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengolahan limbah B3 dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengolahan limbah B3 sesuai prosedur yang berlaku.
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** didukung anggaran Rp291.345.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan

keuangan 99,88%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi (100%), yaitu Persentase rekomendasi lingkungan hidup dan (126,66%) Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga membutuhkan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kualitas dokumen lingkungan dan melakukan sosialisasi perubahan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu terwujudnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

6. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat** didukung anggaran Rp773.364.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,25%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), yaitu Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya dan Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya, sementara indikator dengan tingkat ketercapaian rendah (60,73%) yaitu Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah. Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu sebagian besar masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas belum memahami dampak perilaku mereka terhadap lingkungan dan membutuhkan proses edukatif berkelanjutan. **Upaya** yang dilakukan antara lain sinergitas dengan lintas sektor untuk mendukung kegiatan peningkatan pengetahuan, kapasitas dan kompetensi lembaga/kelompok masyarakat melalui pembentukan kader lingkungan hidup. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
7. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** didukung anggaran Rp123.428.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,90%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), yaitu Persentase pengaduan yang ditangani. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu SDM penanganan pengaduan terbatas, sementara kasus pencemaran dan konflik lingkungan semakin meningkat dan perlu segera ditindaklanjuti. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan penambahan dan peningkatan kompetensi SDM pengawas, penyidik PPLH, dan petugas verifikator serta penguatan koordinasi lintas instansi untuk percepatan tindak lanjut pengaduan. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu terwujudnya penyelesaian aduan terkait permasalahan lingkungan secara

cepat dan efektif serta peningkatan partisipasi publik dalam penyampaian permasalahan lingkungan.

8. Program Pengelolaan Persampahan didukung anggaran Rp331.520.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 92,80%. Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (99,56%), yaitu Persentase sampah yang tertangani. Terhadap target akhir RPD terdapat indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu timbulan sampah terus meningkat dan memerlukan intervensi berkelanjutan. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan sinergitas antar stakeholder dalam pengelolaan sampah melalui satgas pengelolaan sampah dan penyusunan peta jalan pengelolaan sampah. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu peningkatan kapasitas pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota dan terwujudnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya sehingga meminimalkan timbulan sampah di TPA.

Tabel 3.90 Capaian Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	130,77	130,77	100	130,77	130,77
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4,76	4,76	100	4,76	4,76	100
2	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	%	2,85	2,85	100	2,85	2,85	100
3	Persentase pengujian kualitas air	%	100	106,04	106,04	100	106,04	106,04
4	Persentase pemantauan kualitas udara	%	100	117,67	117,67	100	117,67	117,67
5	Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	%	100	100	100	100	100	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
1	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	6,06	2,54	41,91	0,4	0,42	105
2	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	%	7,8	5,2	66,67	2,6	2,6	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
1	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	80	80	100	80	80	100
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
1	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50	63,33	126,66	50	63,33	126,66
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
1	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	%	11,5	10,5	91,30	10,5	10,5	100
2	Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	%	45,71	33	72,19	33	33	100
3	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	25	100	25	25	100
VII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
1	Persentase sampah yang tertangani	%	60	42,81	71,35	43	42,81	99,56

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup didukung dengan 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi** dengan **keluaran** tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Jawa Tengah, dokumen Perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Mojo dan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya analisis kinerja lingkungan hidup yang mendukung perencanaan daerah serta meningkatnya tata kelola lingkungan di tingkat desa. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat,

sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta kualitas perencanaan pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih terbatasnya ketersediaan data lingkungan hidup di beberapa kabupaten/kota dan kurangnya pemahaman aparat desa terkait penyusunan regulasi berbasis lingkungan. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait untuk memperkuat penyediaan data dan informasi lingkungan serta melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah desa dalam penyusunan dan implementasi Perdes lingkungan hidup.

- 2) **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi** dengan **keluaran** tervalidasinya 14 dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya rekomendasi lingkungan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan daerah yang lebih berwawasan lingkungan. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkurangnya potensi konflik pemanfaatan ruang. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih terbatasnya data tematik dan spasial di beberapa kabupaten/kota serta terbatasnya kapasitas teknis penyusun KLHS. **Upaya** yang dilakukan adalah penguatan koordinasi dan asistensi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota serta peningkatan kapasitas penyusun KLHS melalui pendampingan dan pelatihan.

2. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** didukung kegiatan **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** dengan **keluaran** 105 unit usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah, 105 unit usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi, 24.290,9 tCO₂e penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat tapak, tersusunnya dokumen laporan pemantauan dan pengujian kualitas air dan kualitas udara serta dokumen laporan penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan baku mutu lingkungan dan peningkatan upaya adaptasi/mitigasi perubahan iklim serta tersedianya data dan informasi hasil uji kualitas lingkungan yang valid. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pengendalian pencemaran lingkungan serta tersedianya dasar ilmiah kualitas lingkungan yang dapat digunakan untuk perencanaan, evaluasi dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan. **Dampak** kegiatan ini yaitu menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurangnya kapasitas pelaku usaha dan masyarakat dalam identifikasi kerentanan terhadap perubahan iklim serta kurangnya kapasitas SDM terkait pembaruan metode pengujian laboratorium sehingga hasil uji tidak valid. **Upaya** yang dilakukan

adalah peningkatan intensitas pendampingan, penguatan koordinasi lintas sektor dan update metode pengujian.

3. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** didukung kegiatan **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi** dengan **keluaran** yaitu 10,41 Ha lokasi pelestarian kehati yang ditangani dan 2 unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan kehati di tingkat daerah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terjaganya spesies lokal serta tersedianya sarana edukasi dan penelitian konservasi. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kehati serta terwujudnya ekosistem yang lestari. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konservasi kehati. **Upaya** yang dilakukan adalah peningkatan kegiatan edukasi dan kampanye kehati, serta pengelolaan koleksi dan habitat secara berkelanjutan.
4. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)** didukung dengan kegiatan **Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 1.476.440 ton limbah B3 yang terkelola. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan efektivitas pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu berkurangnya potensi pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan akibat limbah berbahaya. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar sumber limbah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan sarana pengumpulan dan pengolahan limbah B3 serta kepatuhan pelaku usaha yang belum optimal. **Upaya** yang dilakukan adalah peningkatan pembinaan dan pengawasan serta penguatan kapasitas pengelola limbah B3.
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** didukung kegiatan **Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi** dengan **keluaran** yaitu 198 dokumen rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan/diterbitkan serta 19 unit pelaku usaha berijin yang taat. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan lingkungan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan izin lingkungan serta berkurangnya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan. **Dampak** kegiatan ini yaitu terciptanya pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya pengawasan. **Upaya** yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas pengawas serta optimalisasi sistem perizinan dan pengawasan berbasis elektronik.

6. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat** didukung dengan kegiatan **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** yaitu 128 unit pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya, 2 Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah dan 2 lembaga/kelompok sasaran suluh lingkungan hidup. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya masyarakat yang berbudaya lingkungan serta tumbuhnya jejaring komunitas peduli lingkungan di daerah. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas lingkungan dan berkurangnya timbunan sampah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan jangkauan kegiatan penyuluhan dan sumber daya pelatih. **Upaya** yang dilakukan adalah peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal serta optimalisasi media edukasi lingkungan berbasis digital.
7. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** didukung dengan kegiatan **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi** dengan **keluaran** yaitu 33 laporan aduan yang ditangani. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan respons dan efektivitas penanganan pengaduan lingkungan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terselesaikannya permasalahan lingkungan secara cepat dan tepat. **Dampak** kegiatan ini yaitu berkurangnya potensi konflik lingkungan dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya dalam verifikasi lapangan. **Upaya** yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi dengan pihak terkait serta pemanfaatan sistem informasi untuk mempercepat proses penanganan aduan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
8. **Program Pengelolaan Persampahan** didukung dengan **Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional** dengan **keluaran** yaitu 2.650.000 ton sampah tertangani. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terkelolanya timbunan sampah dan terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. **Dampak** kegiatan ini yaitu menurunnya potensi pencemaran dan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan sarana prasarana persampahan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. **Upaya** yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi antar daerah dan penguatan peran masyarakat dalam pengurangan sampah.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup dengan tingkat ketercapaian 7 indikator sangat tinggi dan 1 indikator tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.91 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5	100	6	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	3	86,91	3	100	86,91	Tinggi
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
8	Program Pengelolaan Per-sampahan	1	99,56	1	100	99,56	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Koordinasi pelaksanaan rencana aksi pengawasan pencemaran lingkungan di Bengawan Solo, Pekalongan (Batik) dan Rawa Pening;
2. Penyiapan kelembagaan dan pendampingan proses Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Magelang;
3. Peningkatan peran masyarakat serta fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Pekalongan dan Karimunjawa Kabupaten Jepara; dan
4. Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) sebanyak 50 lokasi di Kab/Kota se-Jawa Tengah.

3.4.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah pada tahun 2025 berhasil mencapai angka kepemilikan dokumen sebesar 91,07% melalui peran strategis Pemerintah Provinsi dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota. Dalam upaya meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, Jawa Tengah dihadapkan pada beberapa tantangan teknis dan sosiologis dalam menjangkau luasnya wilayah administratif yang mencakup 7.810 desa dan 753 kelurahan, Pemerintah Provinsi melalui Dispermadesdukcapil terus melakukan akselerasi melalui transformasi digital dan inovasi jemput bola guna mengatasi disparitas layanan serta meningkatkan kesadaran pemutakhiran data mandiri. Strategi ini diintegrasikan untuk mendukung Program Prioritas, di mana akurasi data kependudukan diposisikan sebagai fondasi vital dalam penyediaan basis data presisi dalam pengambilan kebijakan pembangunan Jawa Tengah yang inklusif serta tepat sasaran.

a. Realisasi Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp444.837.000 untuk melaksanakan 3 program yaitu :

1. **Program Pendaftaran Penduduk** didukung anggaran sebesar Rp156.622.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,80%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase penduduk yang memiliki KTP-el. Terhadap target akhir RPD indikator diperkirakan telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KTP-el. **Upaya** yang dilakukan yaitu Pelayanan digital serta jemput bola dalam event-event yang diadakan oleh pemerintah dan swasta terbukti efektif menysasar masyarakat yang belum terlayani administrasi dokumen kependudukan. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan publik.
2. **Program Pencatatan Sipil** didukung anggaran sebesar Rp154.154.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,77%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian tinggi, yaitu Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 98%. **Permasalahan** yang dihadapi adalah luasnya area di Kabupaten/Kota sehingga masyarakat yang letaknya jauh akan sulit untuk mengakses layanan kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. **Upaya** yang dilaksanakan adalah mengadakan pelayanan kepengurusan administrasi dan kependudukan di tingkat desa sampai dengan kecamatan, sehingga masyarakat lebih dekat kepada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah memastikan setiap warga negara memiliki

identitas resmi dan hak-hak sipilnya terlindungi sebagai dasar berbagai layanan publik.

- 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** didukung anggaran sebesar Rp134.061.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,95%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan. **Permasalahan** yang dihadapi adalah izin yang diterbitkan untuk pemanfaatan data kependudukan oleh Dirjen Kemendagri terkadang lama, sehingga menghambat lembaga/instansi yang mengajukan. **Upaya** yang dilaksanakan adalah aktif dalam koordinasi kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam upaya percepatan dikeluarkannya izin pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga yang membutuhkan. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah mudahnya lembaga/instansi dalam memverifikasi data kependudukan bagi masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan publik.

Tabel 3.92 Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
1	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	98	98,7	100,3	99	98,7	99,7
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	%	95	82,85	82,85	100	82,85	87,21
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
1	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	14,29	33,3	233,1	100	33,3	33,3

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

- 1. Program pendaftaran penduduk** didukung kegiatan **pelayanan pendaftaran kependudukan** dengan **keluaran** bimbingan teknis kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dengan peserta dari 35 kabupaten/kota dan sosialisasi administrasi kependudukan kepada 70 peserta dari 35 Dinas Dukcapil Kab/Kota se-Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa Meningkatnya kapasitas aparatur pendaftaran penduduk. **Manfaat** kegiatan ini yaitu semakin efektifnya pelayanan pendaftaran penduduk, tidak hanya melalui offline tetapi juga dalam pelayanan online. **Dampak** kegiatan ini yaitu kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masyarakat yang terkadang menunda untuk mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. **Upaya**

yang dilakukan, yaitu melaksanakan modernisasi layanan dan peningkatan aksesibilitas untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang sah.

2. **Program Pencatatan Sipil** didukung oleh kegiatan **pelayanan Pencatatan Sipil** dengan **keluaran** rapat koordinasi administrasi kependudukan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk mensinergikan program administrasi kependudukan provinsi dengan kabupaten/kota. **Outcome** kegiatan tersebut berupa sinerginya antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam hal program dan inovasi bersama pelayanan pencatatan sipil. **Manfaat** kegiatan ini yaitu percepatan layanan di Kabupaten/Kota dalam hal dokumen pencatatan sipil, terutama penduduk dengan usia 0-17 tahun. **Dampak** kegiatan ini yaitu kemudahan masyarakat dalam pelayanan pencatatan sipil terutama bagi usia 0-17 tahun. **Permasalahan** yang dihadapi adalah sarana dan prasarana perekaman pencatatan sipil yang ada di Kabupaten/Kota banyak yang rusak atau perlu diperbarui. **Upaya** yang dilaksanakan adalah mengoptimalkan pelayanan online dalam percepatan pelayanan pencatatan sipil.
3. **Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan** didukung oleh kegiatan **Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi** dengan **keluaran** sosialisasi menggunakan media cetak maupun digital mengenai inovasi pelayanan administrasi kependudukan di beberapa titik di kabupaten/kota serta koordinasi dengan dirjen dukcapil terkait dengan program-program dukcapil yang akan dilaksanakan di daerah. **Outcome** kegiatan tersebut adalah semakin banyak lembaga/instansi yang mengajukan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanannya. **Manfaat** kegiatan ini yaitu lembaga/instansi swasta dan pemerintah mendapatkan kemudahan dalam akses pemanfaatan data kependudukan untuk dasar pelayanan yang dilaksanakan. **Dampak** kegiatan ini adalah kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar dari lembaga/instansi pemerintah dan swasta. **Permasalahan** yang dihadapi adalah syarat yang diajukan oleh Dirjen Kemendagri terkait pemanfaatan data kependudukan, yaitu adanya ISO 27001 bagi lembaga/instansi yang ingin memanfaatkan data kependudukan. **Upaya** yang dilaksanakan adalah koordinasi aktif dengan Dirjen Dukcapil terkait dengan proses pengajuan pemanfaatan data kependudukan.

c. **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja**

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tingkat capaian 2 indikator sangat tinggi dan 1 indikator tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.93 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pendaftaran Penduduk	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Program Pencatatan Sipil	1	87,21%	1	100%	87,21%	Tinggi
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	100	1	100%	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:

1. Mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui transformasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2. Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri mengenai proses pemanfaatan data kependudukan bagi Institusi/Lembaga, serta melaksanakan koordinasi mengenai perpanjangan masa kerjasama pemanfaatan data kependudukan bagi Institusi/Lembaga yang masa kerjasamanya sudah habis atau akan habis.

3.4.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah merupakan pilar pembangunan manusia berkelanjutan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian desa melalui penguatan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara makro, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfokuskan kebijakan pada pengembangan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kapasitas infrastruktur desa. Sebagai salah satu bentuk intervensi strategis dalam mendukung kemandirian tersebut, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan kebijakan untuk untuk menstimulus pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya secara mandiri, sekaligus memastikan sinkronisasi pembangunan antara level provinsi dan kabupaten dan desa, guna memperkecil kesenjangan antarwilayah.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp5.362.557.000,00 dilaksanakan melalui 4 program yaitu:

1. **Program Penataan Desa** didukung anggaran Rp10.699.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,83%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa.

Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih banyaknya kepala desa yang belum memahami pentingnya administrasi kelembagaan yang ada di desa. **Upaya** yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi dan konsultasi kepada perangkat desa akan pentingnya tertib administrasi kelembagaan desa. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah lebih tertibnya administrasi yang ada di desa, baik itu dalam hal pelayanan maupun dokumen-dokumen administrasi desa.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa didukung anggaran Rp601.228.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar 99,90%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa dan Indikator Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa. Terhadap target akhir RPD 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kesenjangan antara tuntutan digitalisasi dan transparansi dengan kapasitas SDM dan infrastruktur yang masih belum merata. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi dan pembuatan aplikasi terkait dengan administrasi desa, sehingga lebih mudan dan akuntabel dalam pelaksanaan administrasi desa. **Manfaat** penyelenggaraan program administrasi pemerintahan desa yaitu Pemberian bantuan keuangan kepada desa sebanyak 11.707 titik di Jawa Tengah yang efektif untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa selain itu, turut mensukseskan proyek strategis nasional melalui Percepatan verifikasi tanah kas desa yang terkena proyek strategis nasional di Jawa Tengah.

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa didukung anggaran Rp353.476.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,84%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP). Terhadap target akhir RPD indikator tersebut perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih rendahnya kesadaran kepala desa dalam mengidentifikasi potensi yang ada di desa, serta rendahnya kesadaran kepala desa dalam berkolaborasi dalam mengelola potensi desa dengan pihak-pihak terkait. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan bimtek dan fasilitasi kepada kepala desa agar sadar akan potensi desa yang dimiliki. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah penggalian potensi yang ada di desa yang selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan pihak-pihak terkait guna pembangunan desa yang lebih baik.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat didukung anggaran Rp3.925.688.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,42%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan 1 (satu) indikator dengan tingkat ketercapaian tinggi. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kompetensi SDM dan manajemen kelembagaan desa yang

perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan BUMDesa agar dapat mendongkrak perekonomian desa. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas kepada lembaga desa dan pengelola BUMDesa demi meningkatkan perekonomian desa. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah Pemberian pelatihan kepada pengelola BUMDes berkembang dan maju memberikan dampak yang signifikan terhadap tata kelola BUMDes, sehingga nantinya diharapkan ikut memperkuat perekonomian yang ada di desa.

Tabel 3.94 Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENATAAN DESA							
1	Persentase Kabupaten yang Terfasilitasi dalam Rangka Penataan Desa	%	100	100	100	100	100	100
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
1	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	%	100	62,5	62,5	100	100	100
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
1	Persentase kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi dalam indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	100	62,4	62,4	46,96	62,4	132,8
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
1	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	11,67	36,19	310,11	44,95	36,19	80,51
2	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

- Program Penataan Desa** didukung kegiatan **Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa dan desa adat** dengan **keluaran** kegiatan yaitu terfasilitasinya tata kelola administrasi desa sebanyak 1 Desa. **Outcome** kegiatan tersebut

berupa terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. **Manfaat** kegiatan ini yaitu administrasi desa menjadi lebih tertib dan terstandar. **Dampak** kegiatan ini yaitu Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu Banyaknya desa yang belum tertib administrasi. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi dan Bimtek kepada perangkat desa.

2. **Program Administrasi Pemerintahan Desa** didukung kegiatan **Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa** dengan keluaran antara lain terfasilitasinya 24 desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dikeluarkannya 66 rekomendasi terkait dengan tukar menukar tanah kas desa sebagai bagian dalam rangka mendukung proyek strategis nasional, 58 perangkat desa yang dilatih manajemen pengelolaan keuangan desa, terfasilitasinya 29 kabupaten yang mendapat bantuan keuangan sarana dan prasarana desa, serta terfasilitasinya 227 dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan desa. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terfasilitasinya kebutuhan pihak terkait mengenai tertibnya administrasi pemerintahan desa. **Manfaat** kegiatan ini yaitu pemerintah desa mampu melayani masyarakat dengan baik secara administrasi maupun pelayanan. Dampak kegiatan ini yaitu masyarakat mampu menikmati sarana dan prasarana desa yang baik, sehingga kehidupan masyarakat semakin membaik. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih adanya perangkat desa yang belum melek teknologi, sehingga menghambat proses tertib administrasi yang ada di desa. **Upaya** yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pendampingan terhadap perangkat desa mengenai Sistem Informasi Desa.
3. **Program Peningkatan Kerjasama Desa** didukung kegiatan **fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi** dengan **keluaran** yaitu 1 kerjasama desa yang difasilitasi dan 1 pengembangan kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan perekonomian desa terkait dengan pengembangan kawasan dan kerjasama desa. **Manfaat** kegiatan ini yaitu perekonomian masyarakat yang secara tidak langsung berdampak positif karena adanya pengembangan kawasan dan kerjasama desa. **Dampak** kegiatan ini yaitu penyerapan tenaga kerja local di desa, sehingga mengurangi pengangguran dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi adalah kepala desa yang terkadang masih ego sentris belum mau untuk bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mengelola potensi desa yang ada. **Upaya** yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada kepala desa agar lebih terbuka untuk bekerja sama dengan desa sekitar maupun pihak swasta untuk memanfaatkan potensi desa yang ada.
4. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat** didukung kegiatan **Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Prov. serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat**

yang Sama Berada di Lintas Daerah Kab./Kota dengan **keluaran** 150 anggota LPMD/K yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, telah terealisasinya 1 kali kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah, terfasilitasinya sebanyak 1096 unit BUMDesa tumbuh/pemula dalam peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa, 70 anggota pokjanal posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas, 35 unit posyantek yang difasilitasi pemanfaatan TTG yang nantinya akan dikirim ke tingkat nasional sebagai perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 35 TP PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang terfasilitasi. **Outcome** kegiatan ini yaitu adalah meningkatnya kapasitas pengelola BUMDesa di Jawa Tengah dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu pengelola BUMDesa yang semakin professional dalam pengelolaan BUMDesa. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memperluas kegiatan usaha BUMDesa, sehingga mampu menyerap tenaga kerja di masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu pengelola BUMDesa masih banyak yang belum professional. **Upaya** yang dilakukan yaitu pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa klasifikasi tumbuh/pemula di Jawa Tengah, diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan BUMDesa dan peningkatan perekonomian desa.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.95 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penataan Desa	1	100	1	100	100	Sangat tinggi
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2	100	7	100	100	Sangat tinggi
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	100	2	100	100	Sangat tinggi
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	3	93,5	6	100	93,5	Sangat tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Tahun 2026 yaitu:

1. Fasilitasi untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa,
2. Fasilitasi bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana Desa,
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa,
4. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan,
5. Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes dan Fasilitasi Pembentukan Badan Hukum untuk Bumdes,
6. Fasilitasi dukungan kelembagaan Posyandu dengan 6 bidang SPM.

3.4.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rekomendasi dewan antara lain menjalin dialog dan menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan, dan tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengembangkan jejaring atau mitra kerja dalam upaya pembangunan keluarga, kependudukan, berencana dan keluarga berencana.

Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah berdasarkan bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain: masih rendahnya kesertaan KB terutama KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Belum semua Kabupaten/Kota mengintegrasikan Kebijakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan, belum optimalnya KIE KB terutama di daerah tertinggal, terpencil dan terbelakang.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Pusat yaitu :

1. Terbaik I Regional Jawa Bali Kategori Capaian KB MKJP tertinggi terhadap total pelayanan KB pada Pelayanan KB serentak di pasar tradisional;
2. Terbaik II Kategori Provinsi dengan jumlah capaian terbanyak tingkat Nasional dalam Pelayanan Vasektomi serentak;
3. Terbaik III kelompok target 1 kategori Provinsi dengan persentase capaian tertinggi pada pelayanan vasektomi serentak;
4. Terbaik III regional Jawa Bali kategori rata-rata pelayanan KB MKJP terbanyak dalam pelayanan KB serentak di pasar tradisional;
5. Juara terbaik 1 forum genre tingkat nasional.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp1.165.000.000,00 untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

1. **Program Pembinaan Keluarga Berencana** didukung anggaran Rp479.426.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,96%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 1 indikator sangat tinggi yaitu Persentase *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dan 1 indikator tinggi yaitu *Unmetneed*. Terhadap target akhir RPD 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu rendahnya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) yang mampu Pasangan Usia Subur (PUS) di setiap desa/kelurahan (1.366 orang dari 8.563 desa/kelurahan). Selain itu, minimnya peran serta pria dalam program KB. **Upaya** yang dilakukan yaitu mengoptimalkan kinerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) untuk mendukung peran dan fungsi PLKB melalui Peningkatan Kapasitas PPKBD dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan penggerakan program KB pria. **Manfaat** penyelenggaraan program tersebut adalah untuk meningkatkan kesertaan KB bagi PUS sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk.
2. **Program Pengendalian Penduduk** didukung anggaran Rp112.524.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan, terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum terintegrasinya 30 indikator urusan penduduk dalam dokumen perencanaan. **Upaya** untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota untuk pengintegrasian dokumen GDPK 5 pilar dan 30 indikator PJPk kedalam dokumen perencanaan. **Manfaat** program tersebut adalah mendorong pembangunan kependudukan yang berkualitas dan berkelanjutan secara komprehensif.
3. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** didukung anggaran Rp495.661.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,24%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Kampung Keluarga Berkualitas mandiri dan berkelanjutan, terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang ada antara lain peningkatan jumlah kampung KB mandiri dan berkelanjutan yang belum signifikan terhadap perkembangan jumlah kampung KB yang sudah terbentuk, dikarenakan kurang optimalnya kader pendamping kampung KB.

Upaya yang dilakukan yaitu koordinasi dengan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Jawa Tengah dan OPD KB di Kabupaten/Kota untuk advokasi dan pendampingan kampung KB. **Manfaat** penyelenggaraan program tersebut yaitu meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga.

Tabel 3.96 Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
1	<i>Unmetneed</i> KB	%	9,8	10	98	7,78	10	77,8
2	<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	%	66,4	66,7	100,45	69,47	66,7	96,01
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
1	Persentase pemerintah daerah yang 3-227atihan3-227 dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar dalam pembangunan	%	62	88,88	143,35	57	88,88	155,93
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA							
1	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	36	38,93	108,14	32	38,93	121,66

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal** dengan **keluaran** Safari pelayanan KB MKJP di 35 Kabupaten/Kota dengan realisasi 420 orang; Penggerakan Program KB bersama mitra dengan realisasi 130 orang di 4 Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan sebanyak 60 orang dari PT. Jarum Jepara. **Outcome** dari kegiatan ini adalah peningkatan kesertaan KB terutama MKJP dan menurunkan angka *unmetneed*. **Manfaat** dari kegiatan yang dilakukan yaitu meningkatkan motivasi PUS dalam berKB sehingga risiko 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak, dan Terlalu Sering) melahirkan dapat dicegah. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka stunting. **Permasalahan** yang terjadi yaitu masih tingginya PUS yang menggunakan KB Non MKJP serta masih rendahnya kesertaan pria berKB, karena persepsi yang keliru tentang KB hanya tanggung jawab perempuan sehingga menghambat optimalisasi peran mitra kerja dalam

menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kesertaan pria dalam KB. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan penggerakan KB MKJP bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB pria yang bekerjasama dengan *stakeholder* dan mitra kerja terkait.

- 2) **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** dengan **keluaran** Sosialisasi Peningkatan Kapasitas PPKBD kepada 80 peserta di daerah yang capaian kepesertaan KB nya masih rendah di Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan pelibatan organisasi sipil dan kelompok perempuan. **Outcome** dari kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas kader PPKBD dalam untuk berperan serta dalam program Bangga Kencana. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader PPKBD dalam membina PUS yang belum menjadi peserta KB aktif. **Dampak** dari kegiatan ini adalah menurunkan angka putus pakai atau *Drop Out* KB sehingga jumlah peserta KB aktif tetap stabil bahkan meningkat. **Permasalahan** yang terjadi yaitu banyak petugas PPKBD yang merangkap tugas lain di luar urusan Keluarga Berencana, sehingga tugas utama PPKBD dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada PUS kurang optimal. **Upaya** mengatasi hal tersebut dengan memberikan fasilitasi pertemuan dan peningkatan kapasitas untuk mendorong motivasi kader PPKBD dalam melaksanakan mendukung program Bangga Kencana.

2. Program Pengendalian Penduduk didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** dengan **keluaran** Advokasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Sragen dan Temanggung kepada 30 kader pengelola Kampung KB; Workshop Advokasi Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) kepada 40 peserta di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Rembang dengan peserta dari tim pokja GDPK Kabupaten; Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) kepada 60 peserta di Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus dari unsur Kepala Sekolah, Guru dan pembina SSK Kabupaten; Advokasi Rumah Data Kependudukan (RDK) kepada 30 kader pengelola dan pembina rumah data kependudukan di Kabupaten Pekalongan; serta Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan kampung Keluarga Berkualitas di 5 titik nominator yaitu Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Sukoharjo, dan Kota Pekalongan, Salatiga. **Outcome** kegiatan ini adalah pemahaman masyarakat terhadap Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak, *Grand Design* pembangunan kependudukan,

sekolah siaga kependudukan. Dan rumah data kependudukan. **Manfaat** semakin meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pembangunan yang integratif komprehensif berbasis data kependudukan sehingga masyarakat bukan saja menjadi objek pembangunan tetapi subyek pembangunan. **Dampak** masyarakat berada dalam kondisi sejahtera lahir batin dan generasi penerus bangsa yang kompeten dan bermoral baik tersedia untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal, regional maupun nasional. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kampung keluarga berkualitas belum sepenuhnya sesuai dengan harapan untuk peningkatan derajat kesejahteraan lahir dan batin masyarakat pada. **Upaya** yang dilakukan yaitu optimalisasi advokasi dan edukasi di Kabupaten/Kota dan Pengurus serta Anggota Pokja Kampung KB untuk menindaklanjuti program Kampung KB berbagai upaya optimalisasi kampung KB yang sudah terbentuk dengan sinergitas program/kegiatan lintas sektor yang juga sudah dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan, utamanya yang berbasis masyarakat.

- 2) **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi** dengan **keluaran** Kegiatan Advokasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) kepada 18 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu OPD Provinsi Jawa Tengah mendukung pembangunan kependudukan di Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan yaitu OPD Provinsi Jawa tengah akan memperhatikan sistem deteksi dini, perencanaan, pemantauan, dan pengendalian kependudukan yang berbasis data dan teknologi. **Dampak** kegiatan adalah peningkatan kualitas penduduk dan terkendalinya kuantitas penduduk sebagai upaya mendorong pembangunan kependudukan secara komprehensif di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang ada yaitu, belum optimalnya pemanfaatan data yang tersedia di Aplikasi SIPERINDU oleh OPD Provinsi Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi berkelanjutan dengan OPD Provinsi Jawa Tengah untuk bisa memanfaatkan data yang tersedia di Aplikasi SIPERINDU sebagai dasar perencanaan pembangunan kependudukan.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** dengan **keluaran** Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) kepada 30 peserta di Desa Sengare, Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dari unsur Kelompok BKB, TPK, PKK, Pemerintah Desa Sengare, Kecamatan Talun, OPD KB Kabupaten Pekalongan; Sosialisasi Penurunan Angka Stunting dan AKI Melalui Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) kepada 25 peserta di Kabupaten Grobogan dari unsur kelompok BKR, Pembina BKR dari Kabupaten Grobogan, Perangkat Kecamatan Penawangan; Workshop Advokasi Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Kelompok Bina Keluarga Lansia

(BKL) kepada 25 peserta di Kabupaten Sragen dari unsur kelompok BKL dan Pembina BKL. **Outcome** kegiatan tersebut antara lain meningkatkan peran, kualitas dan motivasi kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta mencegah *new stunted*, menurunkan angka stunting di Jawa Tengah dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kelompok lanjut usia. **Manfaat** dari kegiatan yang dilakukan adalah kader mampu memberikan penyuluhan dan pendampingan dalam pencegahan dan penanganan stunting kepada keluarga Balita, remaja dan lansia serta meningkatkan derajat kesehatan perempuan, anak dan kelompok lansia. **Dampak** dari kegiatan ini adalah penurunan angka stunting dan peningkatan IPM di Jawa Tengah. **Permasalahan** saat ini adalah masih kurangnya kapasitas kader kelompok Tribina dalam mendorong keaktifan kelompok kegiatan sehingga peran serta masyarakat dalam kegiatan BKB, BKR dan BKL belum optimal. **Upaya** yang dilakukan yaitu advokasi bersama lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat serta keaktifan kelompok dan kader tribina.

- 2) **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** dengan **keluaran** Bimbingan Teknis dan Workshop UPPKA dengan jenis pelatihan yaitu pembuatan keripik tempe dan keripik kecimpring kepada 1 kelompok (20 orang) di Kabupaten Blora. **Outcome** dari kegiatan ini adalah kelompok tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi produktif di lingkungannya, sehingga mendorong peningkatan ketahanan keluarga. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah anggota kelompok bisa menjadi wirausaha yang mandiri. **Dampak** dari kegiatan diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dengan menggerakkan anggota keluarga akseptor melalui pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga akseptor miskin. **Permasalahan** yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran. **Upaya** yang dilakukan yaitu bekerjasama dengan CSR untuk memberikan bantuan pendampingan berkelanjutan serta promosi produk.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.97 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana	2	86,91%	2	100%	86,91%	Tinggi
2	Program Pengendalian Penduduk	1	100%	2	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1	100%	2	94,16%	97,08%	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Tahun 2026 yaitu:

1. Mengintegrasikan GDPK 5 Pilar ke dalam setiap jenjang dokumen perencanaan Kabupaten/Kota serta menyusun PJPK Jawa Tengah tahun 2025 – 2029.
2. Meningkatkan pengetahuan siswa terkait isu kependudukan dan pembangunan keluarga melalui Sekolah Siaga Kependudukan.
3. Meningkatkan kapasitas kader satyagraha sebagai upaya optimalisasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) pada Kecamatan Berdaya.
4. Peningkatan kapasitas Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Forum Genre;
5. Penurunan stunting melalui peningkatan kapasitas kader Tribina (BKB dan BKR).

3.4.2.9 Urusan Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas Urusan Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi: perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran; pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan 3-231atiha perhubungan di Provinsi Jawa Tengah berperan strategis dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah berbasis potensi. Untuk itu, penyelenggaraan 3-231atiha perhubungan dilakukan secara terencana, terprogram, dan terkoneksi melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penyediaan transportasi massal, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, pembangunan dan peningkatan terminal tipe B, serta fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan strategis yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Urusan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2025 adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan juara 1 Pembina terbaik dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Perhubungan didukung anggaran Rp211.929.889.000,00 untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

didukung alokasi anggaran Rp145.840.753.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,06%. Program ini memiliki 26 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD, indikator Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum telah tercapai (108,28%) dan indikator Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah telah tercapai (100,2%), sedangkan 23 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras yaitu Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan disebabkan karena belum terpenuhinya pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan. Upaya yang dilakukan yaitu telah berkolaborasi dengan kementerian perhubungan serta pemerintah kabupaten/kota untuk pemenuhan perlengkapan jalan. **Permasalahan** yang dihadapi dalam penyelenggaraan program pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah yaitu pengembangan angkutan umum yang layak dan berkelanjutan masih belum optimal, sehingga masyarakat cenderung bergantung pada kendaraan pribadi. Selain itu, pemasangan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu pengatur lalu lintas belum merata terutama di daerah rawan kecelakaan, sehingga mengurangi efektivitas dalam mendukung keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. **Upaya** yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut yaitu operasionalisasi angkutan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng), penanganan daerah rawan kecelakaan dan pemerataan pemasangan perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi. **Manfaat** penyelenggaraan program tersebut yaitu terpenuhinya keselamatan dan keamanan transportasi, memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah, peningkatan konektivitas dan pengembangan ekonomi pada kawasan pengembangan di Jawa Tengah, serta meningkatkan kualitas angkutan umum aglomerasi.

2. Program Pengelolaan Pelayaran didukung anggaran Rp774.340.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,22%. Program ini memiliki 2 indikator yang mendukung RKPD yaitu Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP dan Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD indikator Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP akan tercapai dan indikator Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai perlu upaya keras, hal tersebut disebabkan karena pengerjaannya

akan dilaksanakan dan selesai pada tahun 2026. Upaya yang dilakukan yaitu mengakselerasi pelaksanaan pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai. **Permasalahan** yang dihadapi dalam penyelenggaraan program ini yaitu masih kurangnya sarana prasarana pendukung konektivitas dan fasilitas keselamatan Transportasi Laut serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan peningkatan infrastruktur ASDP, pemenuhan fasilitas keselamatan, serta peningkatan pelayanan perizinan usaha angkutan laut. **Manfaat** penyelenggaraan program tersebut yaitu meningkatnya pelayanan jasa transportasi penyeberangan menuju Kawasan strategis Pariwisata dan Pulau terluar, memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi antar pulau, serta meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian didukung anggaran Rp1.074.842.000,00 terlaksana dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,71%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Terhadap target akhir RPD indikator Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan masih perlu upaya keras, hal tersebut karena belum terpenuhinya pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan di perlintasan sebidang yang bersinggungan dengan jalan Provinsi. Upaya yang dilakukan yaitu berkolaborasi dengan kementerian perhubungan untuk peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang bersinggungan dengan jalan Provinsi. **Permasalahan** yang dihadapi dalam penyelenggaraan program ini adalah masih adanya perlintasan sebidang yang belum memenuhi standar pelayanan teknis keselamatan. **Upaya** untuk mengatasi kendala tersebut yaitu pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang yang bersinggungan dengan jalan Provinsi. **Manfaat** penyelenggaraan program tersebut menunjang keselamatan perjalanan kereta api dan menurunkan kecelakaan di perlintasan sebidang jalan Provinsi.

Tabel 3.98 Capaian Kinerja Program Urusan Perhubungan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
1	Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0,58	0,56	96,55	0,56	0,56	100
2	Rasio pemanfaatan terminal	Angka	0,24	0,23	95,83	0,229	0,23	100,44
3	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0,55	0,52	94,55	0,52	0,52	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,26	0,25	96,15	0,25	0,25	100
5	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,03	0,02	66,67	0,02	0,02	100
6	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,22	0,21	95,45	0,21	0,21	100
7	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,25	0,24	96,00	0,24	0,24	100
8	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,19	0,18	94,74	0,18	0,18	100
9	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,23	0,22	95,65	0,22	0,22	100
10	Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0,532	0,51	95,86	0,486	0,51	104,93
11	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,59	0,4	67,80	0,4	0,4	100
12	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,93	0,95	97,89	0,95	0,95	100
13	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,92	0,94	97,87	0,94	0,94	100
14	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,93	0,95	97,89	0,95	0,95	100
15	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,92	0,94	97,87	0,94	0,94	100
16	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,93	0,95	97,89	0,95	0,95	100
17	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,92	0,95	96,84	0,95	0,95	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0,988	0,99	100,20	0,985	0,99	100,50
19	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,86	0,84	97,67	0,84	0,84	100
20	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,87	0,84	96,55	0,84	0,84	100
21	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,87	0,84	96,55	0,84	0,84	100
22	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,87	0,84	96,55	0,84	0,84	100
23	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,87	0,84	96,55	0,84	0,84	100
24	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,87	0,84	96,55	0,84	0,84	100
25	Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	55	53,5	97,27	53	53,5	100,94
26	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	69,36	75,1	108,28	67,34	75,1	111,52
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
1	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0,45	0,4	88,89	0,378	0,4	105,82
2	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0,6	0,4	66,67	0,4	0,4	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
1	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,36	0,08	22,22	0,08	0,08	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

didukung 12 kegiatan, antara lain :

- 1) **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi** dengan **keluaran** pemasangan 513 unit Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi yaitu

pengadaan dan pemasangan 100 unit rambu; 10 unit Rambu Penunjuk Pengarah Jalan (RPPJ); 1 unit Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan 402 unit Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ TA 2024 terkait Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya pemenuhan perlengkapan jalan dan meningkatnya keselamatan pengguna jalan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya keselamatan dan keamanan transportasi. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu belum semua ruas Jalan Provinsi terdapat jaringan listrik dan bahu jalan untuk pemasangan fasilitas perlengkapan jalan. **Upaya** untuk mengatasi hal tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyesuaian lokasi pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan kondisi lapangan dan koordinasi dengan PLN terkait pemenuhan jaringan listrik.

- 2) **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi** dengan **keluaran** rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di 6 lokasi yang tersebar di 6 BPSPP Wilayah Perhubungan. Peningkatan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan di Kalijambe Kec. Bener Kab. Purworejo yaitu pemasangan rambu peringatan berupa MMT terkait gunakan gigi rendah turunan panjang; pengadaan dan pemasangan *Warninglight* sebanyak 2 unit; pengadaan dan pemasangan rambu Daerah Rawan Kecelakaan sebanyak 20 unit; serta telah dilaksanakan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum, sesuai dengan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) yang disepakati oleh 5 Pilar, dalam Rencana Aksi Keselamatan (RAK) terdapat 86 lokasi Daerah Rawan Kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ TA 2024 terkait Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan; Rekomendasi terkait Kebutuhan mendesak untuk melakukan monitoring dan perbaikan seluruh ruas jalan, terutama daerah rawan kecelakaan yang menjadi wewenang provinsi secara khusus titik kecelakaan di Kalijambe – Purworejo segera untuk dibangun jalur penyelamat; dan Rekomendasi terkait Melakukan koodinasi dengan Kementrian PU dan Dinas PU Kabupaten kota yang memiliki ruas jalan yang rawan kecelakaan di wilayah Jawa Tengah untuk segera dilakukan perbaikan. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya meningkatnya keselamatan pengguna jalan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya keselamatan dan keamanan transportasi. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu terdapat tindak perusakan dan pencurian perlengkapan jalan di Daerah Rawan Kecelakaan. **Upaya** untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan

koordinasi dan pelaporan pada pihak berwajib di lokasi rawan kerusakan dan pencurian perlengkapan jalan di Daerah Rawan Kecelakaan.

- 3) **Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** beroperasinya 115 Unit bus Trans Jateng di 7 koridor kawasan aglomerasi perkotaan; penambahan ritase sebanyak 6.570 ritase/tahun; Peningkatan prasarana Trans Jateng yang semula rambu pemberhentian menjadi halte sebanyak 9 unit; penurunan tarif khusus Trans Jateng yang semula Rp.2.000,- untuk buruh, pelajar dan veteran menjadi Rp1.000,- dan penambahan kategori tarif khusus untuk penumpang lanjut usia dan penyandang disabilitas sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 mulai Tanggal 15 Mei 2025; Trans Jateng juga terus melakukan pengembangan aplikasi Si Anteng untuk memberi kemudahan kepada masyarakat guna mengetahui rute jadwal keberangkatan, dan lokasi halte dan tersedia fitur *cashless*. Layanan *Cashless* selain pada aplikasi Si Anteng juga dapat dilayani dengan QRIS menggunakan *M-Banking* dan dompet digital lainnya, *Tapping* dengan KMT bekerja sama dengan PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan *Tapping* bekerja sama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri) dan BCA; Selain itu dalam mendukung keberpihakan pengarusutamaan gender layanan Trans Jateng menerapkan pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, telah disediakan tempat duduk khusus untuk penyandang disabilitas, pada koridor solo-wonogiri juga telah disediakan 2 bus khusus yang terdapat tempat untuk pengguna kursi roda, disediakan halte untuk penyandang disabilitas, serta dalam aplikasi Si Anteng juga terdapat pelayanan untuk tuna netra. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ TA 2024 terkait Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan serta Rekomendasi terkait memastikan layanan Trans Jateng sesuai SPM Angkutan darat. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan angkutan umum. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu belum optimalnya fasilitas penunjang Trans Jateng sesuai jumlah kebutuhan pada setiap koridor. **Upaya** untuk mengatasi hal tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan optimalisasi dan penambahan jumlah Tempat Pemberhentian Bus (TPB) sebagai fasilitas penunjang layanan Trans Jateng.

2. **Program Pengelolaan Pelayaran** didukung 4 kegiatan, tiga diantaranya yaitu:

- 1) **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional** dengan **keluaran** terpenuhinya fasilitasi persyaratan perizinan pembangunan dan

pengoperasian pada 8 unit Pelabuhan Pengumpan Regional di Pelabuhan Batang, Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Juwana, Pelabuhan Tasik Agung, Pelabuhan Sluke, Pelabuhan Karimunjawa, dan Pelabuhan Legon Bajak. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya pelayanan publik di sektor transportasi laut. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi antar pulau. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu terdapat penyelenggara pelabuhan yang belum memiliki dokumen legalitas sesuai dengan ketentuan. **Upaya** untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan koordinasi terkait pengoperasian pelabuhan serta monitoring dan evaluasi fasilitas pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) **Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas** dengan **keluaran** Penerbitan 14 dokumen Izin Usaha Jasa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya legalitas dan kepastian usaha. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pengajuan izin Usaha Angkutan laut. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya kualitas layanan angkutan laut. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu ketidaksinkronan antara ketentuan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Permenhub No 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi dengan kebijakan Kemenhub terkait mekanisme pembukaan kantor cabang usaha jasa kepelabuhanan. **Upaya** melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan kementerian Perhubungan, serta menerapkan perizinan secara konsisten sesuai regulasi yang seragam secara nasional.
- 3) **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** terbangunnya dermaga sungai non permanen menjadi permanen yang terletak di Sungai Kuto, Dukuh Mundu, Kab. Batang. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ TA 2024 terkait Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu tersedianya pelabuhan sungai/danau yang layak, aman dan berizin. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya keselamatan dan keamanan penyeberangan angkutan sungai dan danau. **Dampak**

kegiatan tersebut yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu pembangunan titik dermaga di bantaran sungai tidak boleh melebihi bibir sungai sehingga kapal sulit untuk bersandar. **Upaya** untuk mengatasi hal tersebut dilakukan rekayasa konstruksi dermaga dengan menambahkan *rampdoor* atau sesek bambu.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian didukung kegiatan **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** dengan **keluaran** pemasangan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang yang bersinggungan dengan jalan provinsi pada 3 lokasi di Kab. Cilacap, dengan rincian: pemasangan Rambu Cross Andrea sebanyak 2 unit, Rambu Peringatan Gerak Arah Lalin sebanyak 2 unit dan Marka 575,45 m² di JPL 2; pemasangan Rambu Peringatan 1 sebanyak 2 unit, Rambu Peringatan 2 sebanyak 2 unit dan Marka 1654,6 m² di JPL 464B; pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum sebanyak 5 unit di JPL 446H. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya pemenuhan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang jalan Provinsi. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang jalan Provinsi. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu belum semua perlintasan sebidang dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang sesuai dengan peraturan. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemenuhan perlengkapan jalan sesuai peraturan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan Provinsi.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.99 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perhubungan

	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26	100	34	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Pelayaran	2	100	5	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Pembangunan lanjutan Terminal Tipe B Kutoarjo, Kab. Purworejo Tahap 6 sebagai upaya mendukung perekonomian daerah sekitar utamanya Kutoarjo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi Jawa Tengah, Serta Peningkatan Terminal Tipe B Purbalingga, Kab. Purbalingga guna peningkatan konektivitas antar wilayah pengembangan.
2. Operasional Pelayanan Trans Jateng di 7 koridor sebanyak 115 bus yaitu di koridor Semarang (Stasiun Tawang) – Kab. Semarang (Terminal Bawen), koridor Semarang (Terminal Mangkang) – Kab. Kendal (RTH Weleri), koridor Semarang (Terminal Penggaron) – Kab. Grobogan (Terminal Gubug), koridor Surakarta – Sragen (terminal Sumberlawang), koridor Solo – Wonogiri, koridor Purworejo (terminal Kutoarjo) – Kabupaten Magelang (Terminal Borobudur), koridor Kab. Banyumas (Terminal Bulupitu Purwokerto) – Kab. Purbalingga (Terminal Bukateja).
3. Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan berupa rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan yang tersebar di ruas jalan Provinsi, Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan utamanya pengadaan dan pemasangan rambu, warning light, dan LPJU di ruas jalan Provinsi serta pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang berupa rambu dan RPPJ.

3.4.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas Urusan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi layanan informasi 3-240atiha dengan menyebarkan informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Selain itu juga melakukan pengembangan dan pengelolaan e-Government, serta melakukan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK. Hal tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (*Smart Province*) dan Pemerintahan Digital.

Saat ini Pemerintahan Digital telah berkembang pesat dan semakin maju. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengembangkan berbagai inovasi digital pada tata kelola pemerintahan. Selain itu, berbagai fasilitas digital dalam hal pelayanan publik juga diberikan, salah satunya yaitu adanya bantuan Internet Gratis ke titik Desa Wisata, Desa Blankspot, hingga tempat transportasi umum. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan *Smart Province* dan Pemerintahan Digital.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2025 yaitu:

1. Peringkat 4 Badan Publik Terinformatif Tahun 2025 Tingkat Nasional pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Pusat;
2. Penghargaan *Public Impact Leadership* pada ajang Anugerah Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) 2025

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung anggaran Rp67.190.389.000,00 untuk melaksanakan 2 program, yaitu:

1. **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik** didukung anggaran Rp24.392.986.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,09%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik (113,72%) dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik (100%). Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masyarakat menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi dan menyampaikan aduan. Hal ini disebabkan karena belum meratanya penyebaran informasi serta kurangnya sosialisasi terkait kanal informasi dan mekanisme pengaduan yang tersedia. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain monitoring dan analisis berita sebagai bahan rekomendasi publikasi dan kebijakan, meningkatkan diseminasi informasi mengenai program pembangunan melalui berbagai kanal media, dan meningkatkan kerjasama dengan pelaku kehumasan dan kelompok informasi masyarakat agar sosialisasi dapat menyentuh masyarakat secara langsung. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada peningkatan akses informasi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan informasi pemerintah.
2. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** didukung anggaran Rp42.797.403.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,05%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (100%), dan tingkat ketercapaian tinggi antara lain Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi (100%). Terhadap target akhir RPD terdapat seluruh indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah masih banyaknya layanan aplikasi yang belum terintegrasi, sehingga setiap sistem berjalan secara terpisah, menimbulkan duplikasi data serta menyulitkan pertukaran informasi antar layanan. Kondisi ini mengakibatkan proses pelayanan menjadi kurang efisien, tidak konsisten, dan membutuhkan waktu lebih lama karena pengguna harus mengakses banyak aplikasi yang tidak saling terhubung. **Upaya** yang dilakukan meliputi penyusunan regulasi yang mendukung integrasi layanan secara menyeluruh, serta pengembangan portal layanan publik terpadu yang dirancang agar pengguna cukup menggunakan satu akun untuk mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meningkatnya keandalan ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan semakin besarnya dukungan infrastruktur dalam penyelenggaraan

pemerintahan digital sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang transparan dan efisien. Selain itu, terwujudnya kemudahan akses berbagai layanan publik melalui satu portal layanan, serta membantu akurasi pengambilan keputusan bagi Pimpinan daerah yang dapat memantau kinerja pemerintahan secara *real-time* dan akurat karena data terpusat dan tidak ganda.

Tabel 3.100 Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
1	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka	85	92,11	108,36	81	92,11	113,72
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	35	33	94,29	33	33	100
II	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
1	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	75	74	98,67	74	74	100
2	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	69	47	68,12	47	47	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

- 1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik** didukung kegiatan **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain monitoring pemberitaan di media massa dan media sosial untuk menghasilkan 270 dokumen Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum. Hasil dari monitoring ditindaklanjuti sebagai *highlight issue*, deskripsi pemberitaan; pembuatan 260 konten informasi publik di berbagai kanal media; dan kerjasama dengan media massa dan 91 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM KIM. **Outcome** kegiatan ini adalah publikasi yang terintegrasi berdasarkan Rekomendasi Analisis Berita dan disebarluaskan melalui pembuatan konten informasi publik serta kerjasama media massa dan KIM. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu tersampainya informasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai media kepada masyarakat. **Dampak** kegiatan ini yaitu menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya efektivitas komunikasi lintas platform, serta stabilitas opini publik terjaga. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu data informasi yang kurang kredibel dan berpotensi memunculkan berita negatif sehingga informasi tidak tersampaikan secara tepat dan cepat. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan memperkuat koordinasi dengan SKPD melalui pertemuan (FGD) dan

penunjukan PIC analisis berita dari masing-masing SKPD; kolaborasi dengan media dan konten kreator, meningkatkan kompetensi tim melalui pelatihan produksi konten; Menyediakan bahan informasi kebijakan pemerintah untuk disebarluaskan melalui media yang dimiliki oleh komunitas; menyelenggarakan lomba/festival yang dapat memacu KIM untuk bisa memproduksi bahan informasi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

- 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** didukung kegiatan **Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain pengembangan 14 aplikasi elektronik (E-Penatausahaan, E-Planning, E-budgeting, E-rembugan, E-controlling, E-RKO, E-SHS, E-Monev, E-Sakip, *Governor Planning Handbook* (GPH), Website Jatengprov, JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni), LaporGub, Dashboard Eksekutif); penyediaan 1 domain utama yaitu jatengprov.go.id dan subdomain yang aktif terutama untuk pelayanan publik, dengan didukung penyediaan layanan internet untuk OPD, jaringan metro kabupaten/kota, jaringan *Fiber Optic* (FO) mandiri, Layanan Internet Gratis; serta fasilitasi layanan pusat data 41 OPD berupa *Virtual Private Server* (VPS), *colocation* OPD/kabupaten-kota. **Outcome** dari kegiatan ini adalah terlayannya pelayanan publik yang lebih efektif; konektivitas dan infrastruktur digital yang stabil, aman, terstandar, dan efisien. **Manfaat** yang diperoleh mencakup peningkatan efisiensi operasional dan kemudahan monitoring kinerja melalui pemanfaatan data *real-time* bagi pemerintah, serta percepatan akses layanan publik. **Dampak** dari kegiatan ini adalah terwujudnya *Smart Governance* yang transparan dan akuntabel, serta meningkatnya Indeks SPBE Pemprov Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya proses pelayanan publik yang belum berbasis digital dan belum terintegrasi. **Upaya** yang dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik dan pengintegrasian sistem.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika dengan tingkat capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.101 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2	100	6	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan penyebaran informasi hasil pembangunan dan kepercayaan publik melalui publikasi di berbagai media berdasarkan hasil analisis media, kerjasama beragam media dan komunitas informasi masyarakat, serta studio *streaming* Jateng Online Radio;
2. Peningkatan SDM pengelola PPID dalam Program Rumah Rakyat untuk mewujudkan Jateng Ngopeni Nglakoni;
3. Fasilitasi internet gratis masyarakat di kecamatan berdaya, koperasi desa merah putih, desa blankspot, desa miskin ekstrim agar masyarakat melek digital, dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih baik dan cepat serta memahami langkah kerja nyata pemerintah;
4. Pengembangan Pusat Data melalui fasilitasi *cPanel, Domain, Hosting, email relay, penyelenggaraan preventive dan corrective maintenance* pada perangkat fasilitas (PAC, UPS, FSS, Panel, Tafo, Genset) serta dukungan PAC, UPS dan Panel untuk menambah kehandalan Pusat Data;
5. Pelaksanaan integrasi aplikasi layanan pemerintah yang dimulai dari pemetaan aplikasi, metode, arsitektur layanan, *help desk*, rapat koordinasi, serta peningkatan layanan publik berbasis digital melalui pengembangan *SuperApp* Jateng Ngopeni Nglakoni ;
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Digital sebagai kesinambungan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3.4.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah pada Tahun 2025 menunjukkan tren positif di tengah kondisi ketidakpastian dan dinamika global. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya omzet Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah sebesar 8.03% dan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,06%. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah melalui penguatan kelembagaan dan tata 3-244atitha koperasi, digitalisasi usaha, inovasi, diversifikasi produk, perluasan akses pasar serta peningkatan kualitas SDM.

Perkembangan tersebut juga didukung dengan Program Nasional yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan melalui koperasi modern berbasis gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi. Koperasi ini berupaya memperkuat ekonomi desa, mewujudkan ketahanan pangan, menekan kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja melalui berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, gerai sembako, apotek, klinik, hingga 3-244atithan3-244. Pada Tahun 2025 di Jawa Tengah telah terbentuk 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan masing-masing bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain: Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Rendahnya pemahaman masyarakat terkait koperasi sebagai sasaran usaha; Rendahnya rasio Koperasi Berkualitas, Citra Koperasi yang penuh masalah;

Keterbatasan akses pasar serta permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan Masih rendahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Top 25 dalam Outstanding Public Service Innovations Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap inovasi Hetero Space.
2. Apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tertinggi Nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia.
3. Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) untuk UPTD Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran Rp7.167.999.000,00 melalui program:

- 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** didukung anggaran Rp740.384.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 99,27% dengan indikator Persentase Koperasi Berkualitas (123%) yang mendukung RKPD. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain kurangnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundangan. **Upaya** yang dilakukan antara lain melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kepatuhan Koperasi dalam rangka peningkatan kualitas koperasi. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu meningkatkan kepatuhan serta rasio kesehatan koperasi guna mewujudkan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat.
- 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** didukung anggaran Rp1.149.690.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 98,63%. Program ini memiliki indikator Persentase Koperasi Provinsi Produktif (100,23%) yang mendukung RKPD. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM Koperasi dalam pengembangan produk serta akses pasar produk. **Upaya** yang dilakukan antara lain pendampingan restrukturisasi usaha Koperasi dan pemberdayaan aspek pemasaran dan produksi Koperasi. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu peningkatan kinerja usaha koperasi.
- 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** didukung anggaran Rp564.392.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 99,84%. Program ini memiliki indikator Persentase SDM Koperasi yang Berkualitas (115,83%) yang mendukung RKPD. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain pengurus/pengelola Koperasi belum memahami regulasi, prinsip-prinsip

perkoperasian dan manajemen pengelolaan Koperasi. **Upaya** yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas SDM pengurus/pengelola Koperasi. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Pengelola/Pengurus Koperasi dalam meningkatkan usaha koperasi serta meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta masyarakat.

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), didukung anggaran Rp2.645.647.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 98,96%. Program ini memiliki 2 (dua) indikator yang mendukung RKPD yaitu persentase usaha mikro mandiri (101,47%); dan persentase pertumbuhan Wirausaha Baru (343,12%) dikarenakan adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga dapat meningkatkan jumlah peserta kegiatan. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara wirausaha baru dan *startup* kesulitan dalam mengembangkan usahanya; keterbatasan akses pembiayaan UMKM; **Upaya** yang dilakukan antara lain pendampingan wirausaha baru/*start-up* melalui peningkatan pengetahuan serta keterampilan kegiatan di *Hetero Space*; Peningkatan Akses Pembiayaan melalui literasi keuangan. **Manfaat** program ini yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan.

5. Program Pengembangan UMKM, didukung anggaran Rp2.067.886.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,58%. Program ini memiliki indikator Persentase UMKM Siap Bermitra (100,13%) yang mendukung RKPD. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap adaptif UMKM dalam pengembangan usaha. **Upaya** yang dilakukan antara lain peningkatan akses pasar UMKM; serta peningkatan kualitas dan kapasitas produksi. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu peningkatan daya saing UMKM.

Tabel 3.102 Capaian Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
1	Persentase koperasi berkualitas	%	27,28	32,89	120,56	26,74	32,89	123,00
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
1	Persentase koperasi provinsi produktif	%	48,90	48,64	99,47	48,53	48,64	100,23
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
1	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	13,00	13,32	102,46	11,50	13,32	115,83
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	27,00	85,78	317,70	25,00	85,78	343,12
2	Persentase usaha mikro mandiri	%	82,90	83,51	100,74	82,30	53,51	101,47
V	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
1	Persentase UMKM siap bermitra	%	25,05	23,11	92,26	23,08	23,11	100,13

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi didukung 2 kegiatan yaitu :

- 1) **Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah koperasi** dengan **keluaran** penguatan tata kelola kelembagaan 150 Unit Koperasi melalui antara lain bimbingan Teknis peningkatan kepatuhan bagi 60 orang pengurus/pengelola Koperasi; pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan bagi 46 unit Koperasi; pemeriksaan 120 Koperasi sektor riil; serta pemantauan koperasi sebanyak 34 kali terhadap 23 koperasi. **Outcome** kegiatan adalah peningkatan kapasitas pengurus/pengelola tentang prinsip-prinsip perkoperasian dan tata kelola koperasi serta manajemen keuangan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu pengurus dan pengelola koperasi dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kinerja usaha koperasi, serta meningkatnya kesejahteraan anggota. **Permasalahan** saat ini yaitu hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi mandiri belum seluruhnya mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. **Upaya** yang dilakukan yaitu pemeriksaan oleh tim pemeriksa kesehatan koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi mandiri.
- 2) **Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi** dengan **keluaran** pemeriksaan dan pengawasan 280 koperasi melalui: pendampingan pemeriksaan Kesehatan Koperasi Mandiri bagi 235 koperasi; Uji kelayakan Pengurus dan Pengawasan Koperasi bagi 300 Orang pengurus/Pengelola dari 50 Koperasi; dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi bagi 45 Koperasi. **Outcome** kegiatan ini penetapan

tingkat kesehatan Koperasi, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. **Manfaat** dari kegiatan tersebut memastikan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan keterbukaan manajemen koperasi kepada anggota, serta memberikan dasar pengambilan keputusan bagi pengurus/pengelola dalam merencanakan intervensi dan perbaikan. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatkan kepercayaan anggota, calon anggota, masyarakat umum untuk berpartisipasi atau bertransaksi dengan koperasi, serta meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih terdapat koperasi yang belum dapat melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri. **Upaya** yang dilakukan yaitu pendampingan penilaian kesehatan mandiri dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi terhadap Pemeriksaan Kesehatan.

2. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** didukung dengan kegiatan **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 223 unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha melalui: Fasilitasi Pameran sebanyak 2 kali pameran bagi 48 Koperasi; Pemberdayaan Aspek Pemasaran Koperasi bagi 120 Pengurus/Pengelola Koperasi; Pemberdayaan Aspek Produksi Koperasi bagi 80 Pengurus/Pengelola Koperasi; Pendampingan Restrukturisasi Usaha bagi 5 Koperasi, serta 170 koperasi Provinsi yang diberdayakan melalui: Peningkatan Kualitas Manajemen Kelembagaan Koperasi bagi 200 Pengurus/Pengelola Koperasi; Peningkatan Kualitas Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi bagi 100 Pengurus/Pengelola Koperasi; Peningkatan Kualitas Rapat Anggota Koperasi bagi 100 Pengurus/Pengelola Koperasi; Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) bagi 35 NPAK. Kegiatan tersebut merupakan rekomendasi DPRD atas rekomendasi memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). **Outcome** kegiatan ini antara lain peningkatan kapasitas pengurus, pengelola dan anggota koperasi dalam penguatan kelembagaan dan usaha koperasi. **Manfaat** kegiatan ini meningkatkan partisipasi anggota, peningkatan kualitas layanan, serta meningkatnya akses pasar dan kualitas produk. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya daya saing usaha koperasi, serta meningkatnya kesejahteraan anggota. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih terdapat koperasi provinsi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA). **Upaya** yang dilakukan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi secara langsung dengan Pengurus Koperasi dengan melibatkan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

- 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** didukung kegiatan **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 250 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian melalui: Pelatihan perkoperasian dasar bagi 100 Pengurus/Pengelola Koperasi; Pelatihan Manajerial Koperasi bagi 75 Pengurus/Pengelola Koperasi; Pelatihan Kompetensi bagi 50 Pengawas Koperasi dan 25 Manajer Koperasi. Kegiatan tersebut merupakan rekomendasi DPRD untuk memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). **Outcome** kegiatan ini meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan SDM pengurus/pengelola/pengawas Koperasi. **Manfaat** kegiatan ini meningkatnya efektivitas kerja dan profesionalitas dalam pengelolaan koperasi, serta meningkatnya kinerja keuangan dan usaha koperasi. **Dampak** kegiatan ini peningkatan produktivitas koperasi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan anggota. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terbatasnya koperasi penerima manfaat pelatihan dikarenakan peserta beberapa pelatihan berasal dari koperasi sama. **Upaya** yang dilakukan sosialisasi pendaftaran pelatihan melalui sosial media, dan dinas yang membidangi koperasi UKM di Kabupaten/Kota Jawa Tengah, selain itu juga melakukan seleksi untuk pendaftar peserta pelatihan.
- 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)** didukung kegiatan **Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan** dengan **keluaran** sebagai berikut:
- 100 UKM difasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha melalui fasilitasi Sertifikasi Halal, 1.240 usaha memperoleh fasilitasi *short course* melalui kegiatan Juguran (jagongan golet ilmu lan seduluran) dan Ngucing (ngobrol usaha mancing ilmu), serta layanan pendampingan oleh Konsultan UMKM Center di Kota Semarang dan PLUT KUMKM Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas bagi 732 UMKM. Kegiatan tersebut merupakan rekomendasi DPRD atas rekomendasi memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah.
 - 300 UMKM difasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan melalui peningkatan akses pembiayaan literasi keuangan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD untuk percepatan indikator non keuangan melalui fasilitasi UMKM Mikro, Ultra Mikro dengan kegiatan *coaching mentoring*.
 - Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan bagi 240 orang, pelatihan bagi 1.780 orang pemilik usaha yang terbagi menjadi 75 orang peserta pelatihan ketrampilan usaha produktif, 125 orang peserta pelatihan manajerial, dan 1.580 peserta melalui pelatihan daring Akademi Balatkop dan e-learning. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas

rekomendasi DPRD berupa perlunya Pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan melalui Bantuan Modal dan Pendampingan, Pelatihan Kewirausahaan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Outcome kegiatan ini meningkatnya jiwa kewirausahaan, penguatan usaha UKM melalui peningkatan kualitas SDM UKM, peningkatan akses pembiayaan, dan sertifikasi usaha UKM. **Manfaat** kegiatan ini meningkatnya kepercayaan produk UMKM, peningkatan akses pembiayaan UMKM. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan di daerah, serta meningkatkan perekonomian daerah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu UMKM kesulitan dalam mengembangkan usahanya dan mengimplementasikan hasil pelatihan. **Upaya** yang dilakukan melakukan Pendampingan oleh konsultan di UMKM Center di Kota Semarang dan PLUT KUMKM Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.

- 5. Program Pengembangan UMKM** didukung kegiatan **Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah** dengan **keluaran** 385 UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi melalui bimbingan teknis diversifikasi produk UMKM bagi 175 UKM, Sosialisasi Keamanan Pangan dan Ijin Edar Produk bagi 180 UKM, Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk UMKM Berkebutuhan Khusus bagi 30 UKM; dan 305 usaha yang terfasilitasi pengembangan usaha melalui Bimbingan Teknis Marketing Online Produk UKM bagi 50 UMKM, Kontak Bisnis Skala Regional bagi 91 orang, Fasilitas Pameran bagi 58 UMKM, dan Fasilitas Promosi bagi 106 UMKM di Ruang Infrastruktur Publik di Bandara Ahmad Yani Kota Semarang. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD untuk memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). **Outcome** kegiatan ini peningkatan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran, serta terfasilitasinya perluasan akses pasar. **Manfaat** kegiatan ini meningkatnya omzet UMKM, meningkatnya daya saing produk. **Dampak** kegiatan ini yaitu pertumbuhan bisnis berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu UMKM yang mendapat pembinaan dalam pengembangan produk kesulitan dalam memasarkan produknya. **Upaya** yang dilakukan melakukan Pendampingan oleh konsultan UMKM Center Jawa Tengah di Kota Semarang dan PLUT KUMKM Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, serta memberikan dukungan peningkatan akses pasar melalui fasilitasi promosi ataupun pameran.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.103 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan UMKM	2	100	3	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan UMKM	1	82,89	1	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
2. Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren.
3. Pengembangan Kewirausahaan dan Start-up bisnis.
4. Layanan Pendampingan UMKM di UMKM Center Jawa Tengah dan PLUT KUMKM Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.

3.4.2.12 Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah melakukan berbagai kebijakan dan inovasi guna meningkatkan realisasi penanaman modal di Jawa Tengah. Peningkatan realisasi penanaman modal tentunya didukung oleh iklim investasi yang kondusif dan layanan perizinan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel. Guna mewujudkan hal tersebut, DPMPTSP mengoptimalkan pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui pemberian insentif dan kemudahan berusaha, promosi investasi, serta layanan pendampingan perizinan baik secara *online* maupun *offline*.

Kinerja DPMPTSP dihadapkan pada isu yang berkembang antara lain belum optimalnya pertumbuhan dan persebaran realisasi penanaman modal, adanya penyesuaian regulasi terkait pelayanan perizinan berusaha, kurang optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku Usaha Menengah Kecil (UMK) dan pencatatan realisasi investasinya, serta kurangnya *link and match* antara kebutuhan (*demand side*) dan ketersediaan (*supply side*) tenaga kerja.

Di sisi lain, terdapat rekomendasi DPRD pada urusan penanaman modal yaitu agar DPMPTSP dapat mendorong pertumbuhan penanaman modal; *link and match* pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); peningkatan investasi dan industri melalui pembangunan kawasan industri, insentif bagi investor, dan mendorong sektor padat karya; serta penguatan inovasi pelayanan publik yang modern dan inovatif berbasis digital pada seluruh aspek pembangunan.

Beberapa rekomendasi diatas telah ditindaklanjuti, yaitu telah tersusunnya kajian IPRO pada sektor peternakan, fasilitasi pemberian insentif kepada 5 pemohon dengan nilai insentif sejumlah Rp920.251.500,00 yang diajukan melalui aplikasi *Central Java Investment Platform* (CJIP) pada menu Permohonan Insentif, menyelenggarakan 3 kali *Central Java Investment Business Forum* (CJIBF) dengan menghasilkan 57 kepeminatan yang dilaksanakan di Semarang dan Jakarta, melakukan fasilitasi perizinan dan penanaman modal melalui 2 kali kegiatan Pekan layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (PENA SIJOHAN) yang dilaksanakan di Kota Magelang dan Kabupaten Kudus, pelaksanaan klinik pelayanan perizinan di 6 Kabupaten/Kota, optimalisasi pelayanan di gerai Mal Pelayanan Publik (MPP), menyelenggarakan bimtek pengawasan, pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan perizinan *Online Single Submission Risked By Approach* (OSS RBA) dan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG), serta mengembangkan integrasi antara CJIP pada fitur SIRUSA dengan Dapodik dan Ayo Kerjo (SIDIKERJO) terkait *link and match* kebutuhan tenaga kerja di Jawa Tengah.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp3.335.080.000,00 untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** didukung anggaran Rp350.519.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,59%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD yaitu Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%). Terhadap target akhir RPD indikator kinerja tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain belum meratanya potensi investasi di Jawa Tengah yang meliputi infrastruktur, tenaga kerja, ketersediaan lahan dan regulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). **Upaya** yang dilakukan antara lain menyusun kajian yang memiliki peluang untuk dipromosikan berupa kajian *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) terutama sektor unggulan dan mendorong penerbitan Perda/Perkada RDTR Kabupaten/Kota. **Manfaat** program ini yaitu meningkatnya daya saing dan iklim investasi, mendorong peningkatan realisasi investasi, serta meningkatkan citra positif Jawa Tengah.
2. **Program Promosi Penanaman Modal** didukung anggaran Rp1.091.991.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,34%.

Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan (112,50%) dan Persentase pengawalan kepemilikan PMA/PMDN (106,61%). Terhadap target akhir RPD kedua indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain ada kesenjangan antara Usaha Menengah Besar (UMB) dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) terkait keberlanjutan penyediaan barang, dan beberapa calon investor yang akan berinvestasi di Jawa Tengah sudah memiliki tujuan baik sektor maupun lokasi investasinya. **Upaya** yang dilakukan yaitu mendorong kepatuhan kewajiban bermitra bagi UMB dan terus mendorong promosi potensi investasi kepada calon investor melalui *business meeting*, pemanfaatan aplikasi CJIP dan pameran investasi. **Manfaat** penyelenggaraan program ini antara lain menumbuhkembangkan investasi sektor UMK melalui kemitraan usaha dan meningkatnya penyebaran informasi positif Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi yang tepat kepada calon investor.

3. **Program Pelayanan Penanaman Modal** didukung anggaran Rp1.104.042.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,68%. Program ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan (109,46%); Persentase pengaduan masyarakat (100%) dan Persentase pemenuhan standar pelayanan (100%). Terhadap target akhir RPD, seluruh indikator kinerja tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya dinamika perubahan regulasi dan kurangnya literasi pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. **Upaya** yang dilakukan yaitu sosialisasi dan diseminasi terkait regulasi terbaru, melakukan asistensi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan penyelesaian layanan pengaduan. **Manfaat** penyelenggaraan program ini yaitu meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi terbaru, terpenuhinya legalitas perizinan pelaku usaha, dan terselesaikannya masalah pengaduan.
4. **Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal** didukung alokasi anggaran Rp365.326.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,96%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD yaitu Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui dengan tingkat ketercapaian tinggi (513,55%). Capaian kinerja yang tinggi tersebut disebabkan karena meningkatnya minat pelaku usaha dalam mendirikan usaha di Jawa Tengah terbukti dengan bertambahnya jumlah proyek dari tahun 2024 ke tahun 2025 yang semula sejumlah 65.815 menjadi 105.078 proyek yang didominasi industri barang dari kulit dan alas kaki, serta adanya kepatuhan pelaku usaha terhadap kegiatan penanaman modal, sehingga kinerja program tersebut dapat tercapai sesuai target akhir RPD. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain belum seluruh pelaku usaha memahami kewajiban pelaporan LKPM. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan pendampingan atas kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan LKPM baik

secara langsung maupun tidak langsung. **Manfaat** penyelenggaraan Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal yaitu meningkatnya realisasi investasi di Jawa Tengah.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

didukung alokasi anggaran Rp423.202.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,26%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD yaitu Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (150,50%). Tingginya tingkat ketercapaian indikator tersebut disebabkan oleh meningkatnya antusiasme pengaksesan berbagai kanal sistem informasi penanaman modal dan perizinan. Terhadap target akhir RPD Indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain belum adanya SDM yang memiliki skill khusus terkait penataan jaringan dan mitigasi keamanan sistem serta masih belum optimalnya penggunaan sistem oleh penerima pelayanan DPMPTSP. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga terkait penataan jaringan dan mitigasi keamanan sistem, serta optimalisasi penggunaan sistem perizinan melalui pendampingan kepada penerima layanan baik secara langsung maupun *online*. **Manfaat** penyelenggaraan program ini yaitu meningkatnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang penanaman modal dan perizinan di Jawa Tengah serta meningkatnya keterbukaan informasi publik dan pengawasan oleh masyarakat.

Tabel 3.104 Capaian Kinerja Program Urusan Penanaman Modal

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PERENCANAAN PENANAMAN MODAL							
1	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%	50	50	100	50	50	100
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
1	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%	50	56,25	112,50	50	56,25	112,50
2	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	%	75	71,43	95,24	67	71,43	106,61
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
1	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	92	99,61	108,27	91	99,61	109,46
2	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase standar pelayanan sesuai ISO	%	100	100	100	100	100	100
IV	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL							
1	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	25	112,98	451,92	22	112,98	513,55
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
1	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	15,05	150,50	10	15,05	150,50

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** dengan **keluaran** dokumen kebijakan penanaman modal yang dihasilkan melalui rapat koordinasi penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan perencanaan penanaman modal. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 yakni memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah dengan mendorong pertumbuhan penanaman modal, serta peningkatan investasi dan industri melalui pengembangan Kawasan industri, insentif bagi investor dan mendorong sektor padat karya. **Outcome** kegiatan tersebut berupa dokumen kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Jawa Tengah Tahun 2025-2045. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memberikan pedoman kebijakan kegiatan penanaman modal di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini yaitu persebaran penanaman modal secara inklusif di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum meratanya persebaran penanaman modal dan pelaksanaan pemberian insentif di Kabupaten/Kota. **Upaya** yang dilakukan antara lain mendorong Kabupaten/Kota untuk menyusun RDTR dan melaksanakan pemberian insentif di Kabupaten/Kota.
- 2) **Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi** dengan **keluaran** dokumen kajian *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) pengembangan potensi kewilayahan penanaman modal yang dihasilkan melalui 4 kali FGD persiapan dan 2 kali FGD ekspose hasil penyusunan kajian IPRO. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 yakni memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah dengan mendorong pertumbuhan penanaman modal.

Outcome kegiatan tersebut berupa kajian IPRO pada sektor unggulan peternakan di Jawa Tengah yang dihasilkan melalui proses pembahasan melalui FGD yang melibatkan *stakeholder* terkait sebagai masukan penyusunan kajian. **Manfaat** kegiatan ini yaitu menghasilkan kajian yang dapat dipromosikan dalam rangka menarik minat investor atas potensi yang tersedia di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini yaitu menghasilkan realisasi penanaman modal pada sektor yang telah dikaji potensinya. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain penentuan lahan yang potensial untuk penyusunan IPRO sektor peternakan sapi perah, dan terdapat perbedaan data dari dinas teknis baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan data dari BPS. **Upaya** yang dilakukan antara lain mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia dan mengembangkan skema pembiayaan investasi melalui sharing profit, serta koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan bersama dengan *stakeholder* terkait secara simultan dalam mendapatkan data yang akan digunakan guna penyelesaian kajian tepat waktu dan dapat dipromosikan melalui media yang tersedia.

- 2. Program Promosi Penanaman Modal** didukung kegiatan **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** dengan **keluaran** temu kemitraan antara Usaha Menengah Besar (UMB) dengan Usaha Menengah Kecil (UMK) antara lain PT. Anugerah Jaya Maju Abadi dengan CV. Mamasoul Indonesia, PT. Inko Java dengan KUD Klepu, Transmart Solo Paragon dengan Bunga Bakung dan lain sebagainya yang menghasilkan 9 kemitraan; *Letter of Intent* (LoI) kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan antara lain PT. Wadao Creative Art Indonesia pada bidang industri pembuatan bingkai, New Era pada bidang industri alas kaki, Zheijang Fashioning Knitting Clothing pada bidang industri pakaian, PT. Indi Hefu Karya pada bidang industri alat lukis, Spin Master pada bidang manufaktur, North China Power Engineering Co., Ltd pada bidang renewable energy, PT. Eilong pada bidang industri makanan, PT. Nindya Karya pada bidang RDF, SPAM dan green hospital, SCG Indonesia pada bidang RDF project dan lain sebagainya yang menghasilkan 89 LoI kepeminatan; dan pengawalan kepeminatan PMA/PMDN antara lain oleh PT. Sailun Manufaktur Indonesia pada bidang industri ban, PT. Yamani Asian Pacific pada bidang industri barang dari kulit, PT. VKTR Sakti Industries pada bidang industri kendaraan bermotor, PT. Grasia Graha Utama pada bidang wisata agro, PT. Wonogiri Sentosa Garment pada bidang industri pakaian jadi dari tekstil, PT. Platinum Cineplex pada bidang bioskop, PT. Evertch International Group pada bidang industri alas kaki, dan lain sebagainya yang menghasilkan 35 laporan pengawalan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa dokumen kemitraan antara UMB dan UMK, LoI/kepeminatan investasi pelaku usaha baik PMA maupun PMDN, dan laporan pengawalan terhadap kepeminatan investasi tersebut. **Manfaat** kegiatan ini antara lain meningkatkan kontribusi UMK terhadap *supply chain* UMB dan meningkatkan realisasi investasi. **Dampak** kegiatan ini antara lain meningkatnya peran UMK terhadap keberlangsungan usaha UMB dan meningkatnya realisasi investasi

di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain pemenuhan bahan baku yang diperlukan UMB masih ditentukan oleh *buyer* sehingga UMKM lokal sulit bersaing, investor yang akan berinvestasi di Jawa Tengah sudah memiliki *plan business* tertentu, sehingga kurang tertarik terhadap proyek IPRO yang telah ditawarkan. **Upaya** yang dilakukan antara lain melakukan pendataan kebutuhan UMB dan UMK yang bersedia untuk bermitra untuk selanjutnya dilakukan temu kemitraan dan mengefektifkan media daring dalam pelaksanaan promosi investasi dengan kolaborasi dengan stakeholder terkait.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** dengan **keluaran** penerbitan 3.090 dokumen perizinan dan non perizinan yang terdiri dari 1.088 dokumen bidang kesra dan lingkungan, 1.218 dokumen bidang pembangunan, dan 784 dokumen bidang perekonomian. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 yakni memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah dengan mendorong pertumbuhan penanaman modal yang salah satunya melalui pelaksanaan klinik pendampingan layanan perizinan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa dokumen perizinan dan non perizinan yang terbit. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha melalui penerbitan dokumen legalitas perizinan berusaha. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan standar usaha. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain terkait ketidaksinkronan antara regulasi dengan aplikasi OSS RBA dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) per sektor belum seluruhnya diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). **Upaya** yang dilakukan yakni berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI terkait sinkronisasi sistem dan K/L penerbit NSPK terkait mekanisme ajuan perizinan berusaha yang baru.
- 2) **Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** tindaklanjut terhadap 82 aduan yang masuk; tindaklanjut terhadap 5 rekomendasi hasil pelaksanaan *International Standart Organization* (ISO) terkait pelayanan perizinan; dan analisis pengembangan sarana prasarana layanan yakni pada *front office* dan 6 gerai pelayanan perizinan yaitu di Kabupaten (Batang, Banyumas, dan Pati) serta Kota (Tegal, Magelang, dan Surakarta). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 yakni memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah dengan mendorong pertumbuhan penanaman modal melalui pelaksanaan Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (PENA SIJOHAN). **Outcome** kegiatan tersebut berupa pelayanan informasi perizinan dan penyelesaian pengaduan, serta pengembangan sarana prasarana layanan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memberikan fasilitasi pelayanan perizinan dan pengaduan yang memadai bagi pelaku usaha di Jawa Tengah. **Dampak**

kegiatan ini yaitu meningkatkan kualitas layanan perizinan dan antusiasme pelaku usaha dalam pengurusan legalitas perizinan berusaha. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain ketidaksinkronan antara regulasi dengan aplikasi perizinan (OSS RBA dan SIAP Jateng) dan NSPK per sektor belum seluruhnya diterbitkan oleh K/L, kurang lengkapnya informasi/dokumen pendukung pengaduan dan masih kurangnya eksplorasi inovasi peningkatan pelayanan perizinan. **Upaya** yang dilakukan antara lain berkoordinasi dengan OPD teknis terkait standar pelayanan yang selanjutnya akan menghasilkan penyesuaian SOP, meningkatkan komunikasi dengan pengadu maupun pihak-pihak terkait yang ditindaklanjuti dengan melakukan tinjauan lapangan, dan melakukan kajian sebagai upaya menggali inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. **Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal** didukung kegiatan **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** dengan **keluaran** pendampingan pengisian 105.078 unit LKPM yang telah disetujui BKPM RI; pembinaan ketentuan pelaksanaan penanaman modal terhadap 188 pelaku usaha dan/atau aparatur; pengawasan terhadap 212 proyek; serta fasilitasi permasalahan penanaman modal sebanyak 8 kali kegiatan. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 yakni memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah dengan mendorong pertumbuhan penanaman modal salah satunya melalui pelaksanaan Bimtek pengawasan dan OSS serta pendampingan dan pemantauan pengisian LKPM. **Outcome** kegiatan tersebut meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan kewajiban kegiatan penanaman modal. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya kewajiban pelaku usaha dalam melakukan pelaporan LKPM dan terfasilitasinya penyelesaian permasalahan penanaman modal. **Dampak** kegiatan ini yakni meningkatnya capaian realisasi investasi di Jawa Tengah dan tingginya antusiasme pelaku usaha terhadap kewajiban kegiatan penanaman modal. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain pelaku usaha belum memahami aturan terkait kewajiban pelaporan LKPM, kurangnya kualitas laporan LKPM, dan perlunya adaptasi pelaku usaha terhadap adanya perubahan regulasi. **Upaya** yang dilakukan antara lain melakukan pengawasan penanaman modal, penyampaian surat pemberitahuan terkait kewajiban LKPM kepada PMA/PMDN, memberikan pendampingan dan bimbingan teknis pelaporan LKPM yang sesuai dengan ketentuan, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** didukung kegiatan **Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** pengembangan fitur Sistem Informasi Perusahaan, Pendidikan dan Ayo Kerjo (SIDIKERJO) yakni sistem terintegrasi antara CJIP, DAPODIK, dan Ayo Kerjo dengan tujuan untuk mendapatkan data realisasi kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan di Jawa Tengah, data realisasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah, dan data

potensi kelulusan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Integrasi sistem SIDIKERJO merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja khususnya lulusan SMK di Jawa Tengah pada setiap proyek yang ditawarkan pada CJIP melalui fitur SIRUSA; dan publikasi 4 dokumen rilis penanaman modal yang disampaikan ke publik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 yakni memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah dengan mendorong pertumbuhan penanaman modal; *Link and Match* Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); serta dalam Peningkatan Investasi dan Industri melalui Pembangunan Kawasan Industri, Insentif bagi Investor, dan Mendorong Sektor Padat Karya. **Outcome** kegiatan tersebut berupa tersedianya data penanaman modal di Jawa Tengah dan pengembangan sistem terintegrasi antara kebutuhan dunia usaha dengan dunia industri. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tersedianya informasi kepada masyarakat dan tersedianya sarana/media yang memudahkan segala proses perizinan dan penanaman modal berupa pengembangan sistem teknologi. **Dampak** kegiatan ini yaitu mudahnya akses informasi perizinan dan penanaman modal di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain kendala dalam proses integrasi yang perlu pencocokan data antara Dapodik, Naker, dan PTSP. **Upaya** yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi terkait integrasi data dengan Disnaker dan Disdik serta melakukan penyesuaian form pada aplikasi Ayo Kerjo agar dapat terintegrasi dengan CJIP.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada urusan Penanaman Modal dengan tingkat kesesuaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.105 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Penanaman Modal

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	100%	2	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Promosi Penanaman Modal	2	100%	3	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Pelayanan Penanaman Modal	3	100%	6	100%	100%	Sangat Tinggi
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	100%	4	100%	100%	Sangat Tinggi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	100%	2	100%	100%	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Pelaksanaan layanan perizinan berusaha melalui kegiatan Pekan layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (PENA SIJOHAN), layanan perizinan tematik, dan pendampingan penerbitan NIB pelaku usaha di desa kategori miskin;
2. Pencatatan data realisasi investasi sektor mikro di 35 Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan business forum;
4. Perwujudan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

3.4.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Pemuda merupakan aset dan agen perubahan bangsa, sementara olahraga menjadi sarana penting dalam membangun 3-260atihan3-260a, disiplin, sportivitas, serta semangat kebersamaan masyarakat.

Melalui pembinaan kepemudaan yang berkelanjutan dan pengembangan olahraga yang terarah, urusan pemuda dan olahraga berkontribusi dalam menciptakan generasi produktif, inovatif, dan berprestasi. Selain itu, 3-260atiha ini turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan persatuan dan kesatuan, serta pencapaian visi pembangunan jangka panjang Indonesia, khususnya menuju Indonesia Emas 2045.

Tindaklanjut Rekomendasi pada tahun 2025 terkait Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yang masih rendah pada nilai kebugaran dan literasi. Upaya yang dilakukan melalui pembudayaan olahraga masyarakat sampai ke tingkat desa yang berkerjasama dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan dan fasilitasi *Event* Olahraga Masyarakat *Sport Tourism* dan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Desain Olahraga Daerah. Pengembangan kewirausahaan pemuda tahun 2025 dilaksanakan melalui program zillenial yaitu program pemberian kartu zillenial untuk pemuda umur 16-30 tahun yg bertujuan untuk memberikan kewirausahaan, pelatihan ketrampilan, peningkatan kompetensi dan peluang komunitas yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Prestasi yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan pada Tahun 2025 di tingkat nasional dan internasional antara lain:

1. Juara Umum II POMNAS XIX Tahun 2025 Di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan tanggal 19 s.d 27 September 2025, memperoleh Medali Atlet Jawa Tengah sebanyak 61 emas, 54 Perak, dan 46 Perunggu yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI).
2. Peringkat V PORNAS KORPRI XVII Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 5 s.d 11 Oktober 2025, Kontingen Provinsi Jawa Tengah memperoleh Medali sebanyak 7 Emas, 8 Perak, dan 13 Perunggu yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (BAPOR KORPRI).
3. Juara Umum II POPNAS XIX Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 19 s.d 27 september 2025, Kontingen Provinsi Jawa Tengah memperoleh Medali sebanyak 58 Emas, 39 Perak, dan 56 Perunggu yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI
4. Juara Umum II PEPARPENAS XI Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 1 s.d 10 November 2025, Kontingen Provinsi Jawa Tengah memperoleh Medali sebanyak 17 Emas, 17 Perak, dan 17 Perunggu yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI
5. Juara I Nasional Pemuda Pelopor Desa pada kategori bidang Ekonomi Digital atas nama Muhammad Burhanudin yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

1. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** didukung anggaran Rp12.326093,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,85%. Program ini didukung 2 indikator antara lain Jumlah Pemuda aktif dalam berorganisasi capaian terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai dan Jumlah wirausaha muda mandiri capaian terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai Permasalahan yang dihadapi **minimnya partisipasi dan keaktifan anggota dan kurangnya pengalaman dan pengetahuan bisnis**. Upaya mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan **meningkatkan kualitas kepemimpinan**, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan bisnis melalui **program pelatihan dan pendampingan (mentoring) yang intensif**. Manfaat pelaksanaan program ini adalah peningkatan daya saing pemuda, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, dengan memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
2. **Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan** didukung anggaran Rp278.462.120,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,52%. Program ini mempunyai 3 indikator antara lain Jumlah masyarakat bugar, Persentase peningkatan perolehan medali dan Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi capaian terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan literasi tentang kebugaran masyarakat dan **manajemen dan tata kelola organisasi olahraga** yang belum optimal, minimnya **kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) olahraga serta keterbatasan sarana dan prasarana**. Upaya mengatasi permasalahan ini dilakukan melalui peningkatan **kesadaran dan edukasi** secara massif, **mendorong perubahan gaya hidup** secara praktis dan Upaya yang ditempuh untuk mengatasi

permasalahan kompleks dalam peningkatan prestasi olahraga di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan terstruktur, yang saat ini dirangkum dalam inisiatif strategis bernama **Desain Olahraga Daerah (DOD)** Manfaat pelaksanaan program ini adalah merangsang pertumbuhan industri olahraga, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional serta mendorong kebugaran masyarakat untuk bergaya hidup sehat.

Tabel 3.106 Capaian Kinerja Program Urusan Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
1	Jumlah Pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	100	100	100	75	100	133,33
2	Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	30	18	60	10	10	100
II	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
1	Jumlah masyarakat bugar	Orang	Orang	3165	2.200	1050	1450	138,10
2	Persentase peningkatan perolehan medali	%	%	34,5	31,55	31,25	31,25	100
3	Jumlah atlet pemusatan 3-262atihan3-262an dan 3-262atihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	Orang	Orang	315	193	105	123	117,14

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** antara lain Peningkatan Wawasan Kebangsaan & Bela Negara pada 60 Titik lokasi se-Jawa Tengah; Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional, Kepecintaalaman di Salatiga dan Kabupaten Semarang; Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Jepara; Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Jepara; Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster dilaksanakan 3 bidang (Content Creator, Digital Marketing, AI kreator) 500 peserta; penempatan PKKP sebanyak 200 Orang di 21 Kabupaten di Jawa Tengah (PKE) dan pengembangan kewirausahaan pemuda tahun 2025 dilaksanakan melalui program zillenial yaitu program pemberian kartu zillenial untuk pemuda umur 16-30 tahun yg bertujuan untuk memberikan kewirausahaan, pelatihan ketrampilan, peningkatan kompetensi dan peluang komunitas yg

dilaksanakan oleh OPD provinsi Jawa Tengah, dengan bidang program kartu UMKM, ketenagakerjaan, kewirausahaan, perijinan, kesehatan, pendidikan pariwisata, seni, sosial. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terciptanya generasi muda yang memiliki karakter kuat, mandiri, berdaya saing, dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. . **Manfaat** dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan keterampilan dan kepedulian pemuda terhadap kebutuhan masyarakat dalam menghadapi era modern untuk memperluas pengetahuan yang dapat membuka peluang pekerjaan baru serta membantu mengurangi angka pengangguran. **Dampak** kegiatan ini yaitu menciptakan gelombang perubahan positif yang akan terasa dalam jangka panjang, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara luas dan terwujudnya masyarakat yang lebih dinamis, inklusif, dan tangguh. **Permasalahan** pemuda saat ini adalah minimnya ruang partisipasi dan pengembangan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan dan kesenjangan keterampilan (*skills gap*), penyediaan akses permodalan mikro, pendampingan usaha serta kurangnya daya saing pemuda. **Upaya** mengatasi permasalahan yang dilakukan dalam peningkatan penyadaran berupa program edukasi dan sosialisasi intensif digencarkan untuk menanamkan kembali rasa kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kesadaran akan peran strategis pemuda serta peningkatan penyelenggaraan pelatihan keterampilan vokasional dan kewirausahaan yang berbasis kebutuhan pasar, dengan menjembatani pemuda dalam dunia industri.

- 2) **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi Pemuda Pelopor Jawa Tengah dan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Jawa Tengah; Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan Lintas Sektor; 15 FGD Kepemudaan Lintas Sektor; Jambore Pemuda Jawa Tengah di Kota Surakarta; 1 Dokumen Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Tengah; 1 Dokumen Profil Data Kepemudaan Jawa Tengah; 1 Dokumen Pengelolaan Kemitraan dan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan. **Outcome** dari kegiatan ini adalah terwujudnya organisasi kepemudaan yang mandiri, profesional, dan memiliki daya saing tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. Melalui penguatan tata kelola kelembagaan, organisasi kepemudaan diharapkan mampu menjadi wadah kaderisasi yang efektif untuk mencetak pemimpin muda yang berkarakter serta wirausaha muda yang inovatif. Hal ini secara langsung akan meningkatkan angka Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di tingkat provinsi melalui penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran pemuda dalam memberikan solusi kreatif terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, sehingga tercipta sinergi yang harmonis antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi serta gerakan pemuda di lapangan. Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan menciptakan generasi muda yang lebih produktif, berdaya guna, dan bebas dari perilaku destruktif, yang menjadi

fondasi utama bagi kemajuan daerah di masa depan, manfaatnya mendapatkan keuntungan berupa ketersediaan kader pemimpin masa depan yang lebih siap pakai, memiliki kompetensi manajerial yang mumpuni, serta memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu pembangunan local, peningkatan ekomoni generasi muda untuk meningkatkan finansial pemuda. **Manfaat** dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan kapasitas kepemimpinan pemuda, pemuda yang terlibat dapat belajar menjadi pemimpin yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. **Dampak** dari kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat provinsi mencakup perubahan positif yang dirasakan baik oleh individu pemuda maupun masyarakat secara luas. Secara sosial, penguatan organisasi ini memberikan pemuda saluran yang sehat untuk berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan melalui kegiatan aksi sosial dan pengabdian masyarakat yang terstruktur. **Permasalahan** banyak organisasi kepemudaan yang belum terfasilitasi peningkatan kualitasnya, baik dari sisi organisasi maupun SDM. **Upaya** mengatasi permasalahan yaitu pelatihan/ seminar/ *workshop/ character building* kepada organisasi kepemudaan maupun pemangku kebijakan kepemudaan.

2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragan didukung 5 kegiatan yaitu:

- 1) **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga** dengan keluaran 15 *event* olahraga pendidikan dan prestasi; 3 *event* olahraga rekreasi yang dilaksanakan; 1 Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam *Multi Event* dan *Single Event*; 50 Atlet Yang Mengikuti Kejuaraan Nasional dan Internasional antar PPLOP/pelajar. **Outcome** kegiatan tersebut meningkatnya prestasi olahraga daerah serta terjaringnya bibit atlet potensial yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. **Manfaat** kegiatan ini adalah tersedianya wadah bagi para atlet untuk menguji kemampuan dan mental bertanding secara kompetitif, yang menjadi sarana evaluasi efektivitas program latihan yang telah dijalankan oleh klub maupun pengurus cabang olahraga. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya daya saing atlet daerah di kancah nasional, di mana rutinitas kompetisi yang berkualitas secara otomatis akan menaikkan standar performa dan mentalitas juara para atlet dan peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah. **Permasalahan** kegiatan ini adalah ketidakmerataan kualitas sarana dan prasarana olahraga, Lemahnya sinkronisasi jadwal kejuaraan antar tingkat (kabupaten, provinsi, dan nasional) dan belum optimalnya tolok ukur pembinaan dalam peningkatan prestasi olahraga. **Upaya** mengatasi yaitu melakukan standardisasi sarana dan prasarana melalui revitalisasi fasilitas olahraga di berbagai daerah agar sesuai dengan standar nasional, strategi kemitraan dengan sektor swasta (*sponsorship*) dan mengintegrasikan konsep *sport tourism* guna menarik investasi serta partisipasi publik yang lebih luas serta penyusunan kalender kejuaraan yang sinkron antara agenda kabupaten, provinsi, hingga nasional serta

memperbanyak kompetisi olahraga sebagai tolak ukur pembinaan. Manfaat kegiatan tersebut adalah peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah.

- 2) **Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi** dengan **keluaran** Pembangunan venue Panjat Tebing tahap 2 dan Venue Sepak Takraw di kompleks Jatidiri Semarang;. **Outcome** kegiatan tersebut mewujudkan ketersediaan prasarana olahraga yang terstandarisasi, layak pakai, dan terdistribusi secara merata untuk mendukung peningkatan prestasi serta kebugaran masyarakat diseluruh daerah. **Manfaat** kegiatan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar. **Dampak** terciptanya efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan aset daerah secara jangka panjang. **Permasalahan** kegiatan tersebut adalah kurangnya *venue* olahraga yang memenuhi standar nasional. **Upaya** yang dilaksanakan yaitu renovasi sarana dan prasarana secara bertahap.
- 3) **Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)** dengan **keluaran** Seleksi Atlet PPLOP, Tryout Atlet & Pelatih sebanyak 120 orang; Pengiriman Kejurnas Antar PPLP Atlet dan Pelatih 126 orang; Pembinaan Atlet PPLOP 215 atlet; *recruitment* 68 Atlet potensial; Pengukuran data indek pembangunan olahraga di 35 Kab./Kota. **Outcome** terwujudnya peningkatan performa atlet secara saintifik yang berujung pada pencapaian prestasi puncak di level nasional maupun internasional. Melalui Pelatda yang terstruktur, atlet mendapatkan lingkungan latihan yang intensif dan terkontrol, sementara penerapan *sport science* (IPTEK Olahraga) memastikan bahwa setiap porsi latihan, nutrisi, hingga proses pemulihan didasarkan pada data akurat mengenai kondisi fisik dan psikologis atlet. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah membantu menganalisis dan mengoptimalkan aspek fisik, teknik dan mental atlet. **Dampak** meningkatnya efisiensi latihan, di mana penggunaan teknologi seperti analisis biomekanik, pemantauan detak jantung secara *real-time*, dan evaluasi gizi terukur mampu menghasilkan performa atlet yang jauh lebih presisi dibandingkan metode konvensional. **Permasalahan** kondisi indeks pembangunan olahraga masih dibawah standar. **Upaya** mengatasinya peningkatan masing-masing dimensi indikator melalui sinkronisasi program dan kegiatan dengan kab./kota.
- 4) **Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga** dengan **keluaran** 1 Dokumen Profil Data Keolahragaan Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Olahraga (SIMPORA). **Outcome** terwujudnya satu data olahraga daerah yang akurat, terpadu, dan mudah diakses (*real-time*) sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan olahraga yang tepat sasaran. **Manfaat** kegiatan ini adalah tersedianya data keolahragaan yang valid dan *up to date*. **Dampak** terjadinya transformasi tata kelola olahraga daerah yang berbasis data (*data-driven governance*), sehingga setiap

kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi menjadi lebih akurat dan minim risiko salah sasaran. **Permasalahan** optimalnya pemanfaatan sistem data terpadu oleh *stakeholder*, organisasi olahraga dan masyarakat umum. **Upaya** mengatasi sosialisasi dan sinkronisasi kemanfaatan sistem data dan informasi sektoral.

- 5) **Standarisasi Organisasi Keolahragaan** dengan **keluaran** sertifikasi Kepelatihan olahraga sejumlah 150 orang; 1 dokumen MoU bidang keolahragaan. **Outcome** kegiatan tersebut terwujudnya tata kelola organisasi keolahragaan yang profesional, akuntabel, dan mandiri sesuai dengan standar nasional keolahragaan. **Manfaat** kegiatan ini adalah adanya standar yang jelas, organisasi keolahragaan memiliki pedoman baku dalam pengelolaan administrasi, rekrutmen pengurus, hingga transparansi laporan keuangan, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, sponsor dan masyarakat luas, penambahan pelatih dan wasit/juri yang berlisensi. **Dampak** kegiatan ini adalah terciptanya stabilitas dan keberlanjutan prestasi olahraga daerah yang tidak lagi bergantung pada figur individu, melainkan pada sistem manajemen yang kuat. Dengan organisasi yang memiliki standar baku, dampak langsungnya adalah hilangnya tumpang tindih kewenangan dan konflik internal kepengurusan, sehingga seluruh energi organisasi dapat difokuskan sepenuhnya pada pembinaan atlet dan pencapaian target medali. **Permasalahan** yang dihadapi adalah masih kurangnya standar lisensi pelatih dan wasit/juri. **Upaya** yang dilakukan pelatihan sertifikasi terhadap pelatih dan wasit/juri.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.107 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	3	100	7	100	100	Sangat Tinggi

Rencana strategis/tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain:

1. Pengiriman atlet pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Aceh dan Sumatera Utara;
2. Pembangunan lanjutan venue Panjat Tebing tahap kedua dan renovasi venue sepak takraw di kompleks Jatidiri ;
3. Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda, pengembangan kepemimpinan dan kepedulian pemuda, serta penguatan struktur organisasi pemuda melalui Klinik Layanan Pemuda (*Klik Yanda*);
4. Purwokerto *Half Marathon* di Purwokerto;
5. Pengembangan daya saing keolahragaan dengan melakukan pemasyarakatan olahraga melalui berbagai event olahraga rekreasi (*sport tourism*), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) dari usia pelajar hingga usia prestasi.
6. Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

3.4.2.14 Urusan Statistik

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat provinsi. Melalui pelaksanaan tugas dalam Urusan Statistik, berperan aktif sebagai Walidata Daerah yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data. Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2022, Walidata Daerah bertugas memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip SDI; menyebarkan data dan Metadata di Portal Satu Data Jawa Tengah dan Portal Satu Data Indonesia; membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah; dan membina Walidata Tingkat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan amanat regulasi Satu Data Indonesia di tingkat provinsi sebagai Walidata Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas baik kelembagaan maupun sumber daya manusia serta pengembangan infrastruktur penunjang baik hardware maupun software untuk lebih mengoptimalkan tata kelola data di Jawa Tengah. Implementasi Satu Data Indonesia di Jawa Tengah yang telah memasuki tahun ketiga serta upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat membawa Jawa Tengah untuk segera memiliki basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengguna data. Tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Provinsi Jawa Tengah. menuju ke tingkatan yang lebih matang.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung anggaran Rp877.083.000,00 untuk melaksanakan **Program Penyelenggaraan Statistik Sektor** dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,67%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Penyusunan Data Prioritas Pembangunan Daerah (100%), dan terhadap target akhir RPD perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah belum optimalnya pengelolaan data sektoral daerah yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI). **Upaya** yang dilakukan dengan melakukan sinkronisasi, koordinasi serta peningkatan kapasitas baik pada pengelolaan maupun pengelola data sektoral daerah. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu ketersediaan data sektoral (statistik dan geospasial) yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh para pengguna data, untuk mendukung pembangunan daerah.

Tabel 3.108 Capaian Kinerja Program Urusan Statistik

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SOSIAL							
1	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%	100	48	48	48	48	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Penyelenggaraan Statistik Sektor didukung kegiatan **Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain menghimpun 80 Metadata statistik sektoral dan geospasial untuk mendukung Portal Satu Data Jawa Tengah. **Outcome** dari kegiatan tersebut berupa pemanfaatan data sektoral daerah yang valid dan akurat oleh para pengguna data. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu peningkatan aksesibilitas data sektoral daerah bagi pengguna data. **Dampak** kegiatan ini yaitu tersedianya kebutuhan data yang mendukung dalam pengambilan kebijakan bagi lembaga pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu data sektoral daerah yang tersaji belum semuanya dapat memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. **Upaya** yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan peningkatan kapasitas para penyelenggara (Produsen Data, Walidata Pendukung, Walidata Daerah) dalam pengelolaan data sektoral daerah, berkoordinasi dengan para penyedia data.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Statistik dengan tingkat capaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.109 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Statistik

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Pengembangan Geoportal Sistem Informasi Geospasial Jateng;
2. Sensus/Pencacahan/Pendataan Urusan Hukum Politik dan Pemerintahan, Urusan Sosial, Urusan Keuangan, Pemetaan dan Pendataan Aset;
3. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia;
4. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar;

3.4.2.15 Urusan Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas Urusan Persandian dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan persandian pada seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah. Dalam Urusan Persandian juga melaksanakan perlindungan terhadap informasi pemerintah yang digunakan dalam pelayanan publik. Selain itu, pengelolaan komunikasi sandi juga dilakukan sehingga terjalin pola komunikasi sandi yang konsisten dan efektif.

Keamanan data dan informasi menjadi salah satu tantangan yang muncul dengan adanya dinamika perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Oleh karena itu, mitigasi dan pengendalian keamanan informasi dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencatat terdapat kurang lebih 1.853 serangan siber, dan sekitar 95,84% telah tertangani. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan sistem pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan Persandian tahun 2025 yaitu Piagam Apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai Pemerintah Provinsi yang menunjukkan komitmen luar biasa, dalam membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh Kabupaten/Kota.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung anggaran Rp2.451.930.000,00 untuk melaksanakan

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,01%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi Sejumlah 80% (100%). Terhadap target akhir RPD indikator tersebut perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu lemahnya kesadaran mengenai keamanan informasi yang berimplikasi pada *massive*-nya insiden siber. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyesuaian kegiatan urusan persandian dengan pedoman dari BSSN. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meningkatkan keamanan dalam layanan publik digital serta menjamin keutuhan informasi yang disebarluaskan memiliki sifat asli dan tidak dimodifikasi atau diubah.

Tabel 3.110 Capaian Kinerja Program Urusan Persandian

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
1	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	80	50	62,50	50	50	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain **keluaran** peningkatan kapasitas 100 orang SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber bagi Agen JatengProv-CSIRT; Sosialisasi Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota; Pendampingan implementasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) bagi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta literasi Keamanan Informasi Bagi Guru dan Siswa SMA/SMK/MA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V dan XI. **Outcome** kegiatan ini yaitu meningkatnya kompetensi, kesiapsiagaan, dan koordinasi keamanan informasi di seluruh perangkat daerah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memperkuat ketahanan siber daerah, mengurangi risiko kebocoran data, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah digital serta terwujudnya lingkungan pemerintahan yang lebih aman, tangguh, dan terlindungi dari ancaman siber. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu rendahnya pemahaman literasi keamanan informasi serta terbatasnya personil dan kompetensi teknis terkait keamanan siber. **Upaya** yang dilakukan yaitu bimbingan teknis penanganan insiden siber bagi seluruh OPD, pendampingan implementasi

SMKI dan Indeks KAMI, koordinasi antar OPD, serta optimalisasi peran JatengProv-CSIRT sebagai pusat koordinasi respons insiden siber.

- 2) **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain fasilitasi penerbitan serta Bimbingan Teknis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Implementasi *Secure Email*/Sanapati kepada 50 perangkat daerah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya keamanan pertukaran informasi antar OPD, meningkatnya efisiensi layanan administrasi digital, serta terbentuknya budaya penggunaan layanan persandian yang aman dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memperkuat keamanan informasi pemerintah, mempercepat layanan administrasi, serta meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan layanan persandian dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kepercayaan publik terhadap keandalan layanan pemerintahan digital serta penguatan tata kelola keamanan informasi di tingkat perangkat daerah terhadap ancaman siber. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu tingkat literasi keamanan informasi yang belum merata membuat sebagian OPD belum sepenuhnya memahami pentingnya penggunaan *secure email*, TTE dan komunikasi sandi. **Upaya** yang dilakukan dengan memperkuat pendampingan dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah terkait pengelolaan Tanda Tangan Elektronik, *secure email*, serta penggunaan layanan persandian.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Persandian dengan tingkat capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.111 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Persandian

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan SDM Persandian dan Keamanan Informasi dalam rangka literasi keamanan siber dan mendorong penggunaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (*Tools Incident Cyber*) ;
2. Penyusunan Kebijakan Pergub tentang *Cyber Security* pada Lingkup Pemprov Jateng;
3. Pembentukan Budaya Sadar Keamanan Informasi dan patroli siber melalui kampanye dan internalisasi kebiasaan kerja digital yang aman;

3.4.2.16 Urusan Kebudayaan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan 2 langkah strategis dalam pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah. Pertama Melek Budaya sebagai penggambaran peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Kedua pemajuan kebudayaan melalui pengarusutamaan pendidikan, dengan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pengarusutamaan dengan memasukkan objek pemajuan kebudayaan seperti tradisi, seni, bahasa, dan pengetahuan tradisional ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan dilakukan dalam aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan baik untuk budaya benda maupun yang tak benda.

Penghargaan tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan kebudayaan dalam Festival Dalang Anak Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) yaitu:

1. Juara 1 dan Juara 5 Kelompok A (usia 11 tahun)
2. Juara 1 dan Juara 3 Kelompok B (usia 12-15)
3. Dalang Mumpuni.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam melaksanakan urusan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didukung anggaran Rp33.347.185.000,00 untuk melaksanakan 5 Program yaitu:

1. **Program Pengembangan Kebudayaan**, didukung anggaran Rp6.227.041.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 94,31%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase Objek Pemajuan Kebudayaan berperingkat nasional, tingkat partisipasi pemeringkatan Objek Pemajuan Kebudayaan, persentase akses pengembangan SDM kebudayaan, dan persentase cakupan pelestarian seni. Terhadap target akhir RPD terdapat 2 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya upaya pembinaan lembaga dan SDM kebudayaan. **Upaya** yang dilakukan yaitu fasilitasi pembinaan lembaga dan SDM kebudayaan melalui ruang ekspresi budaya. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga warisan budayanya, adat dan tradisi yang hampir punah dapat bergiat kembali, dan terbukanya ruang kreasi bagi seniman.
2. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**, didukung alokasi anggaran Rp22.786.072.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,28%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu tingkat partisipasi seni tradisi. Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu, kurangnya ruang ekspresi/event untuk berkesenian serta sarana dan prasarana berkesenian. **Upaya** yang dilakukan

yaitu, penyediaan ruang ekspresi/event untuk penyelenggaraan event berkesenian, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan seni. **Manfaat** pelaksanaan program ini antara lain termotivasinya seniman dan pelaku seni budaya untuk menampilkan dan mengembangkan hasil karyanya, meningkatkan minat dalam berkesenian serta terfasilitasinya kegiatan berkesenian bagi pelaku seni, sehingga kesenian tradisional dapat lestari dan berkembang.

3. **Program Pembinaan Sejarah** didukung anggaran Rp574.051.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,19%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase akses literasi sejarah. Terhadap target RPD terdapat 1 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu, kurangnya literasi sejarah. **Upaya** yang dilakukan yaitu, menambah literasi sejarah dengan meningkatkan penulisan sejarah. **Manfaat** Program Pembinaan Sejarah antara lain tumbuhnya rasa bangga terhadap sejarah bangsa secara umum dan daerah secara khusus dan literasi tentang sejarah semakin meningkat.
4. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** didukung anggaran Rp857.240.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 92,98%. Program ini memiliki 2 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase Cagar Budaya berperingkat nasional dan tingkat partisipasi pemeringkatan Cagar Budaya. Terhadap target RPD terdapat 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Kebudayaan yang berdampak pada pengusulan Cagar Budaya peringkat nasional. **Upaya** yang dilakukan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam pemenuhan dokumen sesuai kebijakan tersebut. **Manfaat** Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya antara lain meningkatnya Cagar Budaya Jawa Tengah yang memiliki status sebagai Cagar Budaya peringkat nasional, meningkatnya Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum melalui penetapan dan pemeringkatan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan Cagar Budaya.
5. **Program Pengelolaan Permuseuman** didukung anggaran Rp2.902.781.000,00 dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 99,60%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu nilai survey kepuasan pengunjung museum. Terhadap target RPD terdapat 1 target telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain, belum optimalnya museum dalam menarik pengunjung terutama dari generasi muda, kurangnya tenaga profesional pemuseuman seperti kurator, edukator, dan restorator. **Upaya** yang dilakukan antara lain, menjalin kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan terutama perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian, praktek kerja lapangan, dan kegiatan bersama lainnya serta dengan meningkatkan kapasitas SDM yang ada untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi teknis permuseuman. **Manfaat** Program Pengelolaan Permuseuman antara lain meningkatnya tata Kelola museum melalui

perlindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi secara terpadu; peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum; dan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum.

Tabel 3.112 Capaian Kinerja Program Urusan Kebudayaan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan berperingkat nasional	%	22,39	25,74	114,96	24,09	24,09	106,85
2	Tingkat partisipasi pemeringkatan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	28,55	26,16	91,63	26,16	26,16	100
3	Persentase pengembangan SDM kebudayaan	%	57,14	52,38	91,67	52,38	52,38	100
4	Persentase cakupan pelestarian seni	%	100	100	100	100	100	100
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							
1	Tingkat partisipasi seni tradisi	%	13,31	11,1	83,4	11,1	11,1	100
III	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							
1	Persentase akses literasi sejarah	%	63,13	54,67	86,6	54,67	54,67	100
IV	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
1	Persentase Cagar Budaya berperingkat nasional	%	13,59	13,6	100,07	13,15	13,6	103,42
2	Tingkat partisipasi pemeringkatan Cagar Budaya	%	28,34	27,81	98,13	26,73	27,81	104
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							
1	Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%	89,85	90,09	100,26	90,11	90,15	100,04

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengembangan Kebudayaan didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain 275 kelompok seni yang difasilitasi, 1 kali

pelaksanaan Parade Seni Jawa Tengah, 1 kali pelaksanaan Revitalisasi Ekosistem Kebudayaan Jawa Tengah, 2 kali pelaksanaan Bengkel Seni, 1 kali pelaksanaan Gelar Seni rangkaian Dugderan Semarang, 20 kali pelaksanaan Tampilan Kesenian Pembukaan, 1 kali pelaksanaan Lomba Dalang Anak, 1 kali pelaksanaan Gita Bahana Nusantara, 1 kali pelaksanaan Lomba Macapat Integritas, 1 kali pelaksanaan Gelar Budaya Pelajar Pancasila, 1 kali partisipasi pada Festival Kebudayaan Yogyakarta, fasilitasi perekaman 13 Karya Budaya. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya pelestarian kesenian tradisional dan penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Tengah menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. **Manfaat** kegiatan ini antara lain, terdokumentasinya Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai data dukung Usulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, sanggar/kelompok seni tetap eksis menampilkan tampilan kesenian dan legal formal kebudayaan. **Dampak** kegiatan ini antara lain, bertambahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, menjadikan Taman Budaya Jawa Tengah sebagai tempat berkesenian untuk sanggar/kelompok seni dan lebih mudah melaksanakan aksi pelestarian. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu, data awal Karya Budaya yang akan direkam sulit terjadwal, tidak semua proposal dari sanggar/kelompok seni dapat terakomodir oleh Taman Budaya Jawa Tengah dan terbatasnya data dukung sebagai syarat pengusulan penetapan. **Upaya** yang dilakukan antara lain, melaksanakan koordinasi dengan lembaga/dinas terkait di kabupaten/kota dalam hal fasilitasi kelompok seni yang akan tampil serta koordinasi dengan kabupaten/kota pengusul terkait penjadwalan perekaman Karya Budaya.

- 2) **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain, penetapan 57 Karya Budaya Jawa Tengah menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia, 5 kali pelaksanaan Pagelaran Wayang, 2 kali pelaksanaan Pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terselenggara dan pemberdayaan kegiatan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan yang sudah ditetapkan tingkat nasional. **Manfaat** kegiatan ini yaitu, menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah/hampir musnah, menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, dan mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi penerus berikutnya. **Dampak** kegiatan ini yaitu, terlestarikannya Objek Pemajuan Kebudayaan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu, komitmen semua lapisan *Stakeholder* untuk gotong royong melestarikan Objek Pemajuan Kebudayaan tingkat nasional dan terbatasnya data dukung sebagai syarat pengusulan penetapan. **Upaya** yang dilakukan yaitu, fasilitasi pembuatan video, dokumentasi foto dan kajian akademis serta pemberdayaan dan

komitmen bersama semua *stakeholder* untuk bersama melestarikan Objek Pemajuan Kebudayaan Nasional.

2. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional** didukung kegiatan **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** 814 lembaga/kelompok/sanggar yang menerima hibah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa pemberian hibah kebudayaan untuk Pentas Seni dan pengadaan sarana prasarana kesenian. **Manfaat** kegiatan ini yaitu, termotivasinya pelaku seni untuk melakukan kegiatan seni serta terfasilitasinya sarana dan prasarana kesenian. **Dampak** kegiatan ini yaitu, lembaga/ kelompok/ sanggar seni semakin aktif berkarya. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu, masih banyaknya lembaga/ kelompok/ sanggar kesenian di Jawa Tengah tetapi belum semuanya didukung dengan stimulan yang memadai. **Upaya** yang dilakukan yaitu, memberikan dukungan pendanaan melalui dana hibah (aspirasi) yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pentas seni dan penyediaan peralatan/perlengkapan kesenian serta penyediaan ruang ekspresi/event/tampilan seni di beberapa lokasi di Jawa Tengah.
3. **Program Pembinaan Sejarah** didukung kegiatan **Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi** dengan **keluaran** antara lain 1 buku dengan judul Menapak Jejak Perjuangan Brigjen Sentot Sudiarto dan Brigade VI-SS/Divisi II di Semarang dan Grobogan, 1 transelitasi dengan judul Pepali KI Ageng Selo. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya pengetahuan dan kesadaran serta kebanggaan masyarakat tentang sejarah lokal. **Manfaat** kegiatan ini yaitu, bertambahnya literasi sejarah. **Dampak** kegiatan ini yaitu, bertambahnya bahan ajar. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu, terbatasnya referensi tulisan. **Upaya** yang dilakukan yaitu, melibatkan akademisi dan ahli waris objek penulisan.
4. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** didukung 2 kegiatan, yaitu:
 - 1) **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan 3 SK Gubernur Cagar Budaya Peringkat Provinsi. **Outcome** kegiatan tersebut Cagar Budaya peringkat provinsi terlindungi. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memiliki status Cagar Budaya peringkat provinsi. **Dampak** kegiatan ini yaitu, meningkatnya jumlah Cagar Budaya peringkat provinsi. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu, kurang lengkapnya persyaratan administrasi dan data objek yang diusulkan. **Upaya** yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam pemenuhan kelengkapan administrasi dan penguatan data dukung objek yang diusulkan.
 - 2) **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan 5 Cagar Budaya yang dimanfaatkan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa pelestarian Cagar Budaya. **Manfaat** kegiatan ini yaitu, penguatan ekonomi masyarakat sekitar pada saat penyelenggaraan kegiatan/event kebudayaan. **Dampak** kegiatan ini yaitu, semakin banyak kegiatan/event yang diselenggarakan di lokasi Cagar Budaya. **Permasalahan** tidak

banyak kegiatan/event kebudayaan yang memanfaatkan Cagar Budaya atau diselenggarakan di lokasi Cagar Budaya. **Upaya** yang dilakukan antara lain menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan komunitas budaya untuk melakukan kegiatan/event kebudayaan bersama dan memperkenalkan potensi Cagar Budaya pada kegiatan/event kebudayaan.

5. Program Pengelolaan Permuseuman didukung kegiatan **Pengelolaan Museum Provinsi** dengan **keluaran** 60.058 orang pengunjung museum. **Outcome** kegiatan tersebut adalah meningkatnya PAD Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu, melalui pengelolaan koleksi museum dapat melestarikan budaya dan sejarah, pendidikan untuk semua usia, pengembangan pariwisata, serta penguatan jati diri bangsa dan ekonomi lokal. **Dampak** kegiatan ini antara lain, aktivitas kegiatan kepariwisataan budaya dan *outing class* di museum meningkat. **Permasalahan** yaitu, dalam belum ada sistem asuransi untuk koleksi museum sehingga koleksi tidak terlindungi apabila terjadi kehilangan/bencana. **Upaya** yang dilakukan mengoptimalkan penyimpanan/pengamanan dan pelestarian koleksi sesuai SOP klasifikasi koleksi.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.113 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kebudayaan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program pengembangan kebudayaan	4	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program pengembangan kesenian tradisional	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program pembinaan sejarah	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2	100	3	100	100	Sangat Tinggi
5	Program pengelolaan permuseuman	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:

1. Upaya pengusulan Cagar Budaya peringkat nasional dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dilakukan melalui:
 - a. Pengkajian Cagar Budaya peringkat provinsi oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Perekaman dan kajian Objek Pemajuan Kebudayaan;
2. Upaya pengusulan Ilir-Ilir sebagai Warisan Dunia.
3. Peningkatan kapasitas tenaga ahli pelestarian Cagar Budaya melalui Bimbingan Teknis dan sertifikasi.

3.4.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan pusat informasi yang menyediakan berbagai sumber pengetahuan, hiburan, dan rekreasi sebagai bagian dari kebutuhan hakiki manusia. Seiring perkembangan teknologi dan perubahan pola akses informasi, perpustakaan kini bertransformasi menjadi pusat layanan informasi dalam berbagai format, baik cetak maupun digital, yang dapat diakses secara langsung maupun daring. Dalam konteks perpustakaan modern, fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai ruang publik yang inklusif untuk belajar, berlatih keterampilan, dan berbagi pengalaman. Sejalan dengan arah kebijakan tahun 2025 yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten serta penguatan kualitas sarana dan prasarana literasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terus mendorong inovasi layanan, memperluas akses literasi, dan mengembangkan perpustakaan berstandar nasional sebagai upaya peningkatan literasi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wujud kinerja nyata urusan Perpustakaan memperoleh penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI, antara lain:

1. Juara III Lomba Bertutur Nasional Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atas nama Alexandra Dian Ayu Vian Lestari pada tanggal 28 Oktober 2025 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
2. Juara I Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) Tingkat Nasional Tahun 2025 dari Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Oktober 2025 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
3. Juara III Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kategori Perpustakaan Masyarakat Terbaik Wilayah II (Jawa, Bali, Nusa Tenggara) dari TBM Rumah Kreatif Wadas Kelir, Kab. Banyumas pada tanggal 28 Oktober 2025 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
4. Juara I Lomba Video Konten Literasi Tingkat Nasional atas nama Aurellia Putri Fadilah pada tanggal 28 Oktober 2025 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
5. Juara I Lomba Resensi Buku Nasional Tingkat SMP/MTs/Sederajat atas nama Melati Kencana Putri pada tanggal 28 Oktober 2025 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
6. Juara II Lomba Resensi Buku Nasional Tingkat SMA/MA/SMK/Sederajat atas nama Naifa Lalitya Sarasati pada tanggal 28 Oktober 2025 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp2.370.818.000,00 untuk mendukung 2 program, yaitu:

1. Program Pembinaan Perpustakaan didukung anggaran Rp2.238.809.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97.06%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan capaian kinerja seluruhnya sangat tinggi yaitu Indikator Nilai survey kepuasan masyarakat (104.88%), Indikator Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi (100%), Indikator Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca (100%). Terhadap target akhir RPD 1 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras. **Permasalahan** dalam pelaksanaan program ini yaitu masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembudayaan literasi masyarakat serta perbaikan fasilitas perpustakaan. **Manfaat** program ini yaitu meningkatnya tingkat literasi masyarakat Jawa Tengah.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno didukung anggaran Rp132.009.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95.43%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan capaian sangat tinggi yaitu Indikator Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa (102.21%) dan terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** dalam pelaksanaan program ini adalah belum optimalnya proses pendataan dan pengumpulan naskah kuno karena keterbatasan informasi mengenai keberadaan naskah kuno yang tersebar di masyarakat. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam kegiatan pelestarian dengan mengubah naskah ke bentuk lain, membuat kotak penyimpanan yang aman dan tidak merusak, memperbaiki naskah-naskah kuno milik masyarakat, serta mengadakan pelatihan perawatan dan acara diskusi di berbagai daerah untuk mendata dan menyelamatkan naskah kuno. **Manfaat** program ini yaitu menjaga, melindungi, dan merawat warisan budaya bangsa agar tetap ada dan lestari, serta memastikan warisan ini bisa terus dipakai sebagai sumber pengetahuan dan identitas budaya untuk masa depan.

Tabel 3.114 Capaian Kinerja Program Urusan Perpustakaan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	89.25	111.56	85.1	89.25	104.88

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	100	88.89	88.89	88.89	88.89	100
3	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	100	61.54	61.54	61.54	61.54	100
II	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							
1	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	100	94.21	94.21	92.25	94.21	102.12

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pembinaan Perpustakaan, didukung oleh 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** antara lain penambahan 9.500 eksemplar koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah; peningkatan 10 jenis layanan Perpustakaan Umum yaitu Pelayanan Keanggotaan Perpustakaan, Sirkulasi Dewasa Perpustakaan, Remaja Dan Anak Perpustakaan, Referensi Perpustakaan, Terbitan Berkala Perpustakaan, Audiovisual Perpustakaan, Pelayanan Terpadu Perpustakaan Sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga, Panti Asuhan, Panti Anak Jalanan Dan Masyarakat Umum (Anter Koper Buku), Perpustakaan Keliling, Pelayanan Anjungan Perpustakaan Digital (iJateng), Pelayanan Ruang Baca Difabel dan Kelompok Rentan; terakreditasinya 9 Perpustakaan kewenangan provinsi; dan 22 pustakawan yang lulus sertifikasi. **Outcome** kegiatan ini yaitu meningkatnya fasilitas, koleksi dan jumlah jenis layanan perpustakaan. Manfaat kegiatan ini yaitu meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengelola perpustakaan. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya minat dan kunjungan masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum terpenuhinya kriteria akreditasi untuk perpustakaan daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi. **Upaya** penyelesaian dilakukan melalui pendampingan akreditasi perpustakaan dan fasilitasi kehadiran asesor untuk pelaksanaan akreditasi secara terpadu kepada perpustakaan daerah Kabupaten/Kota.
- 2) **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 4.377.263 orang telah mengunjungi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah baik secara langsung maupun *online*; 20 orang telah menjadi agen literasi; dan pelaksanaan 3 kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat serta bertambahnya jumlah agen literasi yang aktif dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca. **Manfaat** kegiatan ini yaitu

menumbuhkan dan memperkuat budaya literasi di berbagai lapisan masyarakat, baik di satuan pendidikan menengah, khusus, maupun masyarakat umum. **Dampak** kegiatan ini yaitu terbentuknya masyarakat Jawa Tengah yang rajin membaca, berpikiran kritis, dan berwawasan luas, serta meningkatkan kesadaran bahwa membaca adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca. **Upaya** penyelesaian dilakukan dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap kategori peserta tanpa pembatasan jumlah dalam setiap jenis kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yang diselenggarakan.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno didukung oleh 4 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 194 Penerbit telah menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) pada Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan ini yaitu meningkatnya kepatuhan penerbit dalam menyerahkan karya cetak dan karya rekam, serta tersedianya data koleksi daerah yang lebih lengkap dan terintegrasi. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya usaha pelestarian hasil budaya bangsa dan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat deposit daerah. **Dampak** kegiatan ini yaitu terbentuknya sistem pelestarian karya intelektual daerah yang berkesinambungan, serta tersedianya sumber pengetahuan dan dokumentasi yang menjadi bagian dari koleksi nasional. **Permasalahan** yang dihadapi adalah dinamika usaha penerbit yang sewaktu-waktu dapat berhenti beroperasi, serta kendala serah simpan karya cetak dan karya rekam akibat otoritas data ISBN yang terpusat di Perpustakaan Nasional dan adanya kesenjangan data antara karya yang diterbitkan dan diserahkan. **Upaya** penyelesaian dilakukan melalui pemantauan langsung ke penerbit di kabupaten/kota serta penerapan sistem pendataan satu pintu antara Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) **Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah** dengan **keluaran** 4.611 naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah telah diterbitkan. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi perpustakaan daerah serta perguruan tinggi dalam penyusunan katalog induk dan bibliografi daerah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memudahkan masyarakat dalam mencari dan menemukan koleksi buku serta memperkuat jejaring informasi antarperpustakaan. **Dampak** kegiatan ini adalah terwujudnya sistem informasi bibliografis daerah yang terintegrasi, sehingga mendukung percepatan layanan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya penghimpunan data katalog dari perpustakaan Kabupaten/Kota dan perguruan tinggi di Jawa Tengah yang disebabkan oleh keterbatasan data, rendahnya kesadaran pentingnya

penyusunan katalog induk, serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perundangan terkait Katalog Induk Daerah. **Upaya** yang dilakukan meliputi pemberian informasi/penyuluhan kepada perpustakaan dan perguruan tinggi agar tertib menyusun serta menyampaikan daftar katalog tambahan setiap tahun kepada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

- 3) **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 34 koleksi naskah kuno telah dialihmediakan. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah naskah kuno yang terlindungi melalui proses alih media dan konservasi dasar. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terjaganya warisan budaya bangsa serta tersedianya akses terhadap informasi yang terkandung dalam naskah kuno bagi masyarakat dan peneliti. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya pelestarian khazanah intelektual daerah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan jati diri masyarakat Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum memadainya SDM yang memiliki keahlian dalam pelestarian fisik maupun informasi naskah, serta kurangnya sarana dan prasarana alih media. **Upaya** penyelesaian dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan SDM dan fasilitas yang tersedia.
- 4) **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi** dengan keluaran pengolahan 593 koleksi etnis budaya nusantara. **Outcome** kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah koleksi budaya etnis Nusantara yang terdata dan terdokumentasi secara sistematis. **Manfaat** kegiatan ini yaitu mempermudah akses dan temu kembali informasi koleksi budaya oleh masyarakat serta mendukung pelestarian warisan budaya bangsa. **Dampak** kegiatan ini adalah terwujudnya basis data dan pusat informasi budaya etnis Nusantara yang komprehensif, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas dan karakter budaya daerah Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terbatasnya data Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dimiliki Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan koleksi budaya yang dimiliki. **Upaya** penyelesaian dilakukan melalui penelusuran langsung bersama Tenaga Ahli Filolog serta menjalin sinergi dengan pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, dan komunitas untuk memperluas jangkauan informasi koleksi budaya etnis nusantara.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan kearsipan dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.115 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perpustakaan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pembinaan Perpustakaan	3	100	7	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1	100	4	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:

1. Penguatan tata kelola transformasi digital;
2. Pembudayaan gemar membaca melalui peningkatan partisipasi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus serta masyarakat dengan mengadakan sosialisasi berupa berbagai lomba literasi, pemilihan duta baca dan bunda literasi;
3. Pengembangan kualitas layanan perpustakaan umum, penambahan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum provinsi.

3.4.2.18 Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Seiring perkembangan teknologi informasi, tantangan utama pada tahun 2025 adalah optimalisasi pengelolaan arsip statis dan dinamis melalui transformasi digital untuk menjamin keselamatan memori kolektif bangsa di Jawa Tengah. Isu yang menjadi sorotan adalah peningkatan penyelamatan dan pengolahan arsip secara digital, pengembangan khazanah arsip bernilai guna informasional, serta penguatan pelayanan, publikasi, dan promosi arsip secara online. Upaya ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berorientasi pada pengelolaan arsip yang autentik, terpercaya, dan mudah diakses masyarakat.

Sebagai wujud kinerja nyata urusan kearsipan memperoleh penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu:

1. Register Nasional Memori Kolektif Bangsa Tahun 2025 "Arsip PKK Jawa Tengah sebagai Pionir PKK Nasional" pada tanggal 21 Mei 2025 di Jakarta oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Peringkat I tingkat nasional dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 diserahkan pada tanggal 21 Mei 2025 di Jakarta oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp401,883,000,00 untuk melaksanakan 2 program, yaitu:

1. **Program Pengelolaan Arsip** didukung anggaran Rp366.751.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99.08%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan capaian seluruhnya sangat tinggi yaitu indikator Persentase peningkatan pengunjung arsip dengan capaian kinerja 123,92% dan terhadap target akhir RPD akan tercapai (97,9%), indikator Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya dengan capaian kinerja 129,86% dan terhadap target akhir RPD telah tercapai (166,22%), capaian sangat tinggi dikarenakan pembinaan kearsipan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga penyerahan arsip dan pemusnahan arsip meningkat mengakibatkan nilai hasil pengawasan kearsipan meningkat, serta indikator Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK dengan capaian kinerja 258,34% dan terhadap target akhir RPD telah tercapai 258,34%, capaian sangat tinggi dikarenakan adanya peningkatan penyusutan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis Perangkat Daerah setelah pembinaan kearsipan yang lebih intens. **Permasalahan** dalam pelaksanaan program ini yaitu tata kelola pemerintahan masih memerlukan pengelolaan arsip yang baik dan berkelanjutan serta masih adanya arsip bernilai sejarah yang belum lengkap. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip. **Manfaat** program ini yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta menyelamatkan arsip-arsip yang memiliki nilai guna tinggi dan nilai kesejarahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Memori Kolektif Daerah.
2. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** didukung anggaran Rp35.132.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99.64%. Program ini memiliki 3 (tiga) indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat **ketercapaian** sangat tinggi yaitu indikator Persentase arsip yang diselamatkan dengan capaian kinerja 136,53% dan terhadap target akhir RPD akan tercapai (90%), indikator Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip dengan capaian kinerja 225% dan terhadap target akhir RPD telah tercapai (200%), capaian sangat tinggi disebabkan oleh meningkatnya permintaan fasilitasi Perangkat Daerah terhadap pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah terdapat penurunan kualitas arsip akibat usia arsip, faktor cuaca dan lingkungan baik tekstual maupun elektronik. **Upaya** yang dilakukan yaitu preservasi arsip secara preventif dan kuratif. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terjaganya keutuhan fisik arsip yang memiliki nilai kesejarahan dan guna sekunder, serta memastikan ketersediaan informasi arsip yang autentik dan dapat diakses oleh generasi mendatang.

Tabel 3.116 Capaian Kinerja Program Urusan Kearsipan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
1	Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	100	97,9	97,9	79	97,9	123,92
2	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	32,89	54,67	166,22	42,1	54,67	129,86
3	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	258,34	258,34	100	258,34	258,34
II	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							
1	Persentase arsip yang diselamatkan	%	100	90	90	65,92	90	136,53
2	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	22,5	45	200	20	45	225

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengelolaan Arsip didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi** dengan **keluaran** penyusunan 14.632 daftar inventaris arsip. **Outcome** kegiatan ini yaitu terkelolanya arsip statis dengan baik. **Manfaat** kegiatan ini yaitu mempermudah pencarian arsip statis. **Dampak** kegiatan ini yaitu terselamatkannya arsip bernilai guna sejarah. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini yaitu keterbatasan sarana dan prasarana digitalisasi arsip yang belum memadai. **Upaya** yang dilakukan yaitu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung.
- 2) **Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi** dengan **keluaran** penilaian 6.062 arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah dan peningkatan pengawasan terhadap 41 unit Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan Perangkat Daerah. **Outcome** kegiatan ini yaitu arsip pada masing-masing perangkat daerah dapat terkelola dengan lebih tertib. **Manfaat** kegiatan ini yaitu proses mempermudah pencarian arsip dinamis. **Dampak** kegiatan ini yaitu penyusutan dan penyerahan arsip statis ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang kearsipan pada masing-masing perangkat daerah. **Upaya** penyelesaian dilakukan melalui

pemberian bimbingan teknis kepada pengelola arsip di setiap perangkat daerah guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap pengelolaan arsip yang sesuai dengan ketentuan.

- 3) **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** dengan **keluaran** 41 Unit Kearsipan telah berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip, 1.700 arsip telah terlayankan dan sebanyak 97.98% atau sejumlah 40 Perangkat Daerah telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD). **Outcome** dari kegiatan ini yaitu informasi kearsipan tersampaikan ke masyarakat. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu informasi kearsipan tersedia secara elektronik/digital. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap arsip di kalangan instansi pemerintah, BUMD, lembaga pendidikan, dan masyarakat. **Permasalahan** yang ada antara lain belum sepenuhnya Sistem kearsipan SRIKANDI digunakan dalam penatausahaan persuratan, masih terjadinya gangguan pada sistem, penyelenggaraan pameran kearsipan dan penerbitan warta arsip belum dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, BUMD, Ormas/Orpol, Pendidikan dan masyarakat dengan baik. **Upaya** penyelesaian dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku pengelola sistem SRIKANDI, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pameran dan penerbitan warta arsip.

2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi** dengan **keluaran** penyelamatan 891 arsip akibat bencana skala provinsi. **Outcome** dari kegiatan ini adalah pulihnya arsip vital masyarakat yang terdampak bencana. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terselamatkannya arsip vital masyarakat dari kerusakan akibat bencana. **Dampak** kegiatan ini yaitu arsip vital masyarakat terjaga. **Permasalahan** dalam kegiatan tersebut adalah keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam hal kebencanaan. **Upaya** penyelesaian yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan BPBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota.
- 2) **Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi** dengan **keluaran** pengalihan media sebanyak 286.160 arsip serta penilaian dan autentifikasi sebanyak 14.160 arsip hasil alih media. **Outcome** dari kegiatan ini adalah arsip fisik teralihmedia menjadi arsip digital. **Manfaat** kegiatan ini adalah terjaganya informasi arsip apabila fisik arsip mengalami kerusakan. **Dampak** dari kegiatan ini adalah terjaganya kelestarian wujud fisik arsip, efisiensi tempat penyimpanan/penataan/perpindahan arsip, menjaga keamanan arsip dari bencana, dan mencegah pemalsuan dokumen. **Permasalahan** dalam kegiatan tersebut adalah keterbatasan kemampuan Sumber Daya

Manusia dan sarana prasarana alihmedia arsip. **Upaya** penyelesaian mengoptimalkan ketersediaan sumber daya yang ada baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sarana prasarana.

- 3) **Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun** dengan **keluaran** fasilitasi pemusnahan arsip dengan masa retensi di bawah 10 tahun sejumlah 42.075 arsip dan di 18 OPD. **Outcome** dari kegiatan ini adalah penyusutan arsip non permanen. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah efisiensi tempat penyimpanan arsip. **Dampak** dari kegiatan ini adalah terselamatkannya arsip yang memiliki nilai guna tinggi dari masing-masing OPD setelah penilaian arsip permanen dan non permanen. **Permasalahan** dalam kegiatan tersebut adalah kurangnya pemahaman tentang penyusutan arsip dan kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia dibidang kearsipan (Arsiparis dan pengelola Arsip) di masing-masing OPD. **Upaya** penyelesaian atas permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan pendampingan kepada OPD yang akan melaksanakan penyusutan arsip baik itu musnah maupun serah.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan kearsipan dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.117 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kearsipan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Arsip	3	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2	100	3	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:

1. Penguatan tata kelola transformasi digital kearsipan;
2. Pengelolaan dan pelestarian arsip statis.

3.4.3 Urusan Pilihan

3.4.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki garis pantai sepanjang 971,52 km dan mencakup 17 kabupaten/kota, 77 kecamatan pesisir serta 373 desa pesisir berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Potensi sumber daya laut meliputi perikanan tangkap, budidaya, produksi garam rakyat, dan pengolahan hasil perikanan, dengan komoditas unggulan seperti nila, lele, bandeng, udang vaname, dan gurame, kawasan konservasi dan pesisir yang terkelola namun tetap diiringi dengan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Terdapat 231.223 pembudidaya ikan, 172.214 nelayan, 15.445 petani garam, serta 8.761 UMKM pengolah hasil perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Dengan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, loka perbenihan dan budidaya ikan, sentra pergaraman serta dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diiringi dengan SDM sektor kelautan dan perikanan yang terampil maka sektor kelautan dan perikanan Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi, dengan tetap menjaga kelestarian kawasan serta memperkuat pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

- 1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil** didukung anggaran Rp1.663.292.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,60%. Program ini memiliki 5 indikator dengan capaian indikator seluruhnya sangat tinggi antara lain Persentase produksi garam (1.716%) hal ini disebabkan karena cuaca yang mendukung produksi garam dan pemberian bantuan sarpras pergaraman; serta indikator persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi wilayah Selatan (149,49%) sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Terhadap target akhir RPD tahun 2026 terdapat 2 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain kualitas garam masih rendah; kapasitas SDM pesisir belum memadai; pemahaman masyarakat terhadap RTRW darat-laut masih minim; serta sebagian pemanfaatan WP3K belum memiliki izin atau KKPR. **Upaya** mengatasi dengan memberikan bantuan sarpras dan pembinaan produksi garam; melakukan pemberdayaan dan pelatihan bagi petambak garam dan masyarakat pesisir; memberikan contoh kasus dan solusi terkait RTRW; mengusulkan penetapan kawasan konservasi ke Menteri KP; serta melakukan sosialisasi dan membuka gerai KKPR. **Manfaat** dari program tersebut meningkatnya kuantitas dan kualitas garam; meningkatnya kapasitas SDM petambak garam dan masyarakat pesisir; zonasi kawasan sesuai regulasi; serta pemanfaatan WP3K yang selaras dengan RTRW dan ketentuan KKPR.
- 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** didukung anggaran Rp42.883.560.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,24%. Program ini memiliki 14 indikator dengan tingkat capaian 13 indikator sangat tinggi antara lain Indeks harga yang diterima oleh nelayan (114,19%) dan Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto

(122,21%); dan 1 capaian indikator rendah yaitu Persentase produksi perikanan tangkap (53,2%), hal ini disebabkan minimnya kegiatan *restocking* ikan di perairan umum daratan, dan sumber daya ikan di Laut Jawa semakin menurun. Terhadap target akhir RPD tahun 2026 terdapat 11 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya penurunan jumlah produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD) sebesar 5.656,07 ton dibandingkan tahun 2024 yang diakibatkan karena minimnya kegiatan *restocking* ikan di waduk dan sungai sehingga jumlah ikan yang dapat ditangkap menurun serta berkurangnya jumlah nelayan aktif di PUD; Jumlah produksi di Perairan Laut telah meningkat sebesar 16.787,64 ton dibandingkan tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa program yang dijalankan telah cukup berhasil, namun belum cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan karena sumber daya ikan di laut Jawa *overfishing* dan sarana prasarana yang belum optimal dan memadai. **Upaya** mengatasi dengan *restocking* ikan di waduk dan sungai, penenggelaman *fish apartment* dan terumbu karang buatan di laut, hibah sarpras peralatan penangkapan ikan, serta melakukan penanaman mangrove di daerah pesisir. **Manfaat** dari program tersebut adalah bertambahnya ketersediaan stok ikan di PUD, tersediannya tempat berlindung, memijah dan pembesaran ikan serta terjaganya kelestarian sumber daya perairan.

3. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** didukung anggaran Rp13.231.856.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,53%. Program ini memiliki 4 indikator, dengan tingkat ketercapaian 3 indikator sangat tinggi antara lain Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya (122,12%); Persentase produksi ikan konsumsi air laut (104,8%), serta 1 indikator dengan tingkat ketercapaian tinggi yaitu Produksi perikanan budidaya (88,34%). Terhadap target akhir RPD tahun 2026 terdapat 3 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain keterbatasan sarpras budidaya ikan; masih ditemui adanya penyakit ikan; harga pakan yang tinggi; serta banyak pembudidaya belum memiliki izin usaha dan belum menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)/ Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)/ Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). **Upaya** mengatasi dengan memberikan bantuan sarana-prasarana budidaya ikan; melakukan monitoring penyakit ikan; mendorong penggunaan pakan mandiri; serta membina pembudidaya mengenai pentingnya perizinan usaha. **Manfaat** dari program tersebut peningkatan produksi budidaya; terkendalinya hama dan penyakit ikan; menurunnya biaya produksi karena menggunakan pakan mandiri serta terjaminnya mutu produksi budidaya ikan karena sertifikasi CPIB/CBIB/CPPIB.
4. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan** didukung anggaran Rp1.360.226.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,82%. Program ini memiliki 7 indikator dengan seluruh capaian indikator sangat tinggi antara lain Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan

(103,28%); dan Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan (102,86%). Terhadap target akhir RPD tahun 2026 seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain pengawasan laut belum optimal karena keterbatasan kemampuan armada kapal pengawas; pengetahuan masyarakat tentang teknologi penangkapan dan perizinan masih rendah; banyaknya kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut; masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai peraturan; serta pengawasan Pokmaswas terkendala keterbatasan sarana dan dana. **Upaya** mengatasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarpras pengawasan dan bekerjasama dengan instansi/unsur pengawasan yang lain; melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang perizinan, alat tangkap yang sesuai peraturan, dan sosialisasi peraturan pemanfaatan ruang laut; melakukan pelatihan dan hibah sarana bagi Pokmaswas. **Manfaat** dari program tersebut terawasinya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; pelaku usaha lebih memahami regulasi; serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

- 5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan** didukung anggaran Rp720.510.000,00 dengan realisasi fisik 97,55% dan keuangan 93,58%, hal ini disebabkan terdapat 1 kelompok calon penerima hibah sarpras pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tidak memenuhi syarat. Program ini memiliki 2 indikator dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi yaitu jumlah produksi olahan ikan (180,69%) dan persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan (102%). Terhadap target akhir RPD tahun 2026 seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain Angka Konsumsi Ikan (AKI) yang masih rendah; belum banyaknya ragam diversifikasi olahan hasil perikanan; jaminan mutu olahan hasil perikanan. **Upaya** mengatasi dengan melaksanakan kampanye gemar makan ikan; melakukan pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; pembinaan penerapan mutu hasil perikanan pada para pelaku usaha pengolahan terutama pelaku usaha skala kecil. **Manfaat** dari program tersebut adalah semakin dikenalnya produk olahan hasil perikanan sebagai salah satu sumber gizi utama; meningkatnya AKI; semakin banyak diversifikasi olahan ikan; dan meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tabel 3.118 Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU PULAU KECIL							
1	Persentase produksi garam	%	3	34,32	1.144	2	34,32	1.716
2	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	5	100	5	5	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	4,5	4	88,89	4	4	100
4	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	4,61	4,38	95,01	2,93	4,38	149,49
5	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	12,30	7,8	63,41	7,8	7,8	100
II PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
1	Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	2,66	53,2	5	2,66	53,2
2	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108,81	124,25	114,19	108,54	124,25	114,47
3	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	55,55	50	90,01	50	50	100
4	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	80	111,11	72	80	111,11
5	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	72,72	72,27	100	72,72	72,27	100
6	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81,82	100	122,22	81,82	100	122,22
7	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	%	70	100	142,86	100	100	100
8	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	81,82	81,81	99,99	71,72	81,81	114,07
9	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	81	100	81	81	100
10	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	72,27	81,81	113,2	72,27	81,81	113,2

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Loh-gending	%	63	63	100	63	63	100
14	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	72	100	72	72	100
III PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA								
1	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	5,24	104,8	5	5,24	104,8
3	Produksi perikanan budidaya	Ton	1.827.135	1.092.830,08	59,81	609.000	538.019,95	88,34
4	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111,83	136,23	121,82	111,55	136,23	122,12
IV PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	72	102,86	70	72	102,86
2	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	2	100	2	2	100
3	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	61	100	61	61	100
4	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	2	100	2	2	100
5	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	63	103,28	61	63	103,28
6	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	2	100	2	2	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	61	100	61	61	100
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
1	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	482.404	590.390,03	122,38	160.800	290.551,53	180,69
2	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	4,08	102	4	4,08	102

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi** dengan **keluaran** antara lain sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada 200 stakeholder; 1 lokasi kajian pencadangan kawasan konservasi di Ujungnegoro, Kab. Batang; 4 lokasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan yaitu di Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kab. Jepara dan Kab. Cilacap; penanaman 66.000 batang mangrove dan penenggelaman 8 terumbu karang buatan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan pemahaman stakeholder terhadap peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang laut dan melindungi ekosistem pesisir dan ruang laut. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan ruang laut. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih terdapat pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut yang menyebabkan kerusakan habitat dan ekosistem. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan operasi pengawasan ruang laut, penyusunan kajian pencadangan kawasan konservasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta rehabilitasi mangrove.
- 2) **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan **keluaran** antara lain hibah sarpras Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) berupa *geoisolator* atau *geomembrane*; Pembinaan terhadap 118 petambak garam; penyusunan data potensi di 9 sentra garam rakyat; dan pelatihan kepada 26 orang pokmas pesisir. **Outcome** berupa peningkatan pengetahuan petambak garam dan kelompok masyarakat pesisir. **Manfaat** kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas garam dan terlatihnya kelompok masyarakat pesisir dalam perbengkelan, serta

tersediannya data potensi sentra garam. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas garam dan meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat pesisir. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih rendahnya kemampuan petambak garam dan kelompok masyarakat pesisir sehingga menyebabkan rendahnya kualitas garam serta rendahnya kemampuan kelompok masyarakat pesisir. **Upaya** mengatasi dengan hibah *geoisolator/geomembrane* dan pembinaan petambak garam serta kelompok masyarakat pesisir.

2. Program Perikanan Tangkap didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil** dengan **keluaran** antara lain penyusunan laporan statistik data produksi perikanan tangkap dari 34 kabupaten/kota; pemberian premi asuransi sebanyak 15.000 orang nelayan kecil; hibah kepada 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kab.Kebumen dan Kab.Purworejo; penenggelaman *fish apartment* sebanyak 40 unit. **Outcome** kegiatan berupa tersediannya data produksi perikanan tangkap; terlindunginya 15.000 nelayan kecil, 25 lembaga usaha nelayan, dan 25 rumah tangga nelayan; serta meningkatnya produksi perikanan tangkap. **Manfaat** yang diperoleh yaitu terdatanya produksi perikanan tangkap, terlindunginya nelayan kecil dan meningkatnya produksi perikanan tangkap. **Dampak** kegiatan yaitu meningkatnya produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan kecil. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu produksi perikanan yang tidak terdata; nelayan kecil yang tidak terlindungi asuransi dan penurunan produksi perikanan. **Upaya** yang dilakukan dengan pendataan produksi perikanan tangkap; pemberian asuransi nelayan; penenggelaman *fish apartment* dan hibah sarpras perikanan tangkap.
- 2) **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** pelaksanaan gerai perizinan berusaha berbasis resiko yang menghasilkan dokumen kapal perikanan sebanyak 1.668 unit kapal; hibah alat tangkap ramah lingkungan 15 unit; rekomendasi usaha perikanan 158 unit dan sosialisasi pengelolaan sumberdaya ikan yang ramah lingkungan sebanyak 30 orang. **Outcome** kegiatan berupa terdaftarnya usaha perikanan dan kapal perikanan tangkap; meningkatnya produksi perikanan tangkap dan tersosialisasikannya pengelolaan sumberdaya ikan yang ramah lingkungan. **Manfaat** kegiatan berupa terdaftarnya usaha dan kapal perikanan; peningkatan produksi perikanan tangkap dan terjaganya sumberdaya ikan. **Dampak** kegiatan berupa meningkatnya produksi perikanan dan meningkatnya kesejahteraan nelayan. **Permasalahan** masih adanya usaha dan kapal perikanan yang belum terdaftar serta penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. **Upaya** mengatasi dengan melakukan pendaftaran usaha dan kapal perikanan; pemberian hibah alat tangkap ramah lingkungan dan sosialisasi pengelolaan sumberdaya ikan yang ramah lingkungan.

- 3) **Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi** dengan **keluaran** berupa Pembangunan *breakwater* pada 3 pelabuhan perikanan yaitu PPP Asemdayong, PPP Tawang, dan PPP Larangan; Pengerukan Kolam Pelabuhan/Muara pada 5 pelabuhan perikanan yaitu PPP Asemdayong, PPP Tawang, PPP Larangan, PPP Logending, PPN Tegalsari; Perbaikan jalan kawasan di PPN Tegalsari; Rehabilitasi dermaga di PPP Bajomulyo. **Outcome** berupa lancarnya proses bongkar muat hasil tangkapan, keamanan dan kemudahan kapal untuk melaut. **Manfaat** kegiatan berupa meningkatnya pelayanan kepelabuhanan kepada nelayan. **Dampak** kegiatan berupa peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu sarana prasarana pelabuhan yang rusak, serta alur pelabuhan yang dangkal. **Upaya** mengatasi dengan melakukan pengerukan sedimen di kolam pelabuhan dan alur; membangun dermaga, *breakwater* dan jalan kawasan.

3. Program Perikanan Perikanan Budidaya didukung 3 kegiatan yaitu :

- 1) **Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah** dengan **keluaran** antara lain penyusunan data statistik produksi perikanan budidaya 35 kabupaten/kota; fasilitasi perizinan berusaha sub-sektor perikanan budidaya yang menghasilkan 10 unit pembesaran ikan yang memiliki Surat Pernyataan Penerapan Prinsip-Prinsip (SP4) CBIB/sertifikat CBIB; penilaian dan pembinaan terhadap 1 unit produsen pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB dan 4 unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB. **Outcome** kegiatan berupa penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dari 35 Kabupaten/Kota, unit pembesaran, pembenihan dan produsen pakan yang bersertifikat menjamin produksi budidaya ikan yang bermutu. **Manfaat** yang diperoleh yaitu tersedianya data dan informasi usaha perikanan budidaya dari 35 kabupaten/kota dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pembudidayaan ikan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan standar mutu usaha perikanan, serta tersedianya benih, ikan dan pakan bermutu. **Dampak** kegiatan berupa meningkatnya mutu dan daya saing produksi perikanan budidaya; terwujudnya sistem usaha perikanan budidaya yang tertib perizinan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kepercayaan pasar dan konsumen terhadap produk perikanan budidaya yang bersertifikat. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain lambatnya pemutakhiran data produksi perikanan budidaya di kabupaten/kota; rendahnya kesadaran pelaku usaha pembudidayaan ikan untuk sertifikasi CBIB, CPIB, serta CPPIB; keterbatasan kapasitas teknis dan sarpras unit usaha untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi CBIB, CPIB, serta CPPIB. **Upaya** yang dilakukan dengan melakukan validasi data statistik produksi perikanan budidaya secara berkala; sosialisasi, pendampingan teknis dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk sertifikasi CBIB, CPIB, dan CPPIB.
- 2) **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut** dengan **keluaran** antara lain rehabilitasi di Loka Karimunjawa; produksi ikan konsumsi sebesar

2.877,5 kg dan peningkatan keterampilan SDM loka/balai sebanyak 15 orang. **Outcome** kegiatan berupa peningkatan kapasitas balai benih ikan; tersediannya ikan konsumsi dan meningkatnya kapasitas SDM loka/balai. **Manfaat** yang diperoleh meningkatnya kualitas benih ikan dan tersediannya ikan konsumsi. **Dampak** kegiatan berupa peningkatan pelayanan dan kapasitas balai benih ikan/loka dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi adalah sarpras balai benih ikan yang rusak; SDM balai benih ikan/loka yang perlu ditingkatkan serta kesulitan mendapatkan ikan segar. **Upaya** yang dilakukan dengan melakukan rehab balai benih ikan; melakukan pelatihan bagi SDM balai benih ikan/loka dan produksi ikan konsumsi.

- 3) **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat** dengan **keluaran** antara lain berupa produksi 223.000 ekor benih ikan endemik lokal, 40.841.475 ekor benih unggul, 7.945 ekor calon induk bermutu; dan rehabilitasi balai benih ikan 8 unit di Loka Penjualan Benih Ikan (PBI) Janti, Loka PBI Muntilan, Loka PBI Ngrajek, Loka PBI Ambarawa, Loka PBI Tambaksogra, Loka Budidaya Ikan Air Payau (BIAP) Tugu, Loka BIAP Maribaya, Loka PIAP Sluke. **Outcome** kegiatan berupa peningkatan produksi benih dan kapasitas balai benih ikan. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah semakin meningkatnya mutu benih ikan, mutu ikan dan mutu pakan serta meningkatnya kapasitas produksi balai-balai budidaya. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha pembudidayaan ikan di perairan darat dan ketersediaan benih berkualitas secara berkelanjutan mendorong peningkatan hasil produksi, menjaga kelestarian sumber daya genetik ikan lokal, serta memperkuat daya saing sektor perikanan budidaya daerah. **Permasalahan** yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran unit pembudidayaan ikan untuk melakukan sertifikasi (CPIB, CBIB, CPPIB) yang memberikan jaminan mutu pada benih, ikan dan pakan yang diproduksi, harga pakan ikan buatan yang masih tinggi, serta rusaknya sarpras balai-balai perbenihan. **Upaya** mengatasi dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan cara perbenihan dan budidaya ikan yang baik kepada unit-unit perbenihan rakyat dan pembudidayaan ikan skala kecil, pemberian bantuan hibah sarpras budidaya kepada kelompok pembudidayaan ikan dan pengembangan pakan mandiri oleh kelompok pembudidayaan ikan dan dilakukan rehabilitasi untuk penguatan balai-balai budidaya ikan.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil** dengan **keluaran** antara lain sosialisasi peraturan perundangan sektor Kelautan dan Perikanan (KP) kepada 30 orang pelaku usaha pemanfaatan ruang laut; 30 orang pelaku usaha penangkapan ikan; 30 orang pelaku usaha pembudidayaan ikan; dan hibah sarpras pengawasan kepada 6 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). **Outcome** berupa meningkatnya kepatuhan perundangan para pelaku usaha kelautan dan perikanan dan menguatnya pengawasan partisipatif

melalui Pokmaswas dalam menjaga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. **Manfaat** kegiatan adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan serta meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. **Dampak** berupa terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib, berkelanjutan, dan bertanggung jawab serta berkurangnya potensi pelanggaran di wilayah laut sampai dengan 12 mil. **Permasalahan** yang dihadapi masih terbatasnya pemahaman peraturan perundangan sebagian pelaku usaha kelautan dan perikanan serta keterbatasan sarana prasarana pengawasan oleh Pokmaswas. **Upaya** yang dilakukan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha serta memberikan hibah sarpras pengawasan kepada Pokmaswas.

- 2) **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** antara lain sosialisasi peraturan perundangan sektor KP kepada 30 orang pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan; 30 orang pelaku usaha pada usaha pembudidaya; 30 orang pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya. **Outcome** berupa meningkatnya kepatuhan perundangan para pelaku usaha penangkapan, pembudidaya, serta pengolahan dan pemasaran ikan di perairan umum daratan lintas kabupaten/kota. **Manfaat** kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi sektor kelautan dan perikanan serta mendukung tertib usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan darat sesuai kewenangan provinsi. **Dampak** dari kegiatan tersebut terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang tertib, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, serta berkurangnya potensi pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan. **Permasalahan** yang dihadapi masih terbatasnya pemahaman dan kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan di perairan umum daratan lintas wilayah. **Upaya** yang dilakukan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan, serta pengolahan dan pemasaran ikan di perairan umum daratan lintas kabupaten/kota

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** antara lain fasilitasi perijinan kepada 35 orang

pelaku usaha; dan data statistik produksi pengolahan di 35 kabupaten/kota. **Outcome** berupa meningkatnya kepatuhan dan tertib perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas kabupaten/kota serta tersedianya data statistik produksi pengolahan perikanan yang akurat dari 35 Kabupaten/kota. **Manfaat** kegiatan memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan serta mendukung perencanaan dan pengendalian sektor perikanan melalui ketersediaan data produksi yang terintegrasi. **Dampak** dari kegiatan tersebut terwujudnya usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang tertib, berdaya saing, dan aman serta meningkatnya mutu dan nilai tambah produk perikanan. **Permasalahan** yang dihadapi sebagian pelaku usaha belum memahami dan memenuhi persyaratan perizinan berusaha, serta lambatnya pemutakhiran data produksi pengolahan hasil perikanan. **Upaya** yang dilakukan dengan melakukan fasilitasi perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan kepada pelaku usaha, serta melakukan validasi data setiap semester.

- 2) **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar** dengan **keluaran** peningkatan kompetensi SDM pengolahan dan pemasaran sebanyak 259 orang; pembinaan kelayakan dasar terhadap 102 unit pengolahan ikan (UPI); 3 dokumen sertifikasi ISO 17065:2012, ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017; fasilitasi pemasaran kepada 81 orang pengolah dan pemasar; GEMARIKAN sebanyak 1.000 orang; serta rehabilitasi 2 unit sarana laboratorium pengujian. **Outcome** berupa meningkatnya mutu, keamanan, dan daya saing produk hasil perikanan, unit usaha yang memenuhi kelayakan dasar, sistem sertifikasi, sarana pengujian yang andal serta meningkatnya konsumsi ikan. **Manfaat** kegiatan meningkatnya mutu dan keamanan produk olahan perikanan, semakin luasnya akses pasar dan meningkatnya gizi dan protein masyarakat. **Dampak** kegiatan adalah tersedianya produk olahan perikanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi, meningkatnya kepercayaan pasar, tingginya nilai tambah produk perikanan dan masyarakat yang terpenuhi gizinya. **Permasalahan** yang dihadapi SDM dan unit pengolahan ikan belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, keterbatasan sarana pengujian laboratorium, terbatasnya akses pemasaran produk, dan konsumsi ikan yang rendah. **Upaya** yang dilakukan melaksanakan peningkatan kompetensi SDM, pembinaan kelayakan dasar UPI, fasilitasi sertifikasi sistem mutu dan laboratorium, rehabilitasi sarana laboratorium pengujian, fasilitasi pemasaran produk, serta kampanye GEMARIKAN kepada masyarakat.
- 3) **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** antara lain pembinaan 28 orang pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik. **Outcome** berupa kelancaran dan kepastian penyediaan dan penyaluran bahan baku ikan

bagi industri pengolahan ikan. **Dampak** kegiatan yaitu meningkatnya efisiensi rantai pasok bahan baku ikan dan stabilnya produksi industri pengolahan ikan. **Manfaat** kegiatan adalah tersedianya ikan sebagai bahan konsumsi dan bahan baku industri pengolahan. **Permasalahan** yang dihadapi terputusnya rantai dingin dan distribusi yang panjang antara sumber produksi ikan dengan pasar dan industri. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi dengan melakukan pemetaan distribusi dan pembinaan pada penyedia layanan jasa logistik.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.119 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	5	100	14	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	14	100	73	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4	100	9	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	7	100	14	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2	100	7	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Asuransi kepada 10.000 nelayan;
2. Hibah sarpras budidaya ikan kepada 69 kelompok yang tersebar di 23 kabupaten/kota; sarpras pengolahan hasil perikanan kepada 5 kelompok di 4 kabupaten; sarpras petambak garam rakyat kepada 30 kelompok di 5 Kabupaten; sarpras perempuan/taruna pesisir kepada 4 kelompok di 3 Kabupaten; serta sarpras pengawasan kepada 16 kelompok di 4 kabupaten dan hibah peralatan kepada 3 Pokmaswas di 3 Kabupaten;
3. Pembangunan 1 unit pendederan nila salin di Kabupaten Jepara dan rehabilitasi loka-loka di Balai Pengembangan Budidaya Ikan;
4. Kampanye Gemarikan kepada 1.700 peserta;
5. Penanaman 70.300 batang pohon mangrove dan cemara laut;
6. Pembentukan 1 kawasan yang dicadangkan untuk konservasi;

7. Levelling kawasan dan pembangunan Dermaga apung di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kab. Demak;
8. Rehabilitasi tempat pelelangan ikan di TPI Banyutowo Kab. Pati

3.4.3.2 Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kontribusi sektor pariwisata dari usaha akomodasi serta makan dan minum pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan yang terus tumbuh sepanjang tahun tentunya meningkatkan PDRB, arah kebijakan pariwisata Jawa Tengah difokuskan pada peningkatan daya tarik destinasi, penguatan promosi, pengembangan SDM dan ekonomi kreatif, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hasil yang ingin dicapai meliputi pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta terciptanya lapangan kerja baru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Permasalahan utama yang diselesaikan pada tahun 2025 antara lain : Peningkatan kualitas tata kelola destinasi wisata, Pemerataan kunjungan wisatawan di seluruh kabupaten/kota, Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif, serta Perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif daerah. Upaya pengembangan pariwisata dilakukan melalui penguatan promosi digital, peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk PT Angkasa Pura, serta penyelenggaraan kegiatan seperti fam trip, business forum, dan event pariwisata di daerah. Selain itu, dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha serta desa wisata untuk mendorong inovasi produk dan atraksi wisata, disertai kemudahan perizinan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Urusan Pariwisata Tahun 2025 adalah :

1. Peringkat 5 pada Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang diselenggarakan oleh Crescentrating bekerja sama dengan Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) dan Bank Indonesia (BI)
2. Apresiasi Desa Wisata Integratif pada Lomba Desa Wisata Nusantara 2025 yaitu desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang di selenggarakan oleh Kemenpar Republik Indonesia.
3. Desa Wisata Terbaik kategori desa sangat tertinggal/tertinggal/berkembang pada Lomba Desa Wisata Nusantara 2025 yaitu Desa Melung Kabupaten Banyumas
4. Desa Wisata Favorit Kategori Desa Maju/Mandiri (Ekonomi Kreatif) pada Lomba Desa Wisata Nusantara 2025 yaitu desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
5. Juara 3 Kategori Daya Tarik Wisata Terbaik Nasional pada Wonderful Indonesia Award 2025 yaitu The Pikas Adventure, Banjarnegara, Jawa Tengah.
6. Juara Kategori Cendera Mata pada Anugerah Pesona Indonesia – API Awards diraih oleh Gerabah Melikan, Kabupaten Klaten;
7. Juara Kategori Olahraga & Petualangan pada Anugerah Pesona Indonesia – API Awards diraih oleh Jelajah Kampung Siluman, Kabupaten Klaten
8. Juara Wakil 3 Duta Wisata Indonesia dengan titel Duta Wisata Bahari 2025

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan program pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui Urusan Pariwisata didukung anggaran sebesar Rp14.033.162.000,00 untuk melaksanakan 4 Program, yaitu:

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** didukung anggaran Rp.6.686.674.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,09%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih rendahnya kapasitas dan kualitas tata kelola destinasi pariwisata, khususnya dalam aspek perencanaan, pengelolaan, dan pelibatan masyarakat lokal. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi penyusunan rencana aksi pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan, pendampingan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan daya tarik wisata unggulan. **Manfaat** pelaksanaan program dari aspek ekonomi adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata, sedangkan dari aspek sosial budaya adalah terbentuknya sistem pengelolaan destinasi yang mengedepankan pelestarian nilai seni, budaya, dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
2. **Program Pemasaran Pariwisata** didukung anggaran Rp4.810.816.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 87,43%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Jumlah kunjungan wisatawan. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi pada tahun 2025 adalah belum optimalnya efektivitas strategi promosi dan digitalisasi pemasaran pariwisata, serta kurangnya diversifikasi daya tarik wisata yang mampu menarik wisatawan ke daerah-daerah non-utama. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan komunitas masih perlu diperkuat untuk memperluas jangkauan promosi. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi peningkatan kualitas dan inovasi event promosi yang menonjolkan keunikan lokal, pemanfaatan platform digital dan media sosial secara lebih terintegrasi untuk promosi destinasi dan kalender event Jawa Tengah, serta penguatan kolaborasi dengan asosiasi pelaku pariwisata, influencer, dan media nasional maupun internasional. Selain itu, penyusunan strategi pemasaran berbasis data (*market intelligence*) juga dilakukan untuk menentukan segmen wisatawan potensial dan mengembangkan pola perjalanan wisata baru yang lebih tersebar ke berbagai daerah. **Manfaat** pelaksanaan program dari aspek ekonomi adalah meningkatnya perputaran ekonomi di destinasi wisata serta bertambahnya peluang usaha masyarakat lokal, sedangkan dari aspek sosial budaya program ini mendorong promosi budaya daerah dan memperkuat

jejaring kerja sama antar daerah, antar provinsi, bahkan antar negara melalui kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

didukung anggaran Rp2.147.320.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,17%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih terbatasnya kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta belum meratanya akses pelatihan dan sertifikasi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu, sebagian pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif masih menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital dan mengembangkan inovasi produk yang berdaya saing. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, sertifikasi profesi, serta pendampingan kelembagaan. Pemerintah daerah juga mendorong terbentuknya ekosistem kolaboratif antara pelaku usaha, komunitas kreatif, dan akademisi guna memperkuat transfer pengetahuan dan inovasi. Selain itu, dilakukan fasilitasi akses terhadap informasi, promosi, dan jejaring pasar bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan daya saing. **Manfaat** pelaksanaan program ini dari aspek ekonomi adalah meningkatnya keterampilan tenaga kerja dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari aspek sosial budaya, program ini turut berkontribusi pada pelestarian budaya lokal serta mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi berbasis kearifan lokal yang memperkaya daya tarik wisata Jawa Tengah.

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

didukung anggaran Rp388.352.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 95,81%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (Kabupaten/Kota layanan). Terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku ekonomi kreatif terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta belum optimalnya pendampingan dalam proses pendaftaran dan pemanfaatan HKI untuk mendukung pengembangan usaha. Selain itu, kapasitas manajerial dan akses pemasaran bagi pelaku kreatif juga masih terbatas, sehingga potensi ekonomi kreatif daerah belum sepenuhnya berkembang. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan melalui pendampingan dan fasilitasi pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif, penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait manajemen kekayaan intelektual, serta aktivasi rumah kreatif (creative hub) sebagai pusat pengembangan jejaring dan kolaborasi antar pelaku kreatif di

kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berbasis potensi unggulan daerah. **Manfaat** pelaksanaan program ini dari aspek ekonomi adalah meningkatnya perlindungan hukum atas karya dan inovasi yang dihasilkan pelaku ekonomi kreatif, sehingga membuka peluang pengembangan pasar dan peningkatan pendapatan melalui lisensi dan royalti. Dari aspek sosial budaya, program ini memperkuat apresiasi terhadap karya kreatif lokal serta menjaga orisinalitas ide dan inovasi yang menjadi ciri khas daerah.

Tabel 3.120 Capaian Kinerja Program Urusan Pariwisata

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
1	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	40	26,67	66,68	26,67	26,67	100
II	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	164.717.928	143.926.957	87,38	54.069.703	74.446.231	137,69
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
1	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	Kab./ Kota	24	19	79,17	8	13	162,5
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
1	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	33,87	50,91	150,31	33,87	50,91	150,31

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi** dengan **keluaran** pelatihan pengelolaan DTW yang sesuai standarisasi di 2 Kabupaten (Wonosobo dan Kebumen); Pelatihan tata Kelola Desa Wisata di 2 Kabupaten (Magelang dan Semarang); FGD Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara; Pendampingan dan pengelolaan Desa Wisata se Jawa Tengah; gelar desa wisata Jawa Tengah di Kabupaten Banjarnegara, kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kinerja kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang sesuai standar. **Manfaat** pelaksanaan kegiatan tersebut adalah beragamnya penyusunan paket wisata untuk menarik wisatawan. **Dampak** kegiatan ini yaitu kegiatan ini

adalah meningkatnya kualitas pengelolaan dan daya saing destinasi wisata di tingkat lokal **Permasalahan** dalam kegiatan pengelolaan DTW provinsi adalah masih rendahnya pengelolaan produk dan atraksi wisata di DTW dan Desa Wisata. **Upaya** dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan mendorong pelaku/penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif untuk diversifikasi produk dan atraksi wisata.

- 2) **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)** dengan **keluaran** Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Geopark Kebumen sebanyak 50 orang; Penyusunan Raperda Kepariwisata 1 dokumen; Event Bersama 2 kali pada Wilayah Pakujembara di Karimunjawa dan Wilayah Kedungsepur di Kopeng Kabupaten Semarang, kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kinerja kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan ini berupa meningkatnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata secara terpadu. **Manfaat** dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan munculnya inisiatif lokal dalam penguatan atraksi wisata sesuai karakter wilayah. **Dampak** kegiatan ini adalah semakin terbangunnya konektivitas antar destinasi dalam satu Kawasan. **Permasalahan** yang dihadapi adalah belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan belum terkoneksi destinasi antar wilayah di dalam kawasan strategis. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat, memperkuat koordinasi dan keterpaduan antar daerah, serta mendorong kolaborasi lintas pelaku pariwisata dalam pengembangan produk dan paket wisata kawasan.
- 3) **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata sebanyak 1.350 Usaha Pariwisata di 35 kabupaten/Kota; Pelaksanaan *Inputing* dan *Updating Data* Usaha Pariwisata ke dalam Aplikasi *Map Destination Online System* (MADOSI), kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kinerja kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya pemenuhan standar usaha pariwisata dan ketersediaan basis data usaha pariwisata yang lebih mutakhir. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan pada usaha pariwisata dan tingginya rasa aman serta kenyamanan wisatawan dalam mengakses layanan pariwisata. **Dampak** kegiatan ini adalah terciptanya industri pariwisata Jawa Tengah yang lebih sehat dan berdaya saing dan meningkatnya akurasi data untuk perencanaan dan pengawasan sektor pariwisata. **Permasalahan** dalam kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi adalah masih kurangnya kesadaran pelaku usaha pariwisata dalam meningkatkan kualitas pelayanannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB). **Upaya** dalam mengatasi permasalahan tersebut yang

dilakukan dengan melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata untuk menciptakan industri pariwisata Jawa Tengah yang berdaya saing.

2. Program Pemasaran Pariwisata ini didukung kegiatan **Pemasaran Pariwisata dalam Dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi** dengan **keluaran** Promosi melalui media luar ruang (Cetak MMT); Promosi media digital (Foto wisata, pengembangan website Visit Jawa Tengah); Promosi melalui media elektronik; Promosi melalui media cetak (cetak leaflet); Penyelenggaraan Pesta Rakyat dalam rangka Hari jadi Jawa Tengah, Festival Jamu dan Kuliner; Jateng Travel Fair di Surakarta; Fasilitasi Event Pariwisata Prioritas sebanyak 10 event (Grebeg Sudiro, Solo Menari, Solo Keroncong Festival, Java Ballon Attraction, Festival Arak-arakan Cheng Ho, Festival Gunung Slamet, Dieng Culture Festival, Festival Kota Lama, Moro Borobudur dan International Mask Festival); Jateng on The Spot 2 kali dengan peserta dari BPW luar Jateng, influencer, media cetak dan elektronik, media fujian, fotografer nasional dan lokal, penyusunan data kepariwisataan 1 dokumen dan penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPADA) Jawa Tengah 1 dokumen. kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kinerja kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah **Outcome** kegiatan ini berupa meningkatnya eksposur dan visibilitas potensi pariwisata Jawa Tengah secara nasional dan internasional. **Manfaat** kegiatan ini adalah semakin dikenalnya berbagai destinasi wisata, budaya, dan event unggulan Jawa Tengah oleh masyarakat luas. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya arus kunjungan wisatawan, bertumbuhnya pendapatan ekonomi daerah dari sektor pariwisata, serta menguatnya citra Jawa Tengah sebagai destinasi pariwisata yang menarik. **Permasalahan** yang dihadapi adalah belum sinerginya pengembangan pasar dan belum sepenuhnya efektif metode promosi yang digunakan. **Upaya** yang dilakukan adalah menyusun pemetaan pangsa pasar potensial, mengembangkan pola perjalanan wisata, serta memperkuat promosi berbasis digital dan kolaborasi lintas pelaku pariwisata.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif** dengan keluaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif dengan keluaran Sosialisasi dan Pengisian Borang Penilaian Mandiri kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) sebanyak 2 kali dan penyelenggaraan Semarak Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif di Kabupaten Wonosobo, kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kinerja kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman daerah terhadap parameter penilaian kota kreatif dan meningkatnya eksposur para pelaku kreatif di daerah. **Manfaat** kegiatan ini adalah berkembangnya ide dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif melalui ruang kolaborasi antar komunitas. **Dampak** kegiatan ini adalah tumbuhnya ekosistem kreatif

yang lebih kuat di daerah, meningkatnya identitas kreativitas lokal, serta bertambahnya peluang usaha kreatif yang dapat mendukung pariwisata dan ekonomi daerah. **Permasalahan** yang dihadapi adalah belum adanya pemetaan potensi unggulan pada 17 subsektor ekonomi kreatif di daerah. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dan pendataan potensi ekonomi kreatif sesuai karakteristik wilayah.

- 2) **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** dengan **keluaran** Fasilitas sertifikasi hak merek untuk 50 orang melalui Perlindungan Hasil Kreativitas. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman pelaku kreatif terhadap pentingnya perlindungan HKI dan meningkatnya jumlah produk kreatif yang memperoleh perlindungan hukum. **Manfaat** kegiatan ini adalah bertambahnya nilai ekonomi produk kreatif melalui perlindungan merek yang sah. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya daya saing pelaku kreatif melalui peluang pendapatan baru seperti royalti, serta meningkatnya kepastian hukum atas karya kreatif sehingga mendorong inovasi berkelanjutan. **Permasalahan** yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman pelaku kreatif dalam proses pendaftaran HKI. **Upaya** yang dilakukan adalah memberikan pendampingan, bimbingan teknis, serta mempermudah akses layanan pendaftaran HKI.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan** dengan **keluaran**; Penyusunan kajian nilai tambah ekonomi kreatif 1 dokumen; pameran produk ekonomi kreatif di Jakarta; pelatihan Konten Kreator di bidang pariwisata untuk pengelola Desa Wisata sebanyak 70 orang di Kabupaten Semarang; Sertifikasi Pemandu Wisata 130 orang; pemilihan Mas Mbak (Duta Wisata) Jawa Tengah di Kota Semarang; Apresiasi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Purbalingga; Perkuatan dan Fasilitas Kelembagaan Parekraf melalui Hibah kepada BPPD dan KEK, kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kinerja kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi, profesionalisme, dan peran aktif SDM pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah. **Manfaat** pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan wisata dan kemandirian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. **Dampak** kegiatan ini adalah terwujudnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi. **Permasalahan** yang dihadapi adalah belum optimalnya kesadaran dan kemampuan SDM pariwisata dalam meningkatkan kualitas serta kompetensi, serta masih rendahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan kualitas kompetensi melalui pelatihan teknis dan sertifikasi profesi, memperluas jejaring pelatihan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan akademisi, serta memperkuat kelembagaan kepariwisataan di tingkat kabupaten/kota.

- 2) **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** dengan **keluaran** pelatihan Konten Kreator di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pengelola Desa Wisata sebanyak 150 orang di Kabupaten Semarang, Kota Surakarta dan Kabupaten Purworejo; Digital marketing untuk 25 orang di Semarang; Pelatihan Pengembang Gim sebanyak 25 orang di Semarang, Sertifikasi Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif sebanyak 150 orang (Barista 40 orang, Kuliner 40 Orang, Fotografi 40 orang dan Musik 40 orang), kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kinerja kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan produk berbasis inovasi dan teknologi digital. **Manfaat** dari kegiatan ini adalah meningkatnya kreativitas, produktivitas, dan jejaring usaha pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsektor. **Dampak** kegiatan ini adalah tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar, meningkatnya peluang kerja baru bagi generasi muda, serta bertambahnya kontribusi subsektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. **Permasalahan** yang dihadapi adalah belum optimalnya kesadaran dan kemampuan pelaku ekonomi kreatif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pelatihan peningkatan kapasitas, fasilitasi sertifikasi kompetensi, serta pendampingan pengembangan bisnis kreatif yang berorientasi pasar dan inovasi.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.121 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pariwisata

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemasaran Pariwisata	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi

Rencana strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:

1. Pendampingan pembentukan 200 Desa Wisata;
2. Pelatihan Konten Kreator Pengelola Desa Wisata;
3. Pengembangan Wisata Aglomerasi Borobudur-Kopeng-Rawapening;
4. Pengembangan Wisata Ramah Muslim pada Usaha Pariwisata;
5. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pengelolaan aplikasi *Map Destination Online System (MADOSI)*;
6. Pengembangan pemasaran pariwisata pada 6 DPP Pariwisata Jawa Tengah (Borobudur-Dieng, Semarang-Karimunjawa, Solo-Sangiran, Tegal-Pekalongan, Nusakambangan - Baturraden, Rembang - Blora) melalui Penguatan dan fasilitasi Event Pariwisata ;
7. Penyelenggaraan event-event besar seperti Event Memancing Terbesar di Asia, Semarak Kabupaten/Kota Kreatif, Pesta Rakyat Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, Festival Jamu dan Kuliner, Pemilihan Duta Wisata (Mas dan Mbak) Jawa Tengah serta Aktualisasi dan Apresiasi Kelompok Sadar Wisata ;
8. Peningkatan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi sertifikasi
9. Fasilitasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) untuk produk Ekonomi Kreatif ;
10. Pendampingan uji petik Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif).

3.4.3.3 Urusan Pertanian

A. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, pertanian menjadi salah satu sektor pendukung. Selain itu, pembangunan pertanian juga menjadi bagian dari kebijakan daerah dalam rangka meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya berperan mewujudkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi komoditas pertanian, penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air pertanian, penggunaan benih unggul, pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian, penguatan penyuluhan dan kapasitas SDM pertanian, perlindungan lahan pertanian, perlindungan petani melalui fasilitasi permodalan, dan asuransi pertanian.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan pertanian tahun 2025 dari Kementerian Pertanian yaitu Peringkat dua Lomba Pengawas Benih Tanaman Berprestasi Wilayah Pulau Jawa pada Kegiatan Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional Ke-X.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp275.377.213.000,00 untuk melaksanakan 4 program, yaitu:

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** didukung anggaran Rp106.412.276.000,00 dengan realisasi fisik 99,81% dan keuangan 96,85%. Program ini memiliki 26 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi 23 indikator, sedang 1 indikator, rendah 1 indikator dan sangat rendah 1 indikator. Indikator dengan capaian sedang yaitu Produksi jahe (76,21%) dikarenakan berkurangnya luas tanam dan menurunnya minat petani untuk menanam jahe karena harga jual yang relatif rendah, sehingga banyak petani beralih menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan, sedangkan indikator dengan capaian rendah yaitu Produksi melati (52,85%) dipengaruhi oleh rendahnya minat petani dikarenakan biaya produksi (ongkos petik) yang relatif tinggi dan semakin berkurangnya luas tanam akibat alih fungsi untuk pertanaman padi dan perumahan, serta genangan rob di Kabupaten Batang (Kecamatan Gringsing dan Kandeman) dan Kabupaten Pemalang (Kecamatan Ulujami) menyebabkan tanaman mati dan tidak berproduksi. Adapun indikator dengan capaian sangat rendah yaitu Produksi kedelai (28,63%) yang disebabkan oleh alih komoditas ke tanaman padi yang menjadi prioritas pada program swasembada pangan didukung dengan kondisi iklim kemarau basah dan harga gabah yang baik, serta tidak adanya jaminan harga kedelai sehingga minat petani berkurang. Terhadap target akhir RPD terdapat 16 indikator telah tercapai, 7 indikator akan tercapai, dan 3 indikator perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu stabilitas produksi antar waktu antar wilayah masih fluktuatif sehingga mengakibatkan ketersediaan produksi komoditas pertanian tidak merata. **Upaya** yang dilakukan yaitu peningkatan indeks pertanaman pada lokasi prioritas dengan produktivitas dibawah rata-rata provinsi, peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul bermutu dan perbaikan kualitas lahan dengan pupuk organik dan pembenah tanah, penyesuaian pola tanam antar waktu dan antar wilayah untuk ketersediaan produksi pada bulan defisit, pengamanan produksi dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim, mekanisasi pertanian untuk percepatan tanam dan panen, perlindungan petani dari puso atau gagal panen melalui asuransi pertanian, dan akses permodalan petani melalui subsidi suku bunga, serta optimalisasi kebun benih sebagai penyedia benih. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan stabilisasi pasokan.
2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** didukung anggaran Rp52.366.950.000,00 dengan dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,19%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Luas

cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik (102,76%), dan terhadap target akhir RPD akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu sebagian besar kondisi jaringan irigasi tersier dalam kondisi rusak sepanjang 4.893.060 meter (19,04%) dan non-permanen/tanah sepanjang 13.371.722 meter (52,02%). **Upaya** yang telah dilakukan yaitu rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier pada lokasi prioritas dengan kondisi jaringan rusak dan non permanen dalam rangka peningkatan indeks pertanaman. Selain itu, telah dilakukan koordinasi intensif dengan Dinas PUSDATARU dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Tengah untuk identifikasi jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai dasar dalam intervensi perbaikan dan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu meningkatnya indeks pertanaman dan produksi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi pertanian yang baik.

3. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** didukung alokasi anggaran Rp4.503.760.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,47%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (100%) dan Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim terhadap lahan tanam (100%), sedangkan terhadap target akhir RPD kedua indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu adanya bencana banjir yang diakibatkan oleh kondisi iklim kemarau basah sebagai dampak perubahan iklim, sehingga menyebabkan beberapa daerah sentra produksi komoditas pertanian tergenang air dan terkena serangan OPT seluas 35.786,05 ha dan mengakibatkan puso (gagal panen) seluas 7.904,25 ha. **Upaya** yang dilakukan yaitu penerapan mitigasi penanganan dampak perubahan iklim melalui penyesuaian kondisi iklim dengan pengaturan pola tanam dan pemanfaatan sarana prasarana pertanian yaitu penggunaan benih unggul yang toleran banjir, penggunaan bahan pengendali hayati untuk penanganan OPT secara pre-emptif, menyiapkan pompanisasi untuk pembuangan air saat terjadi banjir. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu peningkatan produksi melalui pengamanan hasil pertanian dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim.
4. **Program Penyuluhan Pertanian** didukung anggaran Rp9.097.123.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,69%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya (100%) dan Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih (100%), sedangkan terhadap target akhir RPD kedua indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kendala dalam adaptasi digitalisasi menyebabkan proses penyuluhan pertanian kurang optimal. Selain itu, masih rendahnya minat generasi muda di bidang agribisnis, serta adanya kendala dalam pemasaran hasil panen dan peningkatan kualitas produk pertanian. **Upaya** yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan berbasis adaptasi digitalisasi, peningkatan kapasitas petani

melalui pelatihan dan bimbingan teknis berbasis inovasi teknologi, dan pengembangan korporasi petani berbasis hilirisasi pertanian. **Manfaat** dalam pelaksanaan program yaitu peningkatan kapasitas SDM pertanian dan penguatan penyuluhan yang akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Tabel 3.122 Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian (DISTANBUN)

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
1	Produksi padi	Ton	28.840.445	18.195.360	63,09	9.287.932	9.304.063	100,17
2	Produksi jagung	Ton	10.751.205	7.003.675	65,14	3.287.481	3.721.291	113,20
3	Produksi kedelai	Ton	158.287	86.011	54,34	52.762	15.016	28,63
4	Produksi bawang merah	Ton	1.583.947	1.191.932	75,25	527.875	584.035	110,64
5	Produksi cabai	Ton	1.038.422	933.605	89,91	346.115	483.735	139,76
6	Produksi durian	Ton	460.323	388.041	84,30	153.410	190.530	124,20
7	Produksi jahe	Ton	107.755	56.008	51,98	35.908	27.364	76,21
8	Produksi melati	Ton	75.369	32.436	43,04	25.120	13.276	52,85
9	Produksi kelapa	Ton	501.563	321.352	64,07	154.100	154.564	100,30
10	Produksi kopi	Ton	78.015	53.653	68,77	26.005	26.785	103
11	Produksi tebu	Ton	7.686.672	7.894.510	102,70	3.670.565	4.555.277	124,10
12	Persentase luas lahan yang dioptimasi	%	2,5	2,77	110,80	2,5	2,77	110,80

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	%	92	93,61	101,75	93	93,61	100,66
14	Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	%	2,5	2,5	100	2,5	2,5	100
15	Persentase Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	%	100	100	100	100	100	100
16	Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	%	3	3	100	3	3	100
17	Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	%	2	2	100	2	2	100
18	Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan	%	1,5	1,5	100	1,5	1,5	100
19	Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	%	1,5	1,5	100	1,5	1,5	100
20	Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	%	1,5	1,5	100	1,5	1,5	100
21	Persentase layanan sertifikasi benih	%	100	100	100	100	100	100
22	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	%	85	85	100	85	85	100
23	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Surakarta	%	85	85	100	85	85	100
24	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	%	85	86,89	102,22	85	86,89	102,22
25	Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	%	3	3	100	3	3	100
26	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1	1	100	1	1	100
II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
1	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	Meter	22.260.822	15.045.487	67,59	7.420.274	7.625.213	102,76

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
1	Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	%	20	15	75	15	15	100
2	Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	%	15	10	66,67	10	10	100
IV PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
1	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2,5	2,5	100	2,5	2,5	100
2	Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** dengan **keluaran** antara lain pengembangan tanaman pangan seluas 6.450 ha (reguler) dan 2.540 ha (DBHCHT), hortikultura seluas 315 ha (reguler) dan 100 ha (DBHCHT), dan perkebunan seluas 393 ha; fasilitasi 121.600 liter pupuk hayati cair untuk komoditas padi dan cabai; fasilitasi 45.000 kg pupuk organik dan 700 kg benih padi untuk demplot optimasi lahan 25 ha; fasilitasi 1.399 unit alat mesin pertanian; pembiayaan subsidi suku bunga untuk 620 petani; dan fasilitasi asuransi lahan pertanian seluas 5.100 ha. **Outcome** kegiatan yaitu peningkatan produksi komoditas pertanian. **Manfaat** kegiatan yaitu menjaga ketersediaan pasokan pangan di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan pangan strategis di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu pola distribusi bantuan sarana pertanian yang belum mempertimbangkan ketersediaan pasokan pada bulan-bulan defisit produksi dan sinergi pelaksanaan kegiatan belum optimal. **Upaya** yang dilakukan adalah distribusi bantuan disesuaikan dengan pola tanam antar waktu antar wilayah agar dapat dipanen pada bulan-bulan defisit produksi, serta koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk pelaksanaan kegiatan.
- 2) **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman** dengan **keluaran** yaitu sertifikasi benih seluas 45.482 ha; perbanyakan benih: tanaman pangan seluas 458 ha, sayur seluas 15 ha, buah 22.000 batang, tanaman hias 13.000 batang, dan perkebunan 183.379 batang. **Outcome** kegiatan yaitu penyediaan benih pertanian yang bersertifikat dan varietas unggul melalui optimalisasi kebun benih dan penangkar

benih. **Manfaat** kegiatan yaitu menjaga ketersediaan dan peredaran benih pertanian di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan yaitu peningkatan produktivitas pertanian melalui penggunaan benih varietas unggul dan bersertifikat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu produksi benih bawang merah menurun dikarenakan adanya serangan hama ulat grayak dengan intensitas serangan 30,37% pada umur 27 hari setelah tanam dan penyakit layu fusarium dengan intensitas serangan 11,48% pada umur 54 hari setelah tanam. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat sehingga hasil panen tidak optimal dan benih yang dihasilkan hanya sedikit. **Upaya** yang telah dilakukan yaitu pengendalian serangan hama penyakit melalui pemusnahan ulat beserta telurnya, dan tanaman yang layu dan busuk dengan cara dibakar agar pertanaman dapat bertahan hingga panen, dan untuk pelaksanaannya berkoordinasi dengan petugas POPT setempat.

2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** didukung Kegiatan **Penataan Prasarana Pertanian** dengan **keluaran** yaitu fasilitasi 275 unit sarana irigasi alternatif dan rehabilitasi 23.725,9 meter jaringan irigasi tersier. **Outcome** kegiatan yaitu penyediaan sumber daya air yang memadai. **Manfaat** kegiatan yaitu peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas tanaman. **Dampak** kegiatan yaitu peningkatan produksi pertanian di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu rusaknya infrastruktur irigasi yang dapat berpengaruh pada kinerja sistem irigasi diantaranya menurunnya efisiensi dan efektivitas irigasi ke areal lahan pertanian, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana irigasi pada lahan terutama pada wilayah dengan potensi sumber air. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan *updating* data kondisi jaringan irigasi tersier untuk memetakan kebutuhan dan ketersediaannya, monitoring secara berkala dalam evaluasi pemanfaatannya, serta melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan irigasi dengan Dinas PUSDATARU dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Tengah.
3. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** didukung Kegiatan **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi** dengan **keluaran** yaitu gerakan pengendalian OPT tanaman: pangan 300 ha, hortikultura 20 ha, dan perkebunan 20 ha; perbanyak Agensi Pengendali Hayati 285 liter; dan penanganan dampak perubahan iklim 40 ha. **Outcome** kegiatan yaitu pengendalian serangan OPT dan penanganan dampak perubahan iklim untuk pengamanan produksi pertanian. **Manfaat** kegiatan yaitu pengamanan hasil produk pertanian. **Dampak** kegiatan yaitu peningkatan produksi pertanian di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu dampak perubahan iklim mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan serangan OPT di beberapa wilayah sentra pertanian sehingga menyebabkan pertanaman tergenang air hingga puso (gagal panen). Adapun lahan yang terdampak banjir dan serangan OPT seluas 35.786,05 ha dan yang mengalami puso seluas 7.904,25 ha, sehingga luasan lahan tanam yang dapat tertangani seluas 27.881,80 ha. **Upaya** yang dilakukan yaitu penanganan bencana banjir melalui pemanfaatan sarana

irigasi dan pompanisasi untuk pembuangan air, penggunaan benih varietas unggul yang toleran banjir, pemanfaatan agens pengendali hayati sebagai langkah pencegahan serangan OPT.

4. Program Penyuluhan Pertanian didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian** dengan keluaran pelatihan penyuluh pertanian sebanyak 250 orang;
- 2) **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** dengan keluaran pelatihan dan bimbingan teknis SDM pertanian untuk 6.086 orang, serta fasilitasi promosi pemasaran produk pertanian untuk 60 kelompok tani;
- 3) **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** dengan keluaran penumbuhan dan pengembangan korporasi tani sebanyak 6 unit.

Outcome kegiatan yaitu terlaksananya pengembangan penyuluhan dan kelembagaan pertanian melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta penumbuhan korporasi tani. **Manfaat** kegiatan yaitu peningkatan kapasitas petani untuk menunjang peningkatan produksi hasil pertanian dan kesejahteraan petani. **Dampak** kegiatan yaitu peningkatan kesejahteraan petani. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian, masih terdapat penyuluh yang terkendala adaptasi digitalisasi sehingga proses penyuluhan pertanian kurang efektif dan optimal, masih terdapat petani yang belum menguasai teknologi pertanian khususnya pada hilirisasi produk. Selain itu, semakin berkurangnya jumlah petani usia produktif karena rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha pertanian. **Upaya** yang dilakukan yaitu fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas petani dalam inovasi teknologi budidaya dan pemasaran produk pertanian, pelatihan petani milenial, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui adopsi teknologi pertanian berbasis digitalisasi, pelatihan kewirausahaan dan kemitraan pertanian, dan penumbuhan korporasi petani untuk menunjang hilirisasi pertanian.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada urusan pertanian dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.123 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pertanian (DISTANBUN)

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	26	98,50	51	100	98,50	Sangat Tinggi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Penyuluhan Pertanian	2	100	4	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Pemberian stimulan benih padi 47.200 ha, jagung 3.200 ha, dan kedelai 3000 ha pada lokasi Kabupaten dengan tingkat produktivitas dibawah rata-rata provinsi; stimulan benih kopi arabika dan robusta seluas 770 ha, tebu dengan *single bud planting* 310 ha dan varietas unggul baru 700 ha, kelapa genjah entog dan kopyor 540 ha, serta strategi peningkatan stabilitas pasokan cabai 310 ha yang disinergikan dengan kemitraan petani Petarung Sejati dan bawang merah *True Shallot Seed* (TSS) 25 ha pada Kabupaten sentra produksi.
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dan irigasi alternatif, serta bantuan alat mesin pertanian pra panen 240 unit meliputi transplanter, traktor crawler, traktor roda 4, hand traktor, cultivator, hand sprayer, combine harvester, APPO dan pompa air diesel, serta sarana pasca panen dan pengolah hasil 15 unit.
3. Bantuan premi asuransi pertanian untuk lahan yang mengalami gagal panen seluas 10.449 ha dan pembayaran subsidi suku bunga di lokasi intervensi Kabupaten Wonosobo, Klaten dan Sragen.
4. Pelatihan dan bimbingan teknis untuk 4.810 petani melalui bimbingan teknis petani milenial, pembuatan pupuk organik, manajemen agribisnis, serta pelatihan budidaya pertanian, pelatihan mekanisasi dan digitalisasi pertanian.
5. Petani Milenial Gajian dengan penyelenggaraan pelatihan di Balai Pelatihan Pertanian dan akan difasilitasi pembentukan korporasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta penumbuhan korporasi pertanian sebanyak 6 unit dan pendampingan korporasi yang sudah dibentuk 24 unit.
6. Penghapusan piutang Perkebunan Inti Rakyat (PIR) melalui penyerahan 1.965 sertifikat.

B. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan gizi masyarakat, serta pengentasan kemiskinan di pedesaan. Subsektor peternakan menjadi

salah satu penopang utama perekonomian daerah melalui penyediaan protein hewani, penciptaan lapangan kerja, dan sumber pendapatan bagi rumah tangga petani-peternak. Selain itu, Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam produksi sapi potong, ayam ras, ayam lokal, telur, dan susu yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan regional maupun nasional.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan pembangunan peternakan di Jawa Tengah didukung anggaran Rp86.881.285.000. untuk melaksanakan 4 program, yaitu:

- 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** dengan anggaran Rp40.124.016.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 88,16%. Capaian keuangan 88,16% dikarenakan adanya 41 kelompok hibah uang yang tidak lolos verifikasi dari target 152 kelompok, senilai Rp3.905.000.000. Program ini memiliki 9 indikator kinerja program yang mendukung RKP dengan tingkat capaian 7 indikator sangat tinggi dan 2 indikator tinggi. Terhadap capaian akhir RPD, 6 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya sarana produksi ternak di Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan dengan peningkatan sarana produksi dan perbaikan kualitas mutu genetik ternak. **Manfaat** penyelenggaraan program yaitu meningkatnya produksi dan kualitas ternak di Jawa Tengah.
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,** dengan anggaran Rp5.223.207.000 realisasi fisik 100% dan keuangan 99,69%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya prasarana produksi ternak di Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan dengan peningkatan prasarana produksi peternakan. **Manfaat** program ini adalah peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan.
- 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** dengan anggaran Rp30.208.258.000 realisasi fisik 100% dan keuangan 96,65%. Program ini memiliki 5 indikator program yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi antara lain Persentase Rumah Potong Hewan (RPH) yang Pemotongan Betina Produktifnya Terkendali (115,85%) dan Persentase Peningkatan Unit Usaha yang Bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (1.088,57%) hal ini dikarenakan peningkatan kesadaran pelaku usaha didorong adanya regulasi kewajiban lalu lintas produk hewan dan sertifikat halal harus dari unit ber-NKV. Terhadap target akhir RPD 1 indikator telah tercapai dan 4 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah munculnya penyakit hewan yang tidak dapat diprediksi. **Upaya** yang dilakukan dengan peningkatan *biosecurity*, *surveillance* dan pengobatan ternak. **Manfaat** program ini yaitu meningkatnya produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang beredar di Jawa Tengah.

- 4. Program Penyuluhan Pertanian** dengan anggaran Rp11.325.804.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 92,39%. Realisasi keuangan 92,39% dikarenakan adanya 9 kelompok hibah uang yang tidak lolos verifikasi dari target 96 kelompok, senilai Rp835.000.000. Program ini mempunyai 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, dan terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** program ini adalah metode penyuluhan masih konvensional, kurang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. **Upaya** yang dilakukan dengan mengembangkan sistem penyuluhan berbasis digital melalui video tutorial, dan konten edukatif berbasis media sosial. **Manfaat** program ini meningkatnya kompetensi peternak dalam manajemen peternakan.

Tabel 3.124 Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian (DISNAKESWAN)

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
1	Jumlah populasi ternak potong	(ST)/(AU)	3.763.791	5.291.845	141,30	3.745.066	5.291.845	141,30
2	Jumlah populasi ternak perah	(ST)/(AU)	114.008	115.088	101,45	113.440	115.088	101,45
3	Jumlah populasi ternak pete-lur	(ST)/(AU)	249.088	591.820	223,99	247.848	591.820	238,78
4	Persentase fasilitasi obat he-wan	%	1	1	100,00	1	1	100
5	Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	Dokumen	12	8	66,67	4	4	100
6	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	0,82	82	1	0,82	82
7	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	%	1	0,90	90	1	0,90	90
8	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	%	1	1	100	1	1	100
9	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	%	1	1,04	104	1	1,04	104
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	15	12	80	12	12	100
2	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	15	12	80	12	12	100
3	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	15	12	80	12	12	100
4	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	15	12	80	12	12	100
III PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
1	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	Dokumen	12	8	66,67	4	4	100
2	Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	%	12	8,11	67,58	7	8,11	115,85
3	Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	%	4,3	38,1	886,04	3,5	38,1	1.088,57
4	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	Dokumen	12	8	66,67	4	4	100
5	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	Dokumen	12	8	66,67	4	4	100
IV PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
1	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	%	1,17	1,08	92,31	1,08	1,08	100
2	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	%	4,13	3,62	87,65	3,62	3,62	100
3	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	%	2,31	2,29	99,13	2,29	2,29	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** yaitu pembinaan kepada 2 kelompok ternak untuk penerapan *Good Farming Practices* (GFP) dan peningkatan skala usaha pada 17 kelompok ternak potong dan perah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan pemahaman kelompok ternak mengenai GFP dan peningkatan jumlah kepemilikan ternak. **Manfaat** kegiatan ini yaitu peningkatan populasi ternak di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini adalah peningkatan produksi ternak di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih rendahnya pemahaman peternak terhadap penerapan GFP dan skala usaha ternak. **Upaya** yang dilakukan adalah memberikan pemahaman tentang GFP dan peningkatan skala usaha kepada kelompok ternak.
- 2) **Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak** dengan **keluaran** antara lain pembinaan 3 pelaku usaha pakan ternak agar produksinya sesuai standar kualitas pakan; 2 kelompok ternak dalam penerapan *Good Breeding Practices* (GBP), 25.092 dosis semen beku yang dihasilkan dari semen segar. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan benih dan bibit ternak unggul yang mutunya terjamin dan tersedia secara berkelanjutan sesuai dengan standar nasional dan prinsip *Good Breeding Practice* (GBP). **Manfaat** kegiatan tersebut peternak dapat memperoleh bibit ternak unggul yang produktivitasnya tinggi, sehat, dan adaptif terhadap lingkungan lokal serta meningkatnya efisiensi usaha peternakan karena melalui penggunaan bibit unggul dapat meningkatkan rasio konversi pakan, pertumbuhan, dan daya reproduksi. **Dampak** kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas ternak (daging, susu, dan telur) di Provinsi Jawa Tengah serta terwujudnya kemandirian daerah dalam penyediaan bibit ternak unggul. **Permasalahan** yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman peternak tentang manajemen produksi bibit unggul. **Upaya** yang dilakukan dengan pembinaan peternak tentang GBP serta penerapan teknologi reproduksi.
- 3) **Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor** dengan **keluaran** antara lain pemberian obat hewan kepada 10.000 ekor ternak dan 4 laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan. **Outcome** kegiatan tersebut adalah meningkatnya kepatuhan distributor dan pelaku usaha obat hewan terhadap ketentuan peredaran, penyimpanan, dan pelabelan obat hewan serta meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan obat hewan yang beredar di wilayah Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan yaitu menurunnya peredaran obat hewan ilegal, kadaluarsa, atau tidak terdaftar. **Dampak** kegiatan tersebut adalah peternak mendapatkan jaminan mutu dan keamanan obat hewan sehingga kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap produk peternakan dari Jawa Tengah meningkat. **Permasalahan** yang dihadapi

masih ditemukannya peredaran obat hewan ilegal atau tidak berizin edar serta keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas pengawas obat hewan.

Upaya yang dilakukan dengan peningkatan sosialisasi/pembinaan dan peningkatan pengawasan rutin kepada pelaku usaha obat hewan serta meningkatkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengawasan lapangan.

2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**, didukung oleh kegiatan **Penataan Prasarana Pertanian** dengan **keluaran** fasilitasi sarpras peternakan kepada 6 kelompok ternak potong, perah dan petelur; penerapan inovasi peternakan pada 4 kelompok; serta peningkatan skala usaha pada 5 unit pelaku usaha pengolahan produk hewan. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana peternakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas ternak meningkatnya efisiensi produksi peternakan. **Manfaat** kegiatan adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha ternak melalui dukungan prasarana yang memadai. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak akibat meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. **Permasalahan** kegiatan antara lain kurangnya fasilitasi prasarana pengolahan hasil peternakan. **Upaya** mengatasi melalui fasilitasi prasarana pengolahan peternakan agar meningkatkan skala usaha dan daya saing.

3. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** didukung 4 kegiatan, antara lain:

- 1) **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 4 laporan penyakit hewan menular strategis (PHMS); vaksinasi 22.283 ekor ternak dan 2.002 ekor ternak yang ter surveilans. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya derajat kesehatan hewan dan menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis serta meningkatnya cakupan wilayah bebas penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut Kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease* (LSD), *Avian Influenza*, Rabies, dan *Brucellosis*. **Manfaat** kegiatan ini adalah peternak memperoleh ternak yang lebih sehat dan produktif, sehingga menurunkan risiko kerugian ekonomi akibat wabah penyakit. Selain itu masyarakat memperoleh jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). **Dampak** kegiatan ini adalah terwujudnya ketahanan pangan asal ternak yang aman dan berkelanjutan. **Permasalahan** kegiatan ini antara lain adanya kejadian penyakit hewan antara lain PMK, LSD dan *Septicemia Epizootica* (SE) dan *African Swine Fever* (ASF). **Upaya** mengatasi masalah melalui vaksinasi dan pengobatan pada ternak serta peningkatan pengawasan lalu lintas ternak.
- 2) **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi** dengan **keluaran** dari Balai Veteriner Semarang, dengan rincian sebagai berikut: 4 laporan hasil pengujian

sampel sebanyak 40.092 sampel, 4 laporan lalu lintas ternak sebanyak 9.636.850 ekor dan 4 laporan pemeriksaan kesehatan hewan 6.114 ekor. Sedangkan dari Bavet Veteriner Boyolali, dengan rincian sebagai berikut: 4 laporan hasil pengujian sampel sebanyak 26.400 sampel, 4 laporan lalu lintas ternak sebanyak 1.750.000 ekor dan 4 laporan pemeriksaan kesehatan hewan 13.950 ekor. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini adalah menjamin kesehatan hewan dan keamanan produk hewan yang beredar di masyarakat. **Dampak** kegiatan ini adalah menurunnya risiko wabah penyakit hewan menular strategis dan meningkatnya keamanan pangan asal hewan (*food safety*) bagi masyarakat. **Permasalahan** kegiatan ini antara lain adanya lalu lintas hewan dan produk hewan ilegal tanpa pemeriksaan kesehatan. **Upaya** mengatasi masalah melalui peningkatan pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan serta penerapan biosecurity.

4. **Program Penyuluhan Pertanian** didukung **Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** dengan **keluaran** fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan ternak potong, perah dan petelur kepada 5 kelompok. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian/peternakan dalam menerapkan teknologi dan inovasi. **Manfaat** kegiatan adalah peningkatan pengetahuan kelembagaan dan manajerial kelompok menuju pada kemandirian bisnis kelompok dan peternak lebih mandiri dalam mengambil keputusan usaha. **Dampak** kegiatan adalah terwujudnya sumber daya manusia pertanian/peternakan yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. **Permasalahan** kegiatan ini adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola kelembagaan ekonomi, seperti koperasi atau kelompok tani. **Upaya** mengatasi masalah tersebut melalui pendampingan dan pembinaan kelembagaan dari provinsi dan kabupaten/kota setempat.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja.

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pertanian dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.125 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pertanian (DISNAKESWAN)

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9	100	16	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4	100	9	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	100	9	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Penyuluhan Pertanian	3	100	3	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain:

1. Peningkatan jaminan keamanan pangan dalam penyediaan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) melalui standarisasi 6 unit Rumah Potong Hewan (RPH) dalam penerapan hygiene sanitasi serta sertifikasi juru sembelih halal sebanyak 29 orang
2. Pengembangan ternak lokal berbasis potensi untuk melahirkan bibit ternak khas Jawa Tengah sejumlah 125.682 ekor (dengan rincian : Ruminansia Potong sejumlah 290 ekor, Ruminansia Perah sejumlah 22 ekor, Non Ruminansia Potong sejumlah 72.344 ekor dan Non Ruminansia Petelur sejumlah 53.027 ekor.
3. Penyediaan 508.371 dosis benih dan bibit ternak potong dan perah yang berkualitas masing-masing sejumlah 61 ekor dan 4 ekor.
4. Pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat melalui HEALING (Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling).

3.4.3.4 Urusan Kehutanan

Dalam melaksanakan tugas Urusan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi : perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung capaian tujuan tersebut, DLHK Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu: "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan." Sasaran strategis yang mendukung tujuan ini meliputi: Meningkatnya kualitas lahan; Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati; dan Bertumbuhnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor kehutanan.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2025 adalah:

1. Terbaik I Kategori Penyuluh Kehutanan PNS an. Sigit Murhofiq, S.Hut (Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X).
2. Terbaik I Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) an. Sugiharto, S.T (Desa Donoharjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah).
3. Terbaik I Kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) an. KTH Sari Bunga Giyanti/Dul Luqman (Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah).
4. Penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Penyelenggara Penyuluh Kehutanan Terbaik IV Tahun 2025.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pembangunan Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran Rp10.552.351.000,00 melalui program:

- 1. Program Pengelolaan Hutan**, didukung anggaran Rp8.610.955.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,02%. Program ini memiliki 15 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian semua indikator tercapai sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD 5 indikator telah tercapai, 4 indikator akan tercapai dan 6 indikator perlu upaya keras yaitu indikator Persentase lahan kritis tertangani di CDK, hal tersebut dikarenakan keterbatasan penanganan lahan kritis dan sebagian penanganan dilakukan diluar lahan kritis. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih terjadinya gangguan terhadap keamanan hutan: Pencurian, pembalakan liar dan upaya pembukaan hutan yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan reboisasi dengan penanaman kembali hutan yang telah rusak dan pemulihan kondisi ekologis hutan.
- 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, didukung anggaran Rp874.880.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,02%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD 2 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih adanya potensi kerusakan habitat tumbuhan dan satwa liar yang mengancam kelangsungan hidup spesies serta kesehatan ekosistem secara keseluruhan. **Upaya** yang dilakukan yaitu menetapkan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengelolaan berbasis kolaborasi untuk menjaga fungsi ekologis dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.
- 3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**, didukung anggaran Rp208.439.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,70%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat

ketercapaian sangat tinggi yaitu persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih tingginya pengolahan lahan secara intensif di wilayah hulu DAS, kurangnya tutupan bervegetasi pohon di bagian hulu dan tengah DAS, dan minimnya vegetasi mangrove di wilayah pesisir (hilir DAS). Hal ini memicu sedimentasi dan penurunan kesuburan tanah. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, baik secara vegetatif maupun sipil teknis pada DAS/sub DAS kritis untuk memulihkan fungsi hidrologi dan ekosistem DAS.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, didukung anggaran Rp858.077.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,39%. Program ini memiliki 12 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi yaitu persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di 12 Unit Kerja. Terhadap target akhir RPD semua indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keberagaman budaya serta kualitas dan kuantitas SDM yang kurang sehingga pelaksanaan penyuluhan belum bisa memberikan pelayanan yang optimal. **Upaya** yang dilakukan yaitu memodifikasi metode penyuluhan sesuai dengan karakter masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM penyuluh kehutanan dan pemberdayaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

Tabel 3.126 Capaian Kinerja Program Urusan Kehutanan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
1	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (Bidang 3)	%	56,58	45,99	81,28	45,99	49,59	100
2	Persentase lahan kritis tertangani (Bidang 4)	%	2,43	1,54	63,37	0,38	0,54	142,10
3	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani (Bidang 5)	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	%	0,15	0,04	26,67	0,02	0,02	100
5	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	%	0,15	0,11	73,33	0,03	0,03	100
6	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	%	0,15	0,17	113,33	0,03	0,03	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	%	0,05	0,06	120	0,06	0,06	100
8	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	%	0,24	0,17	70,83	0,06	0,06	100
9	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	%	0,39	0,19	48,72	0,04	0,04	100
10	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	%	0,54	0,19	35,19	0,03	0,03	100
11	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	%	0,12	0,16	133,33	0,04	0,04	100
12	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	%	0,27	0,18	66,67	0,03	0,04	133,33
13	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	%	0,09	0,1	111,11	0,02	0,02	100
14	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	%	0,21	0,08	38,10	0,02	0,02	100
15	Persentase peningkatan produksi bibit (BSPTH)	%	45	-88	-196,56	-90	-85	105,88
II	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA							
1	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani (Bidang 4)	%	30	20	66,67	10	10	100
2	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif (Bidang 4)	%	80	60	75	60	60	100
3	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	%	72	73	102,82	71	73	102,82
4	Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	%	100	100	100	100	100	100
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
1	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (Bidang 5)	%	7,5	5	66,67	2,5	2,5	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 1	%	0,9	0,6	66,67	0,3	0,3	100
3	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 2	%	0,6	1,4	233,33	0,2	0,2	100
4	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 3	%	0,6	0,4	66,67	0,2	0,2	100
5	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 4	%	0,6	0,4	66,67	0,2	0,2	100
6	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 5	%	0,9	0,3	33,33	0,3	0,3	100
7	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 6	%	0,6	0,4	66,67	0,2	0,2	100
8	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 7	%	0,9	0,7	77,78	0,3	0,3	100
9	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 8	%	0,6	0,4	66,67	0,2	0,2	100
10	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 9	%	0,6	0,58	96,67	0,2	0,2	100
11	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 10	%	0,2	0,2	100	0,2	0,2	100
12	Persentase peningkatan kelas ke- lompok masyarakat di wilayah CDK 11	%	0,6	0,4	66,67	0,2	0,2	100
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI							
1	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertan- gani (Bidang 4)	%	10	10	100	10	10	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengelolaan Hutan didukung oleh 6 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pelaksanaan Rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara** dengan **keluaran** kegiatan rehabilitasi 1.594,53 ha (darat, pantai, mangrove). **Outcome** kegiatan tersebut berupa pemulihan ekosistem dan pencegahan erosi tanah dan abrasi pantai. **Manfaat** kegiatan ini yaitu

terjaganya siklus air, peningkatan cadangan karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati. **Dampak** kegiatan ini yaitu pencegahan bencana alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu lamanya pendistribusian bibit karena sulitnya medan sehingga menurunkan kualitas bibit yang akan ditanam. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasinya adalah membuat persemaian bibit yang lebih dekat dari lokasi tanam.

- 2) **Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung** dengan **keluaran** terbinanya 82 unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu peningkatan produktivitas hutan yang berkontribusi terhadap pendapatan negara (PNBP). **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan perekonomian melalui hasil kayu dan non-kayu. **Dampak** kegiatan ini yaitu pertumbuhan ekonomi melalui hasil hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. **Permasalahan** masih adanya pelaku usaha dan / atau kegiatan yang tidak taat terhadap izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. **Upaya** yang dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan terhadap izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
- 3) **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)** dengan **keluaran** terbinanya 8 unit pengolahan HHBK yang berkembang. **Outcome** kegiatan tersebut Pengelolaan HHBK yang tepat berkontribusi pada perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati di dalamnya. **Manfaat** kegiatan ini yaitu Pemanfaatan HHBK secara berkelanjutan dapat menjadi alternatif dibandingkan penebangan kayu (yang membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh) dan dapat berkontribusi pada pelestarian hutan. **Dampak** kegiatan ini yaitu Pengelolaan HHBK yang lestari mendorong masyarakat /kelompok tani/unit manajemen pengelolaan hutan untuk menjaga hutan agar sumber daya tetap berkelanjutan, sekaligus menjadi sarana pelestarian hutan. **Permasalahan** yang dihadapi upaya pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat /kelompok tani/unit manajemen pengelolaan hutan dalam skala usaha kecil dan masih bersifat tradisional sehingga belum maksimal. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasinya adalah pendampingan dan pembinaan dalam penerapan teknis budidaya, pemasaran serta pendampingan kelompok usaha yang tepat untuk mengembangkan multi usaha kehutanan terutama usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu.
- 4) **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun** dengan **keluaran** terbinanya 183 unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib pengaturan. **Outcome** kegiatan tersebut terwujudnya usaha pengolahan hasil hutan kayu skala kecil yang legal, produktif, efisien, dan berkelanjutan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu Dengan adanya pengolahan yang efisien, penggunaan bahan baku menjadi lebih optimal, yang secara tidak langsung mendukung upaya konservasi sumber daya hutan dalam jangka panjang. **Dampak** kegiatan ini yaitu dengan pengelolaan limbah yang baik dan kepatuhan terhadap

aspek legalitas dan kelestarian. **Permasalahan** yang dihadapi Industri skala kecil sering kesulitan mendapatkan pasokan kayu bulat yang konsisten dan berkelanjutan serta masih kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dengan standar kualitas yang seragam. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasinya adalah mendorong kemitraan antara industri skala kecil dengan industri skala besar dan atau masyarakat kelompok tani hutan.

- 5) **Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi** dengan **keluaran** laporan koordinasi perlindungan hutan dan pelaksanaan patroli gangguan keamanan hutan yang melibatkan Masyarakat Mitra Polisi hutan (MPP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA). **Outcome** tersusunnya perencanaan penanganan perlindungan hutan. **Manfaat** kegiatan ini untuk memastikan ketepatan sasaran perlindungan hutan. **Dampak** kegiatan ini yaitu meminimalisir kerusakan hutan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan sarpras untuk menjangkau lokasi yang sulit di akses. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasinya adalah koordinasi dengan stakeholder diluar pemerintahan untuk memfasilitasi sarpras perlindungan hutan.
- 6) **Perbenihan tanaman hutan** dengan **keluaran** 75 sertifikasi tanaman hutan yang diterbitkan BSPH. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terjaminnya kualitas benih, bibit dan sumber benih. **Manfaat** kegiatan ini yaitu menjamin ketersediaan bibit unggul yang berkualitas dan berkelanjutan untuk rehabilitasi lahan. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatkan produktivitas lahan dan hasil ekonomi. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terkait kualitas dan kuantitas benih, serta aspek manajemen dan kebijakan. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasinya adalah mencakup perbaikan teknis budidaya, penguatan kelembagaan, dan penegakan regulasi.

2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi** dengan **keluaran** laporan pengendalian konservasi tumbuhan dan laporan pengendalian satwa liar serta 705 jenis tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturaden. **Outcome** kegiatan ini yaitu mencegah kerusakan habitat tumbuhan dan satwa. **Manfaat** kegiatan ini yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. **Dampak** kegiatan ini adalah terjaganya kelestarian sumber daya alam hayati. **Permasalahan** yang dihadapi tidak ada data populasi, sebaran, dan tingkat ancaman TSL non-dilindungi di tingkat provinsi, sehingga sulit untuk merumuskan kebijakan pengelolaan yang efektif. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan pendataan secara berkala untuk mengetahui status populasi TSL non-dilindungi.

- 2) **Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi** dengan **keluaran konservasi** Tahura KGPA Mangkunagoro I seluas 231,3 ha dan pemanfaatan kawasan Tahura KGPA Mangkunagoro I. **Outcome** kegiatan tersebut menjaga kelestarian berbagai jenis tumbuhan dan satwa langka serta terancam punah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu TAHURA berfungsi sebagai kawasan konservasi dan habitat satwa. **Dampak** kegiatan ini adalah menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. **Permasalahan** yang dihadapi aktivitas penembangan liar dan konversi lahan hutan. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasinya Melakukan patroli lapangan secara rutin dan menegakkan peraturan pemerintah yang ketat untuk mencegah penembangan liar, perburuan ilegal, dan aktivitas perusakan hutan lainnya.
- 3) **Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam** dengan **keluaran** kegiatan tersusunnya dokumen kajian perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Muria menjadi TAHURA. **Outcome** kegiatan tersebut adalah tersusunnya dasar pengambilan kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Muria menjadi TAHURA. **Manfaat** kegiatan ini melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem di kawasan hutan Gunung Muria. **Dampak** kegiatan ini yaitu terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan menjaga kualitas lingkungan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurangnya dukungan data dan informasi serta dukungan masyarakat. **Upaya** yang dilakukan adalah melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi.
3. **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai** didukung kegiatan **Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** dengan **keluaran** peningkatan daya dukung DAS Urang Boyo dan DAS Serayu; serta pengelolaan dan pengendalian DAS Juana dan DAS Pemali. **Outcome** kegiatan tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas air, pengendalian banjir dan tanah longsor **Manfaat** kegiatan ini meliputi pelestarian ekosistem sungai, pengurangan polusi, dan mitigasi dampak perubahan iklim. **Dampak** kegiatan adalah tersedianya sumber daya air yang berkelanjutan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS masih rendah. **Upaya** yang dilakukan adalah koordinasi intensif antarpihak yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan DAS, seperti melalui program edukasi, penyuluhan, dan pemberdayaan ekonomi.
4. **Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan** didukung kegiatan **Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan** dengan **keluaran** kegiatan terbinanya 25 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang meningkat kelasnya. **Outcome** kegiatan tersebut peningkatan kemampuan KTH dalam kelola kelembagaan, usaha dan kawasan. **Manfaat** kegiatan ini kemandirian masyarakat dalam mengelola usaha bidang kehutanan **Dampak** kegiatan ini peningkatan kesejahteraan KTH.

Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan fasilitas penyuluhan. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan pendekatan intensif dan partisipatif serta menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan berbasis praktik agar masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapat.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kehutanan dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.127 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kehutanan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	26	86.62	44	86.06	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	81.54	3	71.05	100	Sangat Tinggi
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1	95	1	96.47	100	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6	85.41	7	85.31	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Pelaksanaan penanaman mangrove Kegiatan Mageri Segoro di 17 Kab/Kota.;
2. Kegiatan penanaman di darat yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2026 di 35 Kab/Kota se Jawa Tengah;

3.4.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor energi dan sumber daya mineral yang menghadapi berbagai tantangan dalam aspek pengelolaan memerlukan perhatian serius dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan yang efektif diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber energi dan sumber daya mineral. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral secara optimal dan berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan dalam dokumen perencanaan dirancang untuk mengakomodasi tantangan yang telah diidentifikasi. Melalui program dan kegiatan yang telah disusun, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap isu krusial di masyarakat terkait sektor energi dan sumber daya mineral di Jawa Tengah.

Prestasi tingkat nasional berhasil diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu:

1. Penghargaan *Solar Awards* dari Dewan Energi Nasional (DEN), sebagai bentuk pengakuan atas komitmen kuat dan konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pemanfaatan serta pengembangan energi surya secara berkelanjutan guna mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional;
2. Apresiasi Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, sebagai pemerintah daerah yang berperan aktif dalam penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan melalui aplikasi X-Star BPH Migas

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pembangunan sektor ESDM di Jawa Tengah didukung anggaran Rp7.322.696.000,00 untuk melaksanakan 4 program, yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan** didukung anggaran Rp2.441.632.000 realisasi fisik 100% dan keuangan 98,83%. Program ini memiliki 13 indikator Kinerja Program yang mendukung RKPD yaitu persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan yang dilaksanakan pada 12 Cabang Dinas ESDM dan 1 pada Bidang Ketenagalistrikan dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD keseluruhan indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain belum meratanya kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh pemilik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)/genset dan listrik rumah tangga. **Upaya** yang dilakukan antara lain melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta memberikan pendampingan untuk pemenuhan SLO sehingga memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2). **Manfaat** dari program ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik yang memenuhi aspek K2.
- 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan** didukung anggaran Rp1.997.903.000 realisasi fisik 100% dan keuangan 99,15%. Program ini memiliki 13 indikator Kinerja Program yang mendukung RKPD yaitu jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan yang dilaksanakan pada 12 Cabang Dinas dan 1 pada Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai, dan 11 indikator perlu upaya keras. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan prioritas kebijakan yang lebih menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan bidang energi sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain masih rendahnya tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan. **Upaya** yang dilakukan antara lain mendorong pelaku usaha untuk mulai memanfaatkan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui pelaksanaan Forum Energi Daerah, pengembangan infrastruktur EBT melalui pemanfaatan potensi setempat/ lokal, serta penguatan program Desa Mandiri Energi (DME) yang disertai dengan mekanisme apresiasi melalui pemberian penghargaan DME.

3. **Program Pengelolaan Mineral dan Batubara** didukung anggaran Rp1.492.688.000 realisasi fisik 100% dan keuangan 99,50%. Program ini memiliki 14 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi terdiri dari 13 indikator yaitu tingkat produktivitas usaha pertambangan yang dilaksanakan pada 12 Cabang Dinas dan 1 pada Bidang Mineral dan Batubara serta 1 Indikator Program yaitu persentase layanan pengujian mineral dan batubara pada UPT Laboratorium dengan tingkat capaian sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD 1 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai, serta 11 indikator perlu upaya keras. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif dan berproduksi sehingga volume produksi yang dihasilkan relatif rendah dan berdampak langsung pada tingkat produktivitas sektor pertambangan. **Permasalahan** yang dihadapi adalah masih terbatasnya metode verifikasi data produksi pertambangan. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terpadu bersama *stakeholder* terkait baik instansi vertikal maupun horisontal. **Manfaat** dari program ini adalah terpenuhinya kebutuhan material bahan galian namun tetap sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik.
4. **Program Pengelolaan Aspek Kegeologian** didukung anggaran Rp1.390.473.000 realisasi fisik 100% dan keuangan 99,15%. Program ini memiliki 14 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terdiri dari 13 indikator Persentase Pengambilan Air Tanah yang dilaksanakan pada 12 Cabang Dinas dan 1 pada bidang Geologi dan Air Tanah; serta 1 indikator persentase pelayanan pengujian air tanah pada UPT Laboratorium. Terhadap target akhir RPD terdapat 14 indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah perhitungan penggunaan air tanah belum dapat memberikan gambaran secara *real* kondisi pemanfaatan air tanah secara menyeluruh. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan perhitungan pemanfaatan air tanah dengan menggunakan data pemanfaatan air tanah dari perusahaan penyedia air dan industri pengguna air tanah. **Manfaat** dari program ini adalah sebagai upaya konservasi air tanah dengan membatasi penggunaan air tanah sesuai dengan zona konservasi.

Tabel 3.128 Capaian Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KETENAGALISTRIKAN							
1	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	73,77	75,50	102,35	65,04	75,50	116,08
2	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Solo	%	50,35	51,00	101,29	49,77	51,00	102,47
3	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria	%	52,68	53,00	100,61	51,27	53,00	103,37
4	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara	%	50,81	51,20	100,77	50,08	51,20	102,24
5	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan	%	49,79	49,70	99,82	49,42	49,70	100,57
6	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara	%	50,78	50,70	99,84	50,05	50,70	101,30
7	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Ungaran Telomoyo	%	50,77	50,50	99,47	50,05	50,50	100,90
8	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan	%	50,3	50,30	100,00	49,74	50,30	101,13
9	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Sewu Lawu	%	50,15	50,30	100,30	49,64	50,30	101,33
10	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan	%	50,18	51,50	102,63	49,66	51,50	103,71
11	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di	%	53,98	52,90	98,00	52,13	52,90	101,48

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cabdin ESDM Wil. Semarang Demak							
12	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Merapi	%	50,26	50,60	100,68	49,72	50,60	101,77
13	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Cabdin ESDM Wil. Serayu Tengah	%	49,35	49,40	100,10	49,12	49,40	100,57
II PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								
1	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	2.844.705,97	1.097.213,83	38,57	83.109,33	83.109,33	100,00
2	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Solo	SBM	197.289,85	41.947,41	21,26	32,19	32,19	100,00
3	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria	SBM	235.999,08	90.968,26	38,55	19,32	19,32	100,00
4	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara	SBM	405.575,12	173.810,36	42,86	41.306,77	41.306,77	100,00
5	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan	SBM	79.363,76	341,25	0,43	64,39	64,39	100,00
6	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara	SBM	235.876,74	91.132,44	38,64	64,39	64,39	100,00
7	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Ungaran Telomoyo	SBM	159.745,80	108.440,71	67,88	48,29	48,29	100,00
8	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan	SBM	393.270,63	182.136,10	46,31	64,39	64,39	100,00

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Sewu Lawu	SBM	196.727,06	41.580,41	21,14	64,39	64,39	100,00
10	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan	SBM	549.673,61	192.602,22	35,04	41.316,43	41.316,43	100,00
11	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Semarang Demak	SBM	181.602,27	41.548,21	22,88	32,19	32,19	100,00
12	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Merapi	SBM	79.339,19	91.270,87	115,04	64,39	64,39	100,00
13	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Cabdin ESDM Wil. Serayu Tengah	SBM	130.242,86	41.467,74	31,84	64,39	64,39	100,00
III PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								
1	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	%	75	48,28	64,37	45	48,28	107,27
2	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	%	75	46,32	61,76	45	46,32	102,93
3	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	%	75	47,36	63,15	45	47,36	105,24
4	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	%	75	46,36	61,81	45	46,36	103,02
5	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	%	75	47,97	63,96	45	47,97	106,60
6	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	%	75	46,27	61,69	45	46,27	102,82
7	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	75	53,23	70,97	45	53,23	118,29
8	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	%	75	48,16	64,21	45	48,16	107,02

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	%	75	46,90	62,53	45	46,90	104,22
10	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	%	75	49,13	65,51	45	49,13	109,18
11	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	%	75	59,78	79,71	45	59,78	132,84
12	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	%	75	46,92	62,56	45	46,92	104,27
13	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	%	75	47,42	63,23	45	47,42	105,38
14	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	100	100	100	100	100
IV PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								
1	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	%	27,80	26,74	103,96	27,6	26,74	103,22
2	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1,8	1,41	127,66	1,7	1,41	120,57
3	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3,6	3,3	109,09	3,5	3,3	106,06
4	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,95	1,55	125,81	1,9	1,55	122,58
5	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	2,4	1,91	125,65	2,3	1,91	120,42
6	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	4,3	3,85	111,69	4,2	3,85	109,09
7	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,95	1,73	112,72	1,9	1,73	109,83
8	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,6	2,2	118,18	2,5	2,2	113,64

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	1,8	1,36	132,35	1,7	1,36	125,00
10	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,9	2,45	118,37	2,8	2,45	114,29
11	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	3,1	2,89	107,27	3	2,89	103,81
12	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,95	2,63	112,17	2,9	2,63	110,27
13	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,8	1,43	125,87	1,7	1,43	118,88
14	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan didukung 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi** (kegiatan ini dilaksanakan oleh 12 Cabang Dinas dan 1 Bidang) dengan **keluaran** 331 laporan hasil pengendalian pengawasan pelaksanaan perizinan operasi, penguatan pemahaman melalui sosialisasi pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan keandalan layanan tenaga listrik serta pelaksanaan Rapat Koordinasi K2 bersama stakeholder terkait di Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan ini yaitu terfasilitasinya pengendalian dan pendampingan K2 pada pemilik IUPTLS. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya pemenuhan K2 pada pemilik IUPTLS. **Dampak** kegiatan ini yaitu berkurangnya risiko kecelakaan listrik pada instansi atau lembaga dan pelaku usaha. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu instansi atau lembaga dan pelaku usaha belum tertib dalam melaporkan kegiatan operasional penyediaan tenaga listrik. **Upaya** yang dilakukan yaitu memberikan teguran tertulis dan pendampingan untuk memenuhi kewajiban pelaporan.
- 2) **Penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi** (kegiatan ini dilaksanakan oleh 12 Cabang Dinas) dengan **keluaran** 660 rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik. **Outcome** kegiatan ini yaitu terpenuhinya

pelayanan pemenuhan penyediaan listrik untuk kepada pelaku usaha dan masyarakat. **Manfaat** kegiatan ini yaitu masyarakat dan pelaku usaha dapat memanfaatkan pembangkit listrik (genset, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)) sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Dampak** kegiatan ini yaitu pelaku usaha dan masyarakat memiliki cadangan listrik secara mandiri sehingga apabila terdapat gangguan jaringan tidak mengganggu produktivitas pelaku usaha. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih terdapat rendahnya pemahaman pelaku usaha dalam proses mengunggah dokumen pendukung di sistem untuk ajuan izin. **Upaya** yang dilakukan melakukan pendampingan dan konsultasi melalui pelaksanaan sosialisasi perizinan.

- 3) **Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan** (kegiatan ini dilaksanakan oleh 12 Cabang Dinas) dengan **keluaran** 12 dokumen hasil inventarisir dari setiap wilayah terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu, dan pemasangan 1.000 sambungan listrik rumah untuk masyarakat tidak mampu. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap peningkatan jumlah sambungan listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap peningkatan jumlah program pengentasan kemiskinan bidang infrastruktur **Outcome** dari kegiatan ini yaitu penyediaan akses listrik mandiri secara gratis untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu masyarakat tidak mampu memiliki sambungan listrik gratis yang memenuhi standar K2. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu mendukung produktivitas masyarakat tidak mampu melalui pemberian akses listrik. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaannya kegiatan adalah dinamisnya data masyarakat tidak mampu yang berpotensi berbedanya basis data dengan kondisi di lapangan. **Upaya** yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu verifikasi dan validasi data penerima manfaat di lapangan. Pengelolaan ketenagalistrikan turut berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran melalui intervensi pemerataan dan keterjangkauan akses listrik masyarakat dengan sasaran 1.000 sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu.

2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan didukung oleh 2 Kegiatan yaitu:

- 1) **Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi** (kegiatan ini dilaksanakan oleh 12 Cabang Dinas) dengan **keluaran** pembangunan 28 unit infrastruktur EBT. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu masyarakat memanfaatkan energi baru terbarukan untuk mendukung produktivitas. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu masyarakat dapat mengurangi pengeluaran untuk pemenuhan sumber energi seperti listrik maupun LPG.

Dampak dari kegiatan ini yaitu mendukung produktivitas masyarakat serta meningkatkan bauran energi baru terbarukan. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya konsistensi perawatan dan pemanfaatan dalam keberlangsungan penggunaan infrastruktur EBT. **Upaya** yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas keberlangsungan dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur EBT.

- 2) **Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi** dengan **keluaran** penyusunan 1 dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di Jawa Tengah. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu tersedianya data yang *update* terkait potensi EBT di Jawa Tengah serta menjaga ketersediaan dan keandalan energi seperti LPG dan BBM. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu dengan adanya data potensi EBT yang *update*, pembangunan infrastruktur EBT dapat sesuai dengan potensi EBT; ketersediaan dan keandalan energi yang memadai mendukung kelancaran kegiatan usaha, transportasi, dan distribusi barang sehingga rantai pasok kebutuhan masyarakat, stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemanfaatan EBT yang tepat sasaran serta penguatan ketahanan energi daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah potensi EBT masih belum optimalnya pemetaan dan sistem informasi geografis. **Upaya** yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu melakukan verval di lapangan terkait potensi EBT. Program Pengelolaan Energi Baru terbarukan menjadi instrumen transformasi struktural dalam mendukung implementasi Program Daerah, khususnya melalui Program Prioritas Pesantren Obah dan Program Taktis Eco-Pesantren Intervensi ini diarahkan pada penguatan kemandirian energi pesantren, dukungan diwujudkan melalui pemberian hibah 2 (dua) unit PLTS Atap di Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. Upaya ini tidak hanya menekan biaya operasional lembaga, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran energi bersih serta memperkuat citra pesantren sebagai simpul ekonomi syariah yang adaptif terhadap transisi energi. Lebih lanjut, program ini menjadi pilar utama dalam Program Taktis melalui Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas maupun tenaga surya dengan bentuk dukungan penguatan sinergi multipihak melalui Forum Energi Daerah (FED), memberikan stimulus berupa pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya energi setempat. Selain itu dilakukan inventarisasi potensi sumber daya energi untuk pengembangan desa mandiri energi serta dilakukan Kajian Pengembangan Desa Mandiri Energi sebagai dasar perencanaan berbasis data. Secara strategis, langkah ini diarahkan untuk menciptakan daya ungkit ekonomi di tingkat desa, memperluas akses energi bersih, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai keberlanjutan.

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut** (kegiatan ini dilaksanakan oleh 12 Cabang Dinas dan 1 Bidang) dengan **keluaran** pembinaan pertambangan minerba sebanyak 5 kegiatan melalui *updating* Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan (SILUP); Kajian neraca potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; bimtek 20 mahasiswa kebumihutan; penyusunan rapergub pengelolaan pertambangan dan pelaksanaan *good mining practice*; penerbitan 232 dokumen rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah; pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah sebanyak 347 lokasi penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintah Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024; Intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah; Mengusulkan perubahan Wilayah Pertambangan kepada Menteri untuk mengakomodir wilayah pertambangan rakyat. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sehingga mendorong iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan dalam rangka memberikan kontribusi terkait PDRB Jawa Tengah di sektor pertambangan serta memastikan terpenuhinya kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*). **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya tertib administrasi perizinan pertambangan, terciptanya iklim investasi yang kondusif, serta terjaganya pengelolaan sumber daya MBLB yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan kontribusi sektor MBLB terhadap pembangunan ekonomi daerah serta perlindungan lingkungan. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan masih terbatasnya sumber daya dalam pengawasan pertambangan serta masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dalam melaksanakan proses perizinan. **Upaya** yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya yang tersedia dan melakukan pengawasan terpadu bersama *stakeholder* terkait, baik instansi vertikal maupun horisontal serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan guna mendorong penerapan kaidah pertambangan yang baik.
- 2) **Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan** dengan **keluaran** laporan pengawasan pelaksanaan harga patokan MBLB. **Outcome** dari kegiatan ini adalah tersedianya data harga patokan komoditas tambang. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu menjaga stabilitas

harga material atas komoditas hasil galian. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu masih terdapat pelaku usaha tambang yang belum menjadikan harga patokan sebagai acuan. **Upaya** yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan harga patokan MBLB, koordinasi dalam pengendalian harga MBLB dan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Harga Patokan Mineral di Jawa Tengah.

- 3) **Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil** dengan **keluaran** 272 hasil uji mekanika tanah dan batuan serta analisa kimia tanah dan batuan. **Outcome** dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan uji lab atas kualitas material bahan galian. **Manfaat** dari kegiatan ini mengetahui kekuatan dan sifat fisik batuan yang data tersebut digunakan sebagai kebutuhan proyek konstruksi. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu memberikan referensi bahan material yang berkualitas sehingga untuk mendukung desain konstruksi yang optimal. **Permasalahan** yang dihadapi adalah belum optimalnya ketersediaan parameter pengujian. **Upaya** yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pengujian melalui penambahan parameter pengujian untuk memperluas segmen pasar/pengguna jasa, serta perluasan lingkup akreditasi.

Program ini diarahkan sebagai instrumen penguatan implementasi Program Aksi Transformasi Tata Kelola Tambang dengan bentuk dukungan Penyusunan Pergub sebagai turunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024; Pengawasan Usaha Pertambangan secara terpadu dan sinergi dengan pemangku kepentingan serta upaya ini diperkuat melalui pencermatan dalam Penyusunan rekomendasi teknis perizinan pertambangan sebagai instrumen pengendalian awal, sehingga kegiatan pertambangan dapat berjalan tertib, terkendali, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.

4. **Program Pengelolaan Aspek Kegeologian** didukung oleh 2 Kegiatan yaitu:

- 1) **Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** dengan **keluaran** 2 dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah. **Outcome** dari kegiatan ini tersedianya data wilayah konservasi air tanah serta data kawasan rawan bencana geologi dan peningkatan kompetensi bagi pengelola dan pemandu wisata geopark Dieng sejumlah 15 personil serta jelajah UNNESCO Global Geopark Kebumen sebagai penguatan instrumen pembangunan wilayah berbasis potensi alam. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu data konservasi air tanah dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan terkait air tanah. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk mendukung konservasi air tanah. **Permasalahan**

yang dihadapi peningkatan kebutuhan air seiring dengan pertumbuhan industri dan jumlah penduduk, perubahan tata guna lahan, serta dampak perubahan iklim telah memberikan dampak terhadap kondisi air tanah dan bentang alam di berbagai wilayah. **Upaya** yang dilakukan adalah pelaksanaan pengawasan aspek kegeologian dan pengembangan geopark pada berbagai wilayah di Jawa Tengah.

- 2) **Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** (kegiatan ini dilaksanakan oleh 12 Cabang Dinas dan 1 Bidang) dengan **keluaran** 323 laporan hasil pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah di Wilayah Jawa Tengah dan penerbitan 328 dokumen rekomendasi teknis izin pengusahaan air tanah di Jawa Tengah serta keluaran 825 dokumen hasil pengujian air tanah. Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2024 kepada seluruh pelaku usaha yang menggunakan air tanah di Jawa Tengah; Menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang mengacu pada UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; sosialisasi konservasi sumber daya air tanah secara masif kepada seluruh pengguna air tanah di Jawa Tengah. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap Pengawasan intensif terhadap pengambilan air tanah. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu pengambilan air tanah yang sesuai dengan debit yang diizinkan. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu menjaga kondisi air tanah dari segi kualitas dan kuantitas serta volume pengambilan air tanah dapat dimonitor sesuai dengan kemampuan akuifer. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu mendukung ketersediaan dan konservasi air tanah secara berkelanjutan. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah pembagian kewenangan perizinan air tanah berdasarkan wilayah sungai sehingga terdapat kendala kesulitan dalam pembaharuan data terkait pengguna air tanah dan tidak dapat dilakukan pengambilan data pemanfaatan air tanah secara langsung untuk perhitungan indeks konservasi air tanah. **Upaya** yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu sosialisasi dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan melalui tinjauan lapangan dengan Badan Pendapatan Kab./Kota setempat untuk identifikasi pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah dan volume pengambilannya.

Implementasi dalam kerangka besar pembangunan daerah, Program Pengelolaan Aspek Kegeologian berperan strategis dalam Program Aksi Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan bentuk dukungan pengawasan izin usaha air tanah di Jawa tengah.

Selain itu, Program ini memiliki fungsi penguatan pada Program Intervensi melalui program Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah dengan bentuk dukungan Pelaksanaan Jelajah Geopark di Geopark Kebumen, Pendampingan

penetapan Geopark dan Geoheritage, dan Peningkatan kapasitas Pengelola Geopark di Geopark Dieng.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja.

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 129 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	13	100	37	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	13	100	13	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	14	100	15	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	14	100	18	100	100	Sangat Tinggi

Adapun rencana strategis tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:

1. Pengawasan Usaha Pertambangan dan Pelaksanaan Tim Pengawasan Terpadu dalam penerapan *Good Mining Practice*;
2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta optimalisasi penetapan NPA;
3. Pemasangan 1.000 unit sambungan listrik untuk rumah tangga miskin;
4. Pelaksanaan Program Eco Pesantren dan Pengembangan Desa Mandiri Energi melalui pembangunan 23 unit infrastruktur EBT meliputi 15 unit digester biogas, 5 unit PLTS Rooftop dan 3 unit pompa air tenaga surya untuk pertanian;
5. Penguatan konsolidasi pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan melalui pelaksanaan Forum Energi Daerah.

3.4.3.6 Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor pembangun perekonomian Jawa Tengah nomor 2 dengan kontribusi sebesar 13,49%. Besarnya kontribusi sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh ekspor khususnya produk non migas. Kinerja ekspor Jawa tengah pada Tahun 2025 naik sebesar 10,49% dibandingkan pada Tahun 2024 dari US\$11.424,66 menjadi US\$12.623,21. Kinerja lain yang menjadi

keberhasilan sektor perdagangan adalah stabilitas harga yang diukur dari nilai inflasi Jawa Tengah. Pada Desember 2025 inflasi *Year-on-Year* (YoY) Jawa Tengah sebesar 2,72%.

Urusan perdagangan memiliki tantangan terkait negara utama tujuan ekspor produk Jawa Tengah Tahun 2025 adalah Amerika Serikat dengan persentase sebesar 47,58 %. Dominasi Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor meningkatkan kerawanan capaian ekspor Jawa Tengah karena adanya tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Trump mulai Agustus 2025 ini. Permasalahan lain yang masih menjadi kendala bagi capaian kinerja ekspor di Jawa tengah adalah Infrastruktur yang belum memadai terkait dengan infrastruktur pelabuhan muat yang belum memungkinkan untuk melakukan *direct shipment*, ketergantungan pasar tradisional, rendahnya daya saing produk dalam negeri, dan prosedur ekspor yang masih membutuhkan waktu lama..

Upaya untuk menjawab tantangan perdagangan dilaksanakan melalui implementasi program-program yang bertujuan untuk perluasan pasar produk unggulan Jawa Tengah melalui *e-commerce* dan perluasan pasar non tradisional.

Tahun 2025 pada sektor perdagangan melalui Disperindag Prov Jateng telah menerima penghargaan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yaitu:

1. Penghargaan sebagai Daerah Peduli Perlindungan Konsumen;
2. Peringkat 3 penghargaan *Indonesia Market Surveillance* (INAMS) Award terhadap kinerja daerah dan petugas pengawas yang menggunakan INAMS sebagai sistem pelaporan hasil pengawasan barang beredar.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp40.695.985.000,00 untuk melaksanakan 6 program, yaitu:

- 1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** didukung anggaran Rp493.755.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,66% Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah (168,37%) hal ini dikarenakan adanya peningkatan ekspor yang menggunakan dokumen SKA; Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi (100%); Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) (200%) hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha distributor minuman beralkohol di Jawa Tengah. Terhadap target akhir RPD terdapat 2 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras yaitu Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu beberapa negara tujuan ekspor Jawa Tengah masih mewajibkan penyertaan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA), masih banyaknya pelaku usaha perdagangan ilegal. **Upaya** yang dilakukan yaitu Optimalisasi layanan SKA kepada pelaku

usaha ekspor serta meningkatkan koordinasi dan pengawasan izin berusaha. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah mendorong peningkatan ekspor melalui layanan dokumen pendukung ekspor serta meningkatkan ketertiban perizinan berusaha.

2. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** didukung anggaran Rp159.476.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,85%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi (133,33%). Terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurang optimalnya pemanfaatan sarana-sarana perdagangan. **Upaya** yang dilakukan yaitu mengembangkan sarana-sarana perdagangan lain yang lebih efisien dan efektif. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah mendorong pemanfaatan sarana-sarana perdagangan yang lebih efisien dalam minimalisasi biaya distribusi dan efektif dalam memperluas pasar.
3. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** didukung anggaran Rp32.388.954.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,99%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota (136,15%); Persentase kinerja realisasi pupuk (100%); Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi (100%). Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator telah tercapai, 2 indikator akan perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi masih tingginya disparitas harga Bahan Pokok & Penting (Bapokting) di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan gejolak harga yang selalu terjadi pada waktu waktu tertentu. **Upaya** yang dilakukan pelaksanaan pemantauan harga tiap daerah sebagai *early warning inflation* dan kesiapan operasi pasar komoditas yang mengalami inflasi di suatu daerah. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah mempercepat penyelesaian inflasi sehingga meminimalisasi dampak inflasi.
4. **Program Pengembangan Ekspor** didukung anggaran Rp581.343.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,31%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase kenaikan nilai ekspor non migas (316,29%) hal ini disebabkan adanya peningkatan ekspor non-migas di Jawa Tengah. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi ketergantungan pada pasar tradisional dan masih tingginya pelaku usaha ekspor yang tidak melakukan ekspor secara mandiri sehingga tidak tercatat sebagai capaian ekspor dari Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan mencoba membuka peluang pasar non-tradisional melalui perluasan kerjasama pemerintahan dan perluasan promosi produk serta pelaksanaan pelatihan-pelatihan ekspor. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah memperluas pasar produk unggulan serta meningkatkan kemandirian pelaku usaha ekspor di Jawa Tengah.

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen didukung anggaran Rp2.216.985.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,09%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen (552,38%); Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta (300%) dan Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang (743,31%) hal ini dikarenakan masif nya edukasi dan kemudahan akses informasi sehingga meningkatkan literasi dan kewaspadaan konsumen yang mendorong pelaku usaha untuk melengkapi produknya dengan sertifikasi mutu produk. Terhadap target akhir RPD terdapat 2 indikator akan tercapai, 1 indikator perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi masih kurangnya lembaga yang membantu menangani permasalahan sengketa konsumen serta kurangnya kepedulian baik konsumen dan pelaku usaha dalam penggunaan serta peredaran produk yang aman dikonsumsi. **Upaya** yang dilakukan membentuk dan penguatan lembaga-lembaga penanganan sengketa konsumen serta pengawasan produk yang beredar di masyarakat. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meningkatnya keamanan produk yang beredar di pasar Jawa Tengah

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri didukung anggaran Rp4.855.472.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,39%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri (120%). Terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi rendahnya daya saing produk dalam negeri dan produk impor lebih mampu menjawab selera dan kemampuan pasar di Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan perluasan promosi serta pasar produk dalam negeri, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah produk unggulan Jawa Tengah memiliki pasar yang kuat di dalam negeri.

Tabel 3.130 Capaian Kinerja Program Urusan Perdagangan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
1	Persentase peningkatan jumlah pen-erbitan rekomendasi distributor ter-daftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	10	20	200	10	20	200
2	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	%	8,7	14,48	166,44	8,6	14,48	168,37
3	Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	%	20	10	50	10	10	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
1	Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	%	25	20	80	15	20	133,33
III PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
1	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	%	8	6,61	121,03	9	6,61	136,15
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	91,5	0	0	0	0	100
3	Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	80	0	0	0	0	100
IV PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
1	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	4.1	12,81	312,43	4,05	12,81	316,29
V PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
1	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	1,1	5,8	527,27	1,05	5,8	552,38
2	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	%	5	0,3	6	0,1	0,3	300
3	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	%	10	11,67	116,7	1,57	11,67	743,31
VI PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
1	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	20	18	90	15	18	120

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan didukung 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor** dengan **keluaran** yaitu pelaksanaan desiminasi untuk 30 pelaku usaha penjual retail minuman beralkohol serta penerbitan rekomendasi perizinan berusaha bagi distributor minuman beralkohol yang sampai dengan saat

ini belum ada pengajuan. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya ketertiban izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Jawa Tengah. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu meminimalisir peredaran minuman beralkohol ilegal di Jawa Tengah. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu mendorong terciptanya iklim usaha perdagangan minuman beralkohol yang kondusif di Jawa Tengah. **Permasalahan** dari kegiatan tersebut adalah masih terdapat minuman beralkohol ilegal yang beredar di pasaran. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan desiminasi bagi pelaku usaha penjual retail minuman beralkohol.

- 2) **Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar** dengan **keluaran** yaitu pelaksanaan desiminasi untuk 30 pelaku usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar dan unsur pemerintahan serta Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya ke 15 pelaku usaha. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya ketertiban izin usaha perdagangan bahan berbahaya di Jawa Tengah. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran bahan berbahaya ilegal di Jawa Tengah. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu mendorong terciptanya iklim usaha perdagangan bahan berbahaya yang kondusif di Jawa Tengah. **Permasalahan** dari kegiatan tersebut adalah masih tingginya penyalahgunaan dan peredaran bahan berbahaya ilegal. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan desiminasi dan pengawasan bagi pelaku usaha penjual bahan berbahaya.
- 3) **Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)** dengan **keluaran** yaitu pelaksanaan *post*-audit ke 20 pelaku usaha ekspor. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya ketertiban administrasi pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA). **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu meminimalisir kegagalan penerbitan SKA pada periode berikutnya. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu mendorong peningkatan ekspor pelaku usaha di Jawa Tengah. **Permasalahan** masih tingginya penolakan pengajuan SKA karena kekurangan administrasi pengajuan sebelumnya yang belum dipenuhi. **Upaya** yang dilakukan yaitu melaksanakan *post audit* bagi pelaku usaha ekspor yang pernah mengajukan SKA akan tetapi kelengkapan administrasi belum dipenuhi.

2. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** didukung kegiatan **Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi** dengan **keluaran** yaitu bimbingan teknis bagi 30 orang pelaku pasar rakyat serta monitoring, verifikasi dan pembinaan 2 pasar rakyat. **Outcome** dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi SDM pelaku pasar rakyat. **Manfaat** kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar rakyat sehingga masyarakat nyaman bertransaksi di pasar rakyat. **Dampak** dari kegiatan yaitu meningkatkan nilai transaksi di pasar rakyat. **Permasalahan** saat ini pasar rakyat kurang diminati pembeli karena

kurang menjawab kebutuhan dan perkembangan teknologi saat ini. **Upaya** yang dilakukan bimtek peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting didukung 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi** dengan **keluaran** pelaksanaan 2 kali forum antisipasi gejolak harga dan pengawasan stok bapokting kepada 2 pelaku usaha distribusi barang. **Outcome** terjaganya ketersediaan stok bapokting di Jawa Tengah. **Manfaat** meminimalisasi terjadinya inflasi karena kelangkaan stok barang. **Dampak** kestabilan harga bapokting di Jawa Tengah. **Permasalahan** masih sering terjadi kelangkaan stok bapokting di beberapa wilayah di Jawa Tengah. **Upaya** yang dilaksanakan pelaksanaan forum gejolak harga bersama para *stakeholder* untuk meminimalisasi terjadinya monopoli atau penimbunan barang serta pengawasan ketersediaan stok barang.
- 2) **Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan** dengan **keluaran** pembinaan dan pengawasan pemantauan harga dan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga di 35 Kab/Kota. **Outcome** tersedianya informasi harga bapokting dan intervensi stabilisasi harga bapok dari 35 kab/Kota di Jawa Tengah. **Manfaat** peningkatan stabilitas harga kebutuhan bapokting. **Dampak** menjaga stabilitas daya beli masyarakat. **Permasalahan** disparitas harga bapok antar wilayah di Jawa Tengah masih cenderung tinggi dan berfluktuasi. **Upaya** yang dilakukan pengawasan pemantauan harga dan operasi pasar.
- 3) **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya** dengan **keluaran** pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di 6 pelaku usaha distribusi pupuk. **Outcome** ketertiban distribusi pupuk sesuai dengan peruntukannya. **Manfaat** alokasi pupuk bersubsidi tepat sasaran. **Dampak** peningkatan hasil pertanian di wilayah pedesaan. **Permasalahan** yang dihadapi distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran. **Upaya** yang dilakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

4. Program Pengembangan Ekspor didukung kegiatan **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain partisipasi 2 kali pameran dengan memfasilitasi 4 pelaku usaha; pelatihan manajemen ekspor bagi 20 pelaku usaha ekspor; pelaksanaan 1 kali *one-on-one meeting*; penyediaan informasi pasar luar negeri. **Outcome** kegiatan tersebut berupa perluasan pasar luar negeri dan peningkatan ekspor bagi pelaku usaha Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memperluas pasar luar

negeri bagi produk Jawa Tengah. Dampak kegiatan ini yaitu peningkatan ekspor non migas di Jawa Tengah. **Permasalahan** keterbatasan pasar internasional bagi produk unggulan Jawa Tengah dan eksportir tidak melakukan ekspor secara mandiri karena kesulitan prosedur ekspor. **Upaya** yang dilakukan partisipasi pameran dalam negeri bertaraf internasional, *one-on-one meeting*, penyediaan informasi pasar dan pelatihan manajemen ekspor.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen didukung 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** edukasi konsumen cerdas pada 60 masyarakat selaku konsumen; pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan monitoring Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). **Outcome** kegiatan ini yaitu penyelesaian sengketa konsumen. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meminimalisasi terjadinya sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Dampak kegiatan ini adalah peningkatan perlindungan konsumen di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi masih tingginya konflik antara konsumen dengan pelaku usaha perdagangan. **Upaya** edukasi konsumen cerdas, pengaktifan BPSK, dan monitoring LPKSM
- 2) **Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** fasilitasi merk pada 40 pelaku usaha dan SNI pada 2 pelaku usaha. **Outcome** kegiatan tersebut adalah pemenuhan standarisasi berusaha. **Manfaat** kegiatan ini yaitu peningkatan daya saing produk dalam negeri. **Dampak** kegiatan ini yaitu penguatan pasar produk dalam negeri. **Permasalahan** yang dihadapi kurang optimalnya daya saing produk dalam negeri. **Upaya** yang dilakukan fasilitasi merk dan SNI
- 3) **Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** pengawasan pada 20 jenis barang. **Outcome** kegiatan ini adalah peningkatan tertib niaga di Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu peningkatan keamanan produk beredar di masyarakat. **Dampak** kegiatan ini adalah peningkatan perlindungan konsumen di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi masih tingginya barang beredar yang tidak memenuhi standar keamanan barang. **Upaya** yang dilakukan pengawasan barang beredar.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri didukung 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri** dengan **keluaran** partisipasi 2 kali pameran dalam negeri. **Outcome** memperluas pasar perdagangan produk dalam negeri. **Manfaat** meningkatkan nilai transaksi pelaku usaha perdagangan. **Dampak** menguatkan pertumbuhan sektor perdagangan. **Permasalahan** keterbatasan pasar bagi pelaku usaha perdagangan. **Upaya** promosi produk unggulan Jawa Tengah.
- 2) **Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri** dengan **keluaran** fasilitasi sarana prasarana perdagangan pada 42

perkumpulan pelaku usaha perdagangan dan perluasan pemasaran pelaku usaha perdagangan. **Outcome** meningkatnya pasar produk dalam negeri. **Manfaat** pengembangan usaha pelaku usaha perdagangan. **Dampak** meningkatkan pendapatan pelaku usaha perdagangan. **Permasalahan** keterbatasan modal kerja dalam pengembangan usaha perdagangan serta keterbatasan pasar. **Upaya** fasilitasi sarana prasarana dan bimtek *e-commerce* bagi pelaku usaha perdagangan

- 3) **Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** dengan **keluaran** fasilitasi pameran bagi 20 pelaku usaha kriya. **Outcome** perluasan pasar produk dalam negeri. **Manfaat** meningkatkan pendapatan pelaku usaha perdagangan. **Dampak** menguatkan pertumbuhan sektor perdagangan. **Permasalahan** keterbatasan pasar bagi produk dalam negeri. **Upaya** fasilitasi pameran bagi pelaku usaha.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.131 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perdagangan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	3	100	3	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan Ekspor	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	3	100	6	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 masih dengan program yang sama namun dengan prioritas sasaran intervensi yang berbeda yaitu:

1. Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
2. Peningkatan promosi dan kemitraan antar pelaku usaha perdagangan;
3. Pembukaan pasar di dalam dan di luar negeri untuk produk unggulan Jawa Tengah;
4. Peningkatan perlindungan konsumen;
5. Pengawasan barang beredar dimasyarakat.

3.4.3.7 Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian di Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting sebagai pilar perekonomian daerah. Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar PDRB, yaitu sekitar 33,38% pada Tahun 2025, terutama dari sub-sektor padat karya seperti alas kaki serta makanan dan minuman. Dominasi ini menunjukkan kuatnya peran industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan memperluas pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Jawa Tengah.

Di tahun berjalan, sektor industri di Jawa Tengah menghadapi tantangan peningkatan produktivitas, integrasi rantai pasok, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan daya saing global. Pemerintah provinsi terus memperkuat struktur industri melalui pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, peningkatan kompetensi SDM, serta digitalisasi proses produksi. Sejalan dengan program Disperindag, berbagai upaya dilakukan seperti pelatihan SDM industri, inkubasi startup digital, fasilitasi layanan mutu dan sertifikasi, pembinaan sentra Industri Kecil Menengah (IKM), serta dukungan perluasan pasar dan perizinan industri (TKDN, HKI, SNI). Langkah-langkah ini diarahkan untuk memastikan industri daerah tetap adaptif, kompetitif, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang merata.

Dengan kontribusi mencapai sekitar sepertiga dari total PDRB provinsi pada semester pertama tahun 2025. Dalam mendukung pertumbuhan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memperkuat koordinasi pengembangan kawasan industri, meningkatkan efektivitas pembinaan IKM dan wirausaha baru, serta memperluas fasilitasi layanan industri agar lebih tepat sasaran. Termasuk di dalamnya penegasan atas kebutuhan peningkatan kualitas SDM industri, optimalisasi promosi dan ekspor produk unggulan daerah, serta penguatan pengawasan mutu dan sertifikasi untuk mendorong daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Upaya ini dijalankan secara bertahap untuk memastikan kebijakan industri tetap selaras dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.

Prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan Perindustrian tahun 2025 yaitu peringkat terbaik III tingkat nasional pada *Annual Indonesia Green Industry Summit* (AIGIS) di Plenary Hall, *Jakarta International Convention Center* (JICC), Jakarta Pusat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp14.508.097.000,00 untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

1. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** didukung anggaran Rp14.123.558.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,41% Program ini memiliki 5 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (114,75%), Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (108,88%), Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (113,34%), serta Persentase pertumbuhan produksi dan agro (201,6%) hal ini disebabkan karena adanya kenaikan investasi sektor industri di Jawa Tengah. Terhadap target akhir RPD terdapat 4 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih rendahnya daya saing industri di Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan peningkatan daya saing industri melalui fasilitasi pelaku usaha industri, pengembangan teknologi industri dan penyediaan SDM sesuai kebutuhan Industri. **Manfaat** program tersebut yaitu mendorong percepatan pertumbuhan industri di Jawa Tengah.
2. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri** didukung anggaran Rp218.061.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,52%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan (122%), Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan (289,44%) hal ini disebabkan adanya kenaikan investasi sektor industri maka terdapat kenaikan yang signifikan dalam penerbitan rekomendasi perizinan. Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator telah tercapai dan 1 perlu upaya keras. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan pemantauan perizinan usaha industri yaitu keterbatasan data yang belum terintegrasi serta rendahnya kesadaran pelaku industri dalam memenuhi kewajiban perizinan dan pelaporan. **Upaya** yang dilakukan yaitu memberikan pendampingan kepada pelaku industri dalam proses perizinan berusaha, serta melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan komitmen perizinan sesuai ketentuan. **Manfaat** program tersebut yaitu meningkatnya tertib administrasi perizinan usaha industri, terlaksananya pengawasan yang lebih efektif, serta tersedianya data perizinan yang akurat sebagai dasar kebijakan pengendalian dan pengembangan industri di Jawa Tengah.
3. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** didukung anggaran Rp166.478.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,32%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD

dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (138,12%) dan Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (257,7%) hal ini disebabkan meningkatnya jumlah industri di Jawa Tengah yang mendaftar Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya integrasi dan pemutakhiran data industri dalam SIINas, sehingga menyulitkan penyediaan data kinerja industri secara *real-time* untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat. **Upaya** yang dilakukan yaitu melalui pendampingan kepada pelaku industri dalam pelaporan data, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan SIINas agar data yang dilaporkan lebih akurat dan mutakhir. **Manfaat** program tersebut yaitu tersedianya data industri yang lebih terintegrasi, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan industri yang efektif di Jawa Tengah.

Tabel 3.132 Capaian Kinerja Program Urusan Perindustrian

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
1	Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	2,75	5,04	183,27	2,5	5,04	201,6
2	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	2,5	3,15	126	2,5	3,15	126
3	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	9,38	7,56	80,6	6,67	7,56	113,34
4	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	97,54	114,75	85	97,54	114,75
5	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,4	4,78	108,88	4,39	4,78	108,64
II	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
1	Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	11	26,05	236,82	9	26,05	289,44
2	Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	16	6,1	38,13	5	6,1	122
III	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
1	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2,73	25,77	943,96	10	25,77	257,7

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2,72	9,6	351,65	6,95	9,6	351,65

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

- 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** didukung oleh kegiatan **Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan antara lain Pelatihan 650 orang dan penyaluran 634 orang SDM Industri Produk Tekstil dan alas kaki; penumbuhan dan Pendampingan 80 orang Wirausaha Baru sektor Industri; fasilitasi Promosi Sektor Industri sebanyak 55 IKM; Fasilitasi Sertifikat TKDN-IK 120 sertifikat; Diseminasi Teknologi Tepat Guna; Inkubasi Bisnis Startup Digital di Jawa Tengah kepada 10 orang dan kegiatan ini merupakan rekomendasi DPRD untuk memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan kompetensi dan daya saing SDM industri; bertambahnya jumlah wirausaha baru yang produktif dan mandiri; serta meningkatnya kemandirian IKM dalam mengakses pasar dan memenuhi standar sertifikasi industri nasional. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan kapasitas pelaku industri dalam mengelola usaha secara profesional, memperluas peluang kerja, memperkuat jejaring kemitraan antar pelaku industri, dan mendorong terciptanya ekosistem industri yang inovatif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, bertambahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan, serta terwujudnya struktur industri daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih rendahnya ketersediaan tenaga kerja terampil sektor industri; masih rendahnya daya saing produk hasil industri dan masih lambatnya pertumbuhan sektor industri di Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan adalah pelatihan SDM sektor industri dan fasilitasi industri melalui sertifikasi produk hasil Industri, promosi dan kemitraan.
- 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri** didukung kegiatan **Penyerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan verifikasi 21 dokumen pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor industri. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya ketertiban administrasi serta kepatuhan pelaku industri dalam pemenuhan komitmen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya proses pelayanan perizinan industri yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar. **Dampak** kegiatan ini yaitu

meningkatnya tata kelola perizinan industri yang tertib, efektif, dan mendorong tumbuhnya investasi sektor industri yang berdaya saing, memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di daerah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum semua pelaku industri memahami prosedur perizinan yang dapat mempengaruhi efektivitas layanan perizinan industri, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif serta menghambat pertumbuhan sektor industri yang tertib dan berdaya saing di Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan adalah pemberian pemahaman dan sosialisasi kepada pelaku industri mengenai prosedur serta tahapan proses perizinan secara benar dan sesuai ketentuan melalui verifikasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor industri.

3. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** didukung kegiatan **Penyediaan Informasi Industri untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi Berbasis SIINas** dengan **keluaran** kegiatan 80 dokumen hasil pengawasan dan pendampingan industri. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kepatuhan dan akurasi pelaporan data industri pada SIINas serta meningkatnya kapasitas pelaku industri dan petugas dinas dalam pengelolaan informasi industri berbasis digital. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tersedianya data industri yang valid, terintegrasi, dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan industri di tingkat provinsi. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya sistem informasi industri yang transparan, efisien, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga mendukung pengambilan kebijakan industri yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. **Permasalahan** yang dihadapi belum optimalnya integrasi dan akurasi data industri dalam SIINas, rendahnya literasi digital pelaku industri dalam melakukan pelaporan data, serta terbatasnya akses pemerintah daerah terhadap sistem SIINas yang menghambat proses validasi dan pengawasan data industri secara menyeluruh di Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku industri terkait tata cara pelaporan data melalui SIINas, memberikan pendampingan teknis untuk meningkatkan kemampuan digital dalam pengisian data, serta memperkuat koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perindustrian guna mengatasi kendala teknis dan memperluas akses pemerintah daerah terhadap sistem SIINas agar proses validasi dan pengawasan data industri dapat berjalan lebih optimal dengan kegiatan Pengawasan dan Pendampingan bagi Industri.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Perindustrian dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.133 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Perindustrian

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5	100	7	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Penguatan kelembagaan sentra IKM Pangan
2. Coaching Hilirisasi komoditas pangan potensi desa
3. Pendampingan Penerapan Prinsip Industri Hijau menuju sertifikasi Hijau bagi Tenant di Kawasan Industri
4. Penumbuhan dan Pendampingan Wirausaha Baru (WUB) bagi Santri di Provinsi Jawa Tengah - (SantriPreneur)
5. Pelatihan dan Penyaluran SDM Industri Produk Tekstil dan SDM Industri Produk Alas Kaki

3.4.3.8 Urusan Transmigrasi

Pada tahun 2025, Urusan Transmigrasi di Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan, pengurangan kepadatan penduduk, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penempatan dan pemberdayaan keluarga transmigran. Pemerintah provinsi berperan dalam menyiapkan calon transmigran, memberikan pembekalan keterampilan dasar melalui pelatihan berbasis kompetensi, serta memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah tujuan transmigrasi, baik di wilayah luar Jawa maupun kawasan transmigrasi yang masih berkembang. Upaya ini disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia calon transmigran, khususnya melalui pelatihan bidang pertanian, kewirausahaan, dan keterampilan lain yang sesuai dengan potensi wilayah tujuan.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didukung anggaran Rp137.710.000,00 untuk melaksanakan **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** didukung anggaran Rp137.71.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,56%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang difasilitasi (104,31%), terhadap target akhir RPD tahun 2026 telah tercapai dan

Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian (101,62%), terhadap target akhir RPD tahun 2026 akan tercapai. **Permasalahan** dalam penyelenggaraan program tersebut yaitu tidak sebanding antara jumlah masyarakat yang berminat terhadap Program transmigrasi dengan terbatasnya jumlah alokasi program penempatan transmigrasi dari Pusat. **Upaya** yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi melalui pola Kerjasama Antar Daerah dengan daerah penempatan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pusat dan daerah atau Provinsi penempatan. Rincian lokasi daerah Penempatan Transmigran Tahun 2025 Jawa Tengah untuk 19 KK yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan 8 KK; Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat 5 KK; Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah 3 KK; serta Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara 3 KK. **Manfaat** Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi mempunyai dampak peningkatan lapangan kerja, akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan sektor perdagangan di sekitarnya, serta masyarakat transmigran yang semula tidak mempunyai pekerjaan sekarang sudah mempunyai pekerjaan tetap, rumah tinggal yang berpekarangan dan lahan usaha, kesejahteraan warga transmigran cenderung meningkat.

Tabel 3.134 Capaian Kinerja Program Urusan Transmigrasi

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
1	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,81	3,87	101,57	3,71	3,87	101,57
2	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3,81	3,77	98,95	3,71	3,77	101,61

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi didukung **kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** dengan keluaran kegiatan antara lain peningkatan kompetensi 10 orang calon transmigran di bidang pertanian. **Outcome** adalah terwujudnya penempatan calon transmigran asal Jawa Tengah melalui hasil kerjasama (MOU) dengan daerah penempatan. **Manfaat** adalah peningkatan pendapatan transmigran Jawa Tengah di daerah penempatan. **Dampak** adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah penempatan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu dinamika kuota peserta transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Transmigrasi RI semula sebanyak 45 KK, namun pada bulan Agustus 2025 terjadi perubahan Alokasi penempatan transmigrasi menjadi 19 KK. **Upaya** yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi melalui pola Kerjasama Antar Daerah dengan daerah penempatan dan komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi RI.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Transmigrasi dengan tingkat capaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.135 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Transmigrasi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigras	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu: Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antara Kementerian Transmigrasi R.I, Pemerintah Provinsi daerah penempatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan.

3.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

3.4.4.1 Fungsi Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bertujuan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya demi peningkatan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan berfungsi sebagai fondasi dan kompas strategis, bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi spesifik yang dimiliki daerah.

Penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan sinkronisasi kebijakan antara dokumen rencana pembangunan jangka menengah dengan rencana kerja tahunan, guna memastikan seluruh program perangkat daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Melalui optimalisasi sistem informasi pembangunan yang terintegrasi, proses perencanaan telah bertransformasi menjadi lebih akuntabel, transparan dan tepat sasaran dalam mengalokasikan sumber daya pembangunan dengan prinsip *money follows program*, sehingga dokumen perencanaan mampu berfungsi sebagai instrumen strategis yang menjamin efektivitas intervensi kebijakan dalam akselerasi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang Perencanaan di Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

didukung dengan anggaran Rp10.285.989.000,00 untuk melaksanakan 2 Program yaitu:

1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah didukung anggaran Rp4.983.992.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,73%. Program ini memiliki 6 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi, yaitu Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya, Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya, Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian, Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian, Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Terhadap target akhir RPD terdapat 6 Indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu sinkronisasi kegiatan antar perangkat daerah kurang optimal saat proses proses transisi kelembagaan. **Upaya** yang dilakukan yaitu peningkatan koordinasi untuk identifikasi dan pencermatan kegiatan mendasarkan urusan pemerintahan dan struktur kelembagaan. **Manfaatnya** yaitu keterpaduan dan keselarasan kegiatan pembangunan antar Perangkat Daerah melalui pengalokasian sumber daya secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan pembangunan.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

didukung anggaran Rp5.301.997.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,96%. Program ini memiliki 2 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, yaitu Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi dan Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi. Terhadap target akhir RPD terdapat 2 Indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterlambatan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda RPJMD Provinsi Jawa Tengah berdampak administratif terhadap penetapan Perda RPJMD yang melampaui batas waktu. **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dalam proses percepatan penerbitan regulasi yang mengatur tentang evaluasi Rancangan Perda RPJMD. **Manfaatnya** yaitu meningkatnya sinkronisasi dan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan regulasi yang mengatur evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.136 Capaian Kinerja Program Fungsi Perencanaan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
1	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	100	100	100	100	100
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
1	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** dengan **keluaran** 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 1 Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 1 dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 yang merupakan rekomendasi DPRD sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. **Outcome** dari kegiatan tersebut berupa meningkatnya konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan; integrasi program dan kegiatan lintas sektor yang sesuai dengan prosedur regulasi yang ada. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tercapainya proses perencanaan dan penganggaran yang tepat dan terarah guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan peningkatan kualitas

SDM yang produktif dan berdaya saing. **Dampak** kegiatan ini yaitu tercapainya sasaran pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu penyusunan dan perumusan kebijakan dokumen perencanaan urusan pemerintahan dan pembangunan manusia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat, cermat dan efisien. **Upaya** yang dilaksanakan yaitu melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk berperan aktif pada penyusunan dan perumusan dokumen urusan pemerintahan dan pembangunan manusia melalui forum interaktif.

- 2) **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** dengan keluaran 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup bidang perekonomian dan SDA serta 1 Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan SDA, dan kegiatan ini juga merupakan rekomendasi DPRD terkait penguatan koordinasi dan sinkronisasi Program Ekonomi, utamanya dalam rangka Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dengan mendorong pertumbuhan penanaman modal, perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusifitas wilayah didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas. **Outcome** dari kegiatan tersebut berupa meningkatnya konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan; integrasi program dan kegiatan lintas sektor yang sesuai dengan prosedur regulasi yang ada. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tercapainya proses perencanaan dan penganggaran yang tepat dan terarah guna peningkatan peluang kerja, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pengelolaan potensi SDA. **Dampak** kegiatan ini yaitu tercapainya sasaran pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu penyusunan dan perumusan kebijakan dokumen perencanaan urusan perekonomian dan SDA belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat, cermat dan efisien. **Upaya** yang dilaksanakan yaitu melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk berperan aktif pada penyusunan dan perumusan dokumen urusan perekonomian dan SDA melalui forum interaktif.
- 3) **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** dengan keluaran 1 Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta 1 Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan kegiatan ini juga merupakan rekomendasi DPRD terkait Perencanaan pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan yang telah tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 pada BAB 4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah. **Outcome** dari kegiatan tersebut berupa meningkatnya konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan; integrasi program dan kegiatan lintas sektor yang sesuai dengan prosedur regulasi yang ada. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tercapainya proses perencanaan dan penganggaran yang tepat dan

terarah guna peningkatan konektivitas regional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. **Dampak** kegiatan ini yaitu tercapainya sasaran pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu penyusunan dan perumusan kebijakan dokumen perencanaan urusan infrastruktur dan kewilayahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat, cermat dan efisien. **Upaya** yang dilaksanakan yaitu melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk berperan aktif pada penyusunan dan perumusan dokumen urusan infrastruktur dan kewilayahan melalui forum interaktif.

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Penyusunan perencanaan dan pendanaan** dengan keluaran 3 dokumen perencanaan yaitu dokumen RKPD tahun 2026; RKPD-P tahun 2025 serta dokumen RPJMD Provinsi Jawa tengah tahun 2025-2029. Dalam penyusunan dokumen dimaksud, sebagaimana rekomendasi DPRD telah dimuat pula substansi terkait tema dan isu pembangunan prioritas Nasional. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu tercapainya penjabaran dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja yang terukur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memberikan landasan dalam penentuan prioritas kebijakan pembangunan daerah. **Dampak** kegiatan ini yaitu tercapainya keselarasan, sinkronisasi dan sinergitas dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat terkait substansi dan struktur dokumen RPJMD tahun 2025-2029. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan penyesuaian substansi dan struktur dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029.
- 2) **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan keluaran dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah. **Outcome** dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang telah diolah, diverifikasi, dan disajikan secara terintegrasi serta mudah diakses. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas data dan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan. **Dampak** kegiatan ini yaitu pengambilan keputusan dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis data dan informasi yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. **Permasalahan** yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu belum seluruh Kabupaten/Kota mendayagunakan dan mengaplikasikan SIPD RI pada proses penyusunan dokumen perencanaan. **Upaya** yang dilakukan antara lain mendorong Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan pengisian e-walidata pada aplikasi SIPD RI dalam proses perencanaan pembangunan.

- 3) **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan keluaran Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Aturan Perundangan. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu tersedianya kajian analisis rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masa mendatang. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai capaian kinerja pembangunan daerah guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. **Dampak** kegiatan ini yaitu Pembangunan daerah menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, karena berbasis evaluasi yang objektif. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan Kabupaten/Kota dalam mentaati batas waktu penyampaian dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan. **Upaya** yang dilakukan yaitu merubah mekanisme fasilitasi secara tertulis untuk percepatan serta mendorong penyampaian dokumen perencanaan Kabupaten/Kota untuk lebih awal disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Fungsi Perencanaan dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.137 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Perencanaan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	100	3	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6	100	18	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.
3. Penyusunan dokumen Roadmap Tematik Prioritas Pembangunan Daerah

3.4.4.2 Fungsi Keuangan

A. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan pendapatan sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang keuangan dan sub fungsi keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan fiskal dan kemandirian daerah melalui optimalisasi perencanaan, pemungutan, pengawasan hingga evaluasi pendapatan. Dalam konteks tema pembangunan Tahun 2025 peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Badan Pengelola Pendapatan Daerah dituntut untuk senantiasa memperkuat inovasi layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta melakukan pemutakhiran basis data dalam rangka merespons dinamika regulasi dan perkembangan ekonomi daerah. Di samping itu, penguatan sinergi dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pendapatan yang responsif, transparan, dan partisipatif. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kapasitas fiskal sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Isu utama dalam pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2025 adalah peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang adaptif dan transparan. Fokus utama diarahkan pada pemutakhiran data perpajakan, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi perpajakan. Selain itu, penguatan layanan berbasis digital, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pengembangan kolaborasi lintas sektor menjadi prioritas strategis untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan pendapatan daerah yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam melaksanakan fungsi keuangan, Bapenda didukung anggaran Rp40.964.815.000,00 untuk melaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 91,67%. Kondisi ini disebabkan karena adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menciptakan efisiensi tanpa mengurangi kualitas output yang telah ditetapkan. Program ini memiliki 186 indikator dimana 182 indikator kinerja merupakan capaian kinerja pada 37 UPPD se-Jawa Tengah dan 4 indikator lainnya pada kantor pusat. Indikator tersebut mendukung RKPD dengan capaian sangat tinggi 108 indikator, capaian tinggi 39 indikator, capaian sedang 22 indikator, capaian rendah 7 indikator dan capaian sangat rendah 10 indikator. Secara keseluruhan, capaian rata-rata seluruh indikator program Pengelolaan Pendapatan Daerah mencapai 91,78% dari target tahun 2025. Terhadap target akhir RPD sebanyak 60 indikator telah tercapai, 23 indikator akan tercapai dan 103 indikator perlu upaya keras, terutama pada indikator pencapaian persentase pertumbuhan pendapatan PKB, dan BBNKB.

Permasalahan yang dihadapi yaitu realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2025 mengalami penurunan besar dibandingkan dengan tahun anggaran 2024, terutama disebabkan oleh tidak tercapainya target Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Faktor penyebabnya antara lain : kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB belum optimal, ditandai dengan masih tingginya tunggakan/piutang PKB yang mencapai 3,008 triliun rupiah per 31 Desember 2025 (*unaudited*); penurunan penjualan kendaraan bermotor baru yang berdampak langsung pada penerimaan BBNKB; meningkatnya jumlah kendaraan listrik yang bebas PKB dan BBNKB; Struktur pendapatan daerah masih bergantung pada PKB dan BBNKB, sehingga bila terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional (penerapan opsen pajak), dan juga penurunan daya beli masyarakat berdampak pada penurunan pendapatan pajak daerah, serta keterbatasan sumber daya pengelola pajak daerah dalam sosialisasi, pendataan, pelayanan dan penagihan serta basis data pendapatan asli daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan tata kelola retribusi juga masih perlu diperbaiki melalui pemutakhiran data objek dan penyesuaian tarif retribusi.

Upaya yang dilakukan yaitu: meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi masif, publikasi di berbagai platform media, gerakan disiplin pajak, serta pelaksanaan penagihan aktif termasuk kegiatan Sengkuyung Prioritas (Tuntaskan Piutang-Jaga Kepatuhan), *door to door*, wa *blasting*, *customer service*, dan Gadis Pantura; Pemberian insentif pajak berupa Program Diskon Pajak “Jateng Merah Putih” (5 Januari-31 Maret 2025) dan Program Pemutihan Denda Pajak (8 April – 30 Juni 2025) untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi tunggakan; Penguatan sistem pelayanan pajak digital melalui inovasi layanan SAMSAT BUDIMAN (bekerja sama dengan BUMDes) dan SAMSAT Corporate (bekerja sama dengan perusahaan/koperasi), serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pembayaran pajak; Pemutakhiran dan validasi basis data melalui optimalisasi sistem “Satu data pendapatan asli daerah” serta pengembangan Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI); Menyelenggarakan pameran otomotif seperti Auto Show, kerja sama dengan Gaikindo dalam GIIAS 2025, serta pameran GAS THE SERIES di 35 kabupaten/kota untuk mendorong penjualan kendaraan bermotor baru dan meningkatkan penerimaan BBNKB; serta optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerja sama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah.

Manfaat pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah tahun 2025 memberikan manfaat strategis berupa penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber-sumber PAD. Program ini memperluas basis penerimaan daerah dengan diversifikasi sumber pendapatan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi layanan, serta memperbaiki tata kelola pendapatan agar lebih terukur dan partisipatif. Dengan demikian, daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat, memperkuat kapasitas keuangan, dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang berkelanjutan.

Tabel 3.138 Capaian Kinerja Program Fungsi Keuangan (BAPENDA)

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
1	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%	74	78,88	106,59	73	78,88	108,05
3	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%	-3,47	3,57	100	3,19	3,57	111,91
4	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	%	-14,67	-22,99	43,29	-22,54	-22,99	98,04
6	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	%	-16,25	-2,88	182,28	-1,97	-2,88	68,40
7	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	-10,55	39,79	100	37,74	39,79	105,43
8	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	25,27	16,63	65,81	14,69	16,63	113,21
9	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%	-27,79	-34,01	77,62	-33,38	-34,01	98,15
10	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%	-15,09	-23,21	46,19	-17,23	-23,21	74,24
11	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%	29,97	-1,36	4,54	-1,43	-1,36	105,15
12	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	-6,07	13,35	100	13,64	13,35	97,87
13	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	24,31	3,99	16,41	13,55	3,99	29,45
14	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	%	-17,42	-23,42	65,56	-23,28	-23,42	99,40

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%	-21,17	-12,89	139,11	-9,08	-12,89	70,44
16	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%	29,53	33,06	111,95	29,26	33,06	112,99
17	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	-6,09	8,28	100	6,32	8,28	131,01
18	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	24,45	8,13	33,25	13,55	8,13	60,00
19	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	-22,38	-31,18	60,68	-29,05	-31,18	93,17
20	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	-9,56	-18,29	8,68	-13,67	-18,29	74,74
21	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%	31,5	-8,66	27,49	-9,87	-8,66	113,97
22	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	-8,61	64,03	100	54,53	64,03	117,42
23	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	24,18	5,27	21,79	13,33	5,27	39,53
24	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%	-30,29	-34,93	84,68	-34,02	-34,93	97,39
25	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%	-11,53	-15,81	62,88	-11,34	-15,81	71,73
26	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%	19	2,76	14,53	2,58	2,76	106,98
27	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	24,88	-2,16	8,68	-2,74	-2,16	126,85
28	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	-14,56	10,26	100	12,67	10,26	80,98
29	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	-5,13	-13,5	-63,16	-12,65	-13,5	93,70

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	-16,93	-2,55	184,94	-2,06	-2,55	80,78
31	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	%	30,85	75,4	244,41	46,01	75,4	163,88
32	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	-15,03	103,24	100	97,38	103,24	106,02
33	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	25,12	2,55	10,15	13,45	2,55	18,96
34	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%	-10,87	-21,32	3,86	-19,36	-21,32	90,81
35	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%	-15,86	-13,82	112,86	-10,87	-13,82	78,65
36	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%	27,72	10,59	38,20	10,32	10,59	102,62
37	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	-13,32	26,21	100	21,12	26,21	124,10
38	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	23,97	12,45	51,94	13,67	12,45	91,08
39	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	-12,37	-19,69	40,82	-18,5	-19,69	93,96
40	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	-16,1	-9,42	141,49	-7,72	-9,42	81,95
41	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%	30,61	-12,55	41,00	-18,49	-12,55	147,33
42	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	-9,5	45,82	100	49,43	45,82	92,70
43	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	24,14	11,84	49,05	13,66	11,84	86,68
44	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%	-29,88	-35,94	79,72	-36,56	-35,94	101,73

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%	-14,36	-22,92	40,39	-16,61	-22,92	72,47
46	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	%	18,65	0,62	3,32	0,55	0,62	112,73
47	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	-10,99	32,1	100	34,94	32,1	91,87
48	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	24,47	9,19	37,56	13,57	9,19	67,72
49	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	-14,44	-20,56	57,62	-20,04	-20,56	97,47
50	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	-17,34	-29,26	31,26	-22,24	-29,26	76,01
51	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%	31,03	-19,18	61,81	-19,12	-19,18	99,69
52	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	-13,77	9,68	100	9,49	9,68	102,00
53	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	25,33	4,34	17,13	13,67	4,34	31,75
54	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	-17,78	-23,14	69,85	-22,94	-23,14	99,14
55	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	-6,79	-21,6	30,00	-16,8	-21,6	77,78
56	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	%	20,94	0,78	3,72	-4,52	0,78	100,00
57	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	-14,26	64	100	62,8	64	101,91
58	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	24,08	13,54	56,23	13,54	13,54	100,00
59	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-16,81	-21,13	74,30	-20,9	-21,13	98,91

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-6,75	-21,07	30,00	-15,42	-21,07	73,18
61	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	17,47	-36,09	30,00	-36,8	-36,09	101,97
62	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-15,28	12,16	100	12,09	12,16	100,58
63	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	25,36	10,94	43,14	13,62	10,94	80,32
64	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-22,83	-27,2	80,86	-26,39	-27,2	97,02
65	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-14,52	-28,15	6,13	-22,2	-28,15	78,86
66	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	30	-6,71	22,37	-10,05	-6,71	149,78
67	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-9,56	60,9	100	63,29	60,9	96,22
68	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	24,71	9,48	38,37	13,46	9,48	70,43
69	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-12,42	-13,78	89,05	-13,72	-13,78	99,56
70	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-12,84	-24,2	11,53	-18,24	-24,2	75,37
71	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	26,2	0,59	2,25	0,57	0,59	103,51
72	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-4,76	58,79	100	57,87	58,79	101,59
73	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	25,67	6,94	27,04	13,52	6,94	51,33
74	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	-14,14	-21,37	48,87	-20,55	-21,37	96,16

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	-16,08	-18,96	82,09	-14,95	-18,96	78,85
76	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%	30,73	5	16,27	4,47	5	111,86
77	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	-14,95	30,68	100	33,86	30,68	90,61
78	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	24,78	7,51	30,31	13,53	7,51	55,51
79	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%	-20,02	-24,05	79,87	-23,45	-24,05	97,51
80	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	%	-23,67	-28,33	80,31	-24,11	-28,33	85,10
81	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%	31,52	-13,17	41,78	-16,31	-13,17	123,84
82	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	-7,01	20,08	100	20,24	20,08	99,21
83	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	23,53	4,69	19,93	13,46	4,69	34,84
84	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%	-20,08	-26,65	67,28	-25,45	-26,65	95,50
85	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%	-17,52	-13,62	122,26	-10,66	-13,62	78,27
86	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	%	29,61	15,13	51,10	14,7	15,13	102,93
87	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	-6,7	46,25	100	36,52	46,25	126,64
88	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	24,59	9,54	38,80	13,64	9,54	69,94
89	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%	-20,63	-28,45	62,09	-26,7	-28,45	93,85

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%	-18,28	-25,89	58,37	-21,06	-25,89	81,34
91	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	%	29,31	6,67	22,76	6,82	6,67	97,80
92	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	-2,86	32,41	100	30,48	32,41	106,33
93	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	23,4	10,58	45,21	14,95	10,58	70,77
94	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	-24,56	-25,59	95,81	-25,34	-25,59	99,02
95	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	-18,07	-12,72	129,61	-9,81	-12,72	77,12
96	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%	19,85	1,05	5,29	-11,69	1,05	100,00
97	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	-9,83	43,18	100	36,63	43,18	117,88
98	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	24,59	6,19	25,17	13,63	6,19	45,41
99	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	-10,54	-20,1	9,30	-18,21	-20,1	90,60
100	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	-24,51	-7,33	170,09	-5,71	-7,33	77,90
101	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%	23	-40,16	30,00	-36,58	-40,16	91,09
102	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	-10,94	-33,03	30,00	-35,64	-33,03	107,90
103	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	26,83	10,75	40,07	13,32	10,75	80,71
104	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-47,97	-55,74	83,80	-53	-55,74	95,08

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-0,58	-26,57	30,00	-18,85	-26,57	70,94
106	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	24,56	28,64	116,61	27,06	28,64	105,84
107	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	-4,65	7,14	100	13,51	7,14	52,85
108	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	3,13	-9,36	30,00	-8,74	-9,36	93,38
109	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-14,06	-9,34	133,57	-7,4	-9,34	79,23
110	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	31,07	17,87	57,52	14,1	17,87	126,74
111	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-9,41	14,01	100	13,97	14,01	100,29
112	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	24,4	15,89	65,12	12,72	15,89	124,92
113	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%	2,01	-9,08	30,00	-8,17	-9,08	89,98
114	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%	-19,64	-13,84	129,53	-10,82	-13,84	78,18
115	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%	30,93	7,04	22,76	6,02	7,04	116,94
116	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	-12,35	26,56	100	28,3	26,56	93,85
117	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	24,49	16,67	68,07	15,87	16,67	105,04
118	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	-4,6	-15,2	30,00	-13,83	-15,2	90,99
119	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	-26,52	-7,34	172,32	-5,8	-7,34	79,02

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%	28,66	14,54	50,73	10,84	14,54	134,13
121	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	-5,01	68,06	100	77,29	68,06	88,06
122	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	25,26	11,61	45,96	13,37	11,61	86,84
123	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%	-46,93	-56,43	79,76	-53,72	-56,43	95,20
124	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%	-23,72	-8,59	163,79	-6,3	-8,59	73,34
125	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	36,5	73,83	202,27	75,92	73,83	97,25
126	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	24,82	19,19	77,32	19,19	19,19	100,00
127	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	22,66	7,48	33,01	8,26	7,48	90,56
128	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	-22,24	-0,22	199,01	-0,18	-0,22	81,82
129	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	30,78	98,85	321,15	158,84	98,85	62,23
130	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	-14,95	5,99	100	13,63	5,99	43,95
131	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%	24,9	15,22	61,12	13,54	15,22	112,41
132	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	6,36	-2,22	34,91	-2	-2,22	90,09
133	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	-13,98	2,94	100	3,88	2,94	75,77
134	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%	30,34	9,55	31,48	9,04	9,55	105,64

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	-11,01	95,64	100	99,22	95,64	96,39
136	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	25,22	4,23	16,77	13,72	4,23	30,83
137	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-10,31	-22,13	30,00	-20,64	-22,13	93,27
138	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-15,96	-22,13	61,34	-16,45	-22,13	74,33
139	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%	31,35	-10,49	33,46	-11,62	-10,49	110,77
140	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	-15,17	50,13	100	50,49	50,13	99,29
141	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	24,52	8,55	34,87	13,46	8,55	63,52
142	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	-12,17	-22,76	12,98	-21,51	-22,76	94,51
143	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	-21,45	-21,79	98,41	-17,13	-21,79	78,61
144	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	%	29,18	2,45	8,40	1,96	2,45	125,00
145	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	-1,07	63,6	100	62,45	63,6	101,84
146	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	24,5	10,5	42,86	13,57	10,5	77,38
147	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-17,12	-28,29	34,75	-25,68	-28,29	90,77
148	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-0,83	-27,95	30,00	-21,01	-27,95	75,17
149	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	31,5	11,21	35,59	9,39	11,21	119,38

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	%	-3,29	87,71	100	68,68	87,71	127,71
151	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	%	25,3	4,7	18,58	13,41	4,7	35,05
152	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	6,32	-4,58	72,47	-4,08	-4,58	89,08
153	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-12,96	-23,21	20,91	-17,88	-23,21	77,04
154	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	31,01	5,48	17,67	6,16	5,48	88,96
155	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-14,28	64,01	100	50,65	64,01	126,38
156	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	24,59	5,42	22,04	13,21	5,42	41,03
157	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%	-68,85	-70,21	98,02	-69,82	-70,21	99,44
158	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%	-18,28	-12,33	132,55	-8,33	-12,33	67,56
159	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	%	26,38	-8,83	33,47	-12,71	-8,83	143,94
160	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	-1,12	66,25	100	63,16	66,25	104,89
161	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	26,4	13,43	50,87	13,43	13,43	100,00
162	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	-9,87	-9,04	108,41	-8,88	-9,04	98,23
163	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	-17,33	-20,86	79,63	-16,05	-20,86	76,94
164	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%	31,1	21,08	67,78	19,78	21,08	106,57

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	-14,3	88,09	100	72,07	88,09	122,23
166	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	26,79	10,23	38,19	13,58	10,23	75,33
167	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-12,74	-18,06	58,24	-17,46	-18,06	96,68
168	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-15,43	-16,27	94,56	-12,79	-16,27	78,61
169	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%	30,91	-5,5	17,79	-6,13	-5,5	111,45
170	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	-6,86	68,8	100	67,7	68,8	101,62
171	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	25,42	8,94	35,17	13,59	8,94	65,78
172	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-29,26	-31,15	93,54	-30,78	-31,15	98,81
173	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-10,8	-26,48	30,00	-19,71	-26,48	74,43
174	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	%	29	-0,12	0,41	-0,16	-0,12	133,33
175	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	-0,19	103,63	100	112,93	103,63	91,76
176	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	26,66	13,06	48,99	13,71	13,06	95,26
177	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	-9,54	-13,7	56,39	-13,32	-13,7	97,23
178	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	-12,85	-19,41	48,95	-14,26	-19,41	73,47
179	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%	31,22	7,91	25,34	7,59	7,91	104,22

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	-9,42	70,71	100	68,67	70,71	102,97
181	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	25,86	11,04	42,69	13,36	11,04	82,63
182	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-13,64	-19,08	60,12	-18,09	-19,08	94,81
183	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-12,39	-20,15	37,37	-15,2	-20,15	75,43
184	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	30,82	-3,98	12,91	-4,24	-3,98	106,53
185	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-13,88	3,21	100	3,15	3,21	101,90
186	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	25,37	10,4	40,99	13,46	10,4	77,27

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan **Pengelolaan Pendapatan Daerah** dengan **keluaran** antara lain: Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang dilaksanakan di 35 Kab/Kota; kegiatan Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah; serta keluaran kegiatan yang ada di UPPD se Jawa Tengah yaitu Realisasi Pendapatan PKB Rp3.960.139.868.900,00; Realisasi Pendapatan BBNKB Rp1.741.611.744.500,00; Realisasi Pendapatan PAP Rp20.925.885.996,00; Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp6.745.883.500,00; Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani 420.786 unit.

Outcome Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2025 berdampak pada penguatan regulasi pelayanan pajak daerah serta tersusunnya dokumen kajian pengembangan potensi pendapatan dan kebijakan pajak. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap capaian realisasi pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang mendukung peningkatan PAD, serta mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja fiskal dan tata kelola keuangan daerah melalui penguatan kapasitas pengelolaan basis data dan penyusunan kajian potensi pendapatan. Hal tersebut mendorong optimalisasi sumber PAD, baik dari pajak, retribusi, maupun pendapatan lain yang

sah. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah juga memperkuat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah semakin meningkat. Dampak yang dihasilkan adalah bertambahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Permasalahan yang muncul antara lain penurunan daya beli masyarakat akibat memburuknya kondisi ekonomi global, yang berdampak pada menurunnya penjualan kendaraan bermotor dan berimbas pada penerimaan PKB serta BBNKB. Pergeseran pola konsumsi masyarakat terhadap kendaraan listrik berbasis baterai yang bebas BBNKB juga turut memengaruhi realisasi penerimaan. Selain itu, perbedaan dinamika dan karakteristik antar wilayah di Jawa Tengah menyebabkan kebijakan dan pencapaian target tidak dapat seragam. Kerja sama dan koordinasi dengan kabupaten/kota maupun pihak terkait juga belum optimal, khususnya dalam kegiatan pendataan dan penagihan pajak.

Upaya yang telah dilakukan antara lain penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor antara Bapenda, UPPD, Kepolisian, Pemerintah Kabupaten/Kota, PT. Jasa Raharja, Bank Jateng, serta instansi penghasil lainnya untuk menyelaraskan data dan mempercepat penyelesaian kendala di lapangan. Selain itu, dilakukan pengembangan dan perluasan jangkauan layanan pajak, retribusi, dan pendapatan lain; peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola pendapatan melalui bimbingan teknis serta pembinaan pelayanan publik yang responsif dan profesional; optimalisasi pemanfaatan aset daerah; pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan secara bertahap; serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kesadaran pajak kepada masyarakat.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Fungsi Keuangan pada Bapenda dengan tingkat capaian sangat tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.139 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Penunjang Keuangan (BAPENDA)

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	186	91,78	195	91,36	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat desa melalui pengalokasian insentif pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai regulasi.

2. Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah melalui penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala.
3. Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal.
 - a. Penyusunan Rencana Aksi Pemanfaatan Aset Daerah.
 - b. Promosi Pemanfaatan Aset Daerah.
 - c. Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Aset.
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima.
 - a. Perbaikan Tata Kelola SAMSAT untuk memaksimalkan pendapatan daerah.
 - b. Mengalokasikan insentif pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai regulasi.
 - c. Peningkatan sarpras dan SDM pelayanan dan fasilitas SAMSAT.

B. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam menjalankan tugas urusan Penunjang Pemerintahan pada fungsi Keuangan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan 2 program, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Identifikasi dan pemetaan masalah BPKAD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan bidang Fungsi Keuangan, antara lain: potensi keterlambatan penetapan APBD; belum optimalnya penyerapan APBD dan Bantuan Keuangan; Peraturan Gubernur tentang *roadmap* aset masih dalam tahap penyusunan dan masih terbatasnya inovasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pengelolaan Keuangan daerah dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran Rp7.165.588.763.000,00 melalui program:

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan alokasi anggaran Rp7.116.052.366.000,00 dengan **realisasi** fisik sebesar 93,89% dan realisasi keuangan sebesar 92,88% hal ini disebabkan ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pengalihan leading sector penyusunan pengukuran IPKD kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Jateng sesuai Surat Sekda Prov. Jateng Nomor S/900.1/130/2025 tanggal 30 November 2025 hal Penyusunan IPKD. Program ini memiliki 5 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi, yaitu Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu; Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu; Persentase Penetapan APBD tepat waktu; Persentase penyampaian LKPD tepat waktu; dan Persentase penyusunan dokumen manajemen kas. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain kebijakan efisiensi di awal tahun yang mengakibatkan kurang optimalnya penyerapan APBD, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Daerah (KEM-PPKF) tahun 2026, keterlambatan pengajuan pencairan bantuan keuangan kabupaten/kota

dan penyesuaian agenda kegiatan akibat pemeriksaan pendahuluan kepatuhan dari 7 (tujuh) tim BPK-RI. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan percepatan dan penyesuaian pelaksanaan agenda kegiatan dengan realisasi yang belum optimal; melakukan perhitungan kapasitas fiskal daerah akibat pengurangan Transfer Ke Daerah; Rapat Kerja Akuntansi dan Pelaporan yang akan memfasilitasi pembinaan akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah; melakukan monitoring capaian realisasi bantuan keuangan dan melakukan pendampingan melalui aplikasi SIJUARA (Sistem Informasi Pengajuan dan Pelaporan) untuk proses administrasi pencairan transfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; Desk secara paralel untuk verifikasi dan rekonsiliasi sebagai tindak lanjut atas temuan tim BPK-RI. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu agar pengelolaan keuangan daerah baik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan.

- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** dengan alokasi anggaran Rp4.757.454.000,00 memiliki **realisasi** fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,66%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik; Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBM) tepat waktu; dan Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum adanya Juknis untuk pengelolaan BMD di Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 3 Tahun 2025. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan percepatan penyusunan Pergub tentang petunjuk pelaksanaan. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu terfasilitasinya Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah baik dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tabel 3.140 Capaian Kinerja Program Fungsi Keuangan (BPKAD)

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
1	Persentase evaluasi APBD kabupaten/ kota tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu.	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	100	100	100	100	100	100
II PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
1	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	89,86	89,86	100	89,86	89,86	100
2	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh 6 kegiatan yaitu:

- 1) **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** dengan **keluaran** 8 Dokumen Rencana Anggaran Daerah (RAD), 35 Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi, dan 8 Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa penetapan dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah tepat waktu. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terpenuhinya seluruh tahapan penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini yaitu konsistensi arah kebijakan keuangan dalam APBD yang konsisten dengan arah pembangunan daerah pada dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu dinamika regulasi penyusunan APBD khususnya alokasi *mandatory spending* dan proporsi anggaran yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. **Upaya** yang dilakukan yaitu sosialisasi regulasi pedoman penyusunan APBD dan asistensi perencanaan anggaran kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** 105 Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota berupa 35 SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang APBD Kabupaten/Kota, 35 SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota, 35 SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. **Outcome**

kegiatan tersebut yaitu meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota. **Manfaat** kegiatan ini yaitu APBD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan daerah, peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. **Dampak** kegiatan ini berupa peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam rangka menunjang program prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi dinamika regulasi penyusunan APBD Kab/Kota khususnya alokasi *mandatory spending* dan proporsi anggaran yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. **Upaya** yang dilakukan sosialisasi regulasi pedoman penyusunan APBD, monitoring percepatan pembahasan dan penyerapan APBD serta asistensi permasalahan pengelolaan APBD ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 3) **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** dengan **keluaran** 1 Dokumen Manajemen Kas, 2 Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan 1 Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu penatausahaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengurangi penyimpangan dan memperlancar penyerapan anggaran. **Manfaat** kegiatan ini yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan. **Dampak** kegiatan ini yaitu kas terkelola dengan baik dalam rangka pemenuhan kewajiban belanja dan investasi daerah **Permasalahan** yang dihadapi yaitu tindak lanjut kebijakan efisiensi belanja APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mempengaruhi manajemen kas pemerintah Provinsi Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan penyesuaian Rencana Anggaran Kas (RAK) dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 4) **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** dengan **keluaran** 1 Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan, 1 Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran, dan 1 Dokumen Laporan Keuangan. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu opini WTP dapat dipertahankan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu pengambilan arah kebijakan keuangan tahun berikutnya khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK dan auditor pemeriksaan lainnya. **Dampak** kegiatan ini yaitu terjaganya prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBD yang optimal. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keandalan laporan keuangan yang dihasilkan melalui SIPD belum sepenuhnya optimal. **Upaya** yang dilakukan yaitu penyusunan regulasi kebijakan akuntansi diantaranya pengelolaan piutang, pendampingan SIPD melalui SAKD Provinsi Jawa Tengah.
- 5) **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan **keluaran** 1 Dokumen Belanja transfer dan Belanja Tidak Terduga (BTT). **Outcome** kegiatan tersebut yaitu penyaluran BTT, kewajiban belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa terpenuhi tepat waktu. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tidak adanya penangguhan kewajiban pembiayaan atas kegiatan darurat/mendesak dan program pembangunan di daerah kabupaten/kota dan desa yang menimbulkan piutang daerah. **Dampak** kegiatan ini yaitu pembangunan di kabupaten/kota dan Desa menjadi lancar khususnya dalam meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan pengentasan kemiskinan di daerah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terhambatnya penyaluran anggaran transfer karena waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. **Upaya** yang dilakukan yaitu rekonsiliasi realisasi alokasi transfer dan identifikasi pelaksanaan paket pekerjaan kepada Pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah pengampu.

- 6) **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** dengan keluaran 2 Dokumen Rekonsiliasi Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu SKPD memahami input transaksi di SIPD Penatausahaan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu transaksi pendapatan dan belanja tercatat dan akuntabel. **Dampak** kegiatan ini yaitu data tercatat langsung ke pemerintah pusat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu sistem SIPD masih cenderung unstable. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi antara SKPD dan Kemendagri (terkhusus PUSDATIN) dan melakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja per triwulan SIPD dengan SKPD.

2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** didukung kegiatan **Pengelolaan Barang Milik Daerah** dengan **keluaran** 164 sertifikat tanah, dan 1 pemagaran aset tanah, 150 patok tanah dan 100 label, penyelesaian 1 kasus/sengketa aset daerah, 1 Dokumen Laporan Barang Milik Daerah dan 42 SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya pengamanan terhadap barang milik daerah, meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah dan penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan kepastian status kepemilikan barang milik daerah dan menghindari potensi sengketa aset dengan pihak lain, mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, dan terwujudnya sinkronisasi kebutuhan sarana dan prasarana dengan ketersediaan barang milik daerah. **Dampak** kegiatan ini yaitu berkurangnya tingkat risiko kehilangan barang milik daerah, munculnya kepastian hukum atas status kepemilikan aset, terciptanya laporan barang milik daerah yang akurat dan tepat waktu sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah dan terwujudnya efisiensi anggaran belanja daerah karena pengadaan BMD berdasarkan kebutuhan riil serta terpenuhinya pemenuhan sarana dan prasarana secara tepat waktu. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus barang milik daerah akibat sering bergantinya personil pengurus barang yang menyebabkan lemahnya pengawasan rutin terhadap

kondisi dan keberadaan aset, kurang tertibnya pencatatan dan inventarisasi aset secara berkelanjutan dan proses penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah yang belum sinkron dengan penyusunan rencana kerja Pemerintah daerah. **Upaya** yang dilakukan yaitu meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pengurus barang sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal sesuai dengan aturan-aturan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku, meningkatkan upaya pencatatan dan inventarisasi aset dengan lebih baik salah satunya dengan meningkatkan penggunaan, peran dan fungsi sistem aplikasi pengelolaan BMD SIM ASET secara tepat dan efektif untuk penatausahaan aset, dan berupaya untuk melakukan sinkronisasi secara simultan antara penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan penyusunan rencana kerja Pemerintah daerah.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Fungsi Keuangan BPKAD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 141 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Keuangan (BPKAD)

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5	100	12	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	100	4	81,25	100	Sangat Tinggi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (renstra) Tahun 2025-2029, maka pada tahun 2026 BPKAD melaksanakan arah kebijakan diantaranya:

1. Konsolidasi data hasil inventarisasi BMD guna penyusunan perencanaan dan pengamanan BMD yang efektif; dan
2. Menyelaraskan dokumen anggaran, serta melakukan penguatan kebijakan penatausahaan dan realisasi APBD, serta pembinaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten/Kota.

Selain itu guna mendukung capaian **136 program prioritas** pembangunan daerah di Tahun 2026 yang merupakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dilaksanakan pula dukungan program prioritas/intervensi melalui:

1. Dukungan program prioritas **percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil**

berupa Pemberian PMT dalam bentuk pembiayaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pemberian PMT untuk penanganan Stunting kepada 737 orang, Underweight kepada 5967 orang, Ibu Hamil KEK kepada 200 orang dan Balita Underweight kepada 25.964 orang. Dalam pelaksanaannya akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

2. Dukungan program prioritas **Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa** dalam bentuk pemenuhan pengalokasian anggaran untuk belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Dukungan program prioritas **Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang optimal** dalam bentuk penyusunan regulasi daerah tentang pendayagunaan Aset *Idle* Daerah dan melakukan Kerjasama pengelolaan aset daerah. Adapun rencana aktivitas yang akan dilaksanakan berupa:
 - a) Penyusunan dan Sosialisasi/publikasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah terkait petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b) Melakukan pengembangan Kerjasama pengelolaan aset.

Dalam pelaksanaannya akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat daerah yang membidangi pemanfaatan barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Dukungan **program prioritas Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional** dalam bentuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Adapun rencana aktivitas dilaksanakan berupa pemberian bantuan RTLH kepada 10.000 penerima dengan besaran bantuan @Rp20.000.000/penerima.
5. Dukungan program intervensi **Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)** dalam bentuk Pengembangan *sport center* di setiap kecamatan. Adapun rencana aktivitas dilaksanakan berupa penyediaan bantuan olahraga melalui pembiayaan pada Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menunjang program Kecamatan Berdaya.
6. Dalam pelaksanaannya akan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan desa di Jawa Tengah

3.4.4.3 Fungsi Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN). Dinamika perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dan pola manajemen ASN yang lebih modern, efisien, dan responsif. Sebagai penggerak birokrasi, ASN dituntut tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif dan digital mindset dalam menghadapi tantangan era disrupsi.

Tonggak penting dalam penyempurnaan manajemen ASN di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berfokus pada implementasi berbagai ketentuan turunan dari undang-undang tersebut, termasuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan talenta dan manajemen kinerja berbasis hasil (*performance-based management*) dalam upaya penguatan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Hasil penilaian Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2024 masih berada pada kategori Sangat Baik, dan pada tahun 2025 diarahkan untuk dilakukan penyesuaian seiring dengan peralihan pelaksanaan pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen ASN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mempertahankan capaian prestasi bidang kepegawaian di tingkat nasional sebagai Provinsi Terbaik I Seluruh Indonesia dengan kinerja praktik penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN, pengelolaan sistem informasi, sistem merit dan manajemen talenta, serta layanan ASN terbaik dari Badan Kepegawaian Negara.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Fungsi kepegawaian di Jawa Tengah dilaksanakan melalui **Program Kepegawaian Daerah** didukung anggaran Rp5.893.076.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,90%. Program ini memiliki 8 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah pelaksanaan amanat penataan tenaga Non ASN sampai dengan saat ini belum dapat diselesaikan secara paripurna, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menindaklanjuti kebijakan penyelesaian tenaga Non ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN dan ketentuan pemerintah pusat. **Upaya** yang dilakukan yaitu pada tahun 2025 telah dilaksanakan proses penetapan dan pengangkatan menjadi PPPK baik dengan skema pengangkatan penuh dan paruh waktu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus berupaya dan berperan aktif dalam pemetaan formasi, validasi data, serta koordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN untuk memastikan penataan tenaga Non ASN berjalan tertib dan akuntabel. **Manfaat** program ini untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.142 Capaian Kinerja Program Fungsi Kepegawaian

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
1	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Kepegawaian Daerah didukung 4 kegiatan, yaitu:

- 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** dengan **keluaran** penyelenggaraan Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dengan Peserta formasi sebanyak 17.390 ASN yang terdiri dari Pengadaan ASN Tahap I sebanyak 3.934 dan Tahap II sebanyak 345; serta PPPK Paruh Waktu sebanyak 13.111 formasi. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai dengan formasi. **Manfaat** kegiatan ini yaitu mendapatkan ASN yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. **Dampak** kegiatan ini yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh ASN penggerak birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta dapat melaksanakan pelayanan publik yang prima. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum mengakomodir petugas penjaga pintu air untuk diangkat PPPK paruh waktu. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mengakomodir formasi PPPK di tahun 2026.
- 2. Mutasi dan Promosi ASN** dengan **keluaran** pelantikan 31 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. **Outcome** kegiatan tersebut berupa Terpenuhinya 31 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme mutasi dan promosi

sesuai dengan syarat Kompetensi, Kualifikasi, dan rekam jejak jabatan. **Manfaat** kegiatan ini yaitu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja organisasi; sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan karir ASN; serta merupakan bentuk penegakan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. **Dampak** kegiatan ini yaitu terjaganya stabilitas dan keberlanjutan organisasi; dengan penempatan pejabat yang berkompeten dapat mendorong efektivitas pengambilan keputusan, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta percepatan pencapaian target kinerja organisasi. **Permasalahan** yang dihadapi saat ini yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih dalam proses harmonisasi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga proses pengisian/pelantikan Pejabat Manajerial harus menunggu SOTK baru disahkan terlebih dahulu untuk kemudian dapat mengajukan izin pelantikan ke BKN dengan SOTK yang baru. **Upaya** yang dilakukan yaitu secara bertahap dan berjenjang akan dilakukan pengisian dalam jabatan mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas setelah seluruh proses administrasi terpenuhi dan tercukupi.

3. **Pengembangan Kompetensi ASN** dengan **keluaran** fasilitasi 226 orang PNS yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan yang terdiri dari 34 PNS Tugas Belajar dan 192 PNS Izin Belajar. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kompetensi ASN. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan profesionalitas dan kinerja ASN; perbaikan proses kerja, inovasi pelayanan, serta penguatan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. **Dampak** kegiatan ini yaitu mendukung capaian kinerja Pemprov Jateng. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu terdapat PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya setelah batas maksimal perpanjangan masa studi dengan berbagai sebab baik teknis maupun personal dan atau keluarga. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan dan pendampingan dengan PNS yang tugas belajar, monitoring, evaluasi dan rapat koordinasi penyelesaian studi bersama Perguruan Tinggi dan Unit Kerja terkait.
4. **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** dengan **keluaran** penganugerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) kepada 1.600 PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada 12 ASN; serta 300 penanganan kasus dan pelanggaran disiplin ASN. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya tingkat kedisiplinan dan kesejahteraan ASN. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan kepatuhan ASN terhadap norma, aturan, serta kode etik yang berlaku. **Dampak** kegiatan ini yaitu menumbuhkan motivasi dan semangat kerja ASN melalui sistem *reward and punishment*. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih tingginya angka pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik, dan kode perilaku ASN melalui sosialisasi, bimtek, seminar, lokakarya, baik secara luring maupun secara daring kepada para pengelola kepegawaian, atasan langsung dan kepada seluruh ASN secara terus menerus.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Kepegawaian dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.143 Kesesuaian Antara Kinerja Program Dan Kegiatan Pada Fungsi Kepegawaian

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Kepegawaian Daerah	8	100	8	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi Jalur Pendidikan Formal ASN dengan beasiswa dalam negeri dan persiapan beasiswa luar negeri;
2. Peningkatan kesejahteraan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara layak dan berkeadilan.

3.4.4.4 Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

Dalam melaksanakan tugas Urusan Pendidikan dan Pelatihan melalui pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi ASN menjadi satu-satunya jawaban untuk dilakukan dan sangat penting terlebih pasca terbitnya UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggeser paradigma pengembangan kompetensi aparatur yang semula hak setiap pegawai menjadi kewajiban seluruh ASN. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang berfungsi melaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN karena ruang lingkupnya tak lagi terbatas hanya menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan, namun lebih mengarah pada terwujudnya suatu sistem pengembangan kompetensi (bangkom) yang terintegrasi melalui model *Corporate University*.

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah *Corporate University* (Jateng Corpu) diharapkan untuk mendorong OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mampu menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi ASN secara kolaboratif untuk mewujudkan transformasi menjadi organisasi pembelajar dalam rangka menjawab tantangan permasalahan manajemen ASN dan organisasi. Adapun teknologi informasi dan komunikasi menjadi tuntutan keharusan dalam memenuhi kebutuhan manajemen SDM Aparatur yang semakin bervariasi.

Pada Tahun 2025 ini, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menerima penghargaan tingkat nasional dan regional sebagai berikut:

1. Penghargaan Nasional Implementasi ASTA CITA dari Kementerian Dalam Negeri melalui Kegiatan Manunggal Leadership Retreat “Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah”;
2. Penghargaan tingkat nasional pada ajang Anugerah Data dan Teknologi Pendidikan oleh Pusat Data Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI sebagai Peringkat pertama kategori “Anugerah Pengembangan Kapasitas SDM Unggul”;

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran Rp.79.694.942.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar 92,90% dengan 6 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi dan terhadap target akhir RPD seluruhnya telah tercapai, yaitu: Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional, Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis, Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan), Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan, dan Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain: masih banyak ASN di Jawa Tengah yang belum mendapatkan kesempatan untuk menerima dan melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. **Upaya** yang dilakukan yaitu menyelenggarakan dan memfasilitasi usulan penyelenggaraan bangkom bagi ASN di Jawa Tengah. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalitas kinerja ASN di Jawa Tengah.

Tabel 3.144 Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
1	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3.50	3,54	101,14	3.50	3,55	101,42
6	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100

Melihat tabel di atas diketahui bahwa ada 1 indikator program yang melebihi target dari RPD yaitu Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) melebihi target karena pelaksanaan pengembangan kompetensi juga sudah mengadopsi *massive learning* dan perbaikan layanan sebagai bentuk penjaminan mutu kepada seluruh peserta pelatihan.

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. **Pengembangan Kompetensi Teknis** dengan **keluaran** pengembangan kompetensi teknis inti, umum dan pilihan sebanyak 26.288 orang. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN peserta pelatihan. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu membangun profesionalitas dan peningkatan kinerja ASN dalam melaksanakan tupoksi. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan tujuan. **Permasalahan** kegiatan tersebut yaitu pengiriman peserta pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. **Upaya** yang dilakukan yaitu memberikan himbauan dan edaran mengenai syarat dan ketentuan peserta pelatihan yang akan diikuti.
2. **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** dengan **keluaran** Pengembangan Kompetensi Manajerial sebanyak 11.378 orang dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional sebanyak 14.173 orang. Outcome kegiatan tersebut peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN peserta pelatihan dalam pemenuhan standar kompetensi jabatan. Manfaat kegiatan tersebut yaitu membangun profesionalitas serta peningkatan kinerja ASN dalam menentukan kebijakan organisasi dan mendukung kebijakan daerah. Dampak kegiatan tersebut yaitu meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan arah kebijakan daerah. Permasalahan kegiatan tersebut yaitu terdapat instansi pengirim (Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) yang menunda pengiriman peserta dikarenakan kebijakan dari instansi pengirim. Upaya yang dilakukan yaitu menggantikan kuota peserta pelatihan yang dimungkinkan dari luar Provinsi Jawa Tengah.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.145 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	100	8	100	100	Sangat Tinggi

Rencana strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah diantaranya:

1. Pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 dengan memperhatikan capaian tahun 2024 dan tahun 2025 serta target tahun 2026 dalam RPJMD 2025 - 2029;
2. Perwujudan tema pembangunan daerah tahun 2026 "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional melalui penguatan pengembangan kompetensi bagi ASN di Jawa Tengah;
3. Terus menerapkan kurikulum anti korupsi pada setiap pelatihan yang diselenggarakan dan mendorong *stakeholder* terkait untuk mengimplementasikan sampai ke tingkat desa;
4. Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas melalui peningkatan kapasitas ASN guru melalui sekolah inklusi

3.4.4.5 Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penelitian dan Pengembangan meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Identifikasi dan pemetaan masalah Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan masing-masing bidang urusan Penelitian dan Pengembangan, antara lain: Hasil riset belum sepenuhnya sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, Kurangnya sinkronisasi kolaborasi dan kerjasama riset, Inovasi daerah belum sepenuhnya sesuai kebutuhan, dan Kurangnya sinkronisasi, kolaborasi, kerjasama pengembangan inovasi dan kebijakan implementasi hasil inovasi.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025, yaitu:

1. Kegiatan “Apresiasi BRIDA-BAPPERIDA Optimal 2025” yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atas komitmen dan kinerja dalam penguatan riset dan inovasi di Jawa Tengah, dalam hal ini meraih 2 penghargaan, yaitu:
 - a. Kategori Indikator Kajian Kebijakan yang Dimanfaatkan, sebagai pengakuan atas kontribusi BRIDA Jateng dalam menghasilkan kajian strategis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik di tingkat daerah;
 - b. Kategori Indikator Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah, atas upaya BRIDA Jateng dalam mengembangkan inovasi berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan potensi unggulan daerah.
2. Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendagri, mendapatkan 2 Penghargaan yaitu;
 - a. Kategori sebagai Provinsi Sangat Inovatif;
 - b. Kategori sebagai Pemerintah Daerah dengan sebaran Inovasi Urusan Pemerintahan Konkruen Terbanyak.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah didukung anggaran sebesar Rp3.414.678.000 untuk melaksanakan **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan realisasi fisik 100% dan Keuangan 99,76%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, yaitu Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi; Persentase pelaksanaan riset dan inovasi; Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi; dan Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi pada program tersebut adalah kurangnya kolaborasi pelaksanaan riset dan inovasi serta Pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang belum optimal. **Upaya** yang dilakukan yaitu pada meningkatkan pola kerja kolaboratif dengan para stakeholder riset dan inovasi yang kompeten serta Apresiasi terhadap hasil karya riset dan inovasi melalui pembinaan dan fasilitasi. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah sehingga bisa dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Jawa Tengah.

Tabel 3.146 Capaian Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
1	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah didukung 4 kegiatan, yaitu:

- 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** dengan **Keluaran** antara lain: Dokumen Rencana Induk & Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah (RIPJ-PID); Dokumen *Policy Brief Integrated Farming System* (IFS), Dokumen *Policy Brief* Optimalisasi Pemanfaatan Aset untuk Pendapatan Daerah; *background study* Kelembagaan Kewilayahan Kedungsepur; *background study* Penguatan Sinergi dan Strategi Kolaborasi Stakeholder untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah); *Policy Paper* Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah di Jawa Tengah; *policy paper Roadmap* Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan UMKM di Jawa Tengah; Fasilitasi Penerbitan 10 artikel dalam Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Pengolahan Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Rapat Koordinasi Tim Pengelola Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah; Forum Koordinasi infrastruktur riset dan inovasi daerah; Kegiatan *Workshop* pengembangan profesi SDM riset dan inovasi. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu tersusunnya hasil kajian dan penelitian bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu hasil - hasil kajian dan penelitian bisa di gunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan. **Dampak** kegiatan tersebut adalah penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis data riset dan inovasi. **Permasalahan** kegiatan tersebut adalah input data lemah dan tidak mendapat *feedback* dari instansi terkait **Upaya** yang dilakukan mencari input data alterantif sebanyak mungkin serta dalam pembahasan melibatkan para stakeholder dari awal tahapan kajian/ riset

2. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** dengan **Keluaran** Dokumen penelitian dan pengembangan berjudul “Potensi Lokal untuk Mendukung Ketersediaan Pangan dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah”; **Outcome** kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen hasil penelitian tersebut sebagai rekomendasi kebijakan. **Manfaat** kegiatan tersebut memberikan rekomendasi strategis bagi dinas terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penyediaan pangan bergizi. **Dampak kegiatan** tersebut bersifat strategis yang mencakup peningkatan ketahanan pangan provinsi melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan ekonomi UMKM/ petani lokal dari rantai pasok pendek MBG. Secara jangka panjang, mendukung swasembada gizi Jawa Tengah, sinergi lintas sektor hexahelix, dan kontribusi SDGs Tujuan Ke-2 (Tanpa Kelaparan). **Permasalahan** kegiatan tersebut adalah keterbatasan sumber daya riset (personil, waktu dan anggaran) yang tidak memadai untuk cakupan 35 kabupaten/kota Jawa Tengah, sehingga sulit menggambarkan kondisi provinsi secara komprehensif. Selain itu, akses data primer terhambat karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru diluncurkan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dalam tahap awal yang menyebabkan tantangan terkait baseline data historis dan koordinasi lintas OPD. **Upaya** yang dilakukan dengan menerapkan strategi *purposive sampling* dengan memilih 3 daerah *representative* (sampling) untuk mewakili dan menggambarkan kondisi Provinsi. Efisiensi sumber daya dicapai melalui *mixed methods* dan triangulasi data. Kolaborasi BRIDA dan Tenaga ahli dari UNS yang menyediakan akses software analisis dan sinergi dengan OPD pengampu Pangan di wilayah sampel yang mempercepat akses data dan penelitian selesai tepat waktu Desember 2025 meski dengan sumber daya terbatas.
3. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** dengan **Keluaran** Dokumen penelitian dan pengembangan berjudul “Penguatan Hilirisasi Perikanan Tangkap untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jawa Tengah”; **Outcome** kegiatan tersebut dimanfaatkannya dokumen hasil penelitian tersebut sebagai rekomendasi kebijakan. **Manfaat** kegiatan tersebut hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan kebijakan peningkatan efisiensi dan stabilitas pasokan ikan di Jawa Tengah. **Dampak kegiatan** tersebut tersedianya rekomendasi kebijakan yang lebih terarah untuk penguatan efisiensi rantai pasok hilir perikanan tangkap, sehingga pemerintah daerah dapat segera melakukan penyesuaian program dan intervensi pada titik-titik strategis seperti TPI, *cold chain*, distribusi, dan harga. **Permasalahan** kegiatan tersebut adalah terbatasnya sumber daya baik manusia, waktu dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, sehingga belum bisa memberikan gambaran kondisi nyata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan data yang terjadi antara daerah dan pusat juga menjadi sebuah kendala teknis yang terjadi saat pengambilan data di lapangan. **Upaya** yang dilakukan melakukan kolaborasi dengan tenaga ahli dari BRIN dan UNDIP yang mumpuni di bidangnya, sehingga dapat membantu pelaksanaan kegiatan penelitian ini

selesai dengan tepat waktu. Sinergi dan koordinasi dengan OPD terkait pun dilakukan untuk mengatasi persoalan terkait perbedaan data dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan *real* yang terjadi di lapangan.

4. **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** dengan **Keluaran**: Hasil Pengukuran *Innovation Government Award* (IGA) dan Analisis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD); Dokumen Pembuatan dan pengembangan sistem informasi *database* riset Daerah (*DocRida*) dan sistem informasi inovasi PINDAH JATENG; Hasil Uji Coba Pengaruh Model Penyemaian Bawang Merah dengan Biji (*True Shallot Seed*) terhadap Pertumbuhan dan Produksi Umbi dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Temanggung; Event Kreativitas Inovasi Masyarakat (KRENOVA) dengan hasil 341 inovasi dari masyarakat Jawa Tengah dan kegiatan Pameran Produk Inovasi Tingkat Provinsi di Kabupaten Blora; Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan Keluaran pendaftaran 30 sertifikat HAKI bagi inventor; Kegiatan Diseminasi dan Pameran produk inovasi. **Outcome** kegiatan tersebut adalah meningkatkan inovasi di masyarakat dan Munculnya alat-alat inovasi atau teknologi baru yang sudah diuji coba. **Manfaat** kegiatan tersebut untuk membudayakan semangat kreatifitas dan inovasi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang inovasi dan teknologi serta membangun kemitraan antara pemangku kepentingan **Dampak kegiatan** tersebut untuk Penyebarluasan hasil inovasi dan menumbuhkembangkan budaya Inovasi dan Iptek dalam kehidupan masyarakat serta mendorong Pembangunan Provinsi Jawa Tengah melalui Kreativitas dan Inovasi Masyarakat serta. **Permasalahan** kegiatan tersebut adalah peminat ajang kreatifitas yang rendah serta karya karya inovasi yang masuk terbatas. **Upaya** yang dilakukan memperkuat pelibatan kab/ kota serta stakeholder terkait dalam sosialisasi dan penyelenggaraan kegiatan inovasi dan teknologi.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Penelitian dan Pengembangan BRIDA Prov. Jateng dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.147 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Penelitian dan Pengembangan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penelitian dan Pengembangan	4	100	8	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam mendukung program prioritas gubernur oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan Daerah (Kajian Isu Strategis, RIPJ-PID, Indeks Inovasi Daerah, Anugerah Karya Riset Pembangunan/ AKRP, Pemetaan Docrida, Penelitian, Kreativitas Inovasi Daerah/ Krenova, Pameran Produk Inovasi/ PPI, Manajemen Talenta SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset);
2. Pembangunan kolaboratif mendorong terjalannya partisipasi berbasis hexahelix (Forum Komunikasi Riset dan Inovasi/ FKRI, Riset Unggulan Daerah/ RUD dan Seminar);
3. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI dan PIRT (Pendampingan sertifikasi Paten sederhana dan Hak Cipta);
4. Hilirisasi Produk Unggulan dengan Semangat Ekonomi Hijau melalui Pemetaan Potensi produk unggulan Jateng.

3.4.4.6 Fungsi Penghubung

Dalam menjalankan Urusan Pengelolaan Penghubung, Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Tugas penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penghubung melaksanakan fungsi-fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah, tak terkecuali pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Identifikasi dan pemetaan permasalahan Badan Penghubung antara lain: kurang optimalnya dukungan dan pelayanan terhadap masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek; masih perlunya peningkatan kegiatan promosi produk unggulan dan potensi Jawa Tengah; masih perlunya peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada guna mengoptimalkan pelayanan; masih perlunya peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta masih kurangnya ketersediaan pemanfaatan, pengelolaan teknologi dan informasi yang ada.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Pengelolaan Penghubung, Badan Penghubung didukung anggaran Rp3.857.159.000,00 untuk melaksanakan Program Pelayanan Penghubung dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98.31%. Program ini memiliki indikator Kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%) yaitu persentase ketercapaian pelayanan penghubung. Terhadap target akhir RPD, indikator kinerja tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah kurang optimalnya dukungan dan pelayanan terhadap masyarakat Jawa Tengah yang tersebar dalam berbagai lapisan sosial di wilayah Jabodetabek. **Upaya** yang dilakukan Badan Penghubung

adalah bekerjasama dengan Paguyuban Jawa Tengah dan *stakeholder* terkait dalam rangka memperkuat koordinasi dan memperluas jangkauan layanan terhadap masyarakat Jawa Tengah di Jabodetabek serta melakukan pengembangan Inovasi Layanan Berbasis Digital yang bertujuan untuk memudahkan pengguna layanan dalam mengakses informasi publik, bantuan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung.

Tabel 3.148 Capaian Kinerja Program Fungsi Penghubung

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							
1	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Pelayanan Penghubung didukung kegiatan **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung** dengan **keluaran** kegiatan yaitu Pelayanan terhadap Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12 laporan, terlaksananya Mudik Gratis Lebaran dengan moda transportasi bus sebanyak 289 unit untuk 14.374 orang dan kereta api sebanyak 2 rangkaian untuk 1.111 orang, terfasilitasinya kegiatan Paguyuban Jawa Tengah sejumlah 35 paguyuban Kabupaten/Kota, penanganan sosial terhadap masyarakat Jawa Tengah di Jabodetabek sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 137 orang, terfasilitasinya promosi produk unggulan oleh 31 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan mengusung makanan khas masing-masing Kabupaten/Kota tersebut dan pelestarian seni budaya yang diikuti oleh 29 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan mudik gratis dan penanganan sosial adalah peningkatan kesejahteraan sosial; peningkatan keselamatan; meringankan beban finansial masyarakat; serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, sedangkan outcome kegiatan promosi produk unggulan adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan merk lokal; peningkatan penjualan oleh UMKM; dan membangun loyalitas pelanggan. **Manfaat** kegiatan-kegiatan ini yaitu dengan adanya mudik gratis Lebaran dapat meringankan beban finansial masyarakat ekonomi lemah; dapat mengatasi permasalahan sosial; mampu menciptakan jaringan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kontribusi pada kemajuan Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan-kegiatan ini antara lain: dengan adanya kegiatan mudik gratis Lebaran dan penanganan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan sosial; meningkatkan perputaran ekonomi di daerah; sedangkan kegiatan promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya dapat meningkatkan daya beli masyarakat; meningkatkan kesadaran akan produk-produk lokal; meningkatkan penjualan oleh UMKM; memperkenalkan produk baru kepada pasar yang lebih luas serta dapat memperkuat rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. **Permasalahan** yang dihadapi adalah cakupan masyarakat Jawa Tengah di Jabodetabek yang terlalu luas sehingga mengakibatkan layanan Badan

Penghubung belum mampu mengakomodir kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah secara menyeluruh. **Upaya** yang telah dilakukan yaitu pengembangan inovasi layanan berbasis digital yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Jawa Tengah dalam mengakses informasi publik, bantuan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan kesesuaian hasil kinerja Program dan Kegiatan pada Fungsi Penghubung dengan tingkat capaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.149 Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Fungsi Penghubung

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Penghubung	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 adalah program Pelayanan Penghubung dengan kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung yang terdiri dari Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat termasuk di dalamnya adalah pelayanan terhadap Aparatur Pemerintah Jawa Tengah di Jabodetabek, kegiatan Mudik Gratis Lebaran, fasilitasi Paguyuban Jawa Tengah, serta penanganan sosial terhadap masyarakat Jawa Tengah di Jabodetabek dan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.

3.4.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat peran pengawasan internal. Pengawasan yang dilaksanakan selama periode tahun berjalan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah terlaksana sesuai ketentuan perundang-undangan, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Tengah. Melalui hasil evaluasi, audit, revidu, dan berbagai bentuk pengawasan lainnya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memberikan rekomendasi guna memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Selanjutnya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga berperan sebagai mitra konsultasi bagi unit kerja di lingkungan pemerintahan provinsi, serta melaksanakan tindakan pencegahan terhadap korupsi sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Capaian tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan pengawasan tahun 2025 yaitu Jawa Tengah menunjukkan konsistensi

sebagai provinsi dengan integritas tinggi di tingkat regional dan nasional, dengan nilai (75,38), konsisten diatas rata-rata ketercapaian tingkat Nasional yaitu (72,32).

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam melaksanakan Unsur Pengawasan didukung anggaran Rp6.891.756.000,00 untuk melaksanakan 2 program yaitu:

- 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan** didukung anggaran Rp4.170.183.000,00. dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,36%. Program ini memiliki indikator yang mendukung RKPd dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri, Kabupaten/ Kota, dan OPD Provinsi Jawa Tengah sebesar (97,95%). Tingkat ketercapaian belum 100% dikarenakan adanya beberapa rekomendasi atas hasil pemeriksanaan membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 60 hari untuk dapat ditindak lanjuti. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, pada tahun 2026 mendatang, target dan capaian program dan kegiatan yang tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 sudah tidak dapat dijadikan pedoman. **Permasalahan** yang dihadapi terkait dengan tidak tercapainya indikator Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dikarenakan terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati/ Wali Kota sehingga memerlukan proses panjang dalam penyelesaiannya, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) mengalami peretasan dan mengalami sistem error selama kurun waktu 3 bulan di tahun 2025, adanya data dukung tindak lanjut hasil pemeriksanaan pada SMA/ SMK yang hanya diserahkan pada Cabang Dinas Pendidikan, tidak langsung diserahkan ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sehingga menghambat dalam pencatatan penyelesaian tindak lanjut serta Peran APIP dalam fungsi *advisory* dan mitigasi risiko belum optimal akibat keterbatasan sumber daya (5M). **Upaya** yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres tindak lanjut atas rekomendasi di Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di Jawa Tengah sampai dengan level Unit Pelaksana Teknis, pengembangan dan pengamanan sistem informasi manajemen pengawasan (SIMWAS) yang sudah ada, serta berupaya untuk mengusulkan penambahan sumber daya terutama pada pos anggaran sebesar 0,3% atau minimal Rp60.000.000.000., dari belanja APBD diluar belanja pegawai sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. **Manfaat** program penyelenggaraan pengawasan yaitu untuk

penjaminan mutu atas segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jasa *advisory* dan menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi melalui pengendalian dan pencegahan *fraud* dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

didukung anggaran Rp2.721.573.000,00. dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,74%. Program ini memiliki 2 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 (408,5%) dan Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3 (350,08%). **Permasalahan** yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan antara lain belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menerapkan budaya sadar risiko dan pengendalian korupsi. Namun pada Tahun 2025 tingkat ketercapaian pada 2 indikator program dimaksud melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya komitmen oleh Perangkat Daerah dalam proses pengendalian risiko dan efektivitas pengendalian korupsi. **Upaya** yang terus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan terus melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala terkait aktivitas manajemen risiko dan pengendalian korupsi di masing-masing Perangkat Daerah guna mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan pendampingan identifikasi risiko dan pelaporan pengelolaan risiko tiap semester. **Manfaat** program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi yaitu meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko dan memperkuat budaya integritas organisasi serta meminimalkan peluang terjadinya korupsi pada perangkat daerah sehingga mendukung pencapaian *Good and Clean Government* di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.150 Capaian Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri, Kabupaten/Kota, dan OPD Provinsi Jawa Tengah	%	85	93	109,41	84	93	110,71
2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	87	90,38	103,89	86	90,38	105,09
3	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	87	55,18	63,43	86	55,18	64,16
4	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	87	62,91	72,31	86	62,91	73,15

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	87	61,07	70,2	86	61,07	71,01
II PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
1	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	14,29	50	349,9	12,24	50	408,5
2	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	%	14,29	42,58	299,85	12,24	42,58	350,08

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** dengan **keluaran** 1 dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran; Terselaikannya 95 Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Terselaikannya 63 Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah; dan Terselaikannya 70 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah. Outcome kegiatan tersebut adalah meningkatnya efektivitas, efisiensi dan ekonomis program/ kegiatan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, berkurangnya risiko dan penyimpangan dan meningkatnya kualitas laporan keuangan dan kinerja. **Manfaat** kegiatan ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). **Dampak** yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu penguatan budaya integritas dan kinerja di seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu dengan keterbatasan sumber daya (5M), terdapat penugasan yang bersifat *mandatory* tetap harus segera dilaksanakan. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian jadwal pengawasan yang sudah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 2) **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** dengan **keluaran** yaitu terselaikannya 27 Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Outcome kegiatan tersebut adalah terselaikannya masalah spesifik/kasus tertentu, meningkatnya deteksi dini, keandalan pelaksanaan program tertentu, dan tersedianya rekomendasi cepat dan tepat sasaran untuk perbaikan. **Manfaat** kegiatan ini adalah memastikan program prioritas sesuai ketentuan dan memberikan rekomendasi yang tepat kepada Kepala Daerah atas masalah dari program tertentu. **Dampak** kegiatan ini yaitu permasalahan strategis cepat diselesaikan, pencegahan terhadap kerugian negara, program prioritas dapat terjamin keberhasilannya, dan pengambilan keputusan/kebijakan oleh Kepala Daerah menjadi lebih tepat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu banyak

aduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti yang jumlahnya tidak dapat diprediksi serta terdapat limpahan pemeriksaan dari Kementerian Teknis terkait. **Upaya** yang dilakukan adalah melaksanakan pemeriksaan dengan optimal dan prioritas dengan keterbatasan sumber daya (5M).

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung 2 kegiatan yaitu:

- 1) **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan** dengan **keluaran** yaitu 1 Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang telah diselesaikan pada Triwulan IV Tahun 2025. Output kegiatan tersebut adalah tersusunnya pedoman rencana pengawasan yang standar dan terintegrasi. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas dan pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu. **Dampak** kegiatan ini yaitu pengawasan menjadi lebih terarah, terstandar dan terukur serta meningkatnya kualitas hasil pengawasan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum terpetakannya permasalahan dan peta risiko strategis di Kabupaten/Kota sesuai dengan arah perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. **Upaya** yang telah dilakukan adalah melaksanakan *Diagnostic Assessment* ke beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berperan langsung terhadap arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 yang berbasis risiko.
- 2) **Pendampingan dan Asistensi** dengan **keluaran** yaitu Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Outcome kegiatan tersebut adalah menurunnya risiko *fraud* di perangkat daerah, meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, tercapainya standar nilai *Monitoring, Controlling, Surveillance and Prevention* (MCsP), Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan terselenggaranya Survei Penilaian Integritas. **Manfaat** kegiatan ini adalah risiko-risiko yang masuk dalam kategori risiko terutama risiko *fraud* di perangkat daerah dapat diidentifikasi dan dicegah lebih awal serta memberikan keyakinan penuh kepada masyarakat terkait *Good and Clean Government* di dalam Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. **Dampak** dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terbangunnya budaya integritas di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang secara konsisten baik di tingkat regional maupun nasional yaitu provinsi dengan nilai integritas tinggi dengan nilai (75,38), diatas rata-rata ketercapaian tingkat Nasional (72,32) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada 16 (enam belas) perangkat daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). **Permasalahan** yang

dihadapi yaitu dokumen register risiko yang disusun oleh perangkat daerah masih sebatas dokumen formalitas, masih kurangnya pemahaman ASN di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait definisi gratifikasi serta masih minimnya pemenuhan dokumen pendukung pada 8 (delapan) area MCsP KPK RI. **Upaya** yang dilakukan adalah pendampingan penyusunan dokumen register risiko di perangkat daerah, melakukan sosialisasi terkait pemahaman gratifikasi mulai dari aktivitas pencegahan hingga pelaporan dan rapat berkala tim penyusun pemenuhan dokumen pendukung pada 8 (delapan) area MCsP KPK RI.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dengan tingkat ketercapaian 1 indikator tinggi dan 1 indikator sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.151 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5	84,82	5	100	84,82	Tinggi
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2	100	3	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Provinsi Jawa Tengah;
2. Evaluasi Zona Integritas;
3. Penguatan APIP dengan menambah anggaran sesuai dengan *Spending Mandatory* dan personil untuk kegiatan pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa;
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) yang sudah ada;
5. Penguatan MOOC Anti Korupsi bekerjasama dengan BPSDMD; dan
6. Sosialisasi Anti Korupsi untuk Aparatur Sipil Negara, Pelajar SMA/SMK, dan Perangkat Desa di Provinsi Jawa Tengah;

3.4.6 Unsur Pemerintahan Umum

Pada tahun 2025, urusan pemerintahan umum khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Dinamika sosial politik pasca pelaksanaan Pemilu

serentak 2024 masih berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat akibat polarisasi politik dan penyebaran disinformasi di ruang digital. Selain itu, masih ditemui tantangan dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama di tengah meningkatnya pengaruh ideologi transnasional serta arus globalisasi budaya yang dapat mengikis semangat nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Isu lain yang mengemuka adalah perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, serta penguatan peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen deteksi dan pencegahan dini konflik sosial. Di sisi tata kelola, masih dibutuhkan optimalisasi reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur bidang kesbangpol, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengawasan politik dan manajemen data ketahanan nasional. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi dan penguatan ketahanan daerah dalam menjaga persatuan, keutuhan, dan stabilitas di Provinsi Jawa Tengah.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Urusan Urusan Pemerintahan Umum oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 adalah IDI di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2024. Nilai IDI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 80.87 yang menempatkan Provinsi Jawa Tengah di urutan ke-8 di bawah Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Sedangkan pada tahun 2024 nilai IDI di Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 4.97 poin menjadi 85.84 yang menempatkan Provinsi Jawa Tengah di peringkat ke-4 di bawah DI Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Barat.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Untuk menjalankan berbagai program pada urusan pemerintahan umum, khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp199.262.149.000 melalui program:

- 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan** didukung anggaran Rp2.712.345.000,00 dengan **realisasi** fisik 100% dan keuangan 98,80%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPd dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Indeks Ideologi Pancasila (100%), Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi melemahnya karakter kebangsaan dan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat khususnya di kalangan generasi muda. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan berbagai upaya strategis yang bersifat edukatif, partisipatif, dan kolaboratif melalui pendidikan wawasan kebangsaan, forum dialog lintas elemen masyarakat serta melakukan kampanye digital yang mengangkat nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu memperkuat kohesi sosial dan integrasi bangsa prinsip kebhinekaan sebagai dasar terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis di Provinsi Jawa Tengah.

2. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial** didukung anggaran Rp34.468.800.000,00 dengan **realisasi** fisik 100% dan keuangan 99,85%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Indeks kewaspadaan Nasional yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi masih lemahnya sistem deteksi dan pelaporan dini terhadap potensi konflik sosial di daerah serta masih lemahnya koordinasi antar instansi dan antar level pemerintahan menyebabkan terlambatnya penanganan isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik. **Upaya** yang dilakukan antara lain memperkuat peran Forkopimda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah.
3. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** didukung anggaran Rp103.350.314.000,00 dengan **realisasi** fisik 100% dan keuangan 98,41%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Indeks kewaspadaan Nasional yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), Terhadap target akhir RPD indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran sosial sesuai peraturan perundang-undangan. **Upaya** yang dilakukan mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dengan pelatihan-pelatihan serta penguatan kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah dan sesama ormas. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kapasitas, kemandirian dan kepatuhan ormas terhadap peraturan serta terwujudnya peran aktif ormas dalam menjaga persatuan, toleransi, dan partisipasi pembangunan daerah.
4. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya** didukung anggaran Rp2.016.444.000,00 dengan **realisasi** fisik 100% dan keuangan 99,17%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu Indeks penguatan dampak ekonomi dan Indeks toleransi yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), Terhadap target akhir RPD terdapat seluruh indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi masih rendahnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta rendahnya penerimaan keberagaman. **Upaya** yang dilakukan antara lain meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang keberagaman dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kebangsaan. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah serta terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan toleran.
5. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** didukung anggaran Rp40.473.973.000,00 dengan realisasi fisik 100%

dan keuangan 99,88%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), Terhadap target akhir RPD terdapat indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu berkurangnya kebebasan sipil seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul dimana aparat keamanan bertindak represif pada saat pengamanan aksi unjuk rasa. **Upaya** yang dilakukan antara lain Pemerintah daerah melalui Forkompinda memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk berkumpul dan berpendapat. **Manfaat** pelaksanaan program ini meningkatnya kesadaran, partisipasi, dan kedewasaan politik masyarakat dalam berdemokrasi secara sehat dan beretika.

Tabel 3.152 Capaian Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
1	Indeks Ideologi Pancasila	nilai	3,2	3,7	115,63	3,1	3,7	119,35
II	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
1	Indeks kewaspadaan Nasional	nilai	74	80,6	108,92	73,5	80,6	109,66
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
1	Indeks kinerja ormas	nilai	79,82	80	100,23	77,87	80	102,74
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
1	Indeks penguatan dampak ekonomi	nilai	3,2	3,21	100,31	3,1	3,21	103,55
2	Indeks toleransi	nilai	74,5	89,26	119,81	74,3	89,26	120,13
V	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
1	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	nilai	77	91,6	118,96	76	91,6	120,53

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan didukung kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

dengan **keluaran** kegiatan meliputi terfasilitasinya pelaksanaan Paskibraka Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan 35 Duta Paskibraka; serta terlaksananya kegiatan sosialisasi Pembumian Nilai-Nilai Pancasila serta pencegahan radikalisme dan terorisme yang diikuti oleh 3.200 peserta pelajar SMA/SMK di seluruh 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa Peningkatan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. **Manfaat** kegiatan ini yaitu peningkatan ketahanan ideologi bangsa. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya stabilitas sosial dan politik di daerah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih terbatasnya internalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, adanya potensi penyebaran paham radikalisme dan terorisme, serta belum optimalnya peran Duta Paskibraka sebagai agen penguatan ideologi Pancasila di daerah. **Upaya** yang dilakukan meliputi pembentukan Duta Paskibraka sebagai agen pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan pencegahan radikalisme secara masif di 35 kabupaten/kota, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

2. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial** didukung kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** dengan keluaran antara lain terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini yang diikuti oleh 3.200 peserta pelajar SMA/SMK dan dilaksanakan di seluruh 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah; tersalurkannya hibah kepada 9 (sembilan) instansi vertikal penerima hibah; serta terlaksananya kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjaga kondusivitas pada masa Hari Raya Idulfitri serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2025. **Outcome** kegiatan tersebut berupa Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya gangguan keamanan daerah serta peningkatan koordinasi antar lembaga keamanan terkait. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya iklim investasi yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih terbatasnya kapasitas kewaspadaan dan deteksi dini elemen masyarakat, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta meningkatnya potensi kerawanan sosial dan keamanan menjelang Idulfitri dan Nataru Tahun 2025. **Upaya** yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor dan instansi vertikal, serta optimalisasi Forkopimda untuk menjaga kondusivitas daerah pada momentum hari besar keagamaan dan nasional Tahun 2025.
3. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** didukung kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** dengan **keluaran** kegiatan terfasilitasinya pemberian hibah kepada masyarakat melalui 989 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Provinsi Jawa Tengah; serta terlaksananya kegiatan sosialisasi

pendayagunaan potensi dan pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang diikuti oleh 3.200 peserta pelajar SMA/SMK di seluruh 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas ormas penerima hibah, meningkatnya kepatuhan pelaporan hibah, serta menguatnya ketahanan dan kondusivitas sosial di Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas dan peran ormas, tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap peran sosial kemasyarakatan, serta menguatnya sinergi dalam penanganan masalah sosial di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini yaitu menguatnya ketahanan sosial, meningkatnya partisipasi masyarakat dan generasi muda, serta terjaganya stabilitas dan kondusivitas sosial di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya pemberdayaan ormas, keterbatasan kapasitas administrasi pengelolaan hibah, kurangnya pemahaman pelajar terhadap peran ormas, serta keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban hibah. **Upaya** yang dilakukan adalah meliputi pembinaan dan pendampingan ormas penerima hibah, peningkatan kapasitas administrasi pertanggungjawaban hibah, sosialisasi pemberdayaan ormas kepada pelajar, serta penguatan monitoring dan evaluasi.

4. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya** didukung kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** dengan **keluaran** kegiatan terlaksananya pembinaan kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan guna menunjang pengukuran Indeks Harmoni di Provinsi Jawa Tengah; serta terlaksananya kegiatan sosialisasi pemantapan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat yang diikuti oleh 3.200 peserta pelajar SMA/SMK di seluruh 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** Meningkatnya kerukunan dan toleransi antarumat beragama, menguatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta terjaganya kondusivitas masyarakat di Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatnya toleransi dan kerukunan umat beragama, tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap ketahanan sosial budaya, serta terjaganya keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Jawa Tengah. **Dampak** yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu menguatnya kohesi dan harmoni sosial antarumat beragama dan penghayat kepercayaan; menurunnya potensi konflik sosial berbasis SARA; meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat; serta terwujudnya stabilitas, keamanan, dan kondusivitas kehidupan bermasyarakat secara berkelanjutan di seluruh 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih adanya potensi konflik berbasis SARA, belum meratanya tingkat kerukunan antarumat beragama, serta terbatasnya pemahaman pelajar mengenai ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. **Upaya** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kerukunan dan kohesi sosial melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dialog lintas agama, dan program moderasi beragama sesuai Pergub Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama. Upaya ini membuahkan hasil dengan meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) menjadi 77,89 pada

tahun 2025, masuk kategori tinggi. Meski begitu, tantangan berupa intoleransi, polarisasi di ruang digital, serta ancaman radikalisme masih muncul, sehingga pemerintah memperkuat peran organisasi masyarakat dan tokoh agama/budaya melalui hibah dan kegiatan pembinaan. Seluruh langkah ini diarahkan untuk menjaga harmoni sosial, memperkuat ketahanan ekonomi, dan membangun karakter masyarakat Jawa Tengah yang tangguh, toleran, dan adaptif terhadap perubahan.

5. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** didukung kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis dan Peman-tapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Per-wakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** dengan **keluaran** kegiatan terselurkannya bantuan keuangan kepada 10 (sepuluh) partai politik di Provinsi Jawa Tengah; serta terlaksananya kegiatan sosialisasi peningkatan dan penguatan peran politik bagi organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat/tokoh agama (Toma/Toga), dan pelajar yang diikuti oleh 3.200 peserta di seluruh 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas partai politik serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat dan pelajar guna mendukung stabilitas politik di Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas partai politik, bertambahnya pemahaman dan kesadaran politik masyarakat dan pelajar, serta terjaganya stabilitas politik di Jawa Tengah. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas demokrasi, menguatnya partisipasi politik yang sehat, serta terciptanya stabilitas politik yang berkelanjutan di Jawa Tengah. Penguatan sistem kelembagaan politik serta pelaksanaan pendidikan politik dan Sekolah Politik Kebangsaan turut mendorong terbentuknya kader-kader politik yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pelaksanaan penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah memberikan gambaran objektif terhadap perkembangan demokrasi daerah dan menjadi dasar perumusan kebijakan politik yang lebih responsif dan inklusif. **Permasalahan** yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas tata kelola politik, rendahnya literasi politik masyarakat dan pelajar, potensi praktik politik yang kurang sehat, serta tantangan dalam menjaga stabilitas politik daerah. **Upaya** yang dilakukan meliputi pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan partai politik, peningkatan literasi dan partisipasi politik masyarakat dan pelajar, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Unsur Pemerintahan Umum dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.153 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Jateng;
2. Koordinasi Hubungan Kerjasama Pembangunan Daerah melalui Forkopimda;
3. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan;
4. Program Youth Politic Class, yang menjadi wadah pembinaan generasi muda dalam memahami sistem demokrasi, memperkuat etika politik digital, dan menumbuhkan partisipasi aktif generasi Z sebagai pemilih cerdas;
5. Forum Penguatan Demokrasi Jawa Tengah, Forum ini dirancang sebagai wadah strategis untuk mengawal dan memperkuat capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Tengah. Forum ini akan berfungsi sebagai ruang dialog, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor;
6. Edukasi anti narkoba melalui kegiatan sosialisasi tatap muka.

3.4.7 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

3.4.7.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 melaksanakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dengan dukungan 8 program yaitu: Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum oleh Biro Hukum; Program Kesejahteraan Rakyat oleh Biro Kesejahteraan Rakyat; Program Perekonomian dan Pembangunan oleh Biro Perekonomian dan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; Program Kebijakan

Administrasi Pembangunan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa; Program Penataan Organisasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi; serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi oleh Biro Umum.

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025:

1. *Outstanding Public Service Innovations* Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2025;
2. Penghargaan *Financial Literacy Award* 2025 sebagai finalis *Financial Literacy Award* 2025 dengan kategori Pemerintah Daerah dengan program literasi keuangan terbaik level Provinsi;
3. Peringkat I Kategori Provinsi penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dengan nilai 99,72 (AA/Istimewa)
4. Penilaian terhadap pengelolaan JDII Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan nilai 96 dengan Kategori "Eka Acapalati" (perolehan nilai Anggota JDII pada nilai 86-100) dari Kementerian Hukum RI, sehingga menduduki peringkat 2 untuk Anggota JDII Nasional Kategori Pemerintah Provinsi;
5. Penghargaan TPAKD Award 2025 sebagai nominasi penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award Tahun 2025 dengan kategori TPAKD terbaik tingkat Provinsi Wilayah Jawa – Bali.

a. **Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Guna melaksanakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Daerah didukung dengan anggaran Rp685.997.534.000,00 untuk melaksanakan 8 program yaitu:

1. **Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah** yang didukung alokasi sebesar Rp3.246.217.000,00 memiliki realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.919.717.080,00 (89,94%). Program ini memiliki 3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi. Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti, Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah, Tingkat efektivitas kerjasama daerah. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi dalam memenuhi 3 indikator program dimaksud antara lain kurangnya pemahaman pemda/mitra mengenai alur, prosedur, dan regulasi kerjasama daerah; adanya ketidaksesuaian administrasi perbatasan antara Permendagri dengan kondisi existing di lapangan; dan belum optimalnya data, pelaporan, dan monitoring capaian urusan pemerintahan dan SPM di kab/kota. **Permasalahan tersebut selanjutnya diatasi melalui** penyelenggaraan sosialisasi/bimtek mengenai regulasi kerjasama daerah dan mekanisme pengelolaannya; pelaksanaan deleniasi batas daerah antar kabupaten/kota yang mengalami perbedaan dengan Permendagri; Penguatan pembinaan dan

asistensi teknis secara berkala kepada kabupaten/kota terkait urusan pemerintahan dan SPM. **Manfaat** Penyelenggaraan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai regulasi; mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan pemenuhan SPM oleh kabupaten/kota; serta mendorong sinergi dan kolaborasi antar daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih optimal.

2. **Program Kesejahteraan Rakyat** dengan alokasi anggaran yaitu Rp 413.371.924.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp407.230.574.806,00 (98,51%). Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya tinggi yaitu Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar, Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar, Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain masih terdapat kondisi sarana prasarana di lembaga bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan yang kurang Layak. **Upaya** yang dilakukan antara lain pemberian hibah kepada lembaga keagamaan dan pendidikan keagamaan untuk peningkatan sarana dan prasarana. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu meningkatnya kondisi sarana prasarana bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan.
3. **Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum** didukung anggaran Rp2.810.651.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp2.763.129.720,00 (98,31%). Program ini memiliki 4 indikator dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi, antara lain: Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan; Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji; Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani; dan Persentase kabupaten/kota peduli HAM, sedangkan terhadap capaian RPD seluruh indikator telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain belum merata dalam memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. **Upaya** mengatasi permasalahan tersebut antara lain melakukan identifikasi perkara dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jawa Tengah dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. **Manfaat** pelaksanaan program ini yaitu terpenuhinya hak atas akses keadilan, meningkatnya perlindungan hukum, serta terwujudnya kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. **Program Perekonomian Pembangunan** yang didukung alokasi sebesar Rp4.235.260.000,00 memiliki realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.015.924.556,00(94,82%). Program ini memiliki 8 (delapan) indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMD Provinsi Jawa Tengah belum optimal dan terjadi bencana hidrometeorologi ekstrim di kawasan pantura yang

menyebabkan kenaikan muka air laut dan melimpas ke kawasan permukiman.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dengan penyusunan Pedoman GCG dan pemasangan Pompa Air Tenaga Surya (PATS) yang berkolaborasi dengan dunia usaha melalui skema *colaborative funding*.

Manfaat penerapan GCG pada BUMD Provinsi Jawa Tengah antara lain perusahaan mampu meningkatkan kinerja internal perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah dan pelayanan publik dan manfaat pemasangan PATS yaitu mengurangi secara signifikan limpasan air ke pemukiman sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara normal.

5. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.1.761.081.000 Program ini memiliki realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.705.972.962 (96,87%). Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian semuanya memiliki capaian sangat tinggi, Persentase Efektivitas Pengadaan Secara Elektronik; Persentase Pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa; dan Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa. Adapun terhadap target akhir RPD, seluruh indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu sebagian pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. **Beberapa upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan, yaitu: pendampingan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), fasilitasi pemilihan penyedia sesuai dengan peraturan yang berlaku, peningkatan kompetensi para pelaku pengadaan, membangun sistem informasi penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa. **Manfaat** program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan terjaminnya kualitas hasil pengadaan barang dan jasa.

6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah

dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.715.689.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp1.713.108.389,00 (99,85%) sebesar Program ini memiliki 5 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan seluruhnya memiliki capaian sangat tinggi, antara lain: Persentase capaian pelaksanaan APBD, Persentase capaian pelaksanaan APBN, dan Persentase realisasi bantuan keuangan. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan di tahun 2025 antara lain adanya perbedaan laporan progres realisasi fisik dengan kondisi riil di lapangan. **Upaya** yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas diantaranya melaksanakan desk validasi data pelaporan dan pemantauan langsung di lapangan secara berkala. **Manfaat** dari pelaksanaan Program ini

adalah mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Daerah agar berjalan dengan efektif, efisien, sesuai rencana dan tepat sasaran.

7. Program Penataan Organisasi didukung anggaran Rp1.936.969.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp1.685.449.927,00 (87,01%). Program ini memiliki 9 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, antara lain Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB dan Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain struktur organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan tugas, fungsi, dan beban kerja. **Upaya** yang dilakukan yaitu menyusun dan memutakhirkan dokumen kelembagaan, termasuk struktur, uraian tugas, dan beban kerja. **Manfaatnya** antara lain memastikan birokrasi menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung anggaran Rp256.919.743.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp238.221.493.954,00 (92,72%). Program ini memiliki 3 indikator yang mendukung RKPD dengan capaian seluruhnya sangat tinggi, antara lain: Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda dalam kategori tinggi, dan Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda dalam kategori tinggi. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, sarana, dan prasarana penunjang administrasi dan operasional perangkat daerah. **Upaya** mengatasi permasalahan antara lain penguatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia penunjang administrasi dan operasional. **Manfaat** meningkatkan kualitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah.

Tabel 3.154 Capaian Kinerja Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
1	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	100	105,26	95	100	105,26
2	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	100	105,26	95	100	105,26
3	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	100	105,26	95	100	105,26
II	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	85	83	58,82	83	83	100
2	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	85	84	70,59	84	84	100
3	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	60	63,49	60	60	100
III	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							
1	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan peraturan-undangan	%	97	100	91,75	100	100	100
2	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	96	103	90,63	103	103	103
3	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	102	81,25	102	102	102
4	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	100	80,21	100	100	100
IV	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
1	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84	84	101,19	84	84	100
2	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	79	79	110,13	79	79	100
3	Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan	%	86	86	101,16	86	86	100
4	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	82	82	101,22	82	82	100
5	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56	56	101,79	56	56	100
6	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	90,22	58,88	87	90,22	103,70

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	88,14	83,27	85	88,14	103,69
8	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	96	42,44	85	96	112,94
V	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							
1	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	82	86,37	105,32	82	86,37	105,32
2	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	82	83,22	101,48	82	83,22	101,48
3	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	91	92,32	101,52	91	92,39	101,52
VI	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
1	Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98,85	91,68	70,20	98,8	91,68	92,79
2	Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95,50	95,5	63,52	95,5	95,5	100
3	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	87	86	114,31	86	86	100
4	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	98,15	105,41	85	98,15	115,47
5	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	100	50	100	100	100
VII	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							
1	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	91,43	88,57	68,75	88,57	88,57	100
2	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	71,43	95,24	72,49	69,05	95,24	137,929
3	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	94	92	73,4	92	92	100
4	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	93,88	96	63,91	90	96	106,6667

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	82	36,59	32,93	36,59	36,59	100
6	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	74	70	81,08	70	70	100
7	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	93,86	91,01	72,71	91,01	91,01	100
VIII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
1	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	100	100	100	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah didukung kegiatan 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pelaksanaan Tugas Pemerintahan** dengan **keluaran** antara lain dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ sebanyak 8 Dokumen. **Outcome** kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas kebijakan di bidang pemerintahan yang berbasis data, analisis, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah kepada DPRD dan masyarakat. **Manfaat** kegiatan tersebut antara lain terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsive serta memperkuat dasar kebijakan pemerintah daerah, sehingga pembangunan berjalan lebih tepat sasaran. **Dampak** dari kegiatan tersebut adalah terciptanya pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. **Permasalahan** yang terjadi yaitu adanya perubahan regulasi yang cepat. **Upaya** menyelesaikannya adalah monitoring regulasi & updating pedoman.
- 2) **Pelaksanaan Otonomi Daerah**, dengan **keluaran** antara lain layanan fasilitasi KDH dan DPRD sebesar 100%, dokumen rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM sebanyak 3 Dokumen, pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 100%. **Outcome** dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan

otonomi daerah. **Manfaat** dari kegiatan tersebut adalah mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, efektif, dan responsif. **Dampak** yang dapat dirasakan di masyarakat adalah meningkatnya kualitas layanan publik di daerah karena mengacu pada rekomendasi dan SPM yang jelas. **Permasalahan** yang terjadi adalah koordinasi lintas sektor belum optimal. **Upaya** penyelesaian yang dapat diupayakan adalah meningkatkan koordinasi lintas OPD melalui rapat berkala dan kanal komunikasi khusus.

- 3) **Fasilitasi Kerjasama Daerah**, dengan **keluaran** antara lain persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti, naskah kerjasama lembaga, badan usaha dan swasta yang ditindaklanjuti dan rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah seluruhnya sebesar 100%. **Outcome** dari kegiatan tersebut adalah terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama luar negeri sesuai aturan. **Manfaat** dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan efektivitas pemanfaatan potensi dan sumber daya antar daerah atau badan usaha/swasta. **Dampak** yang dapat dirasakan adalah meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui sinergi lintas wilayah dan lintas sektor. **Permasalahan** yang terjadi adalah Proses koordinasi antar pihak (provinsi–kab/kota–mitra) belum berjalan optimal. **Upaya** penyelesaian yang dapat diupayakan adalah optimalisasi tim verifikator dan penyusunan SOP internal percepatan layanan kerjasama daerah.

2. Program Kesejahteraan Rakyat didukung 3 kegiatan yaitu:

- 1) **Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual** dengan **keluaran** antara lain: Penyelenggaraan Jateng bersholawat sebanyak 5 kali, fasilitas pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 pembekalan Tim Petugas Haji Daerah 251 orang dan pengiriman 14 orang Petugas Haji; Pemberian Hibah kepada 477 lembaga keagamaan, 1.135 sarana ibadah, dan 39 majelis taklim; Pemberian Hibah pada bidang pendidikan keagamaan pada 1.187 lembaga; dan Pemberian Hibah kepada 230.830 pengajar keagamaan dan 182.360 siswa (BOSDA MA). **Outcome** peningkatan peran serta dan keikutsertaan masyarakat meningkat dalam melaksanakan ibadah perayaan hari besar keagamaan. **Manfaat:** petugas haji daerah mempunyai kemampuan yang bagus dalam melakukan pelayanan pendampingan kepada para jamaah haji ketika melaksanakan ibadah. **Dampak** terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang religius dan toleran. **Permasalahan** yang dihadapi waktu yang diberikan kepada calon petugas haji dalam melengkapi dokumen petugas haji daerah (PHD) dari kementerian agama RI sangat singkat. Sebagai **upaya** mengatasi permasalahan tersebut yaitu menyiapkan personil PHD lebih banyak dari yang diminta sebagai cadangan.
- 2) **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar** dengan **keluaran** antara lain: laporan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. **Outcome** kegiatan tersebut antara lain meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan

kesejahteraan rakyat dalam pemenuhan pelayanan dasar secara terintegrasi dan berkelanjutan. **Manfaat:** meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. **Dampak** berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar antar wilayah dan kelompok masyarakat **Permasalahan** yang dihadapi belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Sebagai **upaya** mengatasi permasalahan tersebut yaitu penguatan koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah terkait pelayanan dasar.

- 3) **Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar** dengan **keluaran** antara lain: laporan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan mudik dan balik rantau gratis. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu melestarikan budaya mudik pada masyarakat Jawa Tengah yang merantau di luar wilayah. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu meringankan beban masyarakat peserta mudik dan balik rantau gratis. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan perputaran ekonomi di Jawa Tengah saat Hari Raya Idul Fitri. **Permasalahan** yang dihadapi kurang efektifnya sistem pendaftaran mudik dan balik Rantau gratis yang masih memiliki celah adanya praktek pungli dan calo serta terbatasnya jumlah armada angkutan. Sebagai **Upaya** mengatasi masalah pembangunan sistem kendali dan pencegahan resiko melalui sistem elektronik dengan pemindai KTP, membuat MOU dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR dalam penyediaan armada angkutan.

3. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum didukung 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan** dengan **keluaran** kegiatan antara lain Penyusunan 11 Raperda Provinsi Jawa Tengah, harmonisasi dan Sinkronisasi 11 Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 11 Laporan dokumentasi dan Informasi dan Naskah Hukum Lainnya, 11 laporan pengkajian dan analisis evaluasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, fasilitasi dan evaluasi 116 dokumen rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I, fasilitasi dan Evaluasi 138 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II serta fasilitasi dan evaluasi 126 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu peningkatan kualitas produk hukum daerah (perda dan perkada) yang sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu pemerintah memiliki pedoman hukum yang jelas dan mengurangi potensi gugatan uji materiil atau keberatan masyarakat terhadap peraturan yang dinilai merugikan. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu dapat mendorong regulasi yang sederhana dan efektif dalam implementasinya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu banyak rancangan peraturan yang belum harmonis dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan

bahasa hukum tidak baku atau multitafsir yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda saat implementasi. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan kajian akademik yang komprehensif sebelum penyusunan dengan data dan analisis kebijakan yang kuat, memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi melalui proses harmonisasi internal dan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri serta mengoptimalkan fungsi legal drafting agar bahasa hukum baku, sistematis, dan tidak multitafsir, memasukkan hasil evaluasi peraturan lama sebagai dasar.

- 2) **Lilitasi Bantuan Hukum**, dengan **keluaran** kegiatan antara lain: pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan sejumlah 258 perkara, fasilitasi penanganan perkara perdata/TUN sejumlah 19 perkara, fasilitasi implementasi HAM kabupaten/kota sejumlah 35 kabupaten/kota, fasilitasi penanganan aduan masyarakat 15 aduan, fasilitasi penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 22 sengketa. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu menurunnya jumlah pelanggaran HAM di daerah dan terselesaikannya sengketa hukum secara cepat, tepat, dan berkeadilan. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu mencegah terjadinya pelanggaran HAM di daerah melalui kebijakan dan layanan yang berkeadilan, serta mencegah sengketa hukum tidak berkembang menjadi konflik sosial atau politik yang lebih luas. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap warga masyarakat terwujudnya dan terwujudnya penyelesaian sengketa hukum yang adil, damai dan legal. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran HAM. **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi secara intensif terhadap pelaksanaan aksi HAM.

4. Program Perekonomian Pembangunan didukung 3 kegiatan yaitu

- 1) **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian** dengan **keluaran** rekomendasi kebijakan bidang ekonomi antara lain replikasi simanis mart (kios pengendali inflasi) di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu memotong rantai pasok distribusi dari produsen ke konsumen. **Manfaat** dari kegiatan ini yaitu inflasi terjaga dalam rentang kendali $2,5 \pm 1$. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu menjaga stabilitas harga dan daya beli di masyarakat. **Permasalahan** adanya fluktuasi harga komoditas pangan strategis penyebab inflasi. **Upaya** yang dilakukan adalah penguatan sinergi dan koordinasi antar stakeholders terkait. **Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD** yaitu Meningkatkan kapasitas TPID. Perlu upaya pengendalian inflasi daerah, melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.
- 2) **Koordinasi BUMD dan BLUD** dengan **keluaran** kegiatan Koordinasi BUMD dan BLUD antara lain rekomendasi kebijakan hasil monev BUMD Jasa Keuangan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan.

Outcome kegiatan tersebut adalah peningkatan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan regulasi. **Manfaatnya** yaitu terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja BUMD/BLUD. **Dampaknya** yaitu peningkatan kinerja BUMD dan BLUD dan terjadinya penguatan *governance* dan *risk-based*. **Kendala** yang dihadapi pada BUMD dan BLUD antara lain terdilusinya penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Khususnya pada Bank Jateng dan PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah. **Upaya** untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melakukan analisa kebutuhan penyertaan modal untuk pengembangan bisnis maupun pengaturan komposisi saham Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tidak terdilusi.

- 3) **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam** dengan **keluaran** dokumen rekomendasi antara lain potensi energi baru terbarukan di Jawa Tengah dan peta jalan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam usaha ekonomi berbasis ekosistem mangrove. **Outcome** kegiatan yaitu meningkatnya persentase EBT dalam bauran energi dan adanya kesepakatan peta jalan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan stakeholder. **Manfaat** kegiatan ini yaitu mengurangi ketergantungan penggunaan energi fosil dan terjaganya kelestarian ekosistem mangrove. **Dampak** kegiatan ini adalah meningkatnya penggunaan energi yang ramah lingkungan dan mengurangi potensi risiko bencana di wilayah masyarakat pesisir. **Permasalahan** yang dihadapi antara lain adanya potensi perhitungan data ganda pada infrastruktur EBT di Jawa Tengah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove. **Upaya** yang telah dilakukan rekonsiliasi data dengan stakeholder terkait dan penguatan komunitas nelayan yang hidup berdampingan dengan ekosistem mangrove.

5. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik** dengan **keluaran** 4 laporan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. **Outcome** dari kegiatan tersebut adalah terintegrasinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi pengadaan barang/jasa pusat. **Manfaatnya** antara lain terfasilitasinya sinkronisasi data antara keuangan daerah dan sistem pengadaan barang/jasa pusat. **Dampak** dari kegiatan tersebut adalah Pengadaan Barang/Jasa menjadi transparan dan akuntabel. **Permasalahan** yang dihadapi adanya kendala integrasi sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang masih bermasalah. Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan LKPP terkait kendala integrasi dengan aplikasi pengadaan barang/jasa pusat.
- 2) **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** dengan **keluaran** 4 laporan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. **Outcome** dari kegiatan tersebut adalah pemilihan pengadaan barang dan jasa yang transparan

dan akuntabel. **Manfaatnya** antara lain mendukung efisiensi anggaran dengan perencanaan yang baik, alokasi anggaran dapat lebih tepat. **Dampak** dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah dan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelaksanaan PBJ. **Permasalahan** yang dihadapi Data pendukung (spesifikasi, harga, volume, atau kebutuhan riil) tidak lengkap atau tidak mutakhir. **Upaya** yang dilakukan adalah menggunakan referensi harga yang valid, seperti survey pasar, dan basis data harga pemerintah.

- 3) **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa** dengan **keluaran** 4 laporan pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. **Outcome** dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya SDM pengelola PBJ yang berkompeten dan terlaksananya pembinaan UKPBJ Kab/Kota. **Manfaat** antara lain meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas pelaksana PBJ dalam melaksanakan tugas sesuai regulasi dan meningkatkan kapasitas dan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di tingkat kabupaten/kota. **Dampak** dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan peningkatan kapasitas unit PBJ daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan memonitor pengadaan. **Permasalahan** yang dihadapi keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial PBJ dan perbedaan kapasitas dan sumber daya antar kabupaten/kota yang membuat implementasi tidak merata. **Upaya** yang dilakukan adalah menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi PBJ secara berkala untuk SDM pengelola dan melaksanakan pembinaan dan pendampingan UKPBJ secara berkala dengan fokus pada daerah yang memiliki kapasitas rendah.

6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan didukung dengan 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah** dengan **keluaran** kegiatan yaitu rekomendasi kebijakan percepatan pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Wilayah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa dana APBD terserap sesuai target. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu mengoptimalkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan APBD. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu tercapainya tujuan Pembangunan secara efektif dan efisien. **Permasalahan** yang dihadapi pada tahun 2025 yaitu adanya keterlambatan penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas diantaranya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk percepatan penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIVERO (on-line) serta sosialisasi dan pendampingan verifikasi RKO bersama tim verifikator Provinsi untuk meminimalisir kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran

- 2) **Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah** dengan **keluaran** kegiatan antara lain persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelaporan, dokumen hasil evaluasi capaian kinerja Pembangunan Daerah serta dokumen rekomendasi kebijakan teknis Pembangunan Daerah. **Outcome** kegiatan tersebut berupa tersedianya data dan informasi kinerja Pembangunan Daerah yang terukur, akurat dan objektif sebagai dasar pengambilan kebijakan. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu berupa peningkatan kinerja Perangkat Daerah. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu adanya perbaikan berkelanjutan kebijakan Pembangunan. **Permasalahan** yang dihadapi pada tahun 2025 yaitu data pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah belum sesuai dengan kaidah pelaporan antara lain, tepat waktu, lengkap dan informatif. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya pencermatan laporan bulanan dan berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan di lapangan.

7. Program Penataan Organisasi didukung dengan 2 kegiatan, yaitu:

- 1) **Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan** dengan **keluaran** telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 060/81 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, tersusunnya draft Rapergub SOTK OPD, Cabang Dinas, dan UPTD, serta terselenggaranya fasilitasi penataan kelembagaan di Kab/Kota sebagai pelaksanaan fungsi Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). **Outcome** kegiatan tersebut yaitu tersusunnya penataan kelembagaan dan analisis jabatan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi guna mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. **Manfaatnya** antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas perangkat daerah. **Dampak** kegiatan tersebut antara lain terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada kinerja. **Permasalahan** yang terjadi antara lain belum optimalnya pemutakhiran data kelembagaan dan analisis jabatan. **Upaya** mengatasi permasalahan antara lain penyusunan dan pemutakhiran dokumen kelembagaan dan analisis jabatan secara berkala.
- 2) **Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** dengan **keluaran** antara lain hasil evaluasi RB dengan hasil yang menonjol antara lain: Indeks RB (91,28), Indeks Perencanaan Pembangunan (93,89), Indeks Digitalisasi Arsip (98,25), Indeks Reformasi Hukum (98,28), Indeks Tata Kelola Pengadaan (92,29), Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (98,21), Capaian IKU Makro (95,86), Capaian IKU Non Makro (92,30). **Outcome** dari capaian output tersebut adalah peningkatan capaian pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** dari implementasi RB tersebut adalah terwujudnya *good governance* dan *clean government* di Jawa Tengah. Selanjutnya, **dampak** yang dapat dirasakan di masyarakat adalah terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi

ekspektasi masyarakat Jawa Tengah serta meningkatnya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. **Permasalahan** yang terjadi adalah capaian reformasi birokrasi di Jawa Tengah belum maksimal. **Upaya** penyelesaian yang dapat diupayakan adalah perlu dukungan OPD pengampu indikator RB untuk berkontribusi dalam meningkatkan capaian RB di Provinsi Jawa Tengah.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** dengan **keluaran** antara lain Penyediaan kebutuhan rumah tangga dan TU KDH/WKDH dan kebutuhan TU Sekda. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu terwujudnya penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan serta perangkat daerah. **Manfaat** kegiatan tersebut antara lain menunjang kelancaran kegiatan pimpinan daerah dan Sekretariat Daerah. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu terciptanya citra positif tata kelola pemerintahan yang tertib dan profesional. **Permasalahan** kegiatan tersebut yaitu tingginya intensitas kegiatan pimpinan yang membutuhkan dukungan cepat dan fleksibel. **Upaya** yang dilakukan mengatasi permasalahan yaitu peningkatan koordinasi dan perencanaan kegiatan untuk mendukung agenda pimpinan secara efektif dan efisien.
- 2) **Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan** dengan **keluaran** antara lain Penyiapan materi naskah pimpinan, liputan dan publikasi media. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu tersedianya materi dan terlaksananya komunikasi pimpinan yang terkoordinasi, akurat, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan kebijakan serta penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi pimpinan kepada perangkat daerah dan masyarakat. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu terbangunnya kepercayaan publik melalui komunikasi pemerintahan yang informatif dan responsif. **Permasalahan** yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu dinamika kebijakan dan isu strategis yang memerlukan penyusunan materi secara cepat dan tepat. **Upaya** untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui penyusunan materi pimpinan yang sistematis, berbasis data, dan terintegrasi.
- 3) **Fasilitasi Keprotokolan** dengan **keluaran** antara lain fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu terlaksananya layanan keprotokolan yang tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung kegiatan pimpinan daerah dan acara resmi pemerintah daerah. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan resmi pimpinan daerah. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu terciptanya kesan profesional dan berwibawa dalam setiap kegiatan pemerintahan. **Permasalahan** yang muncul antara lain tingginya frekuensi dan variasi kegiatan pimpinan yang memerlukan kesiapan keprotokolan. **Upaya**

untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu optimalisasi perencanaan dan manajemen agenda kegiatan pimpinan.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Unsur Pendukung Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.155 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	100	7	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Kesejahteraan Rakyat	3	100	8	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4	100	6	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Perekonomian Pembangunan	8	100	16	100	100	Sangat Tinggi
5	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	100	3	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	5	100	9	100	100	Sangat Tinggi
7	Program Penataan Organisasi	8	100	8	100	100	Sangat Tinggi
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	100	4	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh Biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah
2. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah
4. Pengiriman delegasi dalam forum UCLG
5. Perluasan kerjasama di bidang pendidikan dengan Turkey atau Mesir
6. Fasilitasi Forum Komunitas peningkatan kerjasama lingkup Luar Negeri (Diaspora)

7. Perluasan kerjasama bidang kesehatan dan pariwisata dengan Fujian Republik Rakyat Tiongkok
8. Koordinasi Pencegahan Bullying dari aspek Religius;
9. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Pendidikan dan pelatihan Vokasi (TKDV);
10. Pemenuhan SDM Petugas Haji Daerah;
11. Koordinasi Penciptaan/Perluasan Kesempatan Kerja;
12. Koordinasi Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah dan Swasta (Revitalisasi BLK);
13. Penyusunan Produk Hukum Daerah yang selaras dengan Produk Hukum Pusat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pembangunan di Jawa Tengah.
14. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jawa Tengah.
15. Fasilitasi penanganan gugatan perkara perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi.
16. Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Jawa Tengah.
17. Fasilitasi aduan masyarakat terkait permasalahan hukum dan pelanggaran HAM.
18. Fasilitasi penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
19. Mengkoordinasikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan pokok ;
20. Mendorong BUMD agar lebih produktif dan efisien ;
21. Merumuskan kebijakan ekonomi makro yang adaptif dan berorientasi pada hasil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh dalam mempercepat pemulihan ekonomi.
22. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Jawa Tengah
23. Sinergitas Pengembangan Geopark Jateng
24. Pemantauan pelaksanaan SPPG untuk program MBG di Jateng
25. Pemantauan capaian Program Daerah yakni Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan, penghapusan hutang petani dan nelayan, program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida, dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok
26. Mendukung kegiatan Selapanan Gubernur Jawa Tengah
27. Pengendalian pelaksanaan 136 Program Daerah yang dibarengi dengan pelaksanaan pengendalian APBD/APBN, pengendalian kewilayahan serta pengendalian kinerja Perangkat Daerah
28. Fasilitasi dan koordinasi monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni
29. Dukungan pengendalian program Daerah pembangunan Gelanggang Olah Raga, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan
30. Pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
31. Pembinaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
32. Pembinaan dan penataan kelembagaan provinsi dan kabupaten/kota.
33. Pembinaan dan evaluasi kematangan organisasi dan kualitas kebijakan daerah.

34. Pembinaan dan penataan analisis jabatan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
35. Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah provinsi.
36. Pelaksanaan fasilitasi tata laksana pemerintahan.
37. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Pengadaan Solar shell pada sebagian kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.
38. Peningkatan fasilitasi komunikasi pimpinan antara lain publikasi dan hubungan media
39. Pemeliharaan barang inventaris secara komprehensif untuk meningkatkan pelayanan umum kepada pimpinan dan masyarakat.
40. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender.
41. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog.
42. Sosialisasi Migrasi Sistem toko daring ke Inaproc.
43. Pendampingan UKPBJ menuju tingkat kematangan level 3 (Proaktif)
44. Hibah pesantren;
45. Penyelenggaraan Jateng Bersholawat;
46. Insentif pengajar agama;
47. Insentif penghafal kitab;
48. Beasiswa luar dan dalam negeri untuk santri berprestasi;
49. Penyetaraan ijazah lulusan pesantren;
50. Identifikasi Madrasah Aliyah di Jawa Tengah.

3.4.7.2 Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah memiliki peran dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah memperoleh dukungan dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penguatan fungsi pengawasan DPRD yang diimplementasikan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Peningkatan tata kelola tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat secara efektif, yakni melalui penerapan sistem pelayanan terintegrasi berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan (SiPelawan). Pengembangan sistem pada tahun 2025 berfokus pada E-Wadul Dewan yang dapat diakses *real time*, lebih transparan, peningkatan keamanan, adanya integrasi dengan E-Aspirasi serta admin dapat memantau aduan dengan form pengajuan aduan yang lebih detail. Selain itu, terdapat pula pengembangan website E-Pengawasan dengan pemantapan alur pengaduan mulai dari input isu oleh staf, analisis oleh Tenaga Ahli, Tindak lanjut oleh PIC Komisi, Feedback dan Finalisasi, diakhiri dengan monitoring, audit, dan laporan akhir.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan, Sekretariat DPRD didukung anggaran Rp345.754.722.000,00 untuk melaksanakan **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD** dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 94,80%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi biaya penginapan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Program ini memiliki dua indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, yaitu Persentase layanan bagian humas dan Persentase fasilitasi penyusunan Raperda. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator telah tercapai. Hal tersebut karena Sekretariat DPRD telah melayani dan memfasilitasi dewan pada setiap triwulannya sehingga persentase layanan dan fasilitasi memiliki tingkat capaian 100%. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang fungsi pengawasan DPRD yang didukung digitalisasi proses. **Upaya** yang dilakukan yaitu pengembangan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses pengawasan, sehingga meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas fungsi pengawasan DPRD. **Manfaat** pelaksanaan program ini adalah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi dan pelayanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya baik dalam pelaksanaan penyusunan Raperda, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, maupun penghimpunan aspirasi dari masyarakat sehingga terjalin hubungan yang baik antara Anggota DPRD dan masyarakat.

Tabel 3.156 Capaian Kinerja Program Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

NO	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026)			TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
1	Persentase layanan bagian humas	%	95	95	100	95	95	100
2	Persentase fasilitasi penyusunan raperda	%	95	95	100	95	95	100

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD didukung 9 kegiatan, yaitu:

- Peningkatan Kapasitas DPRD bagian Humas** dengan **keluaran** 6 kali kegiatan seminar penyusunan RAPERDA Inisiatif, 5 kali kegiatan uji publik penyusunan RAPERDA Inisiatif, 16 kali fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Perda, dan pelaksanaan rencana strategis tahun 2025 dengan melaksanakan pengembangan *website* e-pengawasan dan e-wadul dewan, serta pengamanan jaringan *website* untuk meminimalisir risiko peretasan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa meningkatnya kualitas Raperda melalui masukan dan partisipasi aktif dari

masyarakat. **Manfaat** kegiatan ini yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan Raperda sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat. **Dampak** kegiatan ini yaitu terciptanya budaya partisipatif dalam penyusunan Raperda sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

2. **Pembahasan Kerja Sama Daerah** dengan **Keluaran** 12 dokumen Pembahasan Kerja Sama dengan media lokal baik cetak maupun elektronik. **Outcome** kegiatan tersebut berupa publikasi kegiatan DPRD secara informatif dan konstruktif. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik mengenai pelaksanaan kegiatan DPRD kepada masyarakat. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai lembaga representatif yang terbuka dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** dengan **keluaran** 23 dokumen Fasilitasi Penyusunan RAPERDA. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terfasilitasinya penyusunan Raperda oleh DPRD. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan Raperda melalui penyediaan dukungan administratif, teknis, dan koordinatif. **Dampak** kegiatan ini yaitu terbentuknya Raperda yang berkualitas dan aplikatif Sekretariat DPRD telah menindaklanjuti Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024 dengan melaksanakan Fasilitasi Bapemperda atas pengkajian terhadap Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD dengan memasukkan hasil rekomendasi DPRD agar segera dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah khususnya pada Bab XXI tentang pembahasan LKPJ.
4. **Pembahasan Kebijakan Anggaran** dengan **keluaran** 2 dokumen Pembahasan Kebijakan APBD TA. 2026 dan APBD Perubahan TA. 2025. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terwujudnya proses pembahasan dan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang tertib dan efektif. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses pelaksanaan penyusunan RKPD melalui dukungan administratif dan teknis yang terkoordinasi. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kinerja dan kredibilitas DPRD dalam melaksanakan fungsi penganggaran secara transparan dan akuntabel.
5. **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan **keluaran** 240 laporan Pengawasan oleh lima komisi, 2 dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta 20 Kajian Materi Strategis DPRD. **Outcome** kegiatan tersebut berupa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah melalui pelaksanaan pengawasan yang objektif dan profesional. Sekretariat DPRD telah menindaklanjuti Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024 dengan melaksanakan fasilitasi fungsi

pengawasan DPRD melalui Kegiatan Kunjungan Kerja Pengawasan Tematik Penanggulangan Kemiskinan.

6. **Peningkatan Kapasitas DPRD bagian Persidangan** dengan **keluaran** 6 Bimtek Kedewanan untuk masing-masing pimpinan dan anggota DPRD. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan kompetensi, pemahaman, dan profesionalisme anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. **Manfaat** kegiatan ini yaitu memperkuat kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga legislatif daerah. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
7. **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** dengan **keluaran** 24 laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD; dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD; dan 24 dokumen hasil Pelaksanaan Reses. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terfasilitasinya pelaksanaan fungsi representasi DPRD dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terciptanya komunikasi dua arah antara anggota DPRD dan masyarakat yang lebih konstruktif. **Dampak** kegiatan ini yaitu tersalurkannya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah.
8. **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** dengan **keluaran** 21 FGD oleh Badan Kehormatan DPRD; **Outcome** kegiatan tersebut berupa terfasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan internal DPRD dalam penegakan dan penerapan kode etik. **Manfaat** kegiatan ini yaitu mendukung kelancaran tugas Badan Kehormatan DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kode etik dan tata tertib DPRD. **Dampak** kegiatan ini yaitu terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, tertib, dan produktif melalui penerapan disiplin dan etika kelembagaan yang konsisten.
9. **Fasilitasi Tugas DPRD** dengan **keluaran** 33 dokumen fasilitasi tugas DPRD. **Outcome** kegiatan tersebut berupa terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan efisien. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan kinerja dan akuntabilitas DPRD melalui dukungan pelayanan administrasi dan teknis yang optimal. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya proses harmonisasi peraturan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, terdapat Raperda Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD Provinsi Jawa Tengah hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri disarankan untuk tidak dilanjutkan pembahasan dan penetapannya, karena cukup ditetapkan oleh masing-masing Direksi BUMD sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat pula Raperda Penyelenggaraan Sistem Pertanian yang perlu direkonstruksi ulang untuk selanjutnya dilakukan fasilitasi kembali; dan Raperda Perubahan kedua atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah yang ditarik sebagai langkah kehati-hatian dan wujud komitmen Sekretariat DPRD dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. **Upaya** yang dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan percepatan pembahasan kepada para pengusul serta melakukan koordinasi secara intens dan memperkuat komunikasi lintas sektor baik dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah maupun dengan Kementerian Dalam Negeri.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD dengan tingkat capaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.157 Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja	
		Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	2	100	9	100	100	Sangat Tinggi

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Forum Berlian Membangun; Forum Senayan Eling Jawa Tengah; dan Forum DPRD Kab/Kota.
2. Pengembangan E-Pengawasan sebagai transformasi digital dari pengawasan DPRD.

3.5 PERAN BUMD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUMD Jawa Tengah memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi bisnis sekaligus fungsi pelayanan publik, BUMD tidak hanya beroperasi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang merata bagi wilayah dan masyarakat Jateng. Berikut peran-peran kunci yang dijalankan BUMD:

1. Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

BUMD berkontribusi langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi melalui:

- a. Penyediaan pembiayaan UMKM dan sektor produktif
 - 1) PT BPD Jateng, berkomitmen terhadap pertumbuhan persentase proporsi Kredit Usaha Produktif terhadap seluruh Total Kredit Bank Jateng dengan Rencana Bisnis Bank Jateng tahun 2026 sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan capaian tahun 2024, porsi kredit produktif PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) tercatat sebesar 40,52% atau senilai Rp25,92 triliun dari total kredit yang disalurkan. Pada tahun 2025, kredit produktif meningkat menjadi 40,92% atau sebesar Rp26,28 triliun, dengan pertumbuhan 101,35% dibandingkan tahun 2024.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kredit konsumtif yang mengalami penurunan pada periode yang sama. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran fokus strategi penyaluran kredit Bank Jateng, yang semakin menitikberatkan pada pembiayaan sektor produktif, khususnya untuk mendukung penguatan UMKM di Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk tahun 2026, sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, kredit produktif Bank Jateng ditargetkan mencapai Rp28,80 triliun atau tumbuh sebesar 109,60% dibandingkan realisasi tahun 2025, dengan proyeksi porsi kredit produktif meningkat menjadi 42,01%. Capaian dan rencana tersebut menjadi bukti nyata bahwa prioritas Bank Jateng tidak lagi hanya bertumpu pada sektor konsumtif, tetapi semakin diarahkan pada penguatan sektor produktif sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3.158 Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif pada PT BPD Jateng 2024-2026 (dalam Juta)

No	Jenis Kredit	2024	2025		2026	
		Realisasi	Realisasi	Pertm	RBB	Pertm
1	Kredit Produktif	25.926	26.277	101,35	28.800	109,60
2	Kredit Konsumtif	38.051	37.932	99,69	39.750	104,79
JUMLAH		63.977	64.209	100,36	68.550	106,76

b) Pertumbuhan kredit tersebut juga didukung oleh:

i. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan tren yang terus menguat sebagai tulang punggung pembiayaan UMKM. Pada tahun 2024, realisasi KUR tercatat sebesar Rp8,36 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp8,78 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh sebesar 5,04%. Capaian ini menegaskan bahwa KUR tetap menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, sekaligus memperluas inklusi keuangan di daerah.

Ke depan, arah kebijakan perusahaan semakin menempatkan KUR sebagai motor utama ekspansi kredit produktif. Hal tersebut tercermin dari target tahun 2026 yang memproyeksikan penyaluran KUR mencapai Rp10,37 triliun, atau tumbuh signifikan sebesar 18,09% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Target ini tidak hanya merefleksikan optimisme terhadap prospek sektor UMKM, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam memperkuat peran intermediasi perbankan bagi pengembangan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

ii. Kredit Lapak Digital

Kinerja Kredit Lapak Digital pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari Rp2.469 pada tahun 2024 menjadi Rp120, atau turun sebesar 95,14%. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk tersebut masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha

digital, baik dari sisi skema pembiayaan, tingkat kemudahan akses, maupun efektivitas sosialisasi kepada pasar sasaran.

Untuk tahun 2026, penyaluran Kredit Lapak Digital direncanakan berada pada level yang relatif stabil, yaitu sebesar Rp117 atau turun tipis 2,50%. Proyeksi ini mencerminkan sikap kehati-hatian manajemen dalam mengembangkan segmen tersebut, sekaligus menjadi sinyal perlunya penataan ulang strategi pengembangan produk, agar ke depan Kredit Lapak Digital dapat kembali tumbuh secara lebih sehat, adaptif terhadap dinamika ekonomi digital, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap portofolio kredit produktif perusahaan.

iii. Kredit Startup

Kinerja Kredit Startup Millennial pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup tajam, dari Rp754 pada tahun 2024 menjadi Rp62 atau berkontraksi sebesar 91,78%. Kondisi ini mencerminkan masih tingginya tingkat risiko pada segmen usaha rintisan, baik dari aspek keberlanjutan bisnis maupun kelayakan pembiayaan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam penyaluran kredit pada sektor ini.

Meskipun demikian, manajemen tetap melihat adanya potensi pemulihan ke depan. Hal ini tercermin dari rencana tahun 2026 yang menargetkan penyaluran Kredit Startup Millennial sebesar Rp80 atau tumbuh 29,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Target tersebut menunjukkan komitmen perusahaan untuk kembali mengembangkan segmen ini secara lebih selektif, terukur, dan berbasis manajemen risiko, sehingga pembiayaan yang disalurkan tidak hanya mendorong inovasi dan kewirausahaan generasi muda, tetapi juga tetap menjaga kualitas portofolio kredit secara keseluruhan.

iv. Kredit Mitra Jateng 2025

Kredit yang memberikan kemudahan pada UMKM dari beban bunga karena Kredit Mitra 25 Bank Jateng hanya membebaskan bunga sebesar 7% per tahun. Kinerja Kredit KMJ25 pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari Rp22.500 pada tahun 2024 menjadi Rp8.908 atau turun sebesar 60,41%. Penurunan ini mencerminkan adanya fase penyesuaian dalam strategi penyaluran kredit, baik sebagai dampak dari perubahan kebijakan internal, dinamika permintaan pasar, maupun upaya perusahaan dalam memperkuat prinsip kehati-hatian di tengah meningkatnya risiko pembiayaan.

Meskipun demikian, manajemen tetap memandang segmen ini memiliki potensi untuk kembali tumbuh. Hal tersebut tercermin dari rencana penyaluran Kredit KMJ25 pada tahun 2026 yang ditargetkan meningkat menjadi Rp11.428 atau tumbuh sebesar 28,29% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Proyeksi ini menunjukkan optimisme yang

terukur, sekaligus komitmen perusahaan untuk mengembangkan Kredit KMJ25 secara lebih selektif, adaptif, dan berorientasi pada kualitas, sehingga ke depan produk ini dapat kembali memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap portofolio kredit produktif perusahaan.

Bahwa Kredit Lapak Digital, Kredit Startup dan Kredit Mitra Jateng 2025 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan pelaku UMKM lebih membutuhkan modal yang lebih besar sehingga beralih ke produk KUR dengan Bunga Super Mikro 3%, Mikro mulai 6% dan Kecil mulai 6%, dimana sejalan dengan program dari Pemerintah untuk kuota KUR setiap tahun dilakukan penambahan.

Tabel 3. 159 Jenis Kredit yang Mendukung Pertumbuhan Kredit pada PT BPD Jateng 2024-2026 (dalam Juta)

No	Jenis Kredit	2024	2025		2026	
			Realisasi	Pertm	RBB	Pertm
1	KUR	8.357.823	8.779.078	5,04	10.367.123	18,09
2	Kredit Lapak Digital	2.469	120	- 95,14	117	- 2,50
3	Startup Millenial	754	62	- 91,78	80	29,03
4	KMJ25	22.500	8.908	- 60,41	11.428	28,29
JUMLAH		8.383.546	8.788.168	4,83	10.378.748	18,10

2) PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah

- a) Capaian kredit produktif PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah cenderung tumbuh pada sektor produktif, dengan pertumbuhan kredit UMKM produktif sebesar Rp101,97 miliar dari tahun 2024 ke tahun 2025. Bahwa kredit produktif tahun 2025 yang dimiliki oleh PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah mencapai 67,77% dengan arti atas kehadiran PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah dapat menumbuhkan perekonomian di masyarakat Jawa Tengah.

Tabel 3. 160 Capaian Kredit Produktif PT BPR BKK (Perseroda)

Tahun	Kredit			
	Produktif	%	Non-Produktif	%
2025	6.127.898.289	67,77%	2.913.925.910	32,23%

Pada tahun 2026, PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah merencanakan peningkatan pertumbuhan kredit produktif yang difokuskan pada sektor-sektor strategis daerah, antara lain sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri pengolahan skala kecil dan menengah, serta sektor jasa produktif. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta mendukung program pembangunan dan prioritas ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

- b) Fokus pertumbuhan kredit tersebut didukung melalui pelaksanaan program kredit berbunga murah, antara lain Kredit Mikro BKK (KMB), serta penguatan sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk subsidi bunga. Program dimaksud meliputi Kredit Sanitasi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Water.org dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK) Provinsi Jawa Tengah, serta Kredit Pertanian yang didukung skema subsidi bunga bekerja sama

dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah.

3) PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

- a) Capaian Kredit Produktif PT BPR BKK Jateng (Perseroda) cenderung tumbuh dengan fokus pada sektor-sektor strategis yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, penyaluran kredit PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan perekonomian daerah. Hal ini tercermin dari komposisi kredit produktif yang mencapai 77,07% dari total portofolio kredit, sementara kredit nonproduktif tercatat sebesar 22,93%. Dominasi kredit produktif tersebut mengindikasikan fokus PT BPR BKK (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sektor pertanian, perdagangan, dan sektor produktif lainnya, sekaligus memperkuat peran BPR BKK sebagai lembaga keuangan daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 161 Capaian Kredit Produktif PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

NO	KETERANGAN	2024		2025		RBB 2026
		NOA	OSC	NOA	OSC	OSC
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredit Produktif	30.086	1.313.803.508	27.696	1.340.777.382	1.455.853.057
2	Kredit Konsumtif	8.241	355.186.012	8.239	398.856.404	348.941.867
	JUMLAH	38.327	1.668.989.520	35.935	1.739.633.787	1.804.794.924

- b) Kredit BKK Joglo, yang dilaksanakan melalui sinergi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya melalui Program Tuku Lemah oleh Omah dan Tuku Lemah Sak Omahe, telah terealisasi dengan total penyaluran sebesar Rp335 miliar kepada 4.120 debitur. Sedangkan pada tahun 2026 kredit BKK Jogja direncanakan sebesar Rp403 miliar. Program ini merupakan bentuk dukungan PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
- c) Kredit BKK Bahari merupakan program pembiayaan hasil sinergi PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang diperkuat melalui kerja sama penjaminan dengan pihak asuransi kapal nelayan. Program ini telah terealisasi dengan total penyaluran sebesar Rp13 miliar kepada 116 debitur, yang ditujukan untuk mendukung permodalan dan keberlanjutan usaha nelayan. Sedangkan pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.52 miliar atau sebesar 286,94% pertumbuhannya dari tahun 2025 ke 2026. Melalui skema ini, PT BPR BKK (Perseroda) berperan dalam meningkatkan akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan, memperkuat mitigasi risiko usaha nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir secara berkelanjutan di Jawa Tengah.

- d) Kredit BKK Agro merupakan program pembiayaan yang dilaksanakan melalui sinergi PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam pemanfaatan data komoditas pertanian sebagai dasar penyaluran pembiayaan yang lebih tepat sasaran. Program ini telah terealisasi dengan total penyaluran kredit sebesar Rp86 miliar kepada 2.186 debitur, yang ditujukan untuk mendukung permodalan usaha di sektor pertanian. Sedangkan tahun 2026 direncanakan dalam rencana bisnis sebesar Rp.148 miliar atau tumbuh sebesar 71,40% dari tahun 2025. Melalui Kredit BKK Agro, PT BPR BKK (Perseroda) berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong kesejahteraan petani di Jawa Tengah secara berkelanjutan.
- e) Kredit BKK Sinden merupakan program pembiayaan hasil sinergi PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam pengelolaan data UMKM Jawa Tengah serta pengembangan marketplace produk UMKM. Program ini telah terealisasi dengan total penyaluran kredit sebesar Rp149 miliar kepada 1.698 debitur, yang ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing produk UMKM, serta mendorong digitalisasi pemasaran UMKM di Jawa Tengah. Pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.194 miliar dengan pertumbuhan sebesar 30,45% dari tahun 2025.
- f) Kredit Mikro BKK merupakan program pembiayaan hasil sinergi PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyediaan pembiayaan berbunga rendah bagi pelaku UMKM, yang diperkuat melalui Program Inkubasi BKK. Program ini telah terealisasi dengan total penyaluran kredit sebesar Rp467 miliar kepada 13.247 debitur, yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan, memperkuat kapasitas usaha UMKM, serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah Jawa Tengah. Sedangkan ditahun 2026 direncanakan sebesar Rp.599 miliar dengan pertumbuhan sebesar 28,21% dari tahun 2025.

Tabel 3. 162 Jenis Kredit Produktif PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

NO	NAMA PRODUK	2024		2025		2026
		NOA	REALISASI	NOA	REALISASI	RBB
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredit Mikro Bkk	9.692	252.050.294.618	13.247	467.209.559.333	599.016.570.225
2	Kredit BKK Joglo	3.232	281.504.017.264	4.120	335.033.968.174	403.007.766.599
3	Kredit BKK Sinden	2.194	168.276.304.538	1.698	149.447.535.875	194.949.362.280
4	Kredit Agro	2.007	73.100.720.176	2.186	86.825.494.155	148.815.730.856
5	Kredit Bahari	75	14.285.380.998	116	13.528.327.908	52.346.982.510
JUMLAH		17.200	789.216.717.594	21.367	1.052.044.885.446	1.398.136.412.470

- b. Pembangunan infrastruktur energi dan utilitas (BUMD energi & air minum).
 - 1) PT JPEN:
 - a) Meningkatkan penggunaan energi hijau dengan pengembangan bisnis dengan PLTS yang saat ini telah digunakan di RSJD Amino Gondohutomo, Compressed Natural Gas (CNG) dan Electric Vehicle (EV) Charging station.
 - b) Pembuatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Cilacap, Kebumen, Kendal dan Rembang.
 - c) Program Desa Mandiri Energi.
 - 2) PT TUJT:

Pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional Bregas (Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal), SPAM Regional Keburejo (Kebumen dan Purworejo), SPAM Regional Petanglong (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan dan Batang), dan SPAM Regional Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan Karanganyar) untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah-daerah tersebut.
 - 3) PT SPJT:

Pembangunan dan operasional pabrik garam industri seluas 2,5 hektar di Pati dengan kapasitas output 25.000 ton/tahun untuk memenuhi kebutuhan garam industri Jawa Tengah.
 - 4) PT PRPP:

Penyediaan fasilitas MICE dan tempat wisata berupa Revitalisasi Grand Mae-rakaca bersinergi dengan PT. SPJT.
- c. Dukungan terhadap ekosistem pangan dan kebutuhan pokok melalui BUMD pangan.

PT JTAB telah berperan dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan antara lain dengan :

 - 1) SIMANIS MART
 - 2) KENDIL (Kendaraan Pengendali Inflasi)
 - 3) Green House cabai
 - 4) Gerakan Pangan Murah, Sembako Murah, dan Subsidi Rawan Pangan
 - 5) Optimalisasi Perkebunan Tloga (kopi, cengkeh, karet, dll)
 - 6) dengan Pengembangan Unit Pangan dengan beras ASN, AMDK Ceva, paket sembako
- d. Perputaran ekonomi yang dihasilkan BUMD meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi kabupaten/kota.

2. Mendukung Proram Prioritas Gubenur

Pemprov Jateng memiliki sejumlah program unggulan seperti pemberdayaan UMKM, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan peningkatan layanan publik. BUMD mendukungnya melalui:

- a. Penyaluran kredit murah bagi UMKM dan petani.
- b. Penyediaan pasokan pangan strategis untuk menjaga stabilitas harga dengan intervensi harga ketika terjadi gejolak.
- c. Perluasan layanan air minum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- d. Sinergi ini memastikan program pemerintah berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

3. Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai profit center, BUMD memberikan dividen dan bagi hasil, yang selanjutnya digunakan Pemprov untuk:

- a. Pembiayaan pembangunan daerah,
- b. Program sosial masyarakat,
- c. Penguatan fiskal daerah.
- d. BUMD yang sehat dan bertumbuh turut menambah ruang fiskal Pemprov untuk menjalankan agenda pembangunan.

4. Penyediaan Layanan Publik Berkualitas

Melalui BUMD yang bergerak di air minum, transportasi, maupun utilitas, masyarakat memperoleh layanan yang:

- a. Terjangkau,
- b. Berkualitas,
- c. Disediakan dengan standar pelayanan publik yang baik.
- d. BUMD menjadi alat Pemprov untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi merata hingga pelosok daerah.

5. Mendukung Transformasi Digital dan Tata Kelola Baik

BUMD menjadi pelopor dalam mendorong:

- a. Transformasi digital pelayanan,
- b. Transparansi,
- c. Good corporate governance (GCG),
- d. Pengembangan SDM berbasis kompetensi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, BUMD Jawa Tengah bukan hanya entitas usaha, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. BUMD hadir untuk:

- a. memperkuat ekonomi daerah,
- b. menghadirkan layanan publik berkualitas,
- c. mendukung program prioritas pemprov, serta
- d. memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang semakin profesional dan terintegrasi, BUMD Jateng akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berdayasaing.

3.6 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun kebijakan prioritas pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025. Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) prioritas daerah yang ditetapkan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Prioritas Daerah Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Untuk mendukung Prioritas Daerah tersebut, selama kurun waktu 2025, Gubernur telah mengambil langkah-langkah Kebijakan strategis untuk menyelesaikan masalah masyarakat dalam arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Kebijakan yang diambil untuk mendukung prioritas daerah tersebut meliputi Peraturan Gubernur sejumlah 18 (delapan belas) dokumen dan Keputusan Gubernur sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) dokumen. Selain itu untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang menjadi prioritas daerah juga diterbitkan 12 Surat Edaran Gubernur. Dalam rangka penyelesaian masalah yang menjadi prioritas daerah optimalisasi stakeholder melalui sinergisitas dan kerjasama menjadi penting untuk memastikan program prioritas daerah dapat terlaksana. Untuk mendukung hal tersebut, Gubernur telah menandatangani 61 dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerjasama secara teknis oleh masing masing Perangkat Daerah sesuai program masing-masing.

Untuk mewujudkan Prioritas Daerah Pertama yaitu "Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas" dijabarkan kedalam kebijakan prioritas yaitu Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM; Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi; Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*); Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan; Peningkatan iklim penanaman modal; Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif; Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; Penerapan

pembangunan ekonomi hijau (*green economy*); peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (*ultra mikro*), serta penciptaan lapangan kerja yang layak; peningkatan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman serta fasilitasi pengelolaan SPAM; pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan; Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah; peningkatan daya saing tenaga kerja; serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian.

Untuk mendukung Prioritas Daerah Pertama yaitu “Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas”, telah ditetapkan beberapa dokumen kebijakan strategis yaitu Peraturan Gubernur sejumlah 5 dokumen dan Keputusan Gubernur sejumlah 47, Surat Edaran Gubernur sejumlah 3 dokumen dan Kerjasama Daerah sejumlah 6 dokumen. Kebijakan strategis pada prioritas Pertama pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai berikut:

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG Mendukung PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS	TUJUAN/MASALAH YANG INGIN DISELESAIKAN
1	2	3
Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman	memberikan jaminan kepastian usaha untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Pergaraman
	2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah	meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat
	3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan

	4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu	Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu untuk penyelesaian atas semua permasalahan dalam budidaya tanaman Tebu dan/atau industri Gula berbasis Tebu di Provinsi Jawa Tengah
	5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Mewujudkan tertib administrasi laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/12 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	menjaga dan mengendalikan laju inflasi di Jawa Tengah
	7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/20 Tahun 2025 tentang Jenis Dan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	mendukung penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah
	8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/36 Tahun 2025 tentang Tim Verifikasi Dan Penilaian Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	Meningkatkan iklim investasi di Jawa Tengah melalui pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal
	9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/37 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Strategis Di Tingkat Produsen Dan Konsumen Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	mendukung pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah melalui intervensi harga di tingkat produsen dan konsumen melalui belanja subsidi harga pangan strategis
	10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/40 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Meningkatkan kemajuan daerah melalui pelaksanaan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
	11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan	Memberikan landasan hukum pemberian Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga

	Gubernur Jawa Tengah Nomor 516/45 Tahun 2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Puluh Lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
	12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/53 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Provinsi Jawa Tengah	Memberikan landasan hukum dalam rangka Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Provinsi Jawa Tengah
	13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/60 Tahun 2025 tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Mengendalikan dan mengawasi batas tarif air yang ditetapkan oleh Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
	14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/69 Tahun 2025 tentang Tim Penghapusan Piutang Daerah	melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang daerah non pajak dari Perangkat Daerah
	15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/100 Tahun 2025 Pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025- 2030	menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha, serta meningkatkan kehidupan pelaku bisnis, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah di wilayah Provinsi Jawa Tengah
	16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/110 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Sumber Energi Kepada Masyarakat Rawan Pangan Dan Gizi Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	mendukung pelaksanaan program penurunan angka ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) dan Prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah
	17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Memetakan dan merekomendasikan garis kebijakan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jawa Tengah	meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang

		terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien melalui Angkutan Aglomerasi Perkotaan
	19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/138 Tahun 2025 tentang Panitia Soloraya Great Sale Tahun 2025	mendorong munculnya potensi kawasan berdasarkan atas potensi Daerah dan regional, yang salah satunya yakni Kawasan Soloraya yang merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan melalui Kerja Sama Aglomerasi
	20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/141 Tahun 2025 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peingkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Tahap 1	Mengintervensi kesejahteraan masyarakat desa melalui bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah
	21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/147 Tahun 2025 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Mewujudkan sinergi kewilayahan dan pembangunan tata kelola Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah
	22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/148 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Merumuskan kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
	23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/152 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Di Tingkat Produsen dan Konsumen Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	mendukung pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah melalui intervensi harga di tingkat produsen dan konsumen melalui belanja subsidi harga pangan strategis
	24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/157 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Di Provinsi Jawa Tengah	mendukung pencapaian Asta Cita terkait swasembada pangan, perlu dilakukan penguatan Sistem Pangan Nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan upaya yang sistematis dan terpadu dalam mengarusutamakan penganekaragaman pangan

		berbasis potensi sumber daya lokal
	25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/165 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (Non Government Organization) Dan Lembaga Asing Di Provinsi Jawa Tengah	Mengawasi kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan tujuan dan fungsi serta keberadaan orang asing, Organisasi Non Pemerintah (Non Government Organization)
	26. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/166 Tahun 2025 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi Jawa Tengah	pelaksanaan penanganan konflik sosial di Daerah dapat dilaksanakan secara profesional, efisien dan terkoordinasi dengan baik antara Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah
	27. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/167 Tahun 2025 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	menangkal segala potensi pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini
	28. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/169 Tahun 2025 tentang Tim Uji Dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi	Memastikan kelaikan pembangunan dan keadaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	29. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/174 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Di Jawa Tengah	Meminimalisir adanya Premanisme Dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Di Jawa Tengah
	30. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/198 Tahun 2025 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah	Mengintervensi kesejahteraan masyarakat desa melalui bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah

	Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Tahap II	
	31. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/201 Tahun 2025 tentang Kawasan Perdesaan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	melakukan percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pembangunan Kawasan Perdesaan Lintas Kabupaten di Jawa Tengah, serta sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perdesaan guna mengurangi kemiskinan di Desa
	32. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/202 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah	mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan perluasan serta percepatan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja, pendapatan daerah, dan pembayaran di masyarakat secara nontunai yang berbasis digital
	33. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/223 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan atas Kontribusi Peningkatan Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Meningkatkan iklim investasi guna mendukung perkembangan perekonomian dan kesejahteraan di Jawa Tengah
	34. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/315 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah	Mendorong dan meningkatkan Kesedaran serta Kepatuhan masyarakat atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah untuk optimalisasi pendataan
	35. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/286 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan Atas Kemitraan Usaha Rantai Pasok Dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Mendorong sinergitas antar pelaku usaha khususnya dalam melibatkan peran Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Jawa Tengah
	36. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/334 Tahun 2025 tentang Pemenang Program Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah	mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, khususnya terkait agenda transformasi sosial

	(Blangkon JATENG) Award Tahun 2025	mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif, pelaksanaan Program Blangkon Jateng menjadi salah satu instrumen strategis yang diharapkan mampu mendorong optimalisasi potensi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) lokal serta memperkuat ekosistem digital dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
	37. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/347 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Derah Tahun 2025-2029	optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
	38. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/366 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Tahap III	Mengintervensi kesejahteraan masyarakat desa melalui bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah
	39. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/371 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Organik Dan Pangan Lokal Di Tingkat Konsumen Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	mendukung pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah melalui intervensi harga di tingkat produsen dan konsumen melalui belanja subsidi harga pangan strategis
	40. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/380 Tahun 2025 tentang Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2028	Memberikan landasasan hukum dan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan Pengupahan di Provinsi Jawa Tengah
	41. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/381 Tahun 2025 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025 – 2028	Memberikan landasasan hukum dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah

	42. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/436 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepatuhan Dan Keteladanan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Tuladha Jateng)	mewujudkan sikap kepatuhan dan menunjukkan keteladanan kepada masyarakat serta optimalisasi penerimaan Pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bentuk dari gerakan moral “Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah”, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan kepatuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya Pajak Kendaraan Bermotor
	43. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/405 Tahun 2025 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Tahap II	Mendukung pembangunan dan kemajuan Desa melalui Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan untuk menungjang pelayanan public yang lebih baik
	44. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/414 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan Atas Kontribusi Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Semester I Tahun 2025, Perusahaan Dengan Nilai Ekspor Tertinggi Tahun 2024 Dan Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Terbanyak Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Tengah	Mendorong kemajuan iklim investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah
	45. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/422 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Ngopeni	dalam rangka penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, perlu dilakukan penyesuaian kriteria penerima bantuan dan guna mengoptimalkan penyaluran Bantuan Jaminan Sosial
	46. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/434 Tahun 2025 tentang Jenis Dan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu	mendukung penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah

	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	
	47. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/435 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Di Tingkat Produsen Dan Konsumen Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	mendukung pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah melalui intervensi harga di tingkat produsen dan konsumen melalui belanja subsidi harga pangan
	48. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/440 Tahun 2025 tentang Pemenang Kontes Ternak Domba Ekstrem Dan Kambing Kaligesing Piala Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025	meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mendukung pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan
	49. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/447 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan Event Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2025	mendorong peningkatan kualitas dan daya saing penyelenggaraan event pariwisata di Jawa Tengah guna memberikan apresiasi kepada penyelenggara event yang berkontribusi nyata dalam pengembangan pariwisata
	50. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Penetapan Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
	51. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
	52. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/514 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2026	Memberikan kepastian dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang akurat dan mutakhir
	53. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/515 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah	Pembebasan pokok Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi

	54. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor B/900/272/2025 tentang Petunjuk Teknis Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Menunjang pencapaian dan tujuan dan sasaran program/kegiatan RPJMD melalui Belanja Hibah/ Bansos
	55. Surat Gubernur Jawa Tengah 500.5.2.14/0007569 tanggal 26 Agustus 2025 perihal Dukungan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Provinsi Jawa Tengah	Memberikan perlindungan bagi nelayan melalui perlindungan jiwa saat melakukan kegiatan penangkapan ikan
	56. Surat Edaran Nomor 500.7.2.4/000620 tanggal 17 Januari 2025 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Di Jawa Tengah	langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas penyediaan sumber protein hewani dan dampak kerugian bagi peternak
	57. Perjanjian Kerjasama Tentang Peningkatan Kerjasama Di Bidang Perikanan Laut Antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia Dan Departemen Kelautan Dan Perikanan Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok tanggal 24 Juni 2025	Sinergi Pengembangan Industri Perikanan dan Fasilitas Penunjangnya dan Promosi Perdagangan dan Investasi di Sektor Kelautan dan Perikanan
	58. Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Tengah Nomor PRJ-143/PJ/2025; PRJ-130/PK/2025; 100.3.7.1/206/2025 tanggal 9 September 2025	Optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing melalui kegiatan bersama
	59. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik dan 35 Kabupaten/Kota tanggal 20 Juni 2025 tentang Sinergitas Penyediaan Dan Pemutakhiran Data Dan/Atau Informasi Statistik Serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Penyediaan Dan Pemutakhiran Data Dan/Atau Informasi Statistik Serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah

	Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	
	60. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Nomor 100.3.7.1/143/2025; Nomor 100.3.7.1/2754/MU/2025 tanggal 15 Juni 2025 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kerjasama antar daerah dalam rangka Pembangunan Dan Pengembangan Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata serta Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	61. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100.3.7.1/140/2025; Nomor 120.23/KDH.178/KB-01/2025 tanggal 14 Juni 2025 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kerjasama antar daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pengembangan dan Pembangunan Ketahanan Pangan
	62. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 00.3.7.1/142/2025; Nomor G/406B.01/HK/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kerjasama antar daerah dalam Pembangunan Dan Pengembangan Ketahanan Pangan, Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata dan pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Prioritas Daerah Kedua yaitu "Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata" dijabarkan kedalam kebijakan prioritas yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, serta perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak; meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan prasarana sarana olahraga memadai dan terjangkau, serta pembinaan dan pelatihan atlet; Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda; meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital; meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender; meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan

kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, serta peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mendukung hal tersebut, selama tahun 2025 telah dikeluarkan dokumen kebijakan strategis yaitu Peraturan Gubernur sejumlah 2 dokumen dan Keputusan Gubernur sejumlah 50 dokumen, Surat Edaran Gubernur sejumlah 4 dokumen dan Kerjasama Daerah sejumlah 3 dokumen.

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG Mendukung PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS	TUJUAN/MASALAH YANG INGIN DISELESAIKAN
1	2	3
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren	peningkatan status dan kualitas Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren, Pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren
	2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Dokter Spesialis Keliling	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan spesialis dan guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan di desa yang belum terjangkau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, perlu adanya inovasi pelayanan publik dalam pemberian layanan kesehatan
	3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/34 Tahun 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025-2028	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah

	4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/75 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029	Mewujudkan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang lebih sehat
	5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah	meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting) serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi
	6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/89 Tahun 2025 tentang Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan Tahun Anggaran 2025	memberikan pelatihan yang berkualitas, tepat sasaran dan berhasil guna serta keberlanjutan aktualisasi di tempat kerja melalui Evaluasi pasca pelatihan
	7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/98 Tahun 2025 tentang Forum Anak Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2026	dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya melalui peningkatan hak partisipasi anak, perlu dibentuk Forum Anak yang dikelola anak dengan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan
	8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/99 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah	Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
	9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/105 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025 - 2030	menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah
	10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/106 Tahun 2025 tentang Penetapan Ny. Hj. Nawal Nur Arafah Yasin, M.S.I Sebagai Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2025 - 2029	mendukung terwujudnya budaya gemar membaca perlu menunjuk figur yang memiliki komitmen, perhatian dan empati yang sangat tinggi serta menjadi panutan

	50 (Lima Puluh) Dan 75 (Tujuh Puluh Lima) Kali Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	
	18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/175 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang	Optimalisasi upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang
	19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/182 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah	Melakukan upaya percepatan penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
	20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/184 Tahun 2025 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Pidana Perdagangan Orang	Optimalisasi upaya pencegahan dan penanganan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang
	21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/186 Tahun 2025 tentang Pemenang Lomba Gambar Tingkat Sekolah Dasar Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja Tingkat Sekolah Menengah Pertama Dan Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Rangka Hari Air Dunia XXXIII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Mendorong kreativitas dan kompetensi siswa melalui kegiatan Lomba Gambar Tingkat Sekolah Dasar Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja Tingkat Sekolah Menengah Pertama Dan Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Rangka Hari Air Dunia XXXIII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
	22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/189 Tahun 2025 tentang Pemenang Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	meningkatkan keaktifan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Jawa Tengah dan Pembinaan serentak dan menyeluruh serta apresiasi bagi pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas
	23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/190 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Atau Madrasah	meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat serta tanggap bencana
	24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/200 Tahun 2025 tentang Panitia Seleksi Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Peacemaker Justice Award 2025	Peacemaker Justice Award merupakan bentuk apresiasi bagi Kepala Desa dan Lurah yang telah berkontribusi dalam penyelesaian sengketa hukum melalui pendekatan Non Litigation guna membangun budaya hukum yang kuat, cepat dan berkeadilan

	25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/205 Tahun 2025 tentang Pemenang Lomba Peringatan Hari Keluarga Nasional XXXII Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah
	26. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/206 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini	mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif diperlukan kepedulian, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini
	27. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/282 Tahun 2025 tentang Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan teladan tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Mendorong peningkatan pelayanan publik di bidang Kesehatan
	28. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/283 Tahun 2025 tentang Pemenang Implementasi Integrasi Layanan Primer Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Dan Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	memberikan apresiasi guna peningkatan implementasi Pelayanan Kesehatan Primer
	29. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/284 Tahun 2025 tentang Penghargaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 dan untuk memberikan motivasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada program kesehatan daerah telah ditetapkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan salah satunya adalah kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
	30. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/296 Tahun 2025 tentang Penetapan Desa Terinofatif Dalam Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting	mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui upaya penurunan angka stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas

	Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	
	31. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030	meningkatkan kualitas pendidikan Pesantren dan guna mensinergikan pendidikan Pesantren dengan pembangunan pendidikan umum lainnya perlu adanya fasilitasi dan sinergitas pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan
	32. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/332 Tahun 2025 tentang Pemenang Lomba Sekolah Cerdas Pangan Tahun 2025	meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi anak sekolah dalam mewujudkan Pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pencegahan boros pangan
	33. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/333 Tahun 2025 tentang Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	memberikan motivasi dan penghargaan kepada pengelola Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantek Desa), dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pembina Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah
	34. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/344 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Kecamatan Berdaya	menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang Disabilitas dan pemuda kreatif
	35. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/349 Tahun 2025 tentang Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2030	Mendorong pengembangan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat
	36. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/353 Tahun 2025 tentang Tim Teknis dan Tim Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025	Menerapkan upaya bentuk perlindungan terhadap anak dengan menarik pekerja anak agar kembali ke dunia pendidikan serta penanganan anak tidak sekolah
	37. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/379 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tahun 2025	Mendorong daya kreativitas dan inovasi oleh masyarakat

	38. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/389 Tahun 2025 tentang Pelaksana Terbaik Aksi Kovergensi Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui upaya penurunan angka stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas
	39. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/392 Tahun 2025 tentang Top 10 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025	menumbuhkembangkan ekosistem inovasi dan melaksanakan pembinaan serta apresiasi kepada Perangkat Daerah
	40. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/393 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Jamban Keluarga di Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Meningkatkan gaya hidup sehat pada masyarakat Desa melalui Pembangunan Jamban Keluarga
	41. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/394 Tahun 2025 tentang Penghargaan Penurunan Prevalensi Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui upaya penurunan angka stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas
	42. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/397 Tahun 2025 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Memajukan dan melestarikan kebudayaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah
	43. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/416 Tahun 2025 tentang Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025	untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025
	44. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/430 Tahun 2025 tentang Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025 - 2028	Mendukung kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah
	45. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/452 Tahun 2025 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan perlindungan warisan Bangunan Cagar Budaya Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia masa

		lalu, perlu upaya perlindungan hukum
	46. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/453 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Cagar Budaya Candi Balekambang Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Peningkatan perlindungan warisan Struktur Cagar Budaya Candi Balekambang sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia masa lalu, perlu upaya perlindungan hukum
	47. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/454 Tahun 2025 tentang Penetapan Bangunan Cagar Loji Manggoran Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Peningkatan perlindungan warisan Bangunan Cagar Budaya Loji Manggoran sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia masa lalu, perlu ada upaya perlindungan hukum
	48. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/446 Tahun 2025 tentang Pemenang Lomba Poster Pelajar Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Se-Jawa Tengah Dalam Rangka Peringatan Hari Agraria Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Mendorong dan mengembangkan kreativitas generasi muda melalui kegiatan Lomba Poster Pelajar Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Se-Jawa Tengah Dalam Rangka Peringatan Hari Agraria Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
	49. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/451 Tahun 2025 tentang Pelaksana Terbaik Pembinaan Program Kesehatan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan di Tempat Fasilitas Umum, Tempat Pengolahan Pangan dan Pemeriksaan Kualitas Air Minum di Jawa Tengah
	50. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/466 Tahun 2025 tentang Peringkat Terbaik Pengembangan Kompetensi Jawa Tengah Awards Tahun 2025	Mendorong peningkatan pengembangan kompetensi ASN
	51. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/471 Tahun 2025 Penerima Anugerah Kebudayaan Jawa Tengah Tahun 2025	Memberikan penghargaan kepada aktifis budayawan Jawa Tengah

	52. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/472 Tahun 2025 tentang Tim Panitia Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri Di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan	Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program studi lanjut luar negeri
	53. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.7/0000929 tentang Persiapan Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Di Hari Ulang Tahun	Mewujudkan masyarakat yang sehat dan mengantisipasi faktor risiko penyakit menular dan tidak menular dari bayi sampai dengan lanjut usia
	54. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.7/00004246 tentang Dukungan Terhadap Program Gubernur Jawa Tengah "Layanan Dokter Spesialis Keliling"	meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan spesialisik bagi masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan dan daerah yang kekurangan tenaga Dokter Spesialis
	55. Surat Edaran Nomor 100.3.4/459/2025 tentang Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah	Memperkuat sistem merit berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta mendukung peningkatan Indeks Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah
	56. Surat Edaran Nomor 400.10.2/0004464 TAHUN 2025 tentang Kecamatan Berdaya	program intervensi yang menjadikan kecamatan sebagai pusat aktivitas dalam bentuk Kecamatan Berdaya untuk peningkatan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat
	57. Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan ementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 100.3.7.1/15/125/2025 dan Nomor 017/Men/KL.01/04/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Percepatan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Jawa Tengah	Sinergi Percepatan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Jawa Tengah
	58. Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 1015/KPTA.W11-A/HM1/V/2025; Nomor 100.3.7.1/133/2025 tanggal 22 Maret 2025 tentang Percepatan Layanan Hukum	Upaya percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat antara lain perempuan dan anak

	Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan	
	59. Nota Kesepakatan Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 014/D/KS.00.00/2025 Nomor: 100.3.7.1/210/2025 tanggal 18 September 2025 tentang Dukungan Penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Transformasi	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada siswa Sekolah Menengah Atas

Kemudian prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah Ketiga yaitu “Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan”, dijabarkan dalam Kebijakan Prioritas yaitu peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif; Meningkatkan ketahanan sumber daya air; dan Menurunkan risiko bencana. Untuk mendukung hal tersebut telah diterbitkan beberapa kebijakan strategis dalam kurun waktu Tahun 2025 berupa Peraturan Gubernur sejumlah 4 dokumen, Keputusan Gubernur sejumlah 27 dokumen, 3 dokumen Surat Edaran Gubernur dan 2 dokumen Kerjasama Daerah.

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG Mendukung PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS	TUJUAN/MASALAH YANG INGIN DISELESAIKAN
1	2	3
Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029	sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam sustainable development goals melalui pembangunan sanitasi
	2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Industri Hijau	meningkatkan partisipasi aktif dalam gerakan lingkungan, mendorong perubahan perilaku, kesadaran terhadap isu lingkungan melalui penerapan prinsip Industri berkelanjutan
	3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun	mendukung peran Sumber Daya Air sebagai penopang sistem kehidupan

	2025 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Daerah	dan modal pembangunan yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah
	4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Dieng Tahun 2026-2036	memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan aksi-aksi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan budaya, serta pembangunan daerah khususnya daerah Kawasan Dataran Tinggi Dieng
	5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029	Menetapkan garis kebijakan dan arahan terhadap pengelolaan sumber daya air provinsi Jawa Tengah
	6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan Tahun 2025	Meelakukan pengendalian terhadap Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
	7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/22 Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Mardi Rahayu Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B)	Memberikan kepastian hukum kelayakan lingkungan hidup atas Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Mardi Rahayu Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah
	8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/22 Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Sepatu Oleh Pt. Long Well International Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah	Memberikan kepastian hukum kelayakan lingkungan hidup atas Rencana Kegiatan Industri Sepatu Oleh Pt. Long Well International Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
	9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/42 Tahun 2025 tentang Tim Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jawa Tengah Periode 2025 - 2029	Menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik di Provinsi Jawa Tengah guna pembangunan pertanian daerah

	10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/56 Tahun 2025 Tentang Tim Juri Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Mendorong Keterlibatan Kaum Muda untuk Menciptakan Masa Depan yang Lebih Baik
	11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/61 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Dan Bunga Kredit Air Minum Dan Sanitasi Di Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	Memberikan insentif dan kemudahan pelayanan berupa Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Dan Bunga Kredit Air Minum Dan Sanitasi Di Provinsi Jawa Tengah
	12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029	menjamin pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah secara terpadu
	13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/128 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah	mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/129 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan Desa Mandiri Energi Dan Penghargaan Gerakan Hemat Energi Dan Air Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Mendorong masyarakat desa untuk mengupayakan mandiri energy dan gerakan hemat energi dan air
	15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/132 Tahun 2025 tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Prov Jateng Periode Th.2025-2029	Memperkuat sumber daya pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah peduli lingkungan dan tanggap bencana
	16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/145 Tahun 2025 tentang Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan optimalisasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah

	17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/171 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Mangrove Muara Pemali Brebes	Menjaga kelestarian lingkungan berupa ekosistem Mangrove Muara Pemali Brebes
	18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/177 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penuntasan Sampah Di Jawa Tengah	Mempercepat upaya penuntasan sampah di Jawa Tengah
	19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/178 Tahun 2025 tentang Penerimaan Piagam Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Penyelamat, Pembina Dan Pengabdian Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembinaan dan pengabdian lingkungan hidup
	20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/187 Tahun 2025 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	meningkatkan peran aktif warga sekolah untuk mewujudkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
	21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/220 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah	Memberikan pedoman terhadap pelaksanaan percepatan upaya penuntasan sampah di Jawa Tengah
	22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/285 Tahun 2025 tentang Pemenang Lomba Kinerja Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Pengamat	Mendorong peningkatan kualitas kinerja Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
	23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/287 Tahun 2025 tentang Pemenang Penghargaan Wana Lestari Kategori Kelompok Masyarakat Peduli API Tingkat	Mendorong masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya pada ekosistem hutan

	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	
	24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/372 Tahun 2025 tentang Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah	Upaya untuk memperkuat dan mempercepat penerapan Standar Industri Hijau sebagai standar pembangunan berkelanjutan
	25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/387 Tahun 2025 tentang Tim Gabungan Inventarisasi Sumur Minyak Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah	mendukung upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi melalui skema kerja sama produksi Sumur Minyak Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi/Usaha Mikro Kecil Menengah
	26. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/395 Tahun 2025 tentang Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah	memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan energi daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu serta selaras dengan kebijakan energi nasional dan kebutuhan daerah
	27. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/408 Tahun 2025 tentang Struktur Keanggotaan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Cuaca Ekstrem Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025/2026	mengantisipasi dampak banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem perlu mengambil langkah-langkah diantaranya membentuk struktur Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah
	28. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/409 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Cuaca Ekstrem Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025/2026	mengantisipasi terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem serta mengantisipasi dampak cuaca ekstrem di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana di Provinsi Jawa Tengah
	29. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/448 Tahun 2025 tentang Penerima Apresiasi Inovasi Program Komunitas Iklim Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan

	30. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/455 Tahun 2025 tentang Rencana Alokasi Air Tahunan Wilayah Sungai Pemali Comal Tahun 2025-2026	mendukung operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air di wilayah Sungai Pemali Comal, perlu menetapkan Rencana Alokasi Sumber Daya Air Tahunan
	31. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.4.1/0007086 Tahun 2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Antisipasi Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2025	mengantisipasi potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2025 di Kabupaten/Kota
	32. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 300.2/0008913 Tahun 2025 tanggal 30 September 2025 tentang Kesiapsiagaan Daerah Dalam Menghadapi Potensi Bencana Pada Musim Penghujan di Jawa Tengah Tahun 2025/2026	menantisipasi Potensi peningkatan resiko terjadinya bahaya hidrometeorologi seperti banjir, genangan, tanah longsor, angin kencang, serta penyakit terkait kelembaban tinggi
	33. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.4.1/0007086 Tahun 2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Antisipasi Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2025	mengantisipasi potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2025 di Kabupaten/Kota
	34. Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inversi dan Inovasi di Provinsi Jawa Tengah Nomor 49/I/KS/07/2025 dan 100.3.7.1/167/2025 tanggal 2 Mei 2025	bentuk sinergi dalam pengembangan penelitian serta intervensi dan inovasi pada sektor energi di Provinsi Jawa Tengah dengan fokus basis Data Potensi dan implementasi EBT yang valid di Jawa Tengah, terbangunnya platform monitoring digital infrastruktur EBT, permodelan energi daerah untuk penyusunan RUED yang lengkap dan komprehensif
	35. Kerjasama Mitra Praja Utama Nomor 02/PKS/MPU/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	sinergitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, relawan dan saran prasarana pada status keadaan tanggap darurat bencana dan penyelenggaraan peningkatan kemampuan mitigasi bersama dalam mengurangi resiko terhadap ancaman bencana.

Dalam rangka mendukung “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih

adaptif dan kolaboratif” sebagai Prioritas Keempat pembangunan dijabarkan dalam Kebijakan Prioritas untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi. Selain itu kebijakan prioritas juga diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur telah mengambil beberapa kebijakan strategis melalui penetapan Peraturan Gubernur sejumlah 7 dokumen dan Keputusan Gubernur sejumlah 21 dokumen, Surat Edaran Gubernur sejumlah 2 dokumen, dan 50 dokumen Kerjasama Daerah.

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS	TUJUAN/MASALAH YANG INGIN DISELESAIKAN
1	2	3
Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk berbasis teknologi informasi
	2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah
	3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026	memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
	4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang	mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, profesional efektif

	Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	dan efisien berdasarkan upaya penyederhaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, perlu penyesuaian mekanisme kerja antara Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah
	5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	meningkatkan kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme penegakan aturan penyampaian laporan harta kekayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan	mewujudkan tata kelola pemeritahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik
	7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip Serta Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis	Mewujudkan pengelolaan Arsip Dinamis yang efektif dan efisien serta sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip
	8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/5 Tahun 2025 tentang Rencana Program Dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Memetakan potensi kerja sama daerah dalam rangka menjalin sinergi dengan multi pihak guna bersama sama membantu pembangunan daerah
	9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/7 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tumpang tindih, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/19 Tahun 2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektorl Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Dalam E-Walidata Sistem Informasi	mendukung pelaksanaan keterisian data dan tata kelola penyelenggaraan Data Statistik Sektorl Daerah, perlu dilakukan penyebarluasan Data Statistik

	Pemerintahan Daerah Republik Indonesia	Sektoral Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah
	11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/67 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah	mendukung percepatan pembangunan Daerah perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan akselerasi program prioritas pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah
	12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/74 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	mengantisipasi usulan perubahan dan guna kelancaran standardisasi harga satuan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah
	13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/76 Tahun 2025 tentang Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Yang Mengatur Desa	Meningkatkan tata kelola fasilitasi penyusunan produk hukum Daerah Kabupaten Yang Mengatur Desa
	14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/104 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Mengukur Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/115 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Meningkatkan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Jawa Tengah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik
	16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/125 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah	agar pengumpulan data dan pengukuran perkembangan demokrasi di Provinsi Jawa Tengah melalui Indeks Demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi serta dilakukan secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan secara substansi sesuai dengan kondisi riil di Daerah
	17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/131 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Pencegahan Korupsi	Memperkuat upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025

	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025	
	18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/134 Tahun 2025 tentang Tim Pencepatan Penetapan Kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Mempercepat upaya penataan kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/158 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pos Komando Terpadu Penyelenggaraan Manunggal Leadership Retreat Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah	Melancarkan pelaksanaan kegiatan Manunggal Leadership Retreat Leadership Untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah agar berdayaguna dan berhasilguna
	20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/277 Tahun 2025 tentang Tim dan sekretariat Tim pengelola "Rumah Rakyat" Jawa Tengah	Mendukung pelaksanaan program Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik dan guna mewujudkan pelayanan prima yaitu pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur
	21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/411 Tahun 2025 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Mengoordinasikan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan kebijakan dan arah yang telah ditetapkan
	22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/413 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025	mendorong pemanfaatan hasil riset sekaligus pemberian apresiasi bagi para periset yang memiliki kontribusi bagi pembangunan Jawa Tengah
	23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/433 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan Terbaik Di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	meningkatkan motivasi dan pemberian apresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang merupakan salah satu indikator dalam Penilaian Reformasi Birokrasi
	24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/442 Tahun 2025 tentang Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran	menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan

	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip Perangkat Daerah secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin keutuhan, autentisitas dan keamanan arsip tekstual dan arsip elektronik
	25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/443 Tahun 2025 tentang Tim Penyelesaian Administrasi Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	mendukung tertib administrasi pelaksanaan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Administrasi Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	26. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/450 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah	Mendukung pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperluas akses layanan informasi hukum kepada masyarakat
	27. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/476 Tahun 2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia	Mendukung sistem informasi Pemerintahan Daerah melalui Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
	28. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/528 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2025	Mendorong inovasi daerah di Provinsi Jawa Tengah
	29. Surat Edaran Nomor: S/000.9.14/93/2025 Tentang Dukungan Pelaporan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	Mendukung capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025
	30. Surat Nomor B/800.2.4/477/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Percepatan Pengembangan Kompetensi Digital ASN	Mendukung pemutakhiran data kompetensi dengan mengunggah sertifikat pelatihan (atau surat keterangan kelulusan pelatihan), terutama pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi

		digital yang dimungkinkan diperoleh melalui Pelatihan Teknis, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir
	31. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik Nomor 100.3.7.1/15/PKS/011.3/2025 tanggal 30 Januari 2025	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi
	32. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Ombudsman RI 08/ORI-MOU/V/2025; Nomor 100.3.7.1/127/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	33. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-98/M.3/Es/12/2025 Nomor: 100.3.7.1/237/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Kerjasama Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana	Sinergi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana dengan adanya KUHP baru
	34. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BRIN Nomor: 49/I/KS/07/2025 Nomor: 100.3.7.1/167/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan Serta Inovasi Dan Inovasi Di Provinsi Jawa Tengah	Sinergi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan Serta Inovasi Dan Inovasi Di Provinsi Jawa Tengah
	35. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 45 Perguruan Tinggi se Jawa Tengah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanggal 17 Maret 2025 dan 19 Agustus 2025	Kolaborasi dengan 45 Perguruan Tinggi se Jawa Tengah melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk pembangunan Daerah

3.7 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

3.7.1 REKOMENDASI UMUM

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI UMUM

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
1	Rekomendasi: LKPJ sebagai <i>progress report</i> penyelenggaraan pembangunan tahunan (pertanggungjawaban atas RKPD/APBD) Tahun 2024 dalam kerangka pembangunan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sehingga harus diketahui betul sejauh mana pelaksanaan pembangunan tetap on the track, atau mencapai target/ indikator pembangunan. Dalam hal ini, realisasi pembangunan tahun 2024 selain menyandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) juga perlu menggambarkan keterjangkauan/pencapaian kinerja dibandingkan dengan target tahun akhir RPD yakni 2026 sehingga upaya perbaikan bisa di akselerasi dan fokus pencapaian target. Persandingan ini tidak hanya pada indikator makro Pembangunan atau tujuan sasaran, namun juga pada Tingkat indikator urusan pemerintah daerah yang diampu oleh masing masing perangkat daerah. Tindaklanjut: Dokumen LKPJ TA. 2025 telah menyandingkan capaian akhir RPD 2024-2026 baik pada tingkat ketercapaian tujuan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah serta indikator program dan kegiatan urusan pemerintahan kewenangan provinsi.	Peningkatan kualitas dokumen LKPJ
2	Rekomendasi: Terkait dengan penyajian substansi laporan dalam LKPJ tidak sebatas normatif mengikuti sistematika dan amanat dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun juga dapat dikembangkan/ dielaborasi serta diperkuat analisis dan dukungan data-data nya, sehingga dalam LKPJ dapat menggambarkan secara komprehensif terkait kinerja pemerintah daerah, alasan tercapai atau tidak tercapai suatu target kinerja tidak hanya menyajikan angka angka realisasi. Sehingga DPRD dan masyarakat yang membaca dapat memahami secara utuh, sebab akibat dan data pendukung tercapainya setiap indikator kinerja. Misalnya dalam menggambarkan kinerja Kesehatan, maka elaborasi dan analisis dukungan data terkait stunting, angka kematian ibu, ketersediaan fasilitas Kesehatan perlu dijelaskan. Tindaklanjut: Indikator program dan kegiatan yang belum mencapai target telah diberikan narasi alasan dan faktor penyebab ketidaktercapaiannya target indikator tersebut, serta terhadap indikator-indikator yang tingkat ketercapaiannya jauh melampaui target telah juga disampaikan langkah strategis maupun inovasi yang mendukung. Terhadap kinerja kesehatan telah disampaikan deskripsi terkait stunting, angka kematian ibu, dan ketersediaan fasilitas kesehatan pada BAB III prolog urusan kesehatan.	Peningkatan kualitas dokumen LKPJ
3	Rekomendasi: Aspek kinerja pemerintah daerah tidak hanya menyandingkan target dengan realisasi pada tahun evaluasi, perlu juga menyandingkan dengan daerah sekitar, seperti provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa sehingga	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI UMUM

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	terlihat positioning kinerja Jawa Tengah secara kewilayahan, indikator apa yang perlu mendapatkan upaya akselerasi. Tindaklanjut: Dalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 terhadap aspek kinerja pemerintah daerah telah disandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai upaya untuk mempercepat akselerasi Pembangunan di Jawa Tengah.	
4	Rekomendasi: DPRD dan Kepala Daerah adalah aktor Pembangunan yang masing-masing memiliki peran sentral sesuai dengan kewenangannya sehingga sebagai upaya memastikan Rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, perlu memastikan dan mengatur dalam regulasi dalam hal ini Tata Tertib DPRD, agar setelah pansus selesai dan menghasilkan rekomendasi, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. <u>SEKRETARIAT DPRD</u> Tindaklanjut TA 2025: Telah dibuat: 1) Surat Nota Dinas Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 100.1.7/63/UMUM/VI/2025 hal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah 2) Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.1.7/448/2025 hal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2024 kepada Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai langkah untuk memastikan rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024 dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil rekomendasi DPRD oleh Perangkat Daerah
5	Rekomendasi: Hasil rekomendasi Pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 ini selanjutnya akan diberikan kepada alat kelengkapan DPRD khususnya Komisi-Komisi agar mengawal, memonitoring dan memastikan setiap rekomendasi yang telah dihasilkan dapat dipantau tindak lanjutnya dengan masing masing mitra perangkat daerah melalui rapat kerja, pengawasan maupun kunjungan kerja dalam tahun perencanaan. <u>SEKRETARIAT DPRD</u> Tindaklanjut TA 2025: Telah dibuat: 1) Surat Nota Dinas Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 100.1.7/63/UMUM/VI/2025 hal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil rekomendasi DPRD oleh Perangkat Daerah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024**REKOMENDASI UMUM**

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	2) Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.1.7/448/2025 hal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2024 kepada Ketua Komisi A, B, C, D, dan E DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman komisi melakukan monitpring untuk memastikan rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024 dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.	

3.7.2 REKOMENDASI SEKTORAL PEMBANGUNAN DAERAH

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024 REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
A. TERHADAP KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI (Leading Sector Bappeda Bidang Perekonomian dan Biro Perekonomian)		
	Rekomendasi: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari 2022 ke 2024 mengalami penurunan/pelambatan dan berada dibawah capaian Nasional. Disisi lain, belum ada perbandingan dengan (minimal dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa sehingga terlihat <i>positioning</i> Ekonomi Jawa Tengah secara kewilayahan.	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEREKONOMIAN</u> Tindaklanjut TA 2025: - Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah; - Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar; - Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas; - Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai; - Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran; - Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada green jobs dan green investment dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; - Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital Tindaklanjut TA 2026: - peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi	- Mengendalikan angka inflasi - Meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja - Membangun ekonomi hijau dan ekonomi syariah - meningkatkan kontribusi PDRB - Penguatan kebijakan berwawasan lingkungan - Penguatan kebijakan berbasis desa dan kelembagaan - meningkatkan pertumbuhan penanaman modal

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	kreatif, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; 2) peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM); 3) peningkatan produksi Penguatan pembinaan pertambangan dengan penerapan Good Mining Practice; 4) penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung produktivitas pertanian) 5) Penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 6) Peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim; 7) harmonisasi kebijakan dan tata kelola lintas sektor penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; 8) Penguatan upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan; 9) Peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM; 10) peningkatan pertumbuhan penanaman modal; 11) peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan; 12) peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah; 13) peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 14) peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana; 15) peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana; 16) peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa; 17) mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi; 18) penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa; 19) mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan; 20) peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta 21) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.	
2	Rekomendasi: Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minimum sebesar 10,03 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,56 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 9,15 persen. Perlu penekanan pada sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>BAPPEDA BIDANG PEREKONOMIAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Pada Kontribusi Sektor Akomodasi makan dan minum (Pariwisata) terus mengalami peningkatan pasca pandemi: 3,29% (2022), 3,40% (2023), 3,56% (2024) dan 3,69% (s.d. TW III 2025) Adapun Upaya yang dilakukan di th 2025 untuk peningkatan Kontribusi Sektor Akomodasi Makan Minum: 1) Pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat Desa Wisata; 2) Penguatan promosi pariwisata berbasis digital dan konvensional serta pemasaran pariwisata melalui online dan offline travel agent; 3) Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata; 4) Penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital; 5) Peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinas wisata; 6) Penguatan integrasi antardestinas wisata; 7) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata; 8) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; 9) Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional untuk mendukung Aksesibilitas Wisata Tindaklanjut TA 2026: Upaya yang dilakukan di th 2026 untuk peningkatan Kontribusi Sektor Akomodasi Makan Minum 1) Membangun 1000 Desa Wisata/Kampung Wisata Baru; 2) Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya Dan Religi Berdasarkan Potensi Wilayah 3) Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Global Dengan Prioritas: Borobudur, Kopeng, Rawa Pening; 4) Pengembangan Sport Tourism (Event Memancing Terbesar Di Asia); 5) Pelatihan 1000 Konten Kreator Desa Wisata; 6) Pengembangan Wisata Ramah Muslim Jawa Tengah; Penyelenggaraan dan Fasilitasi event unggulan Pariwisata	Meningkatnya kontribusi PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum
	<u>BIRO PEREKONOMIAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Sebagai Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, Biro Perekonomian melakukan: • Koordinasi dalam rangka penekanan terhadap sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan, agar ditingkatkan dan di pertahankan. • Sektor penyedia akomodasi makan minum perlu didorong dengan optimalisasi potensi wisata.	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata, makan minum, serta informasi dan komunikasi

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	• Perbaikan infrastruktur dan promosi wisata lokal (Pengembangan wisata ramah muslim). • Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah. • Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening. • Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata, sektor informasi dan komunikasi dengan perluasan akses internet yang lebih merata serta jasa Perusahaan dengan inovasi dan digitalisasi di Perusahaan-perusahaan lokal.	
3	Rekomendasi: Penguatan kebijakan dan daya dukung perekonomian inklusif yang fokus pada penguatan kelembagaan (<i>Capacity Building</i>) didukung inovasi, transformasi digital. <u>BAPEDA BIDANG PEREKONOMIAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Salah satu kebijakan dalam peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan adalah dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah melalui: 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM; 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi; 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (<i>food loss and waste</i>); 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan; 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis <i>green investment</i>, pengembangan kawasan industri/ kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah; 6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif; 7) Peningkatan ketengraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah dan 8) Penerapan Pembangunan ekonomi hijau yang diawali dengan perumusan kebijakan sebagai bagian dalam penyusunan roadmap Pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, untuk pengendalian inflasi terdapat penguatan kapasitas TPID dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.	Penguatan kebijakan dan daya dukung perekonomian inklusif

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>BRIDA</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Pelaksanaan lomba Kreativitas dan Inovasi dan penjangkaran Inovasi Masyarakat dalam rangka meningkatkan budaya riset dan inovasi di masyarakat Jawa Tengah: 1. Memfasilitasi proses transformasi ide menjadi solusi yang dapat diimplementasikan; 2. Hilirisasi serta diseminasi alat-alat inovasi tepat guna yang dapat membantu menyelesaikan masalah; 3. Memfasilitasi para investor di masyarakat.	Meningkatnya budaya kreativitas dan inovasi masyarakat di Jawa Tengah
	<u>DISKOMINFO</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan. Salah satunya dengan melakukan transformasi digital yang dilakukan melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara digital (seperti dalam pelayanan informasi, hubungan antar media, penguatan kapasitas SD dan, penguatan tata Kelola Komisi Informasi); pengelolaan aplikasi informatika (seperti melalui penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra PD, pengelolaan pusat data, pengembangan aplikasi khusus sesuai arsitektur dan rencana SPBE Pemda) serta penyelenggaraan statistic sektoral (seperti peningkatan kapasitas kelembagaan statistic sektoral, dan penguatan kapasitas SDM).	Pengembangan kelembagaan ekonomi digital
4	Rekomendasi: Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui:	
a	Rekomendasi: Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan	
	<u>DISPERINDAG</u> Tindaklanjut TA 2025: Dalam rangka memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah dalam menciptakan ekosistem industri yang berkualitas, kompetitif, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai program strategis antarlain: 1. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Industri melalui (a) Pelatihan dan penyaluran SDM untuk industri tekstil dan alas kaki; (b) Pengembangan inkubasi bisnis untuk startup digital; (c) Fasilitasi layanan kemasan dan pengujian alat ukur produksi; (d) Pengujian komoditi makanan dan minuman untuk menjamin mutu. 2. Penguatan UMKM dan Pasar Rakyat melalui (a) Bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat; (b) Perluasan pemasaran	• Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri unggulan. • Peningkatan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja industri. • Meningkatkan jumlah wirausaha baru yang memenuhi standar mutu dan standardisasi produk.

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	produk UMKM melalui e-commerce; (c) Pelatihan manajemen mutu, teknis produksi, dan pengelolaan sentra IKM. 3. Pengembangan Wirausaha Baru (WUB) melalui (a) Bimbingan produksi dan pengelolaan usaha bagi WUB agro dan non-agro; (b) Pelatihan pengelolaan bisnis dan pendampingan diversifikasi produk; (c) Penerapan standardisasi, sertifikasi produk, dan sistem mutu. 4. Promosi dan Temu Bisnis melalui (a) Promosi produk industri agro dan non-agro Jawa Tengah; (b) Pelaksanaan temu bisnis dan pembinaan SDM industri hasil tembakau menengah. 5. Fasilitasi dalam Sertifikasi dan Legalitas melalui fasilitasi sertifikat TKDN-IK, pendaftaran HKI, dan sertifikasi SNI atau sistem manajemen lingkungan. 6. Optimalisasi Kawasan Industri melalui (a) Pengawasan, pendampingan, dan verifikasi perizinan tenant dan pengelola kawasan industri; (b) Pemenuhan pelaporan ke SIINas sebagai prasyarat ekspor-impor; (c) Koordinasi lintas OPD (DPMPTSP, DLHK, Dinas Perhubungan) untuk investasi, pengawasan limbah, dan penyesuaian kebijakan lalu lintas/tata ruang. 7. Peningkatan Layanan dan Teknologi melalui (a) Penerapan ISO 9001:2015 untuk standar pelayanan teknis; (b) Penyediaan layanan mesin produksi tepat guna bekerja sama dengan UNDIP; (c) Penguatan akses bahan baku dan pengembangan akses pasar serta kemitraan sentra IKM. 8. Dukungan Ekspor melalui (a) Pengembangan bank data pelaku ekspor-impor; (b) Pelatihan manajemen ekspor dan penyusunan market brief; (c) Forum informasi pasar luar negeri dan one-on-one meeting dengan Perwadag RI. Pengawasan Distribusi Barang melalui Pengawasan pelabelan bahan berbahaya, SNI, label, dan masa kedaluwarsa. Tindaklanjut TA 2026: Peningkatan Kuantitas dan Kualitas baik produk dan SDM pelaku usaha	• Meningkatkan akses pelaku industri terhadap bahan baku, teknologi, pembiayaan, dan pasar ekspor. • Optimalisasi pengelolaan kawasan industri. • Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan lingkungan. • Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi produk, penerapan mutu, dan pelabelan sesuai standar yang berdampak pada belum terciptanya ekosistem industri Jawa Tengah yang berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan.
b	Rekomendasi: Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif DISPORAPAR Tindaklanjut TA 2025: Kontribusi Sektor pariwisata dari Usaha Akomodasi dan Makan Minum sampai dengan triwulan III Tahun 2025 mencapai sebesar 3,69% dibandingkan tahun 2024 mencapai sebesar 3,56 % mengalami kenaikan sebesar 0,13 poin. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 69.480.726 orang, tahun 2025 sedikit mengalami penurunan yaitu sebanyak 69.101.473 (angka sementara 2025). Selain itu Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata berupaya untuk mendongkrak kontribusi pariwisata melalui: 1) Penguatan promosi pariwisata melalui media digital, media social dan elektronik; 2) Dengan dibukanya Bandara A. Yani sebagai Bandara Internasional peluang untuk meningkatkan wisatawan mancanegara, dengan strategi	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif di Jawa Tengah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	meningkatkan kerjasama promosi pariwisata dengan PT Angkasa Pura dan seluruh pelaku pariwisata; 3) Fam Trip atau wisata pengenalan dengan mengundang pelaku pariwisata dari dalam dan luar negeri; 4) Pengembangan paket wisata bekerjasama dengan pelaku pariwisata; 5) Bisnis forum antar pelaku pariwisata; 6) Fasilitasi event pariwisata di kabupaten/kota dengan harapan event akan lebih meningkat dan bisa berskala besar; 7) Mendorong desa wisata untuk lebih berinovasi mengembangkan produk dan atraksi wisatanya; 8) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata; 9) Kemudahan TDUP/NIB untuk usaha pariwisata baru; 10) Pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada pelaku pariwisata khususnya bagi pemandu wisata. Nilai tambah Ekonomi Kreatif Jawa Tengah mencapai Rp. 62,904 Trilyun ini dari 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan sumbangan tertinggi dari Sektor Kuliner, Fashion Seni Pertunjukan dan Kriya. Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif dilakukan melalui: 1) Workshop untuk pelaku Ekonomi Kreatif 2) Fasilitasi HKI Produk Ekraf (Kuliner) 3) Sertifikasi Pelaku Ekonomi Kreatif 4) Fasilitasi pembentukan Kabupaten/Kota Kreatif 5) Fasilitasi promosi pada Event Ekonomi Kreatif 6) Penyelenggaraan Event "Semarak KaTa Kreatif", untuk promosi Produk Ekraf di kabupaten/kota.	
c	Rekomendasi: peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) <u>DINKOP UMKM</u> Tindaklanjut TA 2025: Dalam rangka peningkatan daya saing koperasi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas usaha koperasi melalui bimbingan teknis pemberdayaan aspek pemasaran koperasi sebanyak 3 kegiatan bagi 120 pengurus/pengelola koperasi dan pemberdayaan aspek produksi sebanyak 2 kegiatan bagi 80 pengurus/pengelola koperasi, serta penguatan kelembagaan kopeiasi melalui bimbingan teknis peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebanyak 3 kegiatan bagi 150 pengurus/pengelola koperasi, bimbingan teknis peningkatan kualitas manajemen partisipasi anggota sebanyak 2 kegiatan bagi 100 pengurus/pengelola koperasi, dan bimbingan teknis peningkatan kualitas Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 kegiatan bagi 100 pengurus/pengelola koperasi. Sedangkan untuk peningkatan daya saing UKM pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:	Meningkatnya omset Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2025 sebesar 7,82% dibanding tahun 2024 dan memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 8,36%

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	1) Peningkatan kualitas produk melalui bimbingan teknis diversifikasi produk UMKM sebanyak 3 kegiatan bagi 75 UMKM, Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk UMKM Berkebutuhan Khusus sebanyak 2 kegiatan bagi 30 UMKM, Sosialisasi Keamanan Pangan dan ijin Edar Produk UMKM sebanyak 1 kegiatan bagi 40 UMKM 2) Peningkatan akses pasar melalui bimbingan teknis marketing online produk UMKM sebanyak 2 kegiatan bagi 50 UMKM, pameran, dan fasilitasi ruang promosi produk UMKM di galeri bandara Ahmada Yani Semarang bagi 107 UMKM. 3) Peningkatan akses permodalan melalui kegiatan literasi keuangan bagi UMKM bagi 300 UMKM 4) Sertifikasi produk UMKM melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 100 UMKM 5) Pengembangan dan penguatan usaha UMKM akan dilaksanakan pendampingan oleh konsultan di UMKM Center di Kota Semarang dan PLUT UMKM Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas sebanyak 2.026 dengan rincian pendampingan NIB sebanyak 924, Halal sebanyak 11, PIRT sebanyak 57, BPOM sebanyak 1, HKI sebanyak 4, Pemasaran 481, Permodalan sebanyak 195, Pembukuan sebanyak 185, Kemitraan sebanyak 8, Kemasan sebanyak 8, SDM sebanyak 66, Manajemen Produksi sebanyak 84. Tindaklanjut TA 2026: Dalam rangka peningkatan daya saing koperasi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2026 akan melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas usaha koperasi, peningkatan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produksi dan akses pasar produk UMKM, serta pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi produk, peningkatan akses pembiayaan serta pendampingan UMKM.	
d	Rekomendasi: peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan <u>DISTANBUN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Peningkatan produksi sektor pertanian dilakukan melalui peningkatan luas panen dan produktivitas tanaman dengan sasaran intervensi pada daerah dengan produktivitas dibawah rata-rata provinsi. Peningkatan luas panen dilakukan diantaranya melalui peningkatan indeks pertanaman, rehab jaringan irigasi, pengamanan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan mekanisasi pertanian. Sedangkan peningkatan produktivitas tanaman dilakukan diantaranya melalui penggunaan benih unggul bersertifikat, pupuk berimbang dan perbaikan kualitas lahan dengan pembenah tanah dan pupuk hayati cair. Bentuk intervensinya diantaranya dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) 192 paket, fasilitasi irigasi perpompaan 110 unit, irigasi perpipaan 65	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	unit, irigasi sprinkle 54 unit, sumur dangkal 40 unit, embung pertanian 3 paket, fasilitasi benih padi 6.800 Ha, benih jagung 1.790 ha, benih kedelai 200 ha, fasilitasi pengembangan cabai melalui kemitraan "Petarung Sejati" 300 ha, pengembangan bawang merah TSS (<i>True Shallot Seed</i>) 80 ha, pengembangan kawasan kopi 68 ha, kelapa 70 ha, rawat ratoon tebu 200 ha, dan tebu varietas unggul baru 3 ha, fasilitasi alsintan 1.399 unit, fasilitasi pupuk hayati cair (PHC) 123.400 liter, asuransi pertanian 5.100 Ha, subsidi suku bunga serta gerakan pengendalian OPT. Tindaklanjut TA 2026: Peningkatan produksi sektor pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan dilakukan melalui peningkatan luas panen dan produktivitas tanaman dengan sasaran intervensi pada daerah dengan produktivitas dibawah rata-rata provinsi. Peningkatan luas panen dilakukan melalui peningkatan indeks per-tanaman, penyediaan air pertanian melalui rehab jaringan irigasi tersier dan irigasi alternatif, pengamanan produksi dari serangan OPT dan DPI (Dampak Perubahan Iklim), mekanisasi pertanian, dan perlindungan petani melalui asuransi, permodalan, jaminan harga dan pasar. Adapun peningkatan produktivitas tanaman melalui penggunaan benih unggul bermutu antar waktu antar wilayah, serta perbaikan kualitas lahan melalui pupuk berimbang dan pembenah. Bentuk intervensinya diantaranya melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier 334 paket dan irigasi perpipaan 75 paket; fasilitasi stimulan benih dan saprodi pada lokasi prioritas yaitu padi 47.300 Ha, jagung 3.200 Ha, kedelai 3.000 Ha; pengembangan cabai dengan kemitraan "Petarung Sejati" 310 Ha dan bawang merah 25 Ha; pengembangan kopi 770 Ha, kelapa 540 Ha, pengembangan tebu dengan <i>Single Bud Planting</i> 310 Ha, pengembangan tebu varietas unggul baru 700 Ha, fasilitasi alsintan prioritas untuk percepatan tanam dan panen, fasilitasi pembenah tanah dan pupuk hayati/organik untuk perbaikan kualitas lahan, asuransi pertanian 10.130 Ha, subsidi suku bunga, penyediaan benih bersertifikat, serta gerakan pengendalian OPT pada lokasi prioritas.	
	DISNAKESWAN Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Peningkatan produksi dan produktivitas sektor peternakan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut: 1) Penguatan Perbibitan dan Perbaikan Genetika Ternak melalui: a) Penetapan/Pelepasan Rumpun/Galur Ternak Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) b) Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Bibit Ternak SDGH c) Pendampingan penerapan <i>Good Breeding Practice</i> (GBP) ke kelompok ternak d) Produksi benih (semen beku) dan bibit ternak unggul berkualitas e) Peningkatan layanan Inseminasi Buatan (IB), dan Transfer Embrio f) Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan 2) Penambahan skala usaha peternakan berupa Bantuan ternak dan sarpras ke kelompok ternak	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor peternakan dengan, 1. meningkatkan kualitas bibit 2. meningkatkan skala usaha kelompok ternak 3. meningkatkan penyediaan pakan ternak yang berkualitas 4. meningkatkan status Kesehatan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	3) Pengembangan Pakan Ternak yang Berkualitas - Bimtek Cara Penyusunan Pakan yang Baik (CPPB) bagi para pelaku usaha pengolahan pakan - Pengawasan mutu dan keamanan pakan 4) Penerapan Manajemen Usaha Ternak yang Efektif melalui <i>Good Farming Practices</i> (GFP) 5) Peningkatan Status Kesehatan Ternak - Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) melalui pengobatan dan vaksinasi - Penanggulangan gangguan reproduksi disertai pemeriksaan reproduksi - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 6) Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan - Bimtek Juru Sembelih Halal (Juleha) - Pembinaan higiene sanitasi pada pelaku usaha (sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV) - Pendampingan Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU) menuju NKV. 7) Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Peternak - Pelatihan dan pendampingan teknis bagi peternak dan kelompok ternak melalui Sekolah Usaha Peternakan Rakyat (SUPRA) - Pemberdayaan kelembagaan ekonomi peternak (koperasi, kelompok usaha bersama). 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan - Penyediaan alat dan mesin peternakan (alsintan) - Pengembangan kawasan peternakan berbasis potensi lokal. 9) Penguatan Pembiayaan Usaha Peternakan melalui Sosialisasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) 10) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Data Peternakan - Digitalisasi data populasi, produktivitas ternak, penandaan dan pendataan ternak, laporan Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) melalui aplikasi identik PKH serta layanan kesehatan hewan melalui aplikasi isikhnas.go.id - Monitoring dan evaluasi berbasis data untuk perencanaan yang responsif.	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Tindaklanjuti TA 2025: Peningkatan produksi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan: - Sektor Perikanan Budidaya - Penyediaan calon induk/induk ikan Nila strain Nirwana untuk Loka PBI Ambarawa, calon induk ikan Mas Najawa Loka PBI Randudongkal, calon induk Nila Sakti untuk Loka PBI Singasari dan calon induk nila strain nirwana POS PBI Tambaksogra.	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan dengan, - meningkatkan kualitas calon indukan - meningkatkan produksi perikanan tangkap,

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	b) Penyediaan calon induk lele strain sangkuriang, calon induk nilam dan calon induk ikan Mas strain najawa untuk lokasi Loka PBI Ngrajek; calon induk gurame strain jambi, calon induk gurame strain majalengka dan calon induk ikan mas strain mustika Loka PBI Muntilan dan calon induk nila merah dan hitam di Loka PBI Janti c) Penyediaan calon Induk/Induk Ikan Endemik Lokal (ikan Beong) di Loka PBI Ngrajek. d) Pemeliharaan kolam dan bak pendukung budidaya ikan air tawar di 7 lokasi: Loka PBI Ambarawa, Loka PBI Randudongkal, Loka PBI Singasari dan POS PBI Tambaksogra, Loka PBI Ngrajek, Loka PBI Muntilan dan Loka PBI Janti. e) Pemeliharaan kolam, bak dan peralatan mesin pendukung budidaya ikan air payau di 3 lokasi: BBIAPL Tugu, Loka BIAP Maribaya, dan Loka PIAP Sluke f) Pemeliharaan hatchery, bak dan KJA budidaya laut di Loka PBIAL Karimunjawa. 2) Sektor PERIKANAN TANGKAP a) Hibah Alat Tangkap Jaring/Gillnet PUD untuk 3 kelompok di Kab Sragen, Kab Boyolali dan Wonogiri. b) Hibah Mesin Tempel (<i>Outboard Engine</i>) untuk 2 kelompok di Kab Demak dan Kab Tegal. c) Pemberian Premi Asuransi Nelayan Jawa Tengah untuk 15.000 orang. d) Pembangunan Breakwater dan Pengerukan Kolam di Pelabuhan/Muara di PPP Asemboyong Kabupaten Pemalang, PPP Tawang Kabupaten Kendal, PPP Logending Kabupaten Kebumen, PPP Larangan Kabupaten Tegal e) Pengerukan Kolam Pelabuhan dan Perbaikan Jalan Kawasan di PPP Tegalsari Kota Tegal. f) Pelayanan Gerai Perijinan di lokasi-lokasi nelayan 3) Sektor Pergaraman dilaksanakan melalui Hibah peralatan bantuan peralatan kerja petambak garam (Geoisolator) sebanyak 4 paket di Kab. Demak dan Kab. Jepara. 4) Sektor Pengolahan Hasil Perikanan a) Hibah pengolah th. 2025 (Hibah Uang -@30.000.000, Kab. Magelang) b) Pembinaan kepada pelaku usaha (kerjasama dg BI) c) Gemarikan di 3 lokasi (Kab. Magelang, Sragen, Klaten, BI kerjasama BI) Tindaklanjut TA 2026: Peningkatan produksi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan: 1) Sektor Perikanan Budidaya a) Fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan melalui hibah sarpras budidaya ikan, revitalisasi tambak nila salin dan sarprasnya (target KKP 15.110 Ha) b) Rehabilitasi sarana prasarana loka budidaya untuk menghasilkan benih nila salin sebanyak 6 juta ekor per thn c) Pendampingan sertifikasi CPIB, CBIB dan CPPIB;	perikanan budidaya dan garam 3. meningkatkan kualitas sarpras perikanan dan penggaraman

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	d) Penebaran ikan di perairan umum, baik ikan konsumtif maupun endemik lokal; e) Penanganan hama penyakit ikan; f) Penyadartahuan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang undangan 2) Sektor Perikanan Tangkap a) Bantuan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan dengan Fish Finder; b) Rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan Pantai, seperti pengerukan alur pelayaran, pembangunan breakwater, tempat pelelangan ikan, dll; c) Asuransi nelayan sebanyak 10.000 premi per tahun d) Penyediaan BBM Bersubsidi untuk nelayan melalui fasilitasi pembangunan SPDN/SPBUN e) Operasi pengawasan penangkapan ikan dengan VMS f) Peningkatan kompetensi/keterampilan nelayan, seperti Basic Safety Training (BST). 3) Sektor Penggaraman a) Fasilitasi teknologi usaha garam rakyat, seperti geosolator, rumah tunnel, Gudang Garam Collecting Point; b) Fasilitasi Kegiatan Hasil Penerapan Teknologi Lahan Garam untuk pengujian kualitas garam yang dihasilkan c) Pertemuan pemberdayaan usaha garam rakyat; d) Fasilitasi sarana prasarana usaha ekonomi bagi masyarakat pesisir, seperti sarpras batik mangrove, pelatihan pengolahan ikan dan manajemen keuangan 4) Sektor Pengolahan Hasil Perikanan a) Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) melalui kerjasama dengan stakeholder, b) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), c) Rekomendasi SNI dan sertifikat hasil uji (CAT/ <i>Certificate Of Analysis</i>), d) Diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan, e) Penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi e-commerce. f) Fasilitasi sarana prasarana pengolah dan pemasar hasil perikanan	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Tindaklanjut TA 2025: Strategi terpadu meningkatkan produksi dan produktivitas kehutanan (hutan mangrove, hutan pantai, hutann rakyat (HR) dan hutan sosial) melalui: 1) Zonasi dan Tata Kelola Terintegrasi 2) Agroforestry dan Silvikutlur terpadu 3) Hilirisasi produk dan diversifikasi ekonomi 4) Ekowisata berbasis hutan dan pesisir 5) Penguatan kelembagaan 6) Digitalisasi dan teknologi produksi	Meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan (hutan mangrove, hutan pantai, hutann rakyat (HR) dan hutan sosial)

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	7) Pembiayaan dan kemitraan 8) Monitoring dan insentif bernasis kinerja Adapun <i>Road map</i> nya sebagai berikut: 1) Tahun 1 : - Pemetaan zonasi dan potensi; - Pembentukan kelembagaan terpadu; <i>Demplot agroforestry</i> (ini bs di HR maupun PS KHFPK) & <i>silvofishery</i> (di mangrove) Tindaklanjut TA 2026: 1) Roadmap Tahun 2: - Produksi awal & pelatihan hilirisasi; - Aktivasi ekowosita dan UMKM HHBK □ dukungan kegiatan di tingkat tapak bisa masuk semua ke tahap ini. 2) Tahun 3 - 5: - Skala produksi dan penguatan pasar; - Replikasi kelembagaan ke wilayah lain; - Insentif berbasis outcome	
e	Rekomendasi: Peningkatan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keberagaman pangan	
	DINAS KETAHANAN PANGAN Tindaklanjut TA 2025: 1) Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga ketersediaan pangan melalui beberapa kegiatan diantaranya: - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas beras, jagung, kedelai, Mie Mocaf dan Beras Analog (Jagung dan Singkong) tahun 2025 sebanyak 724,15 ton. - Penyusunan Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan 2) Keterjangkauan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga keterjangkauan pangan melalui beberapa kegiatan diantaranya: - Penyediaan Data dan Informasi Pangan melalui Sistem Logistik Daerah dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi pangan secara real-time di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah; - Fasilitasi Distribusi Pangan merupakan fasilitas pembiayaan distribusi (transportasi, bongkar muat dan kemasan) untuk menyalurkan bahan pangan dari produsen ke konsumen atau daerah surplus ke daerah minus maupun dalam kegiatan intervensi lainnya saat terjadi gejolak harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Kios Pangan Murah dan Intervensi Lainnya) dengan target komoditas yang di fasilitasi distribusi sebanyak 2.561,71 ton pada tahun 2025.	1. Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi berbasis potensi pangan lokal 2. Sistem pemantauan stok, harga komoditas tiap daerah secara real time 3. Upaya stabilisasi harga di saat harga bergejolak baik saat harga naik (intervensi ke konsumen) atau turun (intervensi ke produsen) 4. Penyediaan pangan murah yang terjangkau bagi masyarakat rawan pangan dan gizi 5. Penyediaan pangan murah yang terjangkau bagi masyarakat yang memiliki anak berisiko stunting

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	c) Stabilisasi Harga pangan strategis (Subsidi Harga Pangan untuk Produsen dan Konsumen) untuk menjaga harga bahan pangan pokok agar tetap terjangkau masyarakat serta mencegah gejolak inflasi, khususnya pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, telur, minyak goreng, dan gula pasir; d) Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi kepada 1.800 Rumah Tangga Miskin di 17 Desa Rawan Pangan di 7 Kabupaten. e) Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Keluarga dengan anak berisiko stunting sebanyak 1.015 anak di 4 kabupaten. f) Kegiatan <i>Food Loss and Waste</i> diantaranya Inisiasi penggiat penyelamatan pangan, fasilitasi pengiriman pangan berlebih, fasilitasi alat penggiat penyelamatan pangan, penyusunan ingub FLW, sosialisasi, edukasi dan kampanye FLW. 3) Kualitas dan Keberagaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga kualitas dan keberagaman pangan melalui beberapa kegiatan diantaranya: a) Edukasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dilaksanakan di 10 desa B2SA dan di 8 OPD Provinsi Jawa Tengah. Dinas Ketahanan Pangan juga menyelenggarakan kegiatan MOOC sekolah Cerdas Pangan yang diikuti 39 Sekolah di Jawa Tengah dan penilaian sekolah cerdas pangan guna mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan lokal yang tidak hanya bergantung pada beras. b) Pengawasan Keamanan Pangan untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan dan bahan pangan pada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Jawa Tengah dengan pengambilan sampel beberapa komoditas Pangan Segar yang diuji cepat dengan Uji Rapid Test Kit Pestisida. Jika hasil uji menunjukkan positif, maka perlu dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar pestisida yang terkandung dalam pangan segar; Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan makanan yang disalurkan aman dikonsumsi, higienis dan memenuhi standar gizi dan mutu serta melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi keamanan pangan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengelola, petugas, serta penerima manfaat di SPPG tentang pentingnya keamanan pangan untuk mencegah penyakit bawaan makanan dan menjaga kualitas gizi makanan yang disajikan. c) Jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan baik produksi dalam negeri / luar negeri ataupun produk segar hasil pertanian untuk ekspor lainnya dengan fokus penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT), Ijin Edar PSAT PD, Sertifikat Prima, Ijin Rumah Pengemasan (Packing House), Ijin Keamanan PSAT (Health Certificate) komoditas ekspor pangan segar asal tumbuhan dan Sertifikasi Organik.	6. Upaya penyelamatan pangan, mengurangi risiko food loss and waste. Food loss adalah pangan yang terbuang selama produksi, pemrosesan dan distribusi. Food waste adalah makanan yang terbuang di tingkat akhir (rumah tangga, restoran, supermarket) 7. Edukasi pola pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman dalam rangka menciptakan skor pola pangan harapan ideal 8. Pengawasan pangan aman di SPPG

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Tindaklanjut TA 2026: 1) Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga ketersediaan pangan melalui beberapa kegiatan diantaranya: a) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas gabah, Mie Mocaf, Beras Analog (Jagung dan Singkong), Sorgum dan Beras Fortivit tahun 2026 sebanyak 320 ton. b) Penyusunan Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan 2) Keterjangkauan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga keterjangkauan pangan melalui beberapa kegiatan diantaranya: a) Penyediaan Data dan Informasi Pangan melalui Sistem Logistik Daerah dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi pangan secara real-time di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah; b) Fasilitasi Distribusi Pangan merupakan fasilitas pembiayaan distribusi (transportasi, bongkar muat dan kemasan) untuk menyalurkan bahan pangan dari produsen ke konsumen atau daerah surplus ke daerah minus maupun dalam kegiatan intervensi lainnya saat terjadi gejolak harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Kios Pangan Murah dan Intervensi Lainnya) dengan target komoditas yang di fasilitasi distribusi sebanyak 725 ton pada tahun 2026; c) Stabilisasi Harga pangan strategis (Subsidi Harga Pangan untuk Produsen dan Konsumen) untuk menjaga harga bahan pangan pokok agar tetap terjangkau masyarakat serta mencegah gejolak inflasi, khususnya pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, telur, minyak goreng, dan gula pasir; d) Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi kepada Rumah Tangga Miskin di Desa Rawan Pangan. e) Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Keluarga dengan anak berisiko stunting. f) Kegiatan <i>Food Loss and Waste</i> diantaranya Inisiasi penggiat penyelamatan pangan, fasilitasi pengiriman pangan berlebih, fasilitasi alat penggiat penyelamatan pangan, penyusunan ingub FLW, sosialisasi, edukasi dan kampanye FLW. 3) Kualitas Dan Keberagaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga kualitas dan keberagaman pangan melalui beberapa kegiatan diantaranya: a) Edukasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dilaksanakan di desa B2SA. b) Pengawasan Keamanan Pangan untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan dan bahan pangan pada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Jawa Tengah dengan pengambilan sampel beberapa komoditas Pangan Segar yang diuji cepat dengan Uji Rapid Test Kit Pestisida. Jika	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	hasil uji menunjukkan positif, maka perlu dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar pestisida yang terkandung dalam pangan segar; Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan makanan yang disalurkan aman dikonsumsi, higienis dan memenuhi standar gizi dan mutu serta melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi keamanan pangan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengelola, petugas, serta penerima manfaat di SPPG tentang pentingnya keamanan pangan untuk mencegah penyakit bawaan makanan dan menjaga kualitas gizi makanan yang disajikan. c) Jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan baik produksi dalam negeri / luar negeri ataupun produk segar hasil pertanian untuk ekspor lainnya dengan fokus penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT), Ijin Edar PSAT PD, Sertifikat Prima, Ijin Rumah Pengemasan (<i>Packing House</i>), Ijin Keamanan PSAT (<i>Health Certificate</i>) komoditas ekspor pangan segar asal tumbuhan dan Sertifikasi Organik.	
f	Rekomendasi: Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan	
	DINAS ESDM Tindaklanjut TA 2025: Potensi pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut: 1) Menyusun payung hukum regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah terkait Pengelolaan Pertambangan di Jawa Tengah sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2) Melaksanakan pengawasan kegiatan pertambangan baik berizin maupun tidak berizin bersama Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah dengan target sejumlah 286 obyek; 3) Melaksanakan kajian persetujuan teknis ajuan perizinan pertambangan dengan target sejumlah 158 dokumen; 4) Pelaksanaan rekonsiliasi data produksi pertambangan di Jawa Tengah; 5) Intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah; 6) Melakukan pembinaan usaha pertambangan bagi pelaku usaha dalam penerapan Good Mining Practice (GMP) dan memberikan penghargaan good mining practice sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori good mining practice; 7) Mengusulkan perubahan Wilayah Pertambangan kepada Menteri untuk mengakomodir wilayah pertambangan rakyat. Tindaklanjut TA 2026:	1. Kepastian hukum terkait usaha pertambangan di Jawa Tengah; 2. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar; 3. Pajak dari usaha pertambangan yang optimal

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2026 direncanakan melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut: 1) Melaksanakan sosialisasi regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah terkait Pengelolaan Pertambangan di Jawa Tengah sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan muatan lokal kebijakan Jawa Tengah; 2) Melaksanakan pengawasan kegiatan pertambangan baik berizin maupun tidak berizin bersama Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah dengan rencana target sejumlah 505 obyek; 3) Melaksanakan kajian persetujuan teknis ajuan perizinan pertambangan dengan rencana target sejumlah 411 dokumen; 4) Pelaksanaan rekonsiliasi data produksi pertambangan di Jawa Tengah; 5) Intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah; 6) Melakukan pembinaan usaha pertambangan bagi pelaku usaha dalam penerapan <i>Good Mining Practice (GMP)</i> dan memberikan penghargaan <i>good mining practice</i> sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori <i>good mining practice</i>; 7) Mengusulkan penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat kepada Menteri untuk mengakomodir wilayah pertambangan rakyat melalui renstra Kementerian ESDM 2025 – 2029; 8) Penyusunan cetak biru (<i>blueprint</i>) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai dokumen acuan bagi pengusaha pertambangan dalam melaksanakan program prioritas Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan RPJMD 2025 – 2029.	
g	Rekomendasi: Mendorong pertumbuhan penanaman modal DPMPTSP Tindaklanjut TA 2025: 1) Menyusun kajian <i>Investment Project Ready to Offer (IPRO)</i> dengan berfokus pada sektor pertanian dan green investment pada tahun 2025; 2) Melaksanakan pemberian insentif kewenangan provinsi kepada pelaku usaha; 3) Melaksanakan kegiatan Business Meeting, <i>Central Java Investment Business Forum (CJIBF)</i>, serta Pameran Investasi sejenis lainnya; 4) Mengoptimalkan pelayanan melalui gerai dan klinik pelayanan perizinan; 5) Memberikan fasilitasi pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (PENA SIJOHAN) kepada para pelaku usaha; 6) Memberikan bimtek pengawasan dan perizinan OSS serta pendampingan dan pemantauan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 7) Pengembangan sistem dengan melakuakn integrasi sistem CJIP (pada fitur SIRUSA) dengan Dapodik dan Ayo Kerjo. Tindaklanjut TA 2026:	• Mendorong pertumbuhan investasi dari dua sumber utama: PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). • Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan penanaman modal agar lebih efektif dan efisien. • Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk memudahkan proses investasi.

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	1) Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2045 sebagai tindaklanjut RPJPN 2025-2045; 2) Penyediaan data Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta data potensi lahan investasi melalui pengembangan sistem CJIP dengan menambahkan fitur Butuh Lahan Siap Pakai (BUHANSIP); 3) Melaksanakan pemberian insentif kewenangan provinsi kepada pelaku usaha; 4) Melaksanakan kegiatan Business Meeting, Central Java Investment Business Forum (CJIBF), serta Pameran Investasi sejenis lainnya; 5) Mengoptimalkan pelayanan melalui gerai dan klinik pelayanan perizinan; 6) Memberikan fasilitasi pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (PENA SIJOHAN) kepada para pelaku usaha; 7) Memberikan bimtek pengawasan dan perizinan OSS serta pendampingan dan pemantauan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 8) Memberikan fasilitasi pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (PENA SIJOHAN) kepada para pelaku usaha; 9) Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP Jateng) dengan android.	
h	Rekomendasi: Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>DINAS PERHUBUNGAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Tahun 2025 jumlah pemenuhan fasilitas keselamatan sebagai berikut: 1) Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di 6 lokasi yang tersebar di 6 BPSPP 2) Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan: a) Pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 100 unit; b) Pengadaan dan pemasangan RPPJ sebanyak 10 unit; c) Pengadaan dan pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) sebanyak 142 unit yaitu 38 unit ruas Batur-Dieng; 13 unit ruas Kertek-Sapuran; 41 unit ruas Wadaslintang-Selokromo; 40 Unit ruas Wonogiri-Manyaran-Blimbing; dan 10 unit ruas Pati-Kayen-Sukolilo serta pergantian lampu sebanyak 196 unit. 3) Tahun 2025 dilaksanakan pembangunan dermaga sungai non permanen menjadi permanen yang terletak di sungai Kuto, Dukuh Mundu, Desa Yosorejo, Kab. Batang. 4) Operasional Trans Jateng 7 koridor sebanyak 115 Bus. 5) Peningkatan prasarana Trans Jateng yang semula rambu pemberhentian menjadi halte sebanyak 7 unit dengan rincian sebagai berikut: a) Koridor Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri 2 unit; b) Koridor Surakarta-Sragen 3 unit; c) Koridor Semarang-Grobogan 2 unit. Tindaklanjut TA 2026: Tahun 2026 jumlah pemenuhan fasilitas keselamatan sebagai berikut : 1. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di 11 lokasi yang tersebar di 6 BPSPP 2. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan: a. Pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 400 unit; b. Pengadaan dan pemasangan RPPJ sebanyak 10 unit; c. Pengadaan dan pemasangan Warning Light sebanyak 16 unit; d. Pengadaan dan pemasangan APILL sebanyak 2 unit; e. Pengadaan dan pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) sebanyak 400 unit serta pergantian sparepart lampu sebanyak 600 unit; f. Pembangunan ZOSS sebanyak 18 lokasi. 3. Tahun 2026 dilaksanakan pembangunan dermaga sungai non permanen menjadi permanen yang terletak di sungai Gangsa, Kelurahan Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal. 4. Operasional Trans Jateng 7 koridor sebanyak 115 Bus serta studi pada wilayah pengembangan Jepara – Kudus – Pati (Jekuti) dan Magelang – Kota Magelang – Temanggung (Gelangmanggung). Pembangunan halte portable sejumlah 20 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng dengan rincian sebagai berikut: 1. Pembangunan 7 unit halte pada koridor Solo – Sragen. 2. Pembangunan 6 unit halte pada koridor Semarang – Gorbogan. - Pembangunan 7 unit halte pada koridor Solo – Wonogiri	1. Menurunkan angka kecelakaan 2. Meningkatkan aksesibilitas distribusi barang dan jasa antar wilayah 3. Meningkatkan keterjangkauan antar wilayah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
i	Rekomendasi: Penguatan ekosistem riset, IPTEK dan inovasi <u>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</u> Tindaklanjut TA 2025: Sebagai upaya dalam meningkatkan ekosistem riset, IPTEK dan inovasi di Provinsi Jawa Tengah BRIDA tahun 2025 melakukan berbagai Upaya diantaranya melalui: 1) Penyusunan RIPJ-PID tahun 2025-2029; 2) Anugerah Karya Riset Pembangunan tahun 2025; 3) Penyelenggaraan krenova dan penjangkaran inovasi masyarakat tahun 2025; 4) Pameran Produk Inovasi tahun 2025 Tindaklanjut TA 2026: Pada tahun 2026 akan dilanjutkan melalui berbagai upaya antarlain: 1) Anugerah Karya Riset Pembangunan tahun 2026; 2) Penyelenggaraan krenova dan penjangkaran inovasi masyarakat tahun 2026; 3) Pameran Produk Inovasi tahun 2026	1. Mensinergikan arah kebijakan inovasi melalui identifikasi permasalahan dan penggalian potensi daerah. 2. Mengapresiasi peneliti dan praktisi atas riset unggulan yang relevan dengan pembangunan daerah serta menjembatani akademisi–praktisi guna mendorong kebijakan berbasis bukti. 3. Menumbuhkan budaya riset dan inovasi masyarakat, mendorong kreativitas, serta memfasilitasi transformasi ide menjadi solusi implementatif, termasuk hilirisasi dan diseminasi inovasi tepat guna. 4. Mendorong produk inovatif untuk meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM naik kelas, serta memperkuat promosi hasil riset dan kolaborasi pemangku kepentingan Iptek di Jawa Tengah.
5	Rekomendasi: Terkait dengan hasil tipologi Klassen yang disajikan dalam LKPJ telah menunjukkan Daerah yang Maju dan Cepat Tumbuh; Berkembang Cepat; Maju tapi Tertekan; Relatif Tertinggal. Kedepan, perlu	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	memperhatikan dan memprioritaskan Daerah yang Maju tapi Tertekan dari aspek penguatan sektor ekonomi dan prioritas Pembangunan daerahnya.	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEREKONOMIAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Berdasarkan hasil tipologi Klassen, dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, daerah yang Maju tapi Tertekan adalah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonogiri. Dimana pertumbuhan ekonomi relatif tinggi namun kemiskinan masih tinggi juga. Jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita, daerah yang Maju Tapi Tertekan adalah Sragen, Kudus, dan Kota Tegal dimana pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata namun PDRB Perkapita diatas rata-rata. Fokus pembangunan tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter dengan prioritas pembangunan diarahkan pada: 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; 3) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Tindaklanjut TA 2026: Arah pengembangan pada tahun 2026 untuk wilayah tersebut sebagai berikut: 1) Wilayah Pengembangan Cibalingmas (Cilacap - Purbalingga - Banyumas): 2) Menterpadukan pengembangan koridor Kawasan perkotaan cilacap-purwokerto-purbalingga 3) Menyelaraskan pengembangan industri cilacap-banyumas 4) Pengembangan potensi wisata unggulan kabupaten, dengan mengintegrasikan kawasan ekosistem mangrove segara anakan dan kawasan pariwisata baturaden 5) Mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang 6) Pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam 7) Mengendalikan alih fungsi sawah 8) Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat (<i>dryport</i>) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor; 9) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya	Prioritas intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, mengurangi kesenjangan serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	10) Peningkatan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman; dan Peningkatan pengelolaan KSN Pacangsanak. <u>BIRO PEREKONOMIAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Mendasarkan uraian tipologi Klassen daerah yang masuk kedalam klasifikasi kabupaten maju tetapi tertekan adalah kabupaten Kabupaten Kudus dan Cilacap. Rata-rata PDRB Perkapita kedua kabupaten tersebut relatif tinggi namun pertumbuhan ekonominya relatif rendah dibanding rata-rata Jawa Tengah. Guna mengatasi hal tersebut telah dilakukan intervensi dengan implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru: 1) Aspek penguatan sektor ekonomi perlu optimalisasi potensi ekonomi unggulan. Kabupaten Cilacap mempunyai potensi karet dan Perikanan Tangap maka perlu Pengembangan Industri Pengolahan (Pertanian dan Perikanan) Cilacap – Banyumas – Purbalingga sampai dengan hilirisasi pertanian seperti Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera ,Cold Storage dan Sentra produksi perikanan untuk meningkatkan pengelolaan hasil laut lebih efisien dan berkelanjutan dan Kabupaten Kudus dengan Pengembangan <i>Marine Tourism</i> dan Religi (promosi budaya lokal melalui penyelenggaraan event budaya (Barikan Kubro) dan event ziarah (Haul Sunan Muria dan Kudus) serta pengembangan DTW Religi (Menara Kudus dan Gunung Muria)); 2) Aspek prioritas Pembangunan daerah a) Wilayah Kudus: Mendorong penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, Mendorong reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban, Mendorong sinergisitas pengelolaan kawasan konservasi Gunung Muria dan Cagar Biosfer Karimunjawa - Jepara – Muria. b) Wilayah Cilacap: Mendorong optimalisasi Bandara Tunggal Wulung sebagai <i>home base flying school</i>, Mendorong pembangunan jalan tol Cilacap-Pejagan, Mendorong optimalisasi dan pemenuhan fasilitas dan pengembangan sarana dan prasarana Tanjung Intan sebagai Pelabuhan Ekspor dan Impor, Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya mendorong pembangunan Bendungan Matenggeng dan Waduk Kaliurip	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor ekonomi dan prioritas pembangunan daerah
6	Perlu perencanaan pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan yang juga dimana kabupaten/kota perlu mengenali karakteristik ekonomi, sosial, fisik itu sendiri, termasuk interaksinya dengan kabupaten/kota atau provinsi lain. <u>BAPPEDA BIDANG IPW</u>	Adanya keselarasan antara perencanaan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Tindaklanjut TA 2025: Perencanaan pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 pada BAB 4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah yang disusun pada tahun 2025. Pembangunan wilayah Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 yang terbagi dalam sepuluh wilayah pengembangan diarahkan dengan kebijakan umum "Pengembangan Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Wilayah Pengembangan" dalam rangka untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah serta memberikan kontribusi untuk perwujudan Indonesia Emas 2045. Penjabaran pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui Pengembangan Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Wilayah Pengembangan (WP) meliputi Program Unggulan dan Program Strategis. 1) Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi adalah program lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kewenangan di setiap WP yang dinilai paling prioritas dan siap menjadi penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi secara jangka menengah ditingkat Jawa Tengah dan/atau Nasional. 2) Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi merupakan pendamping Program Unggulan yang juga berpotensi sebagai penggerak perekonomian ditingkat WP dan/atau lintas WP. Penyusunan program tersebut berdasarkan pada karakteristik ekonomi, sosial, fisik, interaksi antar wilayah serta arahan dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Dengan adanya rencana program unggulan dan program strategis diharapkan setiap wilayah dapat mencapai target indikator Pertumbuhan Ekonomi dalam lima tahun. Tema perwujudan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru pada tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah strategis yang mendukung langsung Pertumbuhan Ekonomi untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sedangkan untuk tahun 2026 adalah meningkatkan produksi dan hilirisasi sektor pertanian dalam arti luas utamanya pada komoditas unggulan daerah untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional	pembangunan dengan karakteristik masing-masing wilayah di Jawa Tengah
7	Rekomendasi: Indikator Rasio Gini tidak memenuhi target. Pemenuhan target indikator Rasio Gini perlu dilakukan evaluasi efektifitas, kualitas jenis kegiatan dan sub kegiatan serta besaran anggarannya. (UPDATE: TELAH TERCAPAI)	
	<u>TIMSUN DAN SEKRETARIAT LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH</u> <u>(BIRO PEMOTDA, BAPPEDA BIDANG PEREKONOMIAN)</u> Tindaklanjut TA 2026: 1) Mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin, melalui :	1. Pemerataan kesejahteraan masyarakat 2. stabilitas sosial lebih baik (berkurangnya

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	a) PBI Jamkes, Kartu Jateng Sejahtera, Asuransi Nelayan (Dinsos, Dinkes, DKP) b) Beasiswa Siswa Miskin, Seragam Siswa Miskin (Disdik) c) Bantuan dan rehabilitasi social (Dinsos) d) Bantuan instalasi sambungan listrik (ESDM) e) Bantuan Pangan (Dishanpan) f) Bantuan Ternak (Dinakeswan) 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, melalui : a) Peningkatan Akses Pekerjaan (Disnaker, Disperakim) b) Peningkatan Kapasitas SDM (Disnaker, Disperindag, DP3AKB) c) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses modal, dan akses penggunaan lahan (Distanbun, DLHK, DKP) d) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil (Dinkopukm) e) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan (Dinkopukm, Disporapar, Dinsos) 3) Meminimalkan wilayah kantor kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melalui: a) Pemenuhan pelayanan dasar (RTLH, Jambanisasi, sanitasi air minum layak, fasilitas pendidikan) (Disperakim, Disdik, PU BMCK); b) Program-program lainnya yang meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. (Dispermades, Dinsos, Dinkes, Disporapar).	resiko konflik sosial, kecemburuan dan kriminalitas) 3. Daya beli masyarakat lebih merata
8	Rekomendasi: Meningkatkan kapasitas TPID. Perlu upaya pengendalian inflasi daerah, melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas. BIRO PEREKONOMIAN Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Strategi pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan kapasitas TPID telah menjadi strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2026-2029 yang masuk dalam sasaran “Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan”. Bentuk taktis yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan dalam pengendalian inflasi melalui: 1) Koordinasi lintas sektor dengan pelibatan seluruh <i>stakeholder</i> baik instansi daerah maupun pusat, guna sinergitas untuk memastikan informasi yang cepat antar stakeholder terkait pergerakan harga dan kebijakan pengendalian inflasi. 2) Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok Masyarakat dengan pemantauan pasokan dan distribusi barang pokok yang dilakukan secara langsung melalui monitoring dilapangan dan pemanfaatan Sistem Pemantau	Strategi pengendalian Inflasi daerah.

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Harga Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemeterian perdagangan. Stabilitas harga melalui intervensi pasar dengan operasi pasar murah dan subsidi pangan murah, bantuan distribusi pangan pengelolaan cadangan pangan pemerintah. 3) Peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas dengan Diversifikasi Sumber Pangan Lokal dan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).	
	<u>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Upaya pengendalian Inflasi di Jawa Tengah selalu mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui penguatan kapasitas kelembagaan TPID baik lingkup Provinsi maupun Kab/Kota. Upaya tersebut di wujudkan dengan koordinasi berkala pada hari Senin setiap minggunya bagi TPID Provinsi yang mana selalu dilakukan pembahasan terkait potensi inflasi serta bentuk mitigasi yang akan dilakukan. Disperindag Jateng selaku anggota TPID Provinsi juga menyelenggarakan koordinasi berkala setiap hari Jumat dengan TPID Kab/Kota dalam hal ini dinas urusan perdagangan di Kab Kota yang secara langsung melakukan pengawasan harga dan stok barang di pasar setiap harinya. Pertemuan berkala ini sebagai bentuk early warning inflasi di level Kab/Kota karena akan dibahas mendetail terkait komoditas yang dalam minggu tersebut mengalami kenaikan harga dan kekurangan stok, serta komoditas potensial yang akan mengalami inflasi karena keterbatasan stok ketika adanya peningkatan permintaan pasar. Hasil pembahasan rapat koordinasi tersebut nantinya akan menjadi materi pembahasan 0 atau laporan kepala Disperindag Prov Jateng di Rapat TPID tingkat Provinsi. Tindaklanjut TA 2026: Rapat koordinasi intensif dengan Kabupaten/Kota terkait ketersediaan stok	Mempercepat dan memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga dan kelangkaan stok komoditas di tingkat kabupaten/kota, sehingga ketidakstabilan harga bahan pokok dapat dicegah dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
	<u>DINAS KETAHANAN PANGAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1) Kegiatan Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Pangan: a) Penyediaan Data dan Informasi Pangan melalui Sistem Logistik Daerah dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi pangan secara <i>real-time</i> di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah; b) Fasilitasi Distribusi Pangan merupakan fasilitas pembiayaan distribusi (transportasi, bongkar muat dan kemasan) untuk menyalurkan bahan pangan dari produsen ke konsumen atau daerah surplus ke daerah minus maupun dalam kegiatan intervensi lainnya saat terjadi gejolak harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Kios Pangan Murah dan Intervensi Lainnya) dengan target komoditas yang di fasilitasi distribusi sebanyak 2.561,71 ton pada tahun 2025 dan 725 ton Di 2026;	1. Edukasi pola pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat juga OPD Provinsi. 2. Edukasi berupa MOOC kepada siswa-siswa di 39 sekolah 3. Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan bahan pangan di SPPG

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	c) Penyediaan Informasi Ketersediaan, Neraca Bahan Makanan, dan Pemantauan Ketersediaan HBKN untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga, menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan pokok dan menjadi dasar kebijakan intervensi yang tepat waktu dan berbasis data. d) Stabilisasi Harga pangan strategis (Subsidi Harga Pangan untuk Produsen dan Konsumen) untuk menjaga harga bahan pangan pokok agar tetap terjangkau masyarakat serta mencegah gejolak inflasi, khususnya pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, telur, minyak goreng, dan gula pasir; e) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi darurat, serta sebagai instrumen intervensi pasar untuk mengendalikan gejolak harga dan mendukung ketahanan pangan daerah; 2) Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Keterjangkauan Akses Pangan Beragam Dan Berkualitas: a) Edukasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) tahun 2025 dilaksanakan di 10 desa B2SA dan di 8 OPD Provinsi Jawa Tengah. Dinas Ketahanan Pangan juga menyelenggarakan kegiatan MOOC sekolah Cerdas Pangan yang diikuti 39 Sekolah di Jawa Tengah dan penilaian sekolah cerdas pangan guna mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan lokal yang tidak hanya bergantung pada beras; b) Pengawasan Keamanan Pangan untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan dan bahan pangan pada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Jawa Tengah.	
B. TERHADAP KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA (Leading Sector Bappeda Bidang Pemsosbud, Biro Kesra, Biro Bangda)		
1	Rekomendasi: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2024 capaiannya meningkat tetap dengan cara yang lambat masih pada level dibawah 75 yaitu sebesar 73,87 meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 IPM Provinsi Jateng sebesar 73,39 (kinerja IPM masih standar merayap meningkat sebesar +0,50 an poin pertahun. pada lima tahun terakhir belum ada percepatan/lompatan kinerja Pembangunan SDM di Provinsi Jateng (diperlukan waktu 4 tahun untuk sekedar naik 2 poin saja dari 71,87 dari tahun 2020 menjadi 73,87 di tahun 2024).	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEMSBUD</u> Tindaklanjut TA 2025: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, pada lima tahun terakhir belum ada percepatan/lompatan kinerja Pembangunan SDM di Provinsi	Meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Tengah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	jateng. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 diantaranya melalui peningkatan lama sekolah melalui sektor Pendidikan antara lain: 1) Pemberian bantuan pendidikan kepada siswa berupa beasiswa miskin (BSM) untuk 15.000 siswa; 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik bersumber dari APBN yaitu BOS dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) bagi sekolah swasta dan BOP bagi sekolah negeri bersumber dari APBD; 3) Strategi pengurangan beban pengeluaran bagi siswa dari keluarga miskin melalui 3 SMK Boarding (Kota Semarang, Kab Pati, Kab Purbalingga) dan 15 SMK Semi Boarding (Kab Rembang, Kab Blora, Kab Grobogan, Kab Sragen, Kab Wonogiri, Kab Klaten, Kab Demak, Kab Pemalang, Kab Purworejo, Kab Kebumen, Kab Wonosobo, Kab Banjarnegara, Kab Banyumas, Kab Cilacap, dan Kab Brebes); 4) Kuota afirmasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi ATS, siswa miskin, anak panti dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); 5) Pembangunan sekolah baru/penambahan ruang kelas baru pada wilayah blankspot layanan Pendidikan.	
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tindaklanjut TA 2025: 1) Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sinergitas Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS); Koordinasi berfokus pada 11 Kabupaten/Kota yang belum pernah mengikuti verifikasi KKS tingkat Pusat 2) Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sinergitas Percepatan Pengendalian Tuberkulosis (TBC) Menuju Eliminasi TBC 2030; Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan penemuan kasus Tuberkulosis dan Upaya meningkatkan peran lintas sector. 3) Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Prioritas di Jawa Tengah; 4) Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sinergitas Pengendalian Angka Kematian Ibu di Jawa Tengah; a. Penyusunan Ringkas Kebijakan: Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) pada Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Puskesmas PONED. b. Inisiasi Bantuan Keuangan terhadap 3 Puskesmas Prioritas untuk Pengembangan Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); 5) Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sinergitas Mempertahankan 0 kasus indigenous malaria di Kabupaten Purworejo menuju Eliminasi Malaria Provinsi Jawa Tengah. 6) Koordinasi dengan Dinas terkait dan wilayah terkait dalam upaya eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo (Mempertahankan 0 kasus indigenous), target eliminasi di bulan Maret 2026 dan Eliminasi tingkat Provinsi bulan November 2026. Tindaklanjut TA 2026:	1. Penyelenggaraan KKS; 2. Percepatan pengendalian Tuberculosis (TBC); 3. Penanganan ODGJ dan Pasung; 4. Percepatan penurunan Stunting; 5. Pengendalian AKI; 6. Pengendalian dan eliminasi malaria.

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	a) Evaluasi dan koordinasi pada penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Jawa Tengah, dengan fokus peningkatan pada penghargaan yang didapatkan Kabupaten/Kota serta keikutsertaan Kabupaten/Kota pada KKS diupayakan 35 Kab/Kota mengikuti verifikasi tingkat Pusat; b) Evaluasi dan koordinasi terkait penguatan peran Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sesuai dengan SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC Tingkat Provinsi Jawa Tengah No. 440/37 Tahun 2024 yang disahkan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 April 2024., serta Tindak lanjut dari SE Gubernur Jawa Tengah No. 440/0002418 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC di Jawa Tengah; c) Berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi dengan Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Tengah menjadi rencana tidak lanjut dalam penanganan stunting: - Penanganan stunting difokuskan pada tahapan pencegahan yang tepat sasaran dan sinergis dengan APBN dan APBD; - Re-Orientasi para pendamping target sasaran stunting perlu optimalisasi dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa, pelibatan unsur-unsur pendukung seperti TNI-POLRI; - Koordinasi penanganan stunting dapat menjadi efektif apabila dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga akan diupayakan untuk koordinasi di tingkat provinsi melalui forum TPPS Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara rutin. - Koordinasi kesiapan eliminasi malaria di Purworejo dan tingkat Provinsi Jawa Tengah, baik kesiapan pada aspek regulasi dan kebijakan serta kesiapan teknis.	
	<u>BIRO ADM. BANGDA</u> Tindaklanjut TA 2025: Sebagai Upaya untuk mengetahui penyebab IPM provinsi Jawa Tengah yang meningkat secara lambat telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya: <i>Focuss Group Discussion</i> (FGD) membahas perkembangan setiap dimensi dan capaian IPM 2024, permasalahan serta strategi penanganannya bersama dengan OPD Provinsi Jawa Tengah (Bappeda, Biro Kesra, Disdikbud, Dinkes, Disnakertrans, Dinkop, Disperindag dan Dinsos. turut diundang juga 4 Kabupaten di Jawa Tengah dengan Nilai IPM terendah (Wonosobo, Pemalang, Brebes dan Banjarnegara) serta Akademisi dari FEB UNDIP dan BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber ahli; - Monitoring dan Evaluasi pada 4 kabupaten dengan nilai IPM terendah dan turut mengundang OPD Kab/Kota terkait untuk mengidentifikasi permasalahan terkait pencapaian IPM serta merumuskan upaya dan dukungan dari Pemerintah Jawa Tengah yang diperlukan. Hasil dari Monev tersebut akan di buat rekomendasi kebijakan dan akan disampaikan kepada pimpinan sebagai pembuat kebijakan. Tindaklanjut TA 2026:	Mengevaluasi pencapaian IPM serta memetakan permasalahan dan upaya pencapaian IPM di Jawa Tengah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Dalam rangka monitoring dan evaluasi indikator makro tahun 2025 akan dilakukan forum koordinasi salah satu indikator yang menjadi pembahasan Adalah IPM yang merupakan IKU Provinsi Jawa Tengah.	
2	Rekomendasi: Penguatan pondasi sistem pembangunan SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan yang maju guna menjamin akses dan level pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang berdayasaing regional, nasional dan internasional.	
	<u>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</u> Tindaklanjut TA 2025: - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB): SMAN, SMKN dan SLBN - SMAN Kota Tegal Tahap II - SMAN Garung, Kab. Wonosobo Tahap II - SMAN Kemalang, Kabupaten Klaten Tahap I - SMAN Watukumpul, Kab. Pemalang Tahap I - SMAN Cilongok, Kab. Banyumas Tahap I - SMKN Karangjambu, Kab. Purbalingga Tahap II - SMKN Tulis, Kabupaten Batang Tahap I - SMKN Kemangkon, Kab. Purbalingga Tahap I - SLBN Purwokerto, Kab. Banyumas Tahap II - Peningkatan Sarpras: DAK Fisik (pengadaan alat), Peningkatan Sarpras melalui APBD - Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tindaklanjut TA 2026: - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB): SMAN, SMKN dan SLBN - SMAN Kota Tegal Tahap III - SMAN Garung, Kab. Wonosobo Tahap III - SMAN Kemalang, Kab. klaten Tahap II - SMAN Watukumpul, Kab. Pemalang Tahap II - SMAN Cilongok, Kab. Banyumas Tahap II - SMKN Karangjambu, Kab. Purbalingga Tahap III - SMKN Tulis, Kabupaten Batang Tahap II - SMKN Kemangkon, Kab. Purbalingga Tahap II - SLBN Purwokerto, Kab. Banyumas Tahap III - Peningkatan Sarpras: DAK Fisik (pengadaan alat), Peningkatan Sarpras melalui APBD - Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah
	<u>DINAS KESEHATAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Dinas Kesehatan sudah mendukung Penguatan pondasi sistem pembangunan SDM dengan Peningkatan Kesehatan Siklus Hidup melalui: - Peningkatan kompetensi Nakes dalam memberikan pelayanan KIA, Gizi, Uspro-remaja dan Lansia; - Pendampingan Kab/Kota lokus masalah prioritas, sehingga mampu lebih berdaya untuk menangani masalah KIA dan Gizi di wilayahnya;	- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM kesehatan (named dan nakes) dalam memberikan layanan kesehatan sesuai siklus hidup; - Mendekatkan akses layanan kesehatan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	3. Pendampingan Fasilitas pelayanan kesehatan (primer-rujukan) di Kab/Kota dalam meningkatkan/memperbaiki kualitas pelayanan KIA; 4. Mengidentifikasi dan mencari solusi atas hambatan dan kendala dalam pemberian pelayanan maupun pencatatan pelaporan pelayanan KIA, Gizi, Uspro-remaja dan Lansia; 5. Penguatan koordinasi dan kolaborasi LP/LS terkait program KIA, Gizi, Uspro-remaja dan Lansia melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Fasilitasi implementasi AMPSR di 10 lokus terbagi menjadi pendampingan luring (Kab Semarang, Kendal, Demak, Sragen, Purworejo, Surakarta, Rembang, Pati); pendampingan daring (Kota Semarang, Sukoharjo, Karanganyar). 2) Fasilitasi kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada korban KtPA dan penyandang disabilitas. Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan sebaagimana yang diharapkan oleh korban KtPA dan para penyandang disabilitas. Puskesmas yang lebih manusiawi dan layak menjadi tumpuan bagi masyarakat rentan. 3) Fasilitasi dalam Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif: a. Mendeteksi dan memberikan tata laksana resiko ibu hamil beresiko tinggi (anemia, gizi kurang, hipertensi, DM, penyakit sifilis, Hepatitis, HIV dan mengetahui apakah calon ibu memiliki faktor resiko Thalassemia; b. Meningkatkan jumlah akseptor KB Pasca persalinan dan KB MKJP untuk menjarangkan dan menunda kehamilan; c. Meningkatkan capaian calon pengantin yang sehat sebelum menikah dan hamil, berkontribusi menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. 4) Aksi Bergizi Pencegahan Stunting di 25 lokus (kurang 4 lokus) dengan sasaran @100 remaja putri. Kegiatan utama edukasi makan bergizi, minum TTD dan pemeriksaan Hb. 5) Penguatan Aksi Konvergensi Intervensi Spesifik. Kegiatan utama koordinasi lintas sektor yang meliputi monitoring dan evaluasi MPASI, Monitoring PMT Lokal, Capaian Intervensi Spesifik, Penguatan Aksi Konvergensi Intervensi Spesifik Sinergi Strategi PMBA bersama Lintas Sektor, Tata laksana Rujukan Masalah Gizi pada Balita. 6) Pelayanan Gizi Bencana di 3 kab (Magelang, Grobogan, Pekalongan) dengan menyiapkan SDM yang handal yang mampu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam mempersiapkan dapur PMBA (Pemberian Makan Balita Anak) yang sehat serta bagi kelompok rentan lainnya. 6. Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan melalui Pelatihan/pengembangan kompetensi: 1) Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 2) Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Leher Rahim Bagi Dokter Di Puskesmas	sampai ke desa (Posyandu) dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader; 3. Mendorong penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita; 4. Mendorong penurunan stunting; 5. Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diharapkan akan tercipta SDM yang unggul dan adaptif.

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	3) Pelatihan Teknis Penanggulangan Stroke Bagi Dokter dan Perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 4) Pelatihan <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS) 5) Pelatihan <i>Advance Cardiac Life Support</i> (ACLS) bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 7. Mendorong Peningkatan Kompetensi RS dalam pemenuhan SDM Layanan KJSU Tindaklanjut TA 2026: 1. Pada Tahun 2026 kembali diusulkan kegiatan fasilitasi implementasi AMPSR fokus pada tindak lanjut hasil rekomendasi AMPSR di 6 lokus (Jepara, Kota Tegal, Blora, Wonogiri, Kota Pekalongan dan Pemalang); 2. Meningkatkan tingkat kemandirian Lansia, dan meningkatkan layanan lansia dengan ketergantungan sedang, berat dan total untuk mendapatkan perawatan jangka panjang; 3. Penguatan Puskesmas Santun lansia, RS pelayanan Geriatri (untuk lansia sakit), dan penguatan peran masyarakat terutama keluarga, untuk menjadi PJP (<i>Care Giver</i>) bagi Lansia nya yang mempunyai ketergantungan sedang, berat dan total. Upaya yang dilakukan dengan cara: - Peningkatan kompetensi Nakes dalam memberikan pelayanan Lansia sehingga dapat memberikan pelayanan dan edukasi yang berkualitas kepada sasaran. - Mengidentifikasi dan mencari solusi atas hambatan dan kendala dalam pemberian pelayanan serta melakukan fasilitasi Kab/Kota dalam meningkatkan pelayanan lansia - Melakukan pencatatan pelaporan pelayanan Lansia, sebagai dasar perencanaan. - Penguatan koordinasi dan kolaborasi LP/LS terkait program Lansia. 4. Pengelolaan kesehatan usia produktif diarahkan pada peningkatan capaian skrining layak hamil bagi Catin dan PUS melalui penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Catatan Sipil, agar seluruh Catin tanpa terkecuali dapat terjangkau skrining dan tidak ada yang tertinggal. 5. Penguatan Aksi Konvergensi Intervensi Gizi Spesifik, kegiatan ini meliputi Koordinasi Lintas Sektor dalam PPS, Pendampingan Aksi Konvergensi di 5 Wilayah Balkesmas, Penguatan Surveilans GIZI KIA dan Monitoring aksi Konvergensi secara daring. 6. Koordinasi Pelayanan Gizi Bencana. Pelayanan Gizi Bencana di prioritas kan di daerah rawan Bencana Tanah Longsor di Kab Banjarnegara dilakukan secara daring. 7. Fasilitasi Pelaksanaan Pemberian PMT Lokal. Dilakukan secara daring sebagai persiapan dan evaluasi sebanyak 3x dan pendampingan PMT lokal bagi Balita dan Ibu Hamil di 10 lokus Posyandu terpilih. 8. Akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan melakukan kegiatan penguatan peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	bertujuan untuk meingkatkan akses layanan dan pelayana RS PONEK yang berkualitas. 9. Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan melalui Pelatihan/ pengembangan kompetensi lainnya.	
3	Rekomendasi: Akselerasi targeting indikator aspek Kesehatan. Terhadap capaian IPM yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di pulau Jawa, maka dari aspek Kesehatan (UHH) perlu mengakselerasi targeting indikatornya agar lebih optimistik. <u>DINAS KESEHATAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Target UHH Tahun 2025: 74,92 sementara target UHH nasional 74,43. Tindaklanjut TA 2026: Target UHH Tahun 2026: 75,09 Dinas Kesehatan sudah berupaya memasang target yang optimis pada Tahun 2026 melebihi target nasional	Akselerasi target indikator yang lebih optimis dapat memacu kinerja perangkat daerah yang lebih agresif dan fokus terhadap penurunan angka stunting serta dapat memacu inovasi pada program penurunan stunting di Jawa Tengah
4	Rekomendasi: Aspek Kesehatan, Dimana realisasi kebijakan belum terlihat jelas. Jika dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh, belum terlihat jelas realisasi atas kebijakan tersebut dengan program/kegiatan yang dilaporkan. Semisal kebijakan terkait Perluasan penemuan kasus, penurunan kasus tular vector, cakupan layanan deteksi dini, Penguatan klaster Kesehatan belum terlihat realisasinya. <u>DINAS KESEHATAN</u> Tindaklanjut TA 2025 Dinas Kesehatan sudah menganggarkan kegiatan untuk perluasan penemuan kasus dengan realisasi: 1. Peningkatan jumlah pemeriksaan skrining malaria dari 30.478 pada th. 2024, capaian 2025 sebesar 44.060 2. Peningkatan penemuan TBC dari 56.473 (58%) menjadi 89.967 (83,70%) 3. Peningkatan keberhasilan pengobatan TBC dari 85% menjadi 85,40% Penurunan Kasus Tular Vector: 1. Jumlah kasus DBD tahun 2024 sebesar 17.636 kasus (IR = 50,1/100.000) ,tahun 2025 = 8.587 kasus (IR= 22,23/100.000) 2. Jumlah kematian DBD tahun 2024 sebesar =217 kasus (CFR=2,1) , tahun 2025 = 75 kasus (CFR = 0,8) 3. Jumlah kasus malaria tahun 2024 sebanyak =747 kasus , tahun 2025 jumlah kasus = 700 kasus 4. Tahun 2024 – 2025 sudah tidak ditemukan penularan lokal yang berpotensi menimbulkan KLB malaria Cakupan Layanan Deteksi Dini dengan realisasi:	1. Peningkatan penemuan kasus malaria dan TBC. Dengan meningkatnya penemuan diharapkan akan meningkat pula pengobatan dan keberhasilan pengobatan penyakit malaria dan TBC 2. Penurunan kasus tular vektor DBD dan malaria dan penurunan kasus kematian DBD 3. Peningkatan cakupan layanan deteksi dini TB, kanker payudara dan kanker serviks, Hipertensi, Obesitas,

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	1. TB: Pengembangan asistensi bekerjasama dengan tim USAID bebas TB melalui program kerja yang telah memberikan asisten teknis pada Tahun 2024 5 Kab/kota Dampungan (Kota Semarang, Kota Surakarta, Cilacap, Tegal, dan Kudus) untuk membentuk tim percepatan pengendalian TB 2025 dikembangkan menjadi 7 Kab dampungan (Kab Semarang, Demak, Sragen, Banyumas, Brebes, Purbalingga dan Pemalang). Terkait kebijakan TB melalui Perpres No 67 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penanggulangan TBC harus ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui salah satu prioritas utama dalam RPJMD, RKPD dan Renstra. 2. Pemeriksaan sadanis untuk mencegah resiko dan deteksi dini kanker payudara dan pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) untuk mencegah resiko dan deteksi dini kanker serviks pada Wanita Usia Subur (WUS) yang dilaksanakan bersamaan dengan CKG dan Spelling. 3. Deteksi dini dan pengendalian faktor resiko PTM (Hipertensi, Obesitas, DM, dan Kolesterol) pada kelompok pekerja. 4. Review dan analisis cakupan CKG bertujuan untuk identifikasi dan kendala CKG agar menghasilkan output peningkatan cakupan CKG di 35 Kab/Kota 5. Penguatan Klaster Kesehatan dengan penerapan sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) 6. Validasi data Capaian Tripel Eliminasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak melibatkan lintas program dengan sasaran ibu hamil (data dari program KIA), perencanaan penghitungan logistik pemeriksaan dilakukan oleh Bidang P2P, pendistribusian oleh Farmasi dan Gudang (Umum). Bumil diperiksa HIV 37%, diperiksa Sifilis 55%, diperiksa Hepatitis B sebanyak 38% dari sasaran bumil 2025. 7. Optimalisasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) merupakan pertemuan bersifat koordinatif untuk memperkuat lintas sektor dalam penanggulangan HIV AIDS. Tindaklanjut TA 2026: 1. Mentoring dan audit klinis kasus DBD dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga kesehatan dalam tata laksana pasien DBD melalui kegiatan respon cepat kewaspadaan KLB arbovirosis, pembentukan pokja-nal arbovirosis tingkat provinsi dengan tujuan menurunkan faktor resiko kematian akibat DBD. 2. Peningkatan kapasitas petugas dalam program P2 malaria melalui bimtek, webinar, wokrshop dan OJT. 3. Fasilitasi mentoring Layanan Tenofovir Pada Ibu Hamil di Kabupaten/Kota bertujuan untuk mencegah penularan hepatitis B ibu hamil ke anak yang dikandungnya atau Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) melalui kegiatan: 1) pertemuan di Kab/Kota dalam rangka Mentoring Layanan Tenofovir Pada Ibu Hamil di Kabupaten/Kota. Peserta: dokter umum puskesmas, penanggung jawab hepatitis puskesmas dan Kab/Kota 2) untuk memperluas layanan tenofovir pada ibu hamil, th 2023 di jateng hanya 2 kab (banyumas dan kt smg), 2024 menjadi 8 kab/ko). 2025 ke	Diabetis mellitus dan kolesterol. Semakin dini ditemukan diharapkan akan semakin besar peluang untuk disembuhkan dan memperpanjang harapan hidup. 4. Pencegahan tripel eliminasi (Eliminasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak) 5. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 6. Penurunan kasus di-are dan pneumonia pada balita 7. Pencegahan dan penanggulangan kasus TB dan Kusta

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	atas diharapkan seluruh faskes bisa melaksanakan layanan tenofovir untuk ibu hamil yg reaktif pemeriksaan HbsAg; 4. Audit klinis diare dan pneumonia di tingkat fasilitas kesehatan 5. Pemantapan Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) Desk Data Program HIV & IMS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam pencatatan dan pelaporan serta memvalidasi data capaian program HIV & IMS 6. Mentoring Klinis Layanan PDP 7. Menghitung validasi data terkait estimasi kasus TB, TC, TBC RO (TC), TSR (TBC SO), TBC RO (TSR), capaian pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) 8. Mentoring klinis TB pada anak menyelesaikan beberapa permasalahan utama dalam penanganan tuberkulosis anak 9. Mentoring klinis layanan TPT berfungsi untuk mengatasi kekurangan tenaga medis yang paham standar operasional prosedur (SOP) dan memastikan pelaksanaan program TPT berjalan sesuai protokol yang berlaku. 10. Evaluasi penderita TLFU (Traching Lost to Follow Up) 11. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di tingkat puskesmas agar mampu melakukan deteksi dini, penanganan tepat, dan pengelolaan pneumonia pada balita. 12. audit klinis kematian leptospirosis dan pneumonia 13. Mentoring Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) 14. Pendampingan persiapan Eliminasi Malaria kab Purworejo dilakukan dengan cara pertemuan, koordinasi, dan persiapan eliminasi malaria di Purworejo dan tingkat Provinsi. 15. Koordinasi persiapan eliminasi malaria tingkat provinsi dilakukan dengan: a) Bimtek surveilans dan penyelidikan epidemiologi b) Webinar penemuan dan tata laksana kasus malaria c) Workshop dan pencegahan dan pengendalian malaria Kegiatan tersebut diikuti oleh pengelola program malaria di Kabupaten, RS, dan puskesmas ada 8 Kab/Kota (Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kebumen, Batang, Kota Tegal, Banyumas dan Sragen) 16. Respon cepat kewaspadaan KLB melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) berbasis indikator dan kejadian 17. Koordinasi Pokjanel DBD menguatkan dukungan dan kolaborasi antar lintas sektor dan program dalam pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD). 18. Validasi data arbovirosis dan hepatitis 19. Pertemuan Lintas Sektor KPA Prov. Jateng diselenggarakan sebagai pertemuan koordinasi tahunan dengan membahas issue issue yang berkembang di masyarakat berdasarkan hasil capaian program supaya dapat diselesaikan secara multisektor. 20. Mentoring RAN penanggulangan pnemonia dan diare diikuti oleh pemegang program Pneumonia dan diare di tingkat kab/kota	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	21. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan kusta dan frambusia (SITASIA terupdate), meningkatkan penemuan kasus baru kusta dan segera ditata laksana sesuai standar dan tidak menjadi indeks case disekitarnya. Selain itu memastikan wilayah tersebut tidak memiliki kasus baru kusta dalam rangka menuju eliminasi kusta. 22. Pendampingan tatalaksana GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) di Jawa Tengah 23. Respon cepat penyakit potensial KLB di Jawa Tengah 24. Aktif Case Finding (ACF) di Jawa Tengah meningkatkan penemuan kasus tuberkulosis (TBC) yang tidak terdiagnosis secara dini, yang menghambat pengobatan dan mengurangi penularan di masyarakat. 25. Fasilitasi teknis P2ML (Pencegahan dan Pengendalian Masalah Lingkungan) 26. fasilitasi teknis P2PTV 27. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) eliminasi malaria tingkat provinsi di Jawa Tengah	
5	Rekomendasi: Isu strategis perlu mendapat porsi penjelasan dalam LKPJ. Terhadap isu strategis seperti Stunting, Angka Kematian Ibu, Cakupan Jaminan Kesehatan dan indikator strategis lainnya perlu mendapatkan porsi penjelasan dalam LKPJ. <u>DINAS KESEHATAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Penjelasan isu strategis seperti <i>stunting</i>, angka kematian ibu dan cakupan JKN sebagai berikut: - Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 20,7% menjadi 17,1%, melalui berbagai Upaya yaitu: - Mempersiapkan Generasi Muda yang sehat dengan minum TTD secara teratur, makan makanan bergizi, edukasi Gizi, pemeriksaan kesehatan sehingga akan menjadi catin yang sehat dan bumil yang sehat sehingga diharapkan akan lahir bayi-bayi yang sehat - Pelayanan kesehatan skrining layak hamil Catin dan PUS untuk mendorong peningkatan cakupan skrining layak hamil Catin dan PUS untuk menurunkan resiko ibu hamil yang beresiko. Demikian juga pengelolaan KtPA, disabilitas dan kespro pada bencana dilakukan agar Puskesmas segera mampu melakukan pelayanan sesuai standar. - pelayanan Gizi tetap memprioritaskan aksi konvergensi dalam PPS diantaranya monitoring PMT Lokal, Koordinasi TPPS dalam PPS, Penguatan Surveilans GIZI KIA, serta Pendampingan PMT Lokal di Posyandu - Dalam rangka penurunan kasus kematian ibu, kegiatan focus pada Fasilitasi implementasi AMPSR di 10 lokus terbagi menjadi pendampingan luring (kab semarang, kendal, demak, sragen, purworejo, surakarta, rembang, pati); pendampingan daring (kota semarang, sukoharjo, karanganyar) dengan fokus kegiatan pada proses identifikasi masalah dan menyusun	- Penurunan prevalensi stunting - Penurunan kasus kematian ibu - Pembiayaan JKN masyarakat miskin

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Rekomendasi SMART di lingkup RS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pembelajaran strategis terkait pengelolaan kasus emergency maternal dan neonatal dengan pendekatan mutu PPK dan Drill emergency spontan. 3. Koordinasi Pelayanan Gizi Bencana 4. Pembiayaan kesehatan peserta jaminan kesehatan, sesuai dengan PerMen-keu No 78 tahun 2020 dan Perpres 64 tahun 2020, mewajibkan pembayaran kontribusi PBIJK menjadi wewenang Pusat dan Provinsi, serta PBPU yang menjadi kewenangan Pusat dan daerah termasuk provinsi. Anggaran tahun 2025 dibayarkan dalam rangka memenuhi kewajiban pemda provinsi dan mewujudkan UHC. UHC dimaknakan sebagai upaya pemerataan akses dan mutu pelayanan. Iuran yang dibayarkan abtara lain digunakan untuk pembiayaan layanan kesehatan dan diharapkan mempunyai dampak terhadap peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan yang bermutu terwujud salah satu karena dilayani oleh tenaga medis/kesehatan yang profesional. Tindaklanjut TA 2026: Pada Tahun 2026 kembali di usulkan 1. kegiatan fasilitasi implementasi AMPSR fokus pada tindak lanjut hasil rekomendasi AMPSR di 6 lokus RS terpilih (Jepara. Kota Tegal, Blora, Wonogiri, Kota Pekalongan dan Pemalang) dengan fokus pada monitoring evaluasi tindak lanjut hasil rekomendasi AMPSR dengan pendekatan management mutu dan penguatan skill emergency (drill emergency). 2. pelayanan Gizi tetap memprioritaskan aksi konvergensi dalam PPS diantaranya monitoring PMT Lokal, Koordinasi TPPS dalam PPS, Penguatan Surveilan GIZI KIA, serta Pendampingan PMT Lokal di Posyandu. Pelayanan kesehatan skrining layak hamil Catin dan PUS untuk mendorong peningkatan cakupan skrining layak hamil Catin dan PUS untuk menurunkan resiko ibu hamil yang beresiko. Demikian juga pengelolaan KtPA, disabilitas dan kespro pada bencana dilakukan agar Puskesmas segera mampu melakukan pelayanan sesuai standar	
	<u>RSUD dr.ADHYATMA, MPH</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Pencegahan dan penanganan stunting dan Angka Kematian Ibu dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling / Speling) dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00. Pada tahun 2025 telah dilakukan spelling kesehatan sebanyak 25 kali di beberapa lokasi dengan pelayanan skrining stunting, TB, Obsgyn, Penyakit Dalam, Spesialis Anak, CKG, Spesialis Syaraf, Spesialis Mata, Pemeriksaan IVA, Spesialis Paru, Spesialis Kulit, Spesialis THT, HMPV DNA, Jiwa dan umum dengan jumlah pelayanan pasien sebanyak 2.981 untuk tahun 2026 dilakukan kembali kegiatan yang sama dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan pola asuh yang tepat 3. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo mendukung program stunting melalui edukasi di desa dampingan, pemeriksaan SHK di ruangan neonatus. Prof. Dr. Margono Soekarjo sudah menjadi rumah sakit jejaring PONEK di Jawa Tengah bagian barat selatan dan ditunjuk sebagai mentor pelayanan PONEK.	1. Penurunan prevalensi stunting 2. Penurunan kasus kematian ibu 3. Pembiayaan JKN masyarakat miskin
	<u>RSUD dr. REHATTA</u> Tindaklanjut TA 2025: RSUD dr. Rehatta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting dan Angka Kematian Ibu melalui kegiatan Spelling, "Rehatta turun gunung", pendampingan Puskesmas sekitar RS serta pemberian bantuan makanan pendamping ASI (MPASI) pada balita dengan sumber anggaran dari APBD, BLUD maupun UPZ. Tindaklanjut TA 2026: Meningkatkan cakupan dan jumlah peserta pencegahan dan penanganan stunting dan Angka Kematian Ibu dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling / Speling).	1. Penurunan prevalensi stunting 2. Penurunan kasus kematian ibu 3. Pembiayaan JKN masyarakat miskin
	<u>RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO</u> Tindaklanjut TA 2025: 1. Kegiatan pencegahan dan penanganan stunting yang telah dilaksanakan: 1) kegiatan di Desa dampingan dengan pemberian makanan tambahan (PMT) pada 22 balita di Desa Wates, Kedungjati, Kabupaten Grobogan. 2) kegiatan bakti sosial di Pondok Pesantren At Taqwa, Meteseh, Semarang dengan jumlah 60 anak berupa cek kesehatan kepada anak-anak Ponpes dan masyarakat umum. 3) kegiatan di Desa dampingan pada tanggal berupa pemberian 23 krat (552 kaleng kornet daging sapi) di Desa Wates, Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Sasaran dari kegiatan ini adalah 22 ibu hamil dan 16 anak balita. 4) Kegiatan bakti sosial di Desa Dampingan (Desa Wates, Kedungjati, Grobogan). Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada 22 balita. 2. Kegiatan untuk pencegahan dan penanganan angka kematian ibu dengan melaksanakan kegiatan rutin pemeriksaan kesehatan ibu hamil minimal 2x dalam sebulan (2 puskesmas) yang sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilakukan spelling Obsgyn sebanyak 16 kali di puskesmas-puskesmas yang ada di Semarang dengan jumlah pelayanan terhadap ibu hamil sebanyak 194 Tindaklanjut TA 2026: Kegiatan Pencegahan dan penanganan stunting dan angka kematian ibu dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta	1. Penurunan prevalensi stunting 2. Penurunan kasus kematian ibu 3. Pembiayaan JKN masyarakat miskin

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling / Speling).	
	<u>RSJD dr. ARIF ZAINUDIN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Pencegahan dan penanganan stunting dan Angka Kematian Ibu dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling / Speling) dengan alokasi anggaran pada tahun 2025 dan 2026 sebesar Rp 120.000.000 Kegiatan pada tahun 2025 dilaksanakan di desa : 1. Bulurejo, Kec.Gondangrejo Karanganyar, 2. Sampetan Gladaksari Boyolali, 3. Kedungwinong Sukolilo kab Pati, 4. Wedung, Bonang kab Demak 5. Jeblogan, Karangtengah Kab Wonogiri 6. Ketundan, Pakis Kab. Magelang 7. Kutowinangun Lor, Tingkir Kab. Salatiga 8. Fakultas Kesmas UNDIP 9. Losari, Pakis Kab. Magelang 10. Central Java Health and Wellness Expo 2025	1. Penurunan prevalensi stunting 2. Penurunan kasus kematian ibu 3. Pembiayaan JKN masyarakat miskin
	<u>RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI</u> Tindaklanjut TA 2025: RSJD Dr. RM. Soedjarwadi secara aktif melakukan tindakan Pencegahan dan penanganan stunting melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Pencegahan Stunting) dan (Spesialis Keliling/Speling). Rincian kegiatan tersebut antarlain: 1) Penyuluhan Kesehatan, stunting dan Penyuluhan Kesehatan PHBS yang bertempat di 3 lokasi (KBTK Islam Buah Hati Kita, Klinik Rawat Jalan, dan Klinik TKA). 2) Speling Kesehatan yang dilaksanakan di 9 lokasi yang berbeda dengan jumlah peserta yang mendapatkan manfaat spelling sebanyak 771 orang. Tindaklanjut TA 2026: Pencegahan dan penanganan stunting dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling / Speling).	1. Penurunan prevalensi stunting 2. Penurunan kasus kematian ibu 3. Pembiayaan JKN masyarakat miskin
6	Rekomendasi: Perlu penguatan/sinkronisasi data BPJS dengan sistem rujukan untuk memastikan distribusi pasien merata (tidak overload di RSUD tertentu). Sosialisasi dan pendaftaran wajib BPJS bagi masyarakat miskin dan rentan serta peningkatan kapasitas rumah sakit daerah agar mampu menangani kasus kompleks.	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025 dan Tahun 2026: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan Pendampingan melalui Percepatan Program Pengampunan Layanan Prioritas dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp22.790.000,00 dan tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp25.850.000,00	Tercapainya pemerataan distribusi pasien dan dan penoptimalkan pasien yang terlayani oleh Rumah Sakit
	<u>RSUD dr.ADHYATMA, MPH</u> Tindaklanjut TA 2025: Peningkatan kapasitas rumah sakit sudah dialokasikan melalui Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kedokteran di RSUD dr.Adhyatma, MPH. Serta peningkatan kapasitas SDM melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 1) Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) di rumah sakit yang disesuaikan dengan strata kompetensi pelayanan dan pemenuhan kelas rawat inap standar. 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2025 dengan indikator Persentase SDM kesehatan yang terlatih sebesar 93,60% Tindaklanjut TA 2026: Peningkatan kapasitas rumah sakit sudah dialokasikan melalui Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kedokteran di RSUD dr.Adhyatma, MPH. Serta peningkatan kapasitas SDM melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Mengoptimalkan sarana, prasarana, serta alat kedokteran di RSUD dr. Adhyatma, MPH, serta kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung pelayanan yang berkualitas dan merata.
	<u>RSUD Dr. MOEWARDI</u> Tindaklanjut TA 2025: 1. Sosialisasi dan penguatan sistem konsul internal, rujuk internal, dan Program Rujuk Balik untuk pemerataan distribusi pasien sesuai jenis penyakitnya. 2. Pengampunan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro (KJSU) - non KJSU untuk meningkatkan kompetensi rumah sakit daerah dan jejaring pengampunan. Tindaklanjut TA 2026: Peningkatan cakupan Program Rujuk Balik dan koordinasi alur pelaksanaannya Pembuatan KAK 2026 dan pelaksanaan visitasi, workshop, serta proctorship ke Seluruh RS jejaring.	Tercapainya pemerataan distribusi pasien dan dan penoptimalkan pasien yang terlayani oleh Rumah Sakit
	<u>RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO</u> Tindaklanjut TA 2025: Regulasi BPJS yang mengharuskan rujukan dilakukan secara berjenjang dari FKTP ke tingkat rujukan yang lebih tinggi. Rumah Sakit Prof. Dr. Margono	Tercapainya pemerataan distribusi pasien dan dan penoptimalkan pasien yang terlayani oleh Rumah Sakit

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Soekarjo pada tahun 2024 telah meningkat menjadi kelas A sehingga mampu tatalaksana penanganan sub spesialisik yang lebih kompleks.	
	<u>RSUD dr. REHATTA</u> Tindaklanjut TA 2025: RSUD dr. Rehatta berkomitmen dalam program peningkatan kapasitas RS dengan tindaklanjut: 1. Pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan sesuai dengan regulasi RS berbasis kompetensi, pemenuhan kelas rawat inap standar. 2. RS melalui diklat RS secara rutin mengadakan kegiatan seminar, workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, serta mengirimkan SDM kesehatan untuk mengikuti pelatihan khusus seperti pelatihan NICU dll.	Tercapainya pemerataan distribusi pasien dan dan penoptimalkan pasien yang terlayani oleh Rumah Sakit
	Tindaklanjut TA 2026: RSUD Dr. Rehatta akan terus berbenah melengkapi sarana prasaran serta alat kesehatan yang belum terealisasi pada anggaran TA 2025 melalui Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kedokteran di RSUD dr. Rehatta serta peningkatan kapasitas SDM melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	
	<u>RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO</u> Tindaklanjut TA 2025 dan Tahun 2026: Peningkatan kapasitas rumah sakit melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan/alat kedokteran di RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Serta peningkatan kapasitas SDM melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi dengan anggaran BLUD. dengan: 1. pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk pemenuhan standar kelas rawat inap standar dan rumah sakit berbasis kompetensi. 2. SDM: peningkatan jumlah SDM dengan penambahan tenaga medis dokter sub spesialis, spesialis dan tenaga kesehatan lainnya, peningkatan kapasitas SDM dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi dan penguatan jejaring dengan fasyankes yang ada disekitar rumah sakit.	Tercapainya pemerataan distribusi pasien dan dan penoptimalkan pasien yang terlayani oleh Rumah Sakit
	<u>RSJD dr. ARIF ZAINUDIN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Peningkatan kapasitas rumah sakit sudah dialokasikan melalui Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kedokteran di RSUD Dr. Arif Zainudin. Tindaklanjut: Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di rumah sakit yang disesuaikan dengan strata kompetensi pelayanan dan pemenuhan kelas rawat inap standar.	Tercapainya pemerataan distribusi pasien dan dan penoptimalkan pasien yang terlayani oleh Rumah Sakit

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>RSJD Dr. RM. Soedjarwadi</u> Tindaklanjut TA 2025: RSJD Dr. RM. Soedjarwadi telah rutin melaksanakan koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Dan terkait dengan peningkatan kapasitas rumah sakit, Upaya yang telah dilakukan antara lain: 1. Pembelian tanah di sekitar rumah sakit (Pembelian dilakukan dengan menggunakan dana BLUD dan progres sampai dengan akhir triwulan III berproses tahap balik nama). 2. Pengadaan alat kedokteran dan alat kesehatan (Stetoscop, tensimeter, HRP Binocular Lupe with Lupelight set, calliper, CT Scan) 3. Sarana dan SDM untuk memenuhi persyaratan klasifikasi kompetensi rumah sakit. Tindaklanjut TA 2026: Peningkatan kapasitas rumah sakit dengan melakukan pembangunan gedung rawat inap non jiwa dan renovasi ruang untuk menambah jumlah kapasitas rumah sakit.	Tercapainya pemerataan distribusi pasien dan dan penoptimalkan pasien yang terlayani oleh Rumah Sakit
7	Rekomendasi: Terhadap UPT Dinkes (Balai Labkes PAK, BKIM Provinsi Jawa Tengah, Balkesmas Wilayah (Semarang, Ambarawa, Klaten, Magelang, Pati), Bapelkes Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan core bisnisnya (Teknis Operasional) mampu mendukung dan menungkit kinerja layanan/ urusan Kesehatan. <u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025: Indikator kinerja UPT Dinkes sudah mendukung indikator kinerja Dinas Kesehatan sesuai dalam cascading Renstra 2025-2029. Misal indikator sasaran tujuan prevalensi stunting, indikator sasaran persentase penurunan kasus stunting, indikator program prevalensi wasting pada Balita, indikator program di UPT: Persentase kab/kota dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah pada minimal 50% sasaran, sehingga apabila dilihat dari cascading Renstra 2025-2029, kinerja UPT sudah mengungkit kinerja layanan/ urusan kesehatan. Tindaklanjut TA 2026: Indikator kinerja UPT Dinkes sudah mendukung indikator kinerja Dinas Kesehatan sesuai dalam cascading Renstra 2025-2029. Misal indikator sasaran tujuan prevalensi stunting, indikator sasaran persentase penurunan kasus stunting, indikator program prevalensi wasting pada Balita, indikator program di UPT: Persentase kab/kota dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah pada minimal 50% sasaran, sehingga apabila dilihat dari cascading Renstra 2025-2029, kinerja UPT sudah mengungkit kinerja layanan/ urusan kesehatan.	Keselarasan indikator kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT, sehingga indikator UPT sudah mendukung capaian indikator di Dinas Kesehatan Provinsi
	Rekomendasi:	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
8	Mendorong penyusunan standar minimum pelayanan publik (SPM) kesehatan berbasis kebutuhan lokal (diluar dari SPM Kemenkes) agar menjawab kebutuhan masyarakat mulai dari waktu tunggu, sediaan obat, respons time dan lainnya sesuai kebutuhan lokal). <u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025: Persiapan penyusunan Peraturan Gubernur terkait tata kelola BLUD bidang kesehatan yang didalamnya sudah mencakup SPM RS (berpedoman pada Permenkes nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) dan pengusulan pencabutan Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Koordinator dari Biro Perekonomian Sekda Prov. Jateng) Tindaklanjut TA 2026: Mengawal Implementasi Peraturan Gubernur yang baru tentang Tata Kelola BLUD Bidang Kesehatan	1. Tersusunnya Rapergub tata kelola BLUD dengan Pergub tata kelola BLUD baru mencabut Pergub lama tentang pencapaian SPM RS 2. Tersediannya Juknis Standar Pelayanan Minimum RS
9	Rekomendasi: Mendorong peningkatan kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dengan pendekatan berbasis desa. <u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025: 1) Penyuluhan melalui Berbagai Media (dalam rangka penanganan masalah kesehatan prioritas) berupa cetak (umbul-umbul HKN, spanduk MMT hari besar, leaflet, poster, kit kader); Pameran, Dialog radio 2) Koordinasi Forum Komunikasi Germas Tingkat Provinsi 3) Implementasi ILP Tindaklanjut TA 2026: 1) Advokasi Implementasi Kebijakan dalam Upaya Peningkatan Aktivitas Fisik di 10 Kab/Kota (angka PTM tinggi) 2) Koordinasi Forkom Germas 3) Penyuluhan melalui berbagai media (spot radio, dialog radio), cetak (umbul-umbul, spanduk, leaflet), pameran 4) Monev Implementasi ILP di Pustu dan Posyandu	1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Meningkatnya koordinasi/dukungan dari Lintas Sektor dalam implementasi GERMAS
	<u>RSUD dr.Adhyatma, MPH</u> Tindaklanjut TA 2025: Kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan pendekatan berbasis desa dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling I Speling) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000 meliputi: 1) Edukasi dan deteksi dini penyakit kanker di 3 lokasid dengan peserta sebanyak 149 peserta	1. Menoptimalkan pelaksanaan kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan secara dini, imunisasi, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Meningkatkan kesadaran dan perilaku

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	2) Speling di 25 lokasi dengan peserta sebanyak 2.981 pelayanan yang meliputi pemeriksaan kanker, TBC, obgyn, anak, penyakit dalam, mata, THT, edukasi nutrisi, saraf, IVA test, HPV DNA, dan pelayanan Kesehatan lainnya Tindaklanjut TA 2026: Kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan pendekatan berbasis desa dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling I Speling) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000	hidup sehat masyarakat secara berkelanjutan.
	<u>RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Kampanye kesehatan RSMS dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan baik secara pra, intra dan post pada desa dampingan dan gerakan masyarakat hidup sehat (komunitas penderita jantung, diabetes, HIV/AIDS, stroke), penyuluhan kesehatan pada siswa SMA dan pondok pesantren serta pemeriksaan kesehatan penunggu/jamaah masjid rumah sakit mendukung upaya promotif dan preventif.	1. Menoptimalkan pelaksanaan kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan secara dini dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat secara berkelanjutan.
	<u>RSUD dr. REHATTA</u> Tindaklanjut TA 2025: Kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan pendekatan berbasis desa dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling Speling). 1. Promotif dan preventif kasus bedah, geriatri serta imunisasi di desa Bandungharjo, kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara 2. Promotif dan preventif germas di desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tindaklanjut TA 2026: Meningkatkan cakupan dan jumlah peserta Kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan pendekatan berbasis desa dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling/Speling).	1. Menoptimalkan pelaksanaan kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan secara dini dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat secara berkelanjutan.
	<u>RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO</u> Tindaklanjut TA 2025:	1. Menoptimalkan pelaksanaan kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Upaya promotif dan preventif masuk dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Spesialis Keliling/Speling) dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya; 1. Kegiatan speling di desa dampingan berupa penyuluhan kesehatan, skrining jiwa serta pemeriksaan kesehatan yang melibatkan dokter spesialis jiwa, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis obgyn. 2. Kampanye Kesehatan tentang PHBS di SMK Tlogosari tanggal 16 Juli 2025 dengan 92 peserta 3. Kegiatan kampanye kesehatan melalui inovasi La Ketan Gula Jawa (Layanan Kesehatan Unggulan Jiwa Remaja) di SMAN 2 Semarang berupa Screening, konsultasi dan Mini Penyuluhan Kesehatan Jiwa Remaja. 4. Edukasi yang dilakukan melalui siaran radio secara rutin oleh tenaga medis dari RS 5. Pelaksanaan kegiatan Spesialis Keliling/Speling dari bulan Mei - September 2025 sejumlah 35 kegiatan. Tindaklanjut TA 2026: Kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan pendekatan berbasis desa dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	secara dini dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat secara berkelanjutan.
	<u>RSJD dr. ARIF ZAINUDIN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining dini, imunisasi, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan pendekatan berbasis desa dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Spesialis Keliling/ Speling) dengan alokasi anggaran tahun 2025 dan 2026 sebesar Rp 120.000.000. Kegiatan skrining (ANC, Jiwa, Kulit Kelamin, mata dll) pada tahun 2025 dilaksanakan di 1. Bulurejo, Kec.Gondangrejo Karanganyar, 2. Sampetan Gladaksari Boyolali, 3. Kedungwinong Sukolilo kab Pati, 4. Wedung, Bonang kab Demak 5. Jeblogan, Karantengah Kab Wonogiri 6. Ketundan, Pakis Kab. Magelang 7. Kutowinangun Lor, Tingkir Kab. Salatiga 8. Fakultas Kesmas UNDIP 9. Losari, Pakis Kab. Magelang	1. Menoptimalkan pelaksanaan kampanye kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan secara dini dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat secara berkelanjutan.
	<u>RSJD Dr. RM. Soedjarwadi</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Penyuluhan kesehatan telah dilaksanakan didalam dan diluar rumah sakit melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta	1. Menoptimalkan pelaksanaan penyuluhan kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp245.564.000,00. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyuluhan kesehatan pada 29 titik lokasi dan Spelling Kesehatan pada 21 titik lokasi. Sedangkan untuk tahun 2026 dilaksanakan kembali dengan kegiatan yang sama dengan anggaran sebesar Rp155.000.000.	secara dini dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat secara berkelanjutan.
	<u>RSUD Dr. Moewardi</u> Tindaklanjut TA 2025: Melaksanakan program penyuluhan kesehatan, sosialisasi germas, skrining bayi risiko stunting, program jambanisasi di Desa Dampingan Tindaklanjut TA 2026: 1. Melakukan asesment desa dampingan yang baru 2. Melaksanakan program penyuluhan kesehatan, sosialisasi germas, dan skrining bayi risiko stunting Melaksanakan program bantuan infrastruktur dengan melihat kondisi desa dampingan (jambanisasi/rumah layak huni, dsb)	1. Menoptimalkan pelaksanaan penyuluhan kesehatan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan secara dini dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat secara berkelanjutan.
10	Rekomendasi: Perlu akselerasi dan percepatan digitalisasi layanan kesehatan, seperti telemedicine dan rekam medis elektronik hingga ke Puskesmas (<i>integrated less boundaries</i>). Penguatan layanan kesehatan primer, terutama Puskesmas dengan kapasitas rawat inap dan layanan UGD 24 jam.	
	<u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025: Penguatan layanan kesehatan Primer di Puskesmas: 1. Puskesmas Banyuasin Kab. Purworejo. 2. Puskesmas Kaligesing Kab. Purworejo 3. Puskesmas Wedung 2 Kab. Demak 4. Puskesmas Kebonagung Kab. Demak 5. Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes Tindaklanjut TA 2026: Rencana penambahan 5 Puskesmas melalui APBN Kemenkes	Masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan lebih mudah dan cepat, terutama di daerah terpencil.
11	Rekomendasi: Mengawal implementasi atas janji dalam Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 seperti:	
a	Rekomendasi: Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD</u>	Masyarakat dapat mengakses layanan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Tindaklanjut TA 2025: Terkait dengan program kerja Bapak Gubernur tentang puskesmas keliling diakselerasi menjadi spesialis keliling yang tujuannya sama untuk mendekatkan layanan yang ada di Puskesmas hal ini sudah terakomodir dalam Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 Tindaklanjut TA 2026: Penguatan Puskesmas Pembantu melalui bantuan sarpras kesehatan, dan peningkatan cakupan layanan spesialis kesehatan keliling dengan pendekatan kesehatan prioritas	kesehatan lebih mudah dan cepat, terutama di daerah terpencil.
	<u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025: 1) Melakukan pembinaan kepada Dinkes Kab/kota dan puskesmas melalui zoom meeting, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di wilayah kerjanya. 2) Sudah mengawal dan mengusulkan sarana prasarana alkes dari Kab/kota ke Kemenkes melalui aplikasi SOPHI dan InPULS. Anggaran dari BLN Tindaklanjut TA 2026: 1) Dinas Kesehatan Provinsi mendorong Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas untuk melibatkan jejaring puskesmas dalam mendukung program pemerintah Mengawal dan mengusulkan sarana prasarana alkes dari Kab/kota ke Kemenkes melalui aplikasi SOPHI dan InPULS	1. Akses dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan, koordinasi antar fasilitas kesehatan (seperti klinik, rumah sakit, dan apotek), efektivitas dan efisiensi layanan, serta memperkuat cakupan program kesehatan prioritas 2. Peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, pengobatan yang lebih tepat sasaran peningkatan efisiensi operasional, pencegahan penyakit yang lebih baik, serta kepuasan pasien
b	Rekomendasi: Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu. Pelayanan tanpa Antri Lansia (Geriatri), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di RS.	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD</u> Tindaklanjut TA 2025: Dalam penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu.masih dilaksanakan perencanaan kebutuhan oleh Dinas Kesehatan dan membutuhkan alokasi anggaran yang besar dan masih disusun regulasi untuk pemenuhan dokter dan perawat.sedangkan Pelayanan tanpa Antri Lansia (Geriatri), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di RS sudah dilaksanakan oleh 7 RS milik Pemprov melalui fasilitas fast track Tindaklanjut TA 2026:	Mendorong pelayanan kesehatan yang lebih baik

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Dalam penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu. masih dilaksanakan perencanaan kebutuhan oleh Dinas Kesehatan dan membutuhkan alokasi anggaran yang besar dan masih disusun regulasi untuk pemenuhan dokter dan perawat. sedangkan Pelayanan tanpa Antri Lansia (Geriatric), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di RS sudah dilaksanakan oleh 8 RS milik pemprov melalui <i>fasilitas fast track</i>.	
	<u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025: 1. Mapping Puskesmas Pembantu yang sudah dan yang belum mempunyai 1 Dokter dan 1 Bidan 2. Mapping Fastrack di RSUD Kab/Kota (eksisting data sd 31 Desember 2025 ada 7 RSUD Provinsi sudah dilakukan mapping fastrack. Jumlah RSUD di Kab/Kota sebanyak 63 RSUD dengan rincian yang sudah seluruhnya di mapping fastrack 23 RSUD, yang sebagian mapping fastrack 29 dan yang belum sama sekali ada 11 RSUD. 3. Advokasi 6 RS untuk segera mengimplementasikan fastrack Geriatric, Ibu hamil, Bayi, Balita, dan Disabilitas Tindaklanjut TA 2026: 1. Pemenuhan 1 pustu dengan 1 dokter dan bidan dengan mendorong kab/kota untuk memenuhi pustu dengan 1 dokter dan 1 bidan 2. Pendampingan 6 RSUD dalam bentuk fasilitasi teknis untuk mendorong RS menyediakan sarana prasarana yang ramah terhadap pasien disabilitas	1. Mendapatkan data existing dokter dan perawat di seluruh puskesmas pembantu di Provinsi Jawa Tengah. 2. Mendorong RS untuk memberikan pelayanan fast track bagi kelompok rentan. 3. Mendorong kab/kota untuk Pemenuhan 1 pustu dengan 1 dokter dan 1 bidan
	<u>RSUD dr. Adhyatma, MPH</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Penyediaan layanan tanpa antri (<i>fast track</i>) untuk Lansia (Geriatric), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di RS dengan kondisi tertentu. Sampai dengan Desember 2025 digitalisasi layanan sampai dengan <i>fast track</i>. Layanan <i>fast track</i> saat ini sudah berjalan secara sistem terintegrasi dan telah dilaksanakan monitoring evaluasi berkesinambungan	Mempermudah dan mempercepat akses pelayanan Kesehatan untuk Lansia (Geriatric), Ibu hamil dan Disabilitas
	<u>RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Layanan <i>fast track</i> di rumah sakit yang telah terintegrasi dengan sistem pendaftaran sampai dengan hantaran obat.	Mempermudah dan mempercepat akses pelayanan Kesehatan masyarakat
	<u>RSUD dr. REHATTA</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Realisasi program aksi Gubernur nomor 36 dilaksanakan menggunakan anggaran BLUD dengan penyediaan layanan tanpa antri (<i>fast track</i>) untuk Lansia (Geriatric), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di RS dengan kondisi tertentu.	Mempermudah dan mempercepat akses pelayanan Kesehatan masyarakat

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Sampai Juni 2025 layanan digitalisasi melalui <i>fast track</i> , Layanan <i>fast track</i> saat ini sudah berjalan dan saat ini sudah ada di tampilan komputer kurang ditampilkan di layar monitor antrian.	
	<u>RSJD Dr. Amino Gondohutomo</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Pelayanan tanpa antrian yaitu dengan Layanan <i>fast track</i> sudah dapat digunakan pada pasien yang datang secara langsung maupun melalui aplikasi. Launching pada bulan Agustus 2025. dengan kriteria pengguna fastrack yaitu pasien Lansia (Geriatri), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan. Layanan <i>fast track</i> telah digunakan sebanyak 894 pengguna dalam periode Mei-September 2025.	Mempermudah dan mempercepat akses pelayanan Kesehatan masyarakat
	<u>RSJD dr. ARIF ZAINUDIN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit dilaksanakan menggunakan anggaran BLUD berupa penyediaan layanan tanpa antri (<i>fast track</i>) untuk Lansia (Geriatri), Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di RS dengan kondisi tertentu.	Mempermudah dan mempercepat akses pelayanan Kesehatan masyarakat
	<u>RSJD Dr. RM. Soedjarwadi</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: RSJD Dr. RM. Soedjarwadi melaksanakan layanan <i>Fast Track</i> dengan kriteria ibu hamil, disabilitas, lansia dengan alat bantu mobilitas, anak dibawah usia 1 tahun, pensiunan dan Kondisi medis tertentu berdasarkan rekomendasi dokter sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah pasien yang menggunakan layanan <i>fast track</i> sebanyak 3.664 orang pasien.	Mempermudah dan mempercepat akses pelayanan Kesehatan masyarakat
	<u>RSUD Dr. Moewardi</u> Tindaklanjut TA 2025: Penguatan dan perbaikan berkelanjutan untuk program <i>fast track</i> di RSUD Dr. Moewardi Tindaklanjut TA 2026: Sinkronisasi sistem SIMRS dan KHS agar antrian <i>fast</i> di pelayanan penunjang dapat diwujudkan <i>by system</i> sehingga lebih efektif dan efisien.	Mempermudah dan mempercepat akses pelayanan Kesehatan masyarakat
C	Rekomendasi: Pap smear Gratis	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD</u> Tindaklanjut TA 2025: Pelayanan skrinning IVA di puskesmas dan pada saat pelaksanaan CKG dan spelling dengan target 14,28 % Tindaklanjut TA 2026:	Meningkatkan cakupan deteksi dini kasus penyakit kanker payudara dan serviks

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Skrining Ca Servix, untuk perempuan 30- 50 tahun yang aktif secara sexual, IVA = @ Rp 20.000; Sasaran 5% dari 5.783.148 orang <u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025: Papsmear gratis dilaksanakan dengan pemeriksaan <i>Inspeksi Visual Asam Acetat</i> (IVA) untuk mendeteksi secara dini adanya kanker leher rahim dengan hasil lebih cepat dan akurat karena dapat diketahui saat itu juga. dilakukan melalui kegiatan Deteksi Dini Payudara dan Kanker Serviks Rp89.289.000,00 Tindaklanjut TA 2026: Deteksi dini payudara dan kanker serviks Rp26.000.000,00	Meningkatkan cakupan deteksi dini kasus penyakit kanker payudara dan serviks
	<u>RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Melaksanakan pemeriksaan IVA di kegiatan Speling	Meningkatkan cakupan deteksi dini kasus penyakit kanker payudara dan serviks
	<u>RSUD dr. REHATTA</u> Tindaklanjut TA 2025: Papsmear gratis dilaksanakan dengan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Acetat (IVA) untuk mendeteksi secara dini adanya kanker leher rahim dengan hasil lebih cepat dan akurat karena dapat diketahui saat itu juga, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: 1. Edukasi pentingnya pemeriksaan IVA 2. Melengkapi alat pemeriksaan IVA Tindaklanjut TA 2026: Melengkapi pemeriksaan IVA serta kanker payudara	Meningkatkan cakupan deteksi dini kasus penyakit kanker payudara dan serviks
	<u>RSJD Dr. RM. Soedjarwadi</u> Tindaklanjut TA 2025: RSJD Dr. RM. Soedjarwadi telah melaksanakan Speling (Skrining dokter spesialis keliling) dengan bekerja sama dengan rumah sakit- rumah sakit umum di provinsi jawa tengah. Sampai akhir tahun 2025 sudah terlaksana kegiatan speling sebanyak 21 kegiatan dengan total pasien 1.769 orang pasien. Tindaklanjut TA 2026: Kegiatan Spesialis Keliling / Speling dilaksanakan melalui Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.000.000	Meningkatkan cakupan deteksi dini kasus penyakit kanker payudara dan serviks
	<u>RSUD Dr. Moewardi</u> Tindaklanjut TA 2025:	Meningkatkan cakupan deteksi dini kasus penyakit kanker payudara dan serviks

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Mengirim Dokter Spesialis Obsgyn untuk memfasilitasi Pap Smear dalam kegiatan Spesialis Keliling (SPELING)	
d	Rekomendasi: Peningkatan operasional kader Posyandu <u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Dukungan operasional kader posyandu menjadi kewenangan Kab/Kota dan Provinsi memberikan dukungan kelembagaan Posyandu 6 Bidang SPM (Bimtek dan Rapat Koordinasi TP Posyandu) <u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025: 1. Mapping desa/kelurahan yang memberikan dukungan operasional kader Posyandu untuk mengetahui desa/kelurahan yang belum mengalokasikan anggaran yang mendukung operasional/insentif bagi kader posyandu. 2. Apresiasi implementasi ILP (kader posyandu berprestasi dan posyandu berprestasi) Rp102.318.000,00 3. Temu Kader dalam rangka mendukung Program Prioritas Rp22.956.000,00 Tindaklanjut TA 2026: 1. Pendampingan 3 Kab/Kota dengan Desa/Kelurahan yang belum mengalokasikan insentif bagi kader Posyandu Rp13.080.000,00 2. Apresiasi implementasi ILP (kader posyandu berprestasi dan posyandu berprestasi) Rp136.214.000,00 Temu Kader dalam rangka mendukung Program Prioritas Rp74.000.000,00	Dukungan kelembagaan Posyandu 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari kader dan Posyandu. 2. Meningkatkan motivasi dan peran kader dalam mensukseskan transformasi pelayanan kesehatan primer di Posyandu, meningkatkan pengetahuan/ kapasitas kader dalam pelayanan di posyandu, ajang pemberian apresiasi bagi kader posyandu berprestasi tingkat provinsi Jawa Tengah 3. Mendorong kab/kota agar desa/kelurahan mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional kader posyandu/ insentif kader.
e	Rekomendasi: Peningkatan kualitas hidup lansia <u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Peningkatan kualitas hidup lansia diimplementasikan melalui Screening geriatri gratis (PKG) dan Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi <u>DINKES</u> Tindaklanjut TA 2025:	Meningkatkan kesehatan lansia 1. Penanganan cepat, pencegahan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Provinsi melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam peningkatan pelayanan Kesehatan lansia melalui pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut Rp.30.719.000,00 meliputi: 1. Peningkatan kemandirian lansia, 2. Skrining Kesehatan lansia dan tindak lanjut hasil skrining, 3. Pemberdayaan lansia dalam posyandu integrasi layanan primer sasaran lansia. Tindak lanjut TA 2026: Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut Rp130.000.000,00 meliputi: 1. Peningkatan kualitas hidup lansia dengan meningkatkan kemandirian lansia, skrining kesehatan lansia, dan tindak lanjut hasil skrining 2. Peningkatan pemberdayaan lansia. 3. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kes lansia	komplikasi, dan menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. 2. Meningkatkan tingkat kemandirian Lansia, dan meningkatkan layanan lansia dengan ketergantungan sedang, berat dan total untuk mendapatkan perawatan jangka panjang 3. Penguatan Puskesmas Santun lansia, RS pelayanan Geriatri (untuk lansia sakit), dan penguatan peran masyarakat terutama keluarga, untuk menjadi PJP (Care Giver) bagi Lansia nya yang mempunyai ketergantungan sedang, berat dan total.
	<u>RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo</u> Tindak lanjut TA 2025 dan 2026: Telah disediakan Penyediaan layanan khusus geriatri yang terpusat pada paviliun abiyasa	Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan geriatri
	<u>RSUD dr. REHATTA</u> Tindak lanjut TA 2025: Penyediaan kesehatan lansia di desa sekitar RS dengan anggaran BLUD melalui kegiatan: 1. Promosi dan preventif kesehatan lansia di desa bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara 2. Kegiatan senam lansia setiap jumat di halaman gedung walet RS Tindak lanjut TA 2026: Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan lansia dengan anggaran BLUD.	Tersedianya layanan Kesehatan lansia
	<u>RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO</u>	Meningkatkan kualitas hidup lansia dengan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Tindaklanjut TA 2025: kegiatan terkait peningkatan kualitas hidup lansia dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yaitu: 1) Kegiatan Spesialis Keliling / Speling di Panti Sosial Lansia Pucang Gading dengan jumlah 23 lansia pada tanggal 22 Juni 2025. Pelayanan dokter spesialis keliling oleh dokter spesialis Kedokteran Jiwa, penyakit dalam dan pemeriksaan dokter umum. 2) Tahap intrahospital: pelaksanaan kegiatan senam pada lansia, penerapan inovasi terapi stimulasi kognitif orientasi waktu (terasi ortu) di ruang rawat inap geriatri. Tindaklanjut TA 2026: Peningkatan kegiatan kerjasama untuk peningkatan kualitas hidup lansia baik upaya promotif maupun preventif, pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	penyediaan pelayanan yang berkualitas
	<u>RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI</u> Tindaklanjut TA 2025: RSJD Dr. RM. Soedjarwadi telah melaksanakan layanan dalam peningkatan kualitas hidup lansia antara lain: 1. Fast Track dengan kriteria ibu hamil, disabilitas, lansia dengan alat bantu mobilitas, anak dibawah usia 1 tahun, pensiunan dan Kondisi medis tertentu berdasarkan rekomendasi dokter sampai dengan ahir tahun 2025 jumlah pasien yang menggunakan layanan fast track sebanyak 3.664 orang pasien. 2. Pelayanan Pasien Geriatri di Klinik Geriatri sebanyak 1.656 orang pasien dan di rawat inap Geriatri sebanyak 158 orang pasien. Tindaklanjut TA 2026: Layanan Fast track akan terus dilaksanakan sesuai dengan program Gubernur dengan kriteria ibu hamil, disabilitas, lansia dengan alat bantu mobilitas, anak dibawah usia 1 tahun, pensiunan dan Kondisi medis tertentu berdasarkan rekomendasi dokter.	Pelayanan <i>fast track</i> memungkinkan pelayanan Kesehatan khususnya Geriatri dapat terlayani dengan lebih cepat
	RSUD Dr. MOEWARDI Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1. Mengirimkan narasumber DPJP <u>Sp.PD.</u>, K.Ger permintaan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Jateng 2. Hadir secara aktif baik pertemuan offline maupun online yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas terkait peningkatan kualitas hidup lansia	Meningkatkan kualitas hidup lansia dengan penyediaan pelayanan yang berkualitas
	DINAS SOSIAL Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Mendasar PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, tindaklanjut	Meningkatkan kualitas hidup lansia dengan penyediaan pelayanan yang berkualitas

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di Jawa Tengah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial adalah: - Memastikan lansia terlantar mendapatkan hak dasar hidup yang layak melalui pangan, sandang, papan dan akses kesehatan serta akses layanan rehabilitasi sosial dan advokasi bagi lansia terlantar atau rentan terlantar; - Dukungan layanan konseling dan psikososial bagi lansia terlantar di dalam panti; - Bimbingan vokasi/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, motorik dan jiwa produktif lansia di dalam panti; dan Mendukung pemenuhan permakanaan panti Swasta di Jawa Tengah melalui program Santunan Orang Setiap Hari (SOSH), Penerima Manfaat lansia terlantar dapat ditangani dengan menggandeng pihak masyarakat dan swasta melalui kolaborasi pemenuhan gizi bagi lansia terlantar di Lembaga Kesejahteraan Swasta Lanjut Usia (LKSLU) di Kabupaten/Kota.	
12	Rekomendasi: Pada aspek Pendidikan, maka penuntasan angka putus sekolah menjadi sangat penting dan prioritas. <u>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1. Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dengan sasaran 10.000 siswa 2. Bantuan Seragam Siswa Miskin di tahun 2025 dengan sasaran penerima 85.933 siswa 4. Bantuan paket pendidikan gratis di tahun 2026 (seragam, tas sekolah dan paket data) untuk siswa miskin dengan sasaran 72.693 siswa 5. Penyelenggaraan Program Kemitraan melalui kerjasama dengan sekolah swasta di tahun 2025 dengan target sasaran 5.004 siswa dan di tahun 2026 sebanyak 2.390 siswa miskin	meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah di Provinsi Jawa Tengah
13	Rekomendasi: Mengoptimalkan cakupan dan rasio ketersediaan infrastruktur sekolah. <u>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1. Rehabilitasi Sarpras Sekolah tahun 2025 dengan sasaran 282 sekolah dan target 2026 sebanyak 22 sekolah (rehab, dan pembangunan sarpras utilitas) 2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB): SMAN, SMKN dan SLBN 3. Pemberian hibah kepada satuan pendidikan SD, SMP, SMK dan SLB swasta di tahun 2025 sebanyak 1.103 lembaga sedangkan di tahun 2026 sebanyak 1.441 lembaga 4. Penyelenggaraan Program Kemitraan melalui kerjasama dengan sekolah swasta di tahun 2025 dengan target sasaran 5.004 siswa dan di tahun 2026 sebanyak 2.390 siswa miskin	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
14	Rekomendasi: Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta. <u>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1. Menyediakan akses pendidikan menengah berkualitas di setiap kecamatan 2. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah melalui distribusi anggaran peningkatan sarpras yang merata, distribusi guru, penguatan kurikulum muatan lokal	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah
15	Rekomendasi: Pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan jumlah minimal 2 sekolah tiap kabupaten. <u>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1. Memberikan kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang berkeadilan (anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti layanan pendidikan di sekolah umum) 2. Memberikan kesempatan lebih luas kepada anak dari keluarga kurang mampu memperoleh layanan pendidikan melalui jalur afirmasi kemiskinan, pendidikan gratis di SMKN Jateng Boarding dan Semi Boarding	meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah di Provinsi Jawa Tengah
16	Rekomendasi: Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa dan Pendidikan Non Formal. <u>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1. Bimbingan dan pelatihan guru pendamping anak berkebutuhan khusus tahun sebanyak 35 orang sedangkan 65 orang 2. Penyediaan sarpras sekolah ramah disabilitas meliputi rehabilitasi sarana prasarana sekolah, pada tahun 2025 jumlah sekolah yang telah direhab sebanyak 25 sekolah sedangkan target tahun 2026 sebanyak 1 sekolah 3. Hibah pendidikan umum pada Lembaga non formal yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di tahun 2025 sebanyak 10 lembaga sedangkan di tahun 2026 sebanyak 5 lembaga	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah
C. TERHADAP KINERJA KETENAGAKERJAAN (Leading Sector Bappeda Bidang Perekonomian dan Biro Kesra)		
1	Rekomendasi: Secara umum, TPT Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 4,78%, lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 4,91%. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 hingga 6 orang pengangguran. Jika dilihat per jenis kelamin, TPT untuk jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan 0,60 poin dari 5,43% di tahun 2023 menjadi 4,83% di tahun 2024. Apabila dilihat menurut jenjang pendidikan dari pengangguran, pengangguran tertinggi adalah dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	mencapai 9,52%. Pada lima tahun terakhir, pengangguran lulusan SMK selalu menempati urutan pertama sebagai pengangguran terbanyak.	
	<u>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</u> Tindaklanjut TA 2025: Untuk mengurangi TPT di Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melaksanakan aksi yang terencana dan sinergis dengan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan OPD lintas sektor yang terkait serta sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan fokus pada peningkatan keterampilan angkatan kerja yaitu dengan program: 1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDI 2. Peningkatan keterampilan teknis sesuai kompetensi kepada para pengajar/ tenaga pendidikan khususnya di SMK untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan DUDI.	Meningkatkan keterampilan Angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran
	<u>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1. Pelatihan Keterampilan Tambahan (<i>Upskilling & Reskilling</i>) teknis sesuai dengan kompetensinya (<i>hard skill</i>) atau yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, pelatihan <i>soft skill</i> guna pengembangan: komunikasi dengan rekan kerja, kerja tim, kepemimpinan, pengelolaan waktu, adaptasi, kreatif dan etika kerja. Pelatihan ini dilakukan di Sekolah Bersama institusi pasangannya (DUDI) 2. Kemitraan dengan Industri yang di kenal dengan <i>Link and Match</i> dalam penyaluran alumni SMK 3. Pembekalan siswa dan alumni SMK dengan pengetahuan kewirausahaan dan program bantuan pemodal, contoh Kredit Usaha Rakyat (KUR) 4. Sertifikat Kompetensi bagi Siswa maupun tamatan SMK	Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2	Rekomendasi: Perlu <i>Link and Match</i> Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI): Perkuat kemitraan SMK dan BLK dengan sektor industri prioritas (manufaktur, agrobisnis, ekonomi kreatif), termasuk program pemagangan dan <i>teaching factory</i>.	
	<u>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</u> Tindaklanjut TA 2025: Dilakukan upaya dalam menyelaraskan kurikulum dan program pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur dan sarpras lembaga pelatihan baik negeri maupun swasta, peningkatan peralatan praktek di SMK yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, pengembangan kerjasama SMK (Asaching fiacAorQ, pusat keunggulan, dan magang siswa) agar sesuai dengan standar DUDI, memastikan lulusan pendidikan vokasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan lapangan kerja.	Menurunkan angka pengangguran utamanya lulusan SMK

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	DPMPTSP Tindaklanjut TA 2025: 1) Menciptakan iklim investasi yang baik dengan mendorong kajian/promosi potensi investasi yang siap ditawarkan di Provinsi yang <i>clean and clear</i> untuk menarik minat calon investor 2) Menyusun kajian <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) dengan berfokus pada sektor pertanian dan green investment pada tahun 2025; 3) Pengembangan sistem dengan melakukan integrasi sistem CJIP (pada fitur SIRUSA) dengan Dapodik dan Ayo Kerja Tindaklanjut TA 2026: 1) Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2045 sebagai tindaklanjut RPJPN 2025-2045; 2) Penyediaan data Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta data potensi lahan investasi melalui pengembangan sistem CJIP dengan menambahkan fitur Butuh Lahan Siap pakai (BUHANSIP).	• Pemerataan distribusi investasi di Jawa Tengah, antara wilayah utara dan selatan. • Meningkatkan daya tarik investasi disertai dengan pengembangan sistem atau teknologi yang dapat mendukung. • Penyerapan tenaga kerja yang selaras dengan tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja.
	<u>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</u> Tindaklanjut TA 2025: 1. Pengembangan SDM dan Pendidikan Vokasi melalui uji kompetensi siswa SMK dan uji sertifikasi Guru SMK 2. Re-engineering Program Keahlian SMK sesuai kebutuhan industri khususnya pada wilayah pertumbuhan kawasan industri baru 3. Penguatan kerjasama SMK dengan Mitra Industri mitra 4. Peningkatan peralatan praktik sesuai kebutuhan pembelajaran Tindaklanjut TA 2026: 1. Pengembangan SDM dan Pendidikan Vokasi melalui uji kompetensi siswa SMK dan uji sertifikasi Guru SMK 2. Re-engineering Program Keahlian SMK sesuai kebutuhan industri khususnya pada wilayah pertumbuhan kawasan industri baru 3. Penguatan kerjasama SMK dengan Mitra Industri mitra 4. Peningkatan peralatan praktik sesuai kebutuhan pembelajaran	Menyiapkan lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
3	Rekomendasi: Penguatan BLK (Balai Latihan Kerja) dengan kurikulum adaptif.	
	<u>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Telah dilakukan upaya peningkatan efektifitas pelatihan kerja melalui penyesuaian kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terkini. Salah satu upayanya dilakukan dengan kreditasi lembaga pelatihan kerja dan mitra serta <i>stakeholder</i> dalam mendorong peran LPK dalam peningkatan kompetensi, sehingga dapat menyesuaikan kurikulum adaptif memastikan bahwa materi pelatihan relevan,	Menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan Menekan pengangguran dan miss match tenaga kerja

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga lulusan LPK lebih siap bersaing di pasar tenaga kerja.	
4	Rekomendasi: <i>Job Matching</i> dan Bursa Kerja Digital Terintegrasi dengan mengembangkan aplikasi pemetaan lowongan kerja yang <i>real-time</i> dan berbasis wilayah. <u>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Telah dibangun sistem informasi pasar kerja yang dapat menyajikan data ketenagakerjaan, kebutuhan/ serapan tenaga kerja Jawa Tengah (di perusahaan) dengan pemetaan <i>supply</i> – lulusan yang siap bekerja, sehingga tercipta ekosistem afiliator informasi ketenagakerjaan yang efektif di Jawa Tengah. Data yang ada berupa informasi realisasi/ <i>real time</i> loker, kebutuhan tenaga kerja, data realisasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah, dan data potensi kelulusan (keahlian/jurusan) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Integrasi sistem informasi pasar kerja itu sudah coba dibangun dalam App Siap Kerja Disnakertrans. Sebagai langkah pengembangan dan strategis dilakukan <i>upgrade</i> menu, proses mengintegrasikan API dengan OPD lain (DPMPTSP, Disdikbud).	Menyediakan data kebutuhan pencari kerja dan ketersediaan lowongan kerja yang lebih akurat
5	Rekomendasi: Perlu Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), <i>Link and Match</i> dengan Industri, dan Program Magang dan Sertifikasi <u>Disnakertrans, Disdikbud dan DPMPTSP</u> Tindaklanjut TA 2025: Agar menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja sesuai kebutuhan DUDI, telah dilakukan upaya: - pemberian konsultasi produktivitas perusahaan agar produktivitasnya dapat terjaga sebagai upaya mencegah PHK, pengembangan karir dan pengujian kompetensi kepada tenaga pendidik dan penciptaan ekosistem penanganan tenaga kerja yang efektif dan iklim investasi yang baik dalam pengembangan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. - Pengembangan sistem dengan melakukan integrasi sistem CJIP (pada fitur SIRUSA) dengan Dapodik dan Ayo Kerjo Tindaklanjut TA 2026: - Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2045 sebagai tindaklanjut RPJPN 2025-2045; - Penyediaan data Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta data potensi lahan investasi melalui pengembangan sistem CJIP dengan menambahkan fitur Butuh Lahan Siap pakai (BUHANSIP).	Optimalisasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah agar dapat tepat sasaran dan sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki oleh angkatan kerja.
	<u>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026:	Mengurangi angka pengangguran dan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	1. Pengembangan SDM dan Pendidikan Vokasi melalui uji kompetensi siswa SMK dan uji sertifikasi Guru SMK 2. Re-engineering Program Keahlian SMK sesuai kebutuhan industri khususnya pada wilayah pertumbuhan kawasan industri baru 3. Penguatan kerjasama SMK dengan Mitra Industri mitra 4. Peningkatan peralatan praktik sesuai kebutuhan pembelajaran	kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
6	Rekomendasi: Perlu Pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan melalui Bantuan Modal dan Pendampingan, Pelatihan Kewirausahaan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif <u>DINKOP UMKM</u> Tindaklanjut TA 2025: • Dalam rangka pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan, Dinas Koperasi UKM provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pelatihan kewirausahaan melalui pelatihan ketrampilan usaha produktif sebanyak 3 kegiatan bagi 75 orang, Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan sebanyak 8 kegiatan bagi 240 orang, pelatihan online bagi startup/wirausaha baru melalui kegiatan Akademi Balatkop dan E-learning sebanyak 38 angkatan bagi 1.580 orang serta pendampingan UMKM oleh konsultan UMKM Center Kota Semarang dan PLUT KUMKM Provinsi Jawa tengah di Kabupaten Banyumas sebanyak 732 dengan rincian pendampingan NIB sebanyak 346, Halal sebanyak 4, PIRT sebanyak 24, BPOM sebanyak 1, HKI sebanyak 2, Pemasaran 100, Permodalan sebanyak 74, Bahan Baku 1, Pembukuan sebanyak 63, Kemitraan sebanyak 4, Kemasan sebanyak 4, SDM sebanyak 19, Alat Produksi 1, Manajemen Produksi sebanyak 22. • Untuk meningkatkan daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dilakukan dengan program pemberian bimtek penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan bagi masy desa yg kemiskinan tinggi (olahan singkong, salak, lele, tempe, bambu, dan gembili) potensi lokal desa, pelatihan keterampilan usaha produktif utk masy miskin yg terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kegiatan Hetero Space - pelatihan online UMKM/calon wirausaha/lulusan SMK dengan materi keuangan, branding marketing, inovasi bisnis dan legalitas serta pendampingan UMKM /wirausaha baru, dan program pelatihan kewirausahaan pemuda bidang digital marketing (usia 16-30 th pada DTKS). Tindaklanjut TA 2026: Dinas Koperasi UKM provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2026 akan melaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam rangka mengelola potensi lokal dan peningkatan kewirausahaan; serta pendampingan pengembangan usaha oleh Konsultan UMKM Center Kota Semarang dan PLUT KUMKM Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.	Terfasilitasinya pembinaan dan pemberdayaan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan
	<u>DISPORAPAR</u> Tindak Lanjut 2025:	1. Terfasilitasinya kebutuhan pelaku usaha di sektor

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	1. Disporapar Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pelatihan konten kreator bagi 150 orang pelaku Desa wisata di Kabupaten Semarang, wilayah Solo Raya dan Wilayah Kabupaten Purworejo, Pelatihan Digital Marketing bagi 25 orang pelaku ekraf di Jawa Tengah dan Pelatihan gim lanjutan bagi 25 orang pelaku ekraf Sub Sektor gim. 2. Memberikan Fasilitas hak merek kepada 50 orang pelaku ekraf Jawa Tengah dan Sertifikasi Kompetensi Profesi barista, kuliner dan fotografi bagi 160 orang pelaku. 3. Pelaksanaan Semarak Kata Kreatif di Kabupaten Wonosobo pada bulan Juni 2025 4. Ditetapkannya Kabupaten Pati dan Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten / Kota Kreatif oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Tindak Lanjut 2026 1. Pelatihan kepada pelaku ekraf 2. Fasilitas Kekayaan Intelektual (hak merek) 3. Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi 4. Gen Semarak Kata kreatif 5. Fasilitas pemasaran pelaku ekraf 6. Pendampingan kabupaten /kota dalam rangka menjadi Kata kreatif	1. industri ekonomi kreatif 2. Meningkatnya kualitas SDM di sektor ekonomi kreatif
7	Rekomendasi: Perlu Peningkatan Investasi dan Industri melalui Pembangunan Kawasan Industri, Insentif bagi Investor, dan Mendorong Sektor Padat Karya	
	<u>DPMPTSP</u> Tindaklanjut TA 2025: Bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilakukan dengan program kajian investasi dengan berfokus pada sektor pertanian dan <i>green investment</i>, pemberian insentif kewenangan pada pelaku usaha dan pengembangan integrasi CJIP dengan Dapodik dan Siap Kerjo (E Makaryo). 1) Menyusun kajian Investment <i>Project Ready to Offer</i> (IPRO) dengan berfokus pada sektor pertanian dan green investment pada tahun 2025; 2) Melaksanakan pemberian insentif kewenangan provinsi kepada pelaku usaha; 3) Pengembangan sistem dengan melakukan integrasi sistem CJIP (pada fitur SIRUSA) dengan Dapodik dan Ayo Kerjo.	• Pemerataan investasi di wilayah utara dan selatan Jawa Tengah; • Meningkatkan minat investasi pada sektor-sektor tertentu di daerah; • Optimalisasi investasi dengan pengembangan sistem atau teknologi yang mendukung; • Penyerapan tenaga kerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan angkatan kerja.
	Tindaklanjut TA 2026: 1) Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2045 sebagai tindaklanjut RPJPN 2025-2045; 2) Penyediaan data Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta data potensi lahan investasi melalui pengembangan sistem CJIP dengan menambahkan fitur Butuh Lahan Siap pakai (BUHANSIP).	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
8	Rekomendasi: Perlu Penguatan Program Padat Karya dengan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan Program Tenaga Kerja Mandiri <u>Pusdataru, DPUBMCK, Distanbun</u> Tindaklanjut TA 2025: • Pusdataru berperan memperkuat program padat karya melalui kombinasi program infrastruktur berbasis masyarakat dan program tenaga kerja mandiri, dilakukan dengan operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan oleh petani pemakai air dan masyarakat setempat. • DPUBMCK melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan melibatkan Kelompok Masyarakat (POKMAS) diharapkan tercipta lapangan kerja produktif yang memberdayakan masyarakat secara langsung dan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini telah dilaksanakan secara menyeluruh di 9 Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) di seluruh Jawa Tengah yang memiliki anggota sebanyak 823 orang. • Distanbun melaksanakan kegiatan melalui Program Padat Karya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin sekitar kebun benih sebagai tenaga kerja dalam kegiatan budidaya pertanian di balai benih dengan pemberian insentif/upah harian. Target output 10.000 Hari Orang Kerja (HOK) (45 orang) di 4 lokasi yaitu Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, Surakarta dan Banyumas, serta Balai Benih Tanaman Perkebunan di Salatiga. Tindaklanjut TA 2026: • Diusulkan kembali di Renja TA 2026 • Program Program Padat Karya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar balai benih dengan kriteria miskin sebagai tenaga kerja dalam kegiatan budidaya pertanian di balai benih wilayah Semarang, Surakarta, Banyumas dan Salatiga.	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan Masyarakat; 2. Mendorong pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat 3. Menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur dan sektor pertanian 4. Mendukung penurunan kemiskinan dan pengangguran
9	Rekomendasi: Perlu Digitalisasi dan Transformasi Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Digital dan Platform Bursa Kerja Online. <u>DISNAKERTRANS DAN DISKOMINFO</u> Tindaklanjut TA 2025: 1. Untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dilakukan dengan program pemberian pelatihan PBK <i>marketing in house</i> pemasaran digital kepada pencari kerja (agar dapat bekerjasama dengan <i>e commerce</i>) 2. Integrasi layanan bursa kerja ke dalam JNN untuk dapat memudahkan akses informasi loker dan pelatihan dalam satu aplikasi (Ayo Kerjo, Sak Pole, Sipentol dan Rumah Sakit Provinsi) Tindaklanjut TA 2026:	1. Meningkatkan literasi digital masyarakat 2. Menurunkan Kesenjangan keterampilan tenaga kerja 3. Meningkatkan adopsi platform digital oleh pelaku usaha 4. mengoptimalkan integrasi sistem

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	- Pengembangan program penyelenggaraan statistik sektoral yaitu terkait penyediaan data sebagai dasar pengembangan ekonomi melalui Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. - Keamanan informasi disediakan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi).	5. meningkatkan perlindungan dan keamanan data
D. TERHADAP KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN <i>(Leading Sector Bappeda Bidang Pemsosbud, Biro Kesra, dan Biro Bangda)</i>		
1	Rekomendasi: Penanggulangan kemiskinan yang terfokus prioritas pada kab/kota yang berkinerja penurunan lambat dan berada pada tingkat kemiskinan tinggi, dengan 3 strategi utama: - Mengurangi beban pengeluaran melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial lainnya; - Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil dan memberi akses pasar digital bagi produk lokal serta pembiayaan; - Mengurangi kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas antar wilayah, penguatan database kemiskinan dan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan harus terintegrasi, sistematis, terencana dengan di dalam program pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam implementasi tiga strategi diatas, terlihat jelas besaran anggaran, lokus dan fokusnya.	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD</u> Tindaklanjut TA 2025: Pemprov Jawa Tengah telah menyusun Rencana Aksi Tahunan tahun 2025 sesuai Amanat Permendagri 53 Tahun 2020, dimana dalam RAT tersebut sudah tercantum program, kegiatan hingga aktivitas riil, anggaran, serta lokus prioritas yang diintervensi. Tindaklanjut TA 2026: Pemprov Jawa Tengah sedang menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025-2029 untuk dokumen perencanaan tematik penanggulangan kemiskinan jangka menengah.	Penanggulangan kemiskinan terintegrasi
2	Rekomendasi: Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, NGO, perguruan tinggi dan sektor swasta dalam program pengentasan kemiskinan serta optimalisasi peran TKPKD sebagai pusat koordinasi lintas sektor.	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD</u> Tindaklanjut TA 2025: Dalam rangka pendukung pembiayaan intervensi penanggulangan kemiskinan, selain bersumber dari APBD juga dimungkinkan bersumber dari non APBD. Pembiayaan yang bersumber dari non APBD merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Pembiayaan ini dapat berasal dari swasta/privat, organisasi/lembaga maupun masyarakat. Guna efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya	Optimalisasi Peran TKPKD dalam pengentasan kemiskinan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	kolaborasi pembiayaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Selain itu, juga melibatkan perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan. Tindaklanjut TA 2026: Sesuai Dokumen RPKD, TKPK terus melanjutkan koordinasi dan sinergitas dengan NGO, perguruan tinggi dan sektor swasta untuk pembiayaan Non APBD (CSR, BAZNAS dan swadaya masyarakat).	
3	Rekomendasi: Validasi data program pengentasan kemiskinan. Verifikasi dan validasi data penerima program infrastruktur, terkhusus pengentasan kemiskinan, sebagai database pemberian bantuan Pemerintah Provinsi dan DPRD bagi Masyarakat.	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD</u> Tindaklanjut TA 2025: Dalam peningkatan kualitas basis data mikro kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) dalam SIKS DJ yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Pada data tersebut merupakan overlay dari data P3KE dan DTKS yang selanjutnya di verval secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa Tindaklanjut TA 2026: Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) digunakan sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya dalam hal hak akses sedang menunggu keputusan/arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat	Validasi data kemiskinan secara terpadu
	<u>DINAS SOSIAL</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Dinas Sosial melaksanakan olah data hasil Verifikasi dan Validasi data oleh 35 kabupaten/kota terkait program Infrastruktur bagi masyarakat miskin yang meliputi jumlah Rumah Tangga Miskin yang membutuhkan Rumah Layak Huni, Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) yang membutuhkan sambungan listrik murah, Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) yang membutuhkan Jamban Sehat, Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) yang membutuhkan penyediaan air bersih konsumsi. Penerima program pengentasan kemiskinan merupakan langkah penting untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi dan DPRD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya beberapa permasalahan, seperti ketidaksesuaian data dengan kondisi riil, tumpang tindih penerima bantuan, serta keterlambatan pemutakhiran data. Hal- hal yang akan dilaksanakan sebagai berikut:	Meningkatkan kualitas basis data mikro kemiskinan, dengan menyediakan Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) dalam SIKS DJ yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Pada data tersebut merupakan overlay dari data P3KE dan DTKS yang selanjutnya di verval secara terpadu oleh Pemerintah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	1. Bimbingan Teknis Penguatan Kualitas Data Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada operator SIKS-DJ Desa/Kelurahan agar lebih memahami Definisi Operasional Variabel Data sehingga pada saat pelaksanaan Verval di lapangan dapat menghasilkan data yang valid sesuai kondisi senyatanya di lapangan. 2. <i>Groundcheck</i> Data Melaksanakan kegiatan <i>Groundcheck</i> Data secara sampling di wilayah-wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kualitas data dan capaian verval data. 3. Koordinasi Lintas Sektor Melaksanakan Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dengan pengelolaan data fakir miskin baik lintas Kabupaten/Kota maupun lintas OPD Provinsi dalam rangka mendapatkan <i>feedback</i> dalam pengelolaan data fakir miskin. 4. Rilis Data Melaksanakan Rilis Data minimal sekali dalam satu tahun untuk penyediaan data pensasaran penanggulangan kemiskinan daerah.	Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa
4	Rekomendasi: Peningkatan jumlah program pengentasan kemiskinan bidang infrastruktur seperti: SPAM Desa, Program Rumah Tidak Layak Huni/RTLH, Sambungan listrik gratis.	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD DAN IPW</u> Tindaklanjut TA 2025: 1. Pada Tahun Anggaran 2025, Program SPAM Desa dilaksanakan di 24 desa dengan prioritas daerah yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Pemilihan lokasi didasarkan pada kajian kebutuhan dan potensi sumber air setempat 2. Pada TA 2025 telah dianggarkan sejumlah 17.000 unit peningkatan kualitas RTLH melalui mekanisme bankeu pemerintah desa. 3. Pada TA. 2025 telah dianggarkan sebanyak 1.000 sambungan melalui APBD. Selain melalui APBD juga telah diusulkan pendanaan melalui APBN, yaitu kepada Kementerian ESDM untuk alokasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang dilaksanakan di Jawa Tengah dengan total usulan sebanyak 21.767 sambungan. Tindaklanjut TA 2026: 1) Pemenuhan kebutuhan universal akses air bersih akan terus diusulkan pekerjaan SPAM Desa pada APBD TA 2026. 2) Penanganan RTLH melalui peningkatan kualitas akan terus diusulkan baik menggunakan APBN dan APBD Provinsi, mendorong pemerintah kab/kota menganggarkan pada APBD kab/kota masing-masing dan mendorong Pemkab untuk mendampingi Pemdes dalam mengalokasikan melalui APBDes serta mengupayakan melalui sumber pembiayaan lain (CSR, BAZNAS, dll). 3) Pemenuhan kebutuhan sambungan listrik gratis akan terus diusulkan baik menggunakan APBD, APBN maupun CSR.	Optimalisasi program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>DPUBMCK</u> Tindaklanjut TA 2025: Program SPAM Desa dilaksanakan di 24 desa dengan prioritas daerah yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Pemilihan lokasi didasarkan pada kajian kebutuhan dan potensi sumber air setempat. Dan telah diusulkan, penambahan pekerjaan SPAM Desa sebanyak 6 lokasi pada APBD Perubahan TA 2025. Tindaklanjut TA 2026: Diusulkan pekerjaan SPAM Desa sebanyak 12 lokasi pada Renja TA 2026.	Pengentasan kemiskinan pada daerah yang memiliki keterbatasan akses air bersih
	<u>DINAS ESDM</u> Tindaklanjut TA 2025: Pada TA. 2025 telah dianggarkan sebanyak 1.000 pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga kurang mampu melalui APBD. Selain melalui APBD juga telah diusulkan pendanaan melalui APBN, yaitu kepada Kementerian ESDM untuk alokasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang dilaksanakan di Jawa Tengah dengan total usulan sebanyak 21.767 sambungan listrik rumah. Tindaklanjut TA 2026: Pada TA. 2026 melalui APBD diusulkan sebanyak 1.000 pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga kurang mampu. Pemasangan sambungan listrik melalui sumber pendanaan Non APBD akan dikoordinasikan dengan <i>stake holder</i> terkait.	Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk masyarakat tidak mampu
5	Rekomendasi: Penyusunan peta jalan penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun ke depan sebagai pedoman perencanaan dan program bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya.	
	<u>BAPPEDA BIDANG PEMSOSBUD</u> Tindaklanjut TA 2025: Sesuai amanat Permendagri 53 Tahun 2020, pemerintah provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah secara konvergen lintas OPD serta lintas sektor. Tindaklanjut TA 2026: Sesuai dengan RPKD 2025-2029 dijabarkan intervensi tahunan dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun 2026.	Sebagai pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan dan program yang terarah, terukur dan berkelanjutan
6	Rekomendasi: Kebutuhan mendesak untuk melakukan monitoring dan perbaikan seluruh ruas jalan, terutama rawan kecelakaan yang menjadi wewenang provinsi. Secara khusus titik kecelakaan di Kalijambe- Purworejo segera untuk dibangun jalur penyelamat. Selain juga penambahan fasilitas layanan perlengkapan jalan.	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>DINAS PERHUBUNGAN</u> Tindaklanjut TA 2025: - Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) penanganan kali-jambe yang dihadiri Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan wilayah serta menghasilkan rekomendasi yang ditandatangani bersama. - Bpspp wilayah 4 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah membuat rambu peringatan berupa MMT terkait gunakan gigi rendah turunan panjang. - Diusulkan pada perubahan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk pengadaan dan pemasangan <i>Warninglight</i> sebanyak 2 unit dan rambu Daerah Rawan Kecelakaan sebanyak 20 unit yang digunakan untuk peningkatan keselamatan pada lokasi rawan kecelakaan di Kalijambe Kec. Bener Kab. Purworejo. Tindaklanjut TA 2026: Pemantauan Daerah Rawan Kecelakaan untuk efektivitas perlengkapan jalan.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan jalan
	<u>DPUBMCK</u> Tindaklanjut TA 2025: Telah diusulkan anggaran di APBD Perubahan TA 2025 terkait pekerjaan pembebasan tanah dan pembangunan jaluk penyelamat di ruas jalan Kalijambe - Purworejo. Tindaklanjut TA 2026: Perbaikan alinyemen horisontal dan vertikal jalan di ruas jalan Kalijambe – Purworejo sudah masuk pada Renja 2026.	Perbaikan/peningkatan keamanan dan kenyamanan ruas jalan
	<u>BAPPEDA BIDANG IPW</u> Tindaklanjut TA 2025: Sektor Perhubungan: Fasilitasi koordinasi dan evaluasi pasca kejadian kecelakaan yang menghasilkan rekomendasi tindaklanjut kebutuhan penanganan. Telah dipasang rambu peringatan sementara dan pada perubahan direncanakan pemasangan 20 rambu dan 2 unit warninglight. Sektor Kebinamargaan: Perubahan anggaran 2025 pembebasan tanah pembangunan jalur penyelamat dan perbaikan alinyemen. Tindaklanjut TA 2026: Sektor Perhubungan: Monitoring evaluasi pasca penanganan fasilitas perlengkapan jalan terhadap penurunan resiko kecelakaan. Sektor Kebinamargaan:	Upaya peningkatan dan perbaikan jalan serta keamanan jalan Kalijambe- Purworejo

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Usulan pembangunan jalur penyelamat serta perbaikan alinyemen horisontal dan vertikal jalan di ruas jalan Kalijambe - Purworejo.	
7	Rekomendasi: Melakukan koodinasi dengan Kementrian PU dan Dinas PU Kabupaten kota yang memiliki ruas jalan yang rawan kecelakaan di wilayah Jawa Tengah untuk segera dilakukan perbaikan <u>DINAS PERHUBUNGAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Telah dilaksanakan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti oleh Dinas PU, sesuai dengan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) yang disepakati oleh 5 Pilar, dalam Rencana Aksi Keselamatan (RAK) terdapat 86 lokasi Daerah Rawan Kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi, pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah melakukan Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di 6 lokasi yang tersebar di 6 BPSPP Tindaklanjut TA 2026: Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setahun 6 kali, hal tersebut dilakukan secara rutin setiap tahunnya yang diikuti oleh Dinas PU. Rencana tahun 2026 akan dilakukan Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di 11 lokasi yang tersebar di 6 BPSPP <u>DPUBMCK</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Melalui aplikasi jalan cantik, terkait aduan masyarakat pada ruas jalan yang berlubang sehingga menyebabkan terjadinya rawan kecelakaan, telah dilakukan koordinasi dengan masing-masing administrasi kementrian dan pemerintah kab/kota.	Menurunkan angka kecelakaan serta meningkatkan kualitas jalan di Jawa Tengah
8	Rekomendasi: Penambahan rute BRT Trans Jateng Koridor Semarang – Jepara dengan didasarkan visibility study untuk dimulai ditahun 2025 dan dilakukan secara bertahap. <u>DINAS PERHUBUNGAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Sudah terdapat masterplan pada wilayah pengembangan Kedungsepur dan saat ini sudah terlayani pada koridor Semarang-Bawen, Semarang-Grobogan, dan Semarang-Kendal, untuk lintas semarang-jepara belum terdapat studi Tindaklanjut TA 2026: Identifikasi awal pada masterplan pada wilayah pengembangan Jekuti <u>BAPPEDA BIDANG IPW</u> Tindaklanjut TA 2025: Proses penyusunan Kajian Pra FS Jekuti, dengan potensi koridor Jepara – Kudus dan Kudus – Pati. Hasil survey karekteristik wilayah yang dilayani didominasi sektor industri.	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Tindaklanjut TA 2026: Penyusunan Masterplan Aglomerasi Angkutan Umum WP Jekuti (apabila hasil kajian Pra FS WP Jekuti di 2025 dinilai layak).	
E. TERHADAP KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN (Leading Sector Biro Organisasi)		
1	Rekomendasi: Pemantapan roadmap yang jelas dan terukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023. Memenuhi 21 indikator reformasi birokrasi general dan 5 Reformasi birokrasi tematik.	
	<u>BIRO ORGANISASI</u> Tindaklanjut TA 2025: - Biro Organisasi telah menyusun draft Road Map Reformasi Birokrasi (RB) yang rencananya akan menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Jawa Tengah; - Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dalam rangka konsultasi pemantapan roadmap yang jelas dan terukur terhadap arah kebijakan yang ada pada draft road map tersebut, hasil koordinasi Kementerian PANRB memberikan saran rekomendasi antara lain: - Dinamika transisi kepemimpinan Presiden baru berpengaruh pada arah kebijakan RB, sehingga Provinsi Jawa Tengah sebaiknya menunggu arah kebijakan terbaru; - Mengingat habisnya periode Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024, Provinsi Jawa Tengah sebaiknya menunggu instruksi dari Kementerian PANRB atas arah kebijakan RB pada masa periode transisi. - Telah terbit SE Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi 2025 pada Bulan Agustus, atas terbitnya SE tersebut Biro Organisasi melakukan pencermatan sebagai pedoman dalam memastikan pelaksanaan RB tetap berjalan efektif. Atas hasil pencermatan terdapat perubahan nomenklatur indikator RB General dan jumlah tema RB Tematik. Tindaklanjut TA 2026: - Biro Organisasi memastikan pelaksanaan RB tetap berjalan efektif dan berkelanjutan walaupun dokumen Road Map baik di tingkat nasional dan daerah belum ada; - Terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, K/L Meso (pembina Indikator RB General dan RB Tematik), dan Instansi Pemerintah Daerah lain dalam rangka penyempurnaan draft Road Map sambil menunggu Grand Design atau Road Map Nasional terbit.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat budaya kerja birokrasi yang berintegritas dan adaptif
2	Rekomendasi: Penguatan Inovasi pelayanan publik yang modern dan inovatif berbasis digital pada seluruh aspek pembangunan Mendukung Atmosfir Provinsi Penumpu Pangan Dan Industri Nasional.	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</u> Tindaklanjut TA 2025: Telah dilakukan advokasi/ pendampingan pembuatan inovasi sesuai dengan kaidah ilmiah dan teknokratik yang diatur serta muatan substansi terkait modernisasi inovatif berbasis digital pada aspek pembangunan mendukung atmosfir Provinsi Penumpu Pangan dan Industri Nasional. Tahun 2025 direncanakan Provinsi Jawa Tengah akan ikut berpartisipasi dalam acara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB dengan leading sektor Biro Organisasi (sesuai tuisi penguatan pelayanan publik). BRIDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) tahun 2025 yaitu kompetisi dalam rangka menumbuhkembangkan Inovasi Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap perangkat daerah berinovasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diikuti oleh OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tindaklanjut TA 2026: Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2026	1. Meningkatkan kinerja pemerintahan: Mengakselerasi peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui gagasan inovatif. 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat: Mendorong inovasi yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah. 3. Membangun ekosistem inovasi: Menciptakan wadah kolaborasi untuk membina, menjangkau, mendokumentasikan, dan menyebarkan ide-ide inovatif. 4. Mendorong kreativitas dan inovasi 5. Mengakomodasi gagasan kreatif dari berbagai pihak seperti ASN, masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan pelaku usaha untuk pembangunan Jawa Tengah.
	<u>DISKOMINFO</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Penguatan inovasi pelayanan publik dilakukan melalui dukungan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, peningkatan Internet Gratis Sektor Desa dan pada tahun 2026 akan dilakukan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Mengoptimalkan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik berbasis digital
	<u>DINAS KETAHANAN PANGAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1) Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) adalah sistem informasi pangan yang menyajikan data ketersediaan (produksi, stok dipelaku usaha, Cadangan pangan, pasokan) dan kebutuhan pangan, harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan strategis yaitu Beras, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Telur, Daging Ayam, Daging Sapi, dan Gula Pasir. Pada tahun 2025 telah dilakukan:	1. Penyediaan sistem logistik daerah yang menyajikan informasi ketersediaan, kebutuhan, informasi harga pangan strategis 2. Penjaminan mutu produk organik kepada

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Koordinasi dengan Kab/Kota, Diskominfo dan pengembang aplikasi untuk pengumpulan data yang akan diinputkan pada aplikasi dan untuk output Data Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Tengah bulanan serta laporan tahunan mengenai Neraca Pangan Provinsi Jawa Tengah. Dampak dengan adanya aplikasi SISLOGDA yaitu membantu pemerintah daerah memantau stok dan distribusi pangan secara real-time. Hal ini memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di berbagai wilayah, terutama di daerah rawan pangan atau terpencil dan sistem ini memungkinkan respon cepat terhadap kondisi darurat seperti bencana alam atau krisis pangan. Pemerintah daerah dapat segera mengalihkan stok pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. 2) Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) adalah penjaminan mutu produk organik (Tanaman segar dan produk tanaman, input produksi (Pupuk, Pestisida, Bibit) dan produk pangan olahan) kepada petani dan pelaku usaha. Pada tahun 2025 telah dilakukan: a) TW I : Tindak Lanjut atas pengajuan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Output: 3 (tiga) ajuan dari pelaku usaha, belum keluar sertifikasinya karena belum proses inspeksi oleh DISHAPAN dan 3 (tiga) sertifikasi organik yang telah terbit dari ajuan pelaku usaha tahun 2024. b) TW II : melakukan Tindak Lanjut atas pengajuan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. c) TW III : Melakukan kegiatan inspeksi atas ajuan 3 (tiga) pelaku usaha. TW IV : Proses pelayanan pengajuan sertifikasi organik.	petani dan pelaku usaha
	<u>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Penguatan inovasi pelayanan publik yang modern dan berbasis digital melalui layanan BPSMB Semarang, BPSMB Surakarta dan BIKDK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berperan strategis dalam mendukung Jawa Tengah sebagai Provinsi Penumpu Pangan dan Industri Nasional, dengan menghadirkan layanan pengujian, sertifikasi mutu, dan kalibrasi alat ukur yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Sampai dengan TW II 2025, BPSMB Semarang telah melayani 25 pengujian laboratorium dan 1265 kalibrasi alat ukur, sementara BPSMB Surakarta mencatat 657 pengujian mutu dan 642 layanan kalibrasi, yang secara langsung memperkuat daya saing produk pangan dan industri, serta menciptakan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha dan standar pasar nasional maupun internasional. Inovasi ini turut diperkuat oleh BIKDK (Balai Industri Kreatif dan Digital Jawa Tengah) melalui pengembangan sistem digital layanan publik, dashboard pemantauan kinerja layanan, sinergi ini mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan daya saing produk, serta membangun ekosistem industri dan pangan yang unggul, modern, dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.	Meningkatkan inovasi layanan publik yang modern dan berbasis digital guna meningkatkan kualitas, kecepatan, dan integrasi layanan pengujian, sertifikasi mutu, serta kalibrasi alat ukur bagi pelaku industri dan pangan di Jawa Tengah, sehingga efisiensi pelayanan publik, daya saing produk, dan kepuasan pelanggan dapat meningkat.

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Capaian terhadap layanan ini telah dilakukan peningkatan branding logo kemasan sebanyak 23 pelaku Usaha dan Peningkatan Desain Kemasan sebanyak 119 pelaku usaha. Mengoptimalkan waktu penyelesaian pelayanan menuju kepuasan pelanggan Tindaklanjut TA 2026: 1) Penguatan Sinergi Antar Unit Layanan dan Stakeholder 2) Optimalisasi Kepuasan Pelanggan dan Evaluasi Pelayanan	
	<u>DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Penguatan Inovasi pelayanan publik yang modern dan inovatif berbasis digital dilakukan melalui pengembangan Sertifikasi Online Tanaman Pangan (SINTP). SINTP merupakan aplikasi pelayanan publik untuk permohonan sertifikasi benih pertanian. Tahun 2025 dilakukan pengembangan dengan menambahkan fitur pelayanan sertifikasi benih untuk komoditas hortikultura. Manfaat dengan adanya SINTP yaitu memberikan pelayanan sertifikasi benih komoditas pertanian dalam rangka penggunaan benih bermutu di masyarakat untuk menunjang peningkatan produksi pertanian di Jawa Tengah. Selain itu, SINTP sebagai sistem pengawasan peredaran benih di Jawa Tengah termasuk pengawasan terhadap benih yang berasal dari provinsi lain dengan melakukan pengecekan kembali untuk menjamin bahwa kualitas benih sesuai dengan standar operasional yang berlaku Total sertifikasi benih pada tahun 2025 sebanyak 3.358 sertifikat Tindaklanjut TA 2026: 1) Pengembangan Sertifikasi Online Tanaman Pangan (SINTP) yang semula melayani sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, akan ditambah fitur layanan sertifikasi benih komoditas perkebunan pada tahun 2026 mulai dari pendaftaran, pengajuan, verifikasi permohonan, pelabelan benih, hingga penerbitan sertifikasi produksi benih. 2) Pengembangan Sistem Layanan Terintegrasi (SIYANTI) yaitu sistem informasi layanan terintegrasi yang melayani petani Provinsi Jawa Tengah dalam hal pemasaran online produk pertanian, informasi terkini bidang pertanian, edukasi dan penyuluhan pertanian. SIYANTI memudahkan petani dalam mendapatkan berbagai kebutuhan layanan yang terintegrasi	Mempermudah produsen benih dalam proses sertifikasi benih mulai dari pendaftaran, pengajuan, verifikasi permohonan, pelabelan benih, hingga penerbitan sertifikasi produksi benih.
	<u>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: Penguatan Inovasi pelayanan publik yang modern dan inovatif berbasis digital pada Sektor Peternakan dilakukan dengan Digitalisasi Layanan Publik Bidang Peternakan melalui 1) Pengembangan layanan terpadu berbasis daring untuk pelayanan kesehatan hewan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak dan sertifikat veteriner serta pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dinas Kab/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melalui aplikasi lalulintas.isikhnas.pertania.go.id serta pelaporan	Percepatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan hewan dan perizinan ternak, penguatan pengendalian dan pencegahan penyakit hewan melalui sistem pelaporan real time, serta tersedianya data peternakan yang terintegrasi dan akurat sebagai dasar

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	kasus penyakit dan perkembangannya serta tindak lanjutnya melalui aplikasi isikhnas.go.id. Selain itu layanan IB dan Pkb serta penandaan dan pendataan ternak melalui aplikasi Identik PKH. 2) Integrasi sistem informasi peternakan dengan portal layanan publik Provinsi Jawa Tengah (aplikasi Sibavet dengan portal data Jawa Tengah) 3) Penyusunan basis data tentang populasi ternak, produktivitas, pemasukan pengeluaran ternak, pemotongan ternak, daya tampung pakan, <i>supply demand</i>, data situasi persebaran penyakit hewan, jumlah data fungsi lainnya (jumlah dan alamat kelembagaan peternakan/pelaku usaha peternakan, jumlah RPH).	pengambilan kebijakan, peningkatan produktivitas ternak, dan penguatan ketahanan pangan hewani.
	<u>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Penguatan Inovasi pelayanan publik yang modern dan inovatif berbasis digital sektor kelautan dan perikanan diwujudkan melalui aplikasi SIANDIN HIDRASI serta melalui rapat koordinasi dengan kabupaten kota untuk optimalisasi penggunaannya mulai dari perencanaan hingga evaluasi hibah sektor kelautan dan perikanan. Tindaklanjut TA 2026: Pemeliharaan aplikasi SIMLAB untuk pelayanan pengujian laboratorium di Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) dan Balai Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan dan Lingkungan (BLPKIL), Pemeliharaan Website Dinas dan PPID, serta pemeliharaan aplikasi SIAWAS untuk pemantauan kapal perikanan.	Meningkatkan kualitas mutu hasil perikanan
3	Rekomendasi: Penguatan berbagai daya dukung meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif yang didukung pengembangan <i>Electronic Government</i> terintegrasi.	
	<u>BIRO ORGANISASI</u> Tindaklanjut TA 2025: - Memastikan ekosistem (arah kebijakan, strategi, dan sistem) <i>Electronic Government</i> telah disusun dan telah dilakukan pemantauan. Arah kebijakan dan strategi e-Gov di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Pergub 40 Tahun 2022 tentang SPBE, dan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 555.3/0000017 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. - Pemantauan dilakukan berdasarkan Pedoman MenPANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE. - Indeks SPBE Prov Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 4,26 (Memuaskan), Tahun 2024 sebesar (4,42), Tahun 2025 (belum rilis). Tindaklanjut TA 2026: Mendorong transformasi digital di berbagai sektor, khususnya empat pilar digital: pemerintahan, masyarakat, ekonomi, dan infrastruktur.	Transformasi digital dalam tata Kelola pemerintahan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi serta meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	<u>DISKOMINFO</u> Tindaklanjut TA 2025: 1. Penguatan ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK 2. Mengoptimalkan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi melalui Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) 3. Peningkatan SDM penyelenggaraan otorisasi statistik di daerah dalam rangka mewujudkan Big Data Jawa Tengah Tindaklanjut TA 2026: 1. Penyediaan akses internet bagi Perangkat Daerah (PD) 2. Penyelenggaraan Layanan Publik digital terintegrasi 3. Penyebarluasan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah 4. Pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 5. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Mengoptimalkan pengembangan E-Government yg terintegrasi
4	Rekomendasi: Penguatan kapasitas ASN melalui budaya birokrasi yang gesit dalam menghadapi ketidak stabilan, ketidakpastian, Kompleksitas, dan ambiguitas.	
	<u>BPSDMD</u> Tindaklanjut TA 2025 dan 2026: 1. Melaksanakan pengembangan kompetensi secara <i>massive</i> melalui pemanfaatan teknologi digitalisasi MOOC 2. pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 3. Mendorong integrasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi seluruh ASN Jawa Tengah melalui implementasi Jawa Tengah <i>Corporate University</i>	Peningkatan Kompetensi ASN untuk pemenuhan peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan di Pemprov. Jateng
	<u>BIRO ORGANISASI</u> Tindaklanjut TA 2025: Telah dilakukan penyusunan rencana aksi Survei Indeks Ber-AKHLAK, dalam rangka mewujudkan budaya birokrasi yang gesit dalam menghadapi ketidakstabilan, ketidakpastian, Kompleksitas, dan ambiguitas. Tindaklanjut TA 2026: Melaksanakan sosialisasi Survei Indeks Ber-AKHLAK, melakukan pemenuhan bukti dukung core value ber-AKHLAK.	Peningkatan Kompetensi ASN untuk pemenuhan peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan di Pemprov. Jateng
	<u>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</u> Tindaklanjut TA 2025: Peningkatan kapasitas ASN dilakukan melalui: 1. Peningkatan kompetensi ASN jalur Pendidikan formal dengan beasiswa tugas belajar dalam negeri kepada ASN;	Peningkatan Kompetensi ASN untuk pemenuhan peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan di Pemprov. Jateng

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	2. Pengembangan karir ASN melalui Manajemen Talenta ASN berbasis Merit System dan digitalisasi manajemen ASN; Peningkatan kesejahteraan ASN, melalui upaya peningkatan TPP dengan Rapergub TPP; Tindaklanjut TA 2026: 1. Peningkatan Profesionalitas ASN melalui pengembangan kompetensi jalur Pendidikan formal dengan program beasiswa kepada ASN baik dalam negeri dengan APBD dan Pembekalan persiapan beasiswa luar negeri untuk ASN (<i>LPDP Preparation</i>); 2. Mewujudkan profesionalitas ASN melalui rekrutmen CASN berbasis CAT, Peningkatan disiplin ASN, Pengembangan karir ASN melalui Manajemen Talenta ASN berbasis Merit System dan digitalisasi manajemen ASN; 3. Meningkatkan kesejahteraan ASN, melalui peningkatan TPP, Anugerah ASN dan Penghargaan non finansial lainnya.	
5	Rekomendasi: Memastikan layanan Trans Jateng sesuai SPM Angkutan darat. <u>DINAS PERHUBUNGAN</u> Tindaklanjut TA 2025: Tahun 2025 kami melakukan peningkatan layanan dengan penambahan ritase sebanyak 6.570 ritase/ tahun dengan rincian sebagai berikut: 1. Koridor Surakarta – Sukoharjo -Wonogiri 2.190 ritase/tahun; 2. Koridor Semarang – Grobogan 4.380 ritase/tahun. Selain itu pada Tahun 2025 untuk meningkatkan pelayanan dengan peningkatan prasarana yang semula rambu pemberhentian menjadi halte sebanyak 7 unit dengan rincian sebagai berikut : 1. Koridor Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri 2 Unit; 2. Koridor Surakarta – Sragen 3 Unit; 3. Koridor Semarang – Grobogan 2 Unit. Dari sisi Sumber Daya Manusia pada Tahun 2025 dilakukan secara rutin pembinaan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng kepada petugas layanan Trans Jateng. Dari sisi keterjangkauan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 mulai Tanggal 15 Mei 2025 terdapat penurunan tarif khusus Trans Jateng yang semula Rp.2.000, untuk buruh, pelajar dan veteran menjadi Rp1.000, dan penambahan kategori tarif khusus untuk penumpang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sementara itu sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, Trans Jateng juga meluncurkan aplikasi Si Anteng. Aplikasi ini dirilis untuk memberi kemudahan kepada masyarakat guna mengetahui rute jadwal keberangkatan, dan lokasi halte dan tersedia fitur <i>cashless</i>. Layanan <i>Cashless</i> selain pada aplikasi Si Anteng juga dapat dilayani dengan QRIS menggunakan <i>M-Banking</i> dan dompet digital lainnya, <i>Tapping</i> dengan KMT bekerja sama dengan PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan <i>Tapping</i> bekerja sama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri) dan BCA. Selain itu dalam mendukung keberpihakan pengarus utamaan gender layanan Trans Jateng menerapkan pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, telah disediakan tempat duduk khusus untuk penyandang	Menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan tarif, kesetaraan layanan, keteraturan dan ketepatan waktu layanan Trans Jateng

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	disabilitas, pada koridor solo-wonogiri juga telah disediakan 2 bus khusus yang terdapat tempat untuk pengguna kursi roda, disediakan halte untuk penyandang disabilitas, serta dalam aplikasi Si Anteng juga terdapat pelayanan untuk tuna netra. Tindaklanjut TA 2026: - Lanjutan operasional pelayanan Trans Jateng pada 7 Koridor sebanyak 115 bus. - Dilakukan secara rutin pembinaan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng kepada petugas layanan Trans Jateng. - Pembangunan halte portable sejumlah 20 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng dengan rincian sebagai berikut: 1. Pembangunan 7 unit halte pada koridor Solo – Sragen. 2. Pembangunan 6 unit halte pada koridor Semarang – Gorbogan. Pembangunan 7 unit halte pada koridor Solo – Wonogiri.	
F. TERHADAP KINERJA PEMBANGUNAN GENDER (Leading Sector DP3AP2KB dan Bappeda Bidang Pemsosbud)		
1	Rekomendasi: Memastikan alokasi anggaran yang responsif gender dalam APBD Provinsi untuk program pemberdayaan perempuan di berbagai sektor untuk pencapaian IPG. DP3AP2KB Tindaklanjut TA 2025: 1) Menerbitkan Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender serta mengeluarkan SE Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 463.23/0005918 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya memuat kebijakan bahwa masing-masing OPD berkewajiban menyusun PPRG pada setiap tahun anggaran minimal 15% dari total anggaran masing-masing perangkat daerah, sehingga advokasi atau monev yang bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 2) Mengintegrasikan penyusunan PPRG ke dalam aplikasi e planning Jawa Tengah. 3) Pendampingan intens di OPD dalam penyusunan PPRG. Tindaklanjut TA 2026: 1) Mengoptimalkan peran Pokja PUG dan <i>focal point gender</i> 2) Menyusun panduan pengintegrasian PUG mulai tahap pelaksanaan sampai evaluasi Membentuk <i>pilot project</i> pengintegrasian PUG di OPD	1. Meningkatnya jumlah OPD yang menyusun PPRG setiap tahunnya 2. Meningkatnya kualitas dokumen PPRG menjadi lebih baik 3. Mengimplementasikan kebijakan PUG di Jawa Tengah dengan efektif dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan. 4. Mengoptimalkan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat perangkat daerah.

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
		5. Meningkatnya penguatan peran Pokja PUG dan focal point gender, penyusunan panduan pengintegrasian PUG dari pelaksanaan sampai evaluasi, serta pembentukan pilot project PUG di OPD
2	Rekomendasi: Mendorong kepedulian keompok perempuan dengan berkoodinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk memberi alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan implementasi program yang terkait kesetaraan Gender.	
	DP3AP2KB Tindaklanjut TA 2025: 1) Penguatan kapasitas kelompok perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan agar perempuan berani dan cakap dalam menyuarakan kebutuhan dan permasalahannya dalam forum-forum pengambilan keputusan 2) Melalui Serat Kartini (Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini) yang bertujuan meningkatkan kesadaran kritis dan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi 3) Kegiatan-kegiatan dengan melibatkan OPD Kab/Kota dalam pelaksanaannya agar dapat direplikasi dan dialokasikan anggaran di Kabupaten/Kota sesuai dengan kearifan lokal Tindaklanjut TA 2026: 1) Mendorong Kabupaten/Kota untuk memiliki LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) yang komprehensif sebagai amanat dari UU 23/2014. Tujuan pembentukan LPLPP adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan. LPLPP juga bertujuan untuk mengelola dan memfasilitasi program pemberdayaan perempuan, termasuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (KPA), dan forum-forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lainnya. Sehingga LPLPP di harapkan dapat menjad satu pintu untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta layanan keluarga yang komprehensif dan terintegrasi dengan program kecamatan berdaya. 2) Koordinasi dan kolaborasi dengan unsur lintas sektor terkait dalam memberikan pendampingan teknis untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, khususnya kelompok perempuan rentan.	1. Meningkatnya peran dan suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan 2. Meningkatnya kesadaran kritis dan kapasitas perempuan dalam memahami isu-isu pembangunan, terutama di bidang ekonomi. 3. Meningkatnya penyelenggaraan layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota.
	Rekomendasi:	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
3	Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. DP3AP2KB Tindaklanjut TA 2025: 1) Kerjasama dengan berbagai mitra antara lain: Asppuk Wilayah Jawa, Fatayat NU, IWAPI, dan organisasi/lembaga perempuan lain dalam mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai level. 2) Kerjasama yang dilakukan antara lain bekerjasama dengan forum puspa, FKKG, BKOW dan organisasi perempuan lainnya dalam upaya mendorong perlindungan perempuan. Tindaklanjut TA 2026: 1) Perluasan kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat Provinsi serta Advokasi melalui program Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan. 2) Memperluas mitra dengan organisasi perempuan dari bidang keagamaan seperti WKRI, PWKI, Puan Hayati dan lainnya. Isu bisa dikembangkan tidak hanya terkait kekerasan terhadap perempuan namun isu yang lain seperti peran mitra perempuan dalam upaya penurunan AKI AKB, perempuan dalam situasi darurat, perempuan korban bencana dan lain sebagainya.	1. Mendekatkan akses layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat kecamatan 2. Meningkatnya Kerjasama dengan mitra dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan isu perlindungan perempuan 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka implementasi dan pengembangan RPPA di Kecamatan Berdaya. 4. Meningkatnya Penguatan kelembagaan dalam rangka kerjasama bersama mitra (Forum Puspa, FKKG, BKOW) dalam upaya perlindungan perempuan
4	Rekomendasi: Pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan dan program terkait kesetaraan gender oleh pemerintah daerah. DP3AP2KB Tindaklanjut TA 2025: 1) Mendorong OPD Provinsi Jawa Tengah memakai tools GAP (<i>Gender analysis Pathway</i>) dan GBS (<i>Gender Budget Statement</i>) dalam perencanaan program dan kegiatan yang responsif gender tahun 2025. 2) Mendorong OPD Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan laporan pelaksanaan implementasi Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit kerjanya sebagai bahan evaluasi tim Teknis PUG Provinsi Jawa Tengah. 3) Mendorong Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan terkait implementasi program dan kegiatan responsif gender	1. Meningkatnya penggunaan <i>tools</i> GAP dan GBS dalam perencanaan tahun 2025 2. memperkuat pelaporan pelaksanaan PUG oleh masing-masing OPD 3. terintegrasinya pengawasan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	di OPD Provinsi Jawa Tengah yang melekat dengan pengawasan kinerja secara menyeluruh. Tindaklanjut TA 2026: Membangun sistem monitoring dan evaluasi terkait program pengarusutamaan gender yang terintegrasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	terhadap implementasi program responsif gender dalam sistem pengawasan kinerja Inspektorat 4. Terintegrasinya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan ketersediaan sistem monitoring dan evaluasi
5	Rekomendasi: Menjalin dialog dan menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok Perempuan.	
	DP3AP2KB Tindaklanjut TA 2025: 1. Mendorong Pelaksanaan musrenbang dan forum konsultasi Publik untuk memprioritaskan masukan dan usulan dari organisasi perempuan. Mendorong setiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan forum perencanaan dari lingkup desa hingga pada forum-forum tingkat Provinsi selalu melibatkan organisasi dan kelompok perempuan 2. Pelibatan mitra kerja dan organisasi masyarakat seperti BKKBN, PKK, Muslimat NU, PW Aisyiyah, TNI Manunggal Rangka Kencana, IBI, dan dalam mendorong Advokasi KIE penggerakan pelayanan KB dan percepatan penurunan stunting. Tindaklanjut TA 2026: 1. Menyelenggarakan forum konsultasi publik secara berkala dengan tema/isu tertentu untuk menampung masukan-masukan dari organisasi serta kelompok perempuan dan melakukan MoU dengan organisasi dan kelompok perempuan secara lebih luas agar terus bersinergi dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. 2. Kegiatan dalam upaya perlindungan perempuan, tetap melibatkan perempuan kelompok rentan serta hasil dialog atau masukan dari menjadi bahan untuk menyusun program kegiatan selanjutnya 3. Mengembangkan jejaring atau mitra kerja dalam upaya pembangunan keluarga, kependudukan, berencana dan keluarga berencana.	1. Meningkatkan komunikasi dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi/kelompok perempuan dengan membentuk forum konsultasi publik tematik secara rutin 2. Memperkuat kemitraan formal dan kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan menjalin kerja sama berkelanjutan antar lembaga pemerintah dan organisasi perempuan 3. Meningkatkan partisipasi kelompok perempuan rentan

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
		dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan dibuktikan dengan Terakomodasinya suara dan kebutuhan kelompok perempuan rentan dalam perumusan program 4. Mengembangkan mekanisme umpan balik (feedback system) untuk memastikan masukan dari forum konsultasi dan kelompok rentan digunakan dalam perencanaan berikutnya dengan tersedianya sistem pelaporan dan tindak lanjut hasil forum dan dialog 5. Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dan kelompok rentan dalam advokasi, perencanaan, dan penyusunan usulan program melalui berbagai pelatihan untuk Meningkatkan kemampuan organisasi perempuan dalam menyusun usulan teknis
G.	PRIORITASI PROGRAM NASIONAL	

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	Rekomendasi: Memastikan tema atau isu Pembangunan prioritas nasional kegiatan dan sub kegiatan teragendakan di Perubahan APBD 2025 antara lain: Penguatan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan, Program makan bergizi Gratis (MBG), Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, Dukungan swasembada Pangan.	
	<u>BAPPEDA BIDANG P2MP</u> Tindaklanjut TA 2025: Tema dan isu pembangunan prioritas Nasional seperti Penguatan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan stunting, kemiskinan ekstrim, dan dukungan swasembada pangan telah terakomodir dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, pembangunan diarahkan untuk “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, dengan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan Nasional.	Memastikan terlaksananya prioritas nasional di Jawa Tengah
H.	PENGAWASAN INTENSIF DAN PEMBERIAN SANKSI. Rekomendasi: Pengawasan intensif terhadap pengambilan air tanah tidak berijin terutama bagi para pengusaha yang melakukan tidak sesuai ketentuan dan pemberian sanksi jika memang terbukti bersalah.	
	<u>DINAS ESDM</u> Tindaklanjut TA 2025: Pada tahun 2025 telah terbit Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, yang didalamnya mengatur mengenai penataan izin pengusahaan air tanah dan penataan persetujuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan bukan usaha. Mendasari Permen ESDM No 14 Tahun 2024 tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya untuk menindaklanjuti pemanfaatan air tanah khususnya untuk kegiatan usaha yang ilegal/ tanpa izin, yaitu sebagai berikut: 1. Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2024 kepada seluruh pelaku usaha yang menggunakan air tanah di Jawa Tengah, sosialisasi dilakukan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>. Sosialisasi juga dilakukan secara masif pada setiap wilayah kab/kota; 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan; 3. Menerbitkan rekomendasi teknis untuk pengajuan izin pengusahaan air tanah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 4. Melakukan sosialisasi konservasi sumber daya air tanah secara masif kepada seluruh pengguna air tanah di Jawa Tengah baik untuk pemenuhan kebutuhan usaha maupun kebutuhan bukan usaha;	1. Penggunaan air tanah yang legal; 2. Volume pengambilan air yang sesuai dengan kemampuan akuifer

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH TA. 2024

REKOMENDASI KINERJA SEKTORAL

No	Tanggapan	Masalah yang diselesaikan
	5. Menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang mengacu pada UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Tindaklanjut TA 2026: Pada Tahun 2026 akan diusulkan beberapa kegiatan, yaitu : 1. Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Sumber Daya Air Tanah yang nantinya akan menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya air tanah di Jawa Tengah. 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan; 3. Menerbitkan rekomendasi teknis untuk pengajuan izin pengusahaan air tanah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Selain itu, tetap harus dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk menggunakan sumber daya air tanah yang memiliki izin dan menerapkan prinsip konservasi sumber daya air khususnya air tanah.	

BAB 4

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN & PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUANKAN, IDENTIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT

Pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah selain didukung dengan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga didukung dengan APBN melalui Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dengan anggaran Rp. 248.298.964.000,00 realisasi fisik 98,96% dan Keuangan Rp.228.463.671.732,00 (92,01%).

4.1.1 Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan urusan konkuren, pemerintah pusat memberikan penugasan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui mekanisme tugas pembantuan dari 4 Kementerian kepada 6 OPD dengan anggaran Rp.180.499.555.000,00 realisasi fisik 99,44% dan Keuangan 98,44%, untuk membiayai sebagian urusan pemerintahan yaitu:

1. Urusan Pertanian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penugasan dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh 2 OPD, yaitu:

A. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian Nomor SP DIPA-018.03.4.039151/2025 (Ditjen Tanaman Pangan), SP DIPA-018.08.4.039158/2025 (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian), SP DIPA-018.13.4.691347/2025 (Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian). Dinas Pertanian dan Perkebunan mendapatkan penugasan untuk melaksanakan sebagian urusan pertanian dengan anggaran Rp97.527.315.000,00, realisasi fisik 99% dan Keuangan 98,37% yang dilaksanakan untuk 3 program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
	DITJEN TANAMAN PANGAN	1.394.310.000	1.295.469.413	92,91	95,83
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	400.000.000	379.290.413	94,82	96,00
	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealisa Tanaman Pangan	400.000.000	379.290.413	94,82	96,00
II.	Program Dukungan Manajemen	994.310.000	916.179.000	92,14	95,76
	Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	994.310.000	916.179.000	92,14	95,76
	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	29.032.355.000	28.591.070.600	98,48	98,80
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	27.232.355.000	26.974.393.950	99,05	99,24
	1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	16,256,696,000	16.255.464.600	99,99	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
	2. Perlindungan dan Penyediaan Lahan	2.878.209.000	2.878.208.500	100	100
	3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	580.000.000	567.370.200	97,82	98,00
	4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	7.517.450.000	7.273.350.650	96,75	97,41
II.	Program Dukungan Manajemen	1.800.000.000	1.616.676.650	89,82	92,08
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Lainnya Ditjen PSP	1.800.000.000	1.616.676.650	89,82	92,08
	DITJEN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN	67.100.650.000	66.092.664.100	98,50	98,59
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	67.059.270.000	66.051.604.100	98,50	98,59
	1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	2.523.284.000	2.285.303.300	90,57	91,29
	2. Perlindungan dan Penyediaan Lahan	64.535.986.000	63.766.300.800	98,81	98,88
II.	Program Dukungan Manajemen	41.380.000	41.060.000	99,23	100
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen LIP	41.380.000	41.060.000	99,23	100
	Jumlah	97.527.315.000	95.979.204.113	98,37	99

a. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dilaksanakan melalui 5 kegiatan yaitu:

- 1) **Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal** dengan **keluaran** 2 kali pembinaan dan pengawalan luas tambah tanam padi dan jagung dengan 35 Kabupaten/Kota. **Outcome** kegiatan yaitu tersusunnya bahan kebijakan untuk luas tambah tanam padi dan jagung. **Manfaat** kegiatan yaitu peningkatan luas tambah tanam dan evaluasi beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan luas tambah tanam. **Dampak** kegiatan yaitu peningkatan produksi tanaman pangan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu adanya beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan luas tanam karena kendala ketersediaan air. **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pompanisasi, pemanfaatan sumur dan percepatan pembangunan jaringan irigasi.
- 2) **Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian** dengan **keluaran** yaitu:
 - a) Fasilitasi dan pembinaan pengembangan sistem pertanian terpadu di dataran tinggi pada 4 kelompok masyarakat di 3 Kabupaten: Purbalingga, Banjarnegara, Magelang. **Outcome** kegiatan yaitu terciptanya sistem pertanian terpadu di dataran tinggi (*upland*). **Manfaat** kegiatan yaitu meningkatkan produktivitas pertanian di dataran tinggi melalui pendekatan pertanian terintegrasi dari hulu hingga hilir. **Dampak** kegiatan yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui penguatan *on-farm* dan *off-farm*. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu lambatnya adopsi

teknologi modern. **Upaya** yang dilakukan yaitu melalui pendampingan intensif dan integrasi dengan bantuan sarana prasarana (alsintan/irigasi) dari hulu ke hilir;

- b) **Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup** dengan pengadaan 100 unit pompa irigasi di 23 kabupaten. **Outcome** kegiatan yaitu penyediaan air bagi sawah pertanian. **Manfaat** kegiatan yaitu peningkatan indeks pertanaman. **Dampak** kegiatan yaitu peningkatan produksi pertanian. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu prasyarat teknis sumber daya listrik yang membatasi lokasi yang membutuhkan belum bisa tersentuh karena jauh dari akses jaringan listrik. **Upaya** yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan PT. PLN untuk melakukan verifikasi bersama dan investasi pemasangan jaringan baru untuk lokasi CPCL irigasi perpompaan.
- 3) **Perlindungan dan Penyediaan Lahan** dilaksanakan melalui kegiatan optimasi lahan dengan **keluaran** perbaikan infrastruktur optimasi lahan non rawa dengan luasan 11.489 Ha di 13 Kabupaten. **Outcome** kegiatan yaitu perbaikan jaringan sumber daya air. **Manfaat** kegiatan yaitu peningkatan luasan tanam komoditas tanaman pangan khususnya padi. **Dampak** kegiatan yaitu peningkatan produksi komoditas tanaman pangan guna penyediaan pangan di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu penentuan CPCL yang seringkali mengalami kendala saat dilaksanakannya verifikasi karena tidak memenuhi syarat. **Upaya** yang dilakukan yaitu percepatan pelaksanaan SID, konstruksi, dan olah lahan, serta koordinasi intensif dengan pengawas lapang agar pelaksanaan yang tertunda ini tidak menjadi kendala.
- 4) **Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian** dengan **keluaran** bantuan sarana alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan pada 29 kabupaten. **Outcome** kegiatan yaitu meningkatnya efektivitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pengelolaan sarana produksi pertanian yang ditunjukkan melalui produktivitas, efisiensi usaha tani, dan kapasitas petani meningkat. **Manfaat** kegiatan yaitu meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui percepatan dan ketepatan proses budidaya, berkurangnya ketergantungan pada tenaga kerja manual, serta terjaminnya ketepatan waktu tanam sesuai kalender tanam. Selain itu, pengelolaan dan pengawasan yang baik memastikan pemanfaatan alsintan bantuan secara tepat guna, berkelanjutan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan tani, sehingga berkontribusi pada peningkatan produksi dan ketahanan pangan daerah. **Dampak** kegiatan yaitu meningkatnya keberlanjutan dan daya saing sektor pertanian, yang tercermin dari meningkatnya produksi dan stabilitas hasil tanaman pangan, terjaganya ketahanan pangan daerah, serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu,

mekanisasi pertanian yang terkelola dengan baik mendorong modernisasi pertanian, memperkuat kelembagaan petani, mengurangi risiko gagal tanam akibat keterlambatan musim tanam, serta menciptakan tata kelola bantuan pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah dan pemerataan alsintan sesuai kebutuhan wilayah, pemanfaatan dan pengelolaan alsintan bantuan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian dan perawatan, serta dukungan pemeliharaan dan keberlanjutan alsintan yang masih rendah. Selain itu, pengawasan pemanfaatan alsintan belum sepenuhnya efektif, perencanaan pengadaan belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan riil, dan koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu diperkuat. **Upaya** yang dilakukan yaitu penguatan perencanaan kebutuhan alsintan berbasis data dan kondisi wilayah, pemerataan serta ketepatan sasaran penyaluran alsintan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani dalam pengoperasian, perawatan, dan manajemen alsintan, serta penguatan sistem pengelolaan dan pemeliharaan alsintan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan pemanfaatan alsintan bantuan dan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola alsintan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

- 5) **Fasilitasi Pupuk dan Pestisida** dengan **keluaran** tersusunnya data penerima pupuk bersubsidi yang tervalidasi dan laporan pengawasan pupuk dan pestisida pada 35 Kabupaten/Kota. **Outcome** kegiatan yaitu tersalurnya pupuk bersubsidi sebanyak 2.103.113 orang penerima secara lebih tepat sasaran dan terukur. **Manfaat** kegiatan yaitu tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai asas 7 tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, tepat harga dan tepat sasaran penerima). **Dampak** kegiatan yaitu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas, kualitas hasil pertanian, dan akses pupuk dengan harga terjangkau dan efisien bagi petani yang berhak, serta optimalisasi pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu beberapa petani belum masuk saat penginputan eRDKK periode pertama dikarenakan terkendala pada kelengkapan persyaratan, data NIK dinyatakan tidak valid atau dinyatakan meninggal dunia dan tidak sesuai dengan data Dukcapil Kabupaten/Kota, sehingga belum bisa melakukan penebusan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan melakukan *update* data petani penerima pupuk bersubsidi yang dilakukan setiap kali ada pembukaan aplikasi eRDKK pada tahun berjalan sehingga NIK yang sebelumnya belum bisa masuk pada pengusulan sebelumnya dapat diusulkan pada aplikasi eRDKK dan petani tersebut dapat menebus pupuk bersubsidi.

2. **Program Dukungan Manajemen** dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian dengan keluaran 3 dokumen layanan perencanaan dan keuangan.

B. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian Nomor DIPA SP DIPA-018.06.4.039154/2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Tugas Pembantuan dengan anggaran Rp2.260.607.000,00 realisasi fisik 99,32% dan realisasi keuangan Rp 2.218.803.713,00 (98,15%) digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
	Layanan Kesehatan Hewan	2.156.100.000	2.123.520.000	98,49	99,29
II.	Program Dukungan Manajemen				
	Layanan BMN	5.197.222	3.030.500	58,31	100,00
	Layanan Data dan Informasi	20.450.295	20.119.000	98,38	100,00
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.549.566	10.078.000	95,53	100,00
	Layanan Manajemen Keuangan	68.081.419	62.056.213	91,15	100,00
	Jumlah	2.260.607.000	2,218,803,713	98,15	99,32

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dilaksanakan melalui kegiatan **Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan** dengan **keluaran** layanan kesehatan hewan berupa vaksinasi 397.149 dosis Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). **Outcome** kegiatan: hewan ternak kebal dari penyakit PMK. **Manfaat** kegiatan ini terbebasnya hewan ternak dari penyakit PMK. **Dampak** kegiatan menurunnya kasus PMK di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi keterbatasan petugas dan tempat pelayanan yang sulit terjangkau. **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan layanan vaksinasi PMK.
2. **Program Dukungan Manajemen** dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu:
 - 1) **Layanan Barang Milik Negara (BMN)** dengan **keluaran** laporan barang milik negara. **Outcome** kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas data dan informasi BMN. **Manfaat** kegiatan ini yaitu data BMN lebih akurat. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatnya

akuntabilitas BMN. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih banyak BMN yang belum tercatat dalam *database*. **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk aktif melaporkan aset BMN yang ada di wilayahnya.

- 2) **Layanan Data dan Informasi** dengan **keluaran** laporan data peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kualitas data peternakan dan kesehatan hewan Jawa Tengah yang akurat dan mudah diakses. **Manfaat** kegiatan yaitu sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Jawa Tengah. **Dampak** yang diperoleh adalah peningkatan efektifitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. **Permasalahan** antara lain validitas dan akurasi data masih rendah. **Upaya** mengatasi melalui verifikasi dan validasi data peternakan dan kesehatan hewan Jawa Tengah.
- 3) **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** dengan **keluaran** laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan program/kegiatan karena pelaksanaan dipantau secara berkelanjutan. **Manfaat** kegiatan yaitu dapat mengetahui kemajuan pelaksanaan program, output, dan outcome secara jelas. **Dampak** kegiatan adalah peningkatan kualitas pelayanan ke masyarakat (kinerja OPD meningkat). **Permasalahan** adalah kurang optimalnya koordinasi lintas bidang, sehingga terkadang tindak lanjut rekomendasi terlambat. **Upaya** mengatasi melalui peningkatan pengendalian internal dan koordinasi lintas bidang.
- 4) **Layanan Manajemen Keuangan** dengan **keluaran** 4 dokumen yaitu: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); Buku Kas Umum (BKU); Buku Pembantuan Pajak; Laporan Pertanggungjawaban Bendahara; dan Laporan Realisasi Keuangan Bulanan. **Outcome** kegiatan yaitu meningkatnya kualitas manajemen keuangan. **Manfaat** kegiatan adalah menjamin pengelolaan anggaran yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. **Dampak** kegiatan antara lain meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi. **Permasalahan** kegiatan yaitu serapan anggaran tidak merata (menumpuk di akhir tahun anggaran). **Upaya** mengatasi monitoring anggaran secara berkala untuk menghindari penumpukan serapan di akhir tahun.

2. Urusan Pekerjaan Umum

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penugasan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh 2 OPD, yaitu:

A. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Berdasarkan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum Nomor SP DIPA-145.04.4.693750/2025, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

mendapatkan penugasan untuk melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan anggaran Rp17.283.071.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 99,70% untuk 2 program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum DPUBMCK

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Program Infrastruktur Kon-ektivitas	17.151.983.000	17.107.300.200	99,74	100,00
	Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	17.151.983.000	17.107.300.200	99,74	100,00
II.	Program Dukungan Mana-jemen	131.088.000	123.628.500	94,31	100,00
	Layanan Perkantoran	131.088.000	123.628.500	94,31	100,00
Jumlah		17,283.071.000	17.230.928.700	99,70	100,00

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

- 1. Program Infrastruktur Konektivitas** dilaksanakan melalui kegiatan **Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional** berlokasi di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, dengan **keluaran** Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 19,94 Km; Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sepanjang 1,01 Km; Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) sepanjang 68,16 Km; Preservasi Jembatan sepanjang 16,6m; dan Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) sepanjang 602,3m. **Outcome** kegiatan tersebut terdaganya kondisi jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi mantap. **Manfaat** dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jaringan jalan dan jembatan nasional. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu penurunan biaya mobilitas, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi. **Permasalahan** yang dihadapi adanya aset pipa Pertamina pada lahan yang digunakan. **Upaya** yang dilakukan koordinasi dengan Pertamina dan revisi desain.
- 2. Program Dukungan Manajemen** dilaksanakan melalui Kegiatan Layanan Perkantoran dengan keluaran berupa operasional dan pemeliharaan kantor yang dilakukan oleh satker induk dan para PPK.

B. Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Berdasarkan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: SP DIPA-145.03.4.694076/2025. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang dengan anggaran Rp. 58.589.297.000,00, realisasi fisik 100% dan Keuangan 98,93% untuk melaksanakan 2 program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum PUSDATARU

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Program Ketahanan Sumber Daya Air	58.240.745.000	57.673.899.000	99,03	100
	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	58.240.745.000	57.673.899.000	99,03	100
II.	Program Dukungan Manajemen	348.552.000	288.300.000	82,71	100
	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	348.552.000	288.300.000	82,71	100
Jumlah		58.589.297.000	57.962.199.000	98,93	100,00

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

- 1. Program Ketahanan Sumber Daya Air** dilaksanakan melalui kegiatan **Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana**, keluaran kegiatan tersebut yaitu jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara sepanjang 3.275.20 Km di Kabupaten:Tegal, Pemalang, Batang, Brebes, Pekalongan, Demak, Kendal, Kudus, Pati, Grobogan, Magelang, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Banjarnegara dan Cilacap. **Outcome** kegiatan tersebut adalah terjaganya kualitas jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang ada di Jawa Tengah sehingga tersedia pengairan untuk lahan pertanian. **Manfaat** dari kegiatan adalah meningkatnya hasil pertanian dan penyerapan tenaga kerja setempat. **Dampak** dari kegiatan adalah mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Jawa Tengah. **Permasalahan** yang dihadapi belum optimalnya kinerja jaringan irigasi karena masih adanya kerusakan sarana dan prasarana, kurangnya pengamanan aset dan rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengguna air. **Upaya** yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pemeliharaannya.
- 2. Program Dukungan Manajemen** dilaksanakan melalui **kegiatan dukungan manajemen ditjen Sumber Daya Air** melalui kegiatan layanan dukungan manajemen internal dengan keluaran tersusunnya 1 layanan organisasi dan tata kelola internal dan 1 layanan perkantoran (tersusunnya struktur organisasi Tugas Pembantuan Satuan kerja Perangkat Daerah untuk kemudahan koordinasi layanan, untuk pemecahan permasalahan yang timbul. Jika ada kekosongan pejabat pada struktur organisasi akan menghambat layanan dukungan manajemen. Upaya yang dilakukan sebisa mungkin untuk mempercepat penggantian pejabat struktural agar mempermudah koordinasi kegiatan yang ada.)

3. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi di Provinsi Jawa Tengah menerima penugasan dari Kementerian Transmigrasi melalui DIPA Kementerian Transmigrasi berdasarkan Nomor: SP DIPA- 152.03.4.694553/2025 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran Rp2.099.988.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 77,87%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya pengurangan kuota calon transmigran dari rencana 45 KK dan yang dapat diberangkatkan hanya 19 KK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Transmigrasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Program Transmigrasi				
	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.033.068.000	1.571.252.298	77,28	100
II.	Program Dukungan Manajemen				
	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	66.920.000	63.915.540	95,51	100
Jumlah		2.099.988.000	57.962.199.000	77,87	100,00

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

1. Program Transmigrasi didukung **Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi** dengan keluaran kuota pemberangkatan transmigran sebanyak 19 KK Transmigran ke 4 Lokasi; Penyediaan Perbekalan sandang untuk 45 KK Transmigrasi; Penyediaan pelayanan Angkutan udara dari daerah asal ke Provinsi daerah penempatan, pelayanan Kesehatan, Permakanan dan Penampungan; serta Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Transmigrasi. Rincian lokasi daerah Penempatan Transmigran Tahun 2025 Jawa Tengah untuk 19 KK yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan 5 KK; Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat 5 KK; Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah 3 KK; serta Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara 6 KK. **Outcome** kegiatan tersebut terwujudnya fasilitasi dan pembinaan keluarga calon transmigran. **Manfaat** dari kegiatan tersebut membuka lapangan pekerjaan dan lahan pertanian baru yang produktif. **Dampak** kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan calon transmigran Jawa Tengah dalam menggerakkan ekonomi kawasan prioritas transmigrasi nasional. **Permasalahan** yang dihadapi adalah animo penduduk Jawa Tengah yang berkeinginan bertransmigrasi cukup banyak namun jumlah yang ditempatkan relatif sedikit, dari 45 KK hanya teralokasi sebanyak 19 KK (42,22%). **Upaya** yang dilakukan adalah dengan koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi RI berkaitan penambahan kuota jumlah penempatan transmigran.

2. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui **Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal** dengan **keluaran** penyusunan dokumen Penyusunan Rencana Kerja, dokumen Laporan Keuangan, Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Tugas, Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat. **Outcome** kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas penyusunan rencana kerja, laporan keuangan, laporan pelaksanaan tugas, koordinasi dan konsultasi ke Pusat. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu laporan pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan pelaksanaan kegiatan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu adanya migrasi akun PPK pada aplikasi *e-purchasing* pemprov jateng **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi dan sinkronisasi akun PPK terkait *e-purchasing*.

4. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah menerima penugasan Berdasarkan DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor **SP DIPA-032.03.4.039163/2025**, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan penugasan sebagian urusan Kelautan dan Perikanan dengan anggaran Rp2.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 98,50% untuk program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian	
				(%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Program Dukungan Manajemen				
	Layanan Manajemen Keuangan	2.000.000	1.970.000	98,50	100
	Jumlah	2.000.000	1.970.000	98,50	100,00

a. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan rincian output layanan manajemen keuangan dengan aktivitas kegiatan Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap meliputi laporan keuangan dan BMN. **Manfaat** mendukung pelaksanaan urusan pemerintah pusat dibidang kelautan dan perikanan, melalui penyusunan laporan keuangan dan BMN lingkup direktorat jenderal perikanan tangkap. **Dampak** dari kegiatan ini terpenuhinya nilai Kementerian Kelautan dan Perikanan

4.1.2 Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBN. Tahun 2025 anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp70.536.686.000,00 dengan realisasi fisik 97,75% dan keuangan 75,81%, yang dilaksanakan 5 OPD untuk melaksanakan kewenangan dan urusan pemerintahan sebagai berikut:

I. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada jabatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah. Pada Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Rp32.000.000,00 berdasarkan Nomor SP DIPA - 010.04.3.039667/2025 tanggal 2 Desember 2024 dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7 Realisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Program Dukungan Manajemen				
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	32.000.000	32.000.000	100	100,00
	Jumlah	32.000.000	32.000.000	100	100,00

a. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan keluaran Fasilitasi Persiapan Pelantikan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan peserta dari pemerintah daerah 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu kesiapan administrasi dan teridentifikasi permasalahan dan solusi untuk pelantikan kepala Daerah hasil Pilkada langsung 2024 di 35 Kabupaten/Kota. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu tertib administrasi dan legitimasi pelantikan kepala Daerah hasil Pilkada langsung 2024, **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu stabilitas wilayah dan legitimasi kepala daerah. **Permasalahan** yang dihadapi adanya potensi pengunduran acara pelantikan kepala daerah karena menunggu terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hasil Pilkada langsung. **Upaya** yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan cek recheck ulang kelengkapan administrasi oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi.

II. Kewenangan Delegatif

1. Urusan Koperasi dan UKM

Berdasarkan DIPA Petikan Kementerian Koperasi Republik Indonesia Nomor SP DIPA-149.01.3.694497/2025 tanggal 14 Oktober 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi APBN Dekonsentrasi sebesar Rp63.351.002.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan Keuangan 75,88%. Rendahnya tingkat realisasi keuangan disebabkan karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dengan tidak memberikan seminar kit kepada peserta pelatihan, selain itu karena adanya peserta pelatihan baik pendamping Koperasi maupun dari peserta pengurus/pengelola koperasi desa/kelurahan merah putih tidak hadir mengikuti kegiatan. Untuk Program Perkoperasian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8 Realisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan Koperasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Program Perkoperasian				
	Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Koperasi di Daerah	63.351.002.000	48.072.304.076	75,88	100,00
Jumlah		63.351.002.000	48.072.304.076	75,88	100,00

a. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Perkoperasian dilaksanakan melalui kegiatan **Dukungan Pemberdayaan Koperasi di Daerah** dengan lokasi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan **keluaran** Fasilitas Pemberdayaan Koperasi bagi 8.523 Koperasi dan pembayaran honorarium bagi *Business Assistant* (BA) Koperasi Desa Merah Putih untuk 838 orang selama 3 bulan; Pelatihan Kompetensi dan Talenta bagi 16.320 Orang; Pembayaran honorarium 70 *Project Management Officer* (PMO) selama 3 bulan. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu optimalisasi pengelolaan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah melalui pendampingan oleh PMO. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian desa, dan penciptaan lapangan kerja. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu peningkatan aksesibilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. **Permasalahan** yang dihadapi adanya *Project Management Officer* (PMO) dan *Business Assistant* (BA) yang mengundurkan diri. **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia untuk pergantian personil yang mengundurkan diri.

2. Urusan Pangan

Berdasarkan DIPA Badan Pangan Nasional Nomor SP DIPA-125.01.3.690701/2025 sebesar Rp591.453.000,00. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan pelimpahan kewenangan sebagian urusan pangan untuk melaksanakan 2 program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Urusan Pangan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	188.720.000	188.703.000	99,99	100
	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	89.825.000	89.825.000	100	100
	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	268.500.000	267.023.497	99,45	100
II.	Program Dukungan Manajemen				
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	44.408.000	41.908.000	94,37	100
Jumlah		591.453.000	587.459.497	99,32	100

a. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu:

- 1) **Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** dengan **keluaran** pelaksanaan 18 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten (Demak, Klaten, Banjarnegara, Boyolali, Purworejo, Temanggung, Brebes, Wonosobo, Kebumen) dan Kota Semarang. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu tersedianya pasokan pangan yang terjangkau masyarakat. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu tersedianya pasokan dan terkendalinya harga pangan strategis di tingkat konsumen. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya pangan murah dan terkendalinya inflasi pangan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum meratanya ketersediaan pasokan pangan antar waktu antar wilayah. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan GPM di wilayah dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang tinggi.
- 2) **Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi** dengan **keluaran** Peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Provinsi; edukasi stop boros pangan kepada masyarakat dan hotel, restoran, kafe (horeka) serta fasilitasi penyelamatan pangan berlebih kepada daerah rentan pangan. **Outcome** kegiatan tersebut adalah tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan Pangan. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu terklasifikasinya Kecamatan sangat rentan, rentan, agak rentan, agak tahan, tahan, sangat tahan pangan di Provinsi Jawa Tengah. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu intervensi penanganan daerah rentan pangan lebih cepat dan tepat sasaran. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu masih banyak daerah rentan pangan dan pola konsumsi masyarakat yang boros yang berakibat pada meningkatnya jumlah limbah makanan (*food waste*). **Upaya** yang dilakukan yaitu penanganan daerah rawan pangan secara holistik.
- 3) **Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan** dengan **keluaran** Penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di 15 Kabupaten (Kendal, Demak, Semarang, Blora, Pemalang, Purbalingga, Pekalongan, Sragen, Brebes, Grobogan, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Magelang, dan Boyolali) dan 3 Kota (Salatiga, Magelang, Tegal); pengawasan sampel/produk pangan di *pre* dan *post market* serta Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Kabupaten Jepara, Kendal, Kota Magelang dan Kota Semarang. **Outcome** kegiatan tersebut adalah terjaminnya keamanan dan kualitas pangan masyarakat sesuai dengan standar. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu terjaganya keamanan dan kualitas pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. **Dampak** dari kegiatan tersebut yaitu meningkatnya kesadaran

masyarakat dan pelaku usaha terhadap keamanan dan kualitas pangan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap keamanan dan kualitas pangan. **Upaya** yang dilakukan yaitu melakukan edukasi dan pengawasan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha serta fasilitasi Rumah Pangan B2SA.

2. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui kegiatan **Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional** dengan **keluaran** laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). **Outcome** kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan dan BMN. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu laporan keuangan dan BMN yang akuntabel. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu belum optimalnya penatausahaan aset BMN. **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi dengan Badan Pangan Nasional terkait penatausahaan aset BMN yang saat ini sudah dialihkan pencatatannya di Badan Pangan Nasional.

3. Urusan Pertanian

Berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP DIPA- 018.03.3.039092/2025 Ditjen Tanaman Pangan, SP DIPA-018.08.3.039014/2025 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, SP DIPA-0.18.10.3.418011 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pertanian dengan anggaran Rp1.283.485.000,00 untuk melaksanakan 3 program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 10 Realisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
	DITJEN TANAMAN PANGAN	976.325.000	973.539.587	99,71	100
I.	Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	916.845.000	915.339.587	99,84	100
II.	Program Dukungan Manajemen				
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	59.480.000	58.200.000	97,85	100
	DITJEN PRASARAN DAN SARANA PERTANIAN	65.000.000	65.000.000	100	100
	Program Dukungan Manajemen				
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen PSP	65.000.000	65.000.000	100	100
	BPSDMP	242.160.000	242.113.208	99,98	100
	Pogram Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi				

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	242.160.000	242.113.208	99,98	100
	Jumlah	1.283.485.000	1.280.652.795	99,78	100

a. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

- 1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** didukung kegiatan **Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan** dengan **keluaran** penerbitan 4.500 sertifikat benih padi. **Outcome** kegiatan yaitu terlaksananya pengelolaan perbenihan tanaman pangan melalui pelayanan sertifikasi benih. **Manfaat** kegiatan yaitu peningkatan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan benih bermutu. **Dampak** kegiatan yaitu menjamin ketersediaan benih bermutu di Jawa Tengah. **Permasalahan** kegiatan yaitu terbatasnya jumlah dan kapasitas penangkar benih. **Upaya** yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembinaan, dan pengawalan serta mempermudah layanan sertifikasi benih bagi penangkar benih.
- 2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** didukung kegiatan **Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian** dengan **keluaran** pendampingan kepada kelompok tani di 35 Kabupaten/Kota. **Outcome** kegiatan yaitu penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. **Manfaat** kegiatan yaitu meningkatnya pengetahuan/keterampilan petani. **Dampak** kegiatan yaitu peningkatan kapasitas petani untuk menunjang peningkatan produksi hasil pertanian. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu minimnya kapasitas sumber daya petani. **Upaya** yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendampingan, penyuluhan, bimbingan teknis kepada kelompok tani untuk meningkatkan pengetahuan/keterampilan petani.
- 3. Program Dukungan Manajemen** dilaksanakan melalui kegiatan **Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya** pada Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan 2 dokumen layanan manajemen keuangan.

4. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: SP DIPA-092.01.3.030073/2025 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penugasan untuk melaksanakan sebagian urusan Keolahragaan dengan anggaran Rp5.278.746.000,00 untuk program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.11 Realisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan Keolahragaan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Tingkat Ketercapaian (%)	
		Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Program Keolahragaan				
	Kegiatan Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	5.278.746.000	3.736.289.000	70,78%	100%
	Jumlah	5.278.746.000	3.736.289.000	70,78%	100%

a. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Keolahragaan dilaksanakan melalui kegiatan **Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda** dengan **Keluaran** terfasilitasi dan terbinanya Talenta Olahragawan Berbakat Nasional sebanyak 46 Atlet. Selama periode pelaksanaan, telah dilaksanakan Tes Seleksi Masuk Diklat untuk menjaring calon atlet potensial dan dilaksanakan Try Out Atlet sebagai evaluasi kemampuan, Tes dan Pengukuran Atlet untuk menilai perkembangan performa serta Operasional satker selama 12 bulan. **Outcome** kegiatan tersebut adalah meningkatnya talenta atlet **Manfaat** meningkatnya prestasi atlet dalam kejuaraan olahraga nasional dan internasional **Dampak** meningkatkan citra Jawa Tengah ditingkat nasional dan internasional. **Permasalahan** masih kurangnya kejuaraan yang dapat diikuti atlet PPLOP dikarenakan beberapa Kejurnas antar Atlet PPLOP tidak dilaksanakan oleh Kemenpora. **Upaya** yang dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait jadwal kejuaraan.

4.2 IDENTIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA (HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN)

4.2.1 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

A. Kebijakan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

Mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota TA 2025 sebesar Rp589.655.055.000,00 dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.12 Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2025

NO	KAB/KOTA	BANTUAN			TOTAL (Rp.000,00)
		NSNP (Rp.000,00)	SARPRAS (Rp.000,00)	PENDIDIKAN (Rp.000,00)	
1	Cilacap	938.000	6.528.515	8.640.000	16.106.515
2	Banyumas	1.113.000	7.505.000	945.000	9.563.000
3	Purbalingga	981.000	5.031.180	-	6.012.180
4	Banjarnegara	981.000	11.960.326	-	12.941.326
5	Kebumen	981.000	28.000.000	50.000	29.031.000

NO	KAB/KOTA	BANTUAN			TOTAL (Rp.000,00)
		NSNP (Rp.000,00)	SARPRAS (Rp.000,00)	PENDIDIKAN (Rp.000,00)	
6	Purworejo	1.001.000	13.750.000	-	14.751.000
7	Wonosobo	1.001.000	47.107.000	-	48.108.000
8	Magelang	918.000	9.452.000	-	10.370.000
9	Boyolali	928.000	8.219.000	-	9.147.000
10	Klaten	1.141.000	5.500.000	-	6.641.000
11	Sukoharjo	1.136.500	1.602.000	-	2.738.500
12	Wonogiri	1.001.000	5.000.000	-	6.001.000
13	Karanganyar	922.000	36.138.667	-	37.060.667
14	Sragen	1.306.000	20.580.088,50	-	21.886.088,50
15	Grobogan	1.072.000	18.600.000	-	19.672.000
16	Blora	981.000	45.920.000	2.290.000	49.191.000
17	Rembang	1.001.000	6.750.000	-	7.751.000
18	Pati	1.131.000	17.800.000	-	18.931.000
19	Kudus	913.500	11.000.000	-	11.913.500
20	Jepara	1.188.500	19.705.000	-	20.893.500
21	Demak	1.098.000	63.250.000	-	64.348.000
22	Semarang	956.500	50.700.000	-	51.656.500
23	Temanggung	1.413.500	13.500.000	-	14.913.500
24	Kendal	991.000	4.000.000	440.000	5.431.000
25	Batang	956.500	7.000.000	150.000	8.106.500
26	Pekalongan	893.500	9.255.000	-	10.148.500
27	Pemalang	981.000	-	-	981.000
28	Tegal	893.500	8.037.153,50	-	8.930.653,50
29	Brebes	1.001.000	15.000.000	-	16.001.000
30	Kota Magelang	1.446.500	5.000.000	-	6.446.500
31	Kota Surakarta	1.202.500	5.446.125	-	6.648.625
32	Kota Salatiga	926.500	10.000.000	-	10.926.500
33	Kota Semarang	857.500	14.702.000	6.000.000	21.559.500
34	Kota Pekalongan	1.201.500	700.000	2.000.000	3.901.500
35	Kota Tegal	946.500	-	-	946.500
JUMLAH		36.401.000	532.739.055	20.515.000	589.655.055

Alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota tersebut untuk kegiatan:

1. Bantuan Non Sarpras Non Pendidikan (NSNP), yang digunakan untuk kegiatan:
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD), berupa pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat; membuka isolasi daerah terpencil; mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan. Sedangkan kegiatan non fisiknya yaitu penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, penyuluhan bahaya penggunaan narkoba, bahaya judi online, penyuluhan pertanian terpadu, pemeriksaan kesehatan masyarakat atau cek kesehatan gratis, serta penyuluhan KB dan pengentasan stunting, serta Rakor Persiapan Upacara dan Upacara Buka Tutup.

- b. Bantuan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), digunakan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan kabupaten/kota melalui kegiatan Penghargaan Pangripta Abipraya.
 - c. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan, digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar hunian Masyarakat yang layak kepada Kepala Keluarga (KK) miskin berdasarkan pada basis data penanggulangan kemiskinan yang dirilis Kementerian Sosial. Bantuan ini digunakan untuk kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang meliputi: Pembangunan/perbaikan atap rumah; Pembangunan/perbaikan lantai rumah; Pembangunan/perbaikan dinding rumah; yang pelaksanaannya secara swadaya masyarakat dengan mengedepankan gotong-royong.
2. Bantuan Sarana Prasarana, digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Alokasi Bantuan Sarana Prasarana TA 2025 dengan mempertimbangkan:
 - a. Proporsionalitas keserasian bantuan antar Kabupaten/Kota dengan indikator: luas wilayah; jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Pendapatan Asli Daerah (PAD); Product Domestic Regional Bruto (PDRB); kontribusi dalam penyediaan lahan pertanian berkelanjutan; panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota; luas areal daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota; Keterkaitan dengan program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan Jawa Tengah; Komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendampingan/sharing pada tahun berjalan untuk kelancaran dan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan nilai kemanfaatan/outcomenya; Kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) tahun sebelumnya; serta Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan dan laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan;
 - b. Urutan prioritas usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbang Provinsi;
 - c. Usulan tindak lanjut hasil reses/kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Usulan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bantuan Sarana Prasarana TA 2025 diarahkan untuk membiayai kegiatan: prasarana jalan/jembatan dan kelengkapannya; prasarana Sumber Daya Air (SDA); Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL); sarana dan prasarana Perhubungan; sarpras dan utilitas kawasan permukiman kumuh; prasarana penunjang pariwisata; sarpras pertanian; sarpras pendukung ekonomi kerakyatan; sarpras pendukung latihan tenaga kerja untuk menunjang pengembang ekonomi wilayah; sarpras Kesehatan Pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit untuk instalasi IGD

3. Bantuan Pendidikan, digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat non fisik dan kegiatan fisik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar), yaitu: penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan; peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; peningkatan kualitas pengembangan kurikulum pendidikan dan pembinaan kesiswaan. Bantuan Pendidikan TA 2025 yaitu Program Pendidikan Dasar meliputi: Rehab Ruang Kelas Rusak SD dan SMP; Pembangunan Ruang Perpustakaan SD; Pengadaan Alat TIK pembelajaran SD; Pengadaan Alat laboratorium Komputer SMP dan Pembangunan Ruang laboratorium SMP.

B. Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Pada Tahun Anggaran 2025 didukung anggaran sebesar Rp589.655.055.000,00 untuk 717 kegiatan dengan realisasi fisik 95,45% dan realisasi penyaluran Rp542.528.545.137,00 (92,01%). Progres secara rinci pelaksanaan Bantuan kepada Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Bantuan Non Sarpras Non Pendidikan

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk kegiatan Non Sarpras Non Pendidikan didukung anggaran sebesar Rp36.401.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk 47 kegiatan di 35 Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik 99,45% dan realisasi penyaluran Rp 36.200.000.000 (99,45%). Belum maksimal realisasi fisik karena paket pekerjaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan anggaran Rp. 201.000.000,00 tidak dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut dialokasikan di Anggaran Murni pada Belanja Hibah kepada Masyarakat, kemudian pada APBD Perubahan TA. 2025 diubah menjadi Belanja Langsung pada DISPERAKIM Kabupaten Banyumas namun mengingat waktu di perubahan sangat terbatas, maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Bantuan TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD) didukung anggaran Rp33.200.000.000,00 untuk membiayai kegiatan fisik dan non fisik di 35 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam 4 tahap dengan realisasi fisik dan keuangan 100%.

Bantuan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) didukung anggaran Rp3.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk 11 Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Penerima Bantuan SPPD adalah Kabupaten: Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Pati, Jepara, Demak, Temanggung dan Kota: Magelang, Surakarta, Pekalongan.

2. Bantuan Sarana Prasarana

Bantuan Sarana Prasarana dengan anggaran Rp532.739.055.000,00 yang diarahkan untuk pelaksanaan 266 kegiatan dengan realisasi fisik 96,21% dan realisasi penyaluran Rp492.319.604.732,00 (92,41%). Belum optimalnya capaian realisasi fisik dan Realisasi penyaluran, disebabkan adanya efisiensi pelaksanaan dan terdapat 10 Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana yang tidak

dapat dilaksanakan sebesar Rp20.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan Embung Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang anggaran Rp3.650.000.000,00 (kegiatan dialokasikan pada APBD Perubahan TA. 2025 sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi).
- b. Pembangunan Embung Sumber Semen Kecamatan Sale Kabupaten Rembang anggaran Rp3.100.000.000,00 (kegiatan dialokasikan pada APBD Perubahan TA. 2025 sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi).
- c. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jembatan Trasan - Pasar Bandongan Kabupaten Magelang anggaran Rp450.000.000,00 (Ruas jalan merupakan kewenangan Provinsi Jawa Tengah atau Bukan Kewenangan Kabupaten Magelang).
- d. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Kaliloro Desa Wadas Cs Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang anggaran Rp900.000.000,00 (Gagal lelang).
- e. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sidandang I, D.I. Sidandang II, dan D.I. Sidandang III Desa Semen Cs Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang anggaran Rp 2.250.000.000,00 (Gagal Lelang).
- f. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Loning Desa Balekerto Cs Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang anggaran Rp 1.350.000.000,00 (Pemenang lelang mengundurkan diri)
- g. Pembangunan/ Pengembangan Saluran Drainase Saluran Primer Jl. Arteri Yos Sudarso Sebelah Utara Sungai Kalibaru Kota Semarang anggaran Rp 250.000.000,00 (Lokasi Pekerjaan berada di Jalan Nasional atau Bukan Kewenangan Pemerintah Kota Semarang).
- h. Rehabilitasi Saluran Drainase Saluran Primer Sungai Tanah Mas Sebelah Barat Pantai Cipta Kota Semarang anggaran Rp250.000.000,00 (Lokasi Pekerjaan berada di Jalan Nasional atau Bukan Kewenangan Pemerintah Kota Semarang).
- i. Rehabilitasi Jalan Ngaringan - Dumpil Kec. Ngaringan Kab. Grobogan anggaran Rp4.000.000.000,00 (Gagal Lelang).
- j. Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Jajar Lama Kecamatan Godong Kab. Grobogan anggaran Rp4.000.000.000,00 (Gagal Lelang)

3. Bantuan Pendidikan

Bantuan Pendidikan didukung dengan anggaran Rp20.515.000.000,00 untuk pelaksanaan 404 kegiatan dengan realisasi fisik 68,61% dan realisasi penyaluran Rp 14.008.940.405 (68,29%). Bantuan Pendidikan dialokasikan untuk 8 kabupaten/kota yaitu Cilacap, Banyumas, Kebumen, Blora, Kendal, Batang, Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan Bantuan Pendidikan disebabkan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada TA 2025, yaitu:

- a. Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) untuk Pembelajaran SD sebanyak 150 Kegiatan dengan anggaran Rp6.000.000.000,00 sudah dibiayai anggaran Pemerintah Kota Semarang;
- b. Rehab Ruang Kelas SD Negeri 3 Bandengan Kendal Rp440.000.000,00 (Kegiatan Muncul di anggaran perubahan mengakibatkan proses Pengadaan

Barang dan Jasa/tender gagal karena waktu tidak mencukupi untuk dilaksanakan).

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota antara lain:

- a. Terdapat kegiatan Bantuan Sarana Prasarana yang tidak dapat dilaksanakan karena bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, atau faktor waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi karena dialokasikan pada Perubahan APBD.
- b. Terdapat kegiatan Bantuan Pendidikan yang tidak dilaksanakan karena telah dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota, sehingga terjadi duplikasi anggaran.

2. Upaya

Upaya penyelesaian permasalahan di atas yaitu:

- a. Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana yang bukan kewenangan Kabupaten/Kota direalokasi pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah menjadi kegiatan Sarana Prasarana lain sesuai kewenangan.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih cermat dalam perencanaan dan pengusulan termasuk dalam sumber pembiayaannya agar tidak terjadi lagi duplikasi anggaran.

4.2.2 Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

A. Alokasi bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp1.992.465.949.000,00, jumlah ini lebih banyak dibanding alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.988.299.682.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran Rp1.646.095.949.000,00 untuk 11.707 titik lokasi di 4.993 desa. Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.1/108 Tahun 2025 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan untuk Tahap II dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.1/405 Tahun 2025. Bantuan keuangan tersebut hasil usulan

desa/masyarakat untuk kegiatan Infrastruktur, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya, yang difasilitasi dengan 30 menu kegiatan sebagai pilihan, harapannya dengan semakin banyaknya pilihan menu kegiatan akan membantu desa mempercepat terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera. Selain itu Bankeu Pemdes Peningkatan Saprass Perdesaan juga diberikan dalam rangka memberi penghargaan kepada desa yang memiliki prestasi antara lain Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi dan Nasional, Desa Anti Korupsi dan Desa dampingan/binaan OPD Provinsi.

2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH), dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp340.000.000.000,00 yang pada Tahap I ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.1/141 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Tahap II dengan Keputusan Gubernur Nomor: 100.3.3.1/198 Tahun 2025, Tahap III dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/366 Tahun 2025 dan Tahap IV dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.1/412 Tahun 2025 tentang Perubahan Dan/Penambahan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk Jamban Keluarga, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp6.370.000.000,00 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/393 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Jamban Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Data Alokasi Anggaran bantuan keuangan Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.13 Alokasi Anggaran Bankeu Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025

NO	KABUPATEN	PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN (DISPERMADESDUKCAPIL)		PENINGKATAN KUALITAS RTLH DI PERDESAAN (@ Rp. 20.000.000) (DISPERAKIM)		PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN KUALITAS JAMBAAN KELUARGA (@ Rp. 6.370.000) (DINKES)	
		TITIK	NOMINAL (Rp)	UNIT	NOMINAL (Rp)	UNIT	NOMINAL (Rp)
1	Banjarnegara	343	40.350.000.000	251	5.020.000.000	-	-
2	Banyumas	330	40.992.500.000	831	16.620.000.000	200	1.274.000.000
3	Batang	293	41.517.500.000	999	19.980.000.000	-	-
4	Blora	524	83.992.500.000	646	12.920.000.000	50	318.500.000
5	Boyolali	208	26.437.000.000	394	7.880.000.000	-	-
6	Brebes	509	91.762.500.000	998	19.960.000.000	-	-
7	Cilacap	208	25.390.000.000	835	16.700.000.000	200	1.274.000.000
8	Demak	268	37.457.500.000	860	17.200.000.000	-	-
9	Grobogan	586	104.000.000.000	339	6.780.000.000	-	-
10	Jepara	263	45.970.000.000	734	14.680.000.000	-	-
11	Karanganyar	794	105.907.500.000	357	7.140.000.000	-	-

NO	KABUPATEN	PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN (DISPERMADESUDKAPIL)		PENINGKATAN KUALITAS RTLH DI PERDESAAN (@ Rp. 20.000.000) (DISPERAKIM)		PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN KUALITAS JAMBAAN KELUARGA (@ Rp. 6.370.000) (DINKES)	
		TITIK	NOMINAL (Rp)	UNIT	NOMINAL (Rp)	UNIT	NOMINAL (Rp)
12	Kebumen	296	41.001.500.000	347	6.940.000.000	-	-
13	Kendal	506	80.117.500.000	535	10.700.000.000	-	-
14	Klaten	675	89.970.000.000	310	6.200.000.000	-	-
15	Kudus	125	18.437.949.000	254	5.080.000.000	-	-
16	Magelang	723	96.484.000.000	997	19.940.000.000	200	1.274.000.000
17	Pati	982	182.776.500.000	995	19.900.000.000	-	-
18	Pekalongan	121	18.697.500.000	553	11.060.000.000	200	1.274.000.000
19	Pemalang	692	101.495.000.000	459	9.180.000.000	-	-
20	Purbalingga	263	35.097.500.000	579	11.580.000.000	100	637.000.000
21	Purworejo	275	33.677.500.000	345	6.900.000.000	-	-
22	Rembang	140	17.777.500.000	727	14.540.000.000	-	-
23	Semarang	304	28.375.000.000	371	7.420.000.000	50	318.500.000
24	Sragen	635	37.972.500.000	350	7.000.000.000	-	-
25	Sukoharjo	342	39.632.500.000	473	9.460.000.000	-	-
26	Tegal	268	44.500.000.000	367	7.340.000.000	-	-
27	Temanggung	327	44.142.500.000	584	11.680.000.000	-	-
28	Wonogiri	266	32.870.000.000	781	15.620.000.000	-	-
29	Wonosobo	441	59.294.000.000	729	14.580.000.000	-	-
	JUMLAH	11.707	1.646.095.949.000	17.000	340.000.000.000	1.000	6.370.000.000

B. Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa TA. 2025 dialokasikan Rp.1.992.465.949.000,00 dengan realisasi keuangan Rp1.962.430.949.000,00 (98,49 %) dan realisasi fisik 99,05%. Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Sarpras Perdesaan disalurkan pada 11.426 titik kegiatan di 4.871 desa dari target 11.707 titik lokasi di 4.993 desa. Jumlah bantuan yang disalurkan sebesar Rp1.616.060.949.000,00. (98,18%), dan yang tidak dapat disalurkan 281 titik lokasi (1,82 %) di 269 desa yang berada di 23 kabupaten, dengan jumlah anggaran Rp.30.035.000.000,00. (1,82%).

Alasan tidak disalurkan antara lain: lokasi kegiatan tidak sesuai kondisi faktual di desa, lokasi tidak layak dibiayai karena sudah dibangun dengan dana lain, lokasi kegiatan tidak jelas karena terdapat penulisan berulang nama desa, desa tidak membutuhkan kegiatan yang ada dalam DPA, terdapat masalah internal di desa serta lokasi kegiatan bukan kewenangan desa. Dampak dari masalah tersebut karena DPPA sudah bersifat final dan masuk dalam dokumen perubahan anggaran, maka demi tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tidak bisa disalurkan.

Realisasi Bantuan Keuangan Sarpras Perdesaan sebagaimana Data Rekapitulasi pada Tabel berikut

Tabel 4.14 Realisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun Anggaran 2025

NO	KABUPATEN	JML PAGU	PAGU JML BANTUAN	DPA CAIR	CAIR JML BANTUAN	DPA TIDAK CAIR	TIDAK CAIR JML BANTUAN
1.	Banjarnegara	343	40.350.000.000	341	40.150.000.000	2	200.000.000
2.	Banyumas	330	40.992.500.000	328	40.792.500.000	2	200.000.000
3.	Batang	293	41.517.500.000	293	41.517.500.000	0	-
4.	Blora	524	83.992.500.000	493	80.892.500.000	31	3.100.000.000
5.	Boyolali	208	26.437.000.000	202	25.637.000.000	6	800.000.000
6.	Brebes	509	91.762.500.000	506	91.362.500.000	3	400.000.000
7.	Cilacap	208	25.390.000.000	207	25.290.000.000	1	100.000.000
8.	Demak	268	37.457.500.000	268	37.457.500.000	0	-
9.	Grobogan	586	104.000.000.000	585	103.800.000.000	1	200.000.000
10.	Jepara	263	45.970.000.000	260	45.470.000.000	3	500.000.000
11.	Karanganyar	794	105.907.500.000	753	101.382.500.000	41	4.525.000.000
12.	Kebumen	296	41.001.500.000	277	38.751.500.000	19	2.250.000.000
13.	Kendal	506	80.117.500.000	493	78.717.500.000	13	1.400.000.000
14.	Klaten	675	89.970.000.000	666	88.870.000.000	9	1.100.000.000
15.	Kudus	125	18.437.949.000	123	18.237.949.000	2	200.000.000
16.	Magelang	723	96.484.000.000	723	96.484.000.000	0	-
17.	Pati	982	182.776.500.000	982	182.776.500.000	0	-
18.	Pekalongan	121	18.697.500.000	121	18.697.500.000	0	-
19.	Pemalang	692	101.495.000.000	655	97.645.000.000	37	3.850.000.000
20.	Purbalingga	263	35.097.500.000	262	34.997.500.000	1	100.000.000
21.	Purworejo	275	33.677.500.000	275	33.677.500.000	0	-
22.	Rembang	140	17.777.500.000	127	16.477.500.000	13	1.300.000.000
23.	Semarang	304	28.375.000.000	292	26.985.000.000	12	1.390.000.000
24.	Sragen	635	37.972.500.000	595	35.452.500.000	40	2.520.000.000
25.	Sukoharjo	342	39.632.500.000	327	38.182.500.000	15	1.450.000.000
26.	Tegal	268	44.500.000.000	267	44.400.000.000	1	100.000.000
27.	Temanggung	327	44.142.500.000	322	43.542.500.000	5	600.000.000
28.	Wonogiri	266	32.870.000.000	243	29.220.000.000	23	3.650.000.000
29.	Wonosobo	441	59.294.000.000	440	59.194.000.000	1	100.000.000
JUMLAH		11.707	1.646.095.949.000	11.426	1.616.060.949.000	281	30.035.000.000

Realisasi bantuan berdasarkan bidang kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Infrastruktur

Dialokasikan untuk 11.534 titik kegiatan dengan anggaran Rp1.624.979.249.000,00, terealisasi Rp1.595.144.249.000,00 (98,16%) untuk membiayai 11.255 titik, dengan kegiatan antara lain pembangunan

atau rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan desa, drainase, talud/sender jalan, embung desa, jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES), pembangunan sarana penghasil energy baru terbarukan, pembangunan sarana prasarana air bersih, rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa, sarana prasarana olahraga desa, dan pembangunan sarana prasarana sanitasi lingkungan.

b. Bidang Ekonomi

Dialokasikan di 29 titik kegiatan sejumlah Rp5.082.500.000,00 terealisasi 100%, digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi pasar desa dan/atau kios desa dan kantor/gedung BUM Desa.

c. Bidang Pendidikan

Dialokasikan di 9 titik kegiatan sejumlah Rp1.177.500.000,00 terealisasi 100% digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana perpustakaan dan pembangunan sarana prasarana taman bacaan desa.

d. Bidang Kesehatan

Dialokasikan di 9 titik kegiatan sejumlah Rp1.525.000.000,00 terealisasi 100 % digunakan untuk membiayai pembangunan atau rehabilitasi Posyandu dan pembangunan atau rehabilitasi gedung Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).

e. Bidang Sosial Budaya

Dialokasikan di 126 titik dengan anggaran sejumlah Rp13.331.700.000,00, terealisasi 124 titik sebesar Rp13.131.700.000,00 (98,50%) tidak terealisasi 2 titik. Bantuan digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan sarana prasarana kesenian desa dan pembangunan gedung/ruang sanggar anak.

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan tersebut, disamping menggunakan tenaga trampil/tukang juga mempekerjakan keluarga miskin/miskin ekstrim di desa penerima bantuan. Anggaran untuk pelaksanaan upah pekerja sebesar Rp225.299.475.718,00, dan sewa alat Rp46.704.778.797,00

Swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan/ pelaksanaan kegiatan Rp48.017.623.411,00 wujud swadaya berupa material, tenaga gotong royong, makan minum maupun hibah/pemberian tanah untuk lokasi kegiatan.

Realisasi Bantuan Keuangan Saranan Prasaran Perdesaan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana table berikut:

Tabel 4.15 Realisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2025 Per Jenis Kegiatan

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
		DPA	NOMINAL BANTUAN	DPA	NOMINAL BANTUAN
1	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal	4.818	682.785.449.000	4.691	668.520.449.000
2	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender	1.794	255.854.500.000	1.784	254.729.500.000
3	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton	1.408	198.540.800.000	1.365	194.110.800.000
4	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton	1.214	140.259.125.000	1.160	135.079.125.000

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
		DPA	NOMINAL BANTUAN	DPA	NOMINAL BANTUAN
5	Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase	653	90.431.000.000	630	88.306.000.000
6	Pembangunan Penerangan Jalan Umum dengan Solar Sel	386	68.620.000.000	384	68.220.000.000
7	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Paving	257	37.900.000.000	247	36.920.000.000
8	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Makadam	232	41.525.000.000	231	41.375.000.000
9	Rehabilitasi Gedung / Kantor Desa	192	28.095.000.000	190	27.795.000.000
10	Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	169	23.033.000.000	168	22.933.000.000
11	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih	138	16.950.375.000	137	16.850.375.000
12	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud Tebing	128	18.190.000.000	126	17.950.000.000
13	Pembangunan atau Penyediaan Sarana Prasarana Kesenian Desa	99	9.002.500.000	97	8.802.500.000
14	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	61	9.980.000.000	60	9.830.000.000
15	Pembangunan Jembatan Desa	53	8.350.000.000	52	8.150.000.000
16	Pembangunan atau Rehabilitasi Gedung/Ruang Sanggar Anak	27	4.329.200.000	27	4.329.200.000
17	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Prasarana Pasar Desa dan atau Kios Desa	22	3.975.000.000	22	3.975.000.000
18	Pembangunan Bronjong Penahan Air Sungai	17	2.315.000.000	16	2.225.000.000
19	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor BUM Desa	7	1.107.500.000	7	1.107.500.000
20	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari dan Instalasinya	6	1.050.000.000	6	1.050.000.000
21	Pembangunan, Rehabilitasi atau Penyediaan Sarana Prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	5	875.000.000	5	875.000.000
22	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Prasarana Taman Bacaan	5	750.000.000	5	750.000.000
23	Pembangunan atau Rehabilitasi Embung Desa	4	600.000.000	4	600.000.000
24	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Prasarana Perpustakaan	4	427.500.000	4	427.500.000
25	Pembangunan atau Rehabilitasi Gedung/Ruang Poliklinik Kesehatan Desa	4	650.000.000	4	650.000.000
26	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Lingkungan	3	300.000.000	3	300.000.000
27	Pembangunan atau Rehabilitasi serta Pengelolaan Saluran untuk Budidaya Perikanan	1	200.000.000	1	200.000.000
	JUMLAH	11.707	1.646.095.949.000	11.426	1.616.060.949.000

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa untuk Peningkatan Kualitas RTLH dengan Anggaran Rp340.000.000.000,00 atau 17,06% dari jumlah total Bankeu Pemdes dengan realisasi fisik dan keuangan 100%, yang target sasarannya 17.000 unit RTLH milik kepala keluarga miskin di 5.279 desa di kabupaten se Jawa Tengah. Bantuan yang diberikan sebesar Rp20.000.000,00 per unit RTLH, digunakan untuk pembelian material bangunan sebesar Rp17.500.000,00 dan Rp2.500.000,00 untuk membayar tenaga tukang.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana Data pada Tabel berikut:

Tabel 4.31

Tabel 4.16 Realisasi Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2025

NO	KABUPATEN	PAGU ALOKASI	JML DESA PENERIMA BANTUAN	REALISASI PENYALURAN	
			JML UNIT RTLH	Nominal (Rp)	JML UNIT RTLH
1	Banjarnegara	5.020.000.000	251	5.020.000.000	251
2	Banyumas	16.620.000.000	831	16.620.000.000	831
3	Batang	19.980.000.000	999	19.980.000.000	999
4	Blora	12.920.000.000	646	12.920.000.000	646
5	Boyolali	7.880.000.000	394	7.880.000.000	394
6	Brebes	19.960.000.000	998	19.960.000.000	998
7	Cilacap	16.700.000.000	835	16.700.000.000	835
8	Demak	17.200.000.000	860	17.200.000.000	860
9	Grobogan	6.780.000.000	339	6.780.000.000	339
10	Jepara	14.680.000.000	734	14.680.000.000	734
11	Karanganyar	7.140.000.000	357	7.140.000.000	357
12	Kebumen	6.940.000.000	347	6.940.000.000	347
13	Kendal	10.700.000.000	535	10.700.000.000	535
14	Klaten	6.200.000.000	310	6.200.000.000	310
15	Kudus	5.080.000.000	254	5.080.000.000	254
16	Magelang	19.940.000.000	997	19.940.000.000	997
17	Pati	19.900.000.000	995	19.900.000.000	995
18	Pekalongan	11.060.000.000	553	11.060.000.000	553
19	Pemalang	9.180.000.000	459	9.180.000.000	459
20	Purbalingga	11.580.000.000	579	11.580.000.000	579
21	Purworejo	6.900.000.000	345	6.900.000.000	345
22	Rembang	14.540.000.000	727	14.540.000.000	727
23	Semarang	7.420.000.000	371	7.420.000.000	371
24	Sragen	7.000.000.000	350	7.000.000.000	350
25	Sukoharjo	9.460.000.000	473	9.460.000.000	473
26	Tegal	7.340.000.000	367	7.340.000.000	367
27	Temanggung	11.680.000.000	584	11.680.000.000	584
28	Wonogiri	15.620.000.000	781	15.620.000.000	781
29	Wonosobo	14.580.000.000	729	14.580.000.000	729
JUMLAH		340.000.000.000	17.000	340.000.000.000	17.000

3. Dinas Kesehatan

Alokasi Bankeu Pemdes untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk Jamban Keluarga pada Tahun 2025 Rp6.370.000.000,00 untuk 51 desa di 7 kabupaten yaitu: Semarang, Blora, Pekalongan, Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Magelang, dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Penggunaan bantuan pembangunan /rehabilitasi jamban bagi keluarga miskin ekstrim yang telah terdata di SIKSDJ Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1000 unit. Besaran bantuan Rp6.370.000,00 per titik lokasi untuk pembelian material dan

biaya tukang. Bantuan tersebut mengalami dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.700.000 per unit.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana Data pada Tabel berikut:

Tabel 4.17 Realisasi Bantuan Keuangan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Jamban Keluarga

NO	KABUPATEN	PAGU ALOKASI	JML DESA PENERIMA BANTUAN	REALISASI PENYALURAN	
			JML UNIT JAMBAN	Rp.	JML UNIT JAMBAN
1	Banyumas	1.274.000.000	200	1.274.000.000	200
2	Blora	318.500.000	50	318.500.000	50
3	Cilacap	1.274.000.000	200	1.274.000.000	200
4	Magelang	1.274.000.000	200	1.274.000.000	200
5	Pekalongan	1.274.000.000	200	1.274.000.000	200
6	Purbalingga	637.000.000	100	637.000.000	100
7	Semarang	318.500.000	50	318.500.000	50
TOTAL		6.370.000.000	1000	6.370.000.000	1000

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Desa

1. Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa antara lain:

- Ketidaksesuaian antara titik lokasi usulan dalam dokumen pelaksanaan bantuan dengan titik lokasi di lapangan.
- Syarat dokumen pencairan bantuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 34 tahun 2023 Jo. Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa, sehingga memperlambat penyaluran bantuan kepada desa.
- Keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban oleh desa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemberi bantuan.

2. Upaya

Upaya penyelesaian permasalahan di atas yaitu:

- Melakukan pencermatan nomenklatur Draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang terbit dan mengkoordinasikan kepada OPD pengampu di tingkat kabupaten untuk verifikasi nomenklatur bantuan agar bantuan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa.
- Mensosialisasikan dan melakukan pendampingan penyusunan persyaratan pencairan bantuan sesuai dengan aplikasi pengelola bantuan.
- Optimalisasi fitur pelaporan pertanggungjawaban secara online dan membuat pemberitahuan kepada Kabupaten dan Desa untuk pelaporan pertanggungjawaban serta monitoring lapangan oleh OPD pengampu untuk penagihan laporan pertanggungjawabawaban

4.3 PELAKSANAAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI JAWA TENGAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menjabarkan bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengawasan dan pembinaan Kabupaten/Kota, Presiden dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota melimpahkan kewenangan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur mempunyai peran untuk bertindak atas nama pemerintah pusat agar Kabupaten/Kota melaksanakan otonominya dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2025 sebagai berikut:

A. Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota

Fasilitas kepala daerah (Bupati/Walikota) oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) adalah serangkaian kegiatan pembinaan, pengawasan, dan dukungan yang dilakukan oleh Gubernur untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan. Fasilitas yang dilaksanakan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Jawa Tengah secara langsung kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelantikan Kepala Daerah diselenggarakan secara serentak seluruh Indonesia di Monumen nasional, maka fasilitas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Jawa Tengah dilaksanakan dengan mengundang Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk memberikan penjelasan administrasi dan teknis yang dipersiapkan oleh Kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam pelaksanaan pelantikan Bupati/Walikota sesuai peraturan perundangan.
2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di Jawa Tengah memproses usulan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri atas laporan dari DPRD kab/kota. Pada tahun 2025 fasilitas memproses usulan dari 21 wilayah yang terdiri dari 17 kabupaten yaitu Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, dan Pekalongan; dan 4 kota yaitu Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Magelang, dan Kota Semarang.
3. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Jawa Tengah mengusulkan pengesahan pengangkatan 2 Penjabat Bupati pada Januari 2025, yaitu:
 - a. Penjabat Gubernur Jawa Tengah telah melantik Sdr. Herda Helmijaya, S.E (Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pada Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai Penjabat Bupati Kudus pada tanggal 13 Januari 2025, sekaligus serah terima jabatan.
 - b. Sdr. AMIR MAKHMUD, S.E., M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal) dilantik sebagai Penjabat Bupati Tegal pada tanggal 21 Januari 2025, sekaligus serah terima jabatan.

4. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Jawa Tengah memfasilitasi rekomendasi pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri dan pemberhentian anggota DPRD kab/kota atas usul pimpinan DPRD kab/kota: sebagai berikut:
 - a. 1 pemberhentian Anggota DPRD Provinsi karena meninggal dunia (Fraksi Gerindra);
 - b. 1 pemberhentian Anggota DPRD Provinsi karena mengundurkan diri (Fraksi Gerindra);
 - c. 1 pemberhentian pimpinan DPRD Kab/Kota karena mengundurkan diri yaitu Kab Banjarnegara ;
 - d. 6 pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota karena mengundurkan diri yaitu Kab Boyolali, Temanggung, Blora (2 usulan) , Batang, Banjarnegara;
 - e. 8 pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota karena meninggal dunia (Kota Surakarta, Kab : Pati, Demak, Blora, Kudus, Brebes, Purworejo)
 - f. 1 pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota karena diberhentikan partai (Kota Surakarta)
5. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Jawa Tengah memfasilitasi penyampaian nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kab/kota yaitu:
 - a. 2 nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi (Fraksi Gerindra);
 - b. 1 nama calon pengganti antarwaktu pimpinan DPRD Kab/Kota (Kab Banjarnegara)
 - c. 14 nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kab/Kota (Kab : Boyolali, Temanggung, Blora (3 usulan), Pati, Demak, Kudus, Brebes, Batang, Purworejo, Banjarnegara) Kota : Surakarta (2 usulan)
6. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Jawa Tengah memfasilitasi Penyiapan rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota untuk 1 usulan penggantian peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD kabupaten Banjarnegara.

B. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2025, fasilitasi evaluasi Raperda RTRW dilakukan pada Raperda RTRW Kabupaten Banyumas. Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Penataan Ruang sebagai tindaklanjut surat permohonan Bupati Banyumas tanggal 15 Oktober 2025. Evaluasi raperda dilakukan untuk memastikan tata ruang kabupaten selaras dengan RTRW Provinsi Jawa tengah, RTRW Nasional, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan meminimalisir konflik pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah

berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Berkaitan dengan RTRW Kabupaten Banyumas, menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas dan ditindaklanjuti dengan penetapan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045.

2. Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) memiliki wewenang mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota. Evaluasi ini bertujuan memastikan keselarasan antara pembangunan daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi, serta memastikan aspek teknis dan substansi RPJMD sesuai regulasi sebelum ditetapkan. Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota sebagai bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan mulai Maret sampai dengan Agustus 2025 yaitu tahapan evaluasi Konsultasi Rancangan Awal dan evaluasi Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029 dari masing – masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat 15 hari kerja sejak diterimanya secara lengkap rancangan Perda berserta dokumen pendukung.

Hasil evaluasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Sistematisasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (hasil pencermatan Bab I – Bab V);
- b. Keselarasan kebijakan rancangan perda RPJMD terhadap rencana tata ruang wilayah, serta kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Substansi rancangan Perda RPJMD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- d. Keselarasan RPJMD terhadap laporan KLHS, Hasil reviu APIP, SPM, dan dokumen lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah. Rincian tahapan pelaksanaan evaluasi dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.18 Rincian Pelaksanaan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Melalui Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

No.	Kab/Kota	Tahap Pelaksanaan		Hasil Evaluasi	
		Kons. Ranc. Awal	Evaluasi Ranc. Akhir	Keputusan Gubernur	Penetapan Perda RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Sukoharjo	07 Mei 2025	10 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/217 Tahun 2025, Tgl. 18 Juli 2025	Nomor 4 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
2	Karanganyar	29 April 2025	10 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/216 Tahun 2025, Tgl. 18 Juli 2025	Nomor 5 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
3	Wonogiri	17 April 2025	14 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/241 Tahun 2025, Tgl. 25 Juli 2025	Nomor 2 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
4	Pekalongan	30 April 2025	14 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/240 Tahun 2025, Tgl. 25 Juli 2025	Nomor 4 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
5	Jepara	16 April 2025	15 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/250 Tahun 2025, Tgl. 31 Juli 2025	Nomor 3 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
6	Kudus	07 Mei 2025	15 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/2510 Tahun 2025, Tgl. 31 Juli 2025	Nomor 11 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
7	Kota Surakarta	07 Mei 2025	22 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/265 Tahun 2025, Tgl. 4 Agus 2025	Nomor 9 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
8	Blora	14 April 2025	22 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/264 Tahun 2025, Tgl. 4 Agus 2025	Nomor 3 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
9	Kota Semarang	11 April 2025	22 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/263 Tahun 2025, Tgl. 4 Agus 2025	Nomor 8 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
10	Kota Tegal	17 April 2025	23 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/260 Tahun 2025, Tgl. 4 Agus 2025	Nomor 1 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
11	Pemalang	30 April 2025	23 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/292 Tahun 2025, Tgl. 8 Agus 2025	Nomor 2 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
12	Purworejo	16 April 2025	23 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/266 Tahun 2025, Tgl. 4 Agus 2025	Nomor 6 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
13	Temanggung	16 April 2025	24 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/259 Tahun 2025, Tgl. 4 Agus 2025	Nomor 5 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
14	Kendal	06 Mei 2025	24 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/295 Tahun 2025, Tgl. 8 Agus 2025	Nomor 2 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
15	Kota Pekalongan	11 April 2025	24 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/293 Tahun 2025, Tgl. 8 Agus 2025	Nomor 5 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
16	Grobogan	06 Mei 2025	28 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/311 Tahun 2025, Tgl. 13 Agus 2025	Nomor 5 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
17	Sragen	02 Mei 2025	28 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/300 Tahun 2025, Tgl. 11 Agus 2025	Nomor 4 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
18	Semarang	15 April 2025	28 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/294 Tahun 2025, Tgl. 8 Agus 2025	Nomor 6 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
19	Brebes	17 April 2025	30 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/303 Tahun 2025, Tgl. 11 Agus 2025	Nomor 4 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
20	Banjarnegara	08 Mei 2025	30 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/302 Tahun 2025, Tgl. 11 Agus 2025	Nomor 2 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
21	Batang	30 April 2025	30 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/291 Tahun 2025, Tgl. 8 Agus 2025	Nomor 8 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025

No.	Kab/Kota	Tahap Pelaksanaan		Hasil Evaluasi	
		Kons. Ranc. Awal	Evaluasi Ranc. Akhir	Keputusan Gubernur	Penetapan Perda RPJMD
1	2	3	4	5	6
22	Banyumas	15 April 2025	31 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/312 Tahun 2025, Tgl. 13 Agus 2025	Nomor 3 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
23	Cilacap	14 April 2025	05 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/321 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 1 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
24	Demak	23 Mei 2025	31 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/301 Tahun 2025, Tgl. 11 Agus 2025	Nomor 5 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
25	Magelang	15 April 2025	31 Juli 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/314 Tahun 2025, Tgl. 13 Agus 2025	Nomor 8 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
26	Purbalingga	06 Mei 2025	01 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/319 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 4 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
27	Wonosobo	29 April 2025	05 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/320 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 11 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
28	Kebumen	08 Mei 2025	05 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/313 Tahun 2025, Tgl. 13 Agus 2025	Nomor 7 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
29	Klaten	22 Mei 2025	6 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/324 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 3 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
30	Pati	14 April 2025	6 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/322 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 3 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
31	Boyolali	15 April 2025	6 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/323 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 5 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
32	Tegal	11 April 2025	7 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/326 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 5 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
33	Kota Salatiga	29 April 2025	7 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/327 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 7 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
34	Kota Magelang	15 April 2025	7 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/325 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 2 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025
35	Kab. Rembang	26 Juni 2025	8 Agustus 2025	SK Gub No. 100.3.3.1/328 Tahun 2025, Tgl. 15 Agus 2025	Nomor 7 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025

C. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota 2024, Raperda Perubahan APBD 2025 dan Raperda APBD 2026

Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan APBD, dilaksanakan oleh Gubernur melalui Tim Evaluasi APBD Kabupaten/kota yang terdiri dari BPKAD, Bappeda, Bapenda, Biro Hukum dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan pada 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

1. 35 dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024. Tahapan Evaluasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 4.19 Evaluasi Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO	Kab/Kota	Srt Bupati/Walikota		Diterima Gubernur	Pengesahan Gubernur	
		Tanggal	Nomor		Tanggal	Nomor
1	2	3	4	5	6	7
1	Wonogiri	16 Juni 2025	S/3001/900.1.15.5/VI/2025	18 Juni 2025	08 Juli 2025	100.3.3.1/195 TH 2025
2	Kendal	18 Juni 2025	900/1374/2025	19 Juni 2025	08 Juli 2025	100.3.3.1/196 TH 2025
3	Temanggung	24 Juni 2025	B/595/903/22/VI/2025	25 Juni 2025	18 Juli 2025	100.3.3.1/208 TH 2025
4	Purworejo	24 Juni 2025	900/1.15/6238/2025	25 Juni 2025	18 Juli 2025	100.3.3.1/212 TH 2025
5	Boyolali	30 Juni 2025	900/01413/5.2/2025	30 Juni 2025	18 Juli 2025	100.3.3.1/212 TH 2025
6	Kota Pekalongan	30 Juni 2025	2613/900.1.15/2025	30 Juni 2025	18 Juli 2025	100.3.3.1/207 TH 2025
7	Kab.Semarang	01 Juli 2025	900/4931	01 Juli 2025	15 Juli 2025	100.3.3.1/203 TH 2025
8	Kota Semarang	04 Juli 2025	B/1251/100.3.2/VII/2025	04 Juli 2025	18 Juli 2025	100.3.3.1/211 TH 2025
9	Kab. Pekalongan	02 Juli 2025	900.1.15/01803	03 Juli 2025	18 Juli 2025	100.3.3.1/210 TH 2025
10	Demak	30 Juni 2025	920/512	04 Juli 2025	23 Juli 2025	100.3.3.1/218 TH 2025
11	Jepara	03 Juli 2025	900/1938	07 Juli 2025	25 Juli 2025	100.3.3.1/233 TH 2025
12	Blora	07 Juli 2025	900/0870/2025	07 Juli 2025	24 Juli 2025	100.3.3.1/228 TH 2025
13	Batang	30 Juni 2025	P/1419/900.1.15.1/VI/2025	08 Juli 2025	25 Juli 2025	100.3.3.1/234 TH 2025
14	Kebumen	07 Juli 2025	900.1.15.5/01138	08 Juli 2025	25 Juli 2025	100.3.3.1/229 TH 2025
15	Kota Magelang	07 Juli 2025	900.1.1.1/448/440	08 Juli 2025	25 Juli 2025	100.3.3.1/231 TH 2025
16	Wonosobo	07 Juli 2025	900.1.15.1/156/BPPKAD	08 Juli 2025	25 Juli 2025	100.3.3.1/237 TH 2025
17	Banjarnegara	10 Juli 2025	900/54/BUPATI/2025	10 Juli 2025	24 Juli 2025	100.3.3.1/227 TH 2025
18	Kab.Tegal	10 Juli 2025	900/25/922	10 Juli 2025	25 Juli 2025	100.3.3.1/235 TH 2025
19	Grobogan	11 Juli 2025	B/900.1.15/82/2025	11 Juli 2025	25 Juli 2025	100.3.3.1/232 TH 2025
20	Rembang	15 Juli 2025	900.1.1/2805/2025	16 Juli 2025	04 Agustus 2025	100.3.3.1/269 TH 2025
21	Kota Surakarta	11 Juli 2025	B/HK/2116/2025	16 Juli 2025	31 Juli 2025	100.3.3.1/252 TH 2025
22	Kota Salatiga	15 Juli 2025	900/0809	16 Juli 2025	07 Agustus 2025	100.3.3.1/279 TH 2025

NO	Kab/Kota	Srt Bupati/Walikota		Diterima Gubernur	Pengesahan Gubernur	
		Tanggal	Nomor		Tanggal	Nomor
23	Kab. Klaten	11 Juni 2025	B/900/1/249/2025/30/M	16 Juli 2025	07 Agustus 2025	100.3.3.1/281 TH 2025
24	Purbalingga	11 Juli 2025	900/12255	16 Juli 2025	31 Juli 2025	100.3.3.1/246 TH 2025
25	Kab Pati	16 Juli 2025	900/399	16 Juli 2025	28 Juli 2025	100.3.3.1/244 TH 2025
26	Pemalang	15 juli 2025	900/1461/BPKAD/2025	17 juli 2025	25 Juli 2025	100.3.3.1/236 TH 2025
27	Banyumas	15 Juli 2025	000.3.2/3017/VII/2025	17 Juli 2025	31 Juli 2025	100.3.3.1/249 TH 2025
28	Brebes	15 Juli 2025	900.1/0704/VII/2025	16 Juli 2025	31 Juli 2025	100.3.3.1/248 TH 2025
29	Kab Sukoharjo	11 juli 2025	900/2321/VII/2025	18 Juli 2025	25 Juli 2025	100.3.3.1/238 TH 2025
30	Kab Sragen	16 Juli 2025	900.1.15.4/726/25/2025	22 Juli 2025	12 Agustus 2025	100.3.3.1/304 TH 2025
31	Kab Magelang	22 Juli 2025	180/788/01.02/2025	23 Juli 2025	13 Agustus 2025	100.3.3.1/308 TH 2025
32	Kab Kudus	21 Juli 2025	900.1.15/1811/2025	23 Juli 2025	07 Agustus 2025	100.3.3.1/280 TH 2025
33	Kab Karanganyar	22 Juli 2025	900/2.442.21	24 Juli 2025	04 Agustus 2025	100.3.3.1/268 TH 2025
34	Kota Tegal	25 Juli 2025	900.1.15.1/001	25 Juli 2025	13 Agustus 2025	100.3.3.1/310 TH 2025
35	Cilacap	29 Juli 2025	900.1.15/5366/36	30 Juli 2025	12 Agustus 2025	100.3.3.1/305 TH 2025

2. 35 dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Tahapan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.20 Evaluasi Dokumen Perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO	Kab/Kota	Srt Bupati/Walikota		Diterima Gubernur	Pengesahan Gubernur	
		Tanggal	Nomor		Tanggal	Nomor
1	2	3	4	5	6	7
1	Wonogiri	7 Juli 2025	900/0873/2025	7 Juli 2025	23 Juli 2025	100.3.3.1/219 TH 2025
2	Kendal	7 Juli 2025	100.3.2/6799/2025	8 Juli 2025	31 Juli 2025	100.3.3.1/247 TH 2025
3	Temanggung	8 Juli 2025	900.1.1.4/5139	9 Juli 2025	31 Juli 2025	100.3.3.1/254 TH 2025
4	Purworejo	10 Juli 2025	903/2002	10 Juli 2025	31 Juli 2025	100.3.3.1/253 TH 2025

NO	Kab/Kota	Srt Bupati/Walikota		Diterima Gubernur	Pengesahan Gubernur	
		Tanggal	Nomor		Tanggal	Nomor
5	Boyolali	09 Juli 2025	900.1.1/2279/2025	11 Juli 2025	01 Agust 2025	100.3.3.1/257 TH 2025
6	Kota Pekalongan	15 Juli 2025	B/900/1.4/245/2025/30/M	16 Juli 2025	08 Agust 2025	100.3.3.1/299 TH 2025
7	Kab.Semarang	15 Juli 2025	900.1.1.4/0705/VII/2025	16 Juli 2025	04 Agust 2025	100.3.3.1/262 TH 2025
8	Kota Semarang	17 Juli 2025	B/91/900.1.1.4/2025	17 Juli 2025	04 Agust 2025	100.3.3.1/261 TH 2025
9	Kab. Pekalongan	17 Juli 2025	B/3608/900.11/VII/2025	18 Juli 2025	04 Agust 2025	100.3.3.1/267 TH 2025
10	Demak	18 Juli 2025	900.1.1.1/0718/BPPKAD	21 Juli 2025	07 Agust 2025	100.3.3.1/278 TH 2025
11	Jepara	19 Juli 2025	T/27	21 Juli 2025	24 Juli 2025	100.3.3.1/230 TH 2025
12	Blora	15 juli 2025	B/1592/900.1.12.1/VII/2025	18 juli 2025	05 Agust 2025	100.3.3.1/271 TH 2025
13	Batang	21 Juli 2025	900.1.1.4/1810/2025	22 Juli 2025	08 Agust 2025	100.3.3.1/297 TH 2025
14	Kebumen	23 Juli 2025	B/1381/900.1.15.1/VII/2025	24 Juli 2025	01 Agust 2025	100.3.3.1/258 TH 2025
15	Kota Magelang	29 Juli 2025	900.1/509/440	29 Juli 2025	13 Agust 2025	100.3.3.1/307 TH 2025
16	Wonosobo	25 juli 2025	900/280/23/2025	30 Juli 2025	15 Agust 2025	100.3.3.1/330 TH 2025
17	Banjarnegara	29 Juli 2025	B/900.1.1/91/2025	30 Juli 2025	15 Agust 2025	100.3.3.1/331 TH 2025
18	Kab.Tegal	28 juli 2025	900.1/724-1/25	30 Juli 2025	13 Agust 2025	100.3.3.1/309 TH 2025
19	Grobogan	29 Juli 2025	900/13452	29 Juli 2025	08 Agust 2025	100.3.3.1/298 TH 2025
20	Rembang	30 Juli 2025	900.1.1/510/Setda/2025	31 Juli 2025	14 Agust 2025	100.3.3.1/316 TH 2025
21	Kota Surakarta	30 Juli 2025	B/KU.00.00/2326/2025	31 Juli 2025	14 Agust 2025	100.3.3.1/317 TH 2025
22	Kota Salatiga	12 agts 2025	T/900.1.11/16/BPKAD/2025	13 agts 2025	29 Agust 2025	100.3.3.1/350 TH 2025
23	Kab. Klaten	11 agts 2025	900.1.1.4/2685	13 agts 2025	29 Agust 2025	100.3.3.1/352 TH 2025
24	Purbalingga	13 agts 2025	900.1.1.4/846/25/2025	14 agts 2025	3 Sept 2025	100.3.3.1/357 TH 2025
25	Kab Pati	11 Agts 2025	P/65/900.1.1/VIII/2025	11 Agts 2025	25 Agust 2025	100.3.3.1/343 TH 2025
26	Pemalang	8 Agts 2025	900.1.1.4/02588	13 Agts 2025	29 Agust 2025	100.3.3.1/351 TH 2025
27	Banyumas	26 Agts 2025	900/2855/VIII/2025	26 Agut 2025	4 Sept 2025	100.3.3.1/362 TH 2025
28	Brebes	27 Agts 2025	T/977/903/022/VIII/2025	27 Agt 2025	22 Sept 2025	100.3.3.1/374 TH 2025

NO	Kab/Kota	Srt Bupati/Walikota		Diterima Gubernur	Pengesahan Gubernur	
		Tanggal	Nomor		Tanggal	Nomor
29	Kab Sukoharjo	27 Agts 2025	900/186/BPKAD	28 Agut 2025	23 Sept 2025	100.3.3.1/377 TH 2025
30	Kab Sragen	29 Agts 2025	900/725/2025	1 Sept 2025	12 Sept 2025	100.3.3.1/367 TH 2025
31	Kab Magelang	01 Sept 2025	900.1.1.1/3209/2025	2 Sept 2025	15 Sept 2025	100.3.3.1/368 TH 2025
32	Kab Kudus	3 Sept 2025	900/6824/5.2/2025	3 Sept 2025	22 Sept 2025	100.3.3.1/375 TH 2025
33	Kab Karanganyar	04 Sept 2025	100.3.2/004	08 Sept 2025	23 Sept 2025	100.3.3.1/378 TH 2025
34	Kota Tegal	04 Sept 2025	900/3.022.21/IX/2025	08 Sept 2025	17 Sept 2025	100.3.3.1/373 TH 2025
35	Cilacap	30 Sept 2025	900/7660/36	1 Okt 2025	17 Okt 2025	100.3.3.1/400 TH 2025

3. 35 dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026. Tahapan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.21 Evaluasi Dokumen APBD Tahun 2026 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO	Kab/Kota	Srt Bupati/Walikota		Diterima Gubernur	Pengesahan Gubernur	
		Tanggal	Nomor		Tanggal	Nomor
1	2	3	4	5	6	7
1	Wonogiri	21 okt 2025	900/3636/X/2025	22 okt 2025	10 Nov 2025	100.3.3.1/419 TH 2025
2	Kendal	3 Nov 2025	B/5672/900.1.1/XI/2025	4 Nov 2025	20 Nov 2025	100.3.3.1/427 TH 2025
3	Temanggung	20 nov 2025	900.1../1201/2025/30/M	20 Nov 2025	15 Des 2025	100.3.3.1/465 TH 2025
4	Purworejo	24 Nov 2025	900.1.1/4381	26 Nov 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/488 TH 2025
5	Boyolali	25 Nov 2025	B/900.1.1/149/2025	25 Nov 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/487 TH 2025
6	Kota Pekalongan	24 Nov 2025	900.1.1/4330/2025	25 Nov 2025	15 Des 2025	100.3.3.1/464 TH 2025
7	Kab.Semarang	25 Nov 2025	T/1236/903/022/XI/2025	25 Nov 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/481 TH 2025
8	Kota Semarang	19 Nov 2025	900/1950-1/3-25	20 Nov 2025	15 Des 2025	100.3.3.1/459 TH 2025
9	Kab. Pekalongan	21 Nov 2025	900.1.1.1/1094/BPPKAD	26 Nov 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/484 TH 2025
10	Demak	25 Nov 2025	T/900.1.1/35/BPKAD/2025	27 Nov 2025	15 Des 2025	100.3.3.1/460 TH 2025

NO	Kab/Kota	Srt Bupati/Walikota		Diterima Gubernur	Pengesahan Gubernur	
		Tanggal	Nomor		Tanggal	Nomor
11	Jepara	25 Nov 2025	900.1.1.3/169/XI/2025	27 Nov 2025	15 Des 2025	100.3.3.1/463 TH 2025
12	Blora	27 Nov 2025	900/823/440	27 Nov 2025	23 Des 2025	100.3.3.1/499 TH 2025
13	Batang	28 Nov 2025	T/815/900.1.1/2025	28 Nov 2025	17 Des 2025	100.3.3.1/468 TH 2025
14	Kebumen	1 Des 2025	900.1.1/1654/25/2025	1 Des 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/480 TH 2025
15	Kota Magelang	1 Des 2025	900.1.1.3/9343	1 Des 2025	23 Des 2025	100.3.3.1/492 TH 2025
16	Wonosobo	27 Nov 2025	900/041/2025	28 Nov 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/478 TH 2025
17	Banjarnegara	28 Nov 2025	900.1.1/3475/2025	28 Nov 2025	17 Des 2025	100.3.3.1/467 TH 2025
18	Kab. Tegal	1 Des 2025	900/1885/23/2025	1 Des 2025	23 Des 2025	100.3.3.1/500 TH 2025
19	Grobogan	29 Nov 2025	900/10528/36	1 Des 2025	15 Des 2025	100.3.3.1/461 TH 2025
20	Rembang	1 Des 2025	903/7	2 Des 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/489 TH 2025
21	Kota Surakarta	1 Des 2025	000/4.238.21/XI/2025	2 Des 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/490TH 2025
22	Kota Salatiga	2 Des 2025	B/100.3.2/3904	2 Des 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/483TH 2025
23	Kab. Klaten	1 Des 2025	B/2367/900.1/XII/2025	2 Des 2025	15 Des 2025	100.3.3.1/458TH 2025
24	Purbalingga	2 Des 2025	P/93/900.1.1/XII/2025	2 Des 2025	15 Des 2025	100.3.3.1/462 TH 2025
25	Kab Pati	28 Nov 2025	T/3147/900.1.12.1/XI/2025	2 Des 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/485TH 2025
26	Pemalang	2 Des 2025	900/505/BPKAD	2 Des 2025	23 Des 2025	100.3.3.1/502TH 2025
27	Banyumas	2 Des 2025	900/05706/5.2/2025	3 Des 2025	23 Des 2025	100.3.3.1/496TH 2025
28	Brebes	1 Des 2025	900.1.1/014	3 Des 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/482TH 2025
29	Kab Sukoharjo	2 Des 2025	B/166/900.1.1/2025	2 Des 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/486TH 2025
30	Kab Sragen	3 Des 2025	900.1.1.3/03603	3 Des 2025	23 Des 2025	100.3.3.1/497 TH 2025
31	Kab Magelang	28 Nov 2025	100.3.2/13.398/2025	1 Des 2025	23 Des 2025	100.3.3.1/501TH 2025
32	Kab Kudus	3 Des 2025	900/22850	3 Des 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/477TH 2025
33	Kab Karanganyar	2 Des 2025	900.1.1/775/Setda/2025	3 Des 2025	22 Des 2025	100.3.3.1/479 TH 2025
34	Kota Tegal	2 Des 2025	900/1505/2025	3 Des 2025	23 Des 2025	100.3.3.1/498TH 2025

NO	Kab/Kota	Srt Bupati/Walikota		Diterima Gubernur	Pengesahan Gubernur	
		Tanggal	Nomor		Tanggal	Nomor
35	Cilacap	21 okt 2025	900/3636/X/2025	22 okt 2025	10 Nov 2025	100.3.3.1/419 TH 2025

D. Fasilitas Pelaksanaan Pengendalian Atas Defisit APBD Kabupaten/Kota Dengan Berdasarkan Batas Maksimal Defisit APBD Dan Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Pinjaman Daerah

Pengendalian defisit APBD dan pinjaman daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahunan, dengan melaporkan rencana defisit dan posisi pinjaman ke Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu/Kemendagri. Pemerintah Daerah wajib mematuhi batas maksimal defisit dan kumulatif pinjaman yang ditetapkan. Batas maksimal defisit APBD dibedakan berdasarkan kapasitas fiskal daerah (sangat rendah hingga sangat tinggi) untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki peran krusial dalam menjaga fiskal daerah melalui fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten/kota. Peta kapasitas fiskal daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 4.22 Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
1	Provinsi Jawa Tengah	1,708	Sedang
2	Kab. Banjarnegara	0,987	Rendah
3	Kab. Banyumas	0,959	Rendah
4	Kab. Batang	0,962	Rendah
5	Kab. Blora	1,003	Rendah
6	Kab. Boyolali	1,226	Sedang
7	Kab. Brebes	1,149	Sedang
8	Kab. Cilacap	1,049	Rendah
9	Kab. Demak	1,179	Sedang
10	Kab. Grogobogan	0,998	Rendah
11	Kab. Jepara	1,012	Rendah
12	Kab. Karanganyar	1,016	Rendah
13	Kab. Kebumen	0,928	Rendah
14	Kab. Kendal	0,924	Rendah
15	Kab. Klaten	1,057	Rendah
16	Kab. Kudus	1,231	Sedang
17	Kab. Magelang	0,993	Rendah
18	Kab. Pati	1,020	Rendah
19	Kab. Pekalongan	0,891	Sangat Rendah

No	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
20	Kab. Pemalang	0,746	Sangat Rendah
21	Kab. Purbalingga	0,792	Sangat Rendah
22	Kab. Purworejo	1,011	Rendah
23	Kab. Rembang	0,860	Sangat Rendah
24	Kab. Semarang	1,093	Rendah
25	Kab. Sragen	0,819	Sangat Rendah
26	Kab. Sukoharjo	1,067	Rendah
27	Kab. Tegal	1,200	Sedang
28	Kab. Temanggung	0,968	Rendah
29	Kab. Wonogiri	0,597	Sangat Rendah
30	Kab. Wonosobo	1,211	Sedang
31	Kota Magelang	1,662	Sangat Tinggi
32	Kota Pekalongan	1,366	Sedang
33	Kota Salatiga	1,586	Tinggi
34	Kota Semarang	2,341	Sangat Tinggi
35	Kota Surakarta	1,866	Sangat Tinggi
36	Kota Tegal	1,079	Rendah

Dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025, Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) dari proyeksi PDB tahun anggaran 2025. Defisit APBD sebagaimana dimaksud merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah. Sementara proyeksi PDB sebagaimana dimaksud merupakan proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025. Batas maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, ditetapkan sebagai berikut (Pasal 3 PMK 75 Tahun 2024):

1. sebesar 3,75% dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi;
2. sebesar 3,65% dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori tinggi;
3. sebesar 3,55% dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sedang;
4. sebesar 3,45% dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori rendah; dan
5. sebesar 3,35% dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat rendah.

E. Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Fasilitas Daerah Kabupaten/Kota

Mencermati berbagai dinamika dan regulasi terkait pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, khususnya peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah, permasalahan pada umumnya adalah terkait koordinasi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota. Permasalahan yang terjadi mulai dari proses perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2025 Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi atas keberatan salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus terhadap Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025. Langkah fasilitasi yang dilaksanakan yaitu:

1. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah tgl 21 Juli 2025 perihal Keberatan terhadap Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025;
2. BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat kepada Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/1090/2025 tanggal 31 Juli 2025 untuk dilakukan rapat internal atas surat keberatan tersebut.
3. Berdasarkan hasil rapat tanggal 31 Juli 2025 tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat kepada Bupati Kudus dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 005/1106 tanggal 31 Juli 2025 Hal Undangan Rapat Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus TA 2025 pada tanggal 5 Agustus 2025.
4. Melakukan rapat fasilitasi terkait surat keberatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus sekaligus evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus TA 2025 di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.
5. Hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sehingga proses evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus TA 2025 dapat dilaksanakan hingga penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025.

F. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap penyusunan regulasi daerah kabupaten/kota bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan kebijakan daerah sejalan dengan

kepentingan nasional. Hal ini juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah dampak negatif dari implementasi peraturan di kabupaten/kota.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan selama ini, dilakukan dalam bentuk:

1. Evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota,
2. Fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota,
3. Pemberian nomor register (noreg) terhadap Raperda Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan,
4. Pelaporan Perda kabupaten/kota yang telah ditetapkan dan diundangkan kepada biro hukum.

Pada tahun 2025 jumlah evaluasi terhadap produk hukum daerah sebanyak 2 evaluasi; fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 174 fasilitasi, rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota sebanyak 356 fasilitasi dan Rancangan peraturan DPRD sebanyak 12 fasilitasi. Pemberian nomor register sebanyak 367 nomor register. Pemerintah Kabupaten/ Kota selama ini secara rutin dan berkala telah melaporkan dan menyampaikan perda kabupaten/kota yang telah ditetapkan dan diundangkan kepada Biro Hukum.

G. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Kabupaten/Kota

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kerja sama daerah yang dilaksanakan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan risiko hukum dan fiskal, mendukung prioritas pembangunan nasional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Secara umum, pelaksanaan kerja sama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif dari sisi kuantitas, namun perlu penguatan dari sisi kualitas, pemerataan, dan dampak terhadap pelayanan publik.

Pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan kerja sama daerah yang menunjukkan meningkatnya kesadaran dan aktivasi kerja sama daerah. Namun demikian, peningkatan kuantitas perlu diimbangi dengan evaluasi kualitas dan efektivitas pelaksanaan kerja sama. Hasil pemantauan kerjasama di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan naskah pada tahun 2025 sebanyak 48 dokumen dengan prosentase sebagai berikut: Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK): 73%, Sinergi dengan Pemerintah Pusat/Lembaga: 20%, Kerja Sama Daerah Antar Daerah (KSDD): 7%.

Dominasi KSDPK menunjukan tingginya keterlibatan sektor non-pemerintah dalam pembangunan daerah. Namun perlu pengawasan ketat terhadap, aspek legalitas, pembagian risiko, potensi beban fiskal, dan perlindungan kepentingan daerah. KSDD masih relatif rendah, padahal kerja sama antar daerah sangat penting untuk penanganan isu lintas wilayah seperti, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, pengendalian banjir dan pengembangan kawasan strategis

Tantangan yang dihadapi dalam kerjasama kabupaten/kota adalah terdapat disparitas jumlah kerja sama antar daerah. Beberapa daerah menunjukkan tingkat

aktivitas kerja sama yang tinggi, sementara sebagian lainnya relatif rendah. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. **Pertama**, Memperkuat fungsi pembinaan dan fasilitasi kepada kabupaten/kota, khususnya bagi daerah yang tingkat kerja samanya rendah, melalui kegiatan sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, serta pendampingan dalam proses identifikasi potensi kerja sama yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. **Kedua**, Penguatan koordinasi dan forum komunikasi antar pemerintah daerah guna mendorong peningkatan kerja sama daerah antar daerah (KSDD) harapannya kabupaten/kota dapat saling berbagi praktik baik (*best practices*), mengidentifikasi isu pembangunan lintas wilayah, serta merumuskan inisiatif kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya dalam penanganan isu strategis seperti pengelolaan sampah regional, ketahanan pangan, pengendalian banjir, pengembangan kawasan strategis, serta peningkatan konektivitas antar wilayah. **Ketiga**, Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah, tidak hanya dari aspek jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani, tetapi juga dari aspek kualitas substansi, implementasi, serta dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Evaluasi ini juga penting untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan telah memperhatikan aspek legalitas, pembagian risiko yang proporsional, serta tidak menimbulkan potensi beban fiskal bagi pemerintah daerah. **Keempat**, Penguatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang menangani kerja sama melalui pelatihan penyusunan dokumen kerja sama, analisis risiko, penguatan aspek hukum perjanjian, serta manajemen pelaksanaan kerja sama.

H. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota adalah untuk menilai kinerja, mengukur capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip *good goervernance*, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kabupaten/kota.

Tim Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 terhadap 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, telah melaksanakan:

1. Pengukuran kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk di lakukan validasi
3. Penyampaian hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di evaluasi sebagai umpan balik.
4. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota akan di sampaikan pada

kegiatan hari Otonomi Daerah oleh Ditjen Otda Kemendagri secara Nasional tanggal 25 April 2026

I. Persetujuan Terhadap Raperda Pembentukan Dan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 3 mengamanatkan bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Fasilitasi persetujuan terhadap Raperda Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2025 dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memfasilitasi 8 Raperda Kabupaten/Kota yaitu:

1. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan;
2. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
3. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
4. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
5. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
6. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
7. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
8. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

J. Penyiapan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota

Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Fasilitasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2025 sebanyak 42 surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota sebagai berikut:

1. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Batang.
2. Permohonan ijin Penambahan Formasi Struktur Jabatan Staf Ahli Kota Salatiga.
3. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Hj Anna Lasmanah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
4. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan.
6. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Blora Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora.
7. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Boyolali Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali.
8. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Brebes Tentang Rancangan Peraturan Bupati Brebes Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
9. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana DAN Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, DAN

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pangan, DAN Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, DAN Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

10. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Jepara Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Kendal Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Klaten Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
14. Fasilitas Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan DAN Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Fasilitas Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan DAN Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
16. Fasilitas Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah DAN Rancangan

- Peraturan Wali Kota Surakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah DAN Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
17. Fasilitas Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tegal DAN Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan DAN Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
 18. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Kudus Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus
 19. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 20. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Pati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
 21. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 22. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Pemalang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DAN Rancangan

- Peraturan Bupati Tentang Staf Ahli Bupati
23. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga Tentang Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho DAN Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
 24. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Rembang Tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
 25. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Semarang Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
 26. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Sragen Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen
 27. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Tegal Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DAN Rancangan Peraturan Bupati Tegal Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati
 28. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah:
 29. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
 30. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri
 31. Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DAN Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

32. Fasilitasi Usulan Pembentukan UPTD kabupaten Wonogiri RSUD Raden Mas Said Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
33. Fasilitasi Usulan Pembentukan UPTD Kota Salatiga UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat kelas B pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga
34. Fasilitasi Usulan Pembentukan UPTD Kota Semarang UPTD Pemakaman kelas A pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
35. Fasilitasi Usulan Pembentukan UPTD kabupaten Pati UPTD Pengelolaan Persampahan kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati
36. Fasilitasi Usulan Pembentukan UPTD Kota Surakarta UPTD Pengelolaan Pedagang Kaki Lima kelas A pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta
37. Fasilitasi Usulan Pembentukan UPTD kabupaten Boyolali UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kelas B pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali.
38. Fasilitasi Usulan Pembentukan UPTD kabupaten Purworejo UPTD Rumah Kemas kelas A pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.
39. Fasilitasi Usulan Peningkatan Kelas UPTD kabupaten Tegal, UPTD Wisata Kesehatan Jamu dari Kelas B menjadi kelas A
40. Fasilitasi Usulan Pembentukan UPTD kabupaten Purbalingga Puskesmas Kemangkon 2
41. Fasilitasi Usulan Pembentukan UPTD kabupaten Wonogiri UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kelas A pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.
42. Fasilitasi Usulan Peningkatan Kelas UPTD Kota Magelang, UPTD Pengelolaan Sport Center dari Kelas B menjadi Kelas A

K. Monitoring, Evaluasi Dan Supervisi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dengan melaksanakan kegiatan:

1. Monitoring dan evaluasi kelembagaan, anggaran, rencana aksi, penetapan target, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 35 Kab/Kota pada 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, serta Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Adapun hasilnya antara lain:
 - a) Diperlukan kolaborasi pendataan siswa institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk penghitungan target dan capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan;
 - b) Penganggaran SPM belum dapat menjangkau rencana penambahan sarana dan prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Suburusan Pemadam Kebakaran;
 - c) Diperlukan peningkatan pemenuhan mutu (kompetensi) sumber daya manusia pemberi layanan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan,

Kesehatan, dan Trantibumlinmas; Pembinaan penerapan SPM dari OPD teknis provinsi kepada OPD teknis kabupaten/kota masih terbatas.

2. Evaluasi Kinerja Urusan Investasi pada 15 (lima belas), Pemerintah Kab/Kota untuk melihat *link and match* pendidikan vokasi dengan pasar kerja disamping penguatan investasi melalui dukungan sektor lainnya seperti: UMKM; perindustrian; perdagangan; kepemudaan; pariwisata; ketenagakerjaan. Adapun Hasil evaluasi kinerja urusan investari diperlukan penguatan kebijakan link and match pendidikan vokasi dengan pasar kerja serta sector penunjang insvestasi sebagai berikut :
 - a) Mengoptimalkan on the job training/magang pada setiap program vokasi;
 - b) Penguatan kelembagaan BLK melalui akreditasi program pelatihan;
 - c) Penguatan peran petugas verifikasi OSS RBA pada OPD per sektor;
 - d) Penguatan UMKM untuk kualifikasi kemitraan dan pemantauan kepemilikan kemitraan;
 - e) Penguatan komponen-komponen pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata seperti fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS RBA, peningkatan kompetensi SDM pariwisata, serta peningkatan aksesibilitas dan amenitas pariwisata.

L. Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan Antardaerah Kabupaten/Kota Dan Antara Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayahnya

Pelaksanaan tugas dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui Rakortekrenbang Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota sebanyak 6 Forum Rakortekrenbang yang terbagi di 6 eks. Karisedenan dalam serangkaian musrenbangwil, serta fasilitasi rancangan akhir peraturan kepala daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota. Kegiatan fasilitasi ini dilakukan terhadap Rancangan akhir perkara RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Perubahan perkara RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025, dimana kedua dokumen tersebut akan menjadi dasar dan pedoman bagi penyusunan KUA PPAS dan APBD Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan fasilitasi dilaksanakan melalui Forum fasilitasi rancangan akhir RKPD masing-masing Kabupaten/Kota yang bertempat di BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan diawali dengan pemaparan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026, kemudian dilakukan pembahasan dan pencermatan, serta penyelarasan terhadap dokumen perencanaan, dan konsistensi target, tujuan – sasaran utamanya pada indikator makro pembangunan daerah dengan memberikan masukan terhadap substansi perencanaan sesuai bidang dan tugasnya oleh Evaluator/ Fasilitator Provinsi.

Adapun hasil fasilitasi tersebut berupa Surat Hasil Fasilitasi yang harus ditindaklanjuti Kabupaten/Kota sebelum dokumen rancangan akhir peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Rincian pelaksanaan Fasilitasi dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.23 Rincian Pelaksanaan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Melalui Fasilitas Rancangan Akhir Perkada Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Surat Permohonan dari Bupati/Walikota		Penyampaian Hasil Fasilitas
		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5
1	Kab. Pati	T/105/000.7.2	06 Mei 2025	17 Mei 2025
2	Kab. Kudus	000.7/929/2025	25 April 2025	20 Mei 2025
3	Kab. Banjarnegara	000.7.2.4/30/BUPATI/2025	05 Mei 2025	20 Mei 2025
4	Kab. Cilacap	000.7/2814/34	08 Mei 2025	20 Mei 2025
5	Kota Surakarta	B/KD.03/1232/2025	06 Mei 2025	21 Mei 2025
6	Kab. Banyumas	000.9/1790/2025	06 Mei 2025	21 Mei 2025
7	Kab. Magelang	050/111/24/2025	05 Mei 2025	22 Mei 2025
8	Kota Pekalongan	B/47/000.7.2.4/2025	06 Mei 2025	22 Mei 2025
9	Kota Tegal	000.7.2.4/005	05 Mei 2025	22 Mei 2025
10	Kab. Demak	050/330	07 Mei 2025	22 Mei 2025
11	Kab. Wonosobo	000.7.3/621	07 Mei 2025	22 Mei 2025
12	Kab. Semarang	000.7.2.4/003570	14 Mei 2025	22 Mei 2025
13	Kab. Temanggung	P/452/050/21/V/2025	06 Mei 2025	26 Mei 2025
14	Kota Semarang	B/913/000.7.2/V/2025	14 Mei 2025	26 Mei 2025
15	Kab. Wonogiri	S/2047/000.7/V/2025	06 Mei 2025	26 Mei 2025
16	Kab. Pekalongan	000.7.2.4/01233	09 Mei 2025	26 Mei 2025
17	Kab. Sragen	000.7.4/432/23/2025	08 Mei 2025	26 Mei 2025
18	Kab. Purbalingga	000.7.2.4/7801	15 Mei 2025	26 Mei 2025
19	Kab. Klaten	B/000.7.2.2/141/2025/31/M	15 Mei 2025	26 Mei 2025
20	Kab. Tegal	000.7.2/321-1/1-23	08 Mei 2025	26 Mei 2025
21	Kab. Jepara	050.1.3/7	03 Mei 2025	27 Mei 2025
22	Kab. Grobogan	B/000.7.2/43/2025	06 Mei 2025	27 Mei 2025
23	Kab. Purworejo	000.7.1/4395/2025	06 Mei 2025	27 Mei 2025
24	Kab. Boyolali	000.7/0941/5.1/2025	05 Mei 2025	27 Mei 2025
25	Kab. Kebumen	000.7.2/0604	05 Mei 2025	27 Mei 2025
26	Kab. Pemalang	000.7/1014	20 Mei 2025	27 Mei 2025
27	Kab. Sukoharjo	B/000.7/1710 /2025	21 Mei 2025	28 Mei 2025
28	Kab. Karanganyar	000.7.2.4/1.792.22/2025	04 Juni 2025	28 Mei 2025
29	Kab. Blora	050.23/0768/2025	05 Mei 2025	28 Mei 2025
30	Kab. Rembang	000.7.2.4/1148/2025	15 Mei 2025	28 Mei 2025
31	Kab. Kendal	000.7.2.1/1074/Baperlitbang	28 Mei 2025	28 Mei 2025
32	Kab. Batang	B/10/000.7.2.4/V/2025	06 Mei 2025	28 Mei 2025
33	Kab. Brebes	000.7/708/V/2025	7 Mei 2025	28 Mei 2025
34	Kota Magelang	000.7.2.4/294/410	06 Mei 2025	28 Mei 2025
35	Kota Salatiga	000.7.4/337	20 Mei 2025	28 Mei 2025

Tabel 4.24 Tabel Rincian Pelaksanaan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Melalui Fasilitas Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Kabupaten/ Kota	Surat Permohonan dari Bupati/Walikota		Penyampaian Hasil Fasilitas
		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5
1	Kota Surakarta	B/0D.00/1691/2025	10 Juni 2025	20 Juni 2025
2	Kab. Jepara	050.1.3/1474	10 Juni 2025	20 Juni 2025
3	Kab. Kudus	000.7/1078/2025	05 Juni 2025	20 Juni 2025
4	Kota Tegal	000.7.2.4/006	10 Juni 2025	20 Juni 2025
5	Kab. Grobogan	B/000.7.2.2/67/2025	10 Juni 2025	20 Juni 2025
6	Kab. Batang	P/1224/000.7.2.4/VI/2025	10 Juni 2025	20 Juni 2025
7	Kota Pekalongan	B/71/000.7.2.4/2025	10 Juni 2025	04 Juli 2025
8	Kab. Kebumen	000.7.2/0759	10 Juni 2025	04 Juli 2025
9	Kab. Sragen	000.7.2.4/557/23/2025	10 Juni 2025	04 Juli 2025
10	Kab. Blora	050.23/0771/2025	10 Juni 2025	04 Juli 2025
11	Kab. Banyumas	000.7/2521	10 Juni 2025	04 Juli 2025
12	Kab. Banjarnegara	000.7.2.4/41/BUPATI/2025	10 Juni 2025	04 Juli 2025
13	Kab. Purworejo	007.2/5737/2025	11 Juni 2025	04 Juli 2025
14	Kab. Demak	050/0991	13 Juni 2025	04 Juli 2025
15	Kab. Cilacap	000.7.2.4/3734/34	13 Juni 2025	04 Juli 2025
16	Kab. Tegal	000.7.2/417-1/1-23	4 Juni 2025	04 Juli 2025
17	Kab. Wonosobo	000.7.2/69/BAPPEDA	11 Juni 2025	04 Juli 2025
18	Kab. Temanggung	P/576/050/21/VI/2025	17 Juni 2025	04 Juli 2025
19	Kab. Karanganyar	000.7.2.4/1.860.22/2025	10 Juni 2025	04 Juli 2025
20	Kab. Brebes	000.7/0531/VI/2025	10 Juni 2025	04 Juli 2025
21	Kab. Boyolali	000.7.2/36/5.1/2025	10 Juni 2025	04 Juli 2025
22	Kab. Sukoharjo	000.7/1945/2025	12 Juni 2025	04 Juli 2025
23	Kab. Wonogiri	S/2393/000.7/VI/2025	10 Juni 2025	04 Juli 2025
24	Kab. Magelang	050/154/24/2025	23 Juni 2025	04 Juli 2025
25	Kab. Klaten	000.7.2.4/183/2025/31/M	10 Juni 2025	04 Juli 2025
26	Kab. Pekalongan	000.7.2.4/01643	24 Juni 2025	04 Juli 2025
27	Kab. Purbalingga	000.7.2.4/11258	26 Juni 2025	04 Juli 2025
28	Kab. Semarang	000.7.2.4/4838	26 Juni 2025	04 Juli 2025
29	Kota Magelang	000.7.2.4/426/410	10 Juni 2025	04 Juli 2025
30	Kab. Pati	T/153/000.7.2	12 Juli 2025	14 Juli 2025
31	Kab. Pemalang	000.7/1413	7 Juli 2025	14 Juli 2025
32	Kab. Kendal	000.7.2.1/1074/Baperlitbang	30 Juni 2025	25 Juli 2025
33	Kota Salatiga	000.7/399	11 Juni 2025	25 Juli 2025
34	Kab. Rembang	000.7.2.4/3294/2025	12 Sept 2025	29 Sept 2025
35	Kota Semarang	B/2083/000.7.2.4/x/2025	24 Okt 2025	10 Nov 2025

M. Memberi Rekomendasi Kepada Pemerintah Pusat Atas Usulan Dana Alokasi Khusus Pada Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Dana Alokasi Khusus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dilaksanakan Melalui Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi, Dan Verifikasi Rancangan Usulan, Serta Memberikan Surat Pengantar Rekomendasi Usulan DAK Pada 17 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2026 Sesuai Arah Kebijakan Dan Alokasi Prioritas Usulan DAK Fisik 2026 Meliputi Kabupaten: Grobogan, Pekalongan, Batang, Pati, Pemalang, Rembang, Blora, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Klaten, Sragen, Karanganyar, dan Kota: Pekalongan, Surakarta.

BAB 5

PENUTUP

Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan transisi pelaksanaan Tahun Ke-2 RPD 2024-2026 dan pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas infrastruktur bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut difokuskan pada kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, infrastruktur teknologi dan data, infrastruktur sekolah dan, infrastruktur penyediaan air untuk petani.

Penjabaran arah kebijakan pembangunan daerah tersebut serta implementasi awal dari 136 program daerah yang mendasari penyesuaian terhadap beberapa rencana kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah Tahun 2025.

Seluruh pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 diukur dengan indikator kinerja utama daerah yaitu Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Otonomi Fiskal Daerah dan Indeks Demokrasi Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar 5,37%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional 5,11%. Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui peningkatan investasi dan kawasan industri, penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, pengembangan SDM dan infrastruktur, serta pemerataan dan konektivitas pembangunan daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 sebesar 4,32% lebih baik dibandingkan Tahun 2024 sebesar 4,78% atau turun 0,46%. Penurunan TPT tersebut menunjukkan adanya perbaikan perekonomian Jawa Tengah melalui berbagai kebijakan antara lain peningkatan sektor pertanian dan pangan, kemudahan izin berusaha, peningkatan investasi dan industri, relokasi 97 perusahaan ke Jawa Tengah, program padat karya, Kecamatan berdaya serta kegiatan ekonomi pesantren.

Angka Kemiskinan Jawa Tengah menunjukkan penurunan dari 9,58% pada 2024 menjadi 9,39% pada 2025 atau mengalami penurunan 0,19%, dengan penurunan jumlah penduduk miskin 51,52 ribu orang dari 3,39 juta orang menjadi 3,34 juta orang. Strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah melalui 3 Pilar yaitu: Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui sinergitas kebijakan dan program.

Tingkat Inflasi Jawa Tengah Tahun 2025 masih terkendali dengan angka sebesar 2,72% atau lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 1,67% namun demikian ini masih lebih rendah dibanding inflasi nasional Tahun 2025 sebesar 2,92%. Upaya pengendalian inflasi di Jawa Tengah dengan mengukung program Rega Tumata, Aman, Terjangkau, Adil, dan Stabil (Rega Tatas) yang diimplementasikan melalui strategi pengendalian inflasi “4K”, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Indeks Modal Manusia Jawa Tengah Tahun 2025 ditargetkan 0,62. Hal ini menggambarkan anak yang lahir saat ini diprediksi akan mencapai 62% dari produktifitas. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan Perprov Jateng antara lain penanganan anak tidak sekolah, penyediaan unit sekolah baru di area *blank spot*, beasiswa miskin, penyediaan 3 SMK *Boarding School*, program Dokter Spesialis Keliling, intervensi penurunan stunting, serta peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan.

Peningkatan pelayanan publik di Jawa Tengah kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, murah, terjangkau dan terukur mendukung capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 94,06 pada tahun 2025. Pencapaian tersebut melalui upaya implementasi Reformasi Birokrasi, Tematik, Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik, Pengelolaan Tata Kelola Anti Korupsi, Manajemen SDM Aparatur yang Adaptif serta Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat.

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden diantaranya (a) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 4.288.525 orang penerima manfaat yang didukung 3.364 unit SPPG; (b) Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dengan capaian sebanyak 17.510 unit bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan 2.743 unit dari Baznas dan CSR; (c) Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), saat ini telah terbentuk 8.523 unit KDKMP, 6.233 unit telah operasional dan 2.289 unit belum operasional dengan anggota sekitar 200 ribu orang; (d) Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas, dengan capaian 14,13 juta orang telah terlayani dari bayi sampai dengan lansia; (e) Program Sekolah Rakyat dengan realisasi pendirian 14 Sekolah Rakyat yang terdiri 4 SD, 5 SMP dan 8 SMA dengan jumlah siswa 1.275 anak.

Kinerja pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi prestasi sekaligus sebagai catatan kritis untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang senantiasa lebih memberikan manfaat, inovatif dan berkelanjutan serta mampu merespon tuntutan dan dinamika masyarakat yang semakin kritis.

Sebagai bagian akhir penyampaian LKPJ ini ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra yang selama ini telah menjalin sinergitas hubungan yang harmonis serta memberikan motivasi dan kritik yang konstruktif kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada segenap stakeholder maupun masyarakat Jawa Tengah atas partisipasi, dukungan, masukan, saran yang diberikan untuk ikut serta dalam mewujudkan "Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045".

Demikian penyampaian LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 diiringi harapan semoga ditahun tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya perjuangan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Keberkahan dan Rahmat-NYA kepada kita semua.

**REKAPITULASI PENGHARGAAN TAHUN 2025 PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	URUSAN/PENGHARGAAN	MEDALI EMAS	MEDALI PERAK	MEDALI PERunggu	JUMLAH	OPD
	WAJIB PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN PENDIDIKAN					
	1. Olimpiade Siswa Nasional (OSN) jenjang SD, SMP dan SMA memperoleh 6 emas, 15 perak dan 27 perunggu;	6	15	27	126	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD, SMP, SMA, SMK memperoleh 4 Emas, 2 Perak, dan 3 Perunggu	4	2	3		
	3. Lomba Keterampilan Siswa (LKS) jenjang SMK dan SLB memperoleh 9 Emas, 11 Perak, dan 11 Perunggu	9	11	11		
	4. Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB memperoleh 5 Emas, 5 Perak, dan 7 Perunggu	5	5	7		
	5. Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang SMP memperoleh 3 Emas, 2 Perak, dan 1 Perunggu	3	2	1		
	6. Lomba FIKSI jenjang SMA memperoleh 4 Emas, 3 Perak, dan 2 Perunggu	4	3	2		
	7. Provinsi Dengan Karya Terbaik Dalam Sayembara Cerita Praktik Baik 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat oleh Kemdikdasmen					
	8. Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025 kategori Wiyata Dharma Madya dan Bunda PAUD Provinsi Peduli PAUD oleh Kemdikdasmen					
	9. Anugerah Provinsi Terbaik Dalam Pemanfaatan Data Pendidikan dan Pengimbasan dan Pemanfaatan Rumah Pendidikan oleh Kemdikdasmen					
	10. Anugerah Guru Pejuang Digital oleh Kemdikdasmen					
	11. Provinsi Penerima Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) oleh Kemdikdasmen					
	12. Anugerah Pengimbasan dan Pemanfaatan Rumah Pendidikan Terbaik oleh Kemdikdasmen.					

2	URUSAN KESEHATAN					
	1. Penghargaan Anugrah Lentera Emas sebagai Juara 1 kategori Lembaga Pelatihan BBPK/Bapelkes/Bapelkesda.				7	Dinas Kesehatan
	2. Penghargaan sebagai 5 Provinsi dengan Capaian terbaik dalam Pelaksanaan Kesehatan Gratis (PKG)					
	3. Penghargaan sebagai Juara 1 Provinsi dengan Capaian Cek Kesehatan Gratis tertinggi					
	4. Penghargaan sebagai Juara 1 Provinsi dengan Capaian Eliminasi TBC Terbaik Regional 1					
	5. Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan					
	6. Penghargaan sebagai Provinsi dengan Intervensi Stunting Terbaik Kategori Regional					
	7. Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik 2 Pembina Kabupaten/Kota Sehat					
	1. Penghargaan JR Care Champion Award 2025 Dengan Kategori Form and Diagno-sis Accuracy Champion dengan Kriteria Ketepatan Pengisian Diagnosis Cedera dan Form Kesehatan.				5	RSUD Dr. Moewardi
	2. Juara 3 Tingkat Nasional Lomba Video Konten Edukasi JKN Tahun 2025, Kategori FKRTL Milik Pemerintah oleh BPJS Kesehatan.					
	3. Diamond Status dari World Stroke Organization pada WSO Angels Awards Q1 dan Q2 Tahun 2025					
	4. Penghargaan Sebagai Dua Belas Rumah Sakit Terbaik Bidang Layanan Kanker Tahun 2025 dari PERSI					
	5. Penghargaan Sebagai Dua Belas Rumah Sakit Terbaik Bidang Layanan Saraf Ta-hun 2025 dari PERSI					
	1. Juara I lomba video kreatif tiktok edukasi kolaboratif dalam asuhan pasien KARS RI (12 Agustus 2025).				4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	2. "Recognition achievement in implementing the guidelines for patient-centred care services and integrated patient care" dalam penganugerahan hospital patient-centred care award KARS RI (12 Agustus 2025).					
	3. Penghargaan The Runner Up Winner Central Sterilization					

	Indonesia's Hero Award 2025 oleh Perkumpulan Praktis Sterilisasi Seluruh Indonesia					
	4. Penghargaan e-Va Centil (Electronic Validation – Cara Cepat dan Akurat Jamin Lancarkan Klaim BPJS) pada Outstanding Public Service Innovations 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi					
	1. Juara 2 Lomba Karya Ilmiah Kategori Manajemen LAM KPRS Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;				3	RSUD dr. Adyatma MPH (RSUD Tugurejo)
	2. Anugerah dalam Bidang Keselamatan dan Keamanan Nuklir Kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Rumah Sakit) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)					
	3. Juara 2 sebagai Instansi Pengelola Jabatan Terbaik kategori Rumah Sakit Daerah yang diselenggarakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia					
	1. Juara Harapan 1 tingkat nasional Pertemuan Ilmiah Tahunan & Semiloka Nasional (PITSELNAS) IX KARS yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit				2	RSUD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten
	2. Juara 1 Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Khusus (JFK) terbaik (JFK Award 2025) Kategori RS Daerah oleh Kementerian Kesehatan RI.;					
	1. Juara 1 Fasilitas Kesehatan Kategori Video Edukasi Pemanfaatan Mobile JKN Terbaik oleh Fasilitas Kesehatan dalam Digital Transformation Awards 2024 di tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan RI.				4	RSJD Surakarta (dr. Arif Zainudin)
	2. Juara III tingkat Nasional untuk kategori Healthcare Workers' Wellbeing Lomba PERSI Award.					
	3. Juara III tingkat Nasional Video Edukasi HKJS #7DetikJagaJiwa dalam Lomba Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (Arsawakoi).					

	4. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Berkomitmen Kategori RS Khusus da-lam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Cabang 2025 oleh BPJS Kesehatan RI.					
3	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN					
	1. Penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, sebagai provinsi peringkat I terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan;				2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2. Penghargaan TVONE Inovasi Membangun Negeri 2025 untuk Kategori Innovation Public Services, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pembangunan Rumah Layak Huni".					
					JUMLAH	153
	WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
4	URUSAN TENAGA KERJA					
	1. Pembina Produktivitas Terbaik pada ajang Naker Inspirational Leadership Award 2025.				2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2. Pembina Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas pada ajang Naker Award 2025.					
5	URUSAN PANGAN					
	1. Provinsi dengan Capaian Skor Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) terbaik II Tahun 2024;				3	Dinas Ketahanan Pangan
	2. Provinsi dengan Capaian Penurunan Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) terbaik III Tahun 2024 (Angka PoU 8,63%);					
	3. Penghargaan Integrasi Data Pangan Inovatif Badan Pangan Nasional Tahun 2024;					
6	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	1. Provinsi Layak Anak (Provila) pada periode evaluasi Kab/Kota Layak Anak Tahun 2025				1	DP3AP2KB
7	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	1. Terbaik I Regional Jawa Bali Kategori Capaian KB MKJP tertinggi terhadap total pelayanan KB pada Pelayanan				5	DP3AP2KB

	KB serentak di pasar tradisional					
	2. Terbaik II Kategori Provinsi dengan jumlah capaian terbanyak tingkat Nasional dalam Pelayanan Vasektomi serentak					
	3. Terbaik III kelompok target 1 kategori Provinsi dengan persentase capaian tertinggi pada pelayanan vasektomi serentak					
	4. Terbaik III regional Jawa Bali kategori rata-rata pelayanan KB MKJP terbanyak dalam pelayanan KB serentak di pasar tradisional					
	5. Juara terbaik 1 forum genre tingkat nasional					
8	URUSAN PERHUBUNGAN					
	Juara 1 Pembina terbaik dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan				1	Dinas Perhubungan
9	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Penghargaan Public Impact Leadership pada ajang Anugerah Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) 2025				1	
10	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
	1. Top 25 dalam Outstanding Public Service Innovations Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap inovasi Hetero Space.				2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2. Apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas Operasional Koperasi Desa/Ke-lurahan Merah Putih tertinggi Nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia.					
11	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	1. Juara Umum II POMNAS XIX Tahun 2025 memperoleh Medali Atlet Jawa Tengah sebanyak 61 emas, 54 Perak, dan 46 Perunggu yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI).	61	54	46	387	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2. Peringkat V PORNAS KORPRI XVII Tahun 2025 Kontingen Provinsi Jawa Tengah	7	8	13		

	memperoleh Medali sebanyak 7 Emas, 8 Perak, dan 13 Perunggu yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (BAPOR KORPRI).					
	3. Juara Umum II POPNAS XIX Tahun 2025 Kontingen Provinsi Jawa Tengah memperoleh Medali sebanyak 58 Emas, 39 Perak, dan 56 Perunggu yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI	58	39	56		
	4. Juara Umum II PEPARPENAS XI Tahun 2025 Kontingen Provinsi Jawa Tengah memperoleh Medali sebanyak 17 Emas, 17 Perak, dan 17 Perunggu yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI	17	17	17		
	5. Juara I Nasional Pemuda Pelopor Desa pada kategori bidang Ekonomi Digital atas nama Muhammad Burhanudin yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI					
12	URUSAN PERSANDIAN					
	Piagam Apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai Pemerintah Provinsi yang menunjukkan komitmen luar biasa, dalam membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh Kabupaten/Kota				1	Diskominfo
13	URUSAN KEBUDAYAAN					
	1. Juara 1 dan Juara 5 Festival Dalang Anak Tahun 2025 oleh PEPADI Kelompok A (usia 11 tahun)				3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Juara 1 dan Juara 3 Festival Dalang Anak Tahun 2025 oleh PEPADI Kelompok B (usia 12-15)					
	3. Dalang Mumpuni pada Festival Dalang Anak Tahun 2025 oleh PEPADI					
14	URUSAN PERPUSTAKAAN					
	Penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI : 1. Juara III Lomba Bertutur Nasional Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atas nama Alexandra Dian Ayu Vian				6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2. Juara I Apresiasi Penyelenggaraan					

	Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Ke-lurahan) Tingkat Nasional Tahun 2025 dari Kabupaten Magelang					
	3. Juara III Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kategori Perpustakaan Masyarakat Terbaik Wilayah II (Jawa, Bali, Nusa Tenggara) dari TBM Rumah Kreatif Wadadas Kelir, Kab. Banyumas					
	4. Juara I Lomba Video Konten Literasi Tingkat Nasional atas nama Aurellia Putri Fadilah					
	5. Juara I Lomba Resensi Buku Nasional Tingkat SMP/MTs/Sederajat atas nama Melati Kencana Putri					
	6. Juara II Lomba Resensi Buku Nasional Tingkat SMA/MA/SMK/Sederajat atas nama Naifa Lalitya Sarasati					
15	URUSAN KEARSIPAN					
	Penghargaan dari Arsip Nasional RI :					
	1. Register Nasional Memori Kolektif Bangsa Tahun 2025 "Arsip PKK Jawa Tengah sebagai Pionir PKK Nasional"				2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2. Peringkat I tingkat nasional dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 diserahkan					
					JUMLAH	413
	URUSAN PILIHAN					
16	URUSAN PARIWISATA					
	1. Peringkat 5 pada Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang diselenggarakan oleh Crescentrating bekerja sama dengan Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) dan Bank Indonesia (BI)					
	2. Apresiasi Desa Wisata Integratif pada Lomba Desa Wisata Nusantara 2025 yaitu desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Kemenpar Republik Indonesia.				8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3. Desa Wisata Terbaik kategori desa sangat tertinggal/tertinggal/berkembang pada Lomba Desa Wisata					

	Nusantara 2025 yaitu Desa Melung Kabupaten Banyumas					
	4. Desa Wisata Favorit Kategori Desa Maju/Mandiri (Ekonomi Kreatif) pada Lomba Desa Wisata Nusantara 2025 yaitu desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara					
	5. Juara 3 Kategori Daya Tarik Wisata Terbaik Nasional pada Wonderful Indonesia Award 2025 yaitu The Pikas Adventure, Banjarnegara, Jawa Tengah					
	6. Juara Kategori Cendera Mata pada Anugerah Pesona Indonesia – API Awards diraih oleh Gerabah Melikan, Kabupaten Klaten					
	7. Juara Kategori Olahraga & Petualangan pada Anugerah Pesona Indonesia – API Awards diraih oleh Jelajah Kampung Siluman, Kabupaten Klaten					
	8. Juara Wakil 3 Duta Wisata Indonesia dengan titel Duta Wisata Bahari 2025					
17	URUSAN PERTANIAN					
	1. Peringkat dua Lomba Pengawas Benih Tanaman Berprestasi Wilayah Pulau Jawa pada Kegiatan Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional Ke-X.				1	Dinas Pertanian dan Perkebunan
18	URUSAN KEHUTANAN					
	1. Terbaik I Kategori Penyuluh Kehutanan PNS an. Sigit Murhofiq, S.Hut (Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X).				4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2. Terbaik I Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) an. Sugiharto, S.T (Desa Donoharjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah).					
	3. Terbaik I Kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) an. KTH Sari Bunga Giyanti/Dul Luqman (Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah).					
	4. Penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Penyelenggara Penyuluh Kehutanan Terbaik IV Tahun 2025.					

19	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	1. Penghargaan Solar Awards dari Dewan Energi Nasional (DEN), sebagai bentuk pengakuan atas komitmen kuat dan konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pemanfaatan serta pengembangan energi surya secara berkelanjutan guna mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional				2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	2. Apresiasi Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, sebagai pemerintah daerah yang berperan aktif dalam penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan melalui aplikasi X-Star BPH Migas					
20	URUSAN PERDAGANGAN					
	1. Penghargaan sebagai Daerah Peduli Perlindungan Konsumen				2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2. Peringkat 3 penghargaan Indonesia Market Surveillance (INAMS) Award terhadap kinerja daerah dan petugas pengawas yang menggunakan INAMS sebagai sistem pelaporan hasil pengawasan barang beredar					
21	URUSAN PERINDUSTRIAN					
	Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian.				1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	JUMLAH					18
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
22	FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	1. Penghargaan Nasional Implementasi ASTA CITA dari Kementerian Dalam Negeri melalui Kegiatan Manunggal Leadership Retreat "Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah";				3	BPSDMD
	2. Penghargaan tingkat nasional pada ajang Anugerah Data dan Teknologi Pendidikan oleh Pusat Data Teknologi Informasi Kementerian					

	Pendidikan Dasar dan Menengah RI sebagai Peringkat pertama kategori "Anugerah Pengembangan Ka-pasitas SDM Unggul					
	3. Penghargaan tingkat Jawa Tengah sebagai "Badan Publik Informatif Peringkat II" OPD Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.					
23	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	1. Kegiatan "Apresiasi BRIDA-BAPPERIDA Optimal 2025" yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atas komitmen dan kinerja dalam penguatan riset dan inovasi di Jawa Tengah, dalam hal ini meraih 2 penghargaan, yaitu: 1) Kategori indikator Kajian Kebijakan yang dimanfaatkan, sebagai pengakuan atas kontribusi BRIDA Jateng dalam menghasilkan kajian strategis yang ada di tingkat daerah 2) Kategori Indikator optimalisasi Potensi atau Penyelesaian Permasalahan Daerah, atas upaya BRIDA Jateng dalam mengembangkan inovasi berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan potensi unggulan daerah				4	BRIDA
	2. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendagri, mendapatkan 2 penghargaan yaitu : 1) Kategori sebagai Provinsi sangat Inovatif 2) Kategori sebagai Pemerintah Daerah dengan sebaran Inovasi urusan Pemerintahan Konkruen terbanyak					
	JUMLAH					7
	UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAHAN					
24	INSPEKTORAT					
	Survei Penilaian Integritas Kategori Provinsi Besar Terbaik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai 79,50.				2	Inspektorat

	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Skor Tertinggi dalam penilaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Kategori Pemerintah Provinsi Periode 2023 - 2024 dengan nilai sebesar 98,29.					
	JUMLAH					2
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
25	Peringkat ke 4 capaian Indeks Demokrasi Indonesia dengan nilai 85,84				1	Kesbangpol
					JUMLAH	1
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
26	SEKRETARIAT DAERAH					
	1. Outstanding Public Service Innovations Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Ta-hun 2025;				6	Sekretariat Daerah
	2. Penghargaan Financial Literacy Award 2025 sebagai finalis Financial Literacy Award 2025 dengan kategori Pemerintah Daerah dengan program literasi keuangan terbaik level Provinsi					
	3. Penilaian terhadap pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan nilai 96 dengan Kategori "Eka Acapalati" (perolehan nilai Anggota JDIH pada nilai 86-100) dari Kementerian Hukum RI, sehingga menduduki peringkat 2 untuk Anggota JDIH Nasional Kategori Pemerintah Provinsi;					
	4. Penghargaan TPAKD Award 2025 sebagai nominasi penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award Tahun 2025 dengan kategori TPAKD terbaik tingkat Provinsi Wilayah Jawa – Bali.					
	5. Peringkat I kategori Provinsi Penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan nilai 99,72 (AA/Istimewa)					

	6. Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah berkinerja terbaik kategori Provinsi Kawasan Jawa dan Bali dalam TPID Awards 2025					
	JUMLAH					6
	JUMLAH TOTAL					600

PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
1.	3310215000000900	10 January 2025	35.000.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Bhakti Nomor 9 Kabupaten Kudus tahap KESATU, periode 1 September 2024 s/d 30 Agustus 2025 An. Mujiati
2.	3310215000000200	13 January 2025	4.168.590	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Kartini Nomor 108 Kota Salatiga Tahap KEENAM, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Juli 2025 An. Agus Supriatna
3.	3310215000000100	13 January 2025	254.231.807	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Setiabudi Nomor 128 Kota Semarang Tahap KEEMPAT, periode 3 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 An. M. Nazir Siregar
4.	3310215000000800	16 January 2025	2.100.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Gintungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tahap KEDUA, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 An. Wintoyo
5.	3310215000000300	21 January 2025	35.917.169	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Kartini Nomor 108 Kota Salatiga tahap KETIGA, periode 29 Januari 2025 s/d 28 Januari 2026 An. Sukanto
6.	3310215000000400	22 January 2025	3.580.776	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Suruh - Karanggede, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tahap KEDUA, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 An. Riyadi
7.	3310215000000500	24 January 2025	14.641.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Surakarta - Sragen, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Tahap KEEMPAT, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 An. Joni Santoso
8.	3310215000001300	24 January 2025	4.840.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas tahap KETIGA, periode 3 Oktober 2024 s/d 30 September 2025 An. Supardi
9.	3310215000000600	24 January 2025	27.288.162	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Surakarta - Sragen, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tahap KEEMPAT, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 An. Waluyo

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
10.	3310215000000700	24 January 2025	15.750.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 2 Kelurahan Sragen, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tahap KEDUA, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 An. Waluyo
11.	3310215000001400	30 January 2025	52.780.280	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Pemuda Nomor 19 B, Kabupaten Pemalang tahap KEENAM, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Juli 2025 An. Wahyu Angganu Adi
12.	3310215000001100	30 January 2025	61.770.700	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Kertek - Parakan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tahap KESATU, periode Januari 2025 s/d Desember 2025 An. Anis Sumarni
13.	3310215000001500	31 January 2025	3.675.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Dukuh Ngagul, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tahap KEDUA, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 An. Zaidun
14.	3310215000001000	31 January 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Pemanfaatan Tanah eks Kantor Cab Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi Bulan September 2024 + cicilan 1 juta dengan rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
15.	3310215000001700	6 February 2025	55.125.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalann Papandayan Selatan Nomor 7, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang Tahap KETIGA, Periode 13 Februari 2025 s.d 12 Februari 2026 An. Harry Nuryanto Soediro, SE., MM
16.	3310215000001200	26 February 2025	1.100.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap tahap KEDUA, periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 An. Maimunah
17.	3310215000001800	28 February 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Pemanfaatan Tanah eks Kantor Cab Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi Bulan Oktober 2024 + cicilan 1 juta dengan rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
18.	3310215000002100	6 Maret 2025	34.137.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4911 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
19.	3310215000002300	6 Maret 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4913 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
20.	3310215000002000	7 Maret 2025	16.101.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4064 di atas HPL Nomor 25 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Jacky Susanto
21.	3310215000001900	11 Maret 2025	10.350.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3301 di atas HPL Nomor 25 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Maria Nurcahyani
22.	3310215000002800	11 Maret 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4897 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
23.	3310215000002600	11 Maret 2025	35.076.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4916 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
24.	3310215000002500	11 Maret 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4895 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
25.	3310215000002400	11 Maret 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4894 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
26.	3310215000002700	11 Maret 2025	35.076.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4893 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
27.	3310215000002200	11 Maret 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4912 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
28.	3310215000002900	11 Maret 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4915 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
29.	3310215000003200	11 Maret 2025	34.137.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4898 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
30.	3310215000003100	11 Maret 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4896 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
31.	3310215000003000	11 Maret 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4914 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
32.	3310215000003400	18 Maret 2025	7.500.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Kota Semarang tahap KEDUA, Periode 6 Januari 2025 s.d 6 Januari 2026 An. Untung Juanto. S.T., M.M.
33.	3310215000003900	24 Maret 2025	5.500.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jl. Raya Tambak-Yogyakarta, Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas tahap KETIGA, periode 03 Januari 2025 s/d 30 Desember 2025 An. Muhamad Kusen
34.	3310215000003800	24 Maret 2025	24.553.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4907 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
35.	3310215000003700	24 Maret 2025	24.553.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4906 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
36.	3310215000003600	24 Maret 2025	31.819.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4905 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
37.	3310215000003500	24 Maret 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4908 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
38.	3310215000003300	27 Maret 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Pemanfaatan Tanah eks Kantor Cab Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi Bulan November 2024 + cicilan 1 juta dengan rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
39.	3310215000004000	30 April 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangunan Guna Serah Tanah eks Kantor Cab Dinas PU Ppengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi Bulan Desember 2024 + Cicilan 1 Juta dengan Rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
40.	3310215000004500	30 April 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5016 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
41.	3310215000004700	30 April 2025	12.527.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5094 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
42.	3310215000004100	30 April 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4900 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Roedy Soegihkusuma
43.	3310215000004400	30 April 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5045 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
44.	3310215000004600	30 April 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4997 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
45.	3310215000004300	2 May 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4903 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Roedy Soegihkusuma
46.	3310215000004200	2 May 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4902 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Roedy Soegihkusuma
47.	3310215000004800	2 May 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5071 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
48.	3310215000005400	6 May 2025	34.137.350	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4899 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
49.	3310215000005200	6 May 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4901 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
50.	3310215000005300	6 May 2025	656.940.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4325 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
51.	3310215000005100	6 May 2025	1.148.768.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4643 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
52.	3310215000005000	7 May 2025	10.350.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4089 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Yenni Kartika
53.	3310215000004900	7 May 2025	10.350.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4087 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Yenni Kartika
54.	3310215000005600	8 May 2025	164.884.028	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Desa Puri, Kecamatan Pati,

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Kabupaten Pati tahap KEEMPAT , Periode 2 Mei 2025 s/d 1m Mei 2026 An. Retno Tri Wulandari
55.	3310215000005800	8 May 2025	157.032.408	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tahap KETIGA, Periode 2 Mei 2024 s/d 1 Mei 2025 An. Retno Tri Wulandari
56.	3310215000005500	14 May 2025	5.314.683	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Suruh - Karanggede, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tahap KEDUA , Periode 1 Mei 2025 s/d 30 April 2026 An. Yusuf Syaifudin
57.	3310215000005700	2 June 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Tanah eks Kantor Cab Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi Bulan Januari 2025 + Cicilan 1 Juta dengan Rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
58.	3310215000005900	4 June 2025	41.403.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2673 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Johanna Rahardjo
59.	3310215000006700	10 June 2025	2.671.982	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Ngringgo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Zulkifli Siregar
60.	3310215000006600	10 June 2025	2.671.982	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Ngringgo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Endang Sri Rejeki
61.	3310215000006000	10 June 2025	4.099.480	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Surakarta-Purwodadi KM 6.3, Dukuh Sadon, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Aviana Nastasia
62.	3310215000007400	10 June 2025	137.500.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Tanjung Nomor 11-A, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang tahap KESATU, periode 01 Mei 2025 s/d 30 April 2026 An. Koesnanto Sh., M.Kn.

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
63.	3310215000007600	19 June 2025	33.122.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2367 di atas HPL Nomor 20 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Barry Budi Yanto
64.	3310215000007700	20 June 2025	31.500.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Soekarno - Hatta Nomor 224, Desa Penggulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal tahap KEDUA, periode 1 Juli 2025 s.d 30 Juni 2026 An. Ach-madi
65.	3310215000007000	23 June 2025	12.155.062	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Dukuh Ngagul, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Iffah Sulistianingrum
66.	3310215000006800	25 June 2025	4.254.271	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Dukuh Ngagul, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Aziz Yuno Utomo
67.	3310215000007200	26 June 2025	3.889.620	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Dukuh Ngagul, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Zaidun
68.	3310215000007300	26 June 2025	4.210.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Dukuh Ngagul, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tahap KETIGA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Zaidun
69.	3310215000006200	26 June 2025	2.342.560	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Surakarta-Purwodadi KM 6.3, Dukuh Sadon, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Waeni
70.	3310215000007100	26 June 2025	6.563.733	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Dukuh Ngagul, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Tugino
71.	3310215000007800	28 June 2025	32.242.410	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Usman Janatin, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tahap KEDUA, periode 1 Juni 2025

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				s/d 31 Mei 2026 An. Ronal Murdinata Simangunsong + denda Rp32.210,-
72.	3310215000007500	30 June 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Tanah eks Kantor Cab Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi Bulan Februari 2025 + Cicilan 1 Juta dengan Rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
73.	3310215000006400	30 June 2025	2.342.560	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Surakarta-Purwodadi KM 6.3, Dukuh Sadon, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. M. Febri Setyawan
74.	3310215000007900	30 June 2025	79.800.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Lawu KM 16, Kabupaten Karanganyar tahap KESATU, periode 1 Juli 2025 s.d 30 Juni 2026 An. Koesnanto, SH., M.Kn.
75.	3310215000006300	1 July 2025	6.442.040	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Surakarta-Purwodadi KM 6.3, Dukuh Sadon, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Muhamad Ridwan Saputro
76.	3310215000006500	1 July 2025	2.342.560	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Surakarta-Purwodadi KM 6.3, Dukuh Sadon, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Widodo
77.	3310215000006900	2 July 2025	5.773.653	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Dukuh Ngagul, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Akhmad Mardiyono
78.	3310215000006100	7 July 2025	2.342.560	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Surakarta-Purwodadi KM 6.3, Dukuh Sadon, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tahap KELIMA, periode 02 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026 An. Teguh Wiyono
79.	3310215000008100	15 July 2025	16.561.450	Pembayaran pemanfaatan HGB Nomor 3462 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Rehobad

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
80.	3310215000008000	21 July 2025	24.629.148	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Jambewangi RT 03 RW 06, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga tahap KESATU, periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 An. Harrie Siswanto + denda Rp2.239.013
81.	3310215000008700	23 July 2025	22.772.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3952 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Neny Widyesti
82.	3310215000008600	23 July 2025	12.076.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4030 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Edward Sofiananda
83.	3310215000008500	23 July 2025	179.831.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5153 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Robin Soegihkusuma
84.	3310215000009300	23 July 2025	72.032.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2609 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Robin Soegihkusuma
85.	3310215000009200	23 July 2025	50.673.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2610 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Robin Soegihkusuma
86.	3310215000009400	23 July 2025	47.604.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2611 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Robin Soegihkusuma
87.	3310215000008400	23 July 2025	62.762.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2612 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Robin Soegihkusuma
88.	3310215000008800	23 July 2025	57.187.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2585 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Robin Soegihkusuma
89.	3310215000008900	23 July 2025	53.304.350	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2586 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Robin Soegihkusuma
90.	3310215000009000	23 July 2025	36.319.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4439 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Lie Hendra Sutanto, SE
91.	3310215000009100	23 July 2025	26.307.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4904 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
92.	3310215000010000	30 July 2025	42.553.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4536 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Saidin
93.	3310215000009500	30 July 2025	24.382.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4537 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Effi Yuniar Setyorini
94.	3310215000009600	30 July 2025	23.232.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4545 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Edward Sofiananda
95.	3310215000009800	30 July 2025	12.077.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3438 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Neny Widjesti
96.	3310215000008200	30 July 2025	33.880.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Sindoro Nomor 9, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo tahap KETIGA, periode 3 Juli 2025 s.d 2 Juli 2026 An. Rosda Khairana
97.	3310215000008300	31 July 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Pemanfaatan Tanah Eks Kantor Cabang Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi bulan Maret 2025 + cicilan 1 juta dengan rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
98.	3310215000009900	5 Agustus 2025	7.579.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4749 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Dedy Chandra
99.	3310215000013500	7 Agustus 2025	24.075.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5134 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
100.	3310215000010600	7 Agustus 2025	38.810.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5167 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
101.	3310215000010700	7 Agustus 2025	15.980.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5168 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
102.	3310215000013100	7 Agustus 2025	11.588.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4990 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
103.	3310215000013000	7 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5000 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
104.	3310215000010800	7 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5001 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
105.	3310215000010900	7 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5003 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
106.	3310215000011700	7 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5004 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
107.	3310215000011600	7 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5005 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
108.	3310215000011400	7 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5006 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
109.	3310215000011200	7 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5007 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
110.	3310215000011300	7 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5008 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
111.	3310215000011000	7 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5009 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
112.	3310215000011100	7 Agustus 2025	13.529.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5010 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
113.	3310215000011500	7 Agustus 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5027 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
114.	3310215000012000	7 Agustus 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5028 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
115.	3310215000012200	7 Agustus 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5029 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
116.	3310215000011800	7 Agustus 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5030 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
117.	3310215000011900	7 Agustus 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5031 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
118.	3310215000012100	7 Agustus 2025	8.518.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5032 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
119.	3310215000013300	7 Agustus 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5048 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
120.	3310215000013400	7 Agustus 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5049 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
121.	3310215000012800	7 Agustus 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5050 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
122.	3310215000012700	7 Agustus 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5052 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
123.	3310215000012600	7 Agustus 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5054 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
124.	3310215000012500	7 Agustus 2025	21.672.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5074 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
125.	3310215000012300	7 Agustus 2025	6.577.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5084 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
126.	3310215000012400	7 Agustus 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5083 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
127.	3310215000013600	7 Agustus 2025	11.274.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4838 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
128.	3310215000010400	7 Agustus 2025	10.523.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4821 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Ivana Sugandhi
129.	3310215000010500	7 Agustus 2025	16.473.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4820 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Ivana Sugandhi
130.	3310215000012900	8 Agustus 2025	9.834.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4799 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Mega Putra Megaradjasa

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
131.	3310215000009700	8 Agustus 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4392 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Lim Se Tjhai
132.	3310215000010300	8 Agustus 2025	95.069.627	Pembayaran sewa pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tahap KEDUA, periode 1 Juni 2025 s.d 31 Mei 2026 An. Anugrah Daut Andika
133.	3310215000014500	11 Agustus 2025	11.274.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4840 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
134.	3310215000013200	11 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5002 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
135.	3310215000014600	11 Agustus 2025	11.588.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4989 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
136.	3310215000014700	11 Agustus 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5051 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
137.	3310215000013900	11 Agustus 2025	14.594.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4835 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
138.	3310215000013700	15 Agustus 2025	592.862.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 1722 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
139.	3310215000020700	19 Agustus 2025	23.452.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4944 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Bedjo Sarwono
140.	3310215000020800	19 Agustus 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4686 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Melisa Dianawati
141.	3310215000020900	19 Agustus 2025	33.122.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2410 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Mekar Armada Jaya
142.	3310215000014800	19 Agustus 2025	14.261.300	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4099 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Meilina Wibowo
143.	3310215000021000	20 Agustus 2025	25.762.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4550 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Natana Loris Karya Utama

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
144.	3310215000021100	20 Agustus 2025	25.762.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4551 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Masrudi
145.	3310215000010100	20 Agustus 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4694 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Dirk Adrianus Jan Van Zeventer
146.	3310215000014000	25 Agustus 2025	26.046.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4362 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Budijono Sarwono
147.	3310215000020600	27 Agustus 2025	46.579.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2677 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Tan Lilyanawati
148.	3310215000010200	29 Agustus 2025	33.000.000	Pembayaran sewa pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Penjawi Randukuning, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tahap PERTAMA, periode 1 Juni 2025 s.d 31 Mei 2026 An. Andayani
149.	3310215000015000	29 Agustus 2025	36.319.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4361 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
150.	3310215000015100	29 Agustus 2025	36.319.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4443 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
151.	3310215000017300	29 Agustus 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4836 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
152.	3310215000017200	29 Agustus 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4837 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
153.	3310215000016900	29 Agustus 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4839 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
154.	3310215000021200	30 Agustus 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Pemanfaatan Tanah Eks Kantor Cabang Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi bulan April 2025 + cicilan 1 juta dengan rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
155.	3310215000021300	3 September 2025	41.403.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2396 di atas HPL Nomor 20 Milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Stevan Raharjo
156.	3310215000021400	9 September 2025	35.000.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Bhakti Nomor 9, Kabupaten Kudus Tahap KEDUA periode 1 September 2025 s/d 30 Agustus 2026 An. Mujiati
157.	3310215000021500	17 September 2025	26.254.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4425 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rosmawarti Suparman
158.	3310215000021700	18 September 2025	5.000.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Potrosari I Nomor 6, Srandol Kulon, Kota Semarang tahap KEDUA, untuk periode 1 September 2025 s.d 31 Agustus 2026 An. Dr. Naili Farida, MSi
159.	3310215000023700	22 September 2025	97.298.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4190 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. The Sindoro Andikara Rabda
160.	3310215000023800	22 September 2025	158.483.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3378 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. The Sindoro Andikara Rabda
161.	3310215000024100	23 September 2025	41.403.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2386 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Lim Sioe Tjoe
162.	3310215000024000	24 September 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4486 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
163.	3310215000023900	24 September 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4487 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
164.	3310215000022300	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4514 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
165.	3310215000022400	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4515 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
166.	3310215000022500	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4516 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
167.	3310215000022600	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4517 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
168.	3310215000022700	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4518 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
169.	3310215000023400	24 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4834 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
170.	3310215000023300	24 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4833 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
171.	3310215000023200	24 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4831 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
172.	3310215000023100	24 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4830 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
173.	3310215000023000	24 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4829 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
174.	3310215000022900	24 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4828 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
175.	3310215000022800	24 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4827 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
176.	3310215000023500	24 September 2025	10.022.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4841 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
177.	3310215000018700	24 September 2025	49.291.300	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4356 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
178.	3310215000023600	24 September 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4842 di atas HPL Nomor 24 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
179.	3310215000014900	24 September 2025	36.319.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4357 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
180.	3310215000015700	24 September 2025	31.131.400	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4492 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
181.	3310215000015600	24 September 2025	20.754.300	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4496 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
182.	3310215000015800	24 September 2025	20.754.300	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4497 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
183.	3310215000015900	24 September 2025	24.905.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4499 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
184.	3310215000020000	24 September 2025	33.206.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4458 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
185.	3310215000018900	24 September 2025	24.905.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4459 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
186.	3310215000015200	24 September 2025	24.905.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4460 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
187.	3310215000019900	24 September 2025	24.905.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4461 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
188.	3310215000015300	24 September 2025	24.905.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4465 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
189.	3310215000015400	24 September 2025	24.905.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4467 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
190.	3310215000015500	24 September 2025	31.131.400	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4491 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
191.	3310215000017100	24 September 2025	24.905.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4500 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
192.	3310215000016000	24 September 2025	40.574.600	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4513 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
193.	3310215000016100	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4519 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
194.	3310215000020100	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4520 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
195.	3310215000016200	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4521 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
196.	3310215000016300	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4522 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
197.	3310215000016400	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4523 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
198.	3310215000016600	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4524 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
199.	3310215000016500	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4525 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
200.	3310215000016700	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4526 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
201.	3310215000016800	24 September 2025	28.640.900	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4527 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
202.	3310215000020500	24 September 2025	30.301.200	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4953 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
203.	3310215000019500	24 September 2025	37.150.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5169 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
204.	3310215000020400	24 September 2025	22.414.600	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4928 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
205.	3310215000017600	24 September 2025	15.659.400	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4879 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
206.	3310215000017500	24 September 2025	14.156.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4878 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
207.	3310215000020200	24 September 2025	14.156.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4877 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
208.	3310215000017400	24 September 2025	18.791.200	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4876 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
209.	3310215000020300	24 September 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4881 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
210.	3310215000017700	24 September 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4883 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
211.	3310215000017800	24 September 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4884 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
212.	3310215000017900	24 September 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4885 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
213.	3310215000018000	24 September 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4886 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
214.	3310215000018100	24 September 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4887 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
215.	3310215000018200	24 September 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4888 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
216.	3310215000017000	24 September 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4889 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
217.	3310215000019000	24 September 2025	11.274.800	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4890 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
218.	3310215000019100	24 September 2025	13.780.200	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4891 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
219.	3310215000018300	24 September 2025	21.046.200	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 4892 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
220.	3310215000018400	24 September 2025	7.516.500	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5025 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
221.	3310215000018500	24 September 2025	7.516.500	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5026 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
222.	3310215000014300	24 September 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5053 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
223.	3310215000018600	24 September 2025	6.201.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5055 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
224.	3310215000019300	24 September 2025	6.201.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5056 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
225.	3310215000019200	24 September 2025	6.201.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5057 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
226.	3310215000019400	24 September 2025	6.201.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5058 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
227.	3310215000018800	24 September 2025	6.201.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5059 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
228.	3310215000019800	24 September 2025	9.834.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5060 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
229.	3310215000019700	24 September 2025	9.834.100	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5061 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
230.	3310215000014400	24 September 2025	15.534.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5062 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
231.	3310215000019600	24 September 2025	5.637.400	Pembayaran Sewa Pemanfaatan HGB Nomor 5082 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah An. Rudy Soegihkusuma
232.	3310215000014200	24 September 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5081 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
233.	3310215000014100	24 September 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5080 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
234.	3310215000021600	29 September 2025	232.080.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 54 di atas HPL Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Astra International tbk
235.	3310215000021800	29 September 2025	232.080.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 55 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Astra International tbk
236.	3310215000021900	29 September 2025	278.496.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 58 di atas HPL Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Astra International tbk
237.	3310215000022000	29 September 2025	232.080.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 64 di atas HPL Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Astra International tbk
238.	3310215000022100	29 September 2025	278.496.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 65 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Astra International
239.	3310215000022200	29 September 2025	278.496.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 66 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Astra International
240.	3310215000024500	29 September 2025	13.091.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4991 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
241.	3310215000024600	29 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4992 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
242.	3310215000024700	29 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4994 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
243.	3310215000024800	29 September 2025	13.091.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4995 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
244.	3310215000024900	29 September 2025	13.091.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4996 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
245.	3310215000025000	29 September 2025	9.646.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4998 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
246.	3310215000025100	29 September 2025	13.091.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4999 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
247.	3310215000025200	29 September 2025	12.276.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5011 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
248.	3310215000025300	29 September 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5013 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
249.	3310215000025400	29 September 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5014 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
250.	3310215000027900	29 September 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5015 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
251.	3310215000025500	29 September 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5017 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
252.	3310215000025600	29 September 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5018 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
253.	3310215000025700	29 September 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5019 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
254.	3310215000025800	29 September 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5020 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
255.	3310215000025900	29 September 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5022 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
256.	3310215000026000	29 September 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5023 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
257.	3310215000026100	29 September 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5024 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
258.	3310215000027000	29 September 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5044 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
259.	3310215000026900	29 September 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5043 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
260.	3310215000026800	29 September 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5042 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
261.	3310215000026700	29 September 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5041 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
262.	3310215000026600	29 September 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5038 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
263.	3310215000026500	29 September 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5036 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
264.	3310215000026400	29 September 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5035 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
265.	3310215000026300	29 September 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5034 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
266.	3310215000026200	29 September 2025	11.025.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5033 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
267.	3310215000027200	29 September 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5077 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
268.	3310215000027100	29 September 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5076 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
269.	3310215000027800	29 September 2025	7.078.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5093 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
270.	3310215000027700	29 September 2025	7.078.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5092 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
271.	3310215000027600	29 September 2025	7.078.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5090 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
272.	3310215000027500	29 September 2025	7.078.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5089 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
273.	3310215000027400	29 September 2025	7.078.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5088 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
274.	3310215000027300	29 September 2025	7.078.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5086 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
275.	3310215000028200	30 September 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4402 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
276.	3310215000028400	30 September 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4404 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
277.	3310215000028500	30 September 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4412 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
278.	3310215000028300	30 September 2025	30.820.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4410 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
279.	3310215000028900	30 September 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4413 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
280.	3310215000029000	30 September 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4414 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
281.	3310215000028800	30 September 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4423 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
282.	3310215000028100	30 September 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4401 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
283.	3310215000028600	30 September 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4449 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
284.	3310215000028700	30 September 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4481 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
285.	3310215000029100	30 September 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5064 di atas HPL nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
286.	3310215000028000	30 September 2025	87.407.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2637 di atas HPL Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Nora Laksono
287.	3310215000024300	30 September 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Pemanfaatan Tanah Eks Kantor Cabang Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi bulan Mei 2025 + cicilan 1 juta dengan rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
288.	3310215000029600	1 October 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5046 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
289.	3310215000029700	1 October 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5047 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
290.	3310215000029800	1 October 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5067 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
291.	3310215000029300	1 October 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5066 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
292.	3310215000029200	1 October 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5065 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
293.	3310215000030100	1 October 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5079 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
294.	3310215000030000	1 October 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5078 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
295.	3310215000029900	1 October 2025	8.205.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5075 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
296.	3310215000030200	1 October 2025	7.078.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5087 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
297.	3310215000029400	1 October 2025	8.644.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4747 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
298.	3310215000029500	1 October 2025	8.644.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4748 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
299.	3310215000030600	1 October 2025	10.272.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4826 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
300.	3310215000024200	1 October 2025	31.338.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4485 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
301.	3310215000030400	1 October 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4488 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
302.	3310215000030300	1 October 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4489 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
303.	3310215000030500	2 October 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4390 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Andry Wijaya
304.	3310215000030800	3 October 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5068 HPL Nomor 21 Milik Perintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
305.	3310215000030700	3 October 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5021 di atas HPL Nomor 23 milik Pmerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
306.	3310215000031100	7 October 2025	109.259.400	Pemanfaatan HGB Nomor 2613 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Martin Basuki Hartono
307.	3310215000031000	7 October 2025	109.259.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2614 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Armand Wahyudi Hartono
308.	3310215000030900	7 October 2025	109.259.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2615 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Victor Rachmat Hartono
309.	3310215000031400	14 October 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4687 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
310.	3310215000031500	14 October 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4706 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
311.	3310215000031600	14 October 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4708 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
312.	3310215000031700	14 October 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4714 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
313.	3310215000031800	14 October 2025	8.644.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4744 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
314.	3310215000031900	14 October 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5012 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
315.	3310215000032100	14 October 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5069 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
316.	3310215000032200	14 October 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5070 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
317.	3310215000032300	14 October 2025	5.637.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5072 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
318.	3310215000032000	14 October 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5039 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
319.	3310215000031200	15 October 2025	85.970.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Kartini No. 108 Kota Salatiga tahap KEDUA periode 1 September 2025 s/d 31 Oktober 2026 An. Risdiawan Setyanto
320.	3310215000032400	17 October 2025	22.414.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4389 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Herlina Puspitowati
321.	3310215000031300	23 October 2025	5.324.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas tahap KEEMPAT periode 3 Oktober 2025 s/d 30 September 2026 An. Supardi
322.	3310215000032500	23 October 2025	241.520.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 27 di atas HPL Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. David Hermanjaya
323.	3310215000032600	23 October 2025	151.813.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4327 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. David Hermanjaya
324.	3310215000032700	23 October 2025	151.813.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4329 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. David Hermanjaya
325.	3310215000033100	24 October 2025	9.395.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 5085 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
326.	3310215000033200	28 October 2025	14.261.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4098 di atas HPL Nomor 25 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. The Sindoro Andikara Rabda
327.	3310215000032800	28 October 2025	23.867.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4397 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Kristien Yuliana Santosa
328.	3310215000032900	28 October 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4398 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Kristien Yuliana Santosa
329.	3310215000033000	31 October 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Pemanfaatan Tanah Eks Kantor Cabang Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi bulan Juni 2025 + cicilan 1 juta dengan rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
330.	3310215000033300	10 November 2025	151.813.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4621 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Tutik Santoso
331.	3310215000033400	17 November 2025	23.867.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4424 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Dudy Sarjono Salim
332.	3310215000033500	24 November 2025	3.327.500	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Dukuh Ngagul, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Tahap KEEMPAT, Periode 2 November s.d 31 Oktober 2026 An. Akhmad Mardiyono
333.	3310215000034600	25 November 2025	71.685.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Pemuda Nomor 19 A, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Tahap Pertama, periode 01 Agustus 2025 s/d 31 Juli 2026 An. Andin Fardian
334.	3310215000033700	25 November 2025	100.219.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4954 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
335.	3310215000036300	26 November 2025	13.333.000	Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Kartini No.108 Kota Salatiga tahap Kesatu, periode 1 Agustus 2025 s.d 31 Juli 2026 An. Agus Supriatna
336.	3310215000035600	26 November 2025	28.640.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4528 Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
337.	3310215000035200	26 November 2025	28.640.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4529 Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
338.	3310215000036200	26 November 2025	41.508.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4530 Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
339.	3310215000035500	26 November 2025	33.414.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4472 Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
340.	3310215000035300	26 November 2025	24.697.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4473 Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
341.	3310215000035700	26 November 2025	31.131.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4484 Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
342.	3310215000035100	26 November 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4453 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
343.	3310215000035000	26 November 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4454 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
344.	3310215000034900	26 November 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4455 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
345.	3310215000034800	26 November 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4456 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
346.	3310215000034700	26 November 2025	33.206.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4457 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
347.	3310215000035400	26 November 2025	27.810.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4512 Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
348.	3310215000033900	26 November 2025	483.041.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 502 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. A. Budi Darmodjo
349.	3310215000034300	26 November 2025	52.559.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2362 di atas HPL Nomor 20 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Lie Alisan Wijono
350.	3310215000035900	28 November 2025	115.585.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2617 Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Daniel Budi Setiawan
351.	3310215000034400	28 November 2025	41.403.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2359 di atas HPL Nomor 20 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Daniel Budi Setiawan

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
352.	3310215000034000	1 December 2025	33.122.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2406 di atas HPL Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Adi Santoso
353.	3310215000033600	1 December 2025	6.124.000	Pembayaran Pemanfaatan Bangun Guna Serah Pemanfaatan Tanah Eks Kantor Cabang Dinas PU Pengairan yang dipergunakan untuk Pusat Perbelanjaan Skylight Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang An. Fajar Hidayat untuk Kontribusi bulan Juli 2025 + cicilan 1 juta dengan rincian Rp5.124.000,- + Rp1.000.000,-
354.	3310215000037100	1 December 2025	1.206.519.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4642 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
355.	3310215000036600	1 December 2025	103.508.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 587 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Yuwono Halim
356.	3310215000034100	2 December 2025	41.403.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2390 di atas HPL Nomor 20 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Yulia Widyati
357.	3310215000036400	2 December 2025	64.405.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 10 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Irawati Adikoesoemo
358.	3310215000036500	2 December 2025	297.875.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 28 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Irawati Adikoesoemo
359.	3310215000037200	2 December 2025	816.678.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4531 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
360.	3310215000036000	2 December 2025	112.709.700	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2684 Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Yohanna Lidyawati
361.	3310215000034500	3 December 2025	41.403.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2668 di atas HPL Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rina
362.	3310215000036800	3 December 2025	75.906.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4981 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rina
363.	3310215000035800	3 December 2025	62.105.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2588 Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rina
364.	3310215000037000	4 December 2025	78.206.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3936 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Kase
365.	3310215000036700	4 December 2025	25.992.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3934 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Kase
366.	3310215000033800	4 December 2025	73.606.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4657 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Phoa Sien Tjien
367.	3310215000041900	5 December 2025	46.579.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2425 di atas HPL Nomor 27 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. A. Budi Darmodjo
368.	3310215000042000	9 December 2025	20.701.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3413 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Erry Murniasih Indriani
369.	3310215000042100	10 December 2025	17.433.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4426 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
370.	3310215000039500	12 December 2025	35.593.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4437 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
371.	3310215000036100	15 December 2025	51.754.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3229 Nomor 25 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Susana Winarso
372.	3310215000036900	15 December 2025	51.754.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3228 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Susana Winarso
373.	3310215000034200	15 December 2025	33.122.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2376 di atas HPL Nomor 20 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Susana Winarso
374.	3310215000042200	16 December 2025	36.319.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4440 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Jimmy Kurniawan Sutanto
375.	3310215000043400	17 December 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4445 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Arief Budiman Utomo
376.	3310215000042600	18 December 2025	82.807.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2687 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Santoso
377.	3310215000043200	18 December 2025	22.549.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2696 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rini Indrawati

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
378.	3310215000042500	18 Desember 2025	33.122.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2419 di atas HPL Nomor 20 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Hertiny Soedjianto
379.	3310215000044000	19 Desember 2025	96.608.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4982 di atas HPL Nomor 20 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rini Indrawati
380.	3310215000044200	19 Desember 2025	48.466.244	Pembayaran Pemanfaatan Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahap KESATU, periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025 An. Agus Atmanto sebesar Rp39.988.650,- + denda Rp8.477.594,-
381.	3310215000042400	19 Desember 2025	33.122.900	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2417 di atas HPL Nomor 20 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Bambang Budi Kusumo
382.	3310215000043500	19 Desember 2025	90.627.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2496 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Agus Setiawan
383.	3310215000039100	19 Desember 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4394 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
384.	3310215000039200	19 Desember 2025	15.877.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4421 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
385.	3310215000039300	19 Desember 2025	17.433.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4432 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
386.	3310215000039400	19 Desember 2025	17.433.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4434 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
387.	3310215000039600	19 Desember 2025	32.999.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4444 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
388.	3310215000039700	19 Desember 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4446 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
389.	3310215000039800	19 Desember 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4447 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
390.	3310215000039900	19 Desember 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4448 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
391.	3310215000040000	19 Desember 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4450 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
392.	3310215000040100	19 Desember 2025	31.131.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4451 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
393.	3310215000040200	19 Desember 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4469 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
394.	3310215000041800	19 Desember 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4470 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
395.	3310215000037300	19 Desember 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4471 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
396.	3310215000037400	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4476 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
397.	3310215000037500	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4478 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
398.	3310215000037600	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4479 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
399.	3310215000037700	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4480 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
400.	3310215000041700	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4483 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
401.	3310215000037800	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4493 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
402.	3310215000037900	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4494 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
403.	3310215000038000	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4495 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
404.	3310215000038100	19 Desember 2025	24.905.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4501 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
405.	3310215000038200	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4502 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
406.	3310215000038300	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4503 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
407.	3310215000038400	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4505 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
408.	3310215000038500	19 Desember 2025	20.754.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4506 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
409.	3310215000038600	19 Desember 2025	20.754.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4507 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
410.	3310215000038700	19 Desember 2025	20.754.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4508 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
411.	3310215000038800	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4509 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
412.	3310215000038900	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4510 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
413.	3310215000039000	19 Desember 2025	20.754.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4511 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
414.	3310215000041100	19 Desember 2025	8.769.300	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4682 di atas HPL Nomor 23 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
415.	3310215000040300	19 Desember 2025	11.902.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4684 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
416.	3310215000040400	19 Desember 2025	11.901.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4688 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
417.	3310215000040500	19 Desember 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4695 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
				Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
418.	3310215000041300	19 Desember 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4700 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
419.	3310215000041400	19 Desember 2025	7.516.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4705 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
420.	3310215000041500	19 Desember 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4715 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
421.	3310215000041600	19 Desember 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4720 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
422.	3310215000040600	19 Desember 2025	6.201.100	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4723 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
423.	3310215000040700	19 Desember 2025	6.952.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4729 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
424.	3310215000040800	19 Desember 2025	8.644.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4742 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
425.	3310215000041200	19 Desember 2025	8.644.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4743 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
426.	3310215000040900	19 Desember 2025	8.644.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4745 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
427.	3310215000041000	19 Desember 2025	8.644.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4746 di atas HPL Nomor 24 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
428.	3310215000042300	19 Desember 2025	17.433.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4427 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rudy Soegihkusuma
429.	3310215000043600	19 Desember 2025	7.767.000	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4100 di atas HPL Nomor 25 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Rini Indrawati
430.	3310215000043300	19 Desember 2025	17.433.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4428 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Yi Xuewen

NO	NOMOR STS	TANGGAL	JUMLAH	URAIAN
431.	3310215000044300	22 Desember 2025	78.206.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 3953 di atas HPL Nomor 21 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. PT. Tri Manunggal Mitra Perkasa
432.	3310215000044600	22 Desember 2025	501.697.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 132 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. David Herman Jaya
433.	3310215000044700	22 Desember 2025	390.209.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 133 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. David Herman Jaya
434.	3310215000044800	22 Desember 2025	222.976.800	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 137 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. David Herman Jaya
435.	3310215000043900	22 Desember 2025	73.606.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4668 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Budi Prijananda Hidajat
436.	3310215000043700	22 Desember 2025	73.606.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4656 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Syaifudin Waspada
437.	3310215000043800	22 Desember 2025	73.606.400	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4659 di atas HPL Nomor 21 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Hardian Lorens
438.	3310215000044100	22 Desember 2025	98.103.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 4983 di atas HPL Nomor 23 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Julia Indrawati
439.	3310215000043000	23 Desember 2025	18.039.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2691 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Poei Tjin Hwa
440.	3310215000043100	23 Desember 2025	18.039.600	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2692 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Poei Tjin Hwa
441.	3310215000042700	23 Desember 2025	21.046.200	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2351 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Iskandar Poejiono
442.	3310215000042900	23 Desember 2025	22.549.500	Pembayaran Pemanfaatan HGB Nomor 2670 di atas HPL Nomor 27 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan PRPP An. Ling Ling Iskandar Poejiono
Jumlah			18.909.112.849	